



DOKUMEN KAJIAN EMPIRIS RENCANA TATA RUANG KSK AGROPOLITAN KABUPATEN KAPUAS HULU



Kelompok Keahlian Perencanaan
Wilayah dan Perdesaan
SAPPK - ITB



PT. LAPITB

KATA PENGANTAR

Kabupaten Kapuas Hulu mengarahkan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kapuas Hulu dari sudut pandang kepentingan ekonomi. Oleh karenanya, perlu disusun sebuah Rencana Tata Ruang (RTR) yang akan menjadi dasar pengembangan kawasan strategis tersebut. Dalam menyusun Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kapuas Hulu, dipilih konsep pengembangan agropolitan hijau. Konsep green agropolitan dipandang sebagai solusi bagi Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengembangkan kegiatan ekonomi lokalnya tanpa merusak lingkungan. Pengembangan agropolitan hijau di Kabupaten Kapuas Hulu dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang menjadi basis utama kegiatan ekonomi di wilayah ini.

Pada tahap awal proses penyusunan rencana, diperlukan kajian komprehensif terhadap karakteristik wilayah Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kapuas Hulu. Buku ini merupakan kajian empiris terhadap karakteristik dan gambaran umum wilayah studi secara menyeluruh dari berbagai aspek untuk mengetahui implikasi (baik potensi maupun kendala) kondisi eksisting terhadap rencana pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kapuas Hulu. Buku kajian empiris ini akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana pengembangan kawasan agropolitan di KSK Kapuas Hulu.

Kami berterima kasih kepada World Wildlife Fund (WWF) beserta Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah membantu tim penyusun dalam menyelesaikan kajian empiris ini. Kami berharap buku ini akan berkontribusi terhadap pengembangan wilayah di Kabupaten Kapuas Hulu dan wilayah lainnya sebagai dampak positif dari pengembangan kawasan agropolitan hijau di KSK Kapuas Hulu.

Bandung, Oktober 2017

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	X
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN	2
1.3 DASAR HUKUM DAN KEDUDUKAN RTR KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	2
1.4 RUANG LINGKUP	3
1.4.1 RUANG LINGKUP WILAYAH	3
1.4.2 RUANG LINGKUP SUBSTANSI	4
1.5 METODOLOGI	5
1.5.1 METODE PENGUMPULAN DATA	5
1.5.2 METODE ANALISIS DATA	7
1.6 SISTEMATIKA PELAPORAN	8
BAB II TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN	10
2.1 UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG	10
2.2 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL	12
2.3 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 37 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	15
2.4 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014 – 2034	19
2.5 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 – 20134	21
2.6 KAJIAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN LAINNYA TERKAIT KSK DAN AGROPOLITAN	26
2.6.1 PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT PENGELOLAAN PERTANIAN DAN PERIKANAN UU 18/2012 TENTANG PANGAN	26
2.6.2 UU RI NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN	27
2.6.3 UU RI NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN HUTAN	29
2.6.4 PP NO 57 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT	30
2.6.5 UU NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	33
2.6.6 KAJIAN PERATURAN TERKAIT SAWIT	34
BAB III GAMBARAN UMUM	38
3.1 DELINEASI KSK AGROPOLITAN KABUPATEN KAPUAS HULU	38
3.2 GAMBARAN UMUM FISIK DAN LINGKUNGAN	41
3.2.1 FISILOGI	41
3.2.2 HIDROLOGI	42
3.2.3 KLIMATOLOGI	43
3.2.4 TOPOGRAFI	43
3.2.5 KERUANGAN	44
3.2.6 DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN	46

3.3	GAMBARAN UMUM BIODIVERSITAS KAWASAN	50
3.3.1	TIPE EKOSISTEM	51
3.3.2	KEKAYAAN JENIS FLORA	53
3.3.3	KEKAYAAN FAUNA	63
3.3.4	POTENSI DAN PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN AIR	78
3.3.5	POTENSI EKOWISATA	82
3.4	GAMBARAN UMUM KEPENDUDUKAN DAN SOSIAL BUDAYA	84
3.4.1	JUMLAH PENDUDUK	84
3.4.2	POLA PERSEBARAN PENDUDUK	85
3.4.3	PENDUDUK BERDASARKAN IPM	87
3.4.4	TINGKAT KEMISKINAN	88
3.4.5	SEJARAH ETNIS MASYARAKAT	94
3.5	GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR	97
3.5.1	INFRASTRUKTUR DASAR	97
3.5.1.1	SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN	97
3.5.1.2	SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN	100
3.5.1.3	SARANA PERIBADATAN	101
3.5.1.4	JARINGAN JALAN DAN TRANSPORTASI	103
3.5.1.5	AIR BERSIH	104
3.5.1.6	SAMPAH DAN LIMBAH	105
3.5.1.7	LISTRIK DAN TELEKOMUNIKASI	105
3.5.2	INFRASTRUKTUR PENUNJANG EKONOMI	106
3.5.2.1	PERDAGANGAN DAN JASA	106
3.5.2.2	PERTANIAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, DAN INDUSTRI	108
3.6	GAMBARAN UMUM EKONOMI	109
3.6.1	KARAKTERISTIK PEREKONOMIAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	109
3.6.2	KARAKTERISTIK PEREKONOMIAN KABUPATEN KAPUAS HULU	112
3.6.3	KARAKTERISTIK PEREKONOMIAN KSK AGROPOLITAN	122
3.7	GAMBARAN UMUM KELEMBAGAAN	133
3.7.1	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016-2017	133
3.7.2	RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014-2034	135
3.7.3	PROFIL ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU DAN KSK AGROPOLITAN	137
3.7.4	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU DAN KSK AGROPOLITAN	138
3.7.5	PROFIL PERUSAHAAN KAWASAN AGROPOLITAN KABUPATEN KAPUAS HULU	147
3.7.6	GAMBARAN UMUM PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN KAPUAS HULU DAN KSK AGROPOLITAN	148
3.7.6.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	149
3.7.6.2	PENDAPATAN DANA TRANSFER DAERAH	152
3.7.6.3	FOKUS PEMBIAYAAN	153
BAB IV	ANALISIS PENGEMBANGAN WILAYAH PERENCANAAN	155
4.1.	ANALISIS FISIK DAN LINGKUNGAN	155
4.1.1	ANALISIS SATUAN KEMAMPUAN LAHAN	155
4.1.1.1	SKL MORFOLOGI	155
4.1.1.2	SKL KEMUDAHAN DIKERJAKAN	156
4.1.1.3	SKL KESTABILAN LERENG DAN SKL KESTABILAN PONDASI	158
4.1.1.4	SKL KETERSEDIAAN AIR PERMUKAAN	161
4.1.1.5	SKL DRAINASE	163
4.1.1.6	SKL TERHADAP EROSI	164
4.1.1.7	SKL UNTUK PEMBUANGAN LIMBAH	166

4.1.1.8	SKL RAWAN BENCANA	168
4.1.1.9	ANALISIS KEMAMPUAN LAHAN	169
4.1.2	ANALISIS KESESUAIAN LAHAN	171
4.1.2.1	ARAHAN RASIO TUTUPAN LAHAN DAN ARAHAN KETINGGIAN BANGUNAN	171
4.1.2.2	PERKIRAAN DAYA TAMPUNG LAHAN	175
4.1.2.3	ANALISIS LAHAN PERTANIAN	177
4.1.2.4	ANALISIS KONSESI SAWIT DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN	186
4.1.3	ISU FISIK DAN LINGKUNGAN	192
4.1.3.1	PENCEMARAN AIR SUNGAI DAN DANAU	192
4.1.3.2	DAMPAK PERUSAHAAN SAWIT DAN PERUSAHAAN KAYU TERHADAP LINGKUNGAN	201
4.1.3.3	PETI (PENAMBANGAN EMAS TANPAN IZIN)	203
4.1.3.4	BANJIR	203
4.1.3.5	LADANG BERPINDAH DAN KEBAKARAN LAHAN	205
4.1.3.6	MASALAH LAHAN	209
4.2	ANALISIS BIODIVERSITAS KAWASAN	211
4.2.1	PENGEMBANGAN WILAYAH UTARA (KEC. EMPANANG DAN KEC. SEMITAU)	211
4.2.2	PENGEMBANGAN WILAYAH SELATAN (KEC. SILAT HILIR DAN KEC. SILAT HULU)	213
4.2.3	PENGEMBANGAN WILAYAH TIMUR (KEC. SEBERUANG, KEC. HULU GURUNG DAN KEC. PENGKADAN)	215
4.3	ANALISIS KEPENDUDUKAN DAN SOSIAL BUDAYA	220
4.3.1	ANALISIS KEPENDUDUKAN	220
4.3.1.1	JUMLAH DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	220
4.3.1.2	PENDIDIKAN	222
4.3.1.3	KESEHATAN	228
4.3.1.4	KETENAGAKERJAAN	230
4.3.2	ANALISIS SOSIAL BUDAYA	236
4.3.2.1	STRATIFIKASI SOSIAL	236
4.3.2.2	KLASIFIKASI MASYARAKAT	238
4.3.2.3	INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT	241
4.3.2.4	MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK	248
4.3.2.5	MODAL BUDAYA	249
4.3.3	PANDANGAN DAN HARAPAN MASYARAKAT TERKAIT KSK AGROPOLITAN	257
4.4	ANALISIS TINGKAT KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA	258
4.4.1	INFRASTRUKTUR DASAR	258
4.4.1.1	SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN	259
4.4.1.2	SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN	271
4.4.1.3	SARANA PERIBADATAN	281
4.4.1.4	JARINGAN JALAN DAN TRANSPORTASI	286
4.4.1.5	AIR BERSIH	289
4.4.1.6	SAMPAH DAN LIMBAH CAIR	293
4.4.1.7	LISTRIK DAN TELEKOMUNIKASI	296
4.4.2	INFRASTRUKTUR PENUNJANG AGROPOLITAN HIJAU	298
4.4.2.1	PERDAGANGAN DAN JASA	298
4.4.2.2	PERTANIAN DAN PERTERNAKAN, PERKEBUNAN, DAN INDUSTRI	300
4.4.3	PUSAT PERKOTAAN	302
4.5	ANALISIS EKONOMI	305
4.5.1	ANALISIS SEKTOR UNGGULAN KABUPATEN KAPUAS HULU	305
4.5.2	ANALISIS KOMODITAS UNGGULAN BUDIDAYA PERTANIAN KAWASAN AGROPOLITAN	308
4.5.2.1	ANALISIS KOMODITAS UNGGULAN TANAMAN PANGAN DI KAWASAN AGROPOLITAN	309
4.5.2.2	ANALISIS KOMODITAS UNGGULAN PERKEBUNAN DI KAWASAN AGROPOLITAN	314

4.5.2.3	ANALISIS KOMODITAS UNGGULAN SAYUR-SAYURAN DI KAWASAN AGROPOLITAN	319
4.5.2.4	ANALISIS KOMODITAS UNGGULAN BUAH-BUAHAN DI KAWASAN AGROPOLITAN	324
4.5.2.5	ANALISIS KOMODITAS UNGGULAN PETERNAKAN DI KAWASAN AGROPOLITAN	332
4.5.2.6	ANALISIS KOMODITAS UNGGULAN PERIKANAN TANGKAP DI KAWASAN AGROPOLITAN	337
4.5.2.7	ANALISIS KOMODITAS UNGGULAN PERIKANAN BUDIDAYA DI KAWASAN AGROPOLITAN	342
4.5.3	PERSEBARAN KOMODITAS UNGGULAN DI KAWASAN AGROPOLITAN	347
4.5.3.1	KECAMATAN SILAT HILIR	347
4.5.3.2	KECAMATAN SILAT HULU	349
4.5.3.3	KECAMATAN HULU GURUNG	350
4.5.3.4	KECAMATAN PENGKADAN	351
4.5.3.5	KECAMATAN SEBERUANG	352
4.5.4.6	KECAMATAN SEMITAU	354
4.5.4.7	KECAMATAN EMPANANG	355
4.5.4	PROSPEK PASAR KOMODITAS UNGGULAN DI KAWASAN AGROPOLITAN	356
4.5.5	ANALISIS KOMODITAS UNGGULAN INDUSTRI BERBASIS PERTANIAN	358
4.6	ANALISIS KELEMBAGAAN	366
4.6.1	ANALISIS KELEMBAGAAN KSK AGROPOLITAN KABUPATEN KAPUAS HULU	366
4.6.2	ANALISIS HARMONISASI PERENCANAAN DAN PROGRAM KABUPATEN KAPUAS HULU MENGENAI KSK AGROPOLITAN	366
4.6.2.1	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU 2016-2020	366
4.6.2.2	RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KAPUAS HULU 2014-2034	367
4.6.2.3	ANALISIS PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI YANG BERHUBUNGAN DENGAN KSK AGROPOLITAN	369
4.6.2.4	ANALISIS PROGRAM YANG BERHUBUNGAN DENGAN KSK AGROPOLITAN	370
4.6.3	ANALISIS AKTOR KAWASAN AGROPOLITAN	370
4.6.3.1	ANALISIS AKTOR KAWASAN AGROPOLITAN BERDASARKAN URUSAN	371
BAB V PENUTUP		378
5.1	POTENSI WILAYAH	378
5.2	KENDALA WILAYAH	380
5.3	ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN KSK AGROPOLITAN	383
DAFTAR PUSTAKA		391

DAFTAR TABEL

Tabel I-1	Rekapitulasi Informan Wawancara.....	6
Tabel I-1	Penetapan Pola Ruang pada Tujuh Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu	23
Tabel I-2	Kerangka Hukum Pengembangan Kegiatan Budidaya Kelapa Sawit	35
Tabel III.1	Kecamatan dan Desa yang Termasuk dalam KSK Agropolitan	39
Tabel III.2	Sungai - Sungai di Kecamatan KSK Agropolitan	42
Tabel III.3	Curah Hujan, Temperatur, dan Kelembaban Kabupaten Kapuas Hulu	43
Tabel III.4	Komposisi jenis pohon di hutan rawa gambut Dusun Sekedau Kec. Semitau	54
Tabel III.5	Komposisi jenis pohon di hutan lindung Sui Mali-Sebalang Hulu (Bukit Sebalang).....	56
Tabel III.6	Komposisi jenis pohon di hutan lindung Beluan Komplek, Desa Lubuk Antuk	59
Tabel III.7	Komposisi jenis pohon di hutan lindung Bukit Raya, Desa Tani Makmur	60
Tabel III.8	Kekayaan fauna di seluruh lokasi pengamatan di wilayah KSK agropolitan	64
Tabel III.9	Status konservasi jenis-jenis fauna dilindungi berdasarkan kriteria IUCN dan CITES.....	75
Tabel III.10	Jumlah Penduduk KSK Agropolitan Tahun 2004 - 2015	85
Tabel III.11	Kepadatan Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015	86
Tabel III.12	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat Per Kabupaten/Kota Tahun 2015	87
Tabel III.13	Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Barat Per Kabupaten/Kota Tahun 2009 - 2015	88
Tabel III.14	Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Barat Per Kabupaten / Kota Tahun 2015	89
Tabel III.15	Menurut Provinsi di Pulau Kalimantan Tahun 2013-2015 (Juta Rupiah)	109
Tabel III.16	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Barat.....	110
Tabel III.17	Persentase Ekspor Provinsi Kalimantan Barat menurut Komoditas Utama Tahun 2016.....	111
Tabel III.18	Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Provinsi Kalimantan Barat menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011-2015 (Persen)	113
Tabel III.19	PDRB Per Kapita di Provinsi Kalimantan Barat menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	114
Tabel III.20	Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	115
Tabel III.21	Rencana dan Realisasi PMDN – PMA di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015.....	115
Tabel III.22	Rencana dan Realisasi PMA dan PMDN di Kabupaten Kapuas Hulu menurut Bidang Usaha Tahun 2016	116
Tabel III.23	Produksi Komoditas Tanaman Pangan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015	117
Tabel III.24	Produksi Komoditas Perkebunan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015	118
Tabel III.25	Produksi Komoditas Tanaman Sayur-Sayuran menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015.....	118
Tabel III.26	Populasi Komoditas Peternakan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015	119
Tabel III.27	Produksi Komoditas Tanaman Buah-Buahan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015.....	121
Tabel III.28	Produksi Komoditas Perikanan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015	122
Tabel III.29	Persentase Penggunaan Lahan Pertanian di Kawasan Agropolitan Tahun 2014	123
Tabel III.30	Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kawasan Agropolitan.....	123
Tabel III.31	Koperasi Bidang Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Agropolitan.....	124

Tabel III.32 Produksi Komoditas Tanaman Pangan di Kabupaten Kapuas Hulu menurut Kecamatan Tahun 2016	124
Tabel III.33 Produksi Komoditas Perkebunan di Kabupaten Kapuas Hulu menurut Kecamatan Tahun 2016	126
Tabel III.34 Produksi Komoditas Sayur-Sayuran di Kabupaten Kapuas Hulu menurut Kecamatan Tahun 2016	127
Tabel III.35 Produksi Komoditas Buah-Buahan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016	129
Tabel III.36 Produksi Komoditas Peternakan di Kabupaten Kapuas Hulu menurut Kecamatan Tahun 2016	130
Tabel III.37 Produksi Komoditas Perikanan Perairan Umum di Kabupaten Kapuas Hulu menurut Kecamatan Tahun 2016	131
Tabel III.38 Produksi Komoditas Perikanan Budidaya di Kabupaten Kapuas Hulu menurut Kecamatan Tahun 2016	132
Tabel IV.1 Klasifikasi SKL Morfologi.....	155
Tabel IV.2 Penilaian dan Pembobotan SKL Kemudahan Dikerjakan	156
Tabel IV.3 Klasifikasi SKL Kemudahan Dikerjakan	157
Tabel IV.4 Penilaian dan Pembobotan SKL Kestabilan Lereng.....	159
Tabel IV.5 Klasifikasi SK Kestabilan Lereng	159
Tabel IV.6 Klasifikasi SKL Kestabilan Pondasi.....	160
Tabel IV.7 Penilaian dan Pembobotan SKL Ketersediaan Air Permukaan	161
Tabel IV.8 Penilaian dan Pembobotan SKL Drainase	163
Tabel IV.9 Klasifikasi SKL Drainase	163
Tabel IV.10 Penilaian dan Pembobotan SKL Terhadap Erosi.....	164
Tabel IV.11 Klasifikasi SKL Erosi.....	165
Tabel IV.12 Penilaian dan Pembobotan SKL untuk Pembuangan Limbah.....	166
Tabel IV.13 Klasifikasi SKL untuk Pembuangan Limbah.....	167
Tabel IV.14 Penilaian dan Pembobotan SKL Rawan Bencana.....	168
Tabel IV.15 Klasifikasi SKL Rawan Bencana.....	168
Tabel IV.16 Pembobotan Analisis Kemampuan Lahan.....	170
Tabel IV.17 Pembobotan Analisis Rasio Tutupan Lahan.....	171
Tabel IV.18 Luas Arah Tutupan Per Kecamatan.....	172
Tabel IV.19 Pembobotan Analisis Ketinggian Bangunan	174
Tabel IV.20 Perkiraan Daya Tampung Berdasarkan Kemampuan Lahan Tahun 2030	175
Tabel IV.21 Arah Komoditas Berdasarkan RTRW Kabupaten Kapuas Hulu	178
Tabel IV.22 Pemenuhan Persyaratan Kesesuaian Lahan per Komoditas dan per Kecamatan	179
Tabel IV.23 Penilaian dan Pembobotan Kriteria Kesesuaian Lahan Pertanian	182
Tabel IV.24 Kriteria Kesesuaian Lahan Sawit	188
Tabel IV.25 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kawasan Agropolitan Kapuas Hulu	191
Tabel IV.26 Laporan Titik Api KSK Agropolitan Tahun 2017	206
Tabel IV.27 Rekomendasi Arah Pengembangan Wilayah Berbasis Biodiversitas dan Jasa Lingkungan	211
Tabel IV.28 Perbandingan Jumlah dan Laju Penduduk di KSK Agropolitan Tahun 2015	221
Tabel IV.29 Tipologi Klasen Pertumbuhan Penduduk	222
Tabel IV.30 Perbandingan Jumlah Murid dengan Jumlah Penduduk di KSK Agropolitan.....	226
Tabel IV.31 Tingkat Ketersediaan Prasarana Taman Kanak-Kanak (TK) di Kawasan Agropolitan.....	260
Tabel IV.32 Kebutuhan Prasarana Taman Kanak-Kanak (TK) di Kawasan Agropolitan Berdasarkan Standar...261	
Tabel IV.33 Kebutuhan Prasarana Taman Kanak-Kanak (TK) di Kawasan Agropolitan Berdasarkan Penyesuaian dan Ketersediaan.....	261
Tabel IV.34 Desa yang Membutuhkan Prasarana Taman Kanak-Kanak.....	262
Tabel IV.35 Tingkat Ketersediaan Prasarana Sekolah Dasar (SD) di Kawasan Agropolitan	263

Tabel IV.36	Kebutuhan Prasarana Sekolah Dasar (SD) di Kawasan Agropolitan Berdasarkan Standar.....	264
Tabel IV.37	Kebutuhan Prasarana Sekolah Dasar (SD) di Kawasan Agropolitan Berdasarkan Penyesuaian dan Ketersediaan.....	264
Tabel IV.38	Desa yang Membutuhkan Prasarana Sekolah Dasar (SD)	265
Tabel IV.39	Jarak Terdekat yang Ditempuh untuk Mengakses Prasarana Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) 266	266
Tabel IV.40	Tingkat Ketersedian Prasarana Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Kawasan Agropolitan 267	267
Tabel IV.41	Kebutuhan Prasarana Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) di Kawasan Agropolitan Berdasarkan Standar.....	267
Tabel IV.42	Kebutuhan Prasarana Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) di Kawasan Agropolitan Berdasarkan Penyesuaian dan Ketersediaan.....	267
Tabel IV.43	Jarak Terdekat yang Ditempuh untuk Mengakses Prasarana Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) ..	268
Tabel IV.44	Tingkat Ketersedian Prasarana Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kawasan Agropolitan.....	270
Tabel IV.45	Kebutuhan Prasarana Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) di Kawasan Agropolitan Berdasarkan Standar 270	270
Tabel IV.46	Kebutuhan Prasarana Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kawasan Agropolitan Berdasarkan Penyesuaian dan Ketersediaan.....	270
Tabel IV.47	Tingkat Ketersedian Prasarana Puskesmas di Kawasan Agropolitan	273
Tabel IV.48	Kebutuhan Prasarana Puskesmas di Kawasan Agropolitan.....	273
Tabel IV.49	Jarak Terdekat yang Ditempuh untuk Mengakses Prasarana Puskesmas Pembantu	274
Tabel IV.50	Tingkat Ketersedian Prasarana Puskesmas Pembantu di Kawasan Agropolitan	276
Tabel IV.51	Kebutuhan Prasarana Puskesmas Pembantu di Kawasan Agropolitan Berdasarkan Standar.....	276
Tabel IV.52	Kebutuhan Prasarana Puskesmas Pembantu di Kawasan Agropolitan Berdasarkan Penyesuaian dan Ketersediaan.....	276
Tabel IV.53	Jarak Terdekat untuk Menempuh Prasarana Pondok Bersalin Desa	278
Tabel IV.54	Tingkat Ketersedian Prasarana Pondok Bersalin Desa (Polindes) di Kawasan Agropolitan (Standar Kecamatan).....	279
Tabel IV.55	Kebutuhan Prasarana Pondok Bersalin Desa (Polindes) di Kawasan Agropolitan Berdasarkan Penyesuaian dan Kebutuhan.....	279
Tabel IV.56	Desa yang Membutuhkan Pondok Bersalin Desa (Polindes)	280
Tabel IV.57	Tingkat Ketersediaan Posyandu di Kawasan Agropolitan.....	280
Tabel IV.58	Kebutuhan Posyandu di Kawasan Agropolitan.....	281
Tabel IV.59	Tingkat Ketersediaan Masjid di Kawasan Agropolitan.....	282
Tabel IV.60	Kebutuhan Masjid di Kawasan Agropolitan Berdasarkan Standar	283
Tabel IV.61	Kebutuhan Masjid di Kawasan Agropolitan Berdasarkan Penyesuaian dan Ketersediaan.....	283
Tabel IV.62	Tingkat Ketersediaan Gereja Protestan di Kawasan Agropolitan.....	284
Tabel IV.63	Tingkat Ketersediaan Gereja Katolik di Kawasan Agropolitan	285
Tabel IV.64	Kondisi Jalan Desa di Kawasan Agropolitan	287
Tabel IV.65	Kapasitas Air Bersih PDAM Tahun 2016.....	290
Tabel IV.66	Kebutuhan Produksi Rata-Rata Air (Liter/Detik)	291
Tabel IV.67	Kebutuhan Prasarana Persampahan.....	294
Tabel IV.68	Proyeksi Produksi Limbah Cair Domestik Tahun 2016-2034.....	295
Tabel IV.69	Tingkat Pelayanan Listrik (PLN dan Non-PLN)	296
Tabel IV.70	Orde per Desa (Analisis Skalogram)	303
Tabel IV.71	Klasifikasi Sektor PDRB Kapuas Hulu menurut Tipologi Klassen	307

Tabel IV.72 Kontribusi Komoditas Tanaman Pangan menurut Kecamatan.....	310
Tabel IV.74 Rasio Komoditas Tanaman Pangan dengan Rata-Rata Kabupaten Kapuas Hulu.....	311
Tabel IV.75 Konsentrasi Komoditas Tanaman Pangan di Kawasan Agropolitan relatif terhadap Non Kawasan Agropolitan	312
Tabel IV.76 Peluang Pasar Ekspor Tanaman Pangan	313
Tabel IV.77 Komoditas Unggulan Tanaman Pangan di Kawasan Agropolitan.....	314
Tabel IV.78 Kontribusi Komoditas Perkebunan menurut Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu	315
Tabel IV.79 Rasio Komoditas Perkebunan dengan Rata-Rata Kabupaten Kapuas Hulu	316
Tabel IV.80 Konsentrasi Komoditas Perkebunan di Kawasan Agropolitan relatif terhadap Non Kawasan Agropolitan	317
Tabel IV.81 Peluang Pasar Ekspor Perkebunan	318
Tabel IV.82 Komoditas Unggulan Perkebunan di Kawasan Agropolitan.....	319
Tabel IV.83 Kontribusi Komoditas Sayur-Sayuran Menurut Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu.....	320
Tabel IV.84 Rasio Komoditas Sayur-Sayuran dengan Rata-Rata Kabupaten Kapuas Hulu	321
Tabel IV.85 Konsentrasi Komoditas Sayur-Sayuran di Kawasan Agropolitan relatif terhadap Non Kawasan Agropolitan	321
Tabel IV.86 Peluang Pasar Ekspor Sayur-Sayuran.....	323
Tabel IV.87 Komoditas Unggulan Sayur-Sayuran di Kawasan Agropolitan	323
Tabel IV.88 Kontribusi Komoditas Tanaman Buah-Buahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu	326
Tabel IV.89 Rasio Komoditas Tanaman Buah-Buahan dengan Rata-Rata Kabupaten Kapuas Hulu	327
Tabel IV.90 Konsentrasi Komoditas Buah-Buahan di Kawasan Agropolitan relatif terhadap Non Kawasan Agropolitan	328
Tabel IV.91 Peluang Pasar Ekspor Buah-Buahan.....	330
Tabel IV.92 Komoditas Unggulan Buah-Buahan di Kawasan Agropolitan	331
Tabel IV.93 Kontribusi Komoditas Peternakan menurut Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu.....	332
Tabel IV.94 Rasio Komoditas Peternakan dengan Rata-Rata Kabupaten Kapuas Hulu.....	333
Tabel IV.95 Konsentrasi Komoditas Peternakan di Kawasan Agropolitan relatif terhadap Non Kawasan Agropolitan	334
Tabel IV.96 Peluang Pasar Ekspor Peternakan	335
Tabel IV.97 Komoditas Unggulan Peternakan di Kawasan Agropolitan.....	336
Tabel IV.98 Kontribusi Komoditas Perikanan Tangkap menurut Kecamatan	337
Tabel IV.99 Rasio Komoditas Perikanan Tangkap dengan Rata-Rata Kabupaten Kapuas Hulu.....	338
Tabel IV.100 Konsentrasi Komoditas Perikanan Tangkap di Kawasan Agropolitan relatif terhadap Non Kawasan Agropolitan	339
Tabel IV.101 Peluang Pasar Ekspor Perikanan Tangkap	341
Tabel IV.102 Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Kawasan Agropolitan.....	341
Tabel IV.103 Kontribusi Komoditas Perikanan Budidaya menurut Kecamatan.....	343
Tabel IV.104 Rasio Komoditas Perikanan Budidaya dengan Rata-Rata Kabupaten Kapuas Hulu.....	344
Tabel IV.105 Konsentrasi Komoditas Perikanan Budidaya di Kawasan Agropolitan relatif terhadap Non Kawasan Agropolitan	344
Tabel IV.106 Peluang Pasar Ekspor Perikanan Budidaya	346
Tabel IV.107 Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Kawasan Agropolitan.....	347
Tabel IV.108 Persebaran Komoditas di Kecamatan Silat Hilir	348
Tabel IV.109 Persebaran Komoditas di Kecamatan Silat Hulu.....	350
Tabel IV.110 Persebaran Komoditas di Kecamatan Hulu Gurung.....	351
Tabel IV.111 Persebaran Komoditas di Kecamatan Pengkadan	352
Tabel IV.112 Persebaran Komoditas di Kecamatan Seberuang.....	353
Tabel IV.113 Persebaran Komoditas di Kecamatan Semitau.....	355

Tabel IV.114 Persebaran Komoditas di Kecamatan Epanang.....	356
Tabel IV.115 Sinkornisasi Muatan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2020 dengan KSK Agropolitan.....	366
Tabel IV.116 Program yang berhubungan dengan Agropolitan dalam RTRW Kabupaten Kapuas Hulu 2014-2034	368

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Kedudukan RTR KSK dalam Sistem Penataan Ruang	3
Gambar I.2 Delineasi KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu.....	4
Gambar II.1 Posisi RTR KSK dalam RTRW.....	11
Gambar II.2 Hubungan antara Pemerintah Pusat, Kementerian Kehutanan, dan Pemerintah Daerah	36
Gambar III.1 Peta KSK Agropolitan Kapuas Hulu.....	38
Gambar III.2 Peta Kawasan Hutan KSK Agropolitan Kapuas Hulu.....	39
Gambar III.3 Peta Batas Desa KSK Agropolitan Kapuas Hulu	41
Gambar III.4 Peta Topografi KSK Agropolitan Kapuas Hulu	44
Gambar III.5 Persentase Tutupan Lahan di Kabupaten Kapuas Hulu	44
Gambar III.6 Peta Tutupan Lahan KSK Agropolitan Kapuas Hulu.....	45
Gambar III.7 Peta Tutupan Hutan Kabupaten Kapuas Hulu	47
Gambar III.8 Peta Arah Hutan Berdasarkan SK Kehutanan 733 Tahun 2014	48
Gambar III.9 Peta Deforestasi Area KSK Agropolitan Tahun 2004 - 2017.....	49
Gambar III.10 Peta Tree Cover Loss Area KSK Agropolitan Tahun 2001 - 2015	49
Gambar III.11 Sebaran Kawasan Hutan Alam di Dalam KSK Agropolitan	50
Gambar III.12 Kondisi hutan rawa gambut di Dusun Sekedau, Desa Tuak Abang, Kec. Semitau	51
Gambar III.13 Hutan gambut topogen yang dijumpai di Dusun Sui Mali, Desa Seberu, Kec. Silat Hilir	52
Gambar III.14 Hutan hujan dataran rendah yang dijumpai di bagian tengah – selatan. (a) HL Sui Mali Kec. Silat Hilir, (b) HL Beluan Komplek Kec. Hulu Gurung	52
Gambar III.15 Hutan kerangas yang dijumpai di Hutan Lindung Bukit Raya Dusun Sui Medang, Desa Tani Makmur Kec. Hulu Gurung	53
Gambar III.16 contoh jenis-jenis Nephentes yang dijumpai di Hutan Dusun Sekedau Kec. Semitau.....	55
Gambar III.17 Jenis-jenis pohon yang mendominasi hutan lindung Sui Mali (dari kiri: Dryobalanops, Hopea dan Shorea)	58
Gambar III.18 Contoh jenis-jenis pohon yan dijumpai di hutan Beluan Komplek (dari kiri: Shorea leprosula, Artocarpus altilis dan Durio zibethinus)	60
Gambar III.19 Jenis-jenis tumbuhan khas yang ditemukan di hutan Sui Medang	61
Gambar III.20 jenis-jenis anggrek yang dijumpai di hutan Sui Medang.....	62
Gambar III.21 Plain sunbird (<i>Antrepthes simplex</i>) sejenis burung madu dan Purple nepped sunbird (<i>Arachnothera hypogrammica</i>), contoh jenis burung yang dijumpai di hutan cadangan Dusun Sekedau, Kec. Semitau	70
Gambar III.22 Fronted-velvet nuthatch (<i>Sitta frontalis</i>) dan Seriwang asia/Indian paradise flycatcher (<i>Terpsiphone paradisi</i>), contoh jenis burung yang dijumpai di Hutan Sui Mali, Desa Seberu Kec. Silat Hilir.....	72
Gambar III.23 <i>Ganocephalus grandis</i> (reptilian) dan <i>Staoris natator</i> (ampibia) yang dijumpai di Hutan Beluan Komplek, Desa Lubuk Antuk Kec. Hulu Gurung.....	73
Gambar III.24 Tupai kerdil/ Least Pygmy Squirrel (<i>Exilisciurus exilis</i>) yang hanya dijumpai di hutan Beluan Komplek, Desa Lubuk Antuk Kec. Hulu Gurung.....	74
Gambar III.25 Fluffy-backed tit babbler (<i>Macronus pilosus</i>) contoh jenis burung yang dijumpai di hutan Bukit Raya Sui Medang, Desa Tani Makmur Kec. Hulu Gurung	75
Gambar III.26 jenis kura-kura duri (<i>Heosemys spinosa</i>) yang dijumpai di hutan Sui Mali, Desa Seberu, Kec. Silat Hilir.....	77
Gambar III.27 bornean keeled green pit viper (<i>Tropidolaemus subannulatus</i>) yang dijumpai di hutan Sui Mali, Desa Seberu, Kec. Silat Hilir	78
Gambar III.28 Sistem penyediaan air bersih menggunakan pipa di Desa Seberu.....	79

Gambar III.29 Hamparan lanskap lahan budidaya pertanian, perikanan, kebun buah dan hutan dan hutan yang terjaga dengan baik di Dusun Beluan, Kec. Hulu Gurung.....	80
Gambar III.30 Bendungan penampung air dari hutan Beluan Komplek di Dusun Beluan Kec. Hulu Gurung.....	81
Gambar III.31 Objek wisata Pusaka Tunggal di Dusun Senai, Desa Tani Makmur	83
Gambar III.32 Objek wisata Medang Pulang di Dusun Sui Medang, Desa Tani Makmur	83
Gambar III.33 Jumlah Penduduk KSK Agropolitan Tahun 2015.....	85
Gambar III.34 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015	86
Gambar III.35 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015	88
Gambar III.36 Persentase Penduduk Miskin Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten Tahun 2015.....	90
Gambar III.37 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin di Provisini Kalimantan Barat dengan Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2009 - 2015	90
Gambar III.38 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kapuas Hulu Per Kecamatan Tahun 2015.....	91
Gambar III.39 Peta Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kapuas Hulu Per Kecamatan.....	92
Gambar III.40 Peta Tingkat Kemiskinan di KSK Agropolitan Per Desa.....	93
Gambar III.41 Perbandingan Indeks Gini di Tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional Tahun 2015	94
Gambar III.42 Ketersediaan dan Persebaran Prasarana Taman Kanak-Kanak (TK).....	98
Gambar III.43 Ketersediaan dan Persebaran Prasana Sekolah Dasar (SD)	98
Gambar III.44 Ketersediaan dan Persebaran Prasarana Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	99
Gambar III.45 Ketersediaan dan Persebaran Prasarana Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	99
Gambar III.46 Ketersediaan dan Persebaran Prasarana Puskesmas.....	100
Gambar III.47 Ketersediaan dan Persebaran Prasarana Puskesmas Pembantu	101
Gambar III.48 Ketersediaan dan Persebaran Prasarana Pondok Bersalin Desa	101
Gambar III.49 Ketersediaan dan Persebaran Prasarana Masjid	102
Gambar III.50 Ketersediaan dan Persebaran Prasarana Gereja Katolik	103
Gambar III.51 Ketersediaan dan Persebaran Prasarana Gereja Protestan	103
Gambar III.52 Peta Jaringan Jalan	104
Gambar III.53 Ketersediaan dan Persebaran Prasarana Pasar	107
Gambar III.54 Ketersediaan dan Persebaran Prasarana Bank	108
Gambar III.55 Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor Provinsi Kalimantan Barat	111
Gambar III.56 Pembagian Kewenangan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.....	139
Gambar III.57 Grafik Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2006 -2016.....	150
Gambar III.58 Komposisi Pendapat Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2012-2016 (dalam Juta Rupiah)	151
Gambar III.59 Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016	151
Gambar III.60 Komponen Pendapatan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2006-2016	152
Gambar III.61 Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam APBD 2016.....	153
Gambar IV.1 Peta SKL Morfologi KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu	156
Gambar IV.2 Peta SKL Kemudahan Dikerjakan KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu	158
Gambar IV.3 Peta SKL Kestabilan Lereng KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu.....	160
Gambar IV.4 Peta SKL Kestabilan Pondasi KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu.....	161
Gambar IV.5 Peta SKL Ketersediaan Air Permukaan KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu	162
Gambar IV.6 Peta SKL Drainase KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu	164
Gambar IV.7 Peta SKL Erosi KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu	166
Gambar IV.8 Peta SKL Pembuangan Limbah KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu.....	167
Gambar IV.9 Peta SKL Rawan Bencana KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu	169
Gambar IV.10 Peta Kemampuan Lahan KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu	170
Gambar IV.11 Peta Arahan Tutupan Lahan KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu.....	172
Gambar IV.12 Grafik Luas Arahan Tutupan Lahan Per Kecamatan (KM ²)	173
Gambar IV.13 Peta Overlay Arahan Tutupan Lahan dengan Guna Lahan Tahun 2009 KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu	174

Gambar IV.14 Peta Arahan Ketinggian KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu	175
Gambar IV.15 Grafik Daya Tampung dan Jumlah Penduduk Tahun 2030 Per Kecamatan	176
Gambar IV.16 Peta Daya Tampung KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu	177
Gambar IV.17 Peta Kesesuaian Lahan Pertanian KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu per Komoditas	183
Gambar IV.18 Peta Konsesi Perkebunan KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu	187
Gambar IV.19 Peta Kesesuaian Lahan Sawit di KSK Agropolitan	188
Gambar IV.20 Peta Kawasan Hutan (SKK 733), Pertambangan, dan Konsesi Perkebunan	189
Gambar IV.21 Peta Izin Usaha Pertambangan KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu	190
Gambar IV.22 Sungai di Pengkadan.....	193
Gambar IV.23 Tambang Batu dari Sungai Milik Rakyat	194
Gambar IV.24 Tambang Pasir dari Sungai Milik Masyarakat	194
Gambar IV.25 Sungai di Hulu Gurung	195
Gambar IV.26 Pertambangan Batu Pecah Milik Perusahaan.....	195
Gambar IV.27 Sungai di Silat Hilir	196
Gambar IV.28 Sungai di Silat Hulu	196
Gambar IV.29 Sungai di Kecamatan Semitau	197
Gambar IV.30 Sungai di Kecamatan Seberuang	198
Gambar IV.31 Pembuangan Sampah di Tepi Sungai.....	199
Gambar IV.32 Lanting (Jamban) di Sungai.....	200
Gambar IV.33 Titik Api KSK Agropolitan 21 Agustus 2017	207
Gambar IV.34 Titik Api KSK Agropolitan 23 Agustus 2017	207
Gambar IV.35 Titik Api KSK Agropolitan 24 Agustus 2017	208
Gambar IV.36 Titik Api KSK Agropolitan 25 Agustus 2017	208
Gambar IV.37 Titik Api KSK Agropolitan 25 Agustus 2017	209
Gambar IV.38 Sebaran Konsesi Perkebunan Sawit di Wilayah KSK Agropolitan (sumber: WWF 2017)	212
Gambar IV.39 Peta Sebaran Hutan di Wilayah KSK Agropolitan	214
Gambar IV.40 Potensi Ekowisata Berbasis Sungai dan Tebing-Tebing Berbatu di Dusun Sui Mali Desa Seberu Kec. Silat Hilir.....	215
Gambar IV.41 Contoh Pengembangan Berbasis Biodiversitas di Dusun Beluan Desa Lubuk Antuk. A. Budidaya Ikan Arwana, B. Sawah dan Kebun Buah-Buahan Lokal	216
Gambar IV.42 Contoh Jenis-Jenis Tanaman Buah Lokal yang Dikembangkan di Desa Lubuk Antuk. A. Langsung/duku, B. Durian, C. Rukam	216
Gambar IV.43 Potensi Tanaman Sagu dan Bamboo di Lahan-Lahan Masyarakat	217
Gambar IV.44 Objek Wisata Air Terun Berwarna (Khas Gambut) Medang Pulang di Dusun Sui Medang, Desa Tani Makmur, Kec. Hulu Gurung	218
Gambar IV.45 Objek Wisata Sungai Berwarna (Khas Gambut) Pusaka Tunggal dengan Jeram-Jeram yang Menarik di Dusun Senai, Desa Tani Makmur, Kec. Hulu Gurung	219
Gambar IV.46 Jumlah Penduduk di KSK Agropolitan Tahun 2004 - 2015.....	220
Gambar IV.47 Laju Pertumbuhan Penduduk di KSK Agropolitan Tahun 2005 - 2015	221
Gambar IV.48 Persentase Penduduk Umur 5 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015	224
Gambar IV.49 Jumlah Murid SD Tahun Ajaran 2015/2016	225
Gambar IV.50 Jumlah Murid SMP Tahun Ajaran 2015/2016	226
Gambar IV.51 Jumlah Murid SMA Tahun Ajaran 2015/2016	226
Gambar IV.52 Perbandingan TPAK dan TPT Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2010 - 2015.....	230
Gambar IV.53 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat Tahun 2014	232
Gambar IV.54 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat Tahun 2014	232
Gambar IV.55 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015.....	233

Gambar IV.56 Peta Persebaran Etnis di KSK Agropolitan	239
Gambar IV.57 Sungai Rusa di Desa Seberuang yang Tercemar Limbah Pabrik	244
Gambar IV.58 Mekanisme Penyelesaian Konflik.....	249
Gambar IV.59 Tari Jepin.....	250
Gambar IV.60 Persebaran dan Aksesibilitas Prasarana Taman Kanak-Kanak (TK)	260
Gambar IV.61 Persebaran dan Aksesibilitas Prasarana Sekolah Dasar (SD)	263
Gambar IV.62 Persebaran dan Aksesibilitas Prasarana Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP)	265
Gambar IV.63 Persebaran dan Aksesibilitas Prasarana Sekolah Tingkat Lanjutan Atas (SLTA)	268
Gambar IV.64 Persebaran dan Aksesibilitas Menuju Prasarana Puskesmas	272
Gambar IV.65 Persebaran dan Aksesibilitas Prasarana Puskesmas Pembantu.....	274
Gambar IV.66 Persebaran dan Aksesibilitas Menuju Prasarana Pondok Bersalin Desa.....	277
Gambar IV.67 Persebaran dan Aksesibilitas Prasarana Mesjid.....	282
Gambar IV.68 Persebaran dan Aksesibilitas menuju Prasarana Gereja Protestan	284
Gambar IV.69 Persebaran dan Aksesibilitas menuju Prasarana Gereja Katolik	285
Gambar IV.70 Kondisi Jalan di Kawasan Agropolitan	286
Gambar IV.71 Peta Aksesibilitas Jalan Desa.....	288
Gambar IV.72 Kondisi Terminal Tipe C di Kecamatan Semitau	289
Gambar IV.73 Ponton untuk Menyebrang Kendaraan di Kecamatan Silat Hilir	289
Gambar IV.74 Sampah yang menumpuk di Pasar Kecamatan Semitau	293
Gambar IV.75 Produksi Sampah per Hari (m ³)	294
Gambar IV.76 Peta Tingkat Elektrifikasi.....	296
Gambar IV.77 Tingkat Pelayanan Telekomunikasi Telkomsel	297
Gambar IV.78 Tingkat Pelayanan Telekomunikasi Indosat	298
Gambar IV.79 Persebaran dan Aksesibilitas Menuju Pasar.....	299
Gambar IV.80 Persebaran dan Aksesibilitas Menuju Bank	300
Gambar IV.81 Lokasi Daerah Irigasi di Kecamatan Pengkadan	301
Gambar IV.82 Lokasi Daerah Irigasi Kecamatan Hulu Gurung	302
Gambar IV.83 Aglomerasi Pusat Pertumbuhan dan Aksesibilitas.....	304
Gambar IV.84 Kontibusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Kapuas Hulu.....	306
Gambar IV.85 Kontibusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian	308
Gambar IV.86 Kondisi dan Potensi Pasar Komoditas Unggulan di Kawasan Agropolitan.....	358
Gambar IV.87 Pohon Industri Tanaman Padi	360
Gambar IV.88 Pohon Industri Tanaman Karet	361
Gambar IV.89 Pohon Industri Hasil Ikan.....	362
Gambar IV.90 Pohon Industri Ayam.....	363
Gambar IV.91 Pohon Industri Kelapa Sawit.....	365
Gambar IV.92 Skema Aktor Urusan Perkebunan Kabupaten Kapuas Hulu.....	373
Gambar IV.93 Skema Aktor Urusan Kehutanan.....	375
Gambar IV.94 Skema Aktor Urusan Pelestarian Lingkungan.....	377

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan memberikan informasi mengenai latar belakang dan tujuan dilaksanakannya kajian empiris wilayah studi untuk mengetahui gambaran kondisi dari berbagai aspek, khususnya yang terkait dengan perencanaan kawasan agropolitan. Setelah itu akan dijelaskan mengenai ruang lingkup pengerjaan, baik substansi maupun wilayah, serta penjelasan terkait metodologi yang digunakan. Pada bagian akhir akan disampaikan mengenai sistematika penulisan laporan secara utuh.

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Kapuas Hulu berperan strategis dari sisi lingkungan dalam lingkup regional, nasional, dan global. Dalam lingkup regional Kalimantan, kabupaten seluas 29.842 km² atau 20,33% dari luas provinsi Kalimantan Barat, berperan untuk menyediakan sumber daya air, sumber daya makanan (ikan), jalur transportasi, dan jasa lainnya tidak hanya bagi Provinsi Kalimantan Barat, tapi juga bagi Malaysia. Dalam lingkup nasional, wilayah ini merupakan kabupaten yang memiliki prosentase hutan tertinggi di Indonesia, yakni 80,96% wilayahnya berupa hutan, yang mana 56,51% diantaranya termasuk dalam kawasan konservasi. Sementara dalam lingkup global wilayah ini memiliki nilai strategis dari sisi lingkungan. Taman Nasional Betung Kerihun yang berada pada ujung timur kabupaten ini merupakan habitat hutan hujan tropis yang berperan sebagai paru – paru dunia dan menjadi habitat bagi 1200 spesies tumbuhan, 44 spesies mamalia, 301 spesies burung, dan 112 spesies ikan. Sementara Taman Nasional Danau Sentarum telah ditetapkan sebagai kawasan lahan basah oleh UNESCO dan menjadi habitat ekosistem air tawar terlengkap di dunia dengan 266 spesies ikan (208 endemik), 510 spesies tumbuhan (33 endemik dan 10 spesies baru), 141 spesies mamalia (29 endemik), dan 31 spesies reptil (8 dilindungi).

Di sisi lain, kegiatan ekonomi yang berkembang di kabupaten ini masih mengandalkan sektor -sektor berbasis sumber daya alam dan praktiknya dilakukan secara tidak ramah lingkungan dan mengancam kawasan konservasi. Semisal kegiatan pertambangan skala kecil emas, batu, dan pasir yang berkembang di Kecamatan Pengkadan dan Seberuang telah mengakibatkan kerusakan air dan tanah di sekitar lokasi pertambangan. Kegiatan perikanan tangkap yang berkembang pesat di Sungai Kapuas, yang dilakukan tanpa mempertimbangkan musim panen ikan dengan peralatan yang merusak lingkungan, telah mengakibatkan munculnya overfishing yang ditandai dengan semakin kecilnya ukuran ikan yang ditangkap dan jumlah tangkapan yang semakin rendah. Lalu, perluasan lahan pertanian oleh masyarakat lokal dilakukan dengan membabat hutan. Akibatnya tidak hanya luasan hutan yang berkurang, tapi juga kerusakan ekosistem.

Konsep *green agropolitan* dipandang sebagai solusi bagi Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengembangkan kegiatan ekonomi lokalnya tanpa merusak lingkungan. Green agropolitan merupakan integrasi antara konsep ekonomi hijau, pertanian hijau, dan agropolitan, yang dapat didefinisikan sebagai pengembangan sektor pertanian ramah lingkungan berbasis

daya dukung lingkungan yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan berhirarki yang menghubungkan antara kegiatan pertanian dan non pertanian dengan infrastruktur memadai. Pengembangan *green agropolitan* di Kabupaten Kapuas Hulu dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang menjadi basis utama kegiatan ekonomi di wilayah ini. Kegiatan ekonomi yang saat ini banyak dikuasai oleh perusahaan – perusahaan besar, melalui *green agropolitan* diharapkan dapat meningkatkan tumbuhnya ekonomi lokal dan penyerapan tenaga kerja lokal, sehingga kesejahteraan masyarakat lokal meningkat. *Green agropolitan* juga diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah pada komoditas – komoditas lokal Kapuas Hulu melalui inovasi yang ramah lingkungan. Selain itu, *green agropolitan* juga dipandang mampu menjaga dan mempertahankan fungsi strategis lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu dari sisi lingkungan.

Kabupaten Kapuas Hulu mengarahkan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Agropolitan dari sudut pandang kepentingan ekonomi. Untuk mengembangkan KSK Agropolitan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, maka perlu disusun Rencana Tata Ruang (RTR) KSK Agropolitan. Rencana ini akan menjadi dasar pengembangan KSK Agropolitan yang telah mengadopsi konsep *green agropolitan* di dalam struktur dan pola ruang kawasan. Dalam proses penyusunan rencana, pada tahap awal diperlukan kajian komprehensif terhadap karakteristik wilayah KSK Agropolitan dari berbagai dimensi perencanaan. Hal ini akan menjadi dasar dalam perumusan analisis gap serta strategi pengembangan KSK Agropolitan.

1.2 Maksud dan Tujuan Kegiatan

Kegiatan “Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (RTR KSK) Kapuas Hulu” merupakan kerjasama antara ITB, World Wildlife Fund (WWF), dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, akan mengusung konsep *green agropolitan* dalam pengembangan 7 Kecamatan, yakni Kecamatan Empanang, Semitau, Silat Hilir, Silat Hulu, Seberuang, Hulu Gurung, dan Pengkadan. Salah satu tahapan dalam kegiatan penyusunan RTR KSK Agropolitan di Kabupaten Kapuas Hulu adalah penyusunan dokumen kajian empiris. Penyusunan kajian empiris bertujuan untuk:

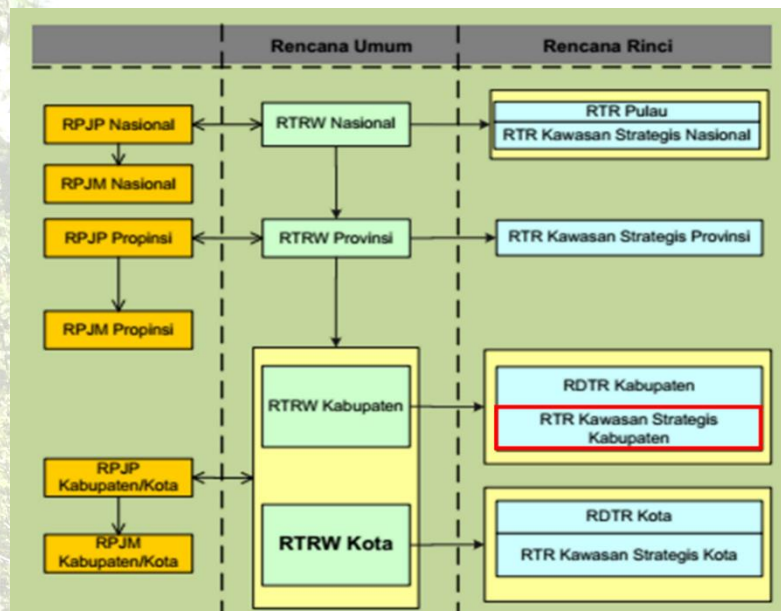
1. Mengetahui karakteristik dan gambaran umum wilayah studi KSK Agropolitan secara menyeluruh dari berbagai aspek, seperti: fisik dan lingkungan, biodiversitas kawasan, kependudukan dan sosial budaya, infrastruktur, ekonomi wilayah, dan kelembagaan.
2. Mengetahui implikasi (baik potensi maupun kendala) kondisi eksisting terhadap rencana pengembangan KSK Agropolitan

1.3 Dasar Hukum dan Kedudukan RTR Kawasan Strategis Kabupaten

Sesuai dengan pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan meliputi penataan ruang Kawasan Strategis

Nasional (KSN), penataan ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP), dan penataan ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (KSK). Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Setiap peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota yang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) provinsi dan kabupaten mengamanatkan penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) KSP dan RTR KSK. Masa berlaku RTR KSP dan RTR KSK adalah 20 tahun. Kedudukan RTR KSK dalam sistem penataan ruang di Indonesia ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar I.1 Kedudukan RTR KSK dalam Sistem Penataan Ruang



Sumber: UU 26/2007 tentang Penataan Ruang

Menurut Peraturan Menteri 37/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten, secara umum RTR KSK memiliki fungsi antara lain:

- a. Sebagai acuan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam mendukung penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam RTRW kabupaten; dan
- c. Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang KSK.

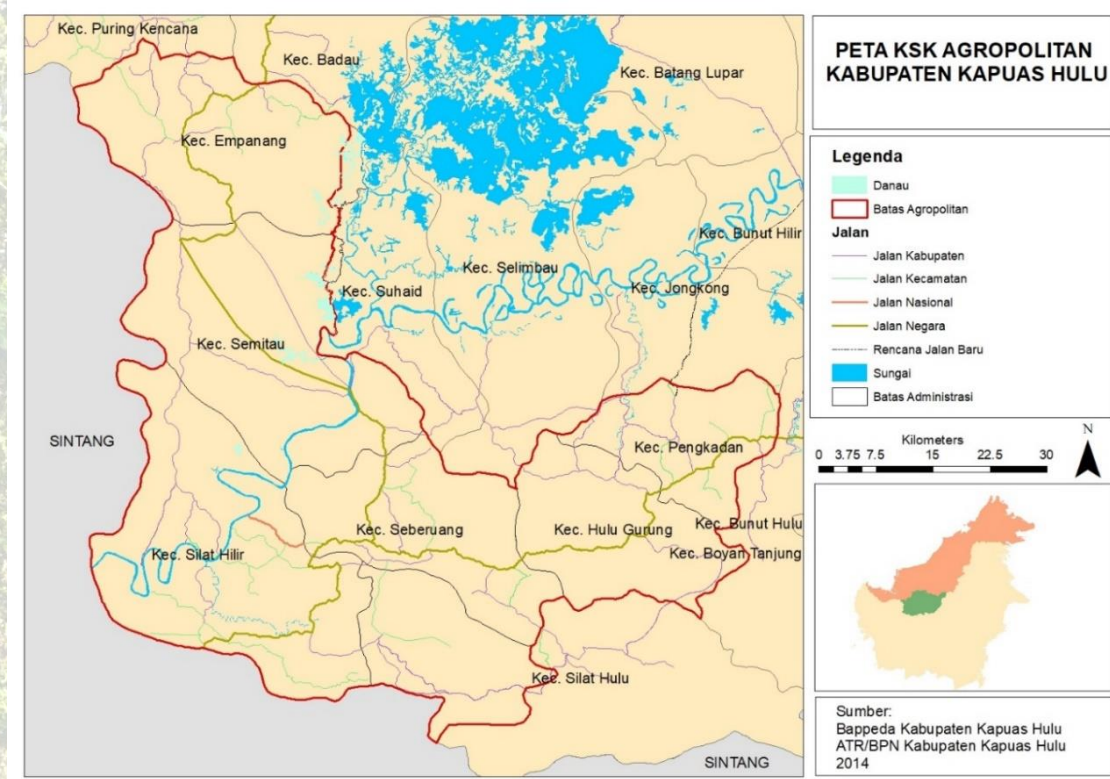
1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan dokumen empiris terbagi menjadi ruang lingkup substansi dan ruang lingkup wilayah studi.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah KSK Agropolitan yang akan direncanakan berada di wilayah barat Kabupaten Kapuas Hulu, yang terdiri dari 7 kecamatan dan XX desa. Kecamatan yang termasuk dalam wilayah KSK Agropolitan yaitu Kecamatan Empanang, Kecamatan Semitau, kecamatan Silat Hilir, kecamatan Silat Hulu, kecamatan Seberuang, kecamatan Hulu Gurung, dan Kecamatan Pengkadan. Delineasi wilayah KSK Agropolitan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar I.2 Delineasi KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber: Hasil Olahan Data, 2017

1.4.2 Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi dalam kajian empiris meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Tinjauan kebijakan
 Pada bagian ini akan ditinjau peraturan-peraturan terkait dalam penyusunan rencana KSK Agropolitan di Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu meliputi: undang-undang tentang penataan ruang, peraturan terkait penyusunan RTR KSK, peraturan daerah RTRW Provinsi Kalimantan Barat, peraturan daerah RTRW Kabupaten Kapuas Hulu, serta kajian terhadap perundang-undangan dari berbagai sektor terkait.
2. Gambaran umum wilayah serta analisis dari berbagai aspek
 Pada bagian ini akan dijelaskan gambaran umum dari berbagai aspek dalam pengembangan KSK Agropolitan, seperti: fisik dan lingkungan, biodiversitas kawasan, kependudukan dan sosial budaya, infrastruktur, ekonomi wilayah, dan kelembagaan.
3. Analisis karakteristik wilayah

Analisis dilakukan dalam berbagai aspek seperti pada bagian gambaran umum. Secara khusus analisis berperan untuk melihat kondisi eksisting komponen-komponen penting dalam pengembangan KSK Agropolitan. Analisis ini akan menjadi acuan dalam melakukan analisis gap dengan kriteria pengembangan *green agropolitan*.

4. Isu-isu strategis wilayah

Isu strategis wilayah dihasilkan melalui analisis potensi dan kendala dari berbagai aspek. Isu-isu yang ditemukan akan menjadi indikasi sejauh mana karakteristik wilayah terhadap berimplikasi terhadap penyusunan rencana KSK Agropolitan.

1.5 Metodologi

Kajian empiris sebagai bahan dasar penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (RTR KSK) Agropolitan Kapuas Hulu dicapai melalui beberapa tahapan. Oleh karenanya diperlukan penyusunan metodologi untuk membuat kajian empiris yang sistematis. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan kajian empiris RTR KSK Agropolitan.

1.5.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah strategis untuk mencapai tujuan kegiatan. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam kegiatan ini di bagi ke dalam dua bagian yaitu metode pengumpulan data sekunder dan metode pengumpulan data primer. Pengumpulan data sekunder merupakan pengumpulan data melalui sumber – sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya melalui dokumen – dokumen. Pengumpulan data primer merupakan pengumpulan data dimana sumber data langsung memberikan data kepada pengumpul yang didapatkan pada saat survei lapangan.

1. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan sepanjang kegiatan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten. Pengumpulan data sekunder dilakukan baik sebelum, saat, maupun setelah survey lapangan dilakukan. Beberapa sumber data dapat dijadikan referensi guna mengumpulkan data sekunder seperti buku, jurnal, laporan studi, artikel, dokumen rencana, kumpulan data statistik, peta, dokumen peraturan, media populer, atau pun *website* serta sumber – sumber lain yang mengandung informasi yang diperlukan terkait wilayah studi. Studi literatur digunakan sebagai referensi teori yang terkait dengan agropolitan dan ekonomi hijau. Sementara itu, dokumen – dokumen lain digunakan sebagai informasi terkait gambaran umum kondisi fisik lingkungan, perekonomian, sosial kependudukan, sarana prasarana, serta kelembagaan dan pembiayaan wilayah studi.

2. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan pada saat melaksanakan survey lapangan. Pengumpulan data primer pada kegiatan penyusunan kajian empiris ini dilakukan dengan tiga cara yaitu wawancara, *Focus Group Discussion*, serta observasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab sehingga mendapatkan makna dari suatu topik tertentu (Sugiyono, 2007). Pada kegiatan ini, dilakukan *in – depth interview* terhadap para responden yang sebelumnya telah ditentukan melalui *purposive sampling*. Wawancara ini dilakukan untuk menemukan permasalahan dan menggali informasi secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide – idenya. Wawancara dilakukan pada aktor – aktor yang dapat memberikan penjelasan dan pemahaman terkait isu yang dibawa. Informan yang diwawancarai dalam kegiatan ini dibagi ke dalam empat kelompok yaitu dari pihak pemerintah, NGO, akademisi, serta masyarakat. Berikut adalah rekapitulasi informan wawancara yang digunakan dalam kegiatan ini.

Tabel I-1 Rekapitulasi Informan Wawancara

No	Kelompok	Nama Institusi
1	Institusi	BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu
2	Pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu
3		Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu
4		Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu
5		Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu
6		Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu
7		Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu
8		Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat, dan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu
9		Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Kabupaten Kapuas Hulu
10		PDAM Kabupaten Kapuas Hulu
11		PLN Kabupaten Kapuas Hulu
12		Institusi Pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat
13	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	
14	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat	
15	Akademisi	Fakultas Pertanian UNTAN
16	NGO	PRCF Indonesia (People Resources and Conservation Foundation)
17		Yayasan Gemawan
18		GIZ
19	Tokoh Masyarakat	Camat dan Sekcam Kecamatan Pengkadan, Hulu Gurung, Semitau, Seberuang, Silat Hilir, Silat Hulu, Empanang
20		Penggawa Kecamatan Pengkadan, Temenggung Kecamatan Semitau, Temenggung Kecamatan Empanang

21		BPP Kecamatan Pengkadan, Mantri Tani Hulu Gurung, BPP Semitau – Seberuang
22		Kepala Desa Miau Merah

Hasil Rekapitulasi, 2017

b. *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) adalah kegiatan diskusi antara pemangku kepentingan terkait perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten. FGD dilakukan guna menggali informasi mendalam dari sudut pandang perwakilan berbagai *stateholder* terkait penyusunan RTR KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu. Adanya FGD memfasilitasi pemangku kepentingan untuk melakukan diskusi dan pemaparan terkait perencanaan penyusunan kawasan strategis kabupaten Agropolitan yang kemudian secara bersama – sama memberikan informasi dan masukan terkait penyusunan RTR KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu. Pada kegiatan ini, FGD dilakukan dua kali dengan tujuan sosialisasi RTR KSK *green* agropolitan Kapuas Hulu, mendapatkan berbagai data dan informasi mendalam dari berbagai dimensi yang terkait dengan penyusunan RTR KSK Kabupaten Kapuas Hulu, serta mendapatkan masukan dan saran dalam penyusunan RTR KSK Kabupaten Kapuas Hulu.

c. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan untuk menambah informasi mengenai objek – objek yang diteliti. Terdapat tiga komponen yang diamati dalam melakukan observasi di kegiatan ini yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activity* (aktivitas) (Spradley, 1980). Selama melakukan observasi, dilakukan pendokumentasian serta pencatatan baik secara terstruktur maupun semi terstruktur terhadap tiga komponen yang terjadi di wilayah studi. Objek yang diobservasi dalam kegiatan ini adalah kondisi daerah pertanian, industri pengolahan, kawasan lindung, kawasan permukiman, pusat pemerintahan, serta beberapa sarana pendukung seperti pasar, terminal, serta TPA. Selain itu, dilakukan juga observasi tidak terstruktur terkait aktivitas kegiatan perekonomian masyarakat, kondisi komoditas dominan, serta kegiatan sehari – hari masyarakat. Data yang didapat dari hasil observasi berupa dokumentas akan digunakan sebagai pelengkap hasil yang sudah didapatkan melalui wawancara kepada para responden dan hasil *focus group discussion* (FGD).

1.5.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penyusunan RTR KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu meliputi analisis *mixed method* yaitu menggabungkan analisis kualitatif dan kauntitaif guna mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah (Creswell, 2013). Metode analisis yang digunakan dalam kegiatan ini antara lain:

1. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Content analysis adalah analisis sistematik dari sisi sebuah teks (siapa yang mengatakan, keada siapa, mengapa, dan sampai mana efeknya) dalam sifat kuantitatif dan kualitatif (Bhattacharjee, 2012), sehingga mampu mengurangi unsur-unsur yang tidak perlu dari bahan tekstual melalui *summarising*, *explicating*, dan *structuring* (Flick,

2009). Analisis isi menghasilkan simpulan dari data yang didapatkan dengan memperhatikan konteksnya (Krippendorf, 1993). Analisis isi digunakan untuk menggali persoalan, permasalahan, kondisi yang terjadi di lapangan serta dari hasil pengumpulan data sekunder maupun primer. Analisis isi membantu untuk memahami dan menginterpretasikan data yang terkandung di dalamnya agar mendapatkan sebuah informasi yang sah.

2. *Coding*

Coding merupakan proses pengidentifikasian dan pengorganisasian tema dalam data kualitatif yang bertujuan untuk mereduksi data dan menginterpretasikan makna dari data – data yang didapatkan berdasarkan kode – kode yang telah ditetapkan (Hay, 2010). *Coding* merupakan proses untuk merubah data kedalam bentuk angka yang dipandu oleh buku kode untuk menandai unit-unit makna pada setiap informasi deskriptif atau inferensial yang disepakati dan disetujui selama berlangsungnya kajian tersebut (Miles & Huberman, 1994). Penerjemahan kode – kode tersebut mengacu pada logika ilmiah yang berlandaskan pada teori yang relevan. Tahapan yang dilakukan dalam melakukan proses *coding* antara lain menyusun kriteria dan agenda pengkodean, mengidentifikasi kata kunci untuk mendapatkan makna yang terkandung deskripsi, serta menginterpretasi makna dan mengklasifikasikan ke dalam kode – kode.

3. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif akan memberikan penggambaran data yang dijelaskan dari ukuran-ukuran penting (Kountur, 2004). Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menginterpretasikan informasi berdasarkan data – data statistik terkait baik yang sudah diolah maupun belum diolah.

4. Analisis Spasial

Bailey dan Gatrell (1995) mendefinisikan analisis spasial sebagai upaya memanipulasi data spasial ke dalam berbagai bentuk-bentuk dan mengekstrak pengertian-pengertian tambahan sebagai hasilnya. Dengan adanya data spasial (data yang memiliki referensi geografis) maka visualisasi tersebut dapat digunakan untuk membuktikan hipotesis-hipotesis mengenai pola atau pengelompokan di dalam ruang geografis serta mengenai peranan lokasi terhadap aktivitas manusia serta sistem lingkungan (Mac Eachren, 1995 dalam (Rustiadi, Panuju, & Saefulhakim, 2003)

1.6 Sistematika Pelaporan

Laporan kajian empiris ini akan tersaji dalam beberapa bab yang akan menggambarkan karakteristik wilayah serta implikasinya terhadap perencanaan KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, akan menjelaskan mengenai latar belakang dilakukannya kajian empiris serta analisis potensi dan persoalan pada wilayah studi untuk menjadi dasar dan input informasi dalam pengembangan KSK Agropolitan.

Bab 2 Tinjauan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan, secara khusus akan membahas dokumen regulasi yang secara formal terkait dengan penyusunan rencana pengembangan KSK Agropolitan di wilayah studi.

Bab 3 Gambaran Umum Wilayah Perencanaan, dimana akan secara garis besar memberikan informasi awal mengenai karakteristik wilayah dari berbagai aspek seperti fisik lingkungan, biodiversitas, kependudukan dan sosial budaya, ekonomi, infrastruktur, dan kelembagaan.

Bab 4 Analisis Pengembangan Wilayah Perencanaan, yang pada khususnya akan membahas lebih lanjut mengenai aspek-aspek terkait dan mengidentifikasi potensi dan persoalan yang muncul pada setiap aspek.

Bab 5 Penutup, dimana akan memberikan kesimpulan yang terdiri dari potensi dan kendala dari setiap aspek terkait perencanaan KSK Agropolitan, serta mengidentifikasi isu-isu strategis sebagai implikasi yang muncul dari hasil analisis yang telah dilakukan.

BAB II TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN

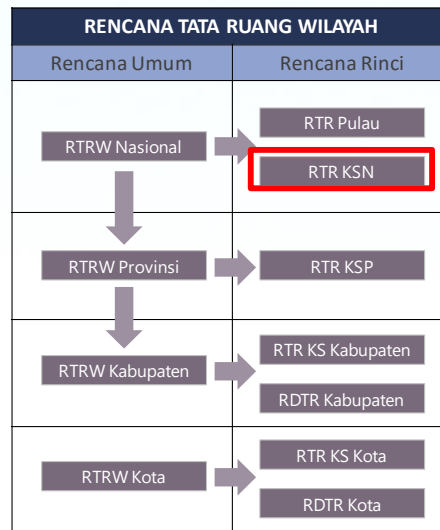
Pada bab ini akan dijabarkan tinjauan terhadap kebijakan terkait dengan perencanaan Kawasan Strategis Kabupaten, khususnya dengan meninjau kebijakan-kebijakan dan peraturan terkait perencanaan kawasan khusus di Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu akan dilakukan tinjauan terhadap peraturan-peraturan terkait dengan penyusunan rencana Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) agropolitan, seperti peraturan mengenai pertanian, kehutanan, gambut, lingkungan, perkebunan sawit, serta kawasan lindung.

2.1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Berdasarkan undang-undang tata ruang, penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Penataan ruang yang berdasarkan sistem terdiri dari sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terbagi menjadi kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kemudian, penataan ruang yang berdasarkan kegiatan kawasan terbagi atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. Sedangkan penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terbagi atas penataan ruang kawasan strategis nasional (KSN), penataan ruang kawasan strategis provinsi (KSP), dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota (KSK). Kawasan strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya, dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam undang-undang ini, penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasan memiliki tujuan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna, juga berkelanjutan.

Berasarkan penataan ruang berdasarkan nilai strategi kawasan yang telah disebutkan sebelumnya, KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Penataan ruang kawasan strategis ini adalah wewenang pemerintah pusat. Kemudian, KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi adalah wewenang pemerintah provinsi. Sedangkan, KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan yang penataan ruangnya merupakan wewenang pemerintah kabupaten atau kota. Berikut posisi rencana tata ruang KSK di dalam rencana tata ruang wilayah dapat dilihat pada Gambar II-1.

Gambar II.1 Posisi RTR KSK dalam RTRW



Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.

Undang-undang ini mendefinisikan kawasan agropolitan sebagai kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Pengembangan kawasan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertanian. Rencana tata ruang kawasan agropolitan merupakan rencana rinci tata ruang 1 (satu) atau beberapa wilayah kabupaten. Rencana tersebut memuat

1. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan agropolitan;
2. rencana struktur ruang kawasan agropolitan yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan agropolitan;
3. rencana pola ruang kawasan agropolitan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;
4. arahan pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi indikasi program utama yang bersifat interdependen antardesa; dan
5. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan agropolitan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Wewenang dalam penataan tersebut berupa penetapan kawasan strategis kabupaten/kota; perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota; pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Dalam melaksanakan wewenangnya, pemerintah daerah perlu menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;

dan melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. Selain itu, dalam penataan ruang, masyarakat berhak mengetahui rencana tata ruang, menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang, memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; mengajukan tuntutan pembatalan izin penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang; mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. Masyarakat juga wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang. Selain itu masyarakat harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan dinyatakan milik umum.

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara, dimana ruang yang dimaksud meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Sebagaimana definisi yang ditentukan oleh Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Sementara Penataan ruang adalah sebuah kerangka kerja yang terdiri atas proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam perwujudan pola ruang, dikenal beberapa istilah untuk menyebut suatu kesatuan ruang sesuai dengan ciri-cirinya. Salah satu istilah adalah istilah "Wilayah", yaitu sebuah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional. Lebih lanjutnya, sebuah wilayah juga dapat disebut sebagai kawasan apabila kawasan tersebut memiliki fungsi tertentu, yaitu fungsi lindung atau fungsi budi daya.

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Mengingat fungsi utamanya, Kawasan Lindung menjadi salah satu kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi upaya pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan pencegahan dampak negative kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

Kedua kebijakan tersebut kemudian diturunkan menjadi beberapa strategi. Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi penetapan kawasan lindung, mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% dari luas pulau sesuai dengan ekosistemnya, dan mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.

Sementara, strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi penyelenggaraan upaya terpadu untuk

melestarikan fungsi lingkungan hidup, melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan dampak nehatif kegiatan manusia, melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zar dan energi yang tersedia di alam, mencegah terjadinya degradasi dan perubahan lingkungan, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam, dan mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin keberlanjutan.

Kawasan Lindung Nasional terdiri dari beberapa jenis kawasan sesuai dengan kebutuhan dan/atau kegunaanya, yaitu;

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - i. kawasan hutan lindung;
 - ii. kawasan bergambut; dan
 - iii. kawasan resapan air.
- b. kawasan perlindungan setempat;
 - i. sempadan pantai;
 - ii. sempadan sungai;
 - iii. kawasan sekitar danau atau waduk; dan
 - iv. ruang terbuka hijau kota.
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - i. kawasan suaka alam;
 - ii. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;
 - iii. suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut;
 - iv. cagar alam dan cagar alam laut;
 - v. kawasan pantai berhutan bakau;
 - vi. taman nasional dan taman nasional laut;
 - vii. taman hutan raya;
 - viii. taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan
 - ix. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- d. kawasan rawan bencana alam;
 - i. kawasan rawan tanah longsor
 - ii. kawasan rawan gelombang pasang
 - iii. kawasan rawan banjir
- e. kawasan lindung geologi; dan
 - i. kawasan cagar alam geologi
 - ii. kawasan rawan bencana alam geologi
 - iii. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah
- f. kawasan lindung lainnya.
 - i. Cagar Biosfer
 - ii. Ramsar
 - iii. Taman buru
 - iv. Kawasan perlindungan plasma nutfah
 - v. Kawasan pengungsian satwa
 - vi. Terumbu karang
 - vii. Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut

Salah satu kawasan lindung yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah Taman Nasional Danau Sentarum yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Jawa Barat. Penentuan kawasan tersebut ditetapkan berdasarkan kriteria :

- a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam;
- b. memiliki luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologi secara alami;
- c. memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun jenis satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh;
- d. memiliki paling sedikit satu ekosistem yang terdapat di dalamnya yang secara materi atau fisik tidak boleh diubah baik oleh eksploitasi maupun pendudukan manusia; dan
- e. memiliki keadaan alam yang asli untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam.

Selanjutnya adalah Kawasan Budi Daya, yaitu wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan dengan dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber budi daya buatan yang tersedia. Dalam pengembangan kawasan budi daya, terdapat dua kebijakan utama, yaitu mewujudkan dan meningkatkan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya; dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Masing-masing kebijakan memiliki strateginya masing-masing. Strategi untuk mewujudkan dan meningkatkan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya meliputi :

- a. Menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
- b. Mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
- c. Mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional;
- e. Mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi; dan
- f. Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan/atau landas kontinen untuk meningkatkan perekonomian nasional.

Sedangkan strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi:

- a. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
- b. mengembangkan perkotaan metropolitan dan kota besar dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak;

- c. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
- d. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan besar dan metropolitan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.
- e. mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil.

Sebagaimana kawasan lindung, kawasan budi daya juga terdiri dari berbagai klasifikasi. Kawasan budi daya terdiri atas :

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. Kawasan peruntukan pertanian;
- d. Kawasan peruntukan perikanan;
- e. Kawasan peruntukan pertambangan;
- f. Kawasan peruntukan industri;
- g. Kawasan peruntukan pariwisata;
- h. Kawasan peruntukan permukiman; dan/atau
- i. Kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan budi daya tersebut juga memiliki kriterianya masing-masing. Selanjutnya akan dibahas mengenai kriteria peruntukan kawasan peruntukan hutan produksi dan kawasan peruntukan hutan rakyat.

Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi terbatas, kawasan peruntukan hutan produksi tetap, dan kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi. Penentuan kriteria teknis kawasan peruntukan hutan produksi terbatas, kawasan peruntukan hutan produksi tetap, dan kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi, ditetapkan oleh menteri yang bertugas dan memiliki kewenangan di bidang kehutanan.

Sementara itu, kawasan peruntukan hutan rakyat ditetapkan dengan kriteria kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik. Kriteria teknis lebih lanjut ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya berada di bidang kehutanan.

2.3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 37 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Untuk menjamin terjaganya keberlanjutan nilai strategis kawasan di kabupaten tersebut dibutuhkan rencana tata ruang. Rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten memiliki masa berlaku dua puluh tahun. Fungsi rencana tata

ruang kawasan strategis Kabupaten (KSK) adalah sebagai acuan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam mendukung penataan ruang wilayah kabupaten; sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam RTRW kabupaten; dan sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang KSK. Kawasan strategis kabupaten memiliki beberapa tipologi:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi

Kawasan ini memiliki ciri-ciri berikut:

- Memiliki potensi cepat tumbuh;
- Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten;
- Memiliki potensi ekspor;
- Memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
- Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
- Ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
- Memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
- Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- Memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
- Memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
- Memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya

Kawasan dengan nilai strategis kepentingan sosial dan budaya memiliki kriteria-kriteria berikut:

- Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
- merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
- Memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya;
- Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
- Merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
- Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi

Kawasan strategis dari sudut pandang ini memiliki kriteria berikut:

- fungsi bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir;
- Diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir;

- Memiliki sumber daya alam strategis;
- Memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; Memiliki fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi kedirgantaraan; dan/atau
- Memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi tinggi strategis lainnya.

4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Sedangkan kawasan strategis ini memiliki kriteria sebagai berikut:

- Tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- Kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora, dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian;
- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- Kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- Kawasan rawan bencana alam; atau
- Kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

KSK Agropolitan yang dikembangkan di Kabupaten Kapuas Hulu merupakan KSK yang memiliki nilai strategis pertumbuhan ekonomi. Dalam penyusunannya, batas deliniasi KSK dapat berupa batas administrasi, bentang alam, dan/atau batas buatan. Sedangkan deliniasi KSK itu sendiri mencakup dua kawasan, yaitu kawasan inti dan kawasan penyangga. Kawasan inti adalah objek utama perencanaan atau pembangunan yang berada di wilayah daratan dan/atau perairan. Sedangkan kawasan penyangga adalah kawasan yang memiliki pengaruh, pelindung, dan berdampak langsung terhadap kawasan inti. Kawasan penyangga memiliki radius tertentu dari batas terluar kawasan inti dan berada di wilayah perairan dan/atau daratan.

Dalam penyusunan rencana tata ruang KSK, kawasan inti digambarkan dengan skala ketelitian peta 1:25.000 hingga 1:5.000 sedangkan kawasan penyangga digambarkan dengan skala ketelitian peta 1:50.000 hingga 1:25.000. Selain itu, masing-masing tipologi kawasan strategis, rencana tata ruangnya memiliki muatan yang berbeda-beda. Rencana tata ruang KSK dari sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi, muatannya ditentukan dengan mempertimbangkan orientasi pasar; daya saing nasional dan internasional; daya serap tenaga kerja; keterkaitan antara industri hulu dan industri hilir; mobilitas; dan/atau kegiatan pendorong sektor ekonomi. Dalam penyusunan rencana tata ruang KSK, terdapat kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan RTR KSK adalah sebagai berikut:

a. Persiapan

Tahap ini meliputi penyusunan kerangka acuan kerja, pemberitahuan kepada publik, kajian awal data sekunder, dan persiapan teknis pelaksanaan.

b. Pengumpulan data dan informasi

Data dan informasi yang dikumpulkan paling sedikit meliputi data terkait dengan nilai strategis dan isu strategis KSK, data kebijakan pentaan ruang dan sektoral, data kondisi fisik lingkungan, data peruntukan ruang, data sarana dan prasarana, dan data kependudukan, data perekonomian, data kelembagaan, data dan informasi pertanahan, peta pasar, dan data lainnya sesuai dengan karakteristik kawasan strategis.

c. Pengolahan data dan analisis data

Pengolahan data terdiri dari kegiatan pelingkupan data, penentuan metode analisis, dan penyiapan peta dasar. Sedangkan kegiatan analisis meliputi tinjauan terhadap RTR terkait dengan KSK, penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), analisis deliniasi kawasan, analisis konsep pengembangan kawasan, analisis regional, analisis kebutuhan ruang, analisis pembiayaan pembangunan, dan analisis lainnya sesuai dengan kebutuhan.

d. Perumusan konsepsi rencana

Tahap ini harus memperhatikan rencana pembangunan baik jangka menengah dan jangka panjang di level nasional dan daerah. Selain itu juga harus memperhatikan rencana sektor terkait. Tahap perumusan konsepsi rencana harus merumuskan alternatif konsep pengembangan dan RTR KSK. Alternatif pengembangan tersebut harus memuat rumusan tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang, dan konsep pengembangan KSK. Sedangkan muatan RTR KSK harus berisi:

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;

Tujuan yang perumusannya difokuskan pada perwujudan pengembangan kawasan yang memiliki sektor unggulan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah. Kemudian kebijakan yang disusun sebagai arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Setelah kebijakan adalah strategi yang disusun sebagai penjabaran kebijakan sebagai langkah operasional.

2. Rencana struktur ruang;

Rencana ini terdiri dari dua sistem utama. Yang pertama adalah sistem pusat kegiatan ekonomi yang terintegrasi dengan pusat kegiatan dalam RTRW Kabupaten. Kemudian sistem jaringan prasarana dan sarana yang terdiri dari:

- Sistem prasarana dan sarana lingkungan
- Sistem jaringan energi dan kelistrikan
- Sistem jaringan telekomunikasi
- Sistem jaringan transportasi
- Sistem jaringan sumber daya air
- Sistem jaringan penyediaan air minum
- Sistem persampahan
- Sistem jaringan air limbah
- Sistem jaringan drainase
- Penyediaan prasarana lainnya

3. Rencana pola ruang;

Rencana ini terdiri dari kawasan inti dan kawasan penyangga. Kedua kawasan ini jika terletak pada kawasan budidaya harus memuat pola ruang kawasan budi daya yang lebih rinci daripada kawasan budi daya yang termuat dalam RTRW Kabupaten. Selain itu pola ruang kawasan inti dan kawasan penyangga harus mencantumkan lokasi relokasi akibat bencana alam serta jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara jika terjadi bencana alam.

4. Arahan/ketentuan pemanfaatan ruang bagi KSK;

Arahan ini merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan dalam jangka waktu perencanaan lima tahun hingga akhir tahun perencanaan. Arahan disusun berdasarkan rencana struktur dan pola ruang, ketersediaan sumber daya dan sumber dana, kesepakatan antar pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan, prioritas pengembangan dan pentahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan RPJPD, dan ketentuan perundang-undangan yang terkait.

5. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang bagi KSK.

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang KSK memuat ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta ketentuan pengenaan sanksi.

e. Penyusunan naskah rancangan peraturan daerah

Berdasarkan peraturan ini, tahap penyusunan naskah rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.4 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 – 2034

RTRW Provinsi Kalimantan Barat bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang aman, produktif, seimbang, terpadu, berkelanjutan, dan berkeadilan melalui pengembangan wilayah berbasis pada **agribisnis, industri, dan pariwisata** yang mengakomodasi kearifan lokal untuk meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat, dengan pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan negara. Pada RTRW Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu termasuk ke dalam Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Perkotaan Putussibau, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Perkotaan Badau di Kecamatan Badau, serta Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perkotaan Semitau dan Nanga Tepuai di Kecamatan Semitau. Beberapa arahan rencana pengembangan tata ruang Provinsi Kalimantan Barat untuk Kabupaten Kapuas Hulu yaitu:

- Jaringan prasarana terdiri atas *unit pengujian kendaraan bermotor* di Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, Ketapang, Kayong Utara, dan Kubu Raya
- *Bandar udara yang dikembangkan untuk melayani penerbangan perintis* di Kabupaten Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, Ketapang, dan Kayong Utara

- *Heliport* yang dikembangkan di Aruk Sambas, Jagoi Babang Bengkayang, Entikong Sanggau, Jasa Sintang, Pulau Karimata Kayong Utara, dan Badau Kapuas Hulu
- Di dalam kawasan hutan lindung, terdapat *kawasan hutan desa dan hutan kemasyarakatan untuk pemanfaatan jasa lingkungan* salah satunya Hutan desa Ujung Said, Hutan desa Nanga Lauk, Hutan desa Penepian Raya, Hutan desa Tanjung, Hutan desa Nanga Jemah, Hutan desa Sri Wangi di Kabupaten Kapuas Hulu
- *Kawasan sempadan sungai* terdiri atas sempadan sungai besar yang terdapat di WS Kapuas, yaitu Kapuas Kecil, Mandor, Landak, Menyuke, Behe, Pede, Ambawang, Kapuas, Tayan, Mengkiang, Kembayan, Sekayam, Sekadau, Belintang, Melawi, Kayan, Belimbing, Pinoh, Sayan, Keruas, Ella, Mentatai, Serawai, Ambalau, Ketungau, Silat, Tawang, Empanang, Embaloh Leboyan, Jongkong, Bunut, Embaloh, Palin, Mandai, Sibau, Mendalam, Keriyau (Kapuas Hulu), Mendawak, Labai, Lida, Kualan, Kerawang, dan Sungai Durian Sebatang
- *Kawasan sekitar danau atau waduk* tersebar di Kota Singkawang dan di 5 (lima) kabupaten Sambas, Kubu Raya, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, dan Ketapang
- *Kawasan budidaya nasional* meliputi Kawasan Andalan Kapuas Hulu dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, kehutanan, perikanan, perkebunan, pariwisata, dan pertambangan
- *Kawasan peruntukan hutan produksi* yang ditetapkan sebagai kawasan hutan terdiri atas:
 - hutan produksi terbatas (HPT) seluas kurang lebih 2.116.885,26 hektar yang tersebar di Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, dan Ketapang
 - hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas kurang lebih 206.098,54 hektar yang tersebar di Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, Ketapang, Sanggau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu
- Di dalam Kawasan Hutan Produksi terdapat hutan desa dan hutan kemasyarakatan meliputi:
 - Hutan Desa Manua Sadap di Kabupaten Kapuas Hulu
 - Hutan Desa Nanga Betung di Kabupaten Kapuas Hulu
 - Hutan Desa Nanga Jemah di Kabupaten Kapuas Hulu
 - Hutan Desa Sri Wangi di Kabupaten Kapuas Hulu
- *Kawasan peruntukan perikanan* di Kabupaten Kapuas Hulu di Kecamatan Jongkong dan sekitarnya
- Untuk menunjang pengembangan kawasan peruntukan perikanan, kelautan, dan pulau – pulau kecil, dikembangkan *rencana PPI* Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu
- *Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi*, meliputi Kawasan pertambangan batubara di Kabupaten Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu dengan sektor unggulan pertambangan

- *Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi Kawasan Strategis Ekosistem Danau Sentarum di Kabupaten Kapuas Hulu*

2.5 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 – 20134

Pada RTRW Kabupaten Kapuas Hulu tercantum bahwa tujuan penataan ruang kabupaten adalah mewujudkan daerah di Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, nyaman, produktif melalui **pengembangan ekowisata yang harmonis dengan agropolitan** untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan daerah tertinggal dengan pola **pembangunan berkelanjutan yang berwawasan konservasi**. Adapun tujuan tersebut diturunkan ke dalam kebijakan dan strategi penataan ruang. Salah satu strateginya adalah terkait dengan strategi pengembangan agropolitan yaitu:

- Mengembangkan kawasan peruntukan pertanian, perkebunan, perikanan yang berkelanjutan dengan menerapkan praktik manajemen terbaik (*best management practice*) di masing - masing sektor
- Mengembangkan kegiatan industri pengolahan, perdagangan, dan jasa
- Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan agropolitan.

Kebijakan dan strategi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam rencana struktur ruang serta rencana pola ruang kabupaten.

Sistem perkotaan Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) di Kota Badau, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kota Putussibau, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kota Nanga Tepuai dan Semitau. Sementara itu, kecamatan - kecamatan yang menjadi deliniasi wilayah studi ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu kawasan perkotaan Nanga Silat di Kecamatan Silat Hilir dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu Desa Nanga Kantuk di Kecamatan Empanang, Desa Martadana di Kecamatan Pengkadan, Desa Sejiram di Kecamatan Seberuang, Desa Miau Merah Simpang Silat di Kecamatan Silat Hilir, Desa Nanga Dangkan di Kecamatan Silat Hulu.

Meninjau dari rencana struktur ruang, kecamatan – kecamatan di KSK Agropolitan termasuk ke dalam beberapa rencana pengembangan jaringan antara lain jaringan jalan, jaringan lalu lintas, jaringan energi, serta jaringan sumber daya air. Rencana jaringan jalan yang tertuang dalam RTRW Kabupaten antara lain:

- Rencana jaringan jalan arteri primer (PKSN)
 - Batas Kabupaten Kapuas Hulu – Sungai Antu – Nanga Kantuk – Badau – Lanjak – Mataso – Tanjung Kerja – Putussibau – Kedamin – Nanga Erak – Batas Kalimantan Timur
 - Batas Kota Putussibau – Semangut – Tepuai – Simpang Sejiram – Simpang Nanga Silat – Sintang
 - Batas Kedamin – Kalis – Semangut – Tepuai – Simpang Sejiram – Simpang Nanga Silat – Batas Kabupaten Sintang
- Rencana jaringan jalan kolektor primer, terdiri atas: Simpang Sejiram – Semitau – Nanga Kantuk

Sementara untuk jaringan lalu lintas, akan direncanakan pembuatan terminal tipe C di Kecamatan Hulu Gurung, Sejiram, dan Semitau. Ada pula perencanaan pengembangan PLTD di Nanga Kantuk Kecamatan Empanang, Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung, Sejiram dan Belikai Kecamatan Seberuang, Semitau Kecamatan Semitau, dan Nanga Dangkan Kecamatan Silat Hulu. Sementara itu di Kecamatan Empanang direncanakan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batubara. Rencana pengembangan mikro hidro diarahkan di Kecamatan Pengkadan, Silat Hulu, Empanang, dan Hulu Gurung. Pada rencana pengembangan jaringan sumber daya air, terdapat rencana pengembangan daerah irigasi di Kecamatan Empanang, Hulu Gurung, Seberuang, Pengkadan, Semitau, dan Silat Hulu. Adapun rencana pengembangan sumber air baku PDAM di Nanga Tepuai, Nanga Dangkan, Sejiram, Semitau.

Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Agropolitan juga perlu mempertimbangkan rencana pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Kapuas Hulu. Tabel di bawah ini adalah penetapan rencana pola ruang pada 7 kecamatan yang tergabung dalam KSK Agropolitan.

Tabel II-1 Penetapan Pola Ruang pada Tujuh Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu

Peruntukan Pola Ruang	Pengkadan	Hulu Gurung	Seberuang	Semitau	Silat Hulu	Silat Hilir	Empanang
Kawasan Lindung							
Kawasan Hutan Lindung (Ha)	206,60	15.733,42	11.365,98	4.580,07	12.076,46	5.439,83	9.878,31
Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahny							
1. Kawasan bergambut (Ha)				25.697,86		2.830,22	18.036,49
Kawasan Perlindungan Setempat							
1. Kawasan sekitar danau di Danau Lindung Anak						√	
Kawasan Cagar Budaya							
1. Gereja Santo Fidelis Sejiram			√				
2. Makam Tua Kerajaan Silat					√		
Kawasan Rawan Bencana (Ha)							57.480
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi							
1. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (Ha)		47.328,58	4.412,21		58.914,34	3.577,42	
2. Kawasan Produksi (Ha)	6.191,83	11.242,63			7.020,39	49,13	1.461,07
3. Kawasan Hutan yang Dapat Dikonversi (Ha)						3.429,85	
Kawasan Budidaya							
Kawasan Peruntukan Pertanian							
1. Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering							
a. Padi gogo	√	√	√	√	√	√	√

Peruntukan Pola Ruang	Pengkadan	Hulu Gurung	Seberuang	Semitau	Silat Hulu	Silat Hilir	Empanang
b. Kacang-kacangan (kedelai, kacang hijau, kacang tanah)	√		√	√	√		
c. Jagung	√		√	√	√	√	√
d. Ketela pohon	√		√			√	√
2. Pertanian Hortikultura							
a. Buah-buahan	√	√	√	√	√	√	√
b. Sayur-sayuran	√			√		√	√
3. Perkebunan							
a. Karet	√	√	√	√	√	√	
b. Sawit	√		√	√	√		√
c. Lada				√			√
d. Kakao	√	√		√	√	√	√
e. Cengkeh	√		√				√
4. Peternakan							
a. Sapi	√	√		√		√	
b. Kambing		√	√			√	
c. Babi			√	√	√	√	√
d. Unggas		√	√				√
e. Burung Walet	√	√	√	√	√	√	√
Kawasan Peruntukan Perikanan							
1. Perikanan Tangkap				√		√	
2. Perikanan Budidaya							

Peruntukan Pola Ruang	Pengkadan	Hulu Gurung	Seberuang	Semitau	Silat Hulu	Silat Hilir	Empanang
a. Perikanan kolam		√	√	√	√		
b. Perikanan keramba						√	
c. Ikan hias arwana				√			
3. Kawasan Pengolahan Ikan			√	√		√	
Kawasan Peruntukan Pertambangan (mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan batuan)	√	√	√	√	√	√	√
Kawasan Peruntukan Industri							
1. Kawasan industri hulu				√			√
2. Kawasan industri rumah tangga	√	√	√	√	√	√	√
Kawasan Peruntukan Pariwisata							
1. Pariwisata Alam		√	√				
2. Agrowisata	√	√					
Kawasan Peruntukan Permukiman							
1. Permukiman Perkotaan		√		√		√	
2. Permukiman Perdesaan	√	√	√	√	√	√	√

Sumber: Hasil Tinjauan Literatur, 2017

2.6 Kajian Peraturan Perundang – Undangan Lainnya Terkait KSK dan Agropolitan

2.6.1 Peraturan Perundangan terkait Pengelolaan Pertanian dan Perikanan UU 18/2012 – Pangan

Perencanaan pangan tingkat kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan kabupaten/kota dan rencana pangan tingkat provinsi serta dilakukan dengan berpedoman pada rencana pangan nasional. Perencanaan pangan tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana pangan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, perseorangan, dan berkelanjutan. Dalam mewujudkan ketersediaan pangan melalui pengembangan pangan lokal, pemerintah perlu menetapkan jenis pangan lokal. Pada umumnya terdapat beberapa kewajiban Pemerintah Daerah terkait dengan pengembangan pangan, yaitu:

1. Pemerintah daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan sebagai produsen pangan.
2. Pemerintah daerah berkewajiban mengatur, mengembangkan, dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air dalam memenuhi kebutuhan pangan.
3. Pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan produksi pangan.
4. Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi penggunaan sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan produksi pangan.
5. Pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan kelembagaan pangan masyarakat untuk meningkatkan produksi pangan.
6. Pemerintah daerah berkewajiban melakukan tindakan untuk mengatasi krisis pangan.
7. Pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
8. Pemerintah daerah berkewajiban menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu.
9. Pemerintah daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan informasi pangan yang terintegrasi.

Untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui produksi pangan daerah dilakukan dengan:

- Mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal
- Mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan
- Mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan
- Membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana produksi pangan
- Mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif

- Membangun kawasan sentra produksi pangan

Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan. Dalam mewujudkan hal tersebut, perlu dilaksanakan kebijakan pemerintah pada bidang distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, dan bantuan pangan. Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan yang dilakukan dalam hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi pangan.
2. Penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat.
3. Pencegahan dan penanggulangan rawan pangan dan gizi.
4. Penyampaian informasi dan pengetahuan pangan dan gizi.
5. Pengawasan kelancaran penyelenggaraan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan.
6. Peningkatan kemandirian pangan rumah tangga.

2.6.2 UU RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Berdasarkan peraturan tentang kehutanan, hutan didefinisikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Berdasarkan statusnya, hutan dibagi menjadi hutan negara, yang bisa juga merupakan hutan adat, dan hutan hak. Hutan juga dapat dikelompokkan menurut fungsinya yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Hutan konservasi berupa kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru.

Aktivitas pengurusan hutan terdiri dari penyelenggaraan perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, serta pengawasan. Masing-masing penyelenggaraan kehutanan tersebut

1. Perencanaan Kehutanan

A. inventarisasi hutan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencari data mengenai sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap. Hasil dari pengumpulan data tersebut akan digunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, penyusunan rencana kehutanan, dan sistem informasi kehutanan

B. pengukuhan kawasan hutan

Kegiatan pengukuhan hutan dilakukan dengan proses penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, serta penetapan kawasan hutan. Engukuhan hutan ini juga harus memperhatikan RTRW.

C. penatagunaan kawasan hutan

kegiatan ini terdiri dari penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan

D. pembentukan wilayah pengelolaan hutan

Wilayah pengelolaan hutan dibentuk dengan memperhatikan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, social budaya, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat setempat.. Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebesar minimal 30% dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional dalam tingkat propinsi, kota/kabupaten, dan unit pengelolaan.

E. penyusunan rencana kehutanan

pemerintah menyusun rencana ini dengan juga mempertimbangkan factor lingkungan dan kondisi social masyarakat. Rencana disusun menurut jangka waktu perencanaan, skala geografis, dan fungsi pokok

2. Pengelolaan Hutan

A. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan

Tata hutan dilakukan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif. Penataan ini meliputi pembagian blok, berdasaeakan ekosistem, tipe, fungsi, ekosistem, dan pembagian petak berdasarkan efisiensi dan intensitas

B. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan

Pemanfaatan tidak dilakukan di hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan izin yang sesuai. Untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan, pihak yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, harus bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat

C. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Rehabilitasi meliputi reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif. Reklamasi hutan berupa inventarisasi lokasi,penetapan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi

D. perlindungan hutan dan konservasi alam

perlindungan hutan terdiri dari aktivitas pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama,serta penyakit; serta perlindungan hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Area kerja dalam hutan menjadi tanggung jawab-masing-masing pemegang izin, begitu juga apabila terjadi kebakaran hutan. Dalam rangka melindungi hutan, setiap orang dilarang untuk menebang pohon tanpa izin dan dalam kawasan sekitar perairan/rawa dengan radius tertentu. Selain itu, setiap orang juga dilarang untuk

mengambil hasil hutan, satwa dan tumbuhan liar, menggembalakan ternak, membawa alat berat, dan eksplorasi atau eksploitasi tanpa izin.

3. Penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan latihan, serta penyuluhan kehutanan
Penyelenggaraan kegiatan ini wajib memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan tradisional, serta kondisi social budaya masyarakat

4. Pengawasan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut

Peraturan ini menjelaskan bahwa pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

2.6.3 UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan

Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan tidak hanya bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan dan mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan, tetapi juga untuk menjamin kepastian hukum, memberi efek jera, dan meningkatkan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak terkait. Ruang lingkup pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan meliputi:

1. Pencegahan perusakan hutan

Pencegahan ini dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan. Terkait pencegahan perusakan hutan, pemerintah membuat sumber kayu alternatif dengan mendorong pengembangan hutan tanaman yang produktif dan teknologi pengolahan. Upaya pencegahan juga dilakukan dengan meningkatkan peran serta masyarakat. Selain itu, pemerintah juga membuat kebijakan terkait pencegahan perusakan hutan berupa:

- koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan;
- insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan;
- peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan
- pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

2. Pemberantasan perusakan hutan

Penindakan secara hukum pelaku perusakan hutan dilakukan sebagai upaya pemberantasan hutan. Tindakan berupa penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan. Perkara perusakan hutan harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke sidang pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

Perusakan hutan meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi. Perusakan hutan dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas dua orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama. Namun, tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. Setiap orang dilarang untuk memanfaatkan hutan tanpa izin atau tidak sesuai dengan izinnya. Kegiatan penambangan, perkebunan, atau yang menggunakan alat berat juga tidak diperbolehkan tanpa izin.

3. Kelembagaan

Dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Presiden membentuk lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Lembaga tersebut bertanggung jawab kepada presiden dan menuat unsur Kementerian Kehutanan; Kepolisian Republik Indonesia; Kejaksaan Republik Indonesia; dan unsur lain yang terkait. Bidang yang ditangani lembaga ini adalah pencegahan, penindakan, hukum dan kerjasama, serta pengawasan internal dan pengaduan masyarakat.

4. Peran serta masyarakat

masyarakat memiliki hak dan kewajiban tertentu dalam rangka pencegahan dan pemberantasan hutan. Peran serta yang dapat dilakukan masyarakat adalah membentuk atau melibatkan diri dalam gerakan anti perusakan hutan, meningkatkan kesadaran tentang kelestarian hutan, memberikan informasi terkait perbuatan yang dilarang, serta pengawasan dalam penegakkan hukum

2.6.4 PP No 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut pada peraturan ini meliputi:

1. Perencanaan;

- A. inventarisasi Ekosistem Gambut;
- B. penetapan fungsi Ekosistem Gambut

Fungsi Ekosistem Gambut meliputi:

- a. fungsi lindung Ekosistem Gambut:
fungsi lindung Ekosistem Gambut paling sedikit 30% dari seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut yang letaknya dimulai dari 1 atau lebih puncak kubah Gambut. Kesatuan Hidrologis Gambut adalah Ekosistem Gambut yang letaknya

di antara 2 sungai, di antara sungai dan laut dan/atau pada rawa. Di luar 30% tersebut, yang memiliki fungsi lindung adalah:

- Gambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih
- plasma nutfah spesifik dan/atau endemik
- spesies yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang undangan
- Ekosistem Gambut yang berada di kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan konservasi,

b. fungsi budidaya Ekosistem Gambut.

Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya dapat diubah menjadi Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung, apabila memenuhi hal diatas, adanya urgensi ekologis untuk melakukan upaya pencegahan atau pemulihan kerusakan lingkungan hidup pada dan/atau di sekitar Ekosistem Gambut; dan/atau adanya urgensi ekologis untuk melakukan upaya pencadangan Ekosistem Gambut di provinsi atau kabupaten/kota

Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya dengan ketebalan lebih dari 1 m dinyatakan rusak apabila memenuhi kriteria baku kerusakan sebagai berikut: a. muka air tanah di lahan Gambut lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan Gambut pada titik penaatan; dan/atau b. tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut.

C. penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut nasional, provinsi, dan kabupaten/kota memuat

- pemanfaatan dan/atau pencadangan Ekosistem Gambut;
- pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Ekosistem Gambut;
- pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Ekosistem Gambut; dan
- adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

2. Pemanfaatan;

Pemanfaatan Ekosistem Gambut pada Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung dapat dilakukan secara terbatas untuk kegiatan: a. penelitian; b. ilmu pengetahuan; c. pendidikan; dan/atau d. jasa lingkungan. Pada Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya dapat dimanfaatkan untuk semua kegiatan sesuai dengan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

3. Pengendalian;

Pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut terdiri atas:

- A. pencegahan kerusakan Ekosistem Gambut;
- penyiapan regulasi teknis;

- pengembangan sistem deteksi dini;
 - penguatan kelembagaan pemerintah dan ketahanan masyarakat: a. penguatan koordinasi tingkat pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan; b. penguatan kelembagaan pengelolaan kawasan tingkat tapak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); c. penyertaan unsur-unsur masyarakat, meliputi masyarakat peduli api, kelompok masyarakat desa, organisasi kemasyarakatan, dan relawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. penguatan kelembagaan sekolah-sekolah pada daerah rawan kebakaran lahan dan hutan dengan pembentukan kelompok pelajar peduli lingkungan yang dibina oleh pemerintah daerah; dan e. pelatihan, pendampingan, akses informasi publik, dan pola kemitraan serta membangun mekanisme pemanfaatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang inovatif dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.
 - peningkatan kesadaran hukum masyarakat masyarakat dilarang untuk membuka lahan baru (land clearing) sampai ditetapkannya zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal Ekosistem Gambut untuk tanaman tertentu; membuat saluran drainase yang mengakibatkan Gambut menjadi kering; membakar lahan Gambut atau melakukan pembiaran terjadinya pembakaran; serta melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut
 - pengamanan areal rawan kebakaran dan bekas kebakaran.
- B. penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut
penanggulangan dilakukan apabila terjadi kebakaran Gambut, terekspos sedimen berpirit atau kwarsa, pembangunan drainase yang mengakibatkan Gambut menjadi kering, serta pembukaan lahan pada Ekosistem Gambut. Terhadap areal perizinan usaha/kegiatan terdapat Gambut yang terbakar, Pemerintah mengambil tindakan penyelamatan dan pengambilalihan sementara areal bekas kebakaran.
- C. pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut.
- a. suksesi alami
 - b. rehabilitasi
 - c. restorasi
 - penerapan teknik-teknik restorasi mencakup pengaturan tata air di tingkat tapak
 - pekerjaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan yang meliputi penataan infrastruktur pembasahan (rewetting) Gambut
 - penerapan budidaya menurut kearifan lokal
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Pemeliharaan

- A.** pencadangan Ekosistem Gambut
- B.** pelestarian fungsi Ekosistem Gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim, yang meliputi mitigasi perubahan iklim dan adaptasi perubahan iklim

5. Pengawasan

Pengawasan terhadap pemanfaatan ekosistem gambut dilakukan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

6. Sanksi Administratif

Sanksi ini berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.

2.6.5 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU 32 mengatur tentang pembangunan berkelanjutan yang meadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjadim keutuhan lingkungan hidup, keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

Menurut UU no 32 Tahun 2009, perlu ada rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disingkan RPPLH, yaitu perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RPPLH memuat rencana tentang: pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. RPPLH Kabupaten Kapuas Hulu ini harus diacu dalam pembuatan RTR KSK Agropolitan.

Menurut pasal ke 14, ada beberapa instrument yang digunakan untuk pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas: KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Tata Ruang, menurut pasal ke 19 merupakan alat untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. Perencanaan tata ruang wilayah ditetapkan denganmemperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pembuatan kawasan strategis kabupaten harus memerhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Sehingga dalam penyusunan RTR KSK Agropolitan perlu ada kajian daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Dalam implementasi kawasan strategis kabupaten di bidang ekonomi tentu akan ada perubahan skala besar yang terjadi di lingkungan. Dengan demikian, dokumen tata ruang ini juga perlu dilengkapi dengan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis). KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dokumen ini diharapkan mampu untuk mencegah dampak lingkungan hidup, yaitu pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, menurut pasal 15 merupakan dokumen wajib untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi beberapa dokumen berikut, yaitu: RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Mekanisme pelaksanaan KLHS adalah:

1. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah.
2. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program.
3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Menurut Pasal ke 16, Muatan Kajian KLHS adalah:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan program pembangunan suatu wilayah. Apabila hasil kajian KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. Berdasarkan pasal ke 18, dikatakan bahwa KLHS harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

2.6.6 Kajian Peraturan Terkait Sawit

Usaha Perkebunan Sawit merupakan kegiatan budi daya yang berhubungan dengan berbagai pihak dan urusan. Setidaknya, ada beberapa komponen dalam kegiatan budi daya sawit yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan mengenai

kegiatan budi daya sawit. Untuk itu, dibutuhkan pengkajian kerangka hukum untuk pengembangan kegiatan budi daya minyak sawit yang meninjau komponen, diantaranya :

Tabel II-2 Kerangka Hukum Pengembangan Kegiatan Budidaya Kelapa Sawit

No	Nomor Undang-Undang / Peraturan
1	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2	Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional
3	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan
4	Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2012 mengenai Prosedur untuk mengubah alokasi dan fungsi kawasan hutan.
5	Peraturan Menteri Kehutanan No 32 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Kehutanan No 41 tahun 2012 tentang Pertukaran Kawasan Hutan
6	Peraturan Menteri Kehutanan No 33 Tahun 2010, Peraturan Menteri Kehutanan No 17 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Kehutanan No 44 Tahun 2011 tentang Prosedur untuk pelesan Hutan Konversi
7	Peraturan Menteri Kehutanan No 34 Tahun 2010 tentang Mengubah Fungsi Kawasan Hutan
8	Peraturan Menteri Pertanian No 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit
9	Peraturan Menteri Pertanian No 26 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan
10	Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup

Sumber: Hasil Tinjauan Terhadap Peraturan, 2017

Dalam penentuan dan perencanaan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya gambut, penentuan batas-batas kawasan lindung dan kawasan budi daya ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya, perencanaan penataan ruang diikuti dengan pengambilan keputusan yang lebih detail oleh Pemerintah Daerah dan perusahaan di dalam kawasan, termasuk dalam zona pertanian. Hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan termasuk dalam urusan pemberian izin, evaluasi dan pengawasan kelayakan kegiatan di ekosistem terkait, memberikan izin, izin pengembangan dan urusan-urusan lain yang ditentukan dalam peraturan lebih lanjut. Dalam mekanisme pemberian izin mensyaratkan pemerintah daerah berkonsultasi dengan masyarakat sekitar sebelum penerbitan izin lokasi.

Gambar II.2 Hubungan antara Pemerintah Pusat, Kementerian Kehutanan, dan Pemerintah Daerah



Sumber: Hasil Tinjauan Peraturan, 2017

Dalam pemberian izin kegiatan budi daya sawit, terdapat beberapa ketentuan perizinan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah mengenai lokasi tempat izin diterbitkan untuk pengembangan sawit. Kewenangan untuk menerbitkan izin mengenai pemanfaatan dan pengembangan lahan berada di Negara, dengan pengecualian bila ada pembagian kewenangan. Negara, melalui Pemerintah Pusat telah memberikan landasan dalam penentuan kawasan di suatu lokasi, apakah lokasi tersebut termasuk kawasan lindung atau kawasan budi daya.

Selanjutnya, Kementerian yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam bidang kehutanan memiliki kewenangan untuk menentukan batas-batas kawasan hutan dan kawasan non hutan di seluruh Indonesia. Selain itu, kementerian yang membawahi urusan bidang kehutanan memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan, termasuk urusan konversi di kawasan hutan.

Pada tingkat Pemerintah Daerah, kewenangan yang dimiliki adalah untuk menerbitkan izin sawit di wilayah-wilayah yang dialokasikan untuk pertanian di dalam rencana tata ruang. Jika lokasi kegiatan sawit berada di kawasan hutan, maka merupakan kewenangan dari Kementerian yang menaungi urusan bidang kehutanan untuk memberikan izin,

Penerbitan izin sawit di suatu lokasi mempertimbangkan perencanaan pembangunan, baik dalam jangka menengah, maupun jangka panjang dengan tujuan optimalisasi hasil pembangunan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemberian izin sawit adalah pertimbangan perhitungan hasil dan dampak pembangunan, perhitungan terhadap infrastruktur, baik secara ketersediaan maupun rencana penyediaanya, serta mempertimbangkan lingkungan seperti kajian AMDAL dan stok karbon.

Selain itu, Pemerintah Daerah dalam penerbitan izin sawit disyaratkan untuk berkonsultasi dengan masyarakat setempat sebelum mengeluarkan suatu izin lokasi maksimal dalam jangka waktu tiga tahun. Pemerintah Daerah juga berfungsi sebagai mediator dalam negosiasi antara masyarakat dengan perusahaan karena perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjamin pembebasan lahan dan kesepakatan kompensasi untuk hak guna jangka panjang, persetujuan mengenai kesepakatan pembagian lahan antara perkebunan dan anggota masyarakat dan ketentuan mengenai perjanjian kemitraan dengan masyarakat

yang menjadi petani kecil yang terikat dalam pembebasan lahan. Proses negosiasi tersebut harus berjalan dengan memperhatikan kaidah keterbukaan dan partisipatif.

Pengkajian secara teknis dan detail terhadap rencana lokasi kegiatan budi daya sawit juga dibutuhkan, antara lain harus memperhatikan batasan-batasan tertentu yang didefinisikan sebagai dampak yang diperbolehkan, misalnya batasan dalam pembabatan hutan, batasan di hulu daerah aliran sungai, atau konversi lahan pertanian desa. Selanjutnya juga dibutuhkan kajian yang rapi terkait AMDAL dan pemetaan ketebalan gambut. Penerbitan izin lokasi juga diikuti beberapa perizinan lainnya, seperti: Izin Lingkungan, Izin Usaha Perkebunan, Izin Buka Lahan, Surat Pelepasan Kawasan Hutan, dan Hak Guna Usaha.

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1 Delineasi KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu

Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 23 kecamatan dengan luas total 29.842 km². Dalam RTRW Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 telah ditetapkan 3 kawasan strategis kabupaten, yaitu Kawasan Agropolitan Silat Hilir dan sekitarnya, Kawasan Ekowisata Taman Nasional Danau Sentarum, dan Kawasan Koridor Taman Nasional Danau Sentarum dengan Taman Nasional Betung Kerihun. Agropolitan silat hilir dan sekitarnya ditetapkan sebagai kawasan strategis ekonomi yang berfungsi untuk menggerakkan perekonomian di kawasannya dan juga Kabupaten Kapuas Hulu. Terdapat tujuh kecamatan yang tergabung dalam kawasan strategis kabupaten agropolitan Kapuas Hulu, yaitu Empanang, Semitau, Silat Hilir, Silat Hulu, Seberuang, Hulu Gurung, dan Pengkadan.

Gambar III.1 Peta KSK Agropolitan Kapuas Hulu

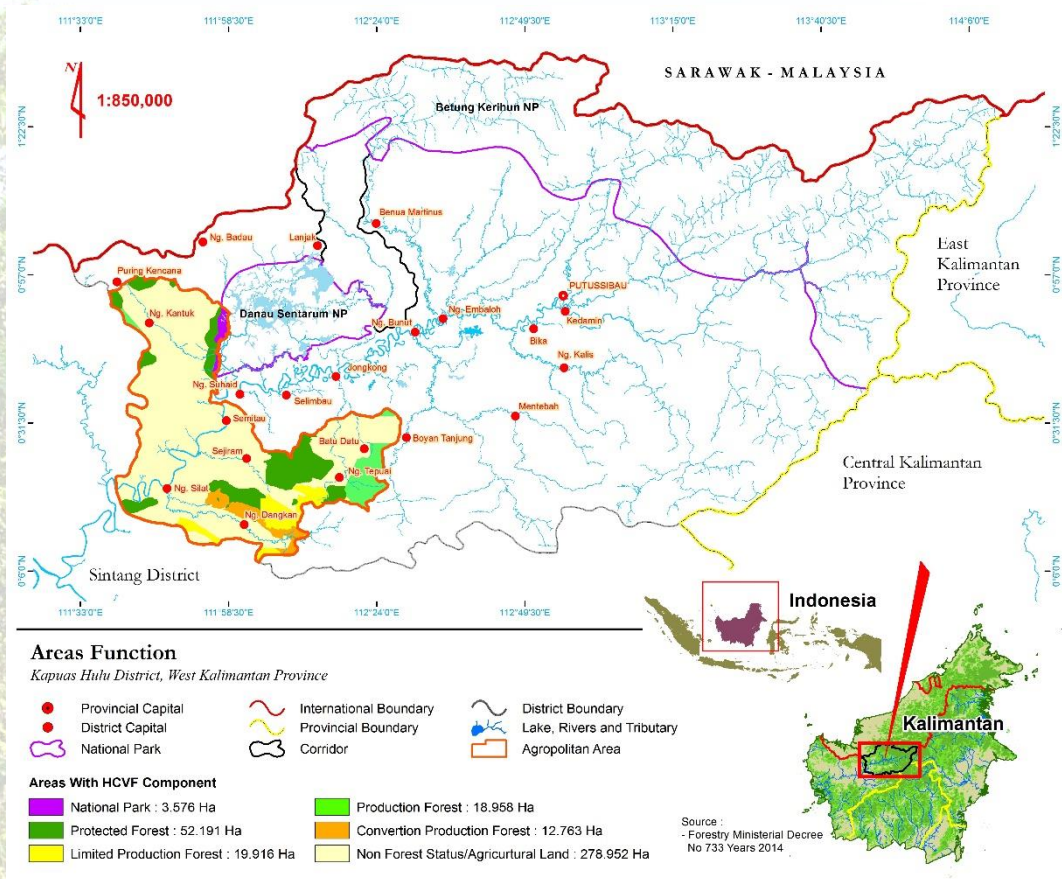


Sumber: WWF, 2017

KSK Agropolitan ditetapkan di tujuh kecamatan ini dikarenakan memiliki kawasan APL (Area Penggunaan Lain) yang paling luas dibandingkan kecamatan lain di Kapuas Hulu berdasarkan SK Kehutanan nomor 733 tahun 2014. Kawasan APL dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan budidaya lainnya sehingga cocok sebagai kawasan agropoitan. Terdapat pula hutan produksi terbatas, hutan produksi konversi, hutan

lindung, dan taman nasional di kawasan agropolitan. Area hutan di area KSK yang tergolong paling sedikit di Kabupaten Kapuas Hulu juga menjadi pertimbangan dalam penetapan area KSK Agropolitan ini. Berikut ini adalah peta area kawasan hutan di area KSK Agropolitan Kapuas Hulu.

Gambar III.2 Peta Kawasan Hutan KSK Agropolitan Kapuas Hulu



Sumber: WWF, 2017

Seluruh desa dalam ketujuh kecamatan ini tergabung dalam KSK Agropolitan, kecuali desa di Kecamatan Silat Hulu yang hanya tergabung 6 dari 12 desa. Jumlah desa yang tergabung dalam KSK Agropolitan ini adalah 77 dengan luas total sekitar 380000 ha.

Tabel III.1 Kecamatan dan Desa yang Termasuk dalam KSK Agropolitan

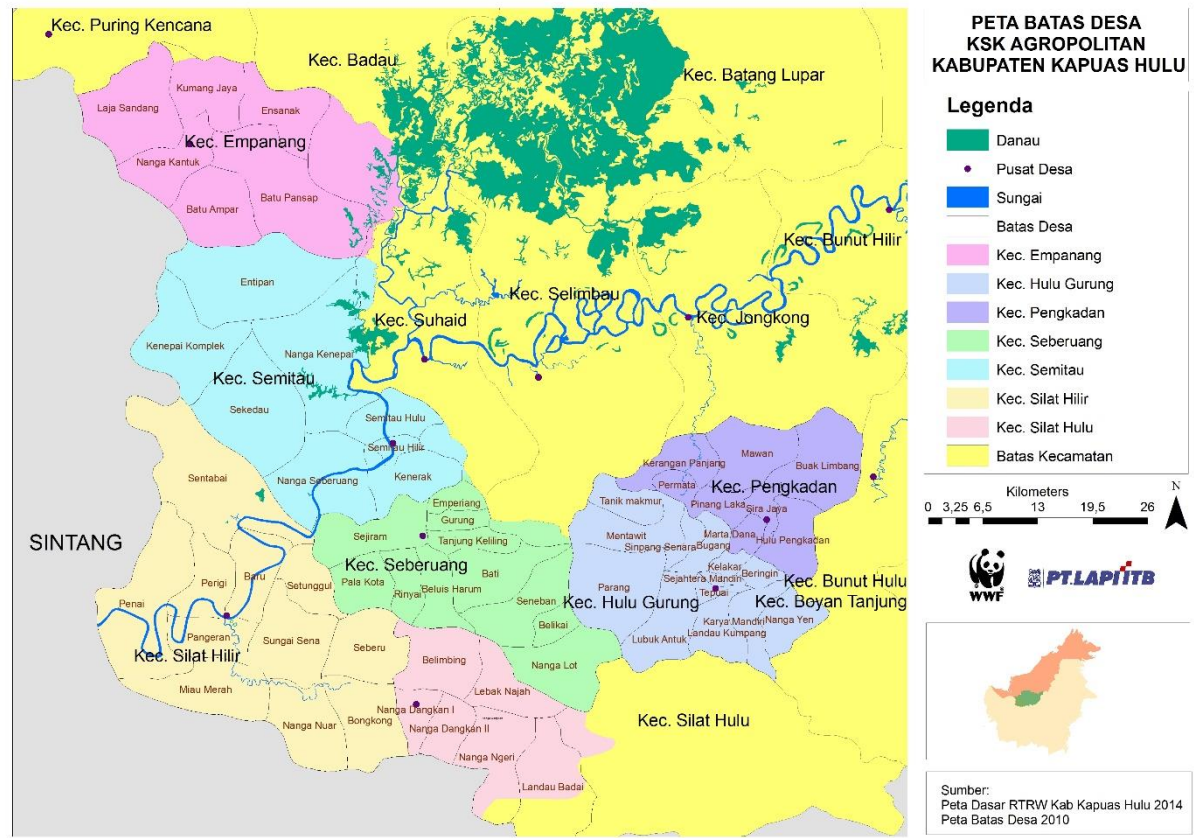
Kecamatan	Desa	Luas (ha)	Kecamatan	Desa	Luas (ha)
Kec. Hulu Gurung	Parang	44258,33	Kec. Semitau	Entipan	76175,543
	Bugang			Nanga Seberuang	
	Lubuk Antuk			Kenerak	
	Mentawit			Kenepai Komplek	
	Tanik makmur			Sekedau	
	Tepuai			Nanga Kenepai	
	Beringin			Padung Kumang	
	Landau Kumpang			Tua Abang	
	Nanga Yen			Marsedan raya	
	Sejahtera Mandiri			Lemedak	
Kelakar	Semitau Hilir				
Simpang Senara	Semitau Hulu				

FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU

Kecamatan	Desa	Luas (ha)	Kecamatan	Desa	Luas (ha)
Kec. Pengkadan	Karya Mandiri	31526,896	Kec. Silat Hilir	Miau Merah	89502,028
	Mubung			Nanga Nuar	
	Tunas muda			Pangeran	
	Mawan			Perigi	
	Buak Limbang			Penai	
	Kerangan Panjang			Baru	
	Permata			Sentabai	
	Pinang Laka			Sungai Sena	
	Sira Jaya			Bongkong	
	Hulu Pengkadan			Seberu	
	Pengkadan Hilir			Setunggul	
	Sasan			Rumbih	
	Kec. Seberuang			Riam Panjang	
Marta Dana		Landau Badai			
Sejiram		Nanga Dangkan I			
Pala Kota		Nanga Dangkan II			
Rinyai		Entebi			
Beluis Harum		Belimbing			
Emperiang		Nanga Kantuk			
Bati		Bajau Andai			
Tanjung Keliling		Laja Sandang			
Gurung		Kumang Jaya			
Seneban		Tintin Peninjau			
Belikai		Keling Panggau			
Nanga Lot					
Tajum mada					
Jerenjang					
Bekuan					
Nanga pala					

Sumber: ATR Kapuas Hulu, 2017

Gambar III.3 Peta Batas Desa KSK Agropolitan Kapuas Hulu



Sumber: Hasil Pengolahan, 2017

3.2 Gambaran Umum Fisik dan Lingkungan

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan satu diantara beberapa kabupaten di Kalimantan Barat yang berada di kawasan Heart of Borneo, selain Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi (Kelompok Kerja Nasional Heart of Borneo, 2014). Kawasan ini memiliki karakter lingkungan yang unik dan peran lingkungan yang penting. Untuk memberikan gambaran mengenai lingkungan di KSK Agropolitan maka akan dibahas karakter KSK Agropolitan secara khusus dan Kabupaten Kapuas Hulu secara umum dari karakter fisiologi, hidrologi, morfologi, dan keruangan.

3.2.1 Fisiologi

KSK Agropolitan berada di Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki kondisi fisik yang unik. Berdasarkan dokumen SDLH Kabupaten Kapuas Hulu (2016), Kapuas Hulu dibagi menjadi tiga wilayah fisiografis, yaitu wilayah daratan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas, Wilayah Pegunungan Kapuas Hulu, dan Wilayah Pegunungan Muller. Ketiga wilayah fisiografis tersebut memiliki karakternya masing – masing, yang pertama, DAS Kapuas memiliki ciri – ciri berupa Danau – danau dan rawa – rawa yang dangkal dengan teras – teras rendah yang sangat luas, bergambut, dan tidak subur. Wilayah DAS Kapuas juga memiliki rangkaian pegunungan, yang disebut Pegunungan Lawit di bagian barat daya dan barat laut kabupaten. Yang kedua, terdapat bentang Pegunungan Kapuas yang berada di TNBK (Taman Nasional Betung Kerihun). Lalu yang ketiga adalah Pegunungan Muller yang

membentang dari Kabupaten Sintang ke Kabupaten Kapuas Hulu. Pegunungan Muller merupakan batas dari Indonesia dan Malaysia.

3.2.2 Hidrologi

Berdasarkan dokumen SDLH Kabupaten Kapuas Hulu (2016), Kabupaten Kabupaten merupakan hulu dari Sungai Kapuas yang mengalir dari Kapuas Hulu hingga ke Kota Pontianak. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki porsi Sungai Kapuas dengan panjang kurang lebih 300 Kilometer dari Putussibau bagian timur hingga kecamatan Silat Hilir. DAS Kapuas terdapat 12 sub – DAS, yaitu sub DAS Bunut, sub DAS Embaloh, sub DAS Jongkong, sub DAS Kapuas Koheng, sub DAS Mendalam, sub DAS Palin, sub DAS Seberuang, sub DAS Sentarum, sub DAS Sibau, sib DAS Silat, sub DAS Suhaid, dan sub DAS Suhai. DAS Kapuas juga memiliki 296 anak sungai yang tersebar di 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Kecamatan Kalis dan Kecamatan Putussibau merupakan kecamatan dengan sungai terbanyak, sedangkan Kecamatan Puring Kencana, Kecamatan Suhaid, dan Kecamatan Sleimbau adalah kecamatan dengan sungai paling sedikit. Dari 296 sungai yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, 67 sungai terdapat di KSK Agropolitan. Sungai sungai ini memiliki fungsi transportasi, logistik (pengangkutan baran – barang), produksi ikan air tawar, dan wisata alam.

Tabel III.2 Sungai - Sungai di Kecamatan KSK Agropolitan

No	Kecamatan	Nama Sungai	Jumlah Sungai
1	Hulu Gurung	Bulun, Madeng, Suaid Ampar, Embau, Mentok, Tepuai, Pensah, Lituk	8
2	Semitau	Empanang, Raya, Penebah, Duku, Kenerak, Lemetak, Sekadau, Anggar, Tekedan, Ramut, Rikat, Rajuk, Bian, Padan, Kapuas	15
3	Seberuang	Duku, Seberuang, Kalakau, Senaban, Bakuran	5
4	Empanang	Mentajung, Ensana, Bungking, Kenua, Katumak, Kailing	6
5	Silat Hilir	Sentabai, Jentu, Burakaik, Putat, Nuar, Jitan, Silat, Jahu Putih, Jahu Induk	9
6	Silat Hulu	Putat, Silat, Entigan, Dangan, Ngeri, Bakuan, Jikan, Pengga, Imuh, Entebi, Merah, Seberuang, Senabai, Mendawai, Sakung, Suwang, Luwei, Senai	18
7	Pengkadan	Pengkadan, Semelagi, Pelet, Jelutung, Buak, Tebuk	6
Kapuas Hulu			296

Pola drainase di Kapuas Hulu didominasi oleh Sungai Kapuas yang mengalir dari Pegunungan Muller di batas Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Selain sungai, terdapat juga danau yang terbentuk di daerah basin dan danau oxbow di daerah meander sungai. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki 23 danau lindung. Dari 23 danau lindung terdapat satu danau yang berstatus taman nasional, yang dikenal dengan Taman Nasional Danau Sentarum. Danau sentarum juga merupakan salah satu danau di Kapuas Hulu yang memiliki nilai strategis dan fungsi penting pada DAS Kapuas dengan fungsi utama hidrologi dan kekayaan biodiversitas. Danau – danau ini merupakan danau depresi, yaitu hanya danau yang berisi karena terdapat cekungan. Selain itu danau ini juga memiliki sifat yang sangat ekstrim, yaitu saat musim kering danau bisa surut namun saat musim hujan, ketinggian air bisa meningkat. Danau juga bisa menjadi sumber penghasil ikan air tawar, seperti yang terjadi di kecamatan – kecamatan diluar KSK Agropolitan seperti di Kecamatan Selimbau, Kecamatan Semitau, Kecamatan Batang Lupar, dan Kecamatan Badau. Danau ini sangat

membantu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari terutama di Kecamatan Semitau yang tergolong area KSK Agropolitan.

3.2.3 Klimatologi

Kapuas Hulu memiliki iklim isothermal hujan tropis dengan rata-rata temepertaur 28° celcius. Suhu yang tinggi dikarenakan oleh letak Kapuas Hulu yang dekat dengan garis Khatulistiwa. Musim kemarau di Kapuas Hulu terjadi pada bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan pada bulan Desember-Maret. Bulan basah di Kapus Hulu mencapai hingga 10-12 bulan dengan curah hujan per tahun berkisar antara 3500-4500 mm. Terdapat pula daerah dengan curah hujan kurang dari 3500 mm yaitu di wilayah aliran sungai Kapuas Hulu, dan daerah dengan curah hujan di atas 4500 mm di daerah perbatas Kapuas Hulu dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Tabel III.3 Curah Hujan, Temperatur, dan Kelembaban Kabupaten Kapuas Hulu

Bulan	Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan	Temperatur Max	Temperatur Min	Kelembaban Nisbi Udara
Januari	763.4	26	31.4	22.5	89
Februari	253.9	24	31.7	22.9	89
Maret	465.5	21	32.3	23	89
April	401.1	25	33	23.2	97
Mei	338.9	16	33	23.7	85
Juni	313.9	16	32.8	23.6	87
Juli	101.1	10	33.8	23.1	84
Agustus	162.4	14	33.4	23.3	87
September	84	6	32.8	23.7	86
Oktober	318	14	32.4	23.8	87
November	609.5	27	32.1	23.7	87
Desember	312.5	22	32.6	23.7	86

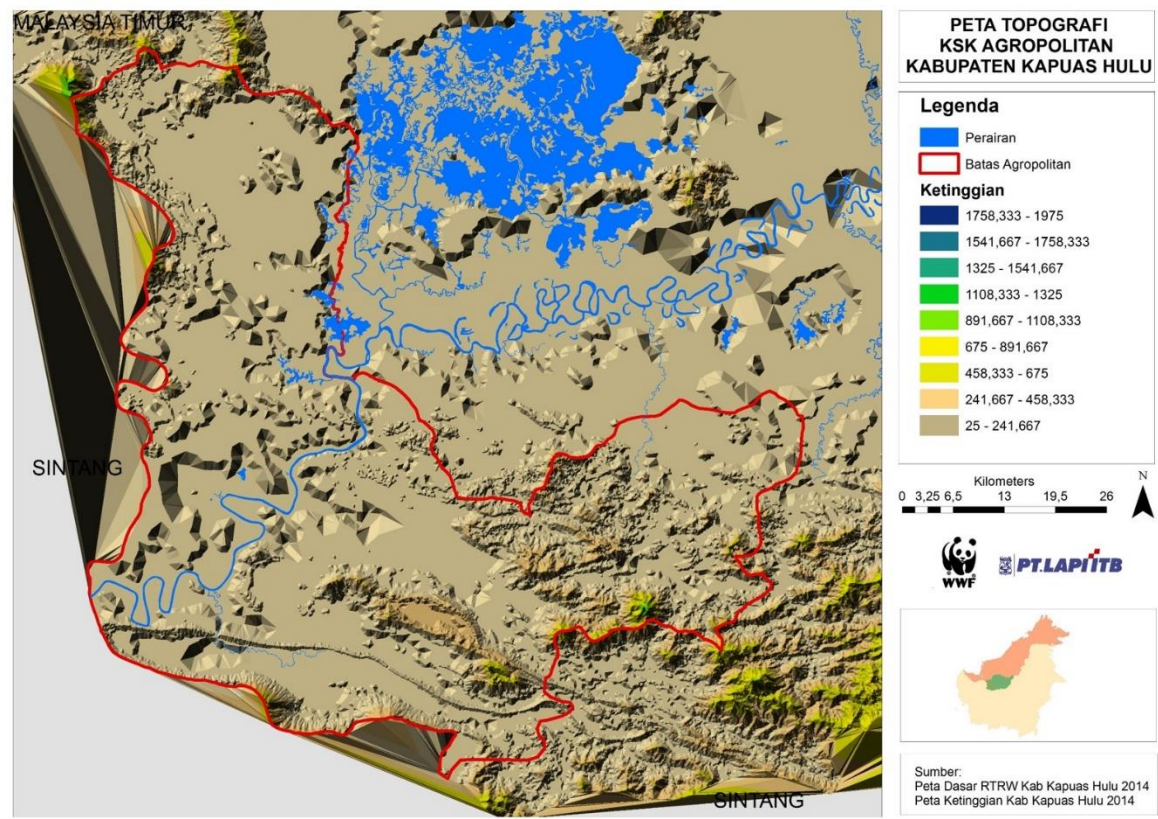
Sumber: Kapuas Hulu dalam Angka 2017

3.2.4 Topografi

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah yang telah mengalami pengikisan dan sudah semakin tua, yang ditandai dengan gradien sungai yang kecil dan berkelok – kelok. Morfologi daerah Kapuas Hulu umumnya berbentuk wajan (kuali) yang terdiri dari dataran rendah atau cekungan yang terendam air dari daerah hilir di Nanga Mandai ke daerah hilir sungai Kapuas di Kecamatan Suhaid. Menurut data dari BPS Kapuas Hulu (2016), di Kecamatan Semitau terdiri dari danau dan rawa-rawa yang airnya cukup dalam. Banyak daerah dataran rendah yang bukan danau bisa terendam dua kali dalam satu tahun selama setengah sampai enam bulan. Namun pada dataran tinggi yang diselingi rawa umumnya bisa digenangi air pada waktu tertentu atau dibanjiri selama beberapa jam dalam waktu tertentu (BPS Kapuas Hulu, 2016).

KSK Agropolitan di Kabupaten Kapuas Hulu merupakan dataran rendah karena cenderung memiliki kondisi kelerengan dan ketinggian yang rendah. Berdasarkan RPJMD Kab Kapuas Hulu tahun 2010-2015, pada dataran rendah ini biasanya terdapat Ibukota Kecamatan yang penduduknya relatif ramai, Sedangkan pada dataran tinggi umumnya terdapat rawa-rawa yang memanjang tetapi sempit dan dikelilingi oleh bukit-bukit kecil. Dataran ini termasuk kategori yang biasa digenangi air pada waktu-waktu tertentu, terutama pada saat curah hujan yang cukup tinggi.

Gambar III.4 Peta Topografi KSK Agropolitan Kapuas Hulu

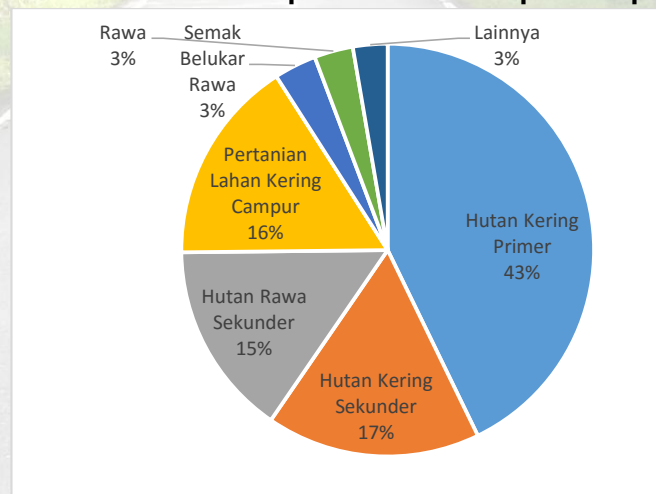


Sumber: Pengolahan Data, 2017

3.2.5 Keruangan

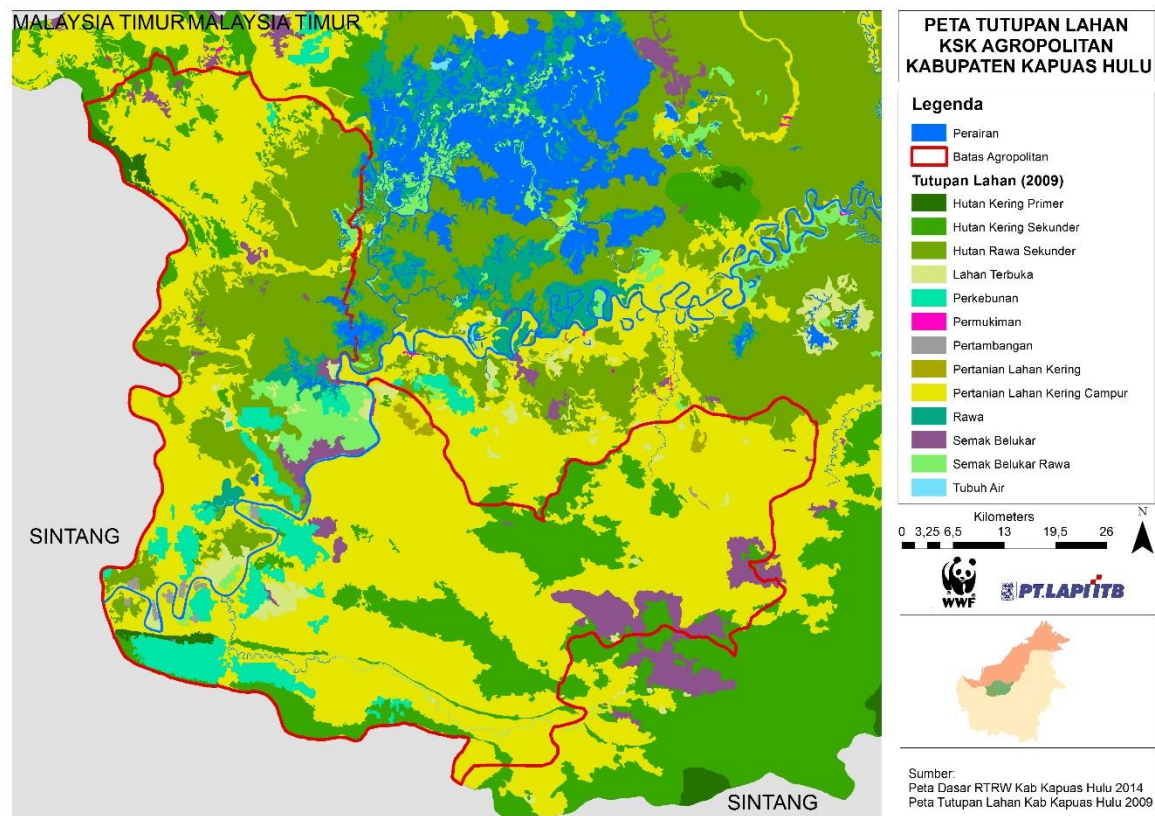
Kabupaten Kapuas Hulu adalah kabupaten konservasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dapat dilihat pada gambar III.5 bahwa Kabupaten Kapuas Hulu didominasi oleh hutan sepanjang bagian utara, timur, dan selatan. Berdasarkan RPJMD Kapuas Hulu, luas hutan kering primer di Kapuas Hulu adalah 13.113,84 km², yaitu hampir setengah dari total luas Kabupaten Kapuas Hulu. Kawasan budidaya yang paling besar proporsinya adalah pertanian, yang mencapai 16% dari total luas kabupaten.

Gambar III.5 Persentase Tutupan Lahan di Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber: RPJMD Kapuas Hulu 2011-2015

Gambar III.6 Peta Tutupan Lahan KSK Agropolitan Kapuas Hulu



Sumber: Pengolahan Data, 2017

Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu memiliki pola ruang eksisting yang sangat menarik dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh karakter alam dan juga budaya lokal. Disisi lain sudah ada pengaruh eksternal yang membentuk pola dan struktur ruang yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat istilah – istilah keruangan yang khusus ada di Pulau Kalimantan, sehingga jarang ditemukan di wilayah lain di Indonesia. Jika dibagi terhadap kawasan lindung dan budidaya maka ada karakter yang berbeda seperti yang tertulis dalam RTR Desa Tua Abang, Kecamatan Semitau. Untuk kawasan lindung, masyarakat lokal mengenal istilah – istilah seperti kawasan cagar budaya, tembawang, kawasan keramat, hutan adat, hutan kearamat, hutan produksi, dan hutan rakyat, kawasan sempadan sungai, dan kawasan sempadan danau. Berikut adalah penjelasan dari masing – masing kawasan lindung:

- Cagar Budaya: gupung, tembawang, kuburan, lembang, tempat bersejarah, dan tempat keramat.
- Tembawang: areal bekas permukiman yang ditinggalkan dan terdapat tanaman buah dan pohon-pohonan sebagai sumber pemenuhan pangan keluarga.
- Tempat keramat: tempat pemujaan dan tempat memohon pertolongan berupa batu, pohon, dan lubang. Bisa juga kuburan tua dan gupung.
- Hutan adat: tempat lokasi kegiatan adat.
- Hutan keramat: didalamnya terdapat benda keramat
- Hutan produksi: untuk kebutuhan kayu masyarakat. Tapi tidak untuk diperjualbelikan.

- Hutan rakyat: hutan cadangan untuk keperluan pemerintah desa.
 - Sekitar Danau: Danau menawan dan Fanau pandan. 50 meter dari titik tertinggi kawasan lindung.
 - Sempadan sungai: 50 meter anak sungai 100 meter untuk sungai besar.
- Selain lahan lindung, ada juga lahan budidaya. Ada beberapa lahan budidaya di pola ruang masyarakat Kapuas Hulu:

- Pertanian Lahan Kering: ditanami singkong, kacang panjang, sayur-sayuran milik pribadi
- Pertanian Lahan Basah: sawah milik perorangan masyarakat desa yang berada di lokasi sama
- Pengembangan Permukiman: kawasan yang direncanakan untuk menjadi permukiman untuk generasi selanjutnya
- Permukiman Existing
- Rawan Banjir: terutama di dekat sungai dan danau
- Kawasan tanaman tahunan dan perkebunan: terdiri atas kebun campuran dan kelapa sawit. Penggunaan lahannya untuk menyediakan bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja untuk masyarakat

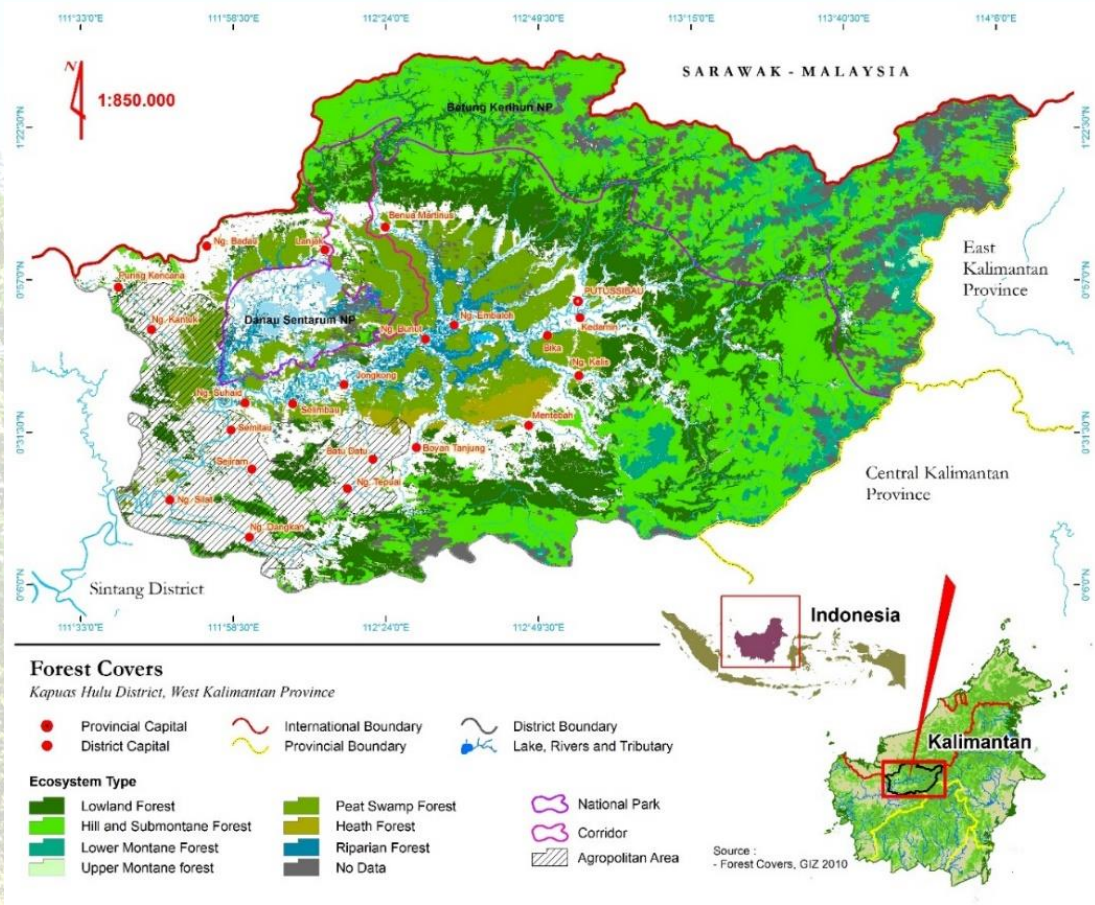
Kawasan lindung dan budidaya tersebut merupakan salah satu contoh yang ada di Desa Tua Abang. Walaupun tidak semua desa memiliki pola ruang yang sama, namun secara umum Kabupaten Kapuas Hulu memiliki karakter seperti itu. Tidak semua daerah memiliki perkebunan kelapa sawit, perusahaan kayu, danau, ataupun sungai besar. Dengan demikian tidak semua desa memiliki pola ruang seperti yang sama persis seperti di atas.

Seperti di penjelasan pola ruang budidaya yang ada di atas, dikatakan bahwa perkebunan sawit merupakan pola ruang yang cukup dominan. Di Desa Tua Abang perkebunan sawit menguasai hampir 80% dari guna lahan desa. Jika dilihat dengan skala yang lebih besar ke Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2002 telah mencapai 8000 ha, lalu pada tahun 2012 areal kelapa sawit meningkat menjadi 47000 ha. Secara keseluruhan, perkebunan yang mendominasi di area KSK adalah perkebunan sawit dalam skala besar yang dimiliki perusahaan. Selain itu, terdapat pula perkebunan karet yang dimiliki masyarakat. Komoditas lain juga terdapat di Kapuas Hulu, namun masih dalam skala kecil.

3.2.6 Deforestasi dan Degradasi Hutan

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki banyak area kawasan hutan, sehingga ditetapkan sebagai Heart of Borneo atau paru-paru dunia dan juga sebagai Kabupaten Konservasi. Berbeda dengan Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan, area KSK Agropolitan yang terletak di bagian barat, tidak memiliki kawasan hutan konservasi dan hutan lindung yang signifikan dibandingkan dengan daerah di Kabupaten Kapuas Hulu lainnya. Kawasan pertanian cenderung mendominasi di ketujuh kecamatan pada area KSK.

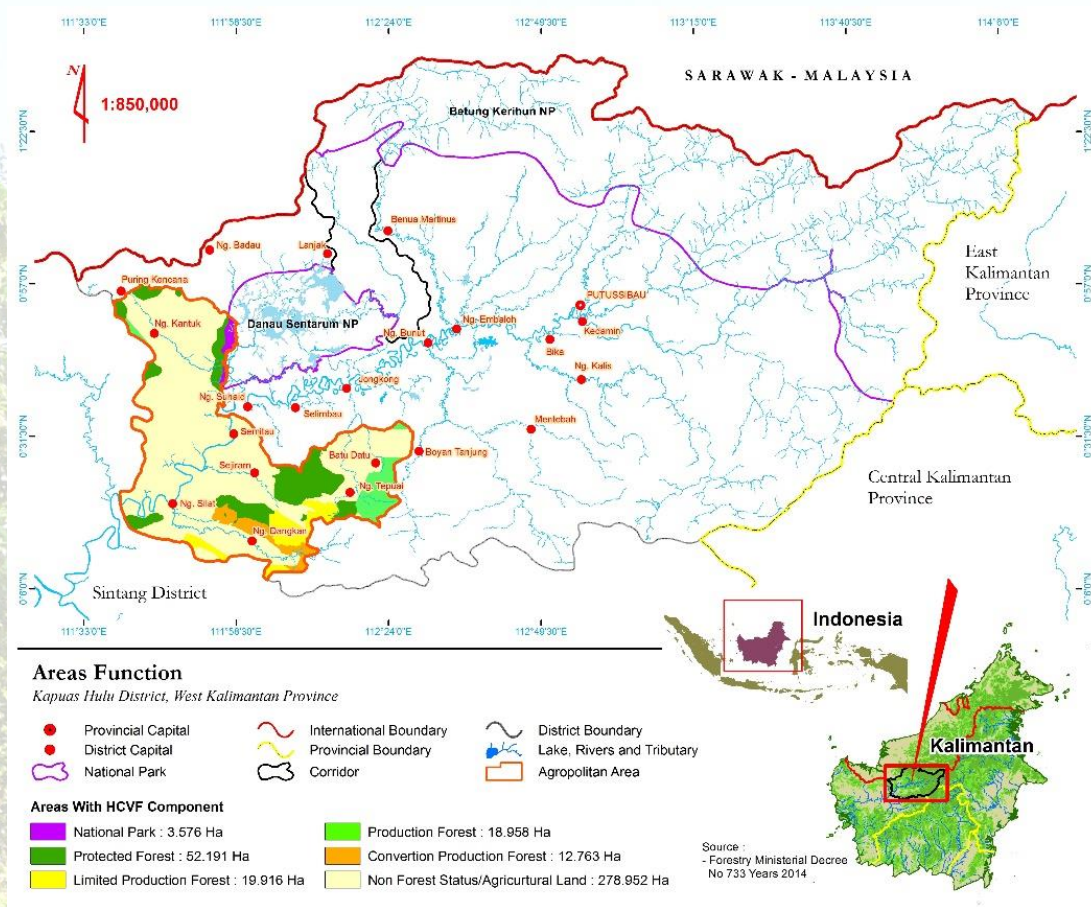
Gambar III.7 Peta Tutupan Hutan Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber: WWF, 2017

Berdasarkan SK Kehutanan nomor 733 tahun 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat, sebagian besar hutan yang saat ini terdapat di Empanang dan Semitau tergolong ke dalam APL (Area Penggunaan Lain) seperti pada gambar III.8.

Gambar III.8 Peta Arahan Hutan Berdasarkan SK Kehutanan 733 Tahun 2014



Sumber: WWF, 2017

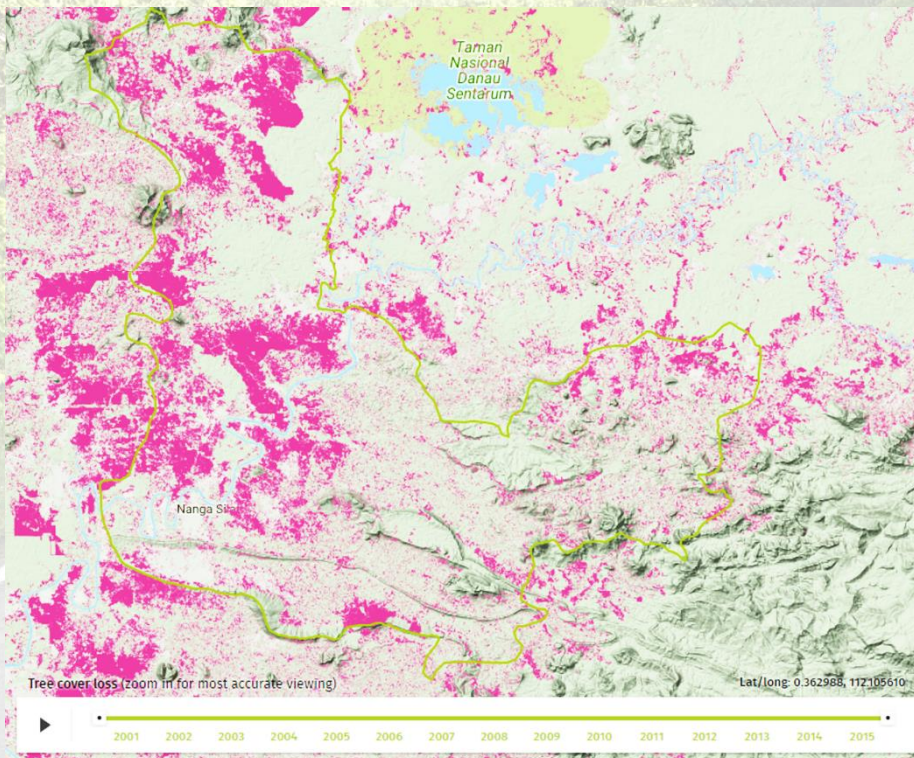
Berdasarkan *Global Forest Watch*, terjadi deforestasi di beberapa kawasan hutan di Kecamatan Semitau, Silat Hilir, dan Empanang sejak tahun 2004 hingga 2017. Apabila dibandingkan dengan peta SKK 733, daerah yang mengalami deforestasi memang tidak diarahkan menjadi hutan, baik itu hutan produksi maupun hutan lindung. Selain itu, terdapat juga degradasi hutan di area KSK Agropolitan yang diindikasikan dari *tree cover loss* pada tahun 2001 hingga tahun 2015. Pada gambar III.10 terlihat bahwa hampir seluruh kecamatan di area KSK Agropolitan mengalami *tree cover loss*, namun di Kecamatan Empanang, Semitau, dan Silat Hilir memiliki penurunan yang paling besar. Hal ini sejalan dengan berkembangnya perusahaan perkebunan sawit dalam dekade terakhir pada ketiga kecamatan tersebut.

Gambar III.9 Peta Deforestasi Area KSK Agropolitan Tahun 2004 - 2017



Sumber: Global Forest Watch, 2017

Gambar III.10 Peta Tree Cover Loss Area KSK Agropolitan Tahun 2001 - 2015



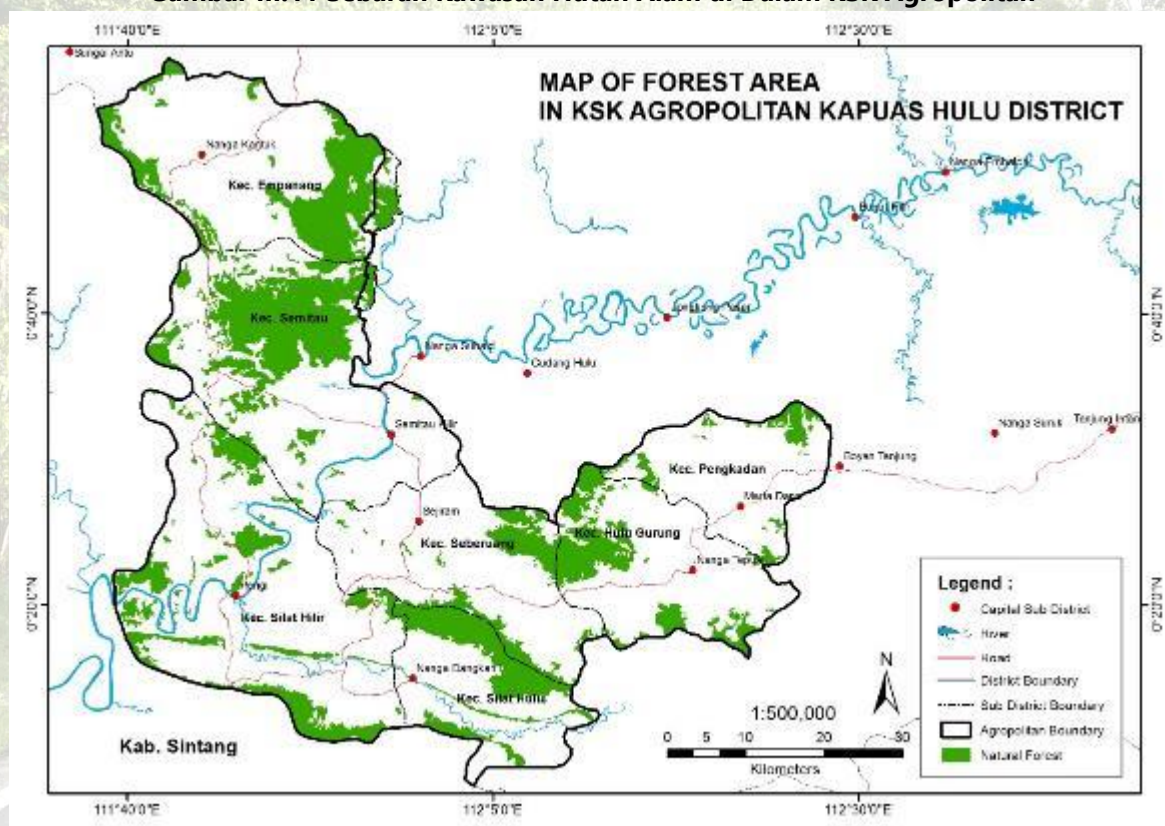
Sumber: Global Forest Watch, 2017

3.3 Gambaran Umum Biodiversitas Kawasan

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan bagian penting dari Heart of Borneo (HoB) sebagai wilayah di jantung Kalimantan seluas lebih dari 23 juta ha yang berbatasan dengan tiga negara yakni Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan hasil kajian sebelumnya diketahui bahwa wilayah HoB memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi serta berperan penting sebagai pengatur ekosistem, baik di daerah hulu maupun hilir. mewakili sekitar 6% keanekaragaman hayati dunia. Menurut van Paddenburget et al. (2012) di wilayah HoB telah ditemukan sekitar 500 spesies baru sejak tahun 1995 (atau hampir 3 spesies batu per bulan) dan menjadi hulu dari 14 sungai utama di Kalimantan. Keberadaan hutan-hutan alam yang tersebar di wilayah Kapuas Hulu ini selain menjadi pusat keragaman hayati, juga memberikan nilai-nilai jasa lingkungan dan ekowisata.

Wilayah KSK Agropolitan Kab. Kapuas Hulu diketahui memiliki sebaran kawasan hutan yang membentang dari utara hingga selatan, secara strategis menjadi kantong biodiversitas, jasa lingkungan dan ekowisata. Setidaknya terdapat tiga wilayah yang menjadi pusat sebaran hutan-hutan alam, yaitu di bagian utara meliputi Kec. Empanang dan Kec. Semitau; bagian tengah ke selatan mencakup Kec. Silat Hilir, Kec. Silat Hulu dan Kec. Seberuang; dan Kec. Hulu Gurung dan Kec. Pengkadan di bagian selatan (Gambar III.11).

Gambar III.11 Sebaran Kawasan Hutan Alam di Dalam KSK Agropolitan



Sumber: WWF-ID, 2017

Berdasarkan hasil survey lapangan ke beberapa titik sampel lokasi hutan dan desa-desa sekitar hutan diperoleh gambaran kondisi biodiversitas, jasa lingkungan dan ekowisata sebagaimana diuraikan lebih lanjut.

3.3.1 Tipe Ekosistem

Ekosistem hutan alam di wilayah KSK Agropolitan secara garis besar terdiri atas tiga tipe, yaitu hutan rawa/hutan rawa gambut (*peat swamp forest*), hutan hujan dataran rendah (*lowland dipterocarp forest*) dan hutan kerangas (*heat forest*). Hutan rawa gambut tersebar di bagian utara kawasan KSK, sedangkan wilayah-wilayah lainnya lebih didominasi oleh hutan hujan lahan kering dataran rendah. Hutan kerangas dijumpai secara spot-spot di bagian selatan terutama di areal-areal perbukitan.

Hutan rawa gambut terkonsentrasi di bagian utara khususnya hutan-hutan yang berada di sekitar Danau Sentarum mencakup wilayah Kec. Empanang dan Kec. Semitau. Hutan-hutan bertipe wetland di wilayah utara ini cenderung berada di areal-areal yang landai di dataran rendah (Gambar III.12). Pada hutan rawa gambut ini juga umum dijumpai keberadaan ekosistem hutan kerangas pada areal-areal tertentu ditandai dengan adanya lapisan pasir kuarsa di lantai hutannya.

Gambar III.12 Kondisi hutan rawa gambut di Dusun Sekedau, Desa Tuak Abang, Kec. Semitau



Sumber: Ichsan Suwandhi 2017

Selain dataran rendah di wilayah utara, hutan bertipe gambut juga dijumpai pada areal perbukitan di bagian tengah KSK Agropolitan berupa hutan gambut topogen, tepatnya di wilayah Kec. Silat Hilir dan Kec. Seberuang. Hasil survey lapangan di wilayah hutan Sui Mali – Sebalang Hulu menunjukkan bahwa gambut-gambut topogen ini terbentuk di perbukitan berbatu dengan lapisan gambut yang tipis berkisar antara 1 hingga 2 meter, merupakan peralihan dari hutan hujan dataran rendah pada bagian lebih bawah (Gambar III.13).

Gambar III.13 Hutan gambut topogen yang dijumpai di Dusun Sui Mali, Desa Seberu, Kec. Silat Hilir



Sumber: Ichsan Suwandhi 2017

Hutan hujan dataran rendah bertipe lahan kering tersebar hampir di seluruh kawasan hutan lainnya, mencakup Kec. Silat Hilir, Silat Hulu, Seberuang, Hulu Gurung dan Pengkadan. Hasil survey pada lokasi-lokasi sampel di Kec. Silat Hilir dan Kec. Hulu Gurung menunjukkan bahwa hutan-hutan hujan dataran rendah ini cenderung terjaga dengan baik karena menjadi kawasan penyangga kehidupan bagi kampung-kampung yang ada di sekitarnya terutama dalam hal penyediaan air bersih (Gambar III.14).

Gambar III.14 Hutan hujan dataran rendah yang dijumpai di bagian tengah – selatan. (a) HL Sui Mali Kec. Silat Hilir, (b) HL Beluan Komplek Kec. Hulu Gurung



Sumber: Ichsan Swandhi, 2017

Hutan kerangas cenderung dijumpai secara spot-spot di wilayah Kec. Hulu Gurung khususnya kawasan hutan Bukit Raya di Desa Tani Makmur (Gambar III.15). Onrizal et al (2005)¹ menjelaskan tentang pengertian hutan kerangas adalah adalah hutan yang memiliki lahan ekstrem dan rawan atau sangat peka terhadap gangguan misalnya kebakaran. Kata kerangas berasal dari bahasa Dayak Iban yang memiliki arti "tanah yang

¹ Onrizal *et al.* 2005. Komposisi Jenis dan Struktur Hutan Kerangas Bekas Kebakaran di Taman Nasional Danau Sentarum, Kalimantan Barat

tidak dapat ditanami padi". Sebutan tersebut diberikan karena kandungan tanah yang membentuk hutan kerangas sangat miskin unsur hara. Vegetasi yang mampu bertahan di hutan kerangas umumnya telah beradaptasi secara luar biasa karena kondisi tanah hutan kerangas memang sangat ekstrem. Salah satu contoh vegetasi hutan kerangas adalah genus *Nepenthes* atau biasa disebut kantong semar, menyerap nutrisi dari hewan dan serangga yang masuk terjebak ke dalam kantung yang dimilikinya. Serangga dan hewan itulah yang kemudian diserap oleh kantong semar sebagai nutrisi supaya tetap bisa bertahan hidup di atas lahan ekstrem hutan kerangas. Jenis tumbuhan lain yang mampu bertahan hidup di hutan kerangas adalah geronggang (*Cratogeomachra arborescens*). Geronggang merupakan jenis pohon pionir di hutan sekunder. Pohon tersebut mampu bertahan dari panas, cepat tumbuh dan dapat hidup dalam sebuah hutan yang pernah terbakar serta didukung oleh batang yang keras sehingga mampu bertahan dari kekeringan.

Gambar III.15 Hutan kerangas yang dijumpai di Hutan Lindung Bukit Raya Dusun Sui Medang, Desa Tani Makmur Kec. Hulu Gurung



Sumber: Ichsan Suwandhi, 2017

3.3.2 Kekayaan Jenis Flora

Hutan-hutan alam yang tersebar di wilayah KSK agropolitan secara umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hutan-hutan alam yang ada di sekitarnya terutama hamparan hutan di sekitar Danau Sentarum dan Taman Nasional Betung Kerihun serta kawasan hutan lindung. Hasil survey di lokasi hutan dan masyarakat desa yang mewakili ketiga wilayah besar di KSK agropolitan diperoleh gambaran kekayaan jenis flora sebagaimana uraian lebih lanjut.

Wilayah Utara (lokasi sampel: Kec. Semitau)

Kecamatan Semitau merupakan salah satu wilayah di bagian utara KSK Agropolitan bersama dengan Kec. Empanang yang secara umum memiliki hutan-hutan bertipe gambut atau rawa. Hutan-hutan di wilayah ini cenderung sudah terfragmentasi oleh konsesi perkebunan sawit. Namun demikian hutan-hutan yang ada di wilayah studi secara umum memiliki kekayaan flora yang tinggi. Hasil survey vegetasi di seluruh kawasan diperoleh sebanyak 171 jenis pohon dari 34 famili, berbagai jenis rotan, pandan-pandan. Hutan rawa gambut dan hutan kerangas di bagian utara cukup banyak dijumpai jenis-jenis pohon dari family Dipterocarpaceae, Myristicaceae, Anacardiaceae dan Apocynaceae. Pada hutan-hutan rawa bercampur formasi kerangas juga menjadi pusat sebaran bagi jenis-jenis kantong semar (*Nepenthes* spp).

Hasil inventarisasi vegetasi di lokasi sampel Dusun Sekedau Desa Tuak Abang Kec. Semitau diperoleh informasi sebanyak 23 jenis pohon dari 7 famili dengan total individu sebanyak 260 bt/ha. Daftar kekayaan jenis tumbuhan di hutan sekedau disajikan pada Tabel III.4. Lokasi sampel merupakan hutan cadangan adat seluas 80 ha yang disisakan secara khusus untuk perlindungan setempat dan pemenuhan kebutuhan sumberdaya hutan bagi masyarakat Dusun Sekedau.

Tabel III.4 Komposisi jenis pohon di hutan rawa gambut Dusun Sekedau Kec. Semitau

No	Jenis	Famili	Kelimpahan
1	<i>Shorea pacyphylla</i>	Dipterocarpaceae.	Tinggi
2	<i>Shorea albida</i>	Dipterocarpaceae.	Tinggi
3	<i>Knema curtisii</i>	Myristicaceae.	Tinggi
4	<i>Gluta renghas</i>	Anacardiaceae.	Tinggi
5	<i>Driobalanop aromatica</i>	Dipterocarpaceae.	Sedang
6	<i>Anisoptera sp</i>	Dipterocarpaceae.	Sedang
7	<i>Calophyllum Fisiferum</i>	Calophyllaceae	Sedang
8	<i>Cotilelobium sp</i>	Dipterocarpaceae.	Sedang
9	<i>Dyera costulata</i>	Apocynaceae	Sedang
10	<i>Litsea sp</i>	Lauraceae.	Sedang
11	<i>Palagium ottolanderi</i>	Sapotaceae	Sedang
12	<i>Anisoptera costata</i>	Dipterocarpaceae.	Sedang
13	<i>Calophyllum sp</i>	Calophyllaceae	Rendah
14	<i>Driobalanop oblongiflorum</i>	Dipterocarpaceae.	Rendah
15	<i>Alstronia solaris</i>	Apocynaceae	Rendah
16	<i>Calophyllum inophyllum</i>	Calophyllaceae	Rendah
17	<i>Shorea leprosula</i>	Dipterocarpaceae.	Rendah
18	<i>Vatica rassak</i>	Dipterocarpaceae.	Rendah
19	<i>Driobalanop sp</i>	Dipterocarpaceae.	Rendah
20	<i>Myristica sp</i>	Myristicaceae.	Rendah
21	<i>Asltronia Sholaris</i>	Apocynaceae	Rendah
22	<i>Palagium sp</i>	Sapotaceae	Rendah

23	Calophyllum Sclerophyllum	Calophyllaceae	Rendah
Total Kelimpahan			260 bt/ha

Keterangan: Kelimpahan tinggi (> 20 bt/ha), sedang (10 – 20 bt/ha), rendah (< 10 bt/ha)

Dari tabel di atas diketahui bahwa hutan di kawasan ini didominasi oleh jenis-jenis dari family dipterocarpaceae, myristicaceae, anacardiaceae, calophyllaceae dan apocynaceae. Shorea pacyphylla, Shorea albida, Knema curtisii, Glutha renghas dan Dryobalanops aromatica. Jenis-jenis tersebut umumnya merupakan pohon-pohon besar yang menempati stratum paling atas dalam stratifikasi hutan.

Selain jenis-jenis pohon, hutan rawa gambut dan kerangas di wilayah ini juga banyak dijumpai kantong semar (Nephentes spp), pandan-pandan, jahe-jahean dan rotan. Beberapa jenis Nephentes umum dijumpai pada areal-areal yang bertipe kerangas baik di tempat terbuka maupun di lantai hutan yang teduh (Gambar III.16).

Gambar III.16 contoh jenis-jenis Nephentes yang dijumpai di Hutan Dusun Sekedau Kec. Semitau



Sumber: Ichsan Suwandhi, 2017

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap peraturan perlindungan jenis-jenis flora sebagaimana tercantum pada PP No 7/1999 diketahui bahwa semua jenis Nephentes termasuk ke dalam jenis-jenis yang dilindungi. Selanjutnya berdasarkan IUCN red list diperoleh informasi jenis-jenis di lokasi studi yang termasuk dalam kategori terancam adalah seluruh jenis pohon dari family Dipterocarpaceae. Disamping itu juga diketahui jenis endemic Pulau Kalimantan berupa jenis Knema curtisii (Lauraceae) yang keberadaannya juga sudah mulai jarang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Tuak Abang diperoleh informasi bahwa Kawasan hutan di sekitar Dusun Sekedau 1 diatur secara khusus oleh adat. Masyarakat umum mengambil kayu di hutan hanya untuk keperluan membangun rumah.

Jenis-jenis kayu yang ada di area hutan dikenal masyarakat adalah ramin (*Gonystylus sp*), bintangur (*Calophyllum sp*) dan pukul (*Shorea sp*).

Pada perkembangan saat ini hutan-hutan di wilayah ini telah banyak yang beralih menjadi kebun-kebun sawit. Hal ini berdampak pada berkurangnya luas hutan adat secara drastic karena sebagian besar warga Desa Tuak Abang bersedia menyerahkan lahannya untuk konsesi perkebunan sawit. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk mempertahankan biodiversitas dan pemanfaatan sumberdaya hutan adalah menyisihkan sebagian areal hutan menjadi hutan cadangan adat sekitar 80 ha di Dusun Sekedau 1.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tuak Abang di Dusun Bian diketahui bahwa masyarakat di Dusun Bian masih cukup tinggi interaksinya dengan hutan, terutama pemanfaatan hasil hutan untuk keperluan rumah tangga. Aktifitas yang umum dilakukan adalah mengambil rotan (digunakan untuk membuat pondok-pondok kecil, tudung saji tikar dan tanaman untuk anyaman tikar atau topi tradisional), mengambil madu dengan cara membuat tikung (untuk memenuhi kebutuhan sendiri) dan kadang masyarakat juga mengambil beberapa tanaman liar di hutan untuk pengobatan tradisional seperti sakit kuning (liver) dan sakit perut.

Selain itu, di wilayah Dusun Bian juga terdapat danau di dekat kawasan yang disebut Danau Benawa' (angker) yang merupakan danau jenis campuran rawa dan gambut. Masyarakat berinteraksi dengan hutan di sekitar danau lebih diutamakan untuk mengambil kayu. Wilayah danau ini termasuk areal yang dikeramatkan dan dianggap suci oleh masyarakat. Bentuk-bentuk pemanfaatan sumberdaya hutan diatur secara khusus oleh adat yang umumnya merupakan etnis suku dayak rambai.

Wilayah Selatan (lokasi sampel : Kec. Silat Hilir)

Hutan-hutan di wilayah selatan KSK agropolitan secara umum berada dalam satu hamparan hutan lindung Bukit Sebalang yang mencakup wilayah Kec. Seberuang, Silat Hilir dan Silat Hulu. Hutan Bukit Sebalang terdiri atas dua tipe, yaitu hutan hujan dataran rendah (lowland dipterocarp forest) di bagian bawah dan hutan gambut topogen di bagian atas bukit (topogen peat forest), sehingga wajar apabila di wilayah ini terdapat dua tipe air berupa air jernih dan air merah (gambut).

Hutan hujan dataran rendah merupakan tipe ekosistem yang dominan dijumpai di Pulau Kalimantan. Dipterocarpaceae dan lauraceae merupakan family pohon yang mendominasi tipe hutan ini. Hutan hujan dataran rendah ini tersebar di bagian tengah hingga selatan kawasan KSK Agropolitan, yaitu mulai dari Kec. Silat Hilir, Hulu Gurung hingga Kec. Pengkadan. Inventarisasi flora dilakukan pada lokasi sampel hutan Sui Mali Kec. Silat Hilir, kawasan hutan di wilayah ini berada dalam satu kesatuan mencakup dua desa, yaitu Desa Seberu dan Desa Palakota. Hasil inventarisasi tumbuhan di hutan lindung sui mali diperoleh sebanyak 13 famili dan 35 jenis pohon sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.5 Komposisi jenis pohon di hutan lindung Sui Mali-Sebalang Hulu (Bukit Sebalang)

No	Jenis	Famamili	Kelimpahan
1	<i>Driobalanop beccarii</i>	Dipterocarpaceae	Tinggi

FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Jenis	Famamili	Kelimpahan
2	<i>Hopea pedicellata</i>	Dipterocarpaceae	Tinggi
3	<i>Tristaniopsis whiteana</i>	Myrtaceae	Tinggi
4	<i>Shorea leprosula</i>	Dipterocarpaceae	Sedang
5	<i>Knema laurina</i>	Myristicaceae	Sedang
6	<i>Scorodocarpus borneensis</i>	Olacaceae	Sedang
7	<i>Litsea sp3</i>	Lauraceae	Sedang
8	<i>Syzygium sp</i>	Myrtaceae	Sedang
9	<i>Shorea bracteota</i>	Dipterocarpaceae	Sedang
10	<i>Hopea mengerawan</i>	Dipterocarpaceae	Sedang
11	<i>Eusyderoxylon zwageri</i>	Lauraceae	Sedang
12	<i>Diospyros elliptifolia</i>	Ebenaceae	Sedang
13	<i>Nephelium lappaceum</i>	Sapotaceae	Sedang
14	<i>Shorea becariana</i>	Dipterocarpaceae	Sedang
15	<i>Driobalanops lanceolata</i>	Dipterocarpaceae	Rendah
16	<i>Calophyllum inophyllum</i>	Calophyllaceae	Rendah
17	<i>Litsea sp</i>	Lauraceae	Rendah
18	<i>Lithocarpus Bancanus</i>	Fagaceae	Rendah
19	<i>Shorea havilandii</i>	Dipterocarpaceae	Rendah
20	<i>Neesia synandra</i>	Malvaceae	Rendah
21	<i>Litsea sp1</i>	Lauraceae	Rendah
22	<i>Litsea sp2</i>	Lauraceae	Rendah
23	<i>Driobalanops oblongifolia</i>	Dipterocarpaceae	Rendah
24	<i>Syzygium lepcooladum</i>	Myrtaceae	Rendah
25	<i>Quercus subsericea</i>	Fagaceae	Rendah
26	<i>Shorea parvifolia</i>	Dipterocarpaceae	Rendah
27	<i>Syzygium hirtum</i>	Myrtaceae	Rendah
28	<i>Driobalanops aromatica</i>	Dipterocarpaceae	Rendah
29	<i>Dracotomelon dao</i>	Anacardiaceae	Rendah
30	<i>Pentaspadon motleyi</i>	Anacardiaceae	Rendah
31	<i>Sindora Wallichii</i>	Fabaceae	Rendah
32	<i>Dacriodes sp</i>	Burseraceae	Rendah
33	<i>Knema latericia</i>	Myristicaceae	Rendah
34	<i>Shorea macrophylla</i>	Dipterocarpaceae	Rendah
35	<i>Knema hirtella</i>	Myristicaceae	Rendah
Jumlah kelimpahan pohon			270 bt/ha

Keterangan: Kelimpahan tinggi (> 20 bt/ha), sedang (10 – 20 bt/ha), rendah (< 10 bt/ha)

Dari tabel di atas diketahui bahwa jenis-jenis yang dominan di kawasan hutan sui mali adalah family dipterocarpaceae, myrtaceae, olacaceae dan lauraceae. Jenis kayu kapur (*Dryobalanops sp*), hopea (*Hopea sp*) dan pelawan (*Tristaniopsis whiteana*) merupakan jenis yang dominan. Jenis-jenis pohon ini juga merupakan sumber hasil kayu bagi masyarakat untuk bahan bangunan rumah (Gambar III.17).

Selain jenis-jenis pohon, hutan lindung sui mali juga dijumpai jenis-jenis rotan seperti jernang (*Daemonorops sp*) dan rebeh (*Calamus sp*). Hasil wawancara juga diketahui bahwa masyarakat sangat mengenal jenis-jenis tengkawang (*Shorea steptera*, *Shorea pinanga*, dan *Shorea macrophylla*), medang (*Litsea sp*) dan tulang ular (*Knema sp*).

Gambar III.17 Jenis-jenis pohon yang mendominasi hutan lindung Sui Mali (dari kiri: Dryobalanops, Hopea dan Shorea)



Sumber: Ichsan Suwandhi 2017

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Dusun Sui Mali diperoleh informasi bahwa interaksi masyarakat dengan hutan hanya dilakukan pada periode tertentu. Hutan lindung sui mali pada dasarnya telah diatur oleh adat terutama hanya untuk keperluan bahan bangunan rumah, namun demikian masih cukup banyak masyarakat yang membuka hutan untuk berladang dan penambangan emas ilegal di sepanjang sungai. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap aturan adat biasanya diselesaikan melalui sidang adat dan penerapan denda.

Berdasarkan hasil penelusuran jenis endemic dan jenis dilindungi diketahui bahwa berdasarkan IUCN redlist, semua jenis dari family Dipterocarpaceae memiliki status dilindungi, demikian juga berdasarkan PP No. 7 tahun 1999 tentang pengawetan keanekaragaman hayati. Selain itu juga terdapat jenis-jenis endemic Pulau Kalimantan yang keberadaannya sudah sangat jarang, yaitu kayu kulim (*Scorodocarpus boorneensis*) dari family Olacaceae dan mangga hutan (*Pentaspadon motleyi*) dari family Anacardiaceae. Jenis-jenis dari family Myristicaceae seperti *Knema* spp juga merupakan jenis endemic P. Kalimantan.

Wilayah Selatan-Timur (lokasi sampel: Kec. Hulu Gurung)

Wilayah selatan menuju timur KSK Agropolitan mencakup Kec. Hulu Gurung dan Kec. Pengkadan. Sebaran hutan-hutan alam banyak tersebar di wilayah Kec. Hulu Gurung khususnya kawasan hutan lindung Bukit Raya yang membentang hingga menyatu dengan hutan-hutan di Kec. Seberuang. Sedangkan hutan di Kec. Pengkadan lebih terkonsentrasi di ujung utara wilayah ini menyatu dengan hamparan hutan lindung di luar KSK agropolitan.

Berdasarkan hasil inventarisasi tumbuhan di lokasi sampel Kec. Hulu Gurung diketahui bahwa di wilayah ini terdiri atas dua tipe ekosistem, yaitu hutan hujan dataran rendah dan hutan kerangas. Hutan hujan dataran rendah umum dijumpai di wilayah hutan lindung

Beluan Komplek di Desa Lubuk Antuk, sedangkan hutan kerangas umum dijumpai di hutan lindung Bukit Raya Desa Tani Makmur.

Kawasan Hutan Lindung Beluan Komplek, Desa Lubuk Antuk

Kawasan hutan hujan dataran rendah di wilayah Hutan lindung yang ada di Lubuk Antuk disebut Beluan kompleks karena mencakup tiga wilayah dusun yaitu Beluan, Berasau dan Piyabung. Hasil inventarisasi tumbuhan di hutan lindung Beluan Komplek diperoleh sebanyak 17 famili dan 31 jenis pohon sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.6 Komposisi jenis pohon di hutan lindung Beluan Komplek, Desa Lubuk Antuk

No	JENIS	Famili	Kelimpahan
1	Artocarpus odoratissimus	Moraceae	Sedang
2	Shorea leprosula	Dipterocarpaceae	Sedang
3	Shorea seminis	Dipterocarpaceae	Sedang
4	Nephelium mutabile	Sapindaceae	Sedang
5	Myristica sp	Myristicaceae	Sedang
6	Hevea braziliensis	Euphorbiaceae	Sedang
7	Encosanthum paradoxum	Annonaceae	Sedang
8	Artocarpus esalticus	Moraceae	Sedang
9	Litsea angulata	Lauraceae	Sedang
10	Artocarpus anisophyllus	Moraceae	Sedang
11	Litsea henryi	Lauraceae	Sedang
12	Lithocarpus bancanus	Fagaceae	Sedang
13	Shorea Gisbersiana	Dipterocarpaceae	Sedang
14	Actiodaphne Glabra	Lauraceae	Sedang
15	Garcinia bancana	Clusiaceae	Sedang
16	Sandoricum beccarianum	Meliaceae	Rendah
17	Shorea palembanica	Dipterocarpaceae	Rendah
18	Actiodaphne sp1	Lauraceae	Rendah
19	Litsea Macrophylla	Lauraceae	Rendah
20	Albizia saman	Fabaceae	Rendah
21	Syzygium rostratum	Myrtaceae	Rendah
22	Durio Zibethinus	Bombacaceae	Rendah
23	Diospiros Macrophylla	Ebenaceae	Rendah
24	Spidium Javanica	Myrtaceae	Rendah
25	Pternandra galeata	Melastomataceae	Rendah
26	Palagium sp	Sapotaceae	Rendah
27	Knema elmeri	Myristicaceae	Rendah
28	Belucea pentamera	Melastomataceae	Rendah
29	Pentaspadon motleyi	Anacardiaceae	Rendah
30	Knema sp	Myristicaceae	Rendah
31	Parishia insignis	Anacardiaceae	Rendah
Total kelimpahan			220 bt/ha

Keterangan: Kelimpahan tinggi (> 20 bt/ha), sedang (10 – 20 bt/ha), rendah (< 10 bt/ha)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hutan lindung Beluan Komplek cenderung memiliki jenis-jenis yang berbeda dengan hutan lindung Sui Mali selain dipterocarpaceae dan lauraceae. Jenis-jenis dari family Moraceae, Sapindaceae dan Sapotaceae juga cukup mendominasi kawasan hutan ini. Hal ini disebabkan oleh kondisi hutan yang berada di sekitar sungai, sehingga membentuk tipe ekosistem tersendiri berupa ekosistem hutan riparian. Jenis tumbuhan penghasil buah cukup banyak dijumpai, diantaranya jenis durian (Durio sp) terap (Artocarpus spp), jambu-jambuan (Syzygium spp), rambutan hutan (Nephelium sp) dan manggis (Garcinia sp).

Gambar III.18 Contoh jenis-jenis pohon yan dijumpai di hutan Beluan Komplek (dari kiri: Shorea leprosula, Artocarpus altilis dan Durio zibethinus)



Sumber: Ichsan Suwandhi, 2017

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat juga diketahui bahwa di dalam hutan lindung Beluan Komplek terdapat pohon-pohon penghasil buah, diantaranya durian, rambutan hutan, langsung dan rukam. Hasil wawancara lebih lanjut dengan kepala adat Dusun Beluan diperoleh informasi bahwa bentuk interaksi masyarakat dengan hutan sudah mulai berkurang, kecuali pengambilan kayu untuk keperluan adat. Masyarakat telah memiliki kebun buah-buahan yang ditanam sejak dulu dan menjadi asset secara turun temurun, bibit tanaman diperoleh langsung dari hutan pada saat memanen buah, biji-biji yang diperoleh kemudian disebar di lahan pekarangan. Di wilayah ini juga sudah melakukan pertanian menetap dengan melakukan budidaya tanaman padi sawah sejak tahun 1970-an.

Berdasarkan kondisi di atas dapat diketahui bahwa wilayah hutan beluan memerlukan perlindungan yang ketat karena merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat lokal terutama sebagai sumber buah-buahan dan sebagai penyangga system hidrologi.

Kawasan Hutan Lindung Bukit Raya, Desa Tani Makmur

Tipe hutan kerangas murni dijumpai di kawasan hutan lindung Bukit Raya yang mencakup wilayah administrasi Desa Tani Makmur, khususnya Dusun Sui Medang dan Dusun Senai. Pada tipe hutan kerangas ini dicirikan dengan adanya lapisan pasir kuarsa sebagai media tumbuh bagi vegetasi di atasnya. Jenis-jenis pohon penciri hutan ini antara lain pelawan (*Syzygium* spp), cemara (*Casuarina* sp), kayu malam (*Diospyros* sp), dan jenis-jenis dari family dipterocarpaceae terutama resak (*Vatica* spp), damar (*Shorea* spp) dan hopea (*Hopea* spp). Hasil inventarisasi jenis-jenis pohon pada wilayah ini diperoleh sebanyak 17 jenis dari 8 family sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.7 Komposisi jenis pohon di hutan lindung Bukit Raya, Desa Tani Makmur

No	Jenis	Fam	Kelimpahan
1	<i>Syzygium havilandii</i>	Myrtaceae	Tinggi

No	Jenis	Fam	Kelimpahan
2	Vatica odorata	Dipterocarpaceae	Tinggi
3	Gluta renghas	Anacardiaceae	Tinggi
4	Litsea sp4	Lauraceae	Tinggi
5	Diospyros barneensis	Ebenaceae	Tinggi
6	Shorea leprosula	Dipterocarpaceae	Tinggi
7	Vatica rassak	Dipterocarpaceae	Tinggi
8	Hopea micrantha	Dipterocarpaceae	Sedang
9	Hopea mengerawan	Dipterocarpaceae	Sedang
10	Mangifera Indica	Anacardiaceae	Sedang
11	Syzygium attenuatum	Myrtaceae	Sedang
12	Shorea breacteota	Dipterocarpaceae	Sedang
13	Hopea penurosa	Dipterocarpaceae	Sedang
14	Calophyllum inophyllum	Clusiaceae	Sedang
15	Memecylon oleifolium	Melastomataceae	Sedang
16	Garcinia bancana	Clusssiaceae	Sedang
17	Lithocarpus sp	Fagaceae	Sedang
	Total kelimpahan		312.5 bt/ha

Keterangan: Kelimpahan tinggi (> 20 bt/ha), sedang (10 – 20 bt/ha), rendah (< 10 bt/ha)

Dari tabel di atas diketahui bahwa hutan kerangas cenderung memiliki kekayaan jenis yang rendah bila dibandingkan tipe hutan lainnya, namun memiliki jenis-jenis penciri yang khas seperti belaban merah, pelawan dan kayu malam, serta flora-flora unik lainnya seperti angrek dan kantong semar. Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa pohon-pohon lebih kecil-kecil pada stadium tiang tapi tumbuh sangat rapat. Jenis khas yang dijumpai di wilayah ini adalah damar (*Shorea* dan *hopea*), belaban merah (*Syzygium* sp) dan kayu malam (*Diospyros borneensis*).

Selain jenis-jenis pohon, kawasan hutan bukit raya ini umum dijumpai jenis-jenis tumbuhan herba, semak dan palem. Jenis-jenis yang khas antara lain entuyut/kantong semar (*Nepenthes* spp), ubah badi untuk sarang semut dan berbagai jenis rotan (Gambar III.19).

Hasil wawancara dengan tokoh sesepuh Dusun Sui Medang diperoleh informasi jenis-jenis tumbuhan yang dimanfaatkan masyarakat antara lain buah-buahan seperti durian, rambai, puak, dan sibau (sejenis rambutan: *Nephelium* sp); kayu-kayuan terutama meranti-merantian (*Shorea* spp) dan resak (*Vatica* spp); bahan obat-obatan antara lain tamu toga, pasak bumi, sarang semut (dalam tumbuhan bernama buah badi); dan bahan anyaman berupa jenis-jenis rotan seperti soga, tunggal, marau, udang, soru dan jernang.

Gambar III.19 Jenis-jenis tumbuhan khas yang ditemukan di hutan Sui Medang



jenis kantong semar (*Nepenthes* sp) dan ubah badi (tumbuhan sarang semut)



jenis-jenis rotan yang umum dimanfaatkan masyarakat

Sumber: Ichsan Suwandhi, 2017

Hasil survey juga menemukan jenis-jenis anggrek (orchidaceae) menempel pada pohon-pohon pelawan dan kayu malam seperti anggrek ekor tikus dan anggrek vanda (Gambar III.20). Jenis-jenis anggrek ini termasuk dilindungi berdasarkan PP no. 7/1999 tentang jenis-jenis tumbuhan dan satwa dilindungi.

Gambar III.20 jenis-jenis anggrek yang dijumpai di hutan Sui Medang.



A. anggrek ekor tikus, B. anggrek vanda

Foto: Ichsan Suwandhi, 2017

3.3.3 Kekayaan Fauna

Kekayaan jenis-jenis fauna di wilayah KSK agropolitan masih cukup tinggi terutama jenis-jenis burung baik berdasarkan data survey lapangan maupun informasi hasil wawancara dengan masyarakat sekitar hutan. Hasil pengamatan secara keseluruhan diperoleh sebanyak 186 jenis fauna, mencakup aves (88 spesies), ampibia (4 spesies), reptilian (6 spesies) dan mamalia (16 famili). Informasi dari penduduk local tidak kurang dari 40 spesies mamalia. Hasil inventarisasi jenis-jenis fauna dan sebarannya di lokasi sampel disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.8 Kekayaan fauna di seluruh lokasi pengamatan di wilayah KSK agropolitan

No	Family	Nama Indonesia	Nama Inggris	Nama Ilmiah	Lokasi			
					Semitau (utara)	Silat Hilir (selatan)	Hulu Gurung (sel-timur)	
					A	B	C	D
Aves (burung) ¹⁾								
1	Accipitridae	Elang-ular bido	Crested Serpent-Eagle	Spilornis cheela			√	
2	Aegithinidae	Cipoh jantung	Green lora	Aegithina viridissima	√			
3	Aegithinidae	Cipoh kacat	Common lora	Aegithina tiphia	√			√
4	Alcedinidae	Cekakak batu	Banded Kingfisher	Lacedo pulchella	√			
5	Alcedinidae	Rajaudang punggung merah	Rufous- Kingfisher	Ceyx rufidorsa			√	√
6	Apodidae	Walet sapi	Glossy Swiftlet	Collocalia esculenta	√		√	
7	Bucerotidae	Enggang badak	Rhinoceros Hornbill	Rhinoplax rhinoceros				√
8	Bucerotidae	Enggang klihingan	Bushy-crested Hornbill	Anorhinus galeritus				√
9	Bucerotidae	Julang emas	Wrinkled Hornbill	Aceros undulatus		√		
10	Bucerotidae	Kangkareng hitam	Black Hornbill	Antracoceros malayanus				√
11	Chloropseidae	Cica-daun besar	Greater Green Leafbird	Chloropsis sonnerati	√	√		
12	Chloropseidae	Cica-daun kecil	Lesser Green Leafbird	Chloropsis cyanopogon	√		√	
13	Chloropseidae	Cica-daun sayap-biru	Blue-winged Leafbird	Chloropsis cochinchinensis				√
14	Cisticolidae	Perenjak rawa	Yellow-bellied Prinia	Prinia flaviventris		√	√	
15	Columbidae	Delimukan zamrud	Emerald Dove	Chalcophaps indica		√		√
16	Corvidae	Tangkar kambing	Bornean black Magpie	Platysmurus atterimus			√	
17	Cuculidae	Bubut alang-alang	Lesser Coucal	Centropus bengalensis	√			
18	Cuculidae	Bubut besar	Greater Coucal	Centropus sinensis			√	
19	Cuculidae	Kangkok india	Indian Cuckoo	Cuculus micropterus		√		
20	Cuculidae	Kedasi Hitam	Square-tailed drongo-cuckoo	Surniculus lugubris	√			
21	Cuculidae	Wiwik kelabu	Plaintive Cuckoo	Cacomantis merulinus			√	
22	Dicaeidae	Cabai bunga-api	Orange-bellied Flowerpecker	Dicaeum trigonostigma	√	√	√	
23	Dicaeidae	Cabai merah	Scarlet-backed Flowerpecker	Dicaeum cruentatum	√			√
24	Dicaeidae	Pentis kalimantan	Yellow-rumped Flowerpecker	Prionochilus xanthopygius	√			
25	Dicaeidae	Pentis raja	Yellow-breasted Flowerpecker	Prionochilus maculatus				√
26	Dicruridae	Srigunting batu	Greater Racket-tailed Drongo	Dicrurus paradiseus			√	
27	Estrildidae	Bondol kalimantan	Dusky Munia	Lonchura fuscans	√		√	
28	Eurylaimidae	Madi-hijau kecil	Green Broadbill	Calyptomena viridis		√		
29	Eurylaimidae	Sempur-hujan darat	Black-and-yellow Broadbill	Eurylaimus ochromalus	√	√		√
30	Eurylaimidae	Sempur-hujan sungai	Black-and-red Broadbill	Cymbirhynchus macrorhynchos		√	√	

FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STARTEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Family	Nama Indonesia	Nama Inggris	Nama Ilmiah	Lokasi			
					Semitau (utara)	Silat Hilir (selatan)	Hulu Gurung (sel-timur)	
					A	B	C	D
31	Falconidae	Alap-alap capung	Black-thighed Falconet	Microhierax fringillarius	√			
32	Hirundinidae	Layang-layang api	Barn Swallow	Hirundo rustica				√
33	Hirundinidae	Layang-layang batu	Pacific Swallow	Hirundo tahitica				√
34	Megalaimidae	Takur warna-warni	Red-throated Barbet	Megalaima mystacophanos		√		
35	Monarchidae	Kehicap ranting	Black-naped Monarch	Hypothymis azurea		√		
36	Monarchidae	Seriwang asia	Indian Paradise-Flycatcher	Terpsiphone paradisi		√		√
37	Muscicapidae	Kucica hutan	White-rumped Shama	Kittacincla malabarica	√			
38	Muscicapidae	Meninting cegar	Chestnut-naped Forktail	Enicurus ruficapillus				√
39	Muscicapidae	Sikatan kalimantan	Bornean Blue-Flycatcher	Cyornis superbus				√
40	Muscicapidae	Sikatan melayu	Malaysian Blue-Flycatcher	Cyornis turcosus	√			
41	Nectariniidae	Burung-madu pengantin	Maroon-bellied sunbird	Leptocoma brasiliana				√
42	Nectariniidae	Burung-madu belukar	Ruby-cheeked Sunbird	Chalcoparia singalensis				√
43	Nectariniidae	Burung-madu kelapa	Brown-throated Sunbird	Anthreptes malacensis				√
44	Nectariniidae	Burung-madu polos	Plain Sunbird	Anthreptes simplex	√	√	√	√
45	Nectariniidae	Burung madu kecil	Purple-Throated Sunbird	Leptocoma sperata	√			
46	Nectariniidae	Burung-madu rimba	Purple-naped Sunbird	Arachnothera hypogrammica	√			
47	Nectariniidae	Burung-madu sepah-raja	Eastern Crimson Sunbird	Aethopyga siparaja				√
48	Nectariniidae	Burung-madu sriganti	Olive-backed Sunbird	Cinnyris jugularis				√
49	Nectariniidae	Pijantung kampung	Thick-billed Spiderhunter	Arachnothera crassirostris				√
50	Nectariniidae	Pijantung kecil	Little Spiderhunter	Arachnothera longirostra	√	√	√	√
51	Passeridae	Burung-gereja erasia	Eurasian Tree Sparrow	Passer montanus				√
52	Phasianidae	Puyuh tarun-tarun	Ferruginous Partridge	Caloperdix oculus				√
53	Picidae	Caladi badok	Buff-necked Woodpecker	Meiglyptes tukki				√
54	Picidae	Pelatuk kijang	Rufous Woodpecker	Celeus brachyurus		√		
55	Picidae	Pelatuk merah	Banded Woodpecker	Chrysophlegma miniaceum		√		
56	Picidae	Tukik tikus	Rufous Piculet	Sasia abnormis				√
57	Pittidae	Paok hijau	Western Hooded Pitta	Pitta sordida				√
58	Vangidae	Philentoma sayap-merah	Rufous-winged Philentoma	Philentoma pyrhoptera				√
59	Psittacidae	Betet ekor-panjang	Long-tailed Parakeet	Psittacula longicauda				√
60	Psittacidae	Serindit melayu	Blue-crowned Hanging-Parrot	Loriculus galgulus		√		√
61	Pycnonotidae	Brinji mata-putih	Buff-vented Bulbul	Iole olivacea	√			
62	Pycnonotidae	Cucak kuricang	Black-headed Bulbul	Pycnonotus atriceps	√			
63	Pycnonotidae	Merbah belukar	Olive-winged Bulbul	Pycnonotus plumosus				√

FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STARTEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Family	Nama Indonesia	Nama Inggris	Nama Ilmiah	Lokasi			
					Semita (utara)	Silat Hilir (selatan)	Hulu Gurung (sel-timur)	
					A	B	C	D
64	Pycnonotidae	Merbah cerukcuk	Yellow-vented Bulbul	<i>Pycnonotus goiavier</i>	√			
65	Pycnonotidae	Merbah corok-corok	Cream-vented Bulbul	<i>Pycnonotus simplex</i>			√	
66	Megalaimidae	Takur ampis	Bornean Brown Barbet	<i>Calorhamphus fuliginosus</i>				√
67	Megalaimidae	Takur gedang	Gold-whiskered Barbet	<i>Psilopogon chrysopogon</i>		√		
68	Megalaimidae	Takur tenggeret	Blue-eared Barbet	<i>Psilopogon australis</i>	√	√	√	√
69	Megalaimidae	Takur tutut	Red-crowned Barbet	<i>Psilopogon rafflesii</i>	√			
70	Rhipiduridae	Kipasan belang	Pied Fantail	<i>Rhipidura javanica</i>			√	
71	Sittidae	Munguk beledu	Velvet-fronted Nuthatch	<i>Sitta frontalis</i>				√
72	Sturnidae	Tiong emas	Common Hill Myna	<i>Gracula religiosa</i>				√
73	Sylviidae	Cinenen belukar	Dark-necked Tailorbird	<i>Orthotomus atrogularis</i>	√		√	√
74	Sylviidae	Cinenen kelabu	Ashy Tailorbird	<i>Orthotomus ruficeps</i>		√		√
75	Sylviidae	Cinenen merah	Rufous-tailed Tailorbird	<i>Orthotomus sericeus</i>	√		√	
76	Timaliidae	Asi kumis	Moustached Babbler	<i>Malacopteron magnirostre</i>	√			
77	Timaliidae	Asi topi-jelaga	Sooty-capped Babbler	<i>Malacopteron affine</i>	√			
78	Timaliidae	Asi topi-sisik	Scaly-crowned Babbler	<i>Malacopteron cinereum</i>	√			
79	Timaliidae	Ciung-air coreng	Bold-striped Tit-Babbler	<i>Mixornis bornensis</i>	√	√		
80	Timaliidae	Ciung-air pongpong	Fluffy-backed Tit-Babbler	<i>Macronous ptilosus</i>				√
81	Timaliidae	Pelanduk dada-putih	White-chested Babbler	<i>Trichastoma rostratum</i>			√	
82	Timaliidae	Pelanduk ekor-pendek	Short-tailed Babbler	<i>Malacocincla malaccensis</i>			√	
83	Timaliidae	Pelanduk merah	Ferruginous Babbler	<i>Trichastoma bicolor</i>		√		√
84	Timaliidae	Pelanduk topi-hitam	Black-capped Babbler	<i>Pellorneum capistratum</i>			√	
85	Timaliidae	Tepus merbah-sampah	Chestnut-winged Babbler	<i>Stachyris erythroptera</i>	√			
86	Timaliidae	Wergan coklat	Brown Fulvetta	<i>Alcippe brunneicauda</i>				√
87	Trogonidae	Luntur diard	Diard's Trogon	<i>Harpactes diardii</i>		√		
88	Trogonidae	Luntur tunggir-coklat	Cinnamon-rumped Trogon	<i>Harpactes orrhophaeus</i>		√	√	
Amphibian2)								
1	Dicroglosidae		Large-headed Frog	<i>Limnonectes kuhlii</i>			√	
2	Dicroglosidae		Asian Brackish Frog	<i>Fejervarya cancrivora</i>	√			
3	Ranidae		Mindanao Splash Frog	<i>Staurois natator</i>			√	
4	Microhylidae	Katak lubang pohon		<i>Metaphrynella sundana</i>				
Reptilian3)								
1	Agamidae		Malayan Crested Lizard	<i>Gonocephalus grandis</i>			√	
2	Gekkonidae	Tokek		<i>Gecko sp</i>	√			

FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STARTEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Family	Nama Indonesia	Nama Inggris	Nama Ilmiah	Lokasi			
					Semitau (utara)	Silat Hilir (selatan)	Hulu Gurung (sel-timur)	
							A	B
3	Geoemydidae	Kura-kura duri	Spiny Turtle	Heosemys spinosa		√		
4	Muridae			Draco sp			√	
5	Scincidae	bengkarung	Common sun skink	Eutropis multifasciata	√			
6	Viperidae	ular viper hijau	Bornean Keeled Green Pit Viper	Tropidolaemus subannulatus		√		
Mammals4)								
1	Ursidae	Beruang madu	Sun Bear	Helarctos malayanus	√		√	√
2	Cercopithecidae	Monyet ekor panjang	Nicobar Long-tailed Macaque	Macaca fascicularis	√		√	√
3	Cercopithecidae	Bekantan / Empliau / rancung	Proboscis Monkey	Nasalis larvatus	√	√		
4	Cercopithecidae		White-fronted Langur	Presbytis frontata	√		√	
5	Cercopithecidae	Klasi / Kelasi	Sarawak langur	Presbytis chrysomelas		√		
6	Cercopithecidae	Beruk	Southern Pig-tailed Macaque	Macaca nemestrina			√	√
7	Hylobatidae	Empliau bulan / Owa muka putih	Abbot gibbon	Hylobates abbotti		√		
8	Cercopithecidae	Kelasi	Red langur / Maroon Leaf Monkey	Presbytis rubicunda	√	√	√	√
9	Viveridae	Musang	Malay weasel	Mustela nudipes	√			
10	Viveridae	Musang akar	Bornean stripped palm civet	Acrtogallidia stigmata	√	√		√
11	Viveridae	Engkuli / Musang	Malay civet	Vivera tangalunga	√	√		√
12	Viveridae	Musang putih	Island palm civet	Paradoxurus phillippinensis		√		√
13	Viveridae	Musang	Hose's civet	Hemigalus hosei	√			√
14	Viveridae	Binturong	Binturong	Arctistis binturong	√			
15	Felidae	Macan / Kucing hutan	Leopard Cat	Prionailurus bengalensis borneonensis	√	√	√	√
16	Felidae	Kucing hutan	Marbled cat	Pardofelis marmorata	√			
17	Felidae	Kucing hutan	Flat headed cat	Felis planiceps	√			
18	Felidae	Macan tutul / Kucing hutan	Bornean clouded leopard	Neofelis diardi bornensis	√			√
19	Suidae	Babi hutan	Bearded pig	Sus barbatus	√		√	√
20	Hystricidae	Landak / angkis	Bornean porcupine	Threcurus crassispinis	√			√
21	Hystricidae	Landak	Malayan Porcupine	Hystrix brachyura	√		√	√
22	Cervidae	Kijang	Bornean red muntjac	Muntiacus muntjak	√		√	√
23	Tragulidae	Pelanduk	Greater mousedeer	Tragulus napu	√	√	√	√
24	Tragulidae	rusa	Sambar deer	Cervus unicolor	√			√
25	Tragulidae	Kancil	Lesser mousedeer	Tragulus kanchil	√			√
26	Tragulidae	Kijang (??)	Bornean yellow muntjak	Mun atherodes	√			√

FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STARTEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Family	Nama Indonesia	Nama Inggris	Nama Ilmiah	Lokasi			
					Semitau (utara)	Silat Hilir (selatan)	Hulu Gurung (sel-timur)	
					A	B	C	D
27	Tarsiidae	Tarsius	Horsfield's Tarsier	Tarsius bancanus	√			
28	Tarsiidae	Bengkang / ingkat	Western tarsier	Cephalopacus bancanus	√	√		
29	Lorisidae	Bengkang	Slow loris	Nycticebus kayan	√			
30	Lorisidae	Kukang	Bornean slow loris	Nycticebus borneanus		√		
31	Lorisidae	ingkat	Banka slow loris	Nyscticebus bancanus	√			√
32	Manidae	Trenggiling	Sunda pangolin	Manis javanica	√	√	√	√
33	Sciuridae	Tupai ekor tebal	Tufted giant squirrel	Reithosciurus macrotis	√			
34	Sciuridae	Tupai kerdil	Least Pygmy Squirrel	Exilisciurus exilis	√		√	
35	Sciuridae	Tupai merah	Mongoose	Urva brachyurus	√			
36	Sciuridae	Tupai / Pon cin	Bornean pigmy squirrel	Exilisciurus exilis			√	
37	Sciuridae	Tupai kecil	Black eared pigmy squirrel					√
38	Sciuridae	Tupai	White head pigmy squirrel	Exilisciurus whiteheadi				√
39	Sciuridae	Tupai (???)	Plantain squirell	Callosciurus notatus	√		√	
40	Sciuridae	Tupai	Giant Squirrel	Ratufa affinis				√
41	Sciuridae	Tajah / tupai	Horse tailed squirrel	Sundasciurus hippurus borneensis			√	√
42	Sciuridae	U i tinggang / tupai	Prevost's squirrel	Callosciurus prevostii borneensis			√	√
43	Sciuridae	Kubung	Thomas flying squirrel	Aeromys thomasi	√			√
44	Sciuridae	Kubung	Red cheek flying squirrel	Hylopetes spadiceus	√	√		√
45	Sciuridae	Kubung	Red giant flying squirrel	Petaurista petaurista	√	√		
46	Sciuridae	Tando	Flying squirrel	Petinomys setosus	√			√
47	Cynocephalidae	Kubung gantung	Bornean colugo	Galeopterus borneanus		√		
48	Herpestidae	Mantuk / Empangan	Shor tailed mongoose	Urva brachyurus		√		
49	Herpestidae	Masak pisang	Collared mangoes	Urva semitorquata		√		
50	Mustellide	Masak pisang	Yellow throated marten	Martes flavigula	√			
51	Mustellidae	Pusuh / Berang berang	Smooth otter	Lutrogale perspicillata	√	√		√
52	Mustellidae	Ringin / Berang berang	Hairy nosed otter	Lutra sumatrana	√	√		√
53	Vespertilionidae	Pedan	Long tongued nectar bat	Macroglossus minimus	√			
54	Vespertilionidae	Kelelawar	Fruits bat	Cynopterus	√	√		
55	Vespertilionidae	Ntama / kelelawar	Bornean fruit bat	Aethalops aequalis			√	√
56	Vespertilionidae	Kelelawar kecil (?)	Spotted winged fruit bat	Balionycteris maculata	√			
57	Vespertilionidae	Kelelawar kecil (?)	Black capped fruit bat	Chironax melanocephalus	√			
58	Muridae	Tikus	House rat	Rattus tanezumi	√			√

FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU

Keterangan: 1 diidentifikasi menggunakan Phillips et al (2013) Phillips' Field Guide to The Birds of Borneo; 2 Robert F. Inger et al : a field guide to the frog of borneo; 3 Robert B. Stuinberg et al: A Field Guide to The Snakes of Borneo; 4 Phillips et al (2016) Phillips Guide to The Mammals of Borneo. A Hutan adat Sekedau, Tuak Abang, B. Hutan Sui Mali, Seberu, C. Hutan Beluan Komplek, Lubuk Antuk, D. Hutan Bukit Raya, Tani Makmur

Dari tabel di atas diketahui bahwa jenis-jenis fauna tertentu hanya dijumpai pada satu wilayah saja atau tersebar pada dua dan beberapa wilayah. Hal ini mengindikasikan bahwa pada masing-masing wilayah memiliki kekhasan atau keunikan jenis-jenis fauna yang diduga kuat sangat terkait dengan tipe-tipe ekosistem hutannya.

Kecamatan Semitau

Wilayah Kec. Semitau yang memiliki hutan cadangan adat seluas 80 ha berupa hutan rawa gambut masih memiliki keragaman fauna yang tinggi khususnya jenis-jenis burung. Keberadaan hutan-hutan cadangan ini menjadi penting sebagai kantong biodiversity, terutama bagi kehidupan fauna yang secara umum sudah terdesak oleh perkebunan sawit. Di dalam kawasan hutan Sekedau dan sekitarnya dijumpai sebanyak 41 jenis burung, 3 jenis reptilian dan 1 jenis ampibi. Di wilayah ini sudah jarang dijumpai mamalia liar seperti primate, macan dan pelanduk. Jenis-jenis aves relative masih bervariasi, didominasi burung-burung pemakan buah (pycnonotidae) dan jenis-jenis burung pengisap madu (nectaridae).

Gambar III.21 Plain sunbird (*Antrephes simplex*) sejenis burung madu dan Purple nepped sunbird (*Arachnothera hypogrammica*), contoh jenis burung yang dijumpai di hutan cadangan Dusun Sekedau, Kec. Semitau



Sumber: Arif Rahman, 2017

Dari tabel III.16 di atas diketahui bahwa di wilayah Kec. Semitau terdapat jenis-jenis fauna yang hanya dijumpai di wilayah ini. Hal diduga merupakan jenis-jenis khas yang ada di areal hutan rawa gambut, yaitu 17 jenis burung seperti Cipoh jantung/ Green Iora (*Aegithina viridissima*), Cekakak batu/ Banded Kingfisher (*Lacedo pulchella*), Kedasi Hitam/ Square-tailed drongo-cuckoo (*Surniculus lugubris*), bubut alang-alang/ Lesser Coucal (*Centropus*

bengalensis), pentis Kalimantan/ Yellow-rumped Flowerpecker (*Prionochilus xanthopygius*), alap-alap capung/ Black-thighed Falconet (*Microhierax fringillarius*), kucing hutan/ White-rumped Shama (*Kittacincla malabarica*), sikatan melayu/ Malaysian Blue-Flycatcher (*Cyornis turcosus*), burung madu kecil/ Purple-Throated Sunbird (*Leptocoma sperata*), dan burung madu rimba/ Purple-naped Sunbird (*Arachnothera hypogrammica*); satu jenis katak Asian Brackish Frog (*Fejervarya cancrivora*); dan dua jenis reptile seperti tokek (*Gecko sp*) dan bengkarung (*Eutropis multifasciata*).

Kecamatan Silat Hilir

Wilayah Kec. Silat Hilir secara umum didominasi oleh hutan hujan dataran rendah dan sebagian lagi berupa hutan gambut topogen memiliki kekayaan jenis fauna yang cukup tinggi. Hasil inventarisasi fauna secara keseluruhan di wilayah Kec. Silat Hilir diperoleh sebanyak 36 jenis burung, 2 jenis reptile dan 3 jenis mamalia.

Hutan di wilayah Kec. Silat Hilir memiliki kekayaan jenis fauna khas dan endemic Pulau Kalimantan, diantaranya adalah jenis reptile kura-kura duri/spiny turtle (*Heosemys spinosa*), ular viper hijau/Bornean green keeled pit viper (*Tropidolaemus subannulatus*); dan 9 jenis burung yang hanya dijumpai di wilayah ini diantaranya julang emas/wrinkled Hornbill (*Aceros undulates*), kangkok india/ Indian Cuckoo (*Cuculus micropterus*), madi hijau kecil/ Green Broadbill (*Calyptomena viridis*), takur warna warni/ Red-throated Barbet (*Megalaima mystacophanos*), kehicap ranting/ Black-naped Monarch (*Hypothymis azurea*), pelatuk kijang/ Rufous Woodpecker (*Celeus brachyurus*), pelatuk merah/Banded Woodpecker (*Chrysophlegma miniaceum*), dan takur gedang/Gold-whiskered Barbet (*Psilopogon chrysopogon*).

Gambar III.22 Fronted-velvet nuthatch (*Sitta frontalis*) dan Seriwing asia/Indian paradise flycatcher (*Terpsiphone paradisi*), contoh jenis burung yang dijumpai di Hutan Sui Mali, Desa Seberu Kec. Silat Hilir



Sumber: Arif Rahman, 2017

Kecamatan Hulu Gurung

Hasil inventarisasi fauna di wilayah Kec. Hulu Gurung, pada kawasan hutan Beluan Desa Lubuk Antuk diperoleh sebanyak 38 jenis burung, 4 jenis amfibi, 2 jenis reptile dan 6 jenis mamalia. Sementara itu di hutan Bukit Raya Desa Tani Makmur diperoleh sebanyak 24 jenis burung dan 9 jenis mamalia. Dari seluruh wilayah pengamatan dapat diketahui bahwa hutan Beluan Komplek di Desa Lubuk Antuk merupakan lokasi dengan kekayaan jenis fauna tertinggi dibandingkan wilayah-wilayah lainnya. Hal ini didukung oleh kondisi hutan yang secara umum terjaga dengan baik dan tipe ekosistem khusus berupa hutan riparian yang diapit oleh dua sungai dimana jenis-jenis fauna cukup banyak terpusat di wilayah ini.

Jenis-jenis burung yang hanya dijumpai di wilayah hutan beluan diantaranya adalah elang ular bido/Crested Serpent-Eagle (*Spilornis cheela*), tangkar kambing/ Bornean black Magpie (*Platysmurus atterimus*) yang merupakan jenis endemik, bubut besar/ Greater Coucal (*Centropus sinensis*), srigunting batu/ Greater Racket-tailed Drongo (*Dicrurus paradiseus*), sikatan Kalimantan/ Bornean Blue-Flycatcher (*Cyornis superbus*), beberapa jenis burung madu, paok hijau/ Western Hooded Pitta (*Pitta sordida*), merbah corok-corok/ Cream-vented Bulbul (*Pycnonotus simplex*), pelanduk dada putih, pelanduk ekor merah dan pelanduk topi hitam, serta beberapa jenis lainnya. Selain jenis-jenis burung, di areal hutan beluan juga dijumpai jenis-jenis reptile dan ampibi yang cukup unik, yaitu sejenis kadal dan katak (Gambar III.23).

Gambar III.23 *Ganocephalus grandis* (reptilian) dan *Staorois natator* (ampibia) yang dijumpai di Hutan Beluan Komplek, Desa Lubuk Antuk Kec. Hulu Gurung



Foto: Arif Rahman 2017

Di wilayah hutan ini juga dijumpai jenis mamalia unik, yaitu tupai kerdil/ Least Pygmy Squirrel (*Exilisciurus exilis*). Tupai kerdil ini berukuran sangat kecil dibandingkan tupai-tupai pada umumnya yang diduga hanya dijumpai di Kapuas Hulu (Gambar III.24).

Gambar III.24 Tupai kerdil/ Least Pygmy Squirrel (*Exilisciurus exilis*) yang hanya dijumpai di hutan Beluan Komplek, Desa Lubuk Antuk Kec. Hulu Gurung



Sumber: Arif Rahman 2017

Selain fauna-fauna hutan beluan, di wilayah Kec. Hulu Gurung juga dijumpai jenis-jenis fauna yang unik dan khas diduga merupakan penciri dari hutan bertipe kerangas yang tersebar dalam hamparan hutan bukit raya Desa Tani Makmur, khususnya di wilayah Dusun Sui Medang. Jenis-jenis burung yang dijumpai di wilayah ini memang lebih sedikit dibandingkan wilayah lainnya, tetapi memiliki tingkat endemisitas yang cukup tinggi diantaranya adalah ciung air pongpong/Fluffy-backed Tit-Babbler (*Macronous ptilosus*), munguk beledu/ Velvet-fronted Nuthatch (*Sitta frontalis*), toing emas/Common Hill Myna (*Gaccula religinosa*) dan tukik tikus/ Rufous Piculet (*Sasia abnormis*), serta beberapa jenis lainnya.

Gambar III.25 Fluffy-backed tit babbler (*Macronus ptilosus*) contoh jenis burung yang dijumpai di hutan Bukit Raya Sui Medang, Desa Tani Makmur Kec. Hulu Gurung



Foto: Arif Rahman, 2017

Hutan bukit raya juga memiliki kekayaan jenis-jenis mamalia yang relative sama dengan hutan beluan, beberapa jenis yang umum dijumpai di wilayah ini antara lain beberapa jenis primate (*Macaca spp* dan *Presbytis spp*), landak (*Hystrix brachyura*), trenggiling (*Manis javanica*), kijang (*Muntiacus muntjak*), pelanduk (*Tragulus napu*) dan beruang madu (*Helarctos malayanus*).

Status perlindungan dan konservasi

Berdasarkan status perlindungan dan konservasinya diketahui bahwa sebagian besar jenis-jenis fauna yang dijumpai di wilayah KSK Agropolitan merupakan jenis-jenis yang dilindungi. Selanjutnya dari jenis-jenis yang dilindungi diketahui terdapat fauna-fauna yang berstatus terancam dalam kategori vulnerable dan endanger sesuai kriteria IUCN, serta appendix I dan II kriteria CITES (Tabel III.9). Status perlindungan seluruh jenis fauna yang dijumpai secara lengkap disajikan pada Lampiran 3.3.3.

Tabel III.9 Status konservasi jenis-jenis fauna dilindungi berdasarkan kriteria IUCN dan CITES

No	Family	Nama Indonesia	Nama Inggris	Nama Ilmiah	CITES	IUCN
Aves						
1	Chloropseidae	Cica-daun besar	Greater Green Leafbird	<i>Chloropsis sonnerati*</i>		VU
2	Corvidae	Tangkar kambing	Bornean black Magpie	<i>Platysmurus atterimus*</i>		NT
3	Estrildidae	Bondol kalimantan	Dusky Munia	<i>Lonchura fuscans</i>		LC

FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Family	Nama Indonesia	Nama Inggris	Nama Ilmiah	CITES	IUCN
4	Falconidae	Alap-alap capung	Black-thighed Falconet	<i>Microhierax fringillarius</i>	II	LC
5	Nectariniidae	Burung-madu pengantin	Maroon-bellied sunbird	<i>Leptocoma brasiliana</i>		LC
6	Nectariniidae	Burung-madu belukar	Ruby-cheeked Sunbird	<i>Chalcoparia singalensis</i>		LC
7	Nectariniidae	Burung-madu kelapa	Brown-throated Sunbird	<i>Anthreptes malacensis</i>		LC
8	Nectariniidae	Burung-madu polos	Plain Sunbird	<i>Anthreptes simplex</i>		LC
9	Nectariniidae	Burung madu	Purple-Throated Sunbird	<i>Leptocoma sperata</i>		LC
10	Nectariniidae	Burung-madu rimba	Purple-naped Sunbird	<i>Arachnothera hypogrammica</i>		LC
11	Nectariniidae	Burung-madu sepah-raja	Eastern Crimson Sunbird	<i>Aethopyga siparaja</i>		LC
12	Nectariniidae	Burung-madu sriganti	Olive-backed Sunbird	<i>Cinnyris jugularis</i>		LC
13	Nectariniidae	Pijantung kampung	Thick-billed Spiderhunter	<i>Arachnothera crassirostris</i>		LC
14	Nectariniidae	Pijantung kecil	Little Spiderhunter	<i>Arachnothera longirostra</i>		LC
15	Pittidae	Paok hijau	Western Hooded Pitta	<i>Pitta sordida</i>		LC
16	Psittacidae	Betet ekor-panjang	Long-tailed Parakeet	<i>Psittacula longicauda</i>	II	NT
17	Psittacidae	Serindit melayu	Blue-crowned Hanging-Parrot	<i>Loriculus galgulus</i>	II	LC
18	Rhipiduridae	Kipasan belang	Pied Fantail	<i>Rhipidura javanica</i>		LC
19	Sturnidae	Tiong emas	Common Hill Myna	<i>Gracula religiosa</i>	II	LC
20	Trogonidae	Luntur diard	Diard's Trogon	<i>Harpactes diardii</i>		NT
21	Trogonidae	Luntur tunggir-coklat	Cinnamon-rumped Trogon	<i>Harpactes orrhophaeus</i>		NT
Amphibi						
22	Geoemydidae	Kura-kura duri	Spiny Turtle	<i>Heosemys spinosa</i>	II	EN
Mamals						
23	Cercopithecidae	Bekantan	Proboscis Monkey	<i>Nasalis larvatus</i>	I	EN
24	Cercopithecidae		White-fronted Langur	<i>Presbytis frontata</i>	II	VU
25	Cercopithecidae	Beruk	Southern Pig-tailed Macaque	<i>Macaca nemestrina</i>	II	VU
26	Cercopithecidae	Kelasi	Maroon Leaf Monkey	<i>Presbytis rubicunda</i>	II	LC
27	Cervidae	Kijang	Bornean red muntjak	<i>Muntiacus muntjak</i>		LC
28	Felidae	Kucing hutan	Leopard Cat	<i>Prionailurus bengalensis</i>	I/II	LC
29	Hystricidae	Landak	Malayan Porcupine	<i>Hystrix brachyura</i>		LC
30	Manidae	Trenggiling	Sunda pangolin	<i>Manis javanica</i>	II	CR
31	Tarsiidae	Tarsius	Horsfield's Tarsier	<i>Tarsius bancanus</i>	II	VU
32	Tragulidae	Pelanduk	Greater oriental chevrotain	<i>Tragulus napu</i>		LC
33	Ursidae	Beruang madu	Sun Bear	<i>Helarctos malayanus</i>	I	VU

* endemik kalimantan

Dari tabel di atas diketahui terdapat dua jenis burung merupakan spesies endemik pulau Kalimantan, yaitu cica daun besar (*Chloropsis sonnerati*) dan tangkar kambing (*Platysmurus*)

atterimus). Dari seluruh jenis fauna di atas diketahui burung cica daun besar sudah berstatus vulnerable (VU), diikuti oleh tiga jenis mamalia meliputi langur putih (*Presbytis frontata*), beruk (*Macaca nemestrina*) dan beruang madu (*Helarctos malayanus*). Dua jenis lainnya terdata berstatus terancam punah (EN: endangered) yaitu kura-kura duri (*Heosemys spinosa*) dan bekantan (*Nasalis larvatus*).

Gambar III.26 jenis kura-kura duri (*Heosemys spinosa*) yang dijumpai di hutan Sui Mali, Desa Seberu, Kec. Silat Hilir



Sumber: Arif Rahman, 2017

Selain jenis-jenis dilindungi di atas juga ditemukan reptilia khas Kalimantan, yaitu bornean keeled green pit viper (*Tropidolaemus subannulatus*), sejenis ular yang sangat berbisa yang dijumpai di hutan Sui Mali (Gambar III.27). Meskipun belum berstatus dilindungi, namun keberadaan jenis ular ini cenderung langka karena populasinya yang terbatas. Hal ini dijelaskan pula oleh masyarakat bahwa jenis ular ini sudah relative jarang dijumpai.

Gambar III.27 bornean keeled green pit viper (*Tropidolaemus subannulatus*) yang dijumpai di hutan Sui Mali, Desa Seberu, Kec. Silat Hilir



Sumber: Arif Rahman, 2017

3.3.4 Potensi dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air

Salah satu bentuk jasa lingkungan yang diperoleh dari hutan-hutan di wilayah KSK Agropolitan adalah air. Secara umum diakui bahwa hutan-hutan yang ada di masing-masing wilayah merupakan penyangga dan penyedia air bersih dan air irigasi bagi kehidupan masyarakat, sehingga hutan-hutan yang ada di masing-masing wilayah memperoleh perlindungan dari masyarakat dan dikelola berdasarkan aturan adat. Sumber-sumber air yang diperoleh dari hutan adalah mata air-mata air sebagai penyedia air bersih, aliran sungai dan danau juga berfungsi untuk air irigasi dan MCK. Bentuk-bentuk pemanfaatan air dari hutan digunakan untuk konsumsi rumah tangga dan pertanian.

Hasil survey lapangan dan wawancara dengan tokoh masyarakat diperoleh informasi pemanfaatan jasa lingkungan air sebagai berikut:

Desa Tuak Abang Kecamatan Semitau

Desa Tuak Abang merupakan salah satu sampel lokasi yang mewakili wilayah utara KSK Agropolitan. Wilayah ini cenderung tergolong sulit air dibandingkan wilayah-wilayah lainnya di bagian tengah hingga selatan. Masyarakat desa Tuak Abang sangat mengandalkan sungai dan air hujan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya untuk MCK dan air bersih. Sungai dan anak sungai umumnya berasal dari hutan rawa gambut yang cenderung asam hanya bisa digunakan untuk MCK dan bertani. Sumber air bersih yang utama adalah air hujan dan bantuan air bersih dari perusahaan sawit.

Dusun Bian sebagai pusat Sumber air utama dari dusun Bian adalah sungai Bian. Keperluan air untuk mandi semuanya diambil dari sungai terdekat (air payak) yang rasanya agak asam. Keperluan air bersih selain diperoleh dari air hujan, masyarakat juga memperoleh air dari anak-anak sungai dengan jarak rata-rata mencapai 5 km. Pada musim kemarau warga harus membeli air dari penyuplai air di dusun Sekedau 2 dengan harga Rp. 10.000,-/galon (air diperoleh dari bukit Sekedau dengan cara pipanisasi yang merupakan bantuan dari pemerintah dan dikelola oleh Desa dengan iuran Rp. 2.000,-/bulan).

Hal yang sama dialami oleh Dusun Sekedau 1, lahan-lahan hutan secara umum sudah diinvasi oleh perusahaan sawit, sehingga penyediaan jasa ekosistem hutan menjadi sangat

kurang. Hal ini membuat warga memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap perusahaan sawit untuk memperoleh air bersih.

Desa Seberu, Kecamatan Silat Hilir dan Desa Palakota, Kecamatan Seberuang

Desa Seberu dan Desa Palakota merupakan dua wilayah yang sangat bergantung pada keberadaan hutan Sui Mali dan Sebalang Hulu sebagai penyedia air bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Air bersih diperoleh dari mata air dan sungai air tawar yang disediakan hutan di sekitarnya dengan menggunakan instalasi pipa. Sebagian sungai berwarna coklat dan asam karena adanya hutan bertipe gambut topogen di atas bukit. Keberadaan hutan lindung adat ini disadari masyarakat sangat vital, sehingga masyarakat menjaga hutan dengan baik. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat adalah masih banyaknya orang yang melakukan PETI di sepanjang sungai mulai dari Kec. Silat Hulu yang mengakibatkan sungai menjadi kotor dan tercemar.

Dusun Sebalang Hulu menggunakan Sumber air dari bukit Sebalang (kawasan hutan lindung) atau sungai pelaiik menggunakan pipa yang merupakan bantuan dari pemerintah dan dikelola oleh masyarakat bersama (Gambar III.28). Air biasanya ditampung dengan tangki plastik yang berukuran cukup besar. Banyaknya pemakaian air untuk kebutuhan per hari bisa menghabiskan hingga 1 tangki sehari. Dalam kaitannya dengan kebutuhan MCK masyarakat dapat mengakses sungai dengan jarak rata-rata sekitar 50 meter.

Gambar III.28 Sistem penyediaan air bersih menggunakan pipa di Desa Seberu



Sumber: Hasil Observasi, 2017

Sumber air untuk masyarakat Dusun Sungai Mali diperoleh dari Bukit Sebalang dan sungai Serepak. Dengan melalui dana swadaya masyarakat dan bantuan dari desa (20 juta) pada tahun 2010 dan perawatan pipa paralon yang dipasang dilakukan secara gotong royong sekitar sebulan sekali atau saat pipa mulai mengalami gangguan.

Hasil wawancara dengan kepala dusun diketahui bahwa beberapa tahun terakhir warga yang berada di hilir dusun sungai mali mulai merasakan kekurangan air, disebabkan oleh beberapa warga di daerah hulu dan tengah dusun yang membuat kolam penampungan air untuk kebutuhan sehari-hari dan mereka tidak menggunakan keran air sehingga air dibiarkan melimpah begitu saja. Untukantisipasi kekurangan air masyarakat membuat sumur bor dan masih membutuhkan mesin tambahan untuk menyedot air dari sumur. Mengambil air ke daerah hulu mendekati sungai dengan jarak tempuh sekitar 3 km dari

rumah. Pemakaian air di setiap rumah tangga rata-rata cukup tinggi mencapai 3 drum atau lebih setiap harinya.

Penambangan emas ilegal sebenarnya sudah pernah dihentikan oleh pemerintah melalui upaya penindakan, tetapi dalam 6 tahun terakhir kembali gencar dilakukan baik oleh masyarakat lokal maupun dari luar khususnya Dusun Sungai Jintan, Desa Bongkong, Dampak dari aktivitas ini adalah terjadinya kekeruhan air sungai sehingga tidak bisa digunakan untuk konsumsi sehari-hari. Hal ini berdampak pula terhadap menurunnya produksi ikan yang selama ini menjadi andalan masyarakat.

Desa Lubuk Antuk, Kecamatan Hulu Gurung

Sangat berbeda dengan lokasi-lokasi lainnya, wilayah Desa Lubuk Antuk Kec. Hulu Gurung memperoleh sumber air bersih langsung dari hutan lindung Beluan Komplek. Kuantitas dan kualitas air dari hutan ini sangat baik dan mencukupi untuk keperluan rumah tangga sehari-hari dan keperluan pengairan untuk lahan pertanian sawah dan kolam budidaya perikanan. Hutan Beluan Komplek turut dilindungi oleh masyarakat dengan batas yang jelas dan adanya aturan berupa larangan berladang di dalam hutan. Hasil wawancara diperoleh informasi bahwa ladang dan lahan pertanian sawah berada di lokasi atau zona tertentu.

Gambar III.29 Hamparan lanskap lahan budidaya pertanian, perikanan, kebun buah dan hutan dan hutan yang terjaga dengan baik di Dusun Beluan, Kec. Hulu Gurung



Sumber: Hasil Observasi, 2017

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa di wilayah ini telah dibangun bendungan atau embung air yang berasal dari hutan Beluan Komplek, sehingga mampu menjamin lestarnya penyediaan air untuk pengolahan lahan pertanian di bawahnya.

Gambar III.30 Bendungan penampung air dari hutan Beluan Komplek di Dusun Beluan Kec. Hulu Gurung



Sumber: Hasil Observasi, 2017

Hasil wawancara lebih lanjut diperoleh informasi bahwa masyarakat Lubuk Antuk mulai bersawah (bertani menetap) sejak tahun 1974. Hal tersebut didukung pula oleh aturan larangan merambah hutan (Bukit Beluan) karena hutan tersebut merupakan salah satu sumber mata air untuk Lubuk Antuk. Di hutan Beluan komplek ada batasan dalam pengelolaan yang dikelola oleh 3 desa. Khusus untuk daerah Beluan, Berasau dan Piyabung (Beluan Komplek) dikelola oleh Desa Lubuk Antuk. Air minum di dapat dari sungai yang sumbernya dari bukit dan sudah dipasang pipa ke rumah-rumah warga. Wilayah ini tidak pernah mengalami kekeringan pada musim kemarau walaupun debit air berkurang tetapi masih mampu menampung kebutuhan masyarakat.

Desa Tani Makmur Kec. Hulu Gurung

Wilayah Desa Tani Makmur memiliki kesamaan dengan Desa Lubuk Antuk, yaitu dalam hal memperoleh jasa ekosistem air dari hutan Bukit Raya yang mencakup dua dusun, yaitu Dusun Senai dan Sui Medang. Mayoritas masyarakat Dusun Senai bekerja sebagai petani sawah dan penoreh karet. Pola pertanian menetap juga sudah menjadi tradisi turun temurun yang dilakukan masyarakat seperti halnya Desa Lubuk Antuk.

Sumber air yang yang diperoleh warga dusun Senai berasal dari hutan perbukitan yang disebut warga lokal Bukit Raya. Terdapat dua sungai besar yang airnya berasal dari kawasan hutan ini dan keduanya dimanfaatkan warga untuk mendapatkan air bersih dengan cara pipanisasi yang dikelola oleh desa dan swadaya masyarakat. Selain itu, warga juga memanfaatkan sumber-sumber mata air yang ada disekitar mereka. Untuk sektor pertanian pangan (pertanian lahan basah/sawah) juga mengambil dari sungai-sungai tersebut.

Dusun Sui Medang agak berbeda dengan Dusun Senai, di wilayah ini juga terdapat sungai merah (air gambut) yang berasal dari hutan-hutan kerangas di atasnya. Namun demikian masyarakat masih memperoleh air bersih dari mata air dan sungai lainnya. Sumber air utama juga berasal dari hutan Bukit Raya yang berbatasan dengan Dusun Senai. Sebagian masyarakat melakukan pertanian lahan basah (sawah) pada tempat-tempat yang memiliki air tawar, namun pada bagian lainnya masyarakat cenderung mengolah lahan-lahan kering.

3.3.5 Potensi Ekowisata

Beberapa wilayah di dalam KSK Agropolitan memiliki potensi ekowisata alam yang cukup prospek untuk dikembangkan lebih lanjut. Kecamatan Hulu Gurung menjadi wilayah yang paling potensial, yaitu Desa Lubuk Antuk dan Desa Tani Makmur. Objek ekowisata umumnya berupa air terjun, sungai dan gua.

Potensi pariwisata di Desa Lubuk Antuk:

Bentuk-bentuk objek pariwisata alam yang dapat dijumpai di Desa Lubuk Antuk meliputi:

Objek wisata gua-gua alam

- Gua Menyadi : ciri khasnya adalah dulunya merupakan rumah yang dengan isinya menjadi batu.
- Gua Pangkundi : turunan dari gua Menyadi, memiliki satu lubang dengan gua Menyadi.
- Gua Temunduk : merupakan gua terpanjang (gua yang panjangnya menembus Bukit Beluan, menghubungkan dua kecamatan, Hulu Gurung dan Silat Hulu).
- Gua Berukuran yang agak kecil yaitu, Liang Kelalang, Liang Pengangkang, Liang Terasat, Liang Sipat, Liang Kolik (lele), Liang Korak (Kera).

Dari desa Lubuk Antuk, di perbatasan hutan lindung dan hutan produksi merupakan letak gua Menyadi dan Pangkundi dengan ajrak tempuh sekitar 20 menit menggunakan sepeda motor. Dan jika ingin melanjutkan perjalanan ke Temunduk hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 20-30 menit. Di gua pernah beberapa kali digunakan untuk hiburan rakyat bagi tamu.

Air Terjun

- Air Terjun Matahari
- Air Terjun Tebayan muara ke sungai Tebayan
- Air Terjun Dalit (7 Tingkat)
- Riam Lepu (panjangnya kira-kira mencapai 60 meter)

Air terjun terdekat Matahari berada di dekat gua Pangkundi dengan jarak tempuh sekitar 25 menit dari desa Lubuk Antuk. Ketinggian air terjun diperkirakan mencapai 50 meter (dua tingkatan) dengan bentuk memanjang seperti ngarai.

Dari air terjun matahari ke Tebayan berjarak sekitar 2 km merupakan air terjun dengan curah air terbesar dibandingkan yang lain. Tebayan ke Dalit kurang lebih 200 meter dengan ketinggian air terjun terbagi menjadi 7 tingkat.

Panorama alam

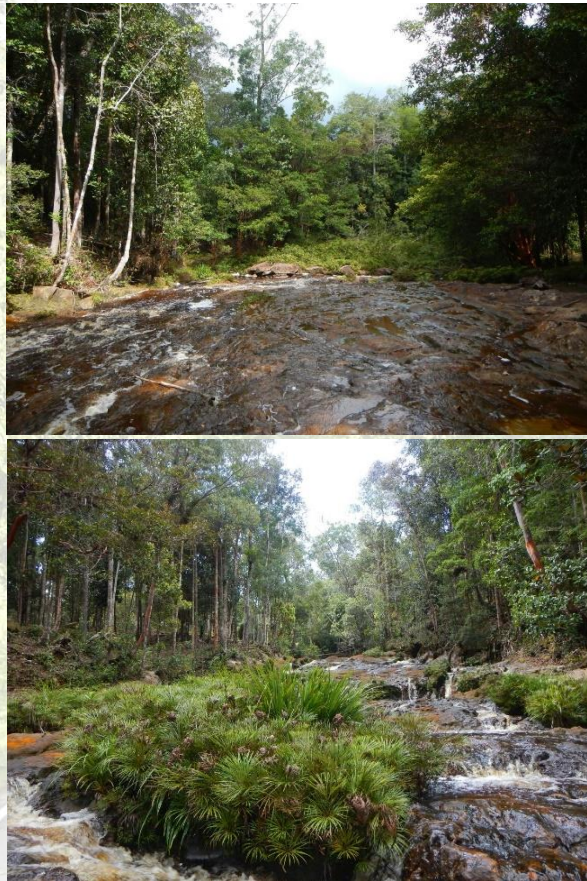
Objek wisata alam berupa panorama dapat diperoleh di puncak Piyabung (di puncak bukit ini terdapat pemandangan alam yang indah dan dapat melihat Danau Sentarum dan area sekitarnya). Bukit tersebut merupakan pertemuan dua wilayah desa, yaitu Lubuk Antuk dan Riam Tapang.

Potensi pariwisata di Desa Tani Makmur

Desa Tani Makmur merupakan contoh wilayah yang memiliki objek wisata alam yang menarik dan sudah terdapat aktivitas pengelolaan yang dilakukan oleh desa. Dusun Senai dan Dusun Sui Medang merupakan dua wilayah dengan potensi wisata air terjun yang indah. Objek wisata di Dusun Senai dikenal dengan nama Pusaka Tunggal dan di Dusun Sui Medang dikenal sebagai Medang Pulang.

Objek wisata pusaka tunggal terletak di kaki Bukit Raya yang dikelola oleh Karang Taruna Brigade Pemuda Pelopor Pembangunan Desa (KTBP3D) yang merupakan organisasi bentukan dari Pemerintah Desa yang sebelumnya dikelola oleh masyarakat sejak tahun 1994. Objek wisata Air di Pusaka Tunggal tersebut merupakan turunan dari dua sungai, sungai Besakak dan Besakak Nanga Dua.

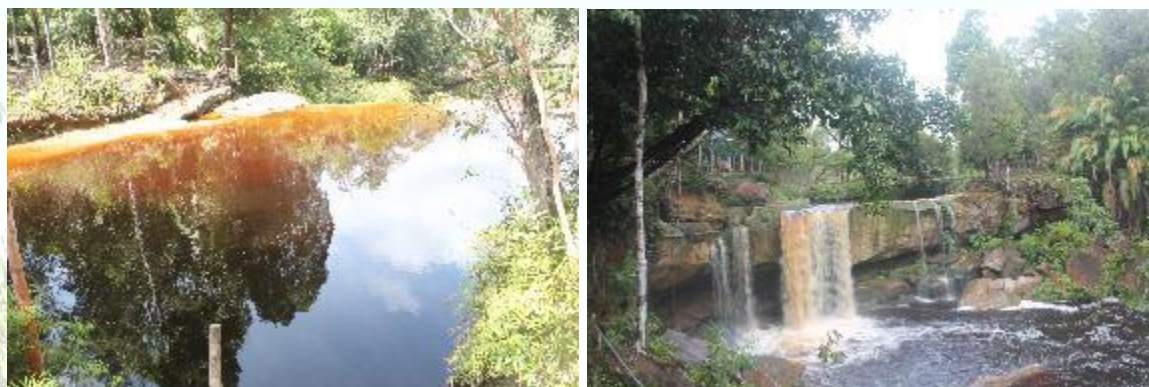
Gambar III.31 Objek wisata Pusaka Tunggal di Dusun Senai, Desa Tani Makmur



Sumber: Hasil Observasi, 2017

Objek wisata air terjun dan camping ground Medang Pulang memiliki pemandangan dan fisiografi areal yang sangat indah. Air terjun terbentuk dari jeram-jeram pada sungai dengan airnya yang berwarna merah. Kondisi ini menghasilkan daya tarik tersendiri bagi wisatawan-wisatawan dari luar daerah.

Gambar III.32 Objek wisata Medang Pulang di Dusun Sui Medang, Desa Tani Makmur



Sumber: Hasil Observasi, 2017

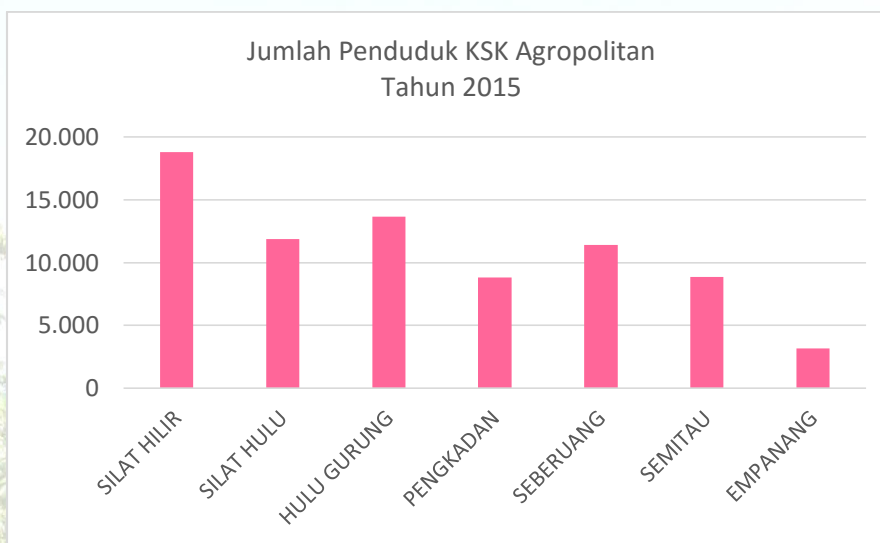
3.4 Gambaran Umum Kependudukan dan Sosial Budaya

Gambaran umum kependudukan dan sosial budaya akan memberikan pemahaman terkait kondisi kependudukan, sosial, dan budaya yang ada di wilayah studi. Hal – hal yang dijelaskan dalam gambaran umum kependudukan dan sosial budaya antara lain jumlah penduduk, pola persebaran penduduk, penduduk berdasarkan IPM, tingkat kemiskinan, serta sejarah etnis masyarakat.

3.4.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2015 adalah sebesar 245.998 jiwa dengan luas wilayah administratif seluas 29.842 km² yang setara dengan 20,33% dari luas Kalimantan Barat secara keseluruhan. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kepadatan penduduk sekitar 8 jiwa/km². Dari total 23 kecamatan yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu, terdapat 7 kecamatan yang termasuk ke dalam Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Agropolitan Kapuas Hulu yaitu Kecamatan Silat Hilir, Silat Hulu, Hulu Gurung, Pengkadan, Seberuang, Semitau, dan Emanang. Jumlah penduduk yang tersebar di KSK Agropolitan adalah sebesar 76.608 jiwa. Jumlah penduduk tersebut mencakup 31,14% dari keseluruhan penduduk yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu. Jumlah penduduk di KSK Agropolitan terbanyak berada di Kecamatan Silat Hilir yaitu sebanyak 18.808 jiwa sementara jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Emanang yaitu sebanyak 3.165 jiwa.

Gambar III.33 Jumlah Penduduk KSK Agropolitan Tahun 2015



Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka (2016)

Pertumbuhan jumlah penduduk dilihat berdasarkan data time series selama 12 tahun dari tahun 2004 hingga tahun 2015. Kecamatan Pengkadan merupakan kecamatan yang baru terbentuk di tahun 2009. Tabel di bawah ini adalah data jumlah penduduk di KSK Agropolitan dari tahun 2004 hingga tahun 2015.

Tabel III.10 Jumlah Penduduk KSK Agropolitan Tahun 2004 - 2015

KECAMATAN	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SILAT HILIR	14.483	15.145	14.615	14.955	15.790	16.085	16.987	17.389	17.690	18.039	18.365	18.808
SILAT HULU	10.064	10.381	10.018	10.250	10.489	10.684	10.735	10.989	11.173	11.396	11.602	11.887
HULU GURUNG	11.649	11.940	11.521	11.788	12.483	12.716	12.339	12.631	12.756	13.012	13.248	13.664
PENKADAN						8.157	7.959	8.147	8.149	8.312	8.463	8.814
SEBERUANG	9.444	9.589	9.253	9.468	9.650	9.831	10.314	10.558	10.648	10.860	11.056	11.420
SEMITAU	6.932	7.209	6.955	7.117	7.335	7.472	7.992	8.182	8.390	8.558	8.713	8.850
EMPANANG	2.563	2.570	2.480	2.538	3.051	3.108	2.858	2.926	2.933	2.992	3.047	3.165
TOTAL	55.135	56.834	54.842	56.116	58.798	68.053	69.184	70.822	71.739	73.169	74.494	76.608

Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka (2005 – 2016)

3.4.2 Pola Persebaran Penduduk

Pola persebaran penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat dari distribusi penduduk di setiap kecamatan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2015, kecamatan dengan kepadatan penduduk tinggi yaitu Kecamatan Hulu Gurung dan Kecamatan Jongkong dengan nilai kepadatan masing – masing sebesar 32 jiwa/km² dan 26 jiwa/km². Sementara itu, kecamatan yang memiliki nilai kepadatan paling rendah adalah Kecamatan Embaloh Hulu dengan nilai kepadatan 1 jiwa/km². Selain Kecamatan Embaloh Hulu, terdapat beberapa kecamatan yang masuk ke dalam kategori kepadatan rendah yaitu Kecamatan Kalis, Putussibau Selatan, Embaloh Hilir, Empanang, Puring Kencana, Badau, Batang Lupar, Embaloh Hulu, dan Putussibau Utara. Tabel di bawah ini adalah rincian tabel kepadatan penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu dengan kecamatan yang di *highlight* merupakan kecamatan yang termasuk ke dalam KSK Agropolitan.

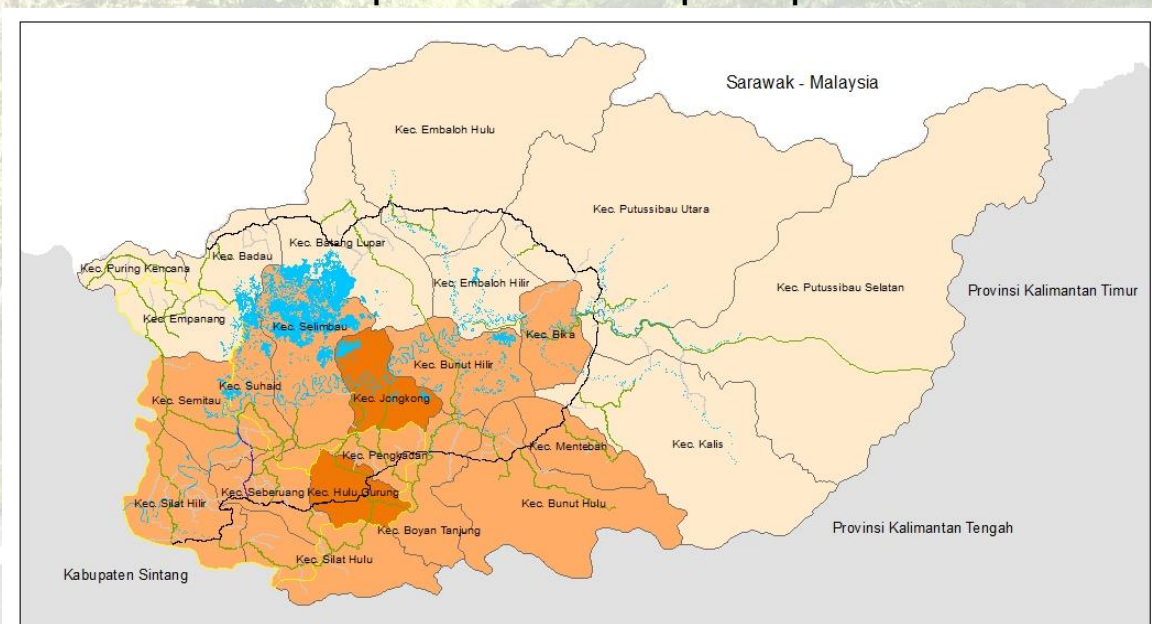
Tabel III.11 Kepadatan Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015

KECAMATAN	KEPADATAN (JIWA/KM ²)	KATEGORI
SILAT HILIR	16	Sedang
SILAT HULU	11	Sedang
HULU GURUNG	32	Tinggi
BUNUT HULU	13	Sedang
MENTEBAH	13	Sedang
BIKA	12	Sedang
KALIS	7	Rendah
PUTUSSIBAU SELATAN	4	Rendah
EMBALOH HILIR	8	Rendah
BUNUT HILIR	11	Sedang
BOYAN TANJUNG	14	Sedang
PENGKADAN	17	Sedang
JONGKONG	26	Tinggi
SELIMBAU	13	Sedang
SUHAIID	19	Sedang
SEBERUANG	20	Sedang
SEMITAU	16	Sedang
EMPANANG	6	Rendah
PURING KENCANA	9	Rendah
BADAU	8	Rendah
BATANG LUPAR	4	Rendah
EMBALOH HULU	1	Rendah
PUTUSSIBAU UTARA	5	Rendah

Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka (2016)

Gambar di bawah ini adalah peta kepadatan penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan kecamatan.

Gambar III.34 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015



Sumber: Hasil Analisis, 2017

3.4.3 Penduduk Berdasarkan IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia. IPM merupakan sebuah indeks yang digunakan untuk mengukur nilai manusia dalam suatu wilayah dari suatu proses pembangunan untuk memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan harapan hidup. Berdasarkan perhitungan metode baru, IPM disusun berdasarkan 4 (empat) indikator yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata – rata Lama Sekolah (RLS), serta pengeluaran. Tabel di bawah ini adalah Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat berdasarkan kabupaten / kota pada tahun 2015.

Tabel III.12 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat Per Kabupaten/Kota Tahun 2015

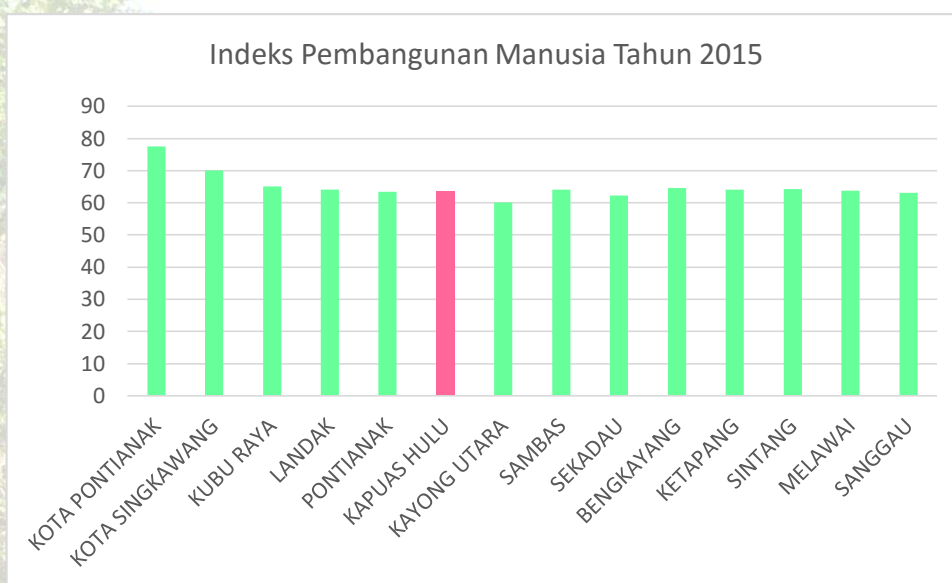
KABUPATEN / KOTA	AHH	HLS	RLS	PENGELUARAN	IPM
SAMBAS	67,74	11,7	6,13	9,195	64,14
BENGKAYANG	72,89	11,14	5,98	8,489	64,65
LANDAK	71,97	12,03	7,06	6,67	64,12
PONTIANAK	70,28	11,91	6,45	7,238	63,37
SANGGAU	70,28	10,67	6,74	7,622	63,05
KETAPANG	70,51	10,95	6,56	8,35	64,03
SINTANG	70,95	10,84	6,7	8,224	64,18
KAPUAS HULU	71,94	11,83	7	6,64	63,73
SEKADAU	70,8	11,23	6,55	6,795	62,34
MELAWAI	72,38	10,78	6,42	7,841	63,78
KAYONG UTARA	67,03	11,74	5,37	6,95	60,09
KUBU RAYA	69,64	12,55	6,56	7,994	65,02
KOTA PONTIANAK	72,01	14,48	9,77	13,737	77,52
KOTA SINGKAWANG	70,84	12,84	7,28	10,982	70,03
KALIMANTAN BARAT	69,87	12,25	6,93	8,279	65,59

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat (2016)

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kapuas Hulu ialah 63,73. IPM Kabupaten Kapuas Hulu ini masih berada di bawah rata – rata IPM di Provinsi Kalimantan Barat yaitu 65,59. Nilai IPM Kabupaten Kapuas Hulu berada di urutan ke 10 dari 14 kabupaten / kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Apabila dirinci berdasarkan komponennya, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki Angka Harapan Hidup dan Rata – Rata Lama Sekolah yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata – rata di provinsi. Sementara itu, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Kabupaten Kapuas Hulu masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kapuas Hulu berada di urutan ke – 5. Hal ini menandakan bahwa tingkat kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu sudah baik dibandingkan dengan kabupaten / kota lainnya. Hal ini ditunjang dengan tersedianya sarana kesehatan yang sudah memadai di setiap kecamatan, bahkan berlebih di beberapa kecamatan. Berdasarkan dimensi pengetahuan, Kabupaten Kapuas Hulu menempati peringkat 4 untuk Rata – Rata Lama

Sekolah dan peringkat 6 untuk Harapan Lama Sekolah. Di tahun 2015, secara rata – rata penduduk Kabupaten Kapuas Hulu usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VII (SMP Kelas 1) dan secara rata – rata penduduk Kabupaten Kapuas Hulu usia 7 tahun ke atas memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga kelas XI (SMA Kelas 2). Meskipun memiliki peringkat yang cukup baik dibandingkan kabupaten / kota lainnya, tingkat pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu belum mampu mengikuti program pemerintah untuk mengenyam pendidikan hingga 12 tahun atau lulus SMA. Mayoritas penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu tingkat pendidikan tertingginya adalah lulusan SD.

Gambar III.35 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat (2016)

3.4.4 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan diukur dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, berdasarkan konsep BPS, yang dimaksud dengan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata – rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 23,74 ribu jiwa atau sebesar 9,66% dari total keseluruhan penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu.

Tabel III.13 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Barat Per Kabupaten/Kota Tahun 2009 - 2015

Kab/Kota	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sambas	9,96	10,08	9,38	8,88	9,9	9,46	9,42
Bengkayang	7,82	7,82	7,25	6,74	8,01	7,2	6,94
Landak	15,48	14,06	13,13	12,41	14,18	13,71	13,51
Mempawah	5,46	6,41	5,97	5,64	6,3	6	5,52
Sanggau	4,62	5,02	4,67	4,4	4,71	4,47	4,57

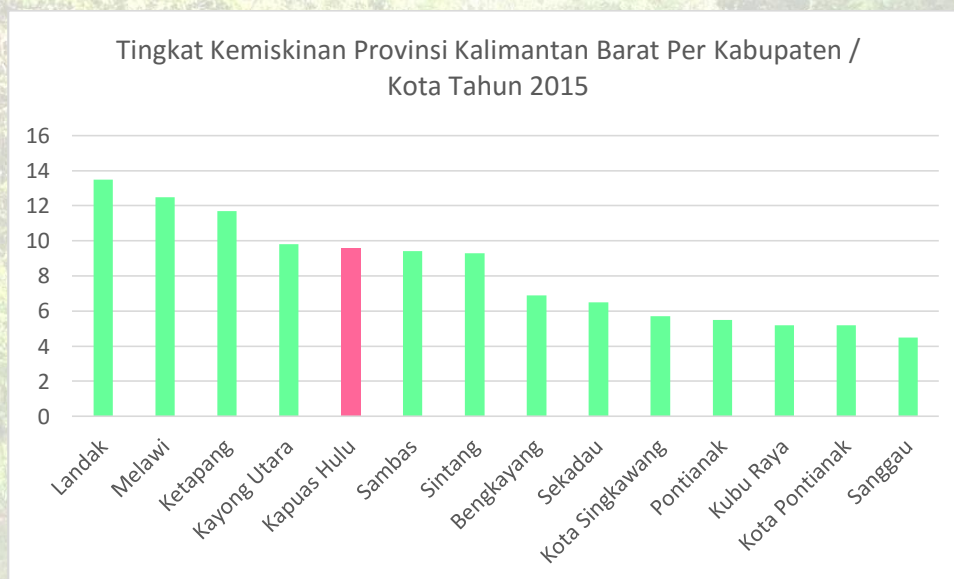
FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU

Kab/Kota	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ketapang	13,08	13,67	12,75	11,91	12,85	11,6	11,72
Sintang	11,55	9,76	9,07	8,55	10,09	9,11	9,33
Kapuas Hulu	9,93	11,39	10,61	9,95	11,11	10,03	9,66
Sekadau	6,42	6,77	6,3	5,93	6,93	6,31	6,5
Melawi	12,62	13,77	12,93	12,1	13,7	12,4	12,57
Kayong Utara	12,43	11,69	10,91	10,16	10,87	9,55	9,84
Kubu Raya	6,78	7,14	6,67	6,27	6,04	5,45	5,22
Kota Pontianak	6,38	6,62	6,15	5,77	5,56	5,15	5,22
Kota Singkawang	6,2	6,12	5,69	5,32	6,5	5,88	5,76
Kalimantan Barat	9,05	9,3	8,48	7,96	8,74	8,07	8,44

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2017

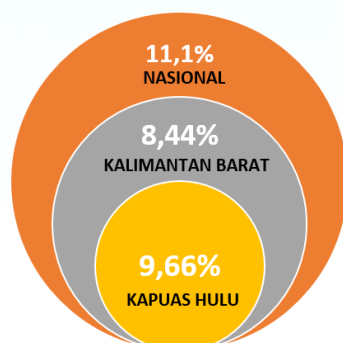
Apabila dibandingkan dengan kabupaten / kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kapuas Hulu berada di urutan 5 teratas bersama Kabupaten Landak, Melawi, Ketapang, dan Kayong Utara. Hal ini menandakan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kapuas Hulu masih banyak dibandingkan dengan 14 kabupaten/kota lainnya. Namun apabila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin secara nasional, Kabupaten Kapuas Hulu masih memiliki persentase yang lebih rendah.

Tabel III.14 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Barat Per Kabupaten / Kota Tahun 2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2017

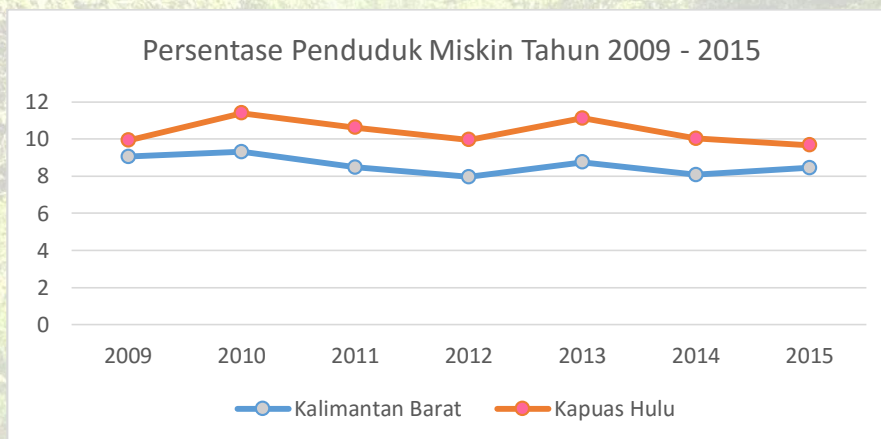
Gambar III.36 Persentase Penduduk Miskin Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten Tahun 2015



Sumber: Hasil Analisis, 2017

Dinamika persentase penduduk miskin di Kabupaten Kapuas Hulu naik turun. Dari tahun 2009 – 2010, persentase penduduk miskin mengalami peningkatan. Dari tahun 2010 – 2012, persentase penduduk miskin mengalami penurunan. Dari tahun 2012 – 2013, persentase penduduk miskin kembali mengalami peningkatan. Sejak tahun 2009 hingga 2013, dinamika yang dialami Kabupaten Kapuas Hulu sejalan dengan dinamika yang dialami oleh Provinsi Kalimantan Barat. Sementara itu, dari tahun 2013 – 2015, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kapuas Hulu terus mengalami penurunan sementara persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Barat kembali mengalami peningkatan dari tahun 2014 – 2015.

Gambar III.37 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2009 - 2015

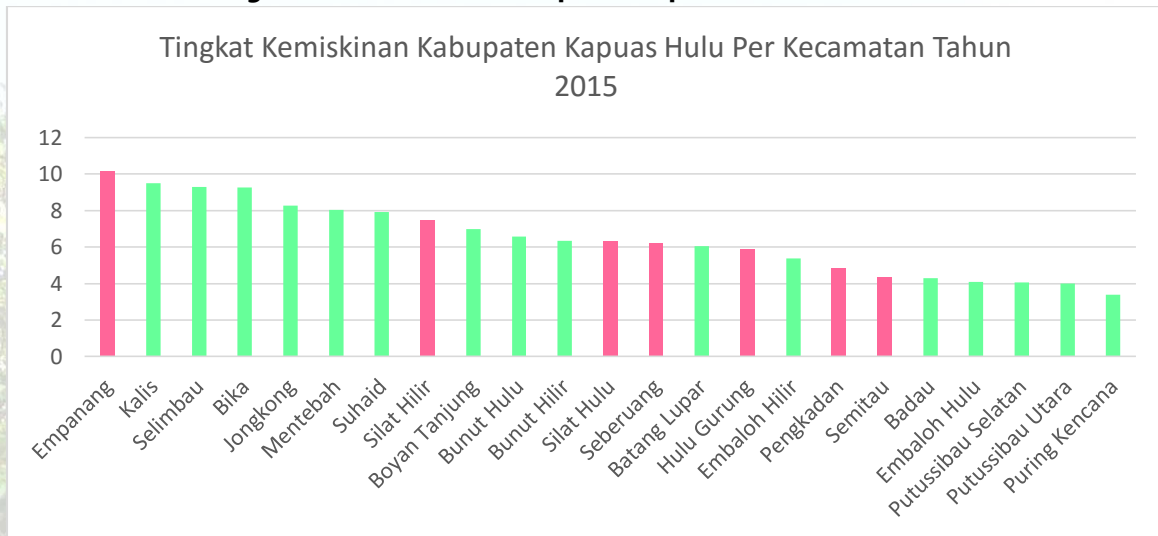


Sumber: Hasil Analisis, 2017

Diantara kecamatan – kecamatan yang termasuk ke dalam KSK Agropolitan, Kecamatan Semitau dan Kecamatan Pengkadan ialah kecamatan dengan tingkat kemiskinan paling rendah. Bahkan apabila dibandingkan dengan 23 kecamatan lainnya di Kabupaten Kapuas Hulu, kedua kecamatan tersebut berada pada urutan ke 6 dan ke 7 untuk persentase penduduk miskin paling rendah. Kecamatan Semitau memiliki persentase penduduk miskin paling rendah dikarenakan karakteristik wilayahnya yang berupa perkotaan dimana masyarakatnya telah mampu memenuhi kebutuhan dasar yang terlihat dari tersedianya pasar dan daerah pertokoan. Sementara itu, Kecamatan Empanang adalah kecamatan yang memiliki persentase penduduk miskin paling besar diantara kecamatan lain dalam KSK

Agropolitan maupun dalam lingkup kabupaten. Banyaknya perkebunan sawit yang terdapat di Kecamatan Empanang ternyata tidak mampu menyejahterakan masyarakatnya.

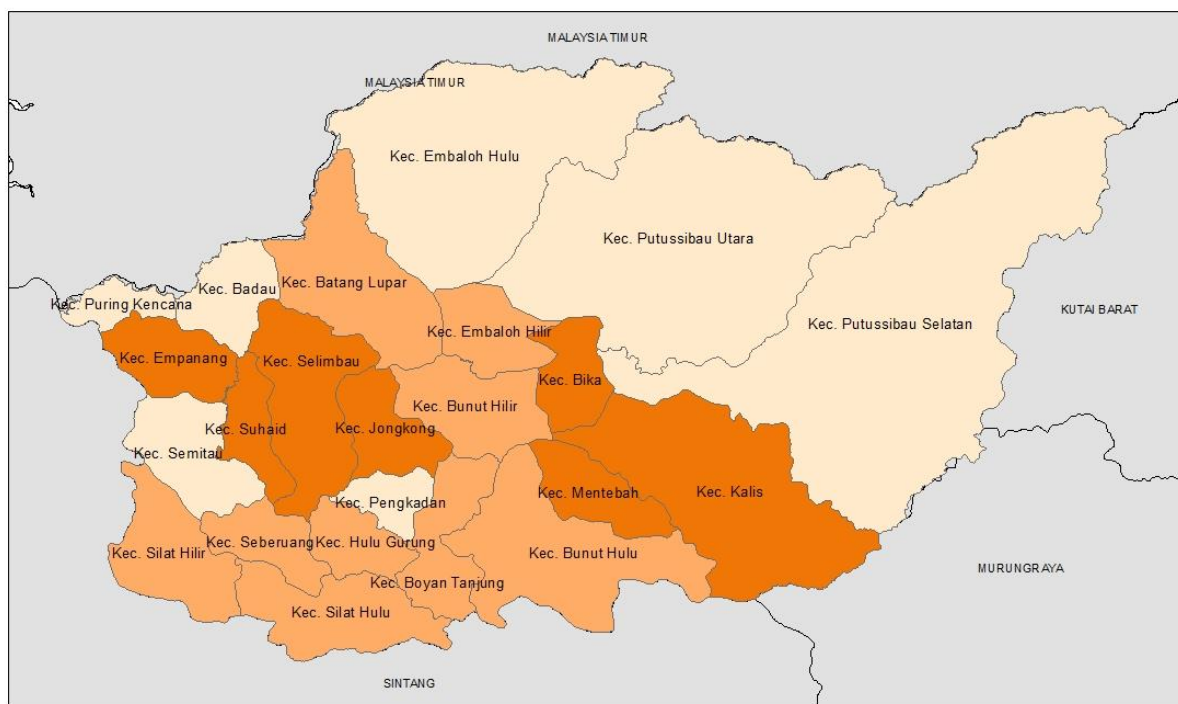
Gambar III.38 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kapuas Hulu Per Kecamatan Tahun 2015



Sumber: SMERU Research Institute, 2017

Secara spasial, persebaran tingkat kemiskinan di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada peta di bawah ini. Kecamatan Semitau dan Kecamatan Pengkadan masuk ke dalam kategori tingkat kemiskinan yang rendah. Kecamatan Silat Hilir, Silat Hulu, Seberuang, dan Hulu Gurung masuk ke dalam ketagori tingkat kemiskinan yang sedang. Sementara itu, Kecamatan Empanang yang termasuk ke dalam KSK Agropolitan masuk ke dalam kategori tingkat kemiskinan yang tinggi. Apabila dilihat dalam lingkup kabupaten, kecamatan – kecamatan yang termasuk ke dalam KSK Agropolitan rata – rata memiliki tingkat kemiskinan yang sedang dan rendah. Kecamatan – kecamatan dengan tingkat kemiskinan tinggi di Kabupaten Kapuas Hulu sebagian besar tidak termasuk ke dalam wilayah KSK Agropolitan namun wilayahnya bersebelahan dengan KSK Agropolitan.

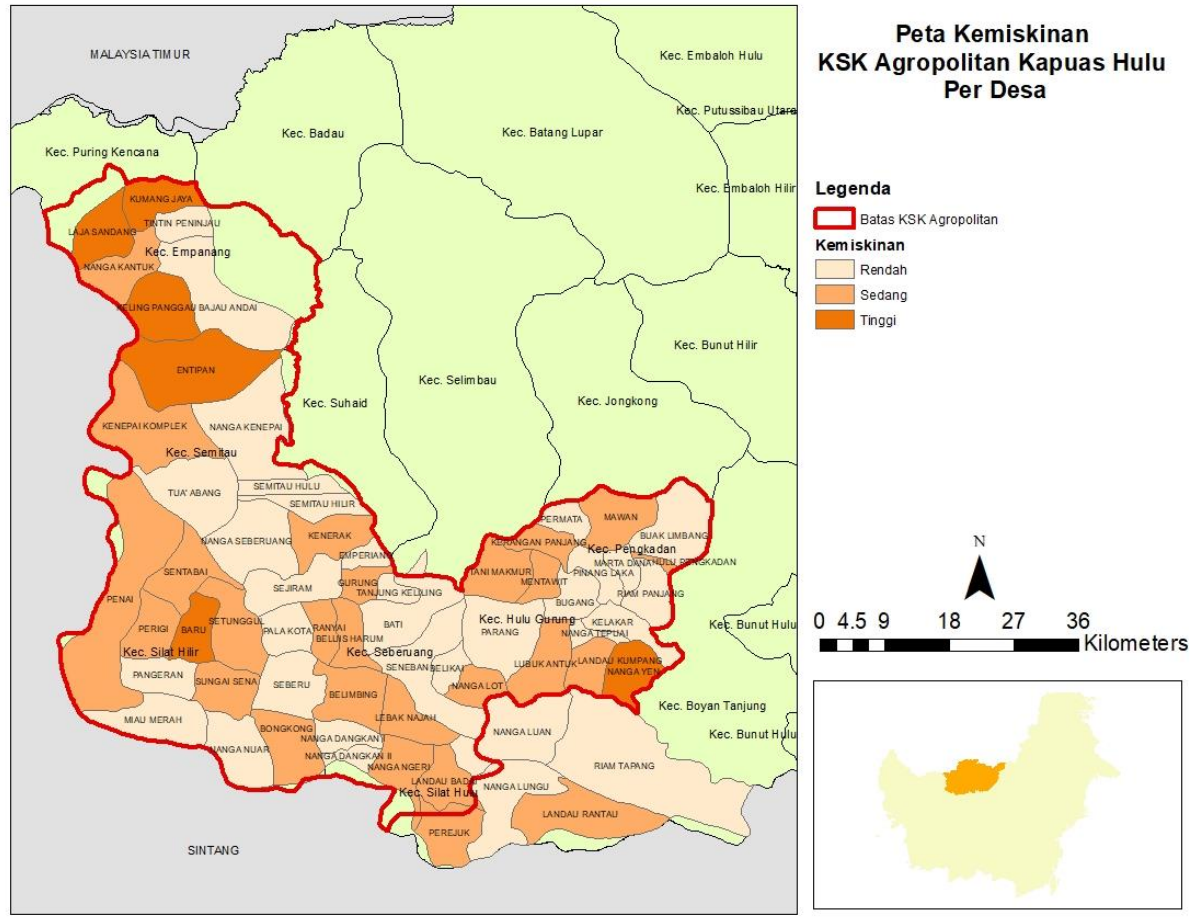
Gambar III.39 Peta Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kapuas Hulu Per Kecamatan



Sumber: Hasil Analisis, 2017

Peta tingkat kemiskinan di KSK Agropolitan dapat dilihat secara lebih mendalam lagi yaitu dalam lingkup desa. Terdapat 5 desa transmigrasi yang berada di KSK Agropolitan yaitu Desa Pelangi, Desa Setunggul, Desa Pangeran, Desa Miau Merah, dan Desa Buak Limbang (Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian Kabupaten Kapuas Hulu, 2017). Dilihat berdasarkan tingkat kemiskinannya, 3 dari 5 desa transmigrasi tersebut termasuk ke dalam kategori rendah. Selain itu, mayoritas desa – desa yang menjadi ibukota kecamatan juga memiliki tingkat kemiskinan yang rendah. Desa dengan tingkat kemiskinan tinggi paling banyak terdapat di Kecamatan Empanang. Kecamatan lain yang memiliki desa dengan tingkat kemiskinan tinggi adalah Kecamatan Hulu Gurung dengan 1 desa dan Kecamatan Silat Hilir dengan 1 desa. Gambar di bawah ini menunjukkan peta tingkat kemiskinan di KSK Agropolitan per desa.

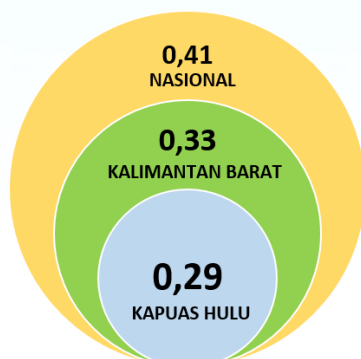
Gambar III.40 Peta Tingkat Kemiskinan di KSK Agropolitan Per Desa



Sumber: Hasil Analisis, 2017

Indeks Gini adalah suatu ukuran untuk melihat distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan terdistribusikan dalam populasi. Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1 dimana apabila indeks gini semakin mendekati 1 berarti distribusi pendapatan semakin tidak merata atau terdapat ketimpangan kekayaan. Indeks Gini di Kabupaten Kapuas Hulu bernilai 0,29 lebih kecil dibandingkan Indeks Gini di Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional. Nilai 0,29 pada indeks gini di Kabupaten Kapuas Hulu menunjukkan bahwa distribusi pendapatan hampir merata dimana setiap orang memiliki penghasilan atau kekayaan yang hampir sama persis. Jadi, tidak terdapat perbedaan mencolok antara orang kaya dan orang miskin di Kabupaten Kapuas Hulu karena pendapatannya tidak timpang jauh.

Gambar III.41 Perbandingan Indeks Gini di Tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional Tahun 2015



Sumber: SMERU Research Institute, 2017

3.4.5 Sejarah Etnis Masyarakat¹

Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 2 (dua) etnis besar yaitu Dayak dan Melayu.

A. Suku Dayak

Pada awalnya Kelompok Rumpun Ibanic berasal dari satu tempat bernama Temawai/Temawang Tampun Juah. Wilayah ini subur dan terletak di hulu Sungai Sekayam. Karena alasan peperangan dan juga wilayah tersebut sudah dikotori oleh musuh dengan racun sehingga para temenggung/kepala suku berkumpul untuk memecahkan permasalahan ini. Pekat Banyau (musyawarah) dilakukan dan dari hasil musyawarah diambil keputusan untuk meninggalkan Tampun Juah secara berangsur-angsur. Proses keberangkatan dipimpin oleh masing-masing temenggung dan yang berangkat dahulu harus membuat lujok (arah penunjuk dari kayu ditancapkan ke arah tujuan) atau tanda pada setiap tempat yang dijalani kelompoknya agar diikuti oleh kelompok belakangnya dengan perjanjian: "jika kelak menemukan tempat yang subur, enak dan cocok, maka mereka berkumpul lagi dan membina kehidupan seperti masa di Tampun Juah.

Migrasi kelompok Suku Dayak di Kapuas Hulu waktu penyebarannya tidak bersamaan. Sebagian kelompok mayoritas suku Dayak di kabupaten Kapuas Hulu diperkirakan sudah mendiami wilayah hulu sungai Kapuas sejak tahun 300an, sebelum peristiwa perang antara manusia dengan roh halus di Tanah Tampun Juah yang menyebabkan "migrasi besar – besaran". Migrasi tersebut terbagi menjadi 3 kelompok atau 3 gelombang:

- 1) Migrasi dalam gelombang pertama diperkirakan berasal dari arah barat, kemungkinan berasal dari hilir sungai Kapuas dan anak – anak sungai, seperti sungai Sekayam, Ketungau, dan Sekadau. Suku – suku Dayak tersebut ialah Seberuang, Ensilat, Iban, Kantuk, Tamanik, Desa, Sekapat, Suaid, Mayan, Sebaru', Rembay, dan Ulu'ai.

- 2) Migrasi dalam gelombang kedua diperkirakan berasal dari arah timur daerah Data Purah, Apo Kayaan yang menghasilkan 3 suku Dayak yaitu Punan, Buket, dan Kayaan Mendalam. Pada gelombang migrasi ketiga juga diperkirakan berasal dari timur yaitu Sungai Kayaan.
- 3) Kelompok ketiga ini tidak langsung memasuki wilayah Kalimantan Barat melainkan menuju Sungai Mahakam yang kemudian menyebar ke daerah hulu Sungai Melawi. Setelah dari hulu Sungai Melawi ini lah kemudian mereka menyebar lagi ke hulu Sungai Manday, Sungai Suru', dan Sungai Mentebah hingga ke Kapuas.

Masyarakat suku Dayak sebelum berdirinya kerajaan – kerajaan dan datangnya penjajah, umumnya menganut agama leluhur mereka. Namun agama ini seringkali dianggap sebagai animisme dan sebagainya. Hal ini membuat kelompok suku Dayak dihadapkan pada pilihan sulit untuk menganut agama yang diakui. Pada saat itu, agama Islam cukup berpengaruh seiring dengan berdirinya kerajaan – kerajaan kecil yang berlandaskan Islam. Kelompok Suku Dayak ini dihadapkan pada pilihan “apabila menganut agama Islam” maka akan terbebas dari perbudakan kewajiban membayar upeti kepada kerajaan. Namun secara tidak sadar, orang yang menganut agama Islam di Kalimantan Barat selalu diidentikkan dengan Melayu. Hal ini lama kelamaan telah menggerus jati diri orang Dayak asli yang telah menjadi muslim dan meninggalkan kultur budayanya dan meninggalkan identitas “dayak”nya. Sementara orang Dayak yang tidak menganut Islam tetap dimaknai sebagai “dayak” kelompok pribumi Kalimantan Barat non Muslim. Saat ini sebagian besar masyarakat Dayak telah memeluk agama Kristen.

² Tulisan ini disusun dari beberapa sumber antara lain:

Aini. (2015). Syair Melayu Identitas Peradaban Melayu Islam di Kalimantan Barat. Retrieved July 12, 2017, from <http://www.kalbariana.web.id/syair-melayu-identitas-peradaban-melayu-islam-di-kalimantan-barat/>

Israniar, D. oleh W. (2016). Makalah Kebudayaan Melayu Kapuas Hulu. Retrieved July 12, 2017, from <http://belajarawalbuatblokwahyuisraniar.blogspot.com/>

Mananta, R. (2016). Sekilas Suku Melayu Di Kalimantan Barat. Retrieved July 6, 2017, from <http://www.misterpangalayo.com/2016/01/sekilas-suku-melayu-di-kalimantan-barat.html>

muzzafar, D. oleh rasheed. (n.d.). SUKU DAYAK KANTUK. Retrieved July 6, 2017, from <http://dayakofborneo.blogspot.com/2013/06/suku-dayak-kantuk.html>

Putra, A. (2016a). Sejarah Suku Dayak Kantuk. Retrieved July 5, 2017, from <http://suku-dunia.blogspot.com/2016/07/sejarah-suku-dayak-kantuk.html>

Putra, A. (2014b). Sejarah Suku Iban Di Kalimantan. Retrieved July 5, 2017, from <http://suku-dunia.blogspot.com/2014/10/sejarah-suku-iban-di-kalimantan.html>

Putra, A. (2014c). Sejarah Suku Kantu Di Kalimantan Barat. Retrieved July 5, 2017, from <http://suku-dunia.blogspot.com/2014/09/sejarah-suku-kantu-di-kalimantan-barat.html>

Putra, A. (2016d). Sejarah Suku Suhaid. Retrieved July 5, 2017, from <http://suku-dunia.blogspot.com/2016/05/sejarah-suku-suhaid.html>

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, keberagaman suku Dayak di Kapuas Hulu antara lain sebagai berikut:

Suaid	Tamambalo	Kayaan
Kantuk	Ensilat	Rembay
Seberuang	Mayan	Sebaru'
Kalis	Sekapat	Iban
Lau'	Desa	Oruung Da'an
Suru'	Punan	Senganan (dayak Islam)
Mentebah	Buket	

B. Suku Melayu

Suku Melayu di Kalimantan Barat merupakan asimilasi Dayak dan Melayu. Orang Melayu datang ke Pulau Kalimantan yang kemudian berasimilasi dengan orang dayak Iban di pesisir pulau sehingga menghasilkan kelompok masyarakat baru di pesisir. Asimilasi ini menghasilkan generasi pertama Suku Melayu di Kalimantan Barat yaitu Melayu Sambas (Sungai Sambas) dan Melayu Ketapang (Sungai Pawan). Penyebaran sub Melayu di Kalimantan Barat dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok asal – usul yaitu melayu asli/pribumi dan melayu kontemporer. Melayu asli/pribumi dapat dibagi lagi ke dalam 4 (empat) kategori dan terbagi atas sub pengelompokan yaitu:

- 4 Melayu pesisir (bermukim di kawasan tepi pantai, laut, sungai) terbagi atas beberapa sub pengelompokan yaitu sub Melayu Sambas, sub Melayu Mempawah, sub Melayu Kubu Raya, dan sub Melayu Pontianak. Secara umum, kelompok ini dikenal sebagai masyarakat asli Kalimantan Barat selain masyarakat Dayak
- 5 Melayu dari kawasan pedalaman dekat terbagi atas beberapa sub pengelompokan yaitu sub Mempawah Hulu, sub Melayu Bengkayang, sub Melayu Landak, sub Melayu Sanggau
- 6 Melayu dari kawasan pedalaman jauh terbagi atas beberapa sub pengelompokan yaitu sub Melayu Sekadau, sub Melayu Melawi, sub Melayu Sintang, dan sub Melayu Kapuas Hulu
- 7 Melayu dari kawasan peralihan pada dua kawasan pedalaman terbagi atas beberapa sub pengelompokan yaitu sub Melayu Kayong Utara dan sub Melayu Ketapang

Selain suku Melayu asli, terdapat juga Melayu Kontemporer yaitu pendatang yang berasal dari berbagai kawasan Melayu di luar Provinsi Kalimantan Barat

Tidak terdapat perbedaan yang menonjol antar etnis melayu ini selain dialek bahasanya saja. Sementara sisanya dalam hal adat istiadat tidak begitu terlihat karena adat istiadat suku Melayu ini didasarkan atas sumber yang sama yaitu Agama Islam.

Suku Melayu di Kalimantan Barat memiliki hubungan kekeluargaan yang erat dengan Suku Melayu di Malaysia dan Brunei Darussalam. Pada hari – hari keagamaan besar seperti Hari raya Idul Fitri, banyak warga Malaysia atau Brunei Darussalam yang berkunjung ke Kalimantan Barat untuk bersilaturahmi atau mengunjungi makan nenek atau datok mereka.

Melayu Kapuas Hulu

Masyarakat Melayu Kapuas Hulu memiliki berbagai kebudayaan baik berupa bahasa, perilaku masyarakat, adat istiadat, seni, dan lainnya. Masyarakat Melayu Kapuas Hulu mengutamakan perilaku sopan, ramah, tutur bahasa yang halus, menjunjung tinggi kekeluargaan, dan suka bergotong royong. Melayu Kapuas Hulu banyak bermukim di pesisir sungai Kapuas sehingga masyarakatnya banyak yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Mereka membangun beberapa permukiman kecil di hulu sungai – sungai besar. Di beberapa tempat terutama di sepanjang tepi sungai besar, kebanyakan masyarakat mendiami rumah apung yang sering disebut rumah lanting. Dari tempat tinggalnya dapat diketahui bahwa sebagian besar mereka hidup sebagai nelayan dan berdagang.

3.5 Gambaran Umum Infrastruktur

Pada gambaran umum berikut ini akan ditunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di kawasan agropolitan secara umum masih kurang memadai baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi. Gambaran umum ini akan membahas kondisi secara umum ketersediaan sarana dan prasarana di tujuh kecamatan kawasan agropolitan. Sarana dan prasarana yang dibahas dalam gambaran ini terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung ekonomi.

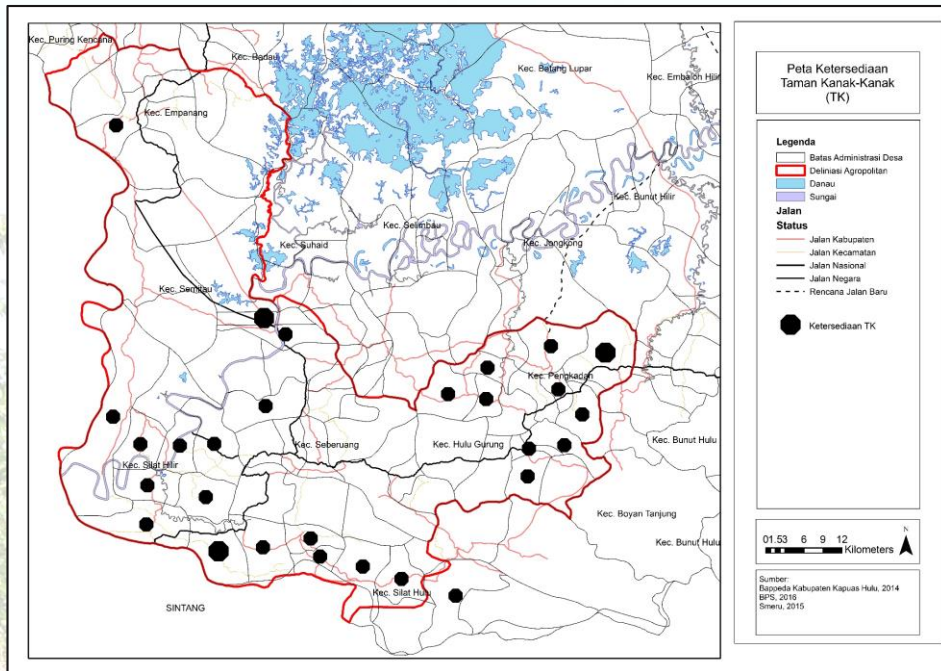
3.5.1 Infrastruktur Dasar

Infrastruktur dasar yang dibahas pada bagian ini adalah sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, air bersih, sampah dan limbah, listrik, dan telekomunikasi.

3.5.1.1 Sarana dan Prasarana Pendidikan

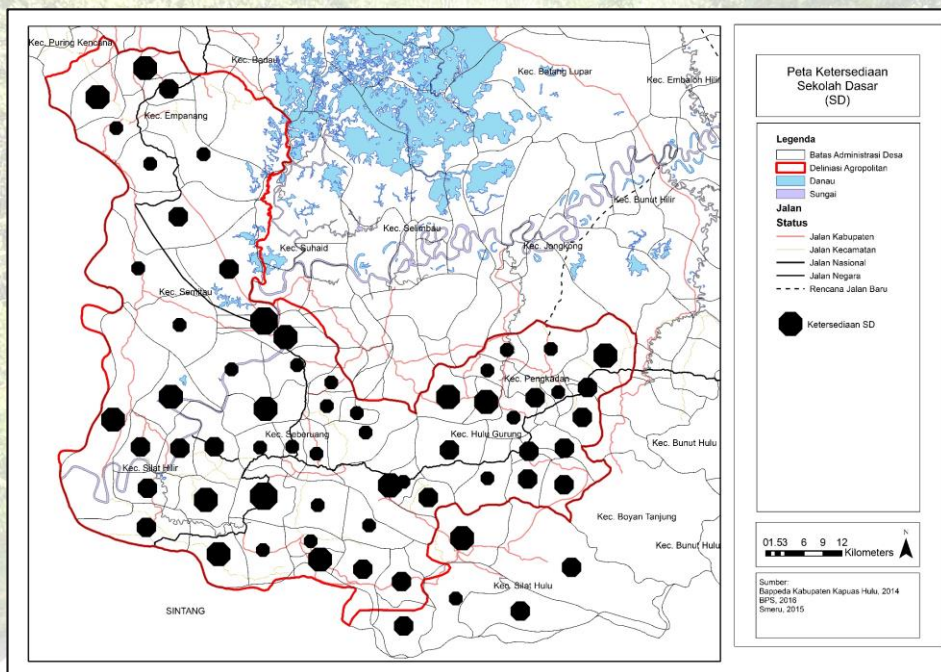
Berdasarkan data yang didapatkan dan observasi yang dilakukan, prasarana pendidikan dasar seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) bukanlah fasilitas yang sulit untuk ditemui di Kabupaten Kapuas Hulu, terutama di tujuh kecamatan yang merupakan Kawasan Strategis Agropolitan: Kecamatan Silat Hilir, Kecamatan Silat Hulu, Kecamatan Hulu Gurung, Kecamatan Pengkadan, Kecamatan Seberuang, Kecamatan Semitau, dan Kecamatan Empanang. Fasilitas SD, SMP, dan SLTA sudah tersebar di setiap tujuh kecamatan. Jumlah fasilitas terbanyak, yaitu di kecamatan Silat Hilir dan Kecamatan Hulu Gurung. Selain itu, di dua kecamatan tersebut, terdapat Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian. Ketersediaan dan persebaran lokasi prasarana pendidikan dapat dilihat pada peta-peta di bawah. Pada gambar itu, desa dengan lingkaran yang lebih besar di antara lingkaran lainnya artinya memiliki prasarana lebih dari satu. Untuk prasarana SD sudah hampir terdapat di seluruh lokasi, namun untuk sarana pendidikan TK tidak semua desa dilengkapi oleh sarana tersebut. Sedangkan prasarana pendidikan SLTA dan SLTP sudah tersebar di seluruh kecamatan.

Gambar III.42 Ketersediaan dan Persebaran Prasarana Taman Kanak-Kanak (TK)



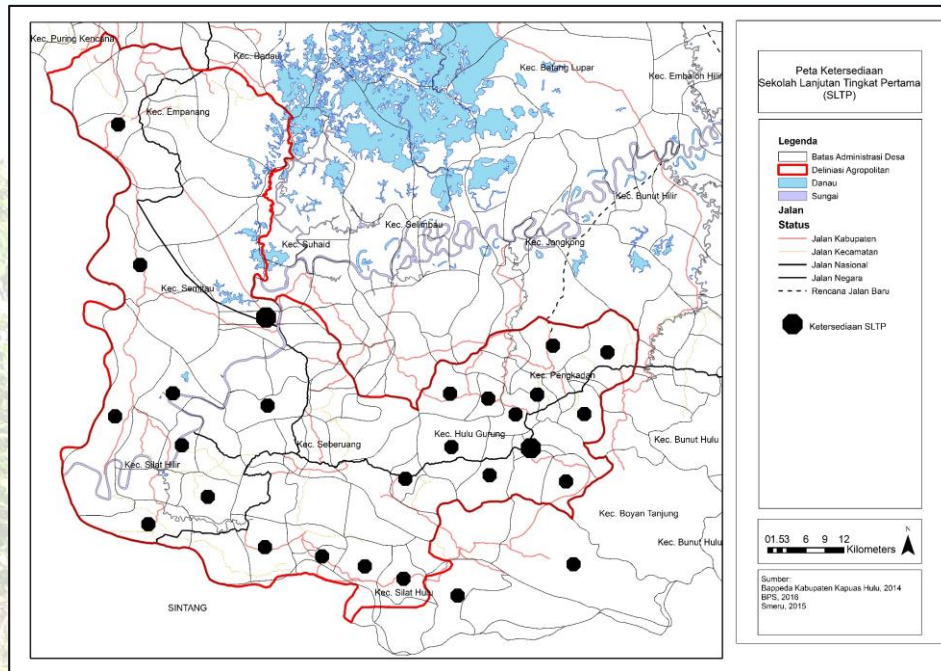
Sumber: Hasil Pengolahan, 2017

Gambar III.43 Ketersediaan dan Persebaran Prasarana Sekolah Dasar (SD)



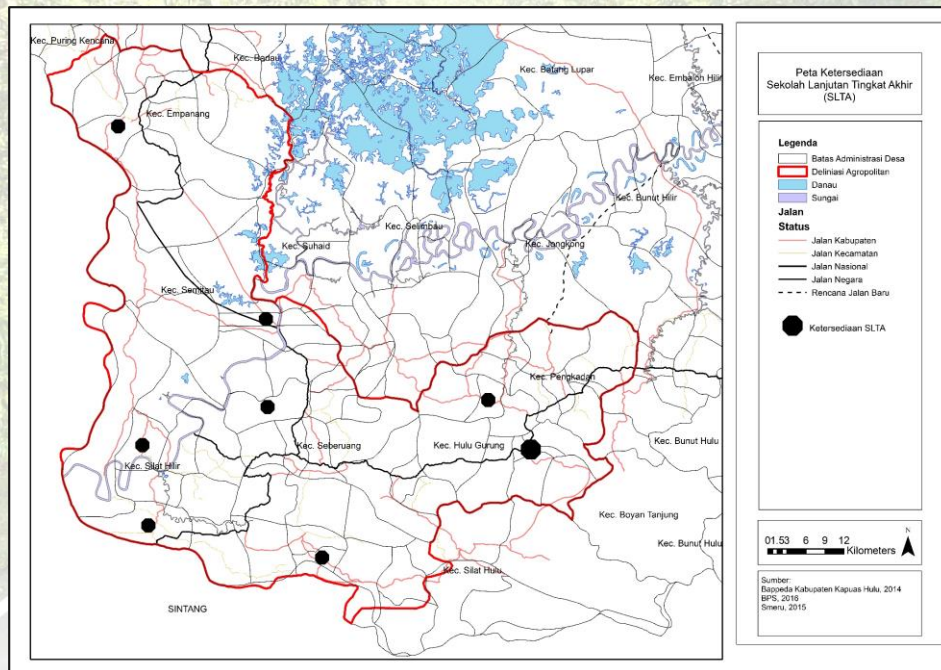
Sumber: Hasil Pengolahan, 2017

Gambar III.44 Ketersediaan dan Persebaran Prasarana Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)



Sumber: Hasil Pengolahan, 2017

Gambar III.45 Ketersediaan dan Persebaran Prasarana Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)

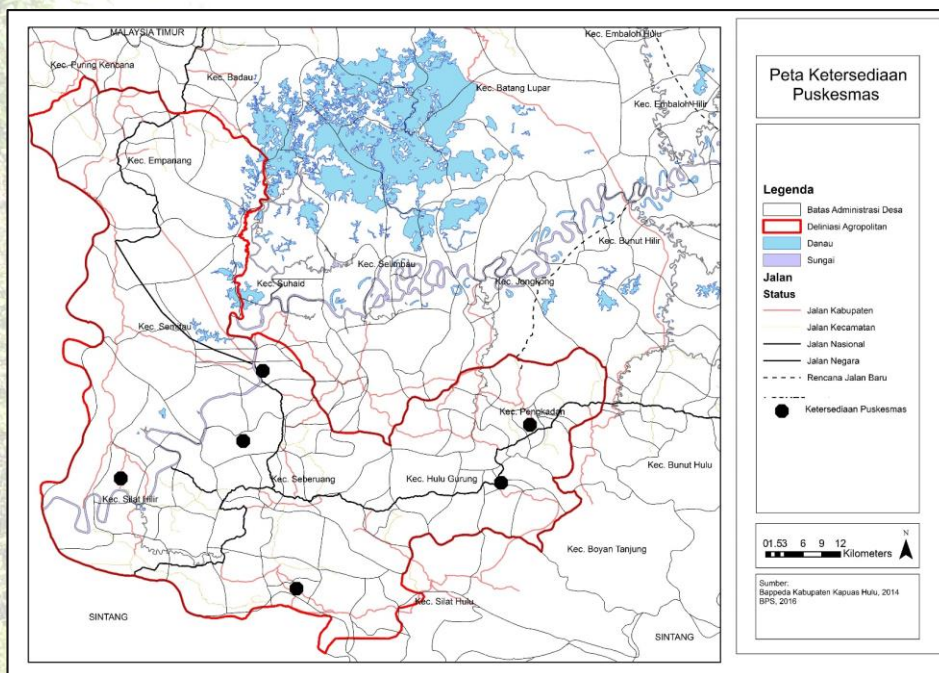


Sumber: Hasil Pengolahan, 2017

3.5.1.2 Sarana dan Prasarana Kesehatan

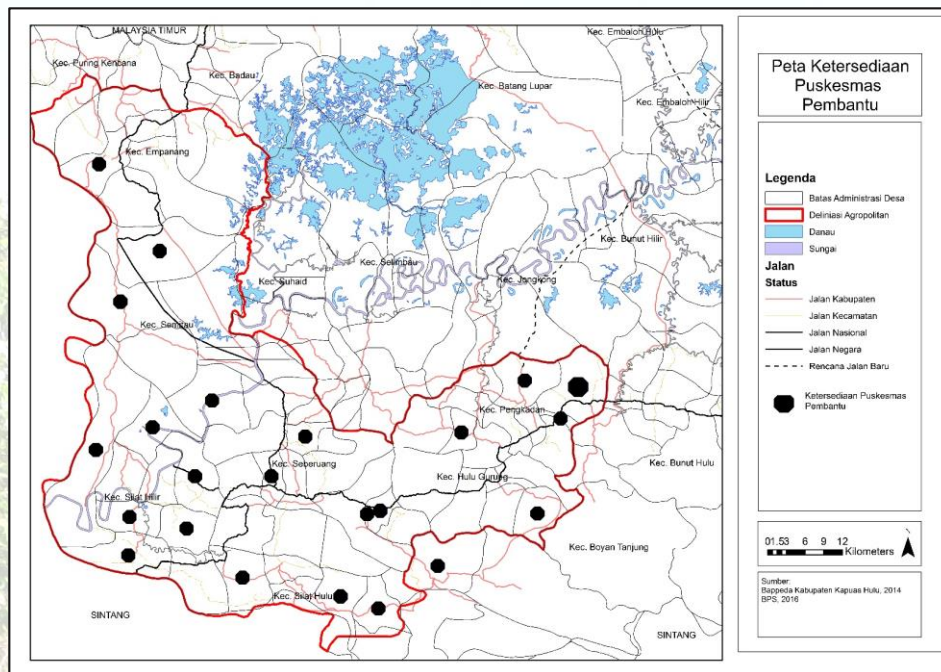
Prasarana kesehatan yang akan dibahas dalam selanjutnya adalah puskesmas, puskesmas pembantu, pondok bersalin desa (polindes), dan posyandu. Sama halnya dengan prasarana pendidikan, hampir seluruh kecamatan sudah terlayani. Namun, untuk Kecamatan Empanang tidak dilengkapi oleh puskesmas namun di kecamatan tersebut terdapat puskesmas pembantu yang memiliki fungsi utama yang sama dengan puskesmas. Selain itu, jumlah prasarana kesehatannya pun jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah sarana kesehatan di kecamatan lain. Hal tersebut sangat berkaitan dengan jumlah penduduk Kecamatan Empanang yang lebih sedikit. Persebaran prasarana kesehatan dapat dilihat pada peta-peta dibawah.

Gambar III.46 Ketersediaan dan Persebaran Prasarana Puskesmas



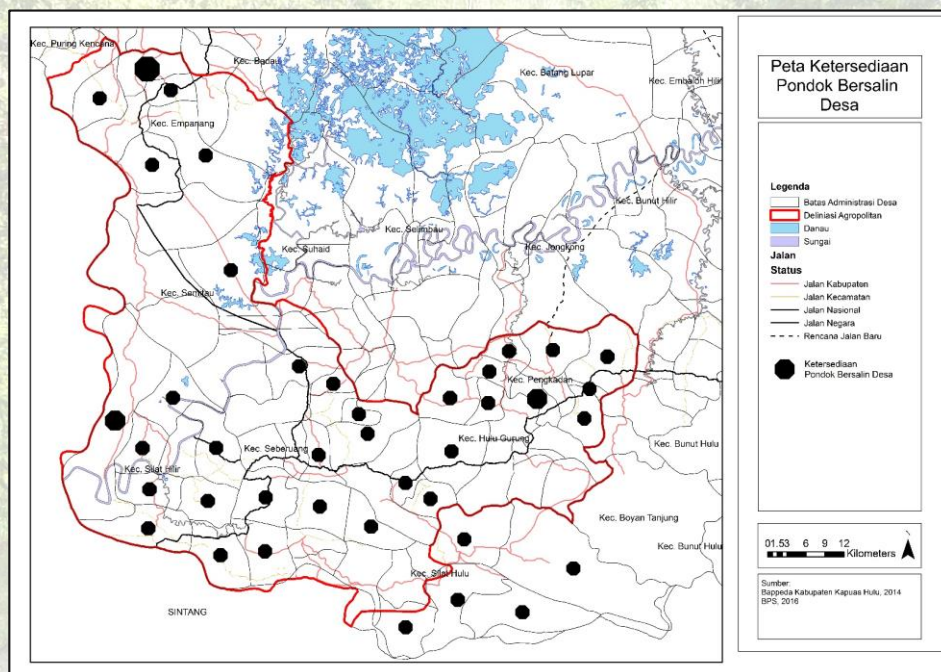
Sumber: Hasil Pengolahan, 2017

Gambar III.47 Ketersediaan dan Persebaran Prasarana Puskesmas Pembantu



Sumber: Hasil Pengolahan, 2017

Gambar III.48 Ketersediaan dan Persebaran Prasarana Pondok Bersalin Desa



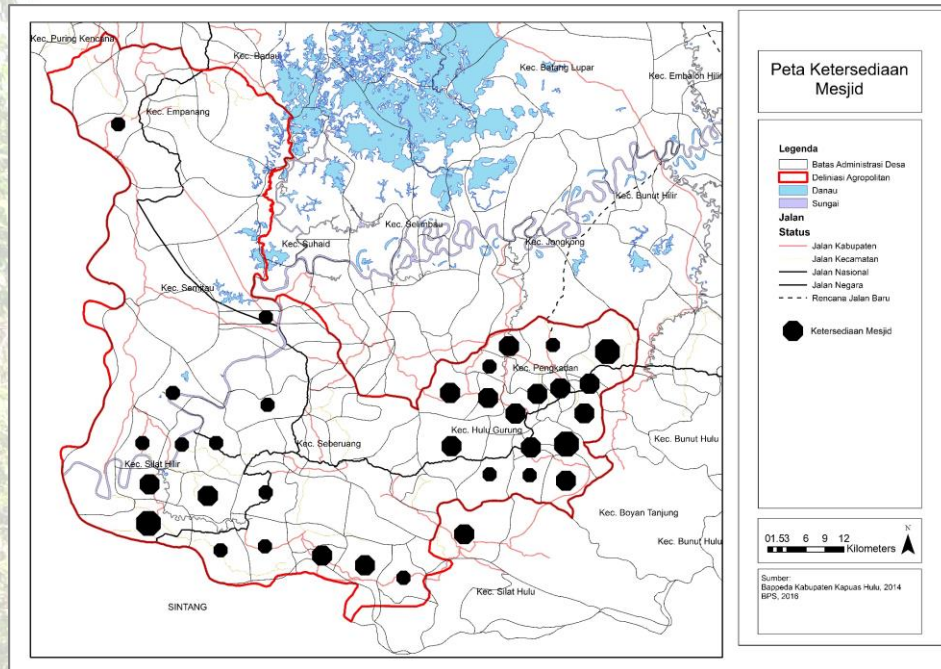
Sumber: Hasil Pengolahan, 2017

3.5.1.3 Sarana Peribadatan

Masing-masing kecamatan KSK Agropolitan tidak didominasi oleh satu agama saja. Kecamatan Silat Hilir dan Kecamatan Semitau merupakan kecamatan yang penduduknya mayoritas beragama muslim dan kristen. Kecamatan Silat Hulu, Kecamatan Seberuang, dan

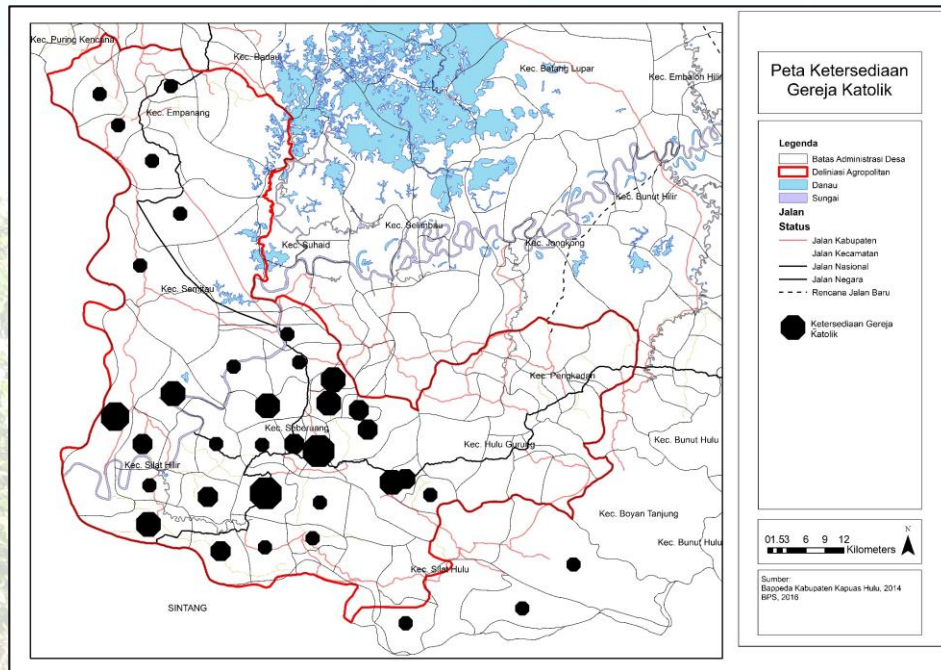
Kecamatan Empanang didominasi oleh masyarakat yang beragama kristen, sedangkan hulu guring dan pengkadan mayoritas penduduknya muslim. Hal tersebut tentunya mempengaruhi jenis prasarana peribadatan yang tersebar di tujuh kecamatan KSK Agropolitan. Selain terdapat penduduk yang beraga Islam dan Kristen, di tujuh kecamatan KSK Agropolitan juga terdapat penduduk beragama Budha sehingga terdapat Vihara di Kecamatan Silat Hilir dan Kecamatan Semitau. Ketersediaan dan persebaran lokasi prasarana peribadatan dapat dilihat pada gambar-gambar berikut.

Gambar III.49 Ketersediaan dan Persebaran Prasarana Masjid



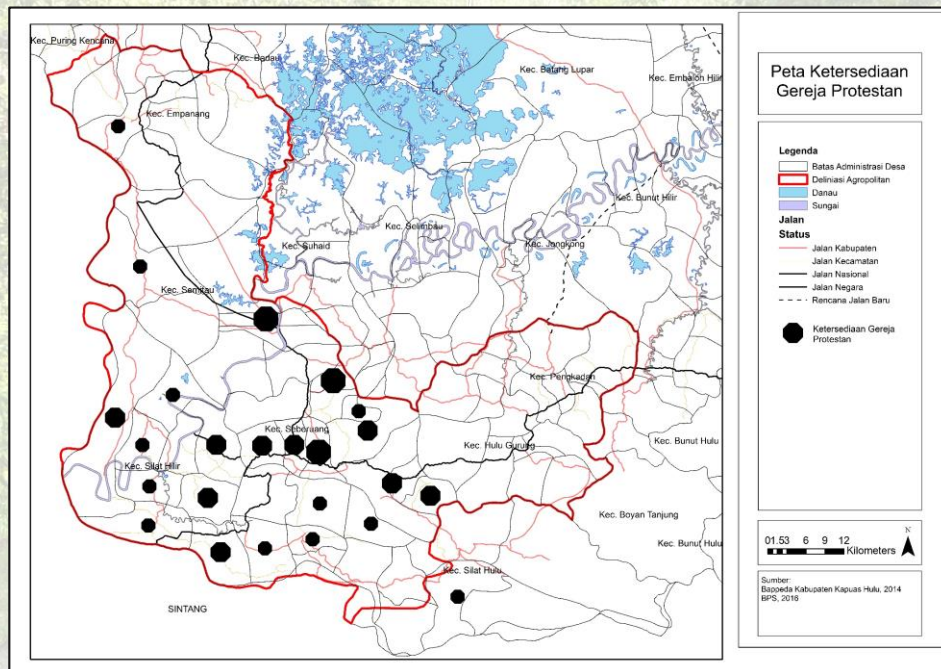
Sumber: Hasil Pengolahan, 2017

Gambar III.50 Ketersediaan dan Persebaran Prasarana Gereja Katolik



Sumber: Hasil Pengolahan, 2017

Gambar III.51 Ketersediaan dan Persebaran Prasarana Gereja Protestan



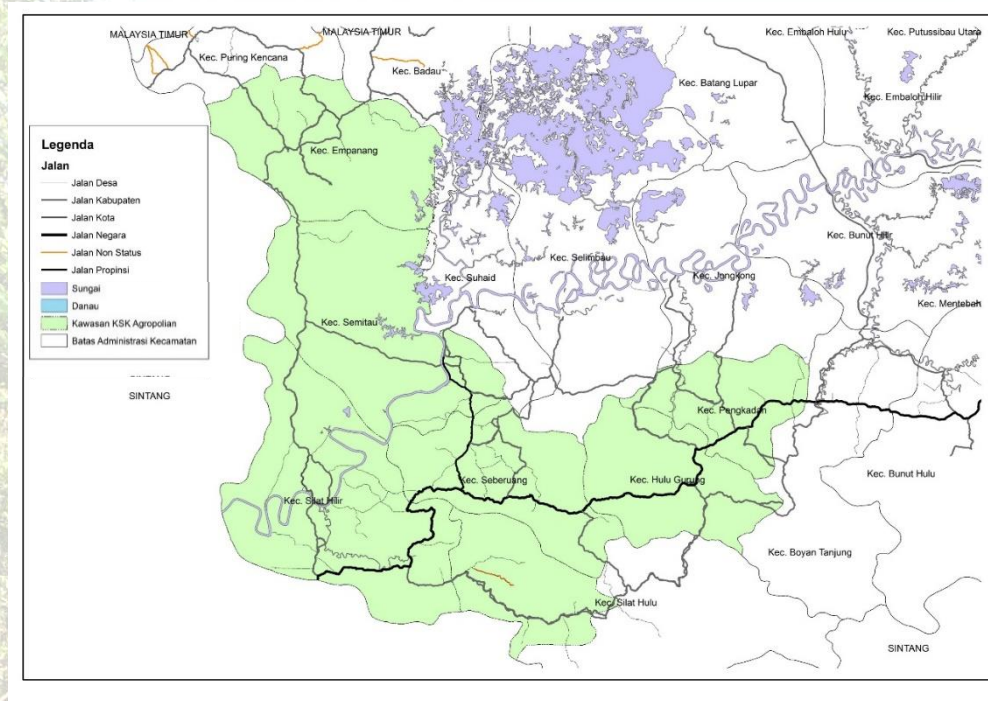
Sumber: Hasil Pengolahan, 2017

3.5.1.4 Jaringan Jalan dan Transportasi

Kabupaten Kapuas Hulu masih memiliki infrastruktur jalan yang sangat terbatas, panjangnya masih 1.186,874 km yang permukaannya 166,862 km diaspal, 334,786 kerikil, 512,498 km masih berupa tanah, 172,728 tidak dirinci. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu No.264 Tahun 2012, di tujuh kecamatan yang merupakan kawasan

agropolitan, panjang jalan keseluruhan adalah 830.71 km. Berdasarkan hasil observasi dan juga hasil wawancara yang telah dilakukan, di tujuh kecamatan agropolitan masih terdapat jalan yang kondisinya masih sangat bergantung dengan cuaca. Di beberapa desa di kecamatan, masih terdapat jalan yang tidak bisa dilalui ketika musim hujan sehingga desa tersebut sulit untuk diakses.

Gambar III.52 Peta Jaringan Jalan



Sumber: Hasil Pengolahan, 2017

Di Kabupaten Kapuas Hulu, masyarakat tidak mengandalkan kendaraan umum. Sehingga jarang sekali ditemukan angkutan umum. Masyarakat rata-rata memiliki kendaraan pribadi, seperti motor. Meskipun begitu, terdapat minibus yang dapat mengantarkan masyarakat ke luar kabupaten. Sayangnya minibus ini tidak dilengkapi dengan prasarana yang baik. Terminal hanya ada di Kecamatan Semtau, yaitu Terminal Tipe C yang seharusnya berfungsi melayani angkutan umum pedesaan. Terminal yang terletak di Desa Semtau Hilir, Kecamatan Semtau tersebut memiliki luas 1 ha namun berdasarkan survey lapangan yang dilakukan, terminal tersebut tidak berfungsi. Hal tersebut mengakibatkan minibus lebih sering berhenti di tempat ramai seperti di kawasan pertokoan di Kecamatan Semtau. Selain simpul transportasi darat, di kecamatan kawasan agropolitan pun terdapat dermaga yang membantu masyarakat untuk mencapai desa yang tidak bisa diakses melalui darat.

3.5.1.5 Air Bersih

Secara umum, terdapat beberapa sumber air di Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu ledeng, air sumur, sungai, hujan, dan kemas. Berdasarkan 71.103 unit rumah di Kabupaten Kapuas Hulu yang diperiksa oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, mayoritas rumah

tangga di Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan air minum dari ledeng. Begitupun dengan tujuh kecamatan KSK Agropolitan. Rata-rata rumah tangga di Kecamatan Silat Hulu, Kecamatan Silat Hilir, Kecamatan Pengkadan, Kecamatan Semitau, dan Kecamatan Empanang, air minumannya bersumber dari ledeng. Kecamatan Hulu Gurung mayoritas masih memanfaatkan air hujan dan kemas. Selanjutnya, Kecamatan Seberuang, sumber airnya merata dari ledeng, sumur, sungai, hujan, dan kemas. Selain itu, untuk beberapa desa di kecamatan, sumber air yang mereka gunakan masih bergantung pada cuaca. Di musim hujan, masyarakat Kecamatan Hulu Gurung, Pengkadan, dan Seberuang dapat menggunakan air yang berasal dari bukit yang kualitas airnya cenderung bersih dan segar. Sedangkan, ketika musim kering, masyarakat akan berpindah dari memanfaatkan air berasal dari bukit menjadi air sungai.

3.5.1.6 Sampah dan Limbah

Sampah dan limbah merupakan suatu hal yang selalu dihasilkan dari aktivitas masyarakat sehari-hari. Namun, di Kabupaten Kapuas Hulu, terutama di tujuh kecamatan yang termasuk kedalam kawasan strategis agropolitan masih memiliki kondisi pengelolaan limbah dan sampah yang sangat memprihatinkan. Pada level Kabupaten Kapuas Hulu saja, hanya terdapat dua kecamatan yang memiliki sistem pengangkutan sampah, yaitu di Kecamatan Putussibau Utara dan Putussibau Selatan, dan itu hanya melayani beberapa desa saja. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan di tujuh kecamatan Kawasan Agropolitan, tidak ada tempat pembuangan sampah lokal dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) lokal yang melayani masing-masing kecamatan. Bahkan bak sampah atau gerobak sampah pun hampir tidak ditemui saat survey dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagai alternatif, masyarakat membuang sampahnya ke sungai, dikubur, dibakar, atau dibuang ke hutan. Kegiatan membuang sampah ke sungai, ke hutan dan membakarnya tentu merupakan kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Sungai yang airnya masih menjadi sumber air sehari-hari masyarakat, jika tercemar kemudian dikonsumsi oleh masyarakat dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Begitupun dengan limbah cair, Di Kabupaten Kapuas Hulu (survey 71.103 rumah tangga), 53% tidak memiliki fasilitas buang air besar, 40% memiliki tempat pribadi, 4% bersama, dan 3% umum. Rumah tangga yang memiliki tempat buang air besar sendiri terbanyak adalah rumah tangga di Kecamatan Putussibau Selatan, sedangkan yang tidak memiliki tempat buang air besar terbanyak berada di Kecamatan silat hilir, yaitu 2.683 rumah tangga (Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, 2015).

3.5.1.7 Listrik dan Telekomunikasi

Berdasarkan data Podes tahun 2014 yang didapatkan, tujuh kecamatan yang merupakan kawasan strategis agropolitan sudah terlayani listrik. Walaupun sudah terlayani, tidak seluruh desa di masing-masing kecamatan sudah terlayani 100 persen. Bahkan, masih terdapat desa yang belum terlayani listrik sama sekali baik PLN dan Non PLN. Desa tersebut

adalah Desa Bati dan Desa Tanjung Keliling. Selain itu, kawasan-kawasan yang telah terlayani listrik pun belum seluruhnya terlayani selama 24 jam. Pemadaman lampu masih sering dihadapi oleh masyarakat. Sebagai upaya adaptasi masyarakat dalam menghadapi kondisi tersebut, beberapa rumah memiliki genset. Biasanya, rumah yang memiliki genset tersebut adalah tempat penginapan, tempat makan, dan toko. Kemudian, terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Desa Permata, Kecamatan Pengkadan. Pemanfaatan mikrohidro juga ditemukan di Desa Mubung, Kecamatan Hulu Gurung. Selain itu, ternyata sumber listrik tidak hanya berasal dari PLN atau tenaga air yang ada di dalam kawasan saja. Di Kecamatan Empanang, listrik disediakan oleh negara tetangga, Malaysia, yang bekerjasama dengan PLN.

Di tujuh kecamatan yang merupakan kawasan agropolitan, hingga kini belum terdapat jaringan telekomunikasi yang disediakan oleh badan usaha milik negara. Walaupun begitu, terdapat dua penyedia yang melayani Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu Telkomsel dan Indosat. Untuk Telkomsel, terdapat dua kecamatan yang tidak terlayani seratus persen oleh Telkomsel: Kecamatan Silat Hulu (Desa Nanga Luan, Desa Perejuk, Desa Nanga Lungu, Desa Lebak Najah, Desa Belimbing) dan Kecamatan Empanang (Desa Bajau Andai, Desa Kumang Jaya, dan Desa Tintin Peninjau). Sedangkan untuk indosat, terdapat tiga kecamatan yang tidak terlayani seratus persen: Kecamatan Silat Hilir (Desa Sungai Sena); Kecamatan Silat Hulu (seuruh desa); Kecamatan Empanang (Desa bajau Andal, Desa Kumang Jaya, Desa Titin Peninjau, dan Desa Lajang Sandang). Ternyata, ketersediaan sinyal dari kedua provider ini sangat bergantung dengan listrik. Jika terjadi pemadaman, ternyata Base Transceiver Station (BTS) tidak akan bekerja, sehingga menyebabkan tidak adanya sinyal.

3.5.2 Infrastruktur Penunjang Ekonomi

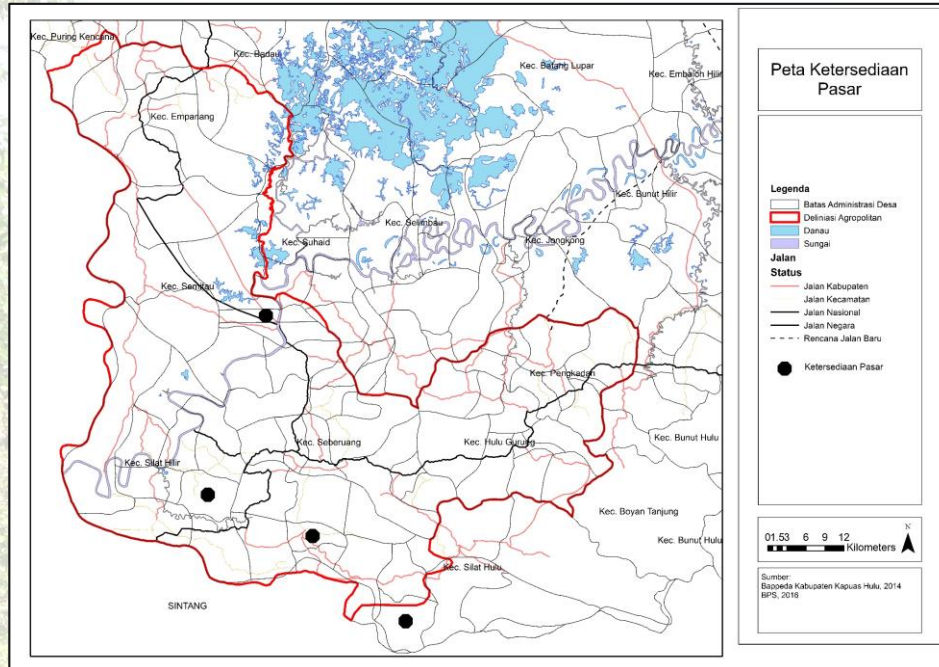
Infrastruktur penunjang ekonomi yang akan dibahas dalam bagian ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu infrastruktur perdagangan dan jasa dan infrastruktur pertanian, perkebunan, perternakan, dan industri.

3.5.2.1 Perdagangan dan Jasa

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak kecamatan, tidak seluruh kecamatan dilengkapi dengan pasar yang merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi ekonomi seperti membeli kebutuhan pokok. Berdasarkan hal tersebut, maka masyarakat di kecamatan yang tidak terlayani pasar mendapatkan kebutuhan sehari-hari dari toko kecil milik penduduk di sekitarnya. Sedangkan untuk kebutuhan pangan seperti sayur-sayuran didapatkan dengan menanam atau membeli dari pedagang keliling yang berasal dari kabupaten lain, seperti Kabupaten Sintang. Dari tujuh kecamatan tersebut, hanya tiga kecamatan yang terlayani pasar: Kecamatan Silat Hilir, Kecamatan Silat Hulu, dan Kecamatan Semitau. Di Kecamatan Silat Hilir, pasar berlokasi di Desa Sungai Sena, di Kecamatan Silat Hulu, pasar berada di Nanga Dangkan, sedangkan di Kecamatan Semitau, pasar terletak di Desa Semitau Hulu dan Semitau Hilir. Di antara tiga kecamatan yang memiliki pasar tersebut, pasar di Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau merupakan pasar yang paling besar dan ramai oleh penjual dan pembeli. Selain pasar, kawasan yang merupakan aglomerasi kegiatan jual-beli seperti

pertokoan juga hanya ada di Kecamatan Semitau saja. Berbeda dengan kecamatanlainnya, aglomerasi kegiatan jual-beli di Kecamatan Semitau ini memiliki kegiatan yang beragam, seperti tempat makan, laundry, mini market, toko elektronik. Kegiatan ini cukup ramai, bahkan terkadang menimbulkan kemacetan kerana angkutan umum seperti minibus juga melewati dan juga berhenti di kawasan ini.

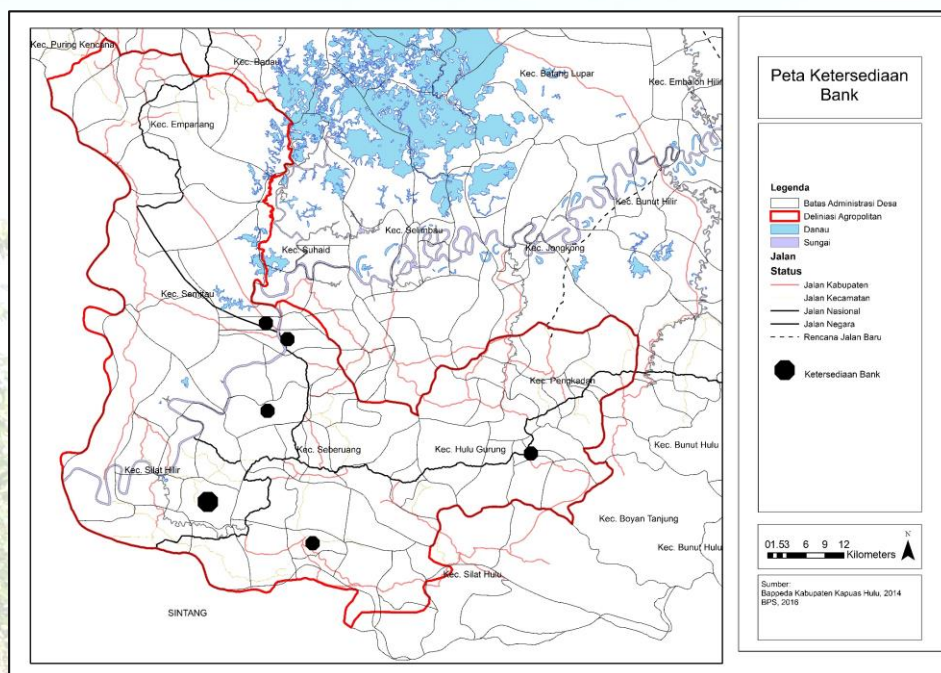
Gambar III.53 Ketersediaan dan Persebaran Prasarana Pasar



Sumber: Hasil Pengolahan, 2017

Fasilitas penting lainnya adalah perbankan. Dengan tersedianya perbankan, artinya masyarakat dapat mengakses fasilitas untuk menabung, meminjam dan mengambil uang. Namun, tidak seluruh kecamatan yang merupakan kawasan agropolitan terlayani oleh sarana ini. Dari tujuh kecamatan, yang tidak terlayani fasilitas perbankan adalah Kecamatan Pengkadan dan Kecamatan Empanang. Walaupun begitu, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, terdapat bank keliling yang mendatangi permukiman penduduk di dua kecamatan tersebut.

Gambar III.54 Ketersediaan dan Persebaran Prasarana Bank



Sumber: Hasil Pengolahan, 2017

3.5.2.2 Pertanian, Perikanan, Perkebunan, dan Industri

Berdasarkan Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka Tahun 2016, jenis sawah yang ada terbagi menjadi tiga jenis: sawah irigasi, sawah rawa lebak, sawah rawa pasang surut, dan sawah tadah hujan. Masing-masing kecamatan memiliki jenis sawah yang berbeda. Kecamatan yang memiliki luas pertanian secara keseluruhan yang luas adalah Kecamatan Hulu Gurung, Kecamatan Pengkadan, dan Kecamatan Seberuang. Berdasarkan Laporan Akhir Penyusunan Database Jaringan Irigasi Dinas Bina Marga Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu, 2016, pertanian yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu sangat mengandalkan air hujan karena memang jenis sawah paling banyak adalah sawah tadah hujan. Selain itu, terdapat juga irigasi sederhana PU, irigasi desa non PU, irigasi setengah teknis, dan irigasi teknis di Kabupaten Kapuas Hulu.

Selain pertanian, terdapat juga kegiatan lain, seperti budidaya sarang walet dan arwana atau ikan lainnya, berkebun karet dan komoditas lainnya. Kegiatan tersebut, hampir seluruhnya merupakan kegiatan ekonomi yang dikelola pribadi sehingga infrastruktur pendukung kegiatan tersebut juga disediakan oleh pemilik masing-masing. Dalam kegiatan budidaya sarang walet, infrastruktur yang dibutuhkan dalam mengembangkan budidaya ini hanyalah rumah walet yang dibangun mandiri oleh masyarakat dan biasanya terletak di sekitar rumah masyarakat tersebut. Sama halnya dengan kegiatan budidaya dan ikan lainnya. Infrastruktur pendukung selain kolam adalah sekat-sekat yang mengelilingi kolam tersebut, dan sekat tersebut dibuat mandiri. Biasanya kolam budidaya berlokasi di depan atau di belakang rumah pemiliknya. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan tersebut juga dikelola sendiri. Begitupun dengan kegiatan perkebunan. Mengingat masyarakat tidak mengolah hasil

perkebunan yang mereka dapatkan, di tujuh kecamatan yang merupakan kawasan agropolitan tidak terdapat industri yang mengolah komoditas tersebut. Sehingga infrastruktur pendukung kegiatan perkebunan tidak ditemui di kecamatan-kecamatan ini.

Industri yang berkembang di tujuh kecamatan ini merupakan industri besar yang dikelola oleh perusahaan. Infrastruktur pendukung yang mereka butuhkan pun mereka sediakan sendiri seperti infrastruktur pengolahan dan pembuangan limbah industri. Selain itu, infrastruktur jalan pun mereka sediakan secara mandiri, jalan tersebut dikenal masyarakat dengan jalan sawit.

3.6 Gambaran Umum Ekonomi

Bagian ini akan menjelaskan gambaran umum aspek ekonomi dalam konteks pengembangan KSK Agropolitan di Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam pembahasannya akan dijelaskan karakteristik ekonomi wilayah eksternal dan internal untuk dapat menjadi basis dasar informasi yang terdiri dari karakteristik perekonomian Provinsi Kalimantan Barat, karakteristik perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu, serta karakteristik perekonomian wilayah KSK Agropolitan.

3.6.1 Karakteristik Perekonomian Provinsi Kalimantan Barat

Untuk mengetahui karakteristik perekonomian Provinsi Kalimantan Barat, secara umum akan dilihat kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Barat terhadap Pulau Kalimantan serta dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Kemudian akan ditinjau kontribusi setiap lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengetahui sektor basisnya. Kemudian dilanjutkan dengan tinjauan terhadap karakteristik ekspor-impor di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, termasuk tingkat ekspor berdasarkan golongan barang.

Produk Domestik Regional Bruto pada tingkat provinsi menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Apabila dinilai secara eksternal kewilayahan, Provinsi Kalimantan barat apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan memiliki kontribusi kedua tertinggi, dibawah Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan timur berkontribusi besar pada perekonomian di pulau Kalimantan, hingga mencapai lebih dari 60%. Hal ini menunjukkan kegiatan ekonomi di pulau Kalimantan didominasi oleh Provinsi Kalimantan Timur. Namun jika dilihat secara perkembangan dari tahun ke tahun, perekonomian Kalimantan Barat cenderung meningkat, dari yang sebelumnya berkontribusi sebesar 13,36 persen pada tahun 2013 menjadi sebesar 14,13% pada tahun 2015.

Tabel III.15 Menurut Provinsi di Pulau Kalimantan Tahun 2013-2015 (Juta Rupiah)

Provinsi	2013	%	2014	%	2015	%
Kalimantan Barat	118.640.957,9	13,36	132.367.206,6	14,13	146.885.970,6	14,13
Kalimantan Tengah	81.956.921,5	9,23	89.887.446,5	9,60	100.148.195,3	9,60
Kalimantan Selatan	115.858.201,6	13,04	127.898.024,5	13,66	137.518.033,2	13,66
Kalimantan Timur	571.736.571,0	64,37	586.469.301,1	62,62	564.686.638,4	62,62

Provinsi	2013	%	2014	%	2015	%
Kalimantan	888.192.652,1	100,00	936.621.978,8	100,00	949.238.837,6	100,00

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2016

PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. PDRB Provinsi Kalimantan Barat atas dasar harga berlaku tahun 2015 mencapai 146,88 trilyun rupiah dengan kontribusi terbesar pada sektor pertanian (21,2%), sektor industri pengolahan (15,73%), dan sektor perdagangan (14,70%). Struktur perekonomian ini masih menunjukkan sektor pertanian sebagai sektor basis (leading sector). Namun, jika dilihat strukturnya dalam lima tahun terakhir tampak terjadi pergeseran sektoranl, dimana sektor industri pengolahan mulai menurun peranannya digantikan dengan sektor konstruksi dan jasa. Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 tumbuh sebesar 4,81 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2014 yaitu sebesar 5,03 persen. Hal ini terutama didorong oleh pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh 11,19 persen. Meningkatnya PDRB secara total tahun 2015 diikuti dengan meningkatnya PDRB per kapita. Pada tahun 2014 PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Barat mecapai 28,07 juta rupiah, sedangkan tahun 2015 meningkat sekitar 9,26 persen menjadi 30,67 juta rupiah.

Tabel III.16 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Barat

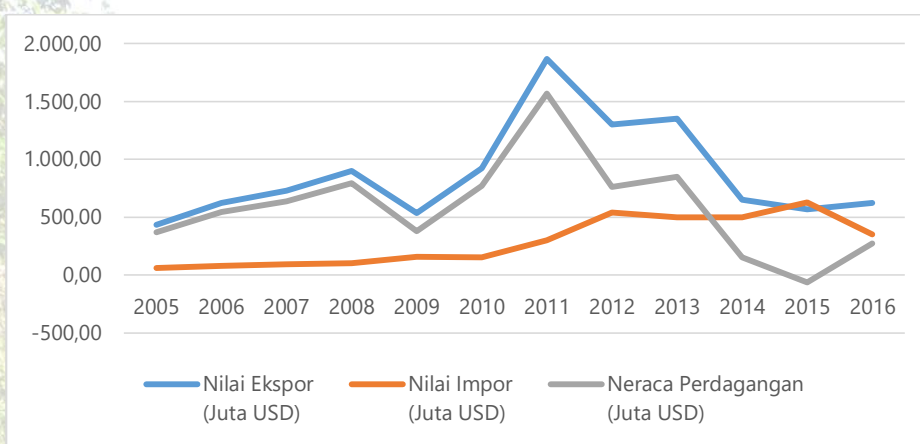
No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,77	21,60	21,02
2	Pertambangan dan Penggalian	5,03	4,79	4,9
3	Industri Pengolahan	16,33	16,47	15,73
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,13	0,13	0,12
6	Konstruksi	11,45	12,21	12,84
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,52	14,48	14,7
8	Transportasi dan Pergudangan	4,22	4,31	4,41
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,29	2,31	2,38
10	Informasi dan Komunikasi	3,3	3,30	3,35
11	Jasa Keuangan	3,61	3,63	3,56
12	Real Estate	3,08	3,04	3,01
13	Jasa Perusahaan	0,45	0,45	0,47
14	Administrasi Pemerintahan, dan Pertahanan	5,8	6,29	6,66
15	Jasa Pendidikan	4,44	4,42	4,28
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,49	1,49	1,5
17	Jasa lainnya	1,03	1,03	1,01
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2016

Apabila dilihat dari sisi perdagangan, Provinsi Kalimantan Barat merupakan daerah yang banyak menghasilkan produk primer yang cukup laku di pasaran, sehingga kegiatan ekspor komoditas pun cukup tinggi. Jika dilihat secara *time series* pada periode tahun 2005-2016,

nilai ekspor Provinsi Kalimantan Barat secara umum terus meningkat hingga tahun 2011 mencapai sekitar US\$ 1.800 juta, kemudian nilai ekspor cenderung menurun hingga tahun 2015. Pada tahun 2015 total nilai ekspor Provinsi Kalimantan Barat mencapai US\$ 565,97 juta, menurun sebesar 13,19% dibandingkan tahun 2014 yang mencapai US\$ 651,99 juta. Adapun pelabuhan yang banyak memberikan andil terhadap ekspor Kalimantan Barat adalah Pelabuhan Pontianak dengan nilai ekspor sebesar US\$ 495,83 juta dan Pelabuhan Nanga Badau dengan nilai ekspor sebesar US\$ 34,21 juta. Kemudian terkait impor barang, pemasukan khususnya terjadi pada komoditas beras, tepung terigu, dan gula pasir, karena masih kekurangan sehingga harus didatangkan dari luar daerah.

Gambar III.55 Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor Provinsi Kalimantan Barat



Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Kalimantan Barat, 2016

Kemudian, apabila dilihat dari sisi komoditas atau golongan barang, nilai ekspor terbesar di Provinsi Kalimantan Barat disumbang oleh karet dan barang dari karet, yaitu sebesar 39,93% dengan nilai mencapai US\$ 284,94 juta. Kemudian disusul oleh kayu, barang dari kayu sebesar 22,49% dengan nilai mencapai US\$ 140,23 juta dan bahan kimia anorganik sebesar 20,34% dengan nilai US\$ 126,78 juta. Hal ini menunjukkan sektor perkebunan dan kehutanan masih berkontribusi besar dalam kegiatan ekspor provinsi Kalimantan Barat. Nilai ekspor menurut golongan barang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.17 Persentase Ekspor Provinsi Kalimantan Barat menurut Komoditas Utama Tahun 2016

Golongan Barang (HS)	Nilai Ekspor (Juta US\$)	Persentase (%)
Karet dan Barang dari Karet (HS40)	248,94	39,93
Kayu, Barang dari Kayu (HS44)	140,23	22,49
Bahan Kimia Anorganik (HS28)	126,78	20,34
Lemak & Minyak Hewan/Nabati (HS15)	38,04	6,10
Ampas/Sisa Industri Makanan (HS23)	17,69	2,84
Buah-buahan (HS08)	16,42	2,63
Tembakau (HS24)	13,46	2,16
Ikan dan Udang (HS03)	8,05	1,29
Perabot, Penerangan Rumah (HS94)	3,01	0,48
Biji-bijian Berminyak (HS12)	1,94	0,31

Golongan Barang (HS)	Nilai Ekspor (Juta US\$)	Persentase (%)
Lainnya	8,86	1,42
Total Ekspor	623,42	100,00

Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Kalimantan Barat, 2016

3.6.2 Karakteristik Perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu

Pada bagian ini akan ditinjau karakteristik perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu dengan melihat beberapa komponen. Pertama yaitu tinjauan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), khususnya melihat laju pertumbuhan ekonomi serta pendapatan per kapita. Kemudian berdasarkan data tersebut akan dilihat karakteristik daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Tipologi Klassen. Selanjutnya akan ditinjau penanaman modal, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kemudian akan ditinjau jumlah produksi komoditas menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat pada beberapa sub sektor, yaitu tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, dan perikanan.

Kemampuan perekonomian wilayah dapat dilihat melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto pada tingkat regional. Secara eksternal pada lingkup provinsi, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang berada di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu dengan rata-rata sekitar 4,5%. Pada tahun 2015, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 7,05 Triliun. Secara umum, kabupaten/kota yang memberi kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kalimantan Barat adalah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Pada tahun 2015, PDRB atas dasar harga berlaku Kota Pontianak mencapai Rp. 27,59 triliun dan Kabupaten Kubu Raya mencapai Rp. 19,12 triliun, dimana kontribusinya masing-masing sebesar 18,79% dan 13,03%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2015 terjadi di Kabupaten Kubu Raya, yaitu sebesar 6,21% dan disusul oleh Kota Singkawang sebesar 6,18%. Sementara itu Kabupaten yang mengalami pertumbuhan terendah adalah Kabupaten Sanggau, yaitu sebesar 3,15%.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu masih sedikit berada di bawah angka Provinsi. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 4,67%, sedangkan Provinsi Kalimantan Barat mencapai 4,81%. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu pada periode 2011-2015 cukup konsisten dengan rata-rata 4,64%. Kemudian pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi naik sekitar 0,69% dibandingkan pada tahun 2014 yang mengindikasikan kinerja perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu mengalami peningkatan. Secara rinci, laju pertumbuhan ekonomi menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.18 Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Provinsi Kalimantan Barat menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011-2015 (Persen)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kab Sambas	5,75	5,90	6,17	5,40	4,78
Kab Bengkayang	5,65	5,87	5,90	4,02	3,96
Kab Landak	6,99	5,42	5,20	4,93	5,11
Kab Pontianak	4,78	4,06	5,44	6,00	5,60
Kab Sanggau	4,61	6,03	5,98	3,26	3,15
Kab Ketapang	7,98	4,65	4,72	2,76	5,53
Kab Sintang	5,49	5,60	6,47	5,36	4,65
Kab Kapuas Hulu	4,56	4,75	5,23	3,98	4,67
Kab Sekadau	6,05	6,21	6,52	6,09	5,75
Kab Melawi	6,05	6,22	4,85	4,73	4,61
Kab Kayong Utara	5,93	5,78	5,25	5,65	5,03
Kab Kubu Raya	6,51	6,61	6,49	6,37	6,21
Kota Pontianak	5,88	7,77	7,83	5,94	4,84
Kota Singkawang	6,46	6,64	6,60	6,61	6,18
Kalimantan Barat	5,50	5,91	6,05	5,03	4,81

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2016

Meningkatnya PDRB secara total tahun 2015 diikuti pula dengan meningkatnya PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan data BPS Kalimantan Barat, pada tahun 2014 PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Barat mencapai Rp. 28,07 juta, sedangkan tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 30,67 juta. Jika dilihat pada tingkat kabupaten/kota, daerah yang memiliki PDRB perkapita tertinggi adalah Kota Pontianak, yang mencapai Rp. 45,41 juta pada tahun 2015. Kemudian disusul oleh Kabupaten Ketapang sebesar Rp. 36,68 juta. Kemudian Kabupaten yang memiliki PDRB perkapita terendah adalah Kabupaten Melawi, yaitu sebesar Rp. 18,64 juta.

Apabila dilihat secara spesifik, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki nilai PDRB per kapita di bawah Provinsi Kalimantan Barat serta dibawah beberapa wilayah lain, seperti Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Sanggau, dengan nilai sebesar Rp. 28,66 juta. Namun apabila dilihat dalam kurun waktu 2011-2015, PDRB per kapita seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Kapuas Hulu pada periode 2011-2015 menunjukkan trend yang terus meningkat. Pada tahun 2015, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kapuas Hulu mengalami kenaikan sebesar 2,2% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 nilai PDRB per kapita Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 28,7 juta rupiah, sementara tahun 2014 sebesar 26,5 juta rupiah. Hal ini menunjukkan kinerja perekonomian daerah yang semakin membaik. Perkembangan PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Barat menurut kecamatan pada periode 2011-2015 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Tabel III.19 PDRB Per Kapita di Provinsi Kalimantan Barat menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kab Sambas	13,26	20,80	22,92	25,42	28,04
Kab Bengkayang	12,01	20,23	22,12	23,89	25,79
Kab Landak	9,91	16,10	17,54	19,03	20,82
Kab Pontianak	10,36	15,45	18,09	20,31	22,80
Kab Sanggau	13,80	25,77	27,79	29,41	31,42
Kab Ketapang	15,51	31,15	32,57	34,39	36,67
Kab Sintang	11,88	19,69	21,83	23,79	25,73
Kab Kapuas Hulu	11,56	22,41	24,58	26,54	28,66
Kab Sekadau	7,42	16,86	18,51	20,40	22,43
Kab Melawi	6,06	14,79	15,97	17,26	18,64
Kab Kayong Utara	10,94	20,12	22,01	24,35	26,63
Kab Kubu Raya	19,55	25,18	27,76	31,10	35,10
Kota Pontianak	24,59	33,56	38,06	41,93	45,41
Kota Singkawang	14,86	26,69	29,63	32,97	36,01
Kalimantan Barat	21,55	23,43	25,56	28,07	30,67
Indonesia	32,36	35,10	38,37	41,90	45,18

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2016

Kemudian, untuk melihat mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah dilakukan analisis Tipologi Klassen. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibedakan menjadi empat klasifikasi, yaitu: daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh (*high growth and high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but low income*), dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*).

Tabel III.20 Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

PERTUMBUHAN EKONOMI	DAERAH BERKEMBANG	DAERAH MAJU DAN CEPAT TUMBUH
	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Landak • Kabupaten Pontianak • Kabupaten Sekadau • Kabupaten Kayong Utara 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Ketapang • Kabupaten Kubu Raya • Kota Sngkawang
	DAERAH RELATIF TERTINGGAL	DAERAH MAJU TAPI TERTEKAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Sambas • Kabupaten Bengkayang • Kabupaten Sintang • Kabupaten Kapuas Hulu • Kabupaten Melawi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Sanggau • Kota Pontianak
	PENDAPATAN PER KAPITA	

Sumber: Analisis data BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2016

Berdasarkan analisis kelas yang dilakukan pada lingkup provinsi Kalimantan Barat, sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat berada pada klasifikasi daerah berkembang dan daerah relatif tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kabupaten di provinsi Kalimantan Barat masih banyak masyarakatnya yang memiliki pendapatan per kapita rendah. Kemudian, secara spesifik ditemukan bahwa Kabupaten Kapuas Hulu masuk ke dalam karakteristik daerah yang relatif tertinggal, bersama dengan Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sintang, dan Melawi. Hal ini berarti Kabupaten Kapuas Hulu memiliki pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Barat. Salah satu faktor yang menjadi penyebab adalah faktor endogen dari wilayah itu sendiri yang tidak kompetitif dan menjadi batas-batas yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengembangan lebih baik lagi.

Terkait dengan kegiatan penanaman modal (investasi), secara umum Kabupaten Kapuas Hulu memiliki rencana penanaman modal (baik itu PMA ataupun PMDN) yang tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Kalimantan Barat, mencapai lebih dari Rp 12 triliun. Nilai ini merupakan nilai tertinggi kedua dibawah Kabupaten Ketapang yang mencapai lebih dari Rp 27 triliun. Namun, realisasi PMA dan PMDN di Kabupaten Kapuas Hulu baru mencapai Rp 4,8 triliun, dimana tingkat realisasi tersebut hanya mencapai kurang lebih 40% dari seluruh rencana. Rencana dan realisasi PMA dan PMDN menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.21 Rencana dan Realisasi PMDN – PMA di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015

KABUPATEN/KOTA	RENCANA (Rp Juta)		REALISASI (Rp Juta)	
	PMDN	PMA	PMDN	PMA
Kab Sambas	1.081.949,00	311.762,06	783.946,52	272.313,34
Kab Bengkayang	2.576.326,85	1.375.095,90	2.486.223,05	11.707,84
Kab Landak	2.806.579,86	203.553,17	1.277.140,14	326.550,48
Kab Pontianak	3.468.341,48	458.235,64	3.537.598,20	190.648,29
Kab Sanggau	7.134.620,20	764.540,18	4.294.885,32	1.024.191,63

FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STARTEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU

KABUPATEN/KOTA	RENCANA (Rp Juta)		REALISASI (Rp Juta)	
	PMDN	PMA	PMDN	PMA
Kab Ketapang	24.101.021,39	2.923.059,58	4.725.125,24	1.652.877,52
Kab Sintang	8.922.808,28	58.172,41	4.420.405,87	112.065,25
Kab Kapuas Hulu	11.997.080,00	536.745,48	4.853.202,07	50.715,41
Kab Sekadau	2.624.493,98	36.854,78	1.122.680,06	217.845,14
Kab Melawi	149.480,00	205.879,16	2.559,28	128.797,14
Kab Kayong Utara	407.000,00	0,00	186.000,00	0,00
Kab Kubu Raya	1.553.340,12	230.436,41	2.212.939,99	331.445,47
Kota Pontianak	700.999,87	369.556,51	450.505,59	127.543,15
Kota Singkawang	44.300,00	2.540,00	66.941,10	0,00

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2016

Kemudian jika disusuri lebih detail menurut bidang usaha, nilai investasi (baik penanaman modal dalam negeri maupun asing – PMDN dan PMA) terbesar yaitu pada sektor perkebunan yang dimana pada umumnya merupakan investasi untuk perkebunan sawit. Sektor perkebunan tersebut sangat mendominasi, yaitu mencapai lebih dari 90% dari total nilai investasi di Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian diikuti dengan sektor perdagangan dan konstruksi. Namun apabila dilihat secara realisasinya masih belum optimal, dimana hanya 10 persen nilai investasi yang terealisasi hingga tahun 2016, khususnya pada sektor perkebunan. Hal ini mengindikasikan sistem penanaman modal di Kabupaten Kapuas Hulu belum optimal dalam mendorong kegiatan penanaman modal. Secara rinci, rencana dan realisasi PMDN dan PMA di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.22 Rencana dan Realisasi PMA dan PMDN di Kabupaten Kapuas Hulu menurut Bidang Usaha Tahun 2016

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)				
BIDANG USAHA	NILAI INVESTASI			
	RENCANA (Rp)		REALISASI (Rp)	
Perkebunan (Sawit)	Rp	18.991.016.580.000	Rp	2.231.500.000.000
Konstruksi Jalan dan Bangunan Sipil	Rp	100.556.520.000	Rp	-
Perdagangan Besar	Rp	27.080.000.000	Rp	2.495.000.000
Perdagangan Eceran	Rp	821.880.000.000	Rp	805.000.000.000
Angkutan Darat	Rp	2.000.000.000	Rp	-
Air Minum	Rp	1.657.300.000	Rp	835.000.000
Lainnya	Rp	7.828.500.000	Rp	-
Penanaman Modal Asing (PMA)				
BIDANG USAHA	NILAI INVESTASI			
	RENCANA (Rp)		REALISASI (Rp)	
Perkebunan (Sawit)	Rp	4.822.210.070.000	Rp	-
Pertambangan	Rp	45.000.000.000	Rp	-

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 2017

Terkait dengan pengembangan agropolitan, pengembangan pertanian mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, dan perikanan. Dari sub sektor tanaman pangan, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki wilayah yang cukup luas dan potensial untuk dikembangkan menjadi daerah pertanian. Namun sampai dengan tahun

2015, luas lahan yang digunakan untuk persawahan hanya 1,33% dari total luas wilayah kabupaten. Jenis sawah yang paling luas berdasarkan sumber pengairannya adalah sawah tadah hujan, yaitu seluas 22.262 ha. Luas panen padi di Kabupaten Kapuas Hulu dari hasil laporan statistik pertanian tahun 2015 menunjukkan penurunan, begitu pula dengan jumlah produksinya. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Barat, produksi komoditas-komoditas sektor tanaman pangan masih rendah, tidak sampai 3% dari total produksi Kalimantan Barat. Produksi komoditas sub sektor tanaman pangan menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.23 Produksi Komoditas Tanaman Pangan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015

NO	KECAMATAN	PRODUKSI KOMODITAS (Ton)								JUMLAH
		Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Kacang Kedelai	
1	Kab Sambas	286.159	343	67	6.154	1.174	14	1.043	1.901	296.855
2	Kab Bengkayang	60.287	20.105	78.373	44.379	3.032	245	28	561	207.010
3	Kab Landak	188.436	17.578	5.977	45.220	400	148	0	15	257.774
4	Kab Pontianak	72.809	188	1.744	8.880	933	16	4	16	84.590
5	Kab Sanggau	107.830	25.992	3.314	17.250	1.438	121	0	0	155.945
6	Kab Ketapang	68.468	13.309	960	11.724	1.217	42	0	21	95.741
7	Kab Sintang	38.665	35.733	2.848	14.313	1.963	210	9	27	93.768
8	Kab Kapuas Hulu	19.406	18.723	337	6.082	639	40	1	15	45.243
9	Kab Sekadau	19.030	7.903	1.257	6.909	118	12	4	17	35.250
10	Kab Melawi	13.845	13.847	114	3.421	262	13	1	0	31.503
11	Kab Kayong Utara	48.306	289	37	2.179	377	22	0	5	51.215
12	Kab Kubu Raya	179.158	1.270	8.048	3.592	2.618	62	11	40	194.799
13	Kota Pontianak	464	0	25	1.676	117	0	0	0	2.282
14	Kota Singkawang	17.563	0	642	1.668	576	0	1	18	20.468
KALIMANTAN BARAT		1.120.426	155.280	103.743	173.447	14.864	945	1.102	2.636	1.572.443

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2015

Sub sektor perkebunan merupakan salah satu andalan Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya tanaman sawit dan karet. Pada tahun 2015, produksi sawit di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebesar 58.064 ton, sedangkan produksi karet sebesar 16.905 ton. Namun, apabila dilihat secara eksternal jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Barat, jumlah produksi tersebut masih terbilang rendah, dimana kontribusinya hanya sekitar 3% untuk sawit dan 6% untuk karet dari total produksi Provinsi Kalimantan Barat. Kontribusi sawit terbesar di Kalimantan Barat yaitu berasal dari Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang, sedangkan kontribusi karet terbesar berasal dari Kab Sanggau, dimana mencapai lebih dari 20%. Produksi komoditas sub sektor perkebunan menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.24 Produksi Komoditas Perkebunan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015

NO	KAB/KOTA	PRODUKSI KOMODITAS (Ton)						JUMLAH
		Sawit	Lada	Kopi	Kakao	Kelapa	Karet	
1	Kab Sambas	105.934	450	571	140	13.562	17.750	138.407
2	Kab Bengkayang	111.243	1.293	68	549	2.645	23.073	138.871
3	Kab Landak	113.922	2	427	302	0	32.235	146.888
4	Kab Pontianak	5.432	127	253	191	16.007	3.815	25.825
5	Kab Sanggau	471.475	1.130	89	1.216	195	53.356	527.461
6	Kab Ketapang	437.930	51	542	25	1.739	16.220	456.507
7	Kab Sintang	214.791	404	98	9	355	38.865	254.522
8	Kab Kapuas Hulu	58.064	11	10	54	42	16.905	75.086
9	Kab Sekadau	163.691	7	0	38	1	23.121	186.858
10	Kab Melawi	30.725	1	1	0	136	13.542	44.405
11	Kab Kayong Utara	23.829	0	481	0	5.358	994	30.662
12	Kab Kubu Raya	82.170	138	1.242	26	39.503	14.212	137.291
13	Kota Pontianak	0	0	0	0	0	0	0
14	Kota Singkawang	4.796	7	8	135	1.529	5.272	11.747
KALIMANTAN BARAT		1.824.002	3.621	3.790	2.685	81.072	259.360	2.174.530

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2015

Sub sektor tanaman hortikultura terbagi menjadi dua, sayur-sayuran dan buah-buahan. Secara umum produksi tanaman sayur-sayuran Kabupaten Kapuas Hulu cukup rendah, peringkat ketiga terbawah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat. Secara keseluruhan, produksi sub sektor tanaman sayur-sayuran Kabupaten Kapuas Hulu hanya mampu berkontribusi 2% dari total produksi tanaman sayur-sayuran Provinsi Kalimantan Barat. Walaupun potensinya cukup besar, tetapi kondisi produksi dan produktivitas saat ini masih jauh tertinggal dari daerah-daerah lain. Produksi komoditas tanaman sayur-sayuran menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.25 Produksi Komoditas Tanaman Sayur-Sayuran menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015

NO	KAB/KOTA	PRODUKSI KOMODITAS (Ton)										JUMLAH
		Bawang Daun	Petsai/Sawi	Kacang Panjang	Cabai	Tomat	Terung	Buncis	Ketimun	Kangkung	Bayam	
1	Kab Sambas	50	294	703	559	59	333	8	750	1.363	1.307	5.426
2	Kab Bengkayang	85	119	1.016	1.172	368	816	228	1.268	190	86	5.348
3	Kab Landak	1	2	370	410	10	334	1	341	109	42	1.620
4	Kab Pontianak	73	297	496	478	172	373	98	458	262	174	2.881
5	Kab Sanggau	6	118	565	496	44	485	40	486	299	165	2.704
6	Kab Ketapang	61	573	460	702	3	1.179	99	2.032	1.435	994	7.538
7	Kab Sintang	0	204	1.416	817	553	997	123	3.836	789	981	9.716

FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU

8	Kab Kapuas Hulu	14	69	287	133	22	86	17	353	112	101	1.194
9	Kab Sekadau	0	16	25	14	3	7	1	9	15	9	99
10	Kab Melawi	0	10	174	218	0	200	0	212	42	41	897
11	Kab Kayong Utara	133	244	552	362	352	986	24	701	654	90	4.098
12	Kab Kubu Raya	87	119	608	971	282	465	289	4.010	180	27	7.038
13	Kota Pontianak	313	696	240	330	120	64	29	309	1.189	407	3.697
14	Kota Singkawang	63	2.029	357	189	64	103	105	651	265	226	4.052
KALIMANTAN BARAT		886	4.790	7.269	6.851	2.052	6.428	1.062	15.416	6.904	4.650	56.308

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2015

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2016, sub sektor peternakan memiliki populasi yang cukup tinggi pada komoditas ayam buras dan sapi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Barat. Populasi ternak besar di Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu sapi sebesar 8.839 ekor dan ternak kecil terdiri dari kambing 5.359 ekor dan babi sebanyak 19.496 ekor. Untuk populasi ternak sapi, Kabupaten Kapuas Hulu berkontribusi sebesar 5,5%, sedangkan untuk ayam buras sebesar 4,3% dari total populasi di Provinsi Kalimantan Barat. Populasi ternak menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.26 Populasi Komoditas Peternakan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015

NO	KAB/KOTA	POPULASI TERNAK (Ekor)							JUMLAH
		Sapi	Kambing	Babi	Ayam Buras	Ayam Ras Pedaging	Ayam Ras Petelur	Itik/Itik Manila	
1	Kab Sambas	11.099	24.953	6.965	437.584	2.830.834	27.200	266.131	3.604.766
2	Kab Bengkayang	12.330	16.008	25.810	133.797	302.403	32.713	23.655	546.716
3	Kab Landak	7.900	6.677	92.037	320.848	1.926.000	13.000	11.597	2.378.059
4	Kab Pontianak	12.042	27.411	57.005	332.531	6.177.821	129.500	60.259	6.796.569
5	Kab Sanggau	11.007	6.203	32.187	333.003	1.592.143	0	18.224	1.992.767
6	Kab Ketapang	35.121	9.131	107.031	48.371	3.500.419	78.700	39.395	3.818.168
7	Kab Sintang	7.741	2.765	88.376	482.727	1.788.918	6.500	16.532	2.393.559
8	Kab Kapuas Hulu	8.839	5.359	19.496	256.038	570.197	4.790	6.812	871.531
9	Kab Sekadau	12.948	5.515	41.462	148.464	1.206.170	0	29.313	1.443.872
10	Kab Melawi	9.788	3.054	17.975	138.636	59.500	0	8.220	237.173
11	Kab Kayong Utara	7.221	12.564	2.246	119.348	430.000	1.200	14.919	587.498
12	Kab Kubu Raya	15.778	28.979	34.130	2.594.948	8.870.056	324.052	61.401	11.929.344
13	Kota Pontianak	3.066	1.454	175	17.698	3.500.419	0	8.585	3.531.397
14	Kota Singkawang	5.181	2.295	35.761	552.104	11.745.161	1.908.131	15.785	14.264.418
KALIMANTAN BARAT		160.061	152.368	560.656	5.916.097	44.500.041	2.525.786	580.828	54.395.837

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2015

Sama seperti sub sektor hortikultura tanaman sayur-sayuran, secara umum produksi tanaman buah-buahan Kabupaten Kapuas Hulu masih terbilang cukup rendah, peringkat keempat terbawah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat. Secara keseluruhan, produksi sub sektor tanaman buah-buahan Kabupaten Kapuas Hulu hanya mampu berkontribusi 1,2% dari total produksi tanaman buah-buahan Provinsi Kalimantan Barat. Produksi komoditas tanaman buah-buahan menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU

Tabel III.27 Produksi Komoditas Tanaman Buah-Buahan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015

NO	KAB/KOTA	PRODUKSI KOMODITAS (Ton)																JUMLAH
		Belimbing	Duku/Langsar	Durian	Jambu Biji	Jeruk	Mangga	Manggis	Nangka	Nanas	Pepaya	Pisang	Rambutan	Salak	Sawo	Sirsak	Sukun	
1	Kab Sambas	85	325	6,705	68	106,896	711	7	338	234	221	5,666	1,534	66	902	29	47	123,834
2	Kab Bengkayang	19	198	438	24	23,184	352	9	418	292	311	12,752	159	2	98	21	49	38,326
3	Kab Landak	59	641	1,065	100	32	152	50	483	29	395	195	186	0	8	33	62	3,490
4	Kab Pontianak	100	178	2,001	114	4,917	523	563	619	9,453	935	23,558	569	7	1,404	77	45	45,063
5	Kab Sanggau	94	110	477	140	399	232	76	1,714	77	482	2,460	686	16	146	41	128	7,278
6	Kab Ketapang	92	148	1,718	263	786	807	57	1,142	134	336	3,165	1,273	6	102	64	38	10,131
7	Kab Sintang	142	295	793	296	325	370	18	705	107	602	2,211	423	59	48	81	363	6,838
8	Kab Kapuas Hulu	32	112	2,903	73	65	207	26	201	217	80	783	282	8	7	22	30	5,048
9	Kab Sekadau	8	127	576	32	73	72	31	102	13	72	326	259	19	3	3	11	1,727
10	Kab Melawi	51	198	832	65	45	202	64	231	14	72	308	184	3	10	13	36	2,328
11	Kab Kayong Utara	13	336	1,254	34	94	551	34	352	1,328	45	1,092	518	237	94	11	53	6,046
12	Kab Kubu Raya	162	159	369	215	987	390	59	1,426	30,767	1,655	85,579	1,390	250	240	90	48	123,786
13	Kota Pontianak	41	363	340	129	72	235	0	799	1,383	4,368	1,291	745	7	115	35	31	9,954
14	Kota Singkawang	26	63	2,083	30	9,517	313	15	213	12,267	70	3,359	1,885	0	72	11	48	29,972
KALIMANTAN BARAT		924	3,253	21,554	1,583	147,392	5,117	1,009	8,743	56,315	9,644	142,745	10,093	680	3,249	531	989	413,821

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2015

Sub sektor perikanan memiliki jumlah produksi yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Barat. Secara total produksi, Kabupaten Kapuas Hulu merupakan peringkat keempat tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat. Produksi terbesar di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya yaitu ikan perairan umum sebesar 15.836 ton dan ikan budidaya yaitu sebesar 16.150 ton. Untuk produksi ikan perairan umum, Kabupaten Kapuas Hulu berkontribusi paling tinggi diantara kabupaten/kota lain, yaitu mencapai 64,3% dari total produksi Kalimantan Barat. Sedangkan untuk ikan budidaya, Kabupaten Kapuas Hulu berkontribusi sebesar 24,7% dari total produksi Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini menunjukkan potensi perikanan di Kabupaten Kapuas Hulu tergolong tinggi. Produksi komoditas perikanan menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.28 Produksi Komoditas Perikanan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015

NO	KAB/KOTA	KOMODITAS PERIKANAN (Ton)			JUMLAH
		Perikanan Tangkap		Perikanan Budidaya	
		Perairan Laut	Perairan Umum		
1	Kab Sambas	37.062	629	6.333	44.024
2	Kab Bengkayang	1.358	397	1.112	2.867
3	Kab Landak	0	217	620	837
4	Kab Pontianak	6.682	290	2.637	9.609
5	Kab Sanggau	0	685	5.466	6.151
6	Kab Ketapang	16.168	4.409	18.074	38.651
7	Kab Sintang	0	787	1.776	2.563
8	Kab Kapuas Hulu	0	15.836	16.150	31.986
9	Kab Sekadau	0	138	568	706
10	Kab Melawi	0	185	6.166	6.351
11	Kab Kayong Utara	21.643	243	317	22.203
12	Kab Kubu Raya	26.220	314	2.792	29.326
13	Kota Pontianak	51.500	0	1.858	53.358
14	Kota Singkawang	1.119	487	1.398	3.004
KALIMANTAN BARAT		161.752	24.617	65.267	251.636

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2015

3.6.3 Karakteristik Perekonomian KSK Agropolitan

Pada bagian ini akan ditinjau karakteristik perekonomian KSK Agropolitan dengan melihat beberapa komponen seperti persentase penggunaan lahan pertanian sebagai basis kegiatan pertanian. Kemudian ditinjau pula jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai potensi kegiatan masyarakat. Kemudian akan dilihat tingkat produksi setiap kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu pada sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, dan pertanian.

Wilayah KSK agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari tujuh kecamatan, yaitu Pengkadan, Seberuang, Empanang, Silat Hulu, Semitau, dan Hulu Gurung memiliki potensi lahan yang tinggi untuk dikembangkan kegiatan pertanian. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian di wilayah KSK agropolitan mencapai lebih dari 80%. Hal ini menunjukkan kegiatan pertanian merupakan kegiatan dominan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Secara spesifik penggunaan lahan terbesar yaitu pada pertanian bukan sawah. Persentase penggunaan

lahan pertanian di kawasan agropolitan tahun 2014 secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.29 Persentase Penggunaan Lahan Pertanian di Kawasan Agropolitan Tahun 2014

No	Kecamatan	Penggunaan Lahan			Total Luas Lahan	Persentase Lahan Pertanian
		Sawah	Pertanian Bukan Sawah	Bukan Pertanian		
1	Pengkadan	1.102	51.543	475	53.120	99,11
2	Seberuang	3.428	51.971	1.981	57.380	96,55
3	Empanang	800	32.125	2.800	35.725	92,16
4	Silat Hulu	446	96.484	9.250	106.180	91,29
5	Silat Hilir	264	107.138	10.308	117.710	91,24
6	Semitau	770	48.840	6.660	56.270	88,16
7	Hulu Gurung	1.207	33.583	8.500	43.290	80,36

Sumber: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, 2017

Kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam wilayah KSK agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu memiliki cukup banyak usaha mikro, kecil, dan menengah yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kegiatan pertanian. Secara umum jenis UMKM terbanyak yaitu terkait dengan perdagangan eceran sembako. Namun pada beberapa kecamatan terdapat pula UMKM terkait dengan kegiatan pertanian seperti usaha kelapa sawit dan industri furnitur dari kayu di kecamatan Silat Hilir dan Hulu Gurung. Kemudian terdapat pula UMKM budidaya perikanan di kecamatan Semitau. Kemudian terdapat pula unit simpan pinjam di beberapa kecamatan seperti Silat Hilir dan Semitau.

Tabel III.30 Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kawasan Agropolitan

NO.	KECAMATAN	JUMLAH UMKM	MENURUT JENIS KELAMIN					
			MIKRO		KECIL		MENEGAH	
			L	P	L	P	L	P
1.	Silat Hilir	60	11	10	27	10	2	0
2.	Silat Hulu	12	6	0	6	0	0	0
3.	Empanang	18	7	2	6	3	0	0
4.	Semitau	28	8	2	12	4	1	1
5.	Hulu Gurung	40	2	1	28	9	0	0
6.	Pengkadan	29	3	2	22	2	0	0
7.	Seberuang	17	7	2	6	1	1	0
JUMLAH		928	178	93	408	161	62	26
		928	271	569	88			

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kapuas Hulu, 2017

Selain itu, secara khusus terdapat pula koperasi yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, yang bermitra dengan perusahaan dalam bentuk inti-plasma. Terdapat beberapa catatan, dimana calon petani belum di-SK-kan oleh Bupati karena luas kebun plasma belum semua tergarap/ditanami. Perkebunan kelapa sawit yang berumur 10 tahun ke atas akan

dinilai kelayakannya untuk kemudian diserahkan kepada petani pengelolanya. Secara rinci, data koperasi di wilayah KSK agropolitan serta lokasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.31 Koperasi Bidang Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Agropolitan

NO.	NAMA KOPERASI	BADAN HUKUM		ALAMAT		MITRA PERUSAHAAN
		NOMOR	TANGGAL	DESA	KECAMATAN	
1.	KOPSA Mitra Gerempung Kitai	719/BH/XVII.2	20-04-2010	Na. Kantuk	Empanang	PT. Sentra Karya Manunggal
2.	KOPSA Mitra Pelangi Kapuas	724/BH/XVII.2	11-10-2010	Semitau Hulu	Semitau	PT. Duta Nusa Lestari
3.	KOPSA Mitra Dinamika Prakarsa	03/BH/XVII.2	25-04-2013	Kenepai Komplek	Semitau	PT. Dinamika Multi Prakarsa
4.	KOPSA Mitra Prima Serasi	04/BH/XVII.2	25-04-2013	Dangkan Kota	Silat Hulu	PT. Primanusa Mitra Serasi
5.	KUD Asmoja	35/BH/X.5	26-07-2004	Miau Merah	Silat Hilir	PT. Salim Group
6.	KUD Asmoja I	98/BH/XVII.2	04-10-2010	Sei Sena	Silat Hilir	PT. Salim Group
7.	Sinar Batu Putih	101/BH/XVII.2	14-04-2011	Bongkong	Silat Hilir	PT. Salim Group

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kapuas Hulu, 2014

Kemudian apabila dilihat dari besaran produksi pertanian yang mencakup beberapa sub sektor seperti tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, dan perikanan akan diketahui potensi pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk sub sektor tanaman pangan, secara umum kawasan agropolitan memiliki produksi cukup tinggi pada komoditas padi sawah dan padi ladang dengan nilai produksi secara berurutan sebesar 11.636 ton, 8.525 ton. Namun apabila dibandingkan dengan wilayah non-kawasan agropolitan jumlah produksi tersebut masih rendah, sepertiga dari total produksi wilayah non-kawasan agropolitan. Secara khusus, beberapa kecamatan di kawasan agropolitan memiliki potensi cukup baik dilihat dari produksinya yang mencapai lebih dari 4.000 ton pada tahun 2016, yaitu kecamatan Hulu Gurung, Pengkadan, dan Seberuang. Komoditas yang memiliki produksi terbesar yaitu padi sawah dan padi ladang. Kecamatan Hulu Gurung memiliki jumlah produksi terbesar apabila dibandingkan dengan kecamatan lainnya pada komoditas padi sawah, yaitu sebesar 4871 ton. Secara rinci, produksi komoditas tanaman pangan menurut kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.32 Produksi Komoditas Tanaman Pangan di Kabupaten Kapuas Hulu menurut Kecamatan Tahun 2016

NO	KECAMATAN	PRODUKSI KOMODITAS (Ton)								JUMLAH
		Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Kacang Kedelai	
1	Silat Hilir	310	465	30,97	178	9	3	0	0	996
2	Silat Hulu	520	1.933	10,68	36	0	0	0	0	2.500
3	Hulu Gurung	4.871	1.164	0,00	221	8	5	0	0	6.270
4	Pengkadan	2.879	1.083	0,00	147	34	7	0	6	4.157
5	Seberuang	1.943	1.214	59,85	828	0	0	0	0	4.045
6	Semitau	955	794	3,99	54	0	1	0	0	1.808
7	Empanang	158	1.872	7,98	0	0	0	0	0	2.038
	Kawasan Agropolitan	11.636	8.525	113	1.465	51	17	0	6	21.814

FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	KECAMATAN	PRODUKSI KOMODITAS (Ton)								JUMLAH
		Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Kacang Kedelai	
8	Bunut Hulu	3.075	2.366	0,00	37	0	2	0	0	5.480
9	Mentebah	879	1.455	0,00	216	8	0	0	0	2.559
10	Bika/Manday	1.070	1.374	0,00	0	0	0	0	0	2.444
11	Kalis	1.769	1.516	63,98	0	0	0	0	0	3.349
12	Putussibau Selatan	2.933	2.165	0,00	203	25	1	0	0	5.327
13	Embaloh Hilir	229	282	0,00	55	8	2	0	0	577
14	Bunut Hilir	260	222	15,98	92	42	0	0	0	632
15	Boyan Tanjung	1.099	1.957	53,52	184	0	0	0	0	3.293
16	Jongkong	3.513	117	0,00	1.197	0	0	0	0	4.827
17	Selimbau	1.161	239	0,00	147	25	0	0	0	1.573
18	Suhaid	1.126	827	21,28	497	0	0	0	0	2.472
19	Puring Kencana	0	626	2,66	37	8	0	0	0	674
20	Badau	74	702	5,32	54	17	0	0	0	852
21	Batang Lupar	1.013	1.879	0,00	221	50	0	0	0	3.163
22	Embaloh Hulu	273	1.325	32,04	36	0	1	0	0	1.667
23	Putussibau Utara	1.937	2.265	24,08	110	0	0	0	0	4.337
Non-Kawasan		20.411	19.317	219	3.086	185	6	0	0	43.224
KAPUAS HULU		32.047	27.843	332	4.551	235	23	0	6	65.038
RATA-RATA		1.393	1.211	14	198	10	1	0	0	2.828

Sumber: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, 2017

Untuk sub sektor perkebunan, secara umum kawasan agropolitan memiliki produksi cukup tinggi pada komoditas kelapa sawit dan karet dengan produksi sebesar 44.677 ton untuk kelapa sawit dan 8177 ton untuk karet. Nilai produksi ini sudah cukup bersaing apabila dibandingkan dengan wilayah non-kawasan agropolitan. Kemudian beberapa kecamatan di kawasan agropolitan memiliki potensi yang baik dilihat dari produksinya yang mencapai lebih dari 5.000 ton pada tahun 2016, yaitu kecamatan Silat Hilir, Seberuang, Semitau, dan Empanang. Kecamatan yang memiliki jumlah produksi komoditas perkebunan tertinggi di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu kecamatan Silat Hilir, mencapai lebih dari 25.000 ton. Komoditas yang memiliki produksi terbesar yaitu sawit dan karet. Kecamatan Silat Hilir berkontribusi sangat tinggi pada produksi sawit, yaitu mencapai 40 persen dari total produksi sawit Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian disusul oleh kecamatan semitau dengan kontribusi sebesar 17,2 persen. Secara rinci, produksi komoditas perkebunan menurut kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.33 Produksi Komoditas Perkebunan di Kabupaten Kapuas Hulu menurut Kecamatan Tahun 2016

N O	KECAMATAN	PRODUKSI KOMODITAS (Ton)									JUMLAH
		Sawit	Lada	Kapuk	Tebu	Kopi	Kakao	Kelapa	Karet	Are	
1	Silat Hilir	24.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	931	0,30	25.619,30
2	Silat Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.004	0,00	1.005,00
3	Hulu Gurung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	6,00	1.727	0,00	1.736,00
4	Pengkadan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1.887	0,00	1.891,00
5	Seberuang	4.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1.167	0,20	5.934,20
6	Semitau	10.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1.152	0,30	11.617,80
7	Empanang	4.765,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	309	0,10	5.075,60
	Kawasan Agropolitan	44.677,00	1,00	0,00	0,00	1,00	4,00	18,00	8.177,00	0,90	52.878,90
8	Bunut Hulu	0,00	0,00	0,00	1,00	0,30	3,00	0,10	872	0,00	876,40
9	Mentebah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,50	867	0,05	867,75
10	Bika/Manday	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	313	1,00	317,00
11	Kalis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	644	0,05	644,55
12	Putussibau Selatan	0,00	0,00	0,05	1,00	0,00	14,00	3,00	305	0,50	323,55
13	Embaloh Hilir	0,00	0,00	0,10	0,00	4,00	8,00	3,00	1.057	3,00	1.075,10
14	Bunut Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	466	0,00	469,00
15	Boyan Tanjung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	927	0,00	932,00
16	Jongkong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	733	0,00	735,00
17	Selimbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	503	0,00	503,30
18	Suhaid	5.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1.093	0,40	6.422,90
19	Puring Kencana	2.985,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	72	0,10	3.058,60
20	Badau	7.569,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	180	0,10	7.756,60
21	Batang Lupar	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,40	245	0,10	252,50
22	Embaloh Hulu	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	13,00	1,00	333	0,60	350,60
23	Putussibau Utara	0,00	0,00	0,05	0,50	0,00	8,00	3,00	278	0,20	289,75
	Non-Kawasan	15.883,00	10,00	0,20	2,50	9,50	53,00	22,30	8.888,00	6,10	24.874,60
	KAPUAS HULU	60.560,00	11,00	0,20	2,50	10,50	57,00	40,30	17.065,00	7,00	77.753,50
	RATA-RATA	2.633,04	0,48	0,01	0,11	0,46	2,48	1,75	741,96	0,30	3.380,59

Sumber: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, 2017

Untuk sub sektor hortikultura tanaman sayur-sayuran, secara umum kawasan agropolitan memiliki produksi cukup tinggi pada komoditas kacang panjang, terung dan ketimun dengan produksi secara berurutan sebesar 321,7 ton, 479,1 ton, dan 413,4 ton. Nilai produksi ini sudah cukup bersaing apabila dibandingkan dengan wilayah non-kawasan agropolitan. Pada kawasan agropolitan, kecamatan Silat Hilir memiliki potensi yang tinggi apabila dilihat dari jumlah produksinya pada tahun 2016 yang mencapai 1.500 ton. Komoditas yang memiliki produksi cukup besar yaitu kacang panjang, cabai rawit, terung, ketimun, dan kangkung, dimana mencapai lebih dari 100 ton. Kecamatan Silat Hilir

berkontribusi sangat tinggi pada produksi tanaman sayur-sayuran, yaitu mencapai 64% dari total produksi di Kabupaten Kapuas Hulu. Namun, produksi di kecamatan-kecamatan lain yang termasuk dalam kawasan agropolitan masih tergolong rendah sehingga perlu ditingkatkan kedepannya dalam pengembangan agropolitan. Secara rinci, produksi komoditas tanaman sayur-sayuran menurut kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.34 Produksi Komoditas Sayur-Sayuran di Kabupaten Kapuas Hulu menurut Kecamatan Tahun 2016

NO	KECAMATAN	PRODUKSI KOMOSITAS (Ton)											JUMLAH
		Bawang Daun	Petai/Sawi	Kacang Panjang	Cabe Besar	Cabe Rawit	Tomat	Terung	Buncis	Ketimun	Kangkung	Bayam	
1	Silat Hilir	0	0	292,6	0	106	0	465,5	0	391,4	167	84	1506,5
2	Silat Hulu	0	0	5,6	0	0	0	0	0	0	0	0	5,6
3	Hulu Gurung	0	0	9,3	0	6,6	0	3,2	0	6	0,9	0,5	26,5
4	Pengkadan	0	0	2,5	0,3	1,2	1,5	1,7	0	2,4	1,1	0,9	11,6
5	Seberuang	0	1,8	3	0	6,7	0	4,4	0	2,6	0	3,2	21,7
6	Semitau	0	0,9	8,7	0	0,7	0	4,3	0	10,9	1,1	8,4	35
7	Empanang	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0,1	0	0	0,3
Kawasan Agropolitan		0	2,7	321,7	0,3	121,4	1,5	479,1	0	413,4	170,1	97	1607,2
8	Bunut Hulu	0	0	10	2,6	6,4	0	36	2	35	4,5	4	100,5
9	Mentebah	0	0	3,2	5,1	11,9	0	2,4	0	0,7	0	0	23,3
10	Bika/Manday	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0,9	0,3	0,2	2
11	Kalis	0	0,7	0,5	0	2	0	0,1	0,1	0,3	0,5	0,5	4,7
12	Putussibau Selatan	10,2	12,3	28,6	4,9	6,8	9,3	14,1	8,8	27,1	21,3	21,1	164,5
13	Embaloh Hilir	0	0,7	0,9	0	0,6	0,3	0,4	0	0,2	0,5	0,3	3,9
14	Bunut Hilir	0	2,2	3,6	0,7	1,5	0,8	4,6	0,2	7,1	5	2,9	28,6
15	Boyan Tanjung	0	0	20	0	14,2	0	32,3	0	35,4	12,8	0	114,7
16	Jongkong	0	0	2,9	0	1	0	2,3	0	5	2,2	2,3	15,7
17	Selimbau	0	0	5,7	0	0	0	2	0	8,5	0	0	16,2
18	Suhaid	0	0	37	0	5,1	0	0	0	84	0	0	126,1
19	Puring Kencana	0	0,4	1,5	0	1,6	0	0,7	0	0,3	0,2	0,4	5,1
20	Badau	0	0	1,9	0	0,6	0,5	0,3	0	0,5	0,9	1	5,7
21	Batang Lupar	0	2,4	7	3,1	4,3	0	5	3,4	6,4	2,8	2,8	37,2
22	Embaloh Hulu	0	0	1,5	0	0	0	1,2	0	2,1	0,5	0,5	5,8
23	Putussibau Utara	0	0	24,2	0	0	0	1,7	0	22,7	19,5	16,9	85
Non-Kawasan		10,2	18,7	149,1	16,4	56	10,9	103,1	14,5	236,2	71	52,9	739
JUMLAH		10,2	21,4	470,8	16,7	177,4	12,4	582,2	14,5	649,6	241,1	149,9	2346,2
RATA-RATA		0,4	0,9	20,5	0,7	7,7	0,5	25,3	0,6	28,2	10,5	6,5	102,0

Sumber: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, 2017

Untuk sub sektor hortikultura tanaman buah-buahan, secara umum kawasan agropolitan memiliki produksi cukup tinggi pada komoditas durian dan pisang dengan produksi secara berurutan sebesar 421,6 ton dan 214,3 ton. Namun apabila dibandingkan dengan wilayah non-kawasan agropolitan jumlah produksi tersebut masih rendah. Pada kawasan agropolitan khususnya, kecamatan Silat Hilir dan Semitau memiliki potensi yang tinggi apabila dilihat dari jumlah produksinya pada tahun 2016 yang mencapai lebih dari 200 ton. Komoditas yang memiliki produksi cukup besar yaitu durian, pisang, dan nanas. Secara khusus, Kecamatan Semitau menghasilkan produksi yang sangat tinggi pada komoditas durian, yaitu mencapai lebih dari 600 ton. Kecamatan Semitau berkontribusi sangat tinggi pada produksi durian, yaitu mencapai lebih dari 70% dari total produksi durian di Kabupaten Kapuas Hulu. Namun, produksi tanaman buah-buahan di kecamatan lainnya yang termasuk dalam kawasan agropolitan masih tergolong rendah sehingga perlu ditingkatkan

kedepannya dalam pengembangan agropolitan. Secara rinci, produksi komoditas tanaman buah-buahan menurut kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STARTEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU

Tabel III.35 Produksi Komoditas Buah-Buahan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

NO	KECAMATAN	PRODUKSI KOMODITAS BUAH-BUAHAN (Ton)																					
		Belimbing	Duku/Langsat	Durian	Jambu Biji	Jambu Air	Jeruk Siam	Jeruk Besar	Mangga	Manggis	Nangka	Nanas	Pepaya	Pisang	Rambutan	Salak	Sawo	Sirsak	Sukun	Melinjo	Petai	Jengkol	JUMLAH
1	Silat Hilir	0	0	0	6	0,1	0,1	0	0	0	41	67,5	0,8	92,5	0	0	0,1	0,2	0,1	0	0	0	208,4
2	Silat Hulu	0,4	0,5	15	0,7	1	0	0,4	0,5	0,3	2,6	1,1	0,3	3,8	1,9	0	0	0,4	0	0	1,8	3,2	33,9
3	Hulu Gurung	0	0	0,1	0,4	0,4	4,5	0	0	0	0	0,4	0,6	32	0	1,1	0	0	0,1	0	0	0	39,6
4	Pengkadan	0,8	0,4	0	0,8	0,4	1,5	0,6	6,7	0,1	16,1	3,5	2,3	52,8	5,4	0,4	0,5	0,4	0,4	1,4	1,1	0,4	96
5	Seberuang	0,1	0	0	1,1	1,5	0	0	0	0,1	2,9	4	3,5	2,5	0	0	0	2,1	0	0	0	0	17,8
6	Semitau	8,7	9,3	406,5	21,2	18,3	0	10,3	30	0	28,7	23	23,1	30,7	14	0	1,3	9,2	4,3	0	1,8	4	644,4
7	Empanang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kawasan Agropolitan		10	10,2	421,6	30,2	21,7	6,1	11,3	37,2	0,5	91,3	99,5	30,6	214,3	21,3	1,5	1,9	12,3	4,9	1,4	4,7	7,6	1040,1
8	Bunut Hulu	0,8	20,9	4,9	4,7	6,2	8	3,1	24,6	18	8,4	65,4	44,8	23,7	7,5	0	0,4	4,3	1	0	2	1,4	250,1
9	Mentebah	4,1	0	9,9	7,9	1,6	2,9	3,4	2,5	0	11,2	2,5	2,1	18,3	0,2	2,8	0	0,9	1,4	0	14,7	0	86,4
10	Bika/Manday	0	0	50	0,4	0,4	0	0	20	0	0,1	0,6	0,4	1	0,2	0	0	0,4	0,4	0	0	0	73,9
11	Kalis	0	0	2,5	0	0	0	0	2,5	0	0	0,6	1,3	920,1	0	0	0	0,2	0,1	0	0	0	927,3
12	Putussibau Selatan	12,2	0	0	14,3	2	29,2	8,8	5,4	0	32,2	47,2	16,8	400,4	0	2,5	3,6	4,3	16,3	4,3	0	0	599,5
13	Embaloh Hilir	1	0,5	0,3	3,3	1,1	2,3	2	28,2	0,2	2,5	0,4	1,5	27,8	0,5	0,2	0	0,4	0,1	0	0	0	72,3
14	Bunut Hilir	0	0	0	0,9	3,5	4,5	6	30	0	5	4	0,3	20	0	0	3,2	0	0	0	0	0	77,4
15	Boyan Tanjung	0,4	3,9	7	0	0	0	0	1,1	0	1,5	1,3	0,7	3,5	1,5	0	0	0	0	0	0,2	0,3	21,4
16	Jongkong	0,1	0	6	0,3	0,5	0,7	0,5	1	0	0	0,9	0,7	4,9	0,9	0	0	0,3	0,9	0	0	0	17,7
17	Selimbau	0,3	0,5	2,4	0,7	0,4	0,2	0,2	1,5	0,1	8,1	1,6	0,6	27,2	1,4	0	0	0,4	0	0,3	0,2	0,1	46,2
18	Suhaid	0,5	0	0,6	0,8	0,4	0	0,4	4,7	0,1	4,1	0,8	1	16,8	2,8	0	0	0	0	0	0,1	0,2	33,3
19	Puring Kencana	0,4	1,2	4,8	0,4	0,4	0	0	1,6	0,4	1,8	0,8	0,8	8,1	0,8	0	0	0,4	0	0	0	0,4	22,3
20	Badau	0,4	0	0,9	1,3	0,4	0,2	0	1	0	1,4	0,6	1,6	15,1	0,6	0,2	0	0,2	0,1	0	0	0	24
21	Batang Lupar	0,3	4,7	25	1,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,1	0,5	0,6	0,4	30	0,8	0,1	0	0	0	0	0	0	65,3
22	Embaloh Hulu	1,4	0,9	17,4	1,7	0,5	1,7	1,2	4,1	0,2	6	0,8	2,5	7,1	1,9	0,4	0	0,5	0,8	0	0,8	0	49,9
23	Putussibau Utara	1,4	1,3	15,6	2,4	3,4	13	1,7	2,3	3,5	3,2	4,4	1,1	11,2	7,4	0,9	0	1,1	1,4	0	0,5	0,4	76,2
Non-Kawasan		23,3	33,9	147,3	40,5	21,2	63,1	27,7	130,7	22,6	86	132,5	76,6	1535,2	26,5	7,1	7,2	13,4	22,5	4,6	18,5	2,8	2443,2
JUMLAH		33,3	44,1	568,9	70,7	42,9	69,2	39	167,9	23,1	177,3	232	107,2	1749,5	47,8	8,6	9,1	25,7	27,4	6	23,2	10,4	3483,3
RATA-RATA		1,4	1,9	24,7	3,1	1,9	3,0	1,7	7,3	1,0	7,7	10,1	4,7	76,1	2,1	0,4	0,4	1,1	1,2	0,3	1,0	0,5	151,4

Sumber: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, 2017

Untuk sub sektor peternakan, secara umum kawasan agropolitan memiliki produksi cukup tinggi pada komoditas babi, ayam buras, dan ayam ras pedaging dengan produksi secara umum mencapai lebih dari 30.000 ton. Namun apabila dibandingkan dengan wilayah non-kawasan agropolitan jumlah produksi tersebut masih jauh lebih rendah. Secara khusus, kecamatan-kecamatan di kawasan agropolitan belum memiliki potensi yang tinggi apabila dilihat dari jumlah produksinya pada tahun 2016 dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Secara umum, komoditas yang memiliki produksi cukup besar dan berpotensi untuk dikembangkan yaitu sapi, babi, ayam buras, dan ayam ras pedaging. Secara khusus, Kecamatan Hulu Gurung menghasilkan produksi yang cukup tinggi pada komoditas ayam ras pedaging, yaitu mencapai lebih dari 13.158 kg. Sedangkan untuk komoditas babi, kecamatan Empanang, Semitau, dan Seberuang memiliki produksi cukup tinggi dibandingkan kecamatan lainnya di kawasan agropolitan, yaitu di atas 8.000 kg. Namun, jumlah produksi tersebut masih tergolong rendah, jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan di luar kawasan agropolitan, khususnya yaitu kecamatan Putussibau Utara dan Putussibau Selatan, sehingga jumlah produksi perlu ditingkatkan lagi kedepannya. Secara rinci, produksi komoditas peternakan menurut kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.36 Produksi Komoditas Peternakan di Kabupaten Kapuas Hulu menurut Kecamatan Tahun 2016

No.	Kecamatan/ Kelurahan	PRODUKSI KOMODITAS PETERNAKAN (Kg)							JUMLAH
		Sapi Potong	Kambing	Babi	Ayam Buras	Ayam Ras Pedaging	Itik	Itik Manila	
1	EMPANANG	0	0	10.115	4.080	315	0	0	14.510
2	HULU GURUNG	4.098	28	0	8.627	13.158	3	6	25.920
3	PENGKADAN	3.339	0	0	7.895	2.417	6	10	13.666
4	SEBERUANG	152	0	8.067	1.839	4.296	0	0	14.354
5	SEMITAU	2.580	127	12.285	4.076	2.680	0	6	21.754
6	SILAT HILIR	1.062	42	696	2.826	10.205	0	29	14.860
7	SILAT HULU	607	0	819	4.605	2.826	0	4	8.860
KAWASAN AGROPOLITAN		11.837	198	31.982	33.947	35.898	9	53	113.924
8	BADAU	1.062	28	5.815	1.740	4.256	4	6	12.912
9	BATANG LUPAR	455	0	9.582	5.244	3.055	0	0	18.336
10	BIKA	304	0	7.821	10.322	5.894	7	6	24.353
11	BOYAN TANJUNG	2.125	99	0	8.237	5.213	3	11	15.688
12	BUNUT HILIR	2.883	0	205	4.359	3.735	33	0	11.214
13	BUNUT HULU	2.276	0	287	6.501	6.756	0	10	15.830
14	EMBALOH HILIR	304	0	450	7.420	1.951	0	0	10.125
15	EMBALOH HULU	911	0	8.763	7.642	1.732	0	0	19.048
16	JONGKONG	5.767	57	164	4.487	41.546	1	0	52.022
17	KALIS	2.580	42	10.115	7.673	6.137	0	32	26.580
18	MENTEBAH	3.339	297	3.890	10.046	5.611	0	10	23.192
19	PURING KENCANA	0	0	7.985	3.296	624	0	0	11.906
20	PUTUSSIBAU SELATAN	23.219	340	12.039	29.256	340.110	101	90	405.155
21	PUTUSSIBAU UTARA	67.230	425	20.475	41.374	406.509	183	97	536.293
22	SELIMBAU	8.650	14	0	7.011	3.202	0	0	18.878
23	SUHAIID	1.366	0	0	5.260	2.696	0	0	9.321
NON-KAWASAN		122.470	1.303	87.592	159.868	839.025	332	262	1.210.853
JUMLAH		134.308	1.501	119.574	193.815	874.924	341	315	1.324.777
RATA-RATA		5.839	65	5.199	8.427	38.040	15	14	57.599

Sumber: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, 2017

Untuk sub sektor perikanan terbagi menjadi ikan perairan umum dan ikan budidaya. Pada ikan perairan umum, secara umum kawasan agropolitan memiliki produksi cukup

tinggi pada komoditas ikan lais dan ikan tambakan dengan nilai produksi secara berurutan sebesar 340,42 ton dan 630,41 ton. Namun apabila dibandingkan dengan wilayah non-kawasan agropolitan jumlah produksi tersebut masih jauh lebih rendah. Pada kawasan agropolitan, kecamatan Silat Hilir dan Semitau memiliki potensi cukup baik apabila dilihat dari jumlah produksinya pada tahun 2016 yang mencapai lebih dari 1.000 ton. Jenis ikan yang memiliki produksi cukup besar yaitu Toman, Lais, dan Tambakan yang produksinya mencapai lebih dari 100 ton. Namun, jumlah produksi ikan perairan umum tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan di luar kawasan agropolitan, khususnya kecamatan Embaloh Hilir dan Bunut Hilir, sehingga produksi ikan perairan umum perlu ditingkatkan kedepannya. Secara rinci, produksi komoditas ikan perairan umum menurut kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.37 Produksi Komoditas Perikanan Perairan Umum di Kabupaten Kapuas Hulu menurut Kecamatan Tahun 2016

N O	KECAMATA N	PRODUKSI KOMODITAS IKAN PERAIRAN UMUM (Ton)								TOTAL
		Jelawa t	Gabus	Betut u	Toman	Belida	Lais	Tambaka n	Lain-lain	
1	Silat Hilir	59,40	55,90	0,00	0,00	53,70	159,21	279,00	402,23	1.009,44
2	Silat Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,68	288,68
3	Hulu Gurung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pengkadan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Seberuang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Semitau	54,00	55,70	53,20	195,91	55,70	130,61	351,41	1.068,82	1.965,35
7	Empanang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	0,00	0,00	50,60
Kawasan Agropolitan		113,40	111,60	53,20	195,91	109,40	340,42	630,41	1.759,73	3.314,07
8	Bunut Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Mentebah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bika/Manda y	19,00	36,00	0,00	32,60	33,00	298,76	264,36	965,26	1.648,98
11	Kalis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Putussibau Selatan	38,00	38,71	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	535,31	612,27
13	Embaloh Hilir	65,30	65,31	38,90	2.208,4 1	74,60	296,41	268,51	1.558,69	4.576,13
14	Bunut Hilir	229,70	151,61	54,90	2.460,4 1	585,70	779,41	278,41	3.199,42	7.739,56
15	Boyan Tanjung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Jongkong	55,40	84,50	48,20	220,51	76,30	316,21	193,51	1.184,72	2.179,35
17	Selimbau	105,70	123,40	53,50	259,31	69,10	415,41	838,31	1.670,70	3.535,43
18	Suhaid	83,70	126,30	65,10	253,11	124,10	817,00	357,31	2.124,01	3.950,63
19	Puring Kencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badau	44,50	44,80	0,00	103,61	43,30	153,11	136,61	965,53	1.491,46
21	Batang Lupar	44,65	143,70	37,80	0,00	46,40	171,81	125,11	927,19	1.496,66

FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STARTEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU

22	Embaloh Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Putussibau Utara	37,21	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,32	522,24
	Non-Kawasan	723,16	852,04	298,40	5.537,96	1.052,75	3.248,12	2.462,13	13.578,15	27.752,71	
	JUMLAH	949,96	1.075,24	404,80	5.929,78	1.271,55	3.928,96	3.722,95	17.097,61	34.380,85	
	RATA-RATA	36,37	41,90	15,29	249,30	50,53	156,02	134,46	666,86	1.350,73	

Sumber: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, 2017

Pada komoditas ikan budidaya, secara umum kawasan agropolitan memiliki produksi cukup tinggi pada komoditas ikan nila dan ikan patin dengan nilai produksi secara berurutan sebesar 529,22 ton dan 150,04 ton. Apabila dibandingkan dengan wilayah non-kawasan agropolitan jumlah produksi ikan nila jauh lebih tinggi, sehingga bisa dianggap berkontribusi besar pada produksi Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian untuk komoditas ikan patin jumlah produksi kawasan agropolitan juga mampu bersaing dengan non-kawasan agropolitan. Pada kawasan agropolitan kecamatan Hulu Gurung dan Pengkadan memiliki potensi cukup baik apabila dilihat dari jumlah produksinya pada tahun 2016 yang mencapai lebih dari 400 ton. Jenis ikan yang memiliki produksi cukup besar di dua kecamatan tersebut yaitu ikan nila dan ikan patin apabila dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di dalam kawasan agropolitan. Namun, jumlah produksi ikan budidaya tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan di luar kawasan agropolitan, khususnya yaitu Kecamatan Jongkong dan Selimbau. Oleh karena itu, jumlah produksi ikan budidaya perlu ditingkatkan kedepannya. Secara rinci, produksi komoditas ikan budidaya menurut kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.38 Produksi Komoditas Perikanan Budidaya di Kabupaten Kapuas Hulu menurut Kecamatan Tahun 2016

NO	KECAMATAN	PRODUKSI KOMODITAS IKAN BUDIDAYA (Ton)										JUMLAH
		Jelawat	Betu tu	Toma n	Nila	Mas	Gura mi	Lele	Patin	Bau ng	Lain-lain	
1	Silat Hilir	0,00	0,00	0,00	37,70	1,10	0,00	0,00	27,62	0,00	75,11	141,53
2	Silat Hulu	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	5,65	10,70
3	Hulu Gurung	0,00	0,00	0,00	363,57	2,50	1,70	1,63	13,70	0,00	152,90	536,00
4	Pengkadan	0,00	0,00	0,00	90,87	1,07	1,14	2,45	64,67	0,00	260,67	420,87
5	Seberuang	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	5,30	10,52
6	Semitau	0,00	0,00	2,12	21,90	0,00	2,58	0,00	38,76	0,00	149,76	215,12
7	Empanang	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	5,70	15,90
	Kawasan Agropolitan	0,00	0,00	2,12	529,22	4,67	5,42	4,08	150,04	0,00	655,09	1.350,64
8	Bunut Hulu	0,00	0,00	0,00	311,85	0,00	0,00	0,00	242,60	0,00	158,90	713,35

FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	KECAMATAN	PRODUKSI KOMODITAS IKAN BUDIDAYA (Ton)										JUMLAH
		Jelawat	Betutu	Toman	Nila	Mas	Gurami	Lele	Patin	Bau ng	Lain-lain	
9	Mentebah	0,00	0,00	0,00	4,02	1,00	0,00	0,00	1,05	0,00	5,03	11,10
10	Bika/Manday	0,89	0,00	2,45	1,81	0,00	1,47	0,00	5,15	0,00	3,63	15,40
11	Kalis	0,00	0,00	0,00	402,29	1,00	0,82	0,00	197,51	0,00	248,38	850,00
12	Putussibau Selatan	0,31	0,00	0,00	7,05	1,02	2,26	4,12	7,15	0,00	12,24	34,15
13	Embaloh Hilir	1,83	0,00	43,97	20,30	0,00	4,25	0,00	31,85	0,00	48,80	151,00
14	Bunut Hilir	12,90	0,10	180,20	117,14	0,00	47,24	0,00	79,17	0,20	528,05	965,00
15	Boyan Tanjung	0,00	0,00	0,00	69,92	0,00	0,00	1,20	37,09	0,00	24,00	132,21
16	Jongkong	455,86	0,22	1.982,57	573,44	1,30	40,99	0,00	923,10	0,30	928,22	4.906,00
17	Selimbau	567,65	2,56	3.168,60	375,10	0,00	95,29	0,00	1.025,10	2,30	1.448,40	6.685,00
18	Suhaid	6,37	0,25	125,60	45,86	0,00	11,70	0,00	46,24	0,14	271,73	507,89
19	Puring Kencana	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	1,15
20	Badau	1,10	0,10	165,92	54,46	0,00	4,92	0,00	125,34	0,00	368,16	720,00
21	Batang Lupar	50,60	0,00	280,23	78,60	0,00	11,40	0,00	150,50	0,10	358,57	930,00
22	Embaloh Hulu	0,00	0,00	3,10	6,80	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	13,30	25,75
23	Putussibau Utara	0,00	0,00	0,00	2,61	1,01	0,00	2,40	2,07	0,00	7,14	15,23
Non-Kawasan		1.097,51	3,23	5.952,64	2.071,38	5,33	220,34	7,72	2.876,47	3,04	4.425,57	16.663,23
JUMLAH		1.097,51	3,23	5.954,76	2.600,60	10,00	225,76	11,80	3.026,51	3,04	5.080,66	18.013,87
RATA-RATA		47,72	0,14	258,90	113,07	0,43	9,82	0,51	131,59	0,13	220,90	783,21

Sumber: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, 2017

3.7 Gambaran Umum Kelembagaan

3.7.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2016-2017

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki Visi "Menuju Kapuas Hulu yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis". Visi tersebut merupakan manifestasi dari harapan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencapai keadaan masyarakat yang maju dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan sekunder, serta didukung oleh suasana kehidupan yang aman dan damai. Selain itu, Visi tersebut juga mengandung harapan agar perekonomian masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu berkembang dengan baik, kreatif dan inovatif sehingga memiliki daya saing yang ditandai dengan meningkatnya investasi dan kapasitas perekonomian masyarakat yang berwawasan lingkungan. Selain itu, masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu juga bercita-cita menjadi masyarakat yang rukun, damai, tertib hukum,

demokratis, dan dinamis. Semua cita-cita tersebut terkandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2020.

Guna mewujudkan Visi tersebut, maka Misi yang diemban oleh Kabupaten Kapuas Hulu adalah

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Bersih
2. Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah yang Berkelanjutan
3. Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan

Selain Visi dan Misi Pembangunan, Kabupaten Kapuas Hulu juga memiliki Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2020. Tujuan dan Sasarannya adalah :

1. Tujuan untuk Terselenggaranya pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang prima, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase instansi pemerintah dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori B)
 - b. Opini Laporan keuangan pemerintah daerah dengan predikat WTP
 - c. Persentase instansi pemerintah yang akuntabilitas kerjanya baik (skor B)
 - d. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 - e. Persentase SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP)
 - f. Persentase penerapan SPIP level 3 di Kabupaten Kapuas Hulu
2. Tujuan Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - b. Angka Harapan Hidup (AHH)
 - c. Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun
 - d. Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun
3. Tujuan untuk Meningkatnya Keluarga Berencana, kesejahteraan sosial, Perlindungan perempuan dan anak, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (CPR) suatu cara (All Methods)
 - b. Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui Sistim Jaminan Sosial Negara (SJSN) Bidang Kesehatan
4. Tujuan Meningkatnya perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Pertumbuhan Ekonomi
 - b. PDRB per Kapita
 - c. Laju Inflasi
 - d. Tingkat Kemiskinan
5. Tujuan Meningkatnya kesejahteraan petani melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

- b. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
6. Tujuan Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
 - b. Prosentase Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
 - c. Persentase penegakan hukum lingkungan
7. Tujuan untuk Meningkatnya sarana prasarana dan kelancaran aksesibilitas daerah, membuka daerah terpencil, terisolir dan pengawasan wilayah perbatasan, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase Kawasan pemukiman kumuh perkotaan
 - b. Kondisi jalan mantap kabupaten
 - c. Pengembangan pelabuhan

3.7.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034 terkandung Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan RUang Kabupaten Kapuas Hulu sebagai orientasi dalam pemanfaatan ruang dalam periode waktu tersebut. Pemahaman mengenai Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu adalah yang penting dalam rangka mewujudkan Kawasan Strategis Agropolitan.

Tujuan penataan ruang Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana terkandung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034 adalah ***"Menjadikan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi di Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pengembangan ekowisata yang harmonis dengan agropolitan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan daerah tertinggal"***.

Sedangkan kebijakan dalam penataan ruang yang disepakati untuk diimplementasikan, sebagaimana terkandung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034 meliputi:

1. Pelestarian kawasan hutan tropis dan keanekaragaman hayati;
2. Pengembangan koridor penghubung taman nasional;
3. Pengembangan instrumen ekonomi basis ekosistem;
4. Pengembangan agropolitan;
5. Pengembangan energi dan sumberdaya mineral;
6. Pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah tertinggal, dan kesetaraan gender;
7. Pengembangan kawasan perbatasan;
8. Pengembangan infrastruktur; dan
9. Penanganan kawasan rawan bencana.

Strategi yang diambil untuk masing-masing kebijakan, sebagaimana terkandung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Pelestarian kawasan hutan tropis dan keanekaragaman hayati meliputi :
 - a. Mempertahankan luas kawasan hutan tropis dan mengendalikan alih fungsi lahan.
 - b. Mempertahankan ekosistem yang memberikan jasa lingkungan dan mengendalikan alih fungsi lahan.
 - c. Merehabilitasi kawasan yang mengalami degradasi dan melestarikan keanekaragaman hayati.
 - d. Mempertahankan dan meningkatkan fungsi ekosistem kawasan hutan produksi.
 - e. Menata kembali kampung yang berada di dalam kawasan.
 - f. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan.

2. Strategi Pengembangan koridor penghubung taman nasional meliputi :
 - a. Menetapkan koridor penghubung Taman Nasional Danau Sentarum dan Taman Nasional Betung Kerihun.
 - b. Menyusun rencana pengelolaan koridor yang partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - c. Mengembangkan infrastruktur yang memperhatikan fungsi ekologi.

3. Strategi Pengembangan instrumen ekonomi berbasis ekosistem meliputi :
 - a. Mengembangkan kegiatan ekowisata;
 - b. Mewujudkan skema-skema insentif jasa lingkungan;
 - c. Mengembangkan daerah tujuan wisata dengan obyek wisata alam tropis dan sosial budaya masyarakat;
 - d. Membangun sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekowisata di daerah tujuan wisata;
 - e. Membentuk tourism information center (pusat informasi pariwisata) yang melakukan promosi untuk menarik wisatawan domestik maupun asing;
 - f. Membuat kalender tahunan kegiatan ekowisata.
 - g. Menjalinkan kerjasama dan membuka peluang usaha masyarakat di bidang ekowisata.
 - h. Memfasilitasi terbentuknya Forum Pelaku Industri Pariwisata Daerah dalam membangun network domestik dan global.

4. Strategi Pengembangan agropolitan meliputi :
 - a. Mengembangkan kawasan peruntukkan pertanian, perkebunan, perikanan yang berkelanjutan dengan menerapkan best management practice di masing-masing sektor;
 - b. Mengembangkan kegiatan industri pengolahan, perdagangan, dan jasa.
 - c. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan agropolitan.

5. Strategi Pengembangan energi dan sumberdaya mineral meliputi :
 - a. Mengembangkan kawasan peruntukkan pertambangan dan sumber energi terbarukan;

- b. Mengembangkan kegiatan industri pengolahan;
 - c. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertambangan.
6. Strategi Pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah tertinggal, dan kesetaraan gender meliputi :
- a. Meningkatkan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat;
 - b. Meningkatkan kapasitas dan peran gender dalam seluruh instrumen pembangunan daerah;
 - c. Mengembangkan akses pasar dan pembiayaan ekonomi mikro;
 - d. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pembangunan daerah tertinggal.
7. Strategi Pengembangan kawasan perbatasan meliputi :
- a. Mengembangkan program peningkatan rasa nasionalisme terutama pada usia dini;
 - b. Mengatasi permasalahan illegal logging dan trafficking dengan meningkatkan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum.
 - c. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pembangunan kawasan perbatasan.
8. Strategi Pengembangan infrastruktur meliputi :
- a. Mengembangkan sistem transportasi terpadu untuk meningkatkan aksesibilitas eksternal dan internal wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. Meningkatkan kapasitas pelayanan bandar udara;
 - c. Meningkatkan kapasitas pelayanan prasarana wilayah berupa sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumberdaya air, dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan hingga wilayah perbatasan.
 - d. Mengembangkan pembangkit listrik tenaga uap, tenaga panas bumi, dan tenaga air untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan;
 - e. Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi berupa sistem jaringan terestrial, seluler dan satelit hingga ke daerah-daerah terpencil; dan
 - f. Mengembangkan jaringan air bersih, drainase, air limbah dan pengelolaan sampah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
9. Strategi Penanganan kawasan rawan bencana meliputi :
- a. Mengidentifikasi kawasan rawan bencana;
 - b. Mengembangkan sistem penanganan dan mitigasi bencana.

3.7.3 Profil Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan KSK

Agropolitan

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan

Peraturan Daerah tersebut, ditentukan bahwa Kabupaten Kapuas Hulu terdiri atas dua (2) sekretariat, satu (1) inspektorat, delapan belas (18) dinas, dan tiga (3) badan daerah. Selain itu juga ditetapkan duapuluh dua (22) kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Dinas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
4. Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air
5. Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya
6. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
12. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
13. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
14. Dinas Perhubungan
15. Dinas Pertanian dan Pangan
16. Dinas Perikanan
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18. Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Badan Keuangan Daerah

3.7.4 Pembagian Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu dan KSK Agropolitan

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diatur mengenai pembagian Urusan Pemerintah Konkuren yang terbagi ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan yang menjelaskan mengenai pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun pembagian urusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, diantaranya:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

- e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 - f. Sosial
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, diantaranya:
- a. Tenaga kerja
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - c. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
 - d. Pertanahan
 - e. Lingkungan hidup
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - i. Perhubungan
 - j. Komunikasi dan informatika
 - k. Penanaman modal
 - l. Pangan
 - m. Statistik
 - n. Kepemudaan dan olahraga
 - o. Kebudayaan
 - p. Perpustakaan dan kearsipan
3. Urusan Pemerintahan Pilihan, diantaranya:
- a. Kelautan dan perikanan
 - b. Pariwisata
 - c. Pertanian
 - d. Kehutanan
 - e. Energi dan sumber daya mineral
 - f. Perdagangan
 - g. Perindustrian
 - h. Transmigrasi

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Gambar III.56 Pembagian Kewenangan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

No	Instansi	Usuran Bidang Sesuai Undang-Undang Pemerintah Daerah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A	Bidang Pendidikan
		Bidang Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A	Bidang Sosial
		Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Tipe A	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Jalan

FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Instansi	Urusan Bidang Sesuai Undang-Undang Pemerintah Daerah
		Sumber Daya Air, Drainase
		Jasa Konstruksi
5	Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Tipe A	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Penataan Bangunan Gedung dan lingkungannya, Bangunan Gedung, Persampahan, Air Limbah, Air Minum, Permukiman, dan Penataan Ruang;
6	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A	Bidang Lingkungan Hidup Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Bidang Kepemudaan dan Olahraga Bidang Pariwisata
8	Donas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C	Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Tipe A	Bidang Tenaga Kerja Bidang Perindustrian Bidang Transmigrasi;
12	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tipe A	Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah Bidang Perdagangan;
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe B	Bidang Komunikasi dan Informatika Bidang Statistik
14	Dinas Perhubungan Tipe C	Bidang Perhubungan;
15	Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A	Bidang Pertanian Bidang Pangan
16	Dinas Perikanan Tipe A	Bidang Perikanan
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C	Bidang Perpustakaan Bidang Kearsipan
18	Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A	Fungsi penunjang Perencanaan dan Fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya tipe B	Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
21	Badan Keuangan Daerah Tipe A	Fungsi penunjang Keuangan

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016

Masing-masing Satuan Perangkat Daerah yang telah dibentuk memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tupoksi dari masing-masing Satuan Perangkat Daerah dijelaskan masing-masing pada bagian berikut.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A

Dinas ini memiliki tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan. Fungsi yang diemban oleh Dinas terkait antara lain :

- Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan

- Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan
- Pelaksanaan Administrasi Dinas, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan

2. Dinas Kesehatan Tipe A

Dinas ini memiliki tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi;
- Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tipe A

Tugas pokok yang diamanatkan pada dinas ini adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Fungsi yang diemban antara lain:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Tipe A

Tugas pokok dari Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, Jalan, Jasa Konstruksi, dan Drainase. Sedangkan fungsi yang diemban adalah :

- Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan Penataan ruang sub urusan sumber daya air, jalan, jasa konstruksi, dan drainase;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan Penataan ruang sub urusan sumber daya air, jalan, jasa konstruksi, dan drainase;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan Penataan ruang sub urusan sumber daya air, jalan, jasa konstruksi, dan drainase;
- Pelaksanaan administrasi dinas;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya, Tipe A

Tugas pokok dari Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya adalah melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang, bangunan gedung, penataan bangunan gedung dan lingkungan, permukiman, air limbah, persampahan, dan air minum. Sementara itu, fungsi yang diamanatkan adalah :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Penataan ruang, bangunan gedung, penataan bangunan gedung dan lingkungan, permukiman, air limbah, persampahan, air minum;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang, bangunan gedung, penataan bangunan gedung dan lingkungan, permukiman, air limbah, persampahan, air minum;
- Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tipe A

Tugas pokok yang diemban oleh dinas ini adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dengan fungsi :

- perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- pelaksanaan kebijakan di lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- pelaksanaan administrasi dinas;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga dan bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah.

- Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
- Pelaksanaan administrasi dinas;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A

Tugas pokok dari dinas ini adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- Pelaksanaan administrasi dinas;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sementara itu, fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah

- perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- pelaksanaan administrasi dinas;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe A

Dinas ini memiliki tugas pokok untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan fungsi

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tugas pokok dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan fungsi

- Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, Tipe A

Tugas dari dinas ini adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja, bidang Perindustrian, dan bidang Transmigrasi. Fungsi dari dinas ini adalah

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi;
- Pelaksanaan administrasi dinas;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Tipe A

Tugas dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan adalah memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan. Sementara, fungsi yang diemban adalah

- Penyusunan rencana strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dengan instansi lainnya;
- penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

14. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Tipe B

Tugas pokok dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Statistik dengan fungsi

- Perumusan Kebijakan Di Bidang Komunikasi, Informatika, Dan Statistik;
- Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Komunikasi, Informatika, Dan Statistik;
- Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Di Bidang Komunikasi, Informatika, Dan Statistik;
- Pelaksanaan Administrasi Dinas;
- Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

15. Dinas Perhubungan, Tipe C

Tugas pokok dari Dinas Perhubungan adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, dengan fungsi

- perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
- pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;
- pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Dinas Pertanian dan Pangan, Tipe A

Tugas pokok dari dinas ini adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Pangan, dengan fungsi

- perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan pangan;
- pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan;
- pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

17. Dinas Perikanan, Tipe A

Tugas pokok dari dinas ini adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan, dengan fungsi

- perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan;
- pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan;
- pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe C

Tugas pokok dari dinas ini adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan kearsipan dengan fungsi

- perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan;

- pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

19. Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A

Tugas dari instansi ini adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Sementara, fungsi dari instansi ini adalah

- perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman umum dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman umum dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman umum dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- pelaksanaan administrasi Satuan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

20. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Tipe A

Tugas pokok dari instansi ini adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan. Sementara, fungsi dari instansi ini adalah

- penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan
- pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Tipe B

Tugas pokok dari instansi ini adalah melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

- Penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- Pelaksanaan dukungan teknis di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

22. Badan Keuangan Daerah Tipe A

Tugas pokok dari instansi ini adalah membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan, dengan fungsi

- Penyusunan kebijakan teknis di bidang Keuangan;
- pelaksanaan dukungan teknis di bidang keuangan;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Keuangan;
- pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.7.5 Profil Perusahaan Kawasan Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu

Salah satu aktor yang dominan dalam menggerakkan kegiatan ekonomi di Kawasan Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu adalah perusahaan dengan berbagai macam bentuk dan skala. Usaha budidaya sawit merupakan sektor yang paling banyak dilaksanakan oleh perusahaan di Kawasan Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu. Berikut daftar perusahaan yang berada di Kawasan Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu hak yang dimiliki

a. Grup First Borneo

Grup perusahaan yang berbasis di Jakarta ini merupakan induk dari beberapa perusahaan yang melaksanakan budidaya sawit di Kawasan Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan penghasil CPO (Crude Palm Oil). Beberapa anak perusahaan yang berada di Kawasan Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu adalah

- PT. Berkah Sawit Abadi dengan luas 18,600 hektar
- PT. Wahana Hamparan Hijau, dengan luas 18,500 hektar
- PT. Borneo Internasional Anugerah, dengan luas 18,500 hektar
- PT. Mitra Kapuas Agro, dengan luas 14,000 hektar
- PT. Khatulistiwa Agro Abadi, dengan luas 14,000 hektar
- PT. Kapuas Bio Agro, dengan luas 10,000 hektar

b. Smart Grup

PT SMART Tbk adalah salah satu perusahaan publik produk konsumen berbasis kelapa sawit yang terintegrasi. Perkebunan kelapa sawit SMART mencakup lebih dari 138, 000 hektar (termasuk plasma). Aktivitas utama perusahaan ini adalah penanaman dan pemanenan pohon kelapa sawit, pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadi minyak sawit (CPO) dan inti sawit, dan pemrosesan CPO menjadi produk bernilai tambah seperti minyak goreng, margarin, dan shortening. SMART juga mengoperasikan 16 pabrik kelapa sawit, 5 pabrik pengolahan inti sawit dan 4 pabrik rafinasi di Indonesia. Beberapa anak perusahaan dari Grup Smart di Kawasan Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu antara lain

- PT. Anugerah Makmur Sejati, dengan luas 15,000 hektar
- PT. Kapuasindo Palm Industri, dengan luas 14,000 hektar
- PT. Persada Graha Mandiri, dengan luas 18,000 hektar
- PT. Kartika Prima Cipta, dengan luas 18,000 hektar
- PT. Paramia Internusa Pratama, dengan luas 18,000 hektar

- PT. Buana Tunas Sejahtera, dengan luas 12,00 hektar
- PT. Sentra Karya Manunggal, dengan luas 14,000 hektar
- PT. Duta Nusa Lestari, dengan luas 13,500 hektar

c. Perusahaan Sawit Lainnya

Selain perusahaan sawit yang tergabung dalam grup besar, juga terdapat beberapa perusahaan yang berdiri secara sendiri-sendiri, diantara lain

- PT. Papan Estetika, dengan luas 7000 hektar
- PT. Riau Agrotama Plantation (Grup Salim), dengan luas 18,000 hektar
- PT. Rimba Utara, dengan luas 9,000 hektar
- PT. Borneo Estate Sejahtera, dengan luas 10,000 hektar
- PT. Arung Benua Nusantara, dengan luas 20,000 hektar
- PT. Tri Putra Agro Persada, dengan luas 18,000 hektar
- PT. Sawit Kapuas Kencana (Grup Metro) dengan luas 22,000 hektar
- PT. Bumi Tani Jaya (Grup Metro), dengan luas 18,000 hektar

d. Perusahaan Pemegang HPH

HPH adalah hak untuk mengusahakan hutan didalam suatu kawasan hutan, yang meliputi kegiatan-kegiatan penebangan kayu, permudaan, pemeliharaan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan rencana kerja pengusahaan hutan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan asas kelestarian hutan dan asas perusahaan.

HPH dapat diberikan kepada BUMN dan Badan Milik Swasta (PT), yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Menteri Kehutanan. HPH merupakan hak pengusahaan hutan yang dititikberatkan pada penebangan kayu sebagai bahan dasar industri maupun untuk keperluan ekspor. Jangka waktu untuk mengusahakan hutan paling lama 20 tahun tetapi dapat diperpanjang. Berikut adalah daftar perusahaan pemegang HPH di Kabupaten Kapuas Hulu

- PT. Benua Indah, dengan hak seluas 57,300 hektar
- PT. Bumi Raya Utama Wood Industries, dengan hak seluas 110,000 hektar
- PT. Lanjak Deras Jaya Raya, dengan hak seluas 45,740 hektar
- PT. Tawang Meranti, dengan hak seluas 49,200 ehktar
- PT. Batasan, dengan seluas 49,150 hektar

3.7.6 Gambaran Umum Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kapuas Hulu dan KSK Agropolitan

Keuangan daerah menggambarkan pengelolaan dan kapasitas sumber daya keuangan yang dimiliki oleh Kabupaten Kapuas Hulu dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Perbandingan PAD dengan Dana Perimbangan, dan Alokasi Belanja Daerah.

3.7.6.1 Pendapatan Asli Daerah

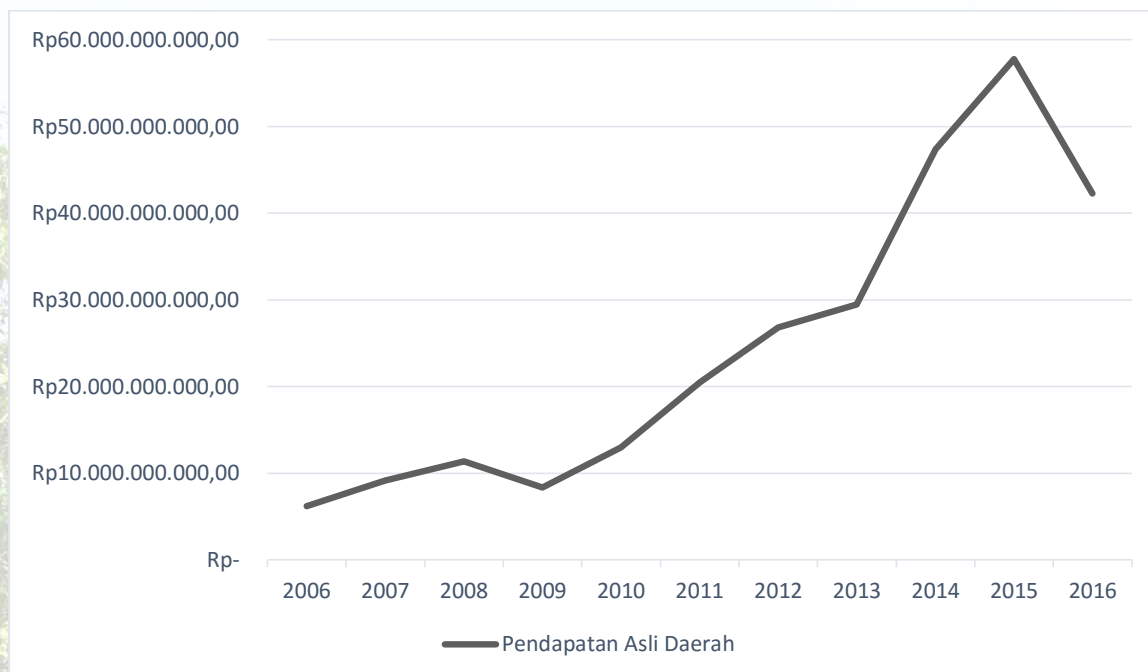
Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah di Indonesia, Pemerintah Daerah secara otomatis mendapatkan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada manajemen belanja, sesuai dengan pembagian urusan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah setidaknya memiliki kewajiban untuk mengatur pengeluarannya dalam Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Dalam pendanaan pelaksanaan urusan-urusan tersebut, terdapat sumber pendanaan utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer ke Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan PAD Lain yang sah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penguatan perpajakan daerah dilakukan dengan beberapa cara, di antara lain dengan pemberian diskresi penetapan tarif dan pendaerahan beberapa jenis pajak baru seperti Pajak Rokok, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan-Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).

Kecendrungan yang saat ini terjadi di Indonesia, sumber pendanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan pembangunan di daerahnya masih bergantung pada Dana Transfer ke Daerah. Secara agregat, Data APBD Tahun 2014 menunjukkan bahwa komposisi Dana Transfer dalam Pendapatan Daerah mencapai 81,6%. Fenomena ini menunjukkan fakta bahwa potensi-potensi untuk pengembangan Pendapatan Asli Daerah belum dimanfaatkan dengan baik.

Pada bagian ini akan dibahas gambaran kondisi pendapatan daerah Kabupaten Kapuas Hulu dari tahun 2006 hingga tahun 2016. Ilustrasi pertama menunjukkan pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Kapuas Hulu dari tahun 2006 hingga tahun 2016, sementara pada ilustrasi berikutnya akan digambarkan pertumbuhan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2006 hingga Tahun 2016 yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah Lain-Lain yang sah.

Gambar III.57 Grafik Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2006 -2016



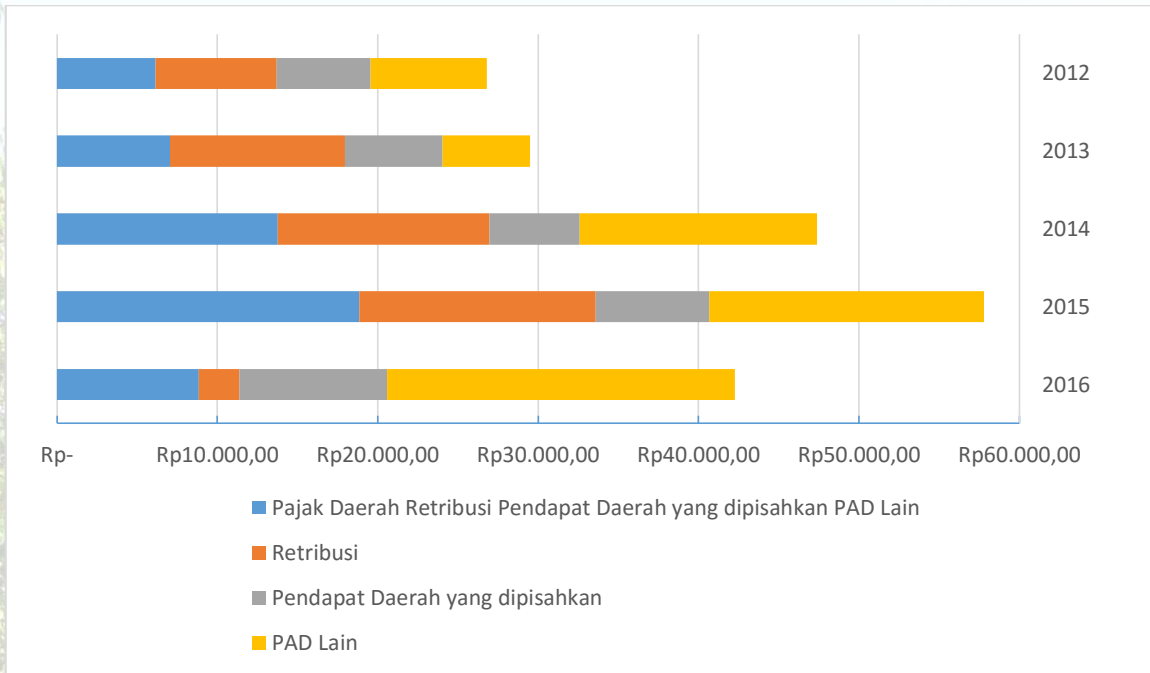
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, 2017

Pada grafik di atas dapat dilihat terjadi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kapuas Hulu yang signifikan dari tahun 2006 hingga tahun 2016. Pada tahun 2006, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. 6.204.186.249, sedangkan pada tahun 2016, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebesar Rp. 42.264.468.221. Artinya, dalam rentang waktu sepuluh tahun, Kabupaten Kapuas Hulu mengalami peningkatan nilai Pendapatan Asli Daerah sebesar 700%. Namun, jumlah Pendapatan Asli Daerah yang tertinggi yang dimiliki oleh Kabupaten Kapuas Hulu dalam rentang waktu tahun 2006 hingga tahun 2016 berada pada tahun 2015 dimana Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebesar Rp. 57.789.336.904.

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang paling signifikan terjadi pada tahun 2013 menuju tahun 2014. Pada tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebesar Rp. 29.479.708.513, sementara Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2014 adalah sebesar Rp. 47.384.623.094 artinya, terdapat pertumbuhan sebesar 161% dalam 1 tahun anggaran.

Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam lima (5) tahun terakhir, secara agregat didominasi oleh Pendapat Lain Daerah yang Sah, yaitu sebesar 33% dalam lima tahun. Pendapatan dari Pajak Daerah berkontribusi sebesar 27% secara agregat, disusul komponen Retribusi Daerah sebesar 24%. Gambaran mengenai komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam lima tahun terakhir dapat disimak dalam gambar berikut.

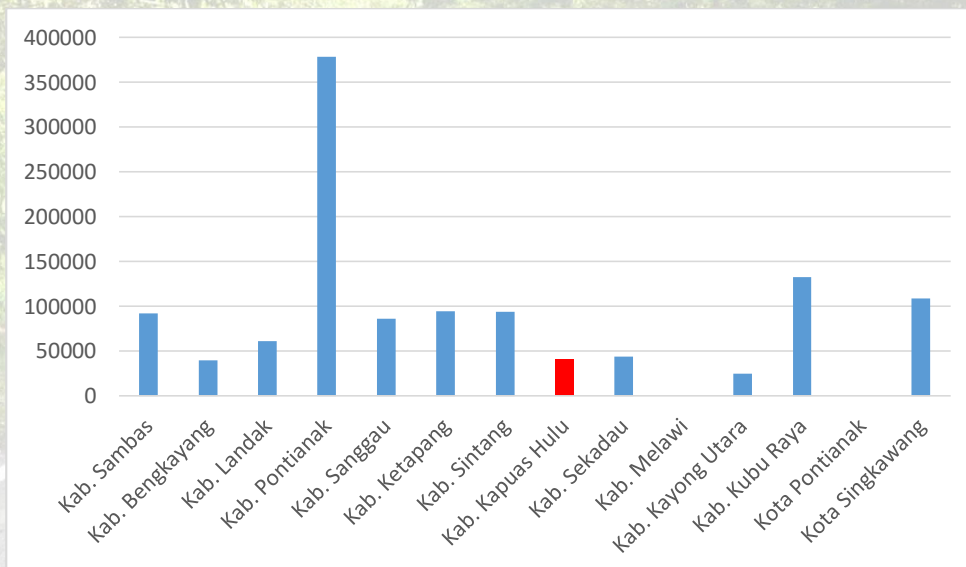
Gambar III.58 Komposisi Pendapat Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2012-2016 (dalam Juta Rupiah)



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, 2017

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Barat, pendapatan asli daerah Kabupaten Kapuas Hulu berada di posisi delapan (8). Dapat disimpulkan, meskipun mengalami kenaikan yang signifikan selama sepuluh tahun terakhir, namun secara komparatif Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu masih sangat kecil jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Kalimantan Barat.

Gambar III.59 Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, 2017

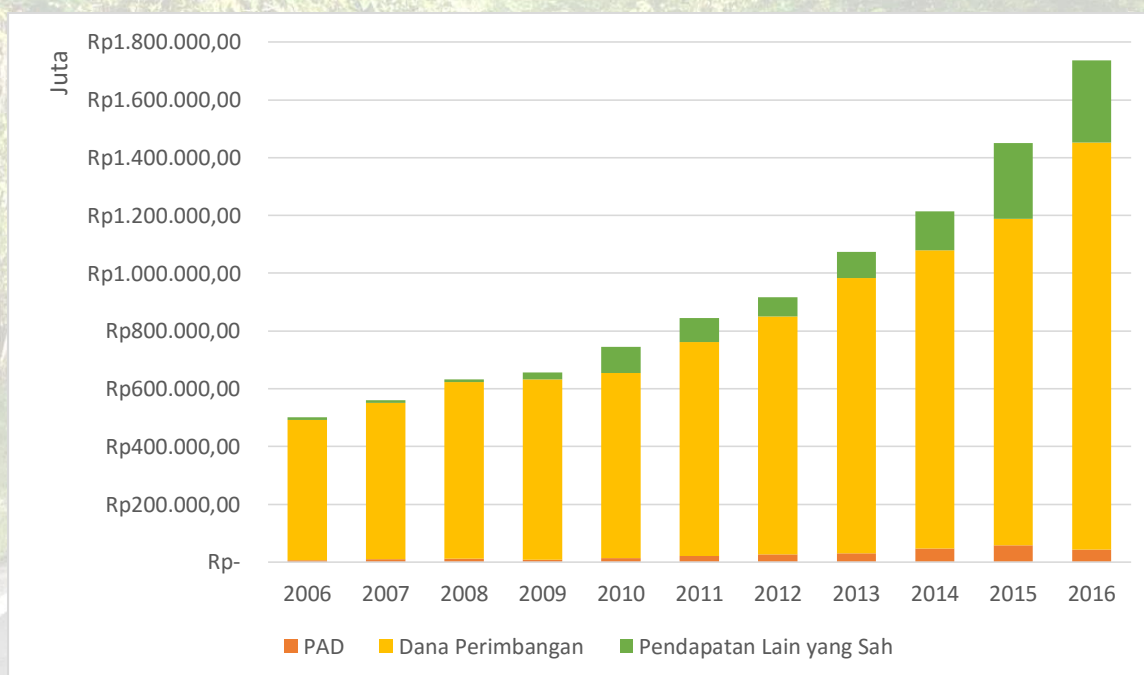
3.7.6.2 Pendapatan Dana Transfer Daerah

Dana transfer atau dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah, Dana Alokasi Umum (DAU) yang digunakan untuk membiayai gaji pegawai, dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang digunakan untuk mengatasi ketimpangan vertical antara Pusat dan Daerah.

Sejak tahun 2006, hingga tahun 2016 Pendapatan Kabupaten Kapuas Hulu di dominasi oleh Dana Transfer daerah. Meskipun jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengalami peningkatan, namun dominasi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Kabupaten Kapuas Hulu masih tinggi. Pada tahun 2006, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu hanya menyumbang sebesar 1.24% dari total pendapatan. Di saat yang bersamaan, Komponen Dana Perimbangan menyumbang 97.12% Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam kurun sepuluh tahun terakhir, Kontribusi terbesar yang disumbangkan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebesar 3.98% dari total pendapatan pada tahun 2015. Di tahun yang sama, Dana Transfer Daerah yang didapatkan oleh Kabupaten Kapuas Hulu mengalami penurunan, yaitu sebesar 77.95%, yang merupakan kontribusi terendah dalam 10 tahun terakhir.

Gambar III.60 Komponen Pendapatan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2006-2016



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, 2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2016, tentang Tata Kelola Dana Transfer Daerah, Dana Transfer Daerah merupakan bagian dari pendapatan daerah yang penggunaannya diatur dalam

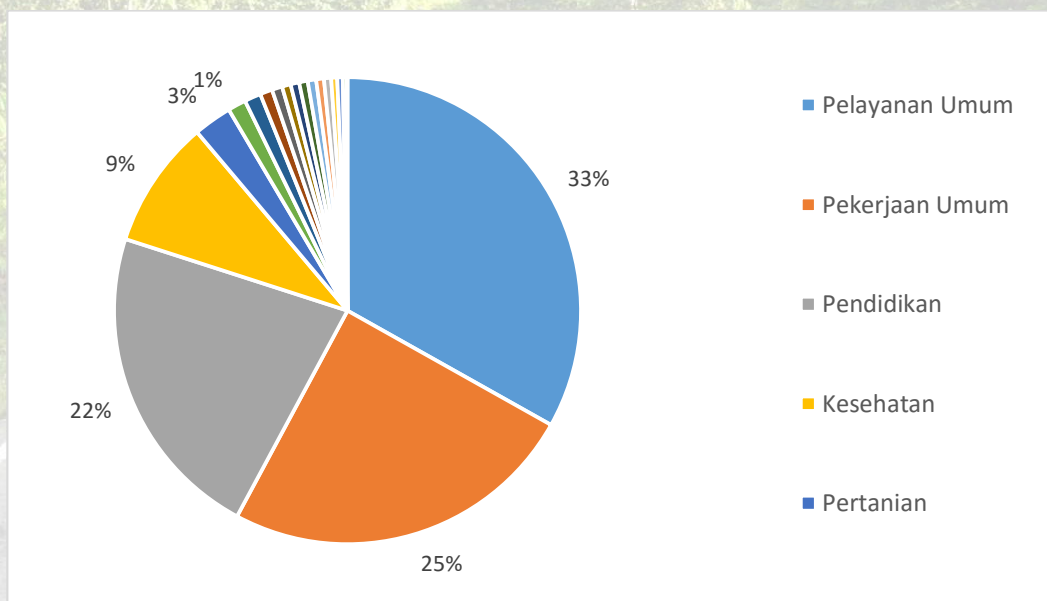
3.7.6.3 Fokus Pembiayaan

Pengeluaran atau *expenditure* dalam komponen APBD berguna untuk melaksanakan 31 urusan wajib dan urusan pilihan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Belanja Daerah mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik, sekaligus sebagai stimulus bagi perekonomian daerah jika dilaksanakan dengan baik. Artinya, belanja daerah menjadi komponen yang penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan mengidentifikasi fokus pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, skala prioritas Pemerintah Daerah terkait program dan kegiatan yang dilaksanakan. Penyusunan anggaran Belanja Daerah dapat menunjukkan apakah suatu daerah *pro poor, growth, and jobs*. Pada komponen Belanja Daerah juga nampak seberapa besar porsi belanja langsung yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan terkait langsung dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan data APBD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016, fokus utama dari Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah Urusan Pelayanan Umum sebesar 33% dari total Belanja Daerah, yaitu sebesar Rp. 561 milyar. Komponen Pelayanan Umum terdiri atas urusan perencanaan, urusan administrasi keuangan, urusan perangkat daerah, dan urusan kepegawaian. Fokus kedua adalah urusan pekerjaan umum sebesar Rp. 418 milyar, atau sebesar 25% dari total Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016.

Gambar III.61 Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam APBD 2016



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, 2017

Selanjutnya adalah urusan pertanian dan urusan kehutanan yang merupakan dua fokus utama Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2016, yang merupakan urusan pilihan dari pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016 untuk urusan pertanian adalah sebesar 3%, sementara untuk urusan kehutanan adalah sebesar 1% dari total belanja. Meski pun relatif kecil, namun kedua belanja tersebut menunjukkan bahwa fokus Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah untuk urusan pertanian dan kehutanan, setelah melaksanakan urusan administrasi, pembangunan fisik, dan menjalankan amanat Undang-Undang dimana belanja urusan Pendidikan dan Kesehatan harus sebesar minimal 20% dan 5% dari total belanja daerah.

BAB IV ANALISIS PENGEMBANGAN WILAYAH PERENCANAAN

4.1. ANALISIS FISIK DAN LINGKUNGAN

Analisis dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kondisi fisik dan lingkungan Kapuas Hulu untuk mendukung kegiatan Agropolitan. Analisis fisik dan lingkungan terdiri dari analisis satuan kemampuan lahan, kemampuhan lahan, arahan rasio tutupan lahan, arahan ketinggian bangunan, daya tampung, kesesuaian lahan, dan evaluasi pemanfaatan lahan

4.1.1 Analisis Satuan Kemampuan Lahan

Kemampuan suatu wilayah dalam mendukung pengembangan wilayah di dalamnya, berdasarkan Permen PU 20/2007 tentang Teknik Analisis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang, dapat dilihat dari beberapa satuan, yaitu morfologi, kemudahan dikerjakan, kestabilan lereng, erosi, kestabilan pondasi, pembuangan limbah, bencana, ketersediaan air, dan drainase. Masing-masing satuan kemampuan lahan dianalisis menggunakan data-data terkait fisik dan lingkungan yang memiliki nilai dan bobot tertentu. Setelah menyusun analisis satuan kemampuan lahan, akan dilakukan *overlay* terhadap SKL-SKL tersebut yang akan menunjukkan kemampuan lahan kawasan agropolitan Kapuas Hulu.

4.1.1.1 SKL Morfologi

SKL morfologi menunjukkan kondisi bentang alam ketujuh kecamatan yang tergolong dalam KSK Agropolitan Kapuas Hulu. Data mengenai kelerengan menentukan apakah wilayah ini memiliki kemampuan morfologi atau sebaliknya. Tingkat kelerengan yang tinggi menandakan bahwa bentang alamnya berupa pegunungan atau bukit yang bergelombang sehingga sulit untuk dikembangkan. Berikut adalah sistem pembobotan data kelerengan untuk SKL Morfologi.

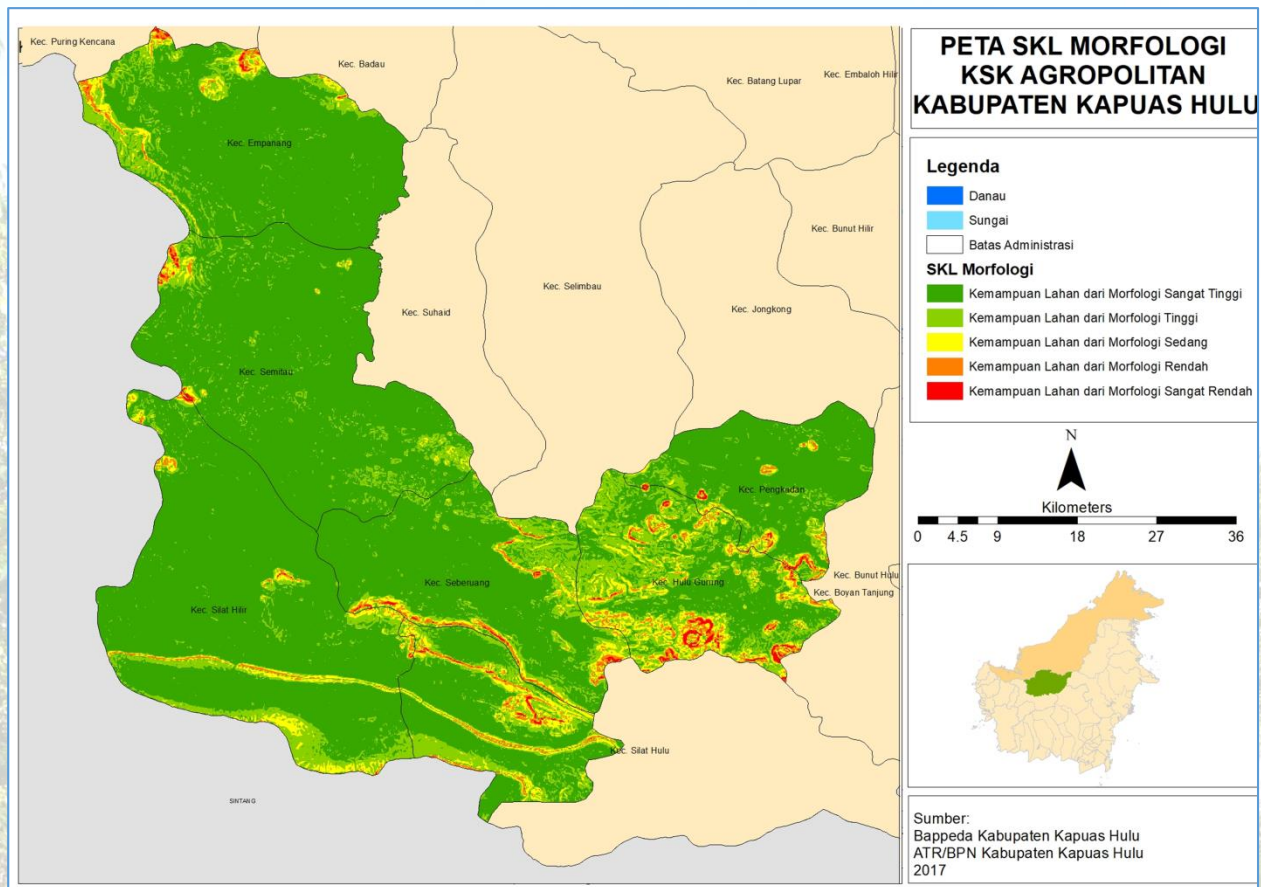
Tabel IV.1 Klasifikasi SKL Morfologi

Kemiringan Lereng	Nilai	Bobot	Klasifikasi
0%-8%	5	1	Kemampuan Lahan dari Morfologi Sangat Tinggi
8% - 15%	4		Kemampuan Lahan dari Morfologi Tinggi
15% - 25%	3		Kemampuan Lahan dari Morfologi Sedang
25%-40%	2		Kemampuan Lahan dari Morfologi Rendah
> 40%	1		Kemampuan Lahan dari Morfologi Sangat Rendah

Sumber: Analisis, 2017

Berdasarkan penilaian dan pembobotan tersebut, disusun peta satuan kemampuan lahan dari morfologi.

Gambar IV.1 Peta SKL Morfologi KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber: Analisis, 2017

Secara keseluruhan, kemampuan lahan berdasarkan kondisi morfologinya sudah sangat baik sehingga dapat dikembangkan dan diolah menjadi kawasan budidaya. Di Kecamatan Silat Hilir, Semitau, Empanang, dan Pengkadan didominasi oleh tingkat keterlerangan yang rendah sehingga kemampuan lahan untuk dikembangkan sangat tinggi. Untuk Kecamatan Hulu Gurung dan Seberuang terdapat daerah perbukitan yang bergelombang sehingga kemampuannya rendah. Selain itu, beberapa desa di Kecamatan Silat Hulu yang tergabung dalam KSK Agropolitan juga memiliki tingkat keterlerangan yang tinggi.

4.1.1.2 SKL Kemudahan Dikerjakan

Satuan kemampuan lahan kemudahan dikerjakan disusun dari *overlay* berbagai data terkait fisik dan lingkungan yaitu kemiringan lereng, formasi batuan, jenis tanah, dan penggunaan lahan. SKL ini mengindikasikan kemudahan lahan untuk diolah atau dimatangkan, semakin tinggi nilai akhirnya maka semakin tinggi pula kemudahan untuk dimatangkan. Masing-masing jenis data diberi bobot berdasarkan kemudahannya untuk dimatangkan. Berikut ini adalah nilai dan pembobotan untuk SKL kemudahan dikerjakan.

Tabel IV.2 Penilaian dan Pembobotan SKL Kemudahan Dikerjakan

Formasi Batuan	Nilai	Bobot	Penggunaan Lahan	Nilai	Bobot
Aluvium	3	2	Hutan Lahan Kering Primer	3	1
Batuan Terobosan	5		Hutan Lahan Kering Sekunder	3	
Betung Volcanics	3		Hutan Rawa Sekunder	1	

FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU

Dangkan Sandstones	2	Perkebunan	3
Disected Alluvial Deposit	3	Permukiman	4
Haloq Sandstone	2	Pertambangan	3
Ingar Formation	3	Pertanian Lahan Kering	4
Kantu	3	Pertanian Lahan Kering Bercampur dengan Semak	4
Kelompok Selangkai	3	Rawa	1
Ketungau	3	Semak/Belukar	5
Komplek Busang	3	Semak/Belukar Rawa	1
Kuaro	3	Tanah Terbuka	5
Lake Deposits	3	Tubuh Air	1
Mandai Group	3	Kemiringan Lereng	Nilai Bobot
Piyabung Volcanics	3	0%-8%	5
Semitau Complex	3	8% - 15%	4
Serpih Silat	2	8% - 25%	3
Tutoop Sandstone	2	25%-40%	2
Jenis Tanah	Nilai	Bobot	> 40%
Aluvial	5		1
Tektonik/Struktural	3	2	
Volkan	3		

Sumber: Analisis, 2017

Data yang digunakan dalam analisis ini bersumber dari data RTRW Kabupaten Kapuas Hulu dengan tahun yang berbeda-beda. Data penggunaan lahan yang digunakan adalah tahun 2009 dengan asumsi tidak ada perubahan yang signifikan dengan guna lahan saat ini. Berdasarkan *overlay* keempat data terkait, diperoleh skor akhir yang akan menentukan tingkat kemudahan dikerjakan suatu daerah. Berikut adalah klasifikasi menurut nilai akhir dari perhitungan yang telah dilakukan.

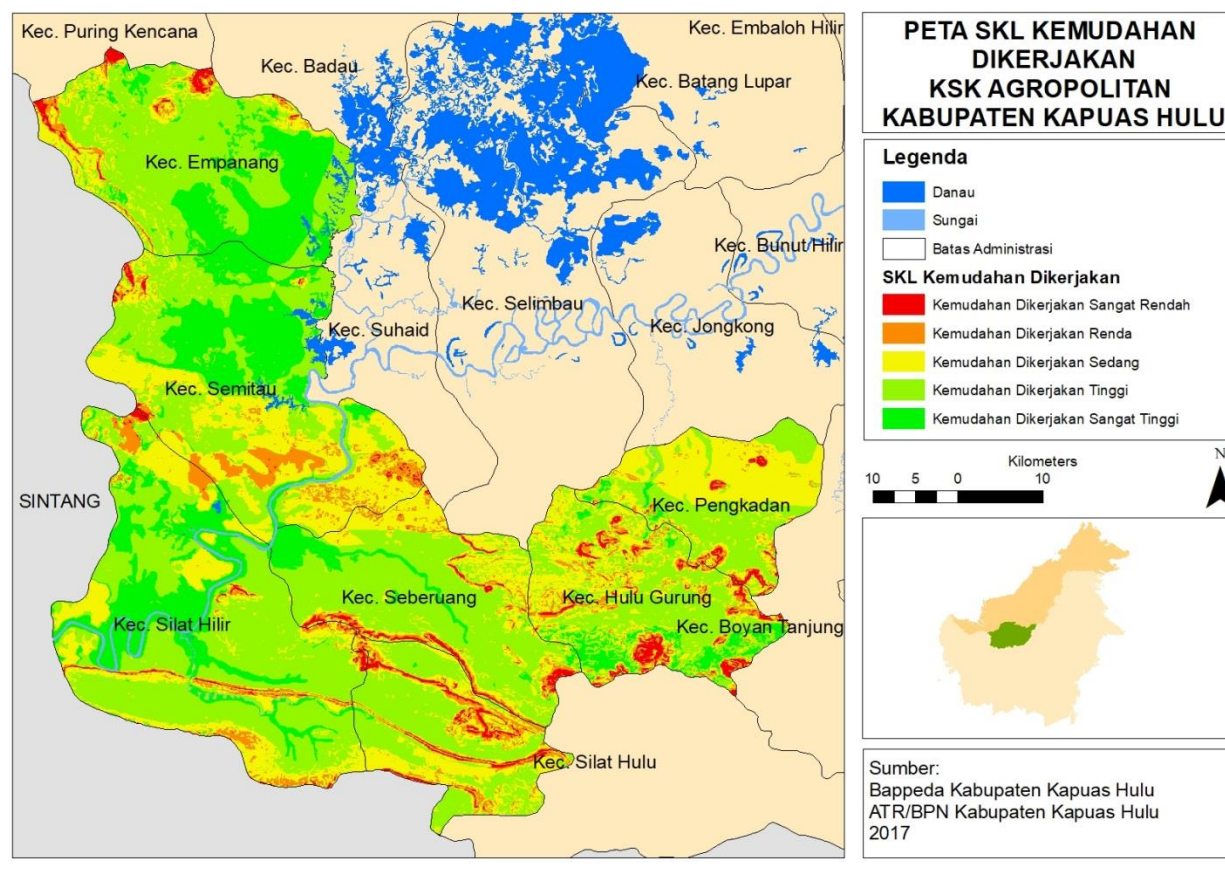
Tabel IV.3 Klasifikasi SKL Kemudahan Dikerjakan

Nilai Akhir	Klasifikasi
39-45	Kemudahan Dikerjakan Sangat Tinggi
35-38	Kemudahan Dikerjakan Tinggi
31-34	Kemudahan Dikerjakan Sedang
27-30	Kemudahan Dikerjakan Rendah
15-26	Kemudahan Dikerjakan Sangat Rendah

Sumber: Analisis, 2017

Kawasan Agropolitan Kapuas Hulu memiliki nilai paling tinggi 45 dan yang paling rendah adalah 26. Gambar dibawah ini menunjukkan peta SKL kemudahan dikerjakan berdasarkan klasifikasinya

Gambar IV.2 Peta SKL Kemudahan Dikerjakan KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber: Analisis, 2017

Dapat dilihat bahwa tingkat kemudahan dikerjakan di kawasan agropolitan Kapuas Hulu secara keseluruhan adalah tinggi. Secara umum Kecamatan Silat Hilir memiliki tingkat kemudahan dikerjakan yang tinggi. Kecamatan Semitau memiliki kondisi yang berbeda di daerah utara dan selatannya. Di Utara Kecamatan Semitau sampai dengan Kecamatan Empanang memiliki tingkat kemudahan dikerjakan yang tinggi, bahkan sangat tinggi di beberapa daerah. Sedangkan untuk Kecamatan Semitau bagian selatan cenderung rendah dan sedang, seperti di Kecamatan Pengkadan. Kecamatan Seberuang dan Hulu Gurung memiliki tingkat kemudahan dikerjakan yang sangat rendah di beberapa daerah.

4.1.1.3 SKL Kestabilan Lereng dan SKL Kestabilan Pondasi

Kestabilan lereng dapat ditentukan dari enam data yaitu kemiringan lereng, ketinggian, jenis tanah, formasi batuan, penggunaan lahan, dan curah hujan. SKL kestabilan lereng menunjukkan stabil atau tidaknya sebuah daerah. Apabila tingkat kestabilan lereng rendah, maka daerah tersebut memiliki tanah yang mudah bergerak dan tidak aman untuk dikembangkan bangunan, perumahan, atau kegiatan budidaya lainnya. SKL kestabilan lereng juga menentukan SKL kestabilan pondasi yang bertujuan untuk menentukan kawasan mana yang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan terbangun dan bagaimana jenis pondasinya. Kawasan dengan kestabilan pondasi tinggi, dapat menggunakan jenis pondasi apapun, sedangkan untuk kestabilan pondasi kurang, diperlukan pondasi tertentu agar bangunan lebih stabil. Untuk kawasan dengan kestabilan lereng rendah dan kestabilan

pondasi rendah disarankan untuk guna lahan hutan, perkebunan, resapan air. Namun, perlu dilihat juga dari SKL lain dan hasil *overlay*nya untuk menentukan peruntukkan lahan. Masing-masing data untuk mem memiliki nilai dan bobot tertentu untuk menghasilkan SKL kestabilan lereng ini, seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel IV.4 Penilaian dan Pembobotan SKL Kestabilan Lereng

Kemiringan Lahan	Nilai	Bobot	Ketinggian	Nilai	Bobot
0%-8%	5	4	0-100 m	5	3
8% - 15%	4		100-500 m	4	
8% - 25%	3		500-1000 m	3	
25%-40%	2		>1000 m	2	
> 40%	1		Jenis Tanah	Nilai	Bobot
Formasi Batuan	Nilai	Bobot	Aluvial	5	3
Aluvium	3	2	Tektonik/Struktural	3	
Batuan Terobosan	5		Volkan	3	
Betung Volcanics	3		Penggunaan Lahan	Nilai	Bobot
Dangkan Sandstones	2		Hutan Lahan Kering Primer	3	2
Disected Alluvial Deposit	3		Hutan Lahan Kering Sekunder	3	
Haloq Sandstone	2		Hutan Rawa Sekunder	1	
Ingar Formation	3		Perkebunan	3	
Kantu	3		Permukiman	4	
Kelompok Selangkai	3		Pertambangan	3	
Ketungau	3		Pertanian Lahan Kering	4	
Komplek Busang	3		Pertanian Lahan Kering Bercampur dengan Semak	4	
Kuaro	3		Rawa	1	
Lake Deposits	3		Semak/Belukar	5	
Mandai Group	3		Semak/Belukar Rawa	1	
Piyabung Volcanics	3		Tanah Terbuka	5	
Semitau Complex	3		Tubuh Air	1	
Serpih Silat	2		Curah Hujan	Nilai	Bobot
Tutoop Sandstone	2		3500-4000 mm	2	3
			4000-4500 mm	1	

Sumber: Analisis, 2017

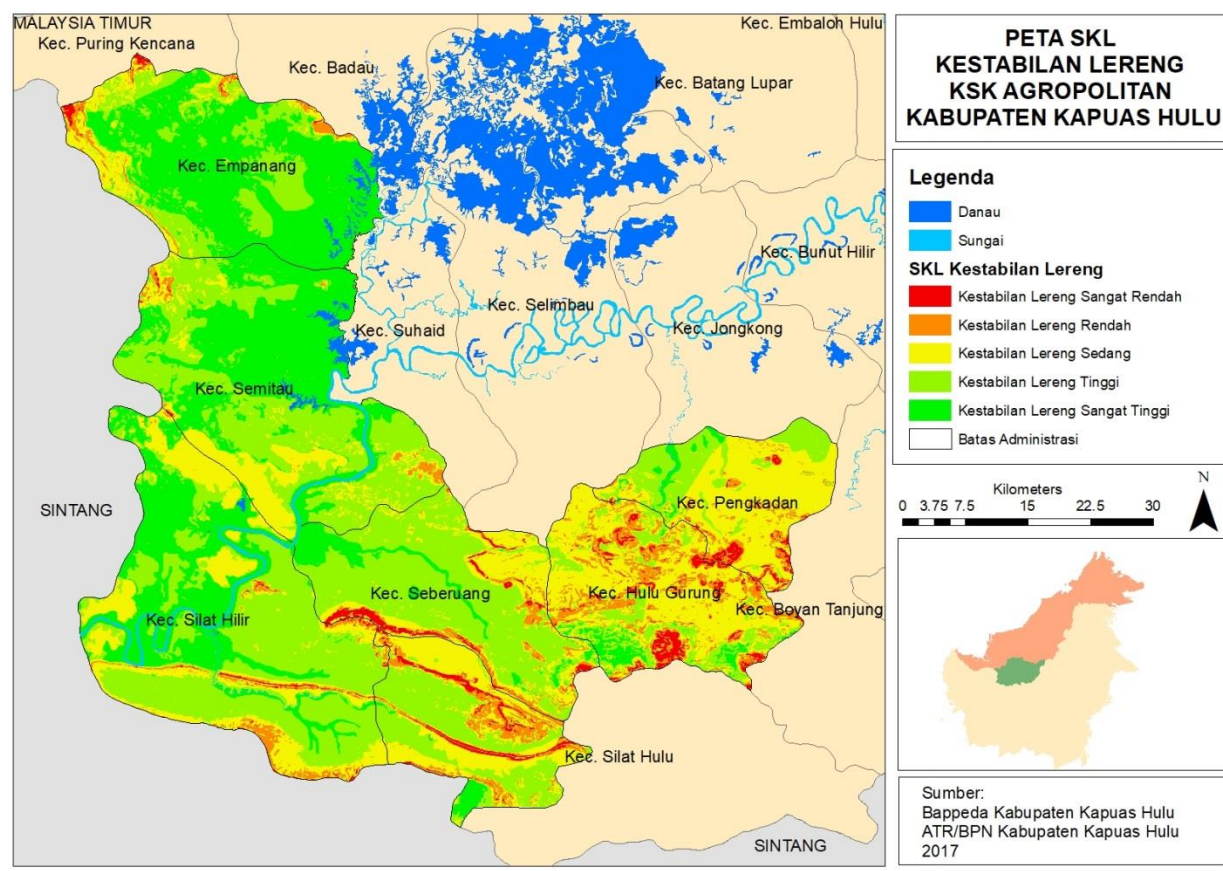
Berdasarkan *overlay* data dan peta tersebut, diperoleh nilai akhir tertinggi sebesar 76 dan terendah 33. Berikut adalah klasifikasi kestabilan lereng menurut nilai akhirnya.

Tabel IV.5 Klasifikasi SK Kestabilan Lereng

Nilai Akhir	Klasifikasi
64-76	Kestabilan Lereng Sangat Tinggi
58-63	Kestabilan Lereng Tinggi
52-57	Kestabilan Lereng Sedang
46-51	Kestabilan Lereng Rendah
33-45	Kestabilan Lereng Sangat Rendah

Sumber: Analisis, 2017

Gambar IV.3 Peta SKL Kestabilan Lereng KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber: Analisis, 2017

Pada gambar IV.3 terlihat bahwa Kecamatan Empanang, Semitau, dan Silat Hilir memiliki lahan yang stabil. Saat ini, di ketiga kecamatan tersebut mayoritas dimanfaatkan untuk perkebunan sawit dari perusahaan besar. Sedangkan, di Kecamatan Seberuang dan Silat Hulu, lahan mayoritas stabil namun terdapat daerah yang kestabilannya rendah dan sangat rendah. Selain itu, lebih dari separuh lahan di Kecamatan Hulu Gurung dan Pengkadan memiliki kestabilan lereng sedang.

SKL Kestabilan Pondasi menggunakan data dengan nilai dan bobot yang sama seperti SKL kestabilan Lereng. Berikut ini adalah klasifikasi kestabilan pondasi yang dibagi menjadi 3 kelas berdasarkan nilai akhir kestabilan lereng.

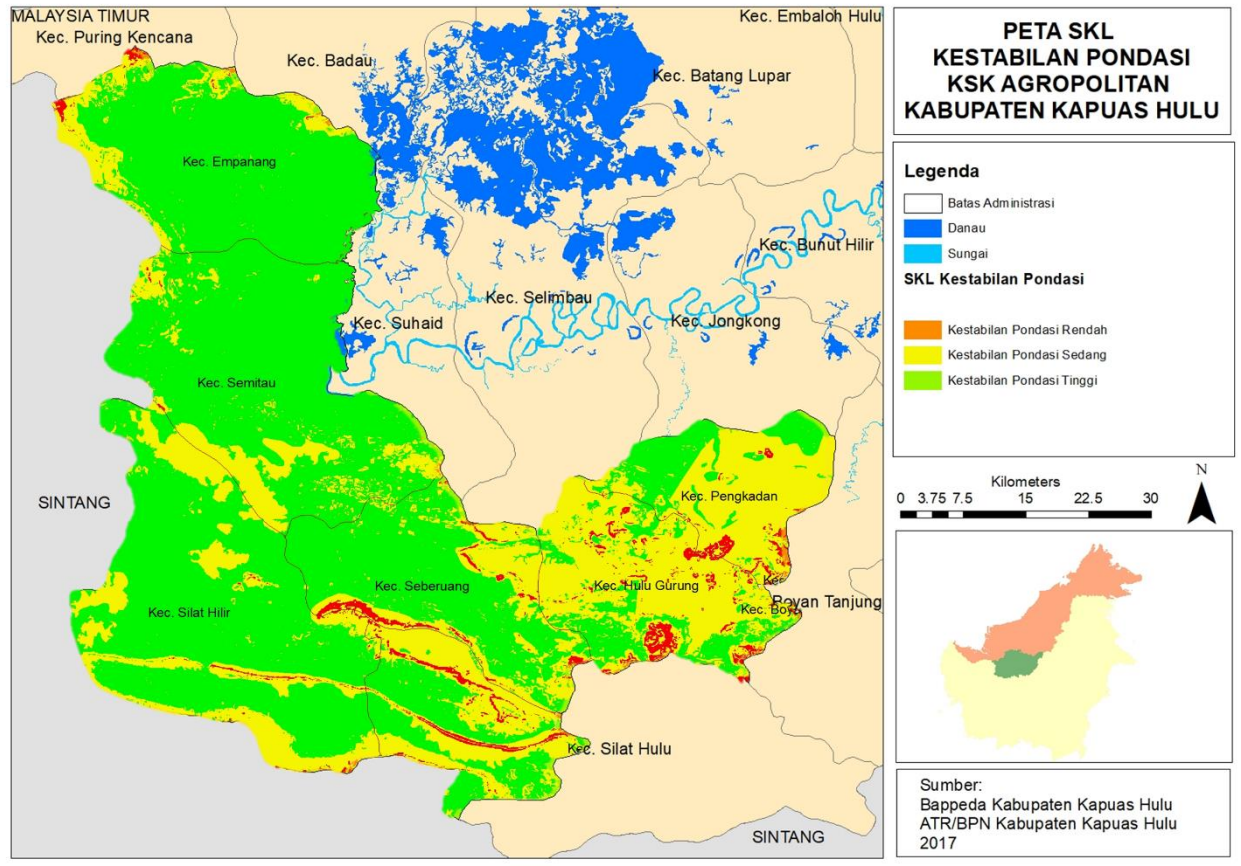
Tabel IV.6 Klasifikasi SKL Kestabilan Pondasi

Nilai Akhir	Klasifikasi
76-58	Kestabilan Pondasi Tinggi
45-57	Kestabilan Pondasi Sedang
33-45	Kestabilan Pondasi Rendah

Sumber: Analisis, 2017

Berdasarkan gambar IV.4 dapat dilihat bahwa bagian barat kawasan Agropolitan Kapuas Hulu cenderung memiliki kestabilan pondasi yang cukup tinggi, daerah ini meliputi Kecamatan Empanang, Semitau, dan Silat Hilir. Kecamatan di bagian timur kawasan Agropolitan memiliki kestabilan pondasi mayoritas sedang.

Gambar IV.4 Peta SKL Kestabilan Pondasi KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber: Analisis, 2017

4.1.1.4 SKL Ketersediaan Air Permukaan

Ketujuh kecamatan di kawasan agropolitan Kapuas Hulu tidak mengandalkan air tanah sebagai sumber air bersih. Hampir seluruh penduduk mengandalkan mata air, air sungai, dan danau untuk keperluan sehari-hari. Sumber air PDAM juga menggunakan tidak hanya menggunakan mata air hutan dan gunung, namun juga air permukaan yang selanjutnya diolah, walaupun belum bisa menjangkau seluruh rumah tangga dan kualitasnya belum seluruhnya baik. Beberapa kecamatan yang memiliki kawasan hutan masih bisa menggunakan mata air untuk konsumsi sehari-hari, contohnya adalah Hulu Gurung dan beberapa desa di Semitau. Air tanah tidak menjadi sumber air bersih masyarakat karena kualitasnya tidak jauh lebih baik dari air sungai, bahkan tidak layak dikonsumsi di beberapa daerah. Hal ini juga dipengaruhi oleh aktivitas sawit dalam skala besar, ditambah lagi pohon sawit merupakan tanaman yang dianggap banyak menyerap air. Oleh karena itu, SKL ketersediaan air yang digunakan adalah air permukaan yang berasal dari curah hujan, sungai, dan danau seperti yang ditunjukkan pada tabel IV.7.

Tabel IV.7 Penilaian dan Pembobotan SKL Ketersediaan Air Permukaan

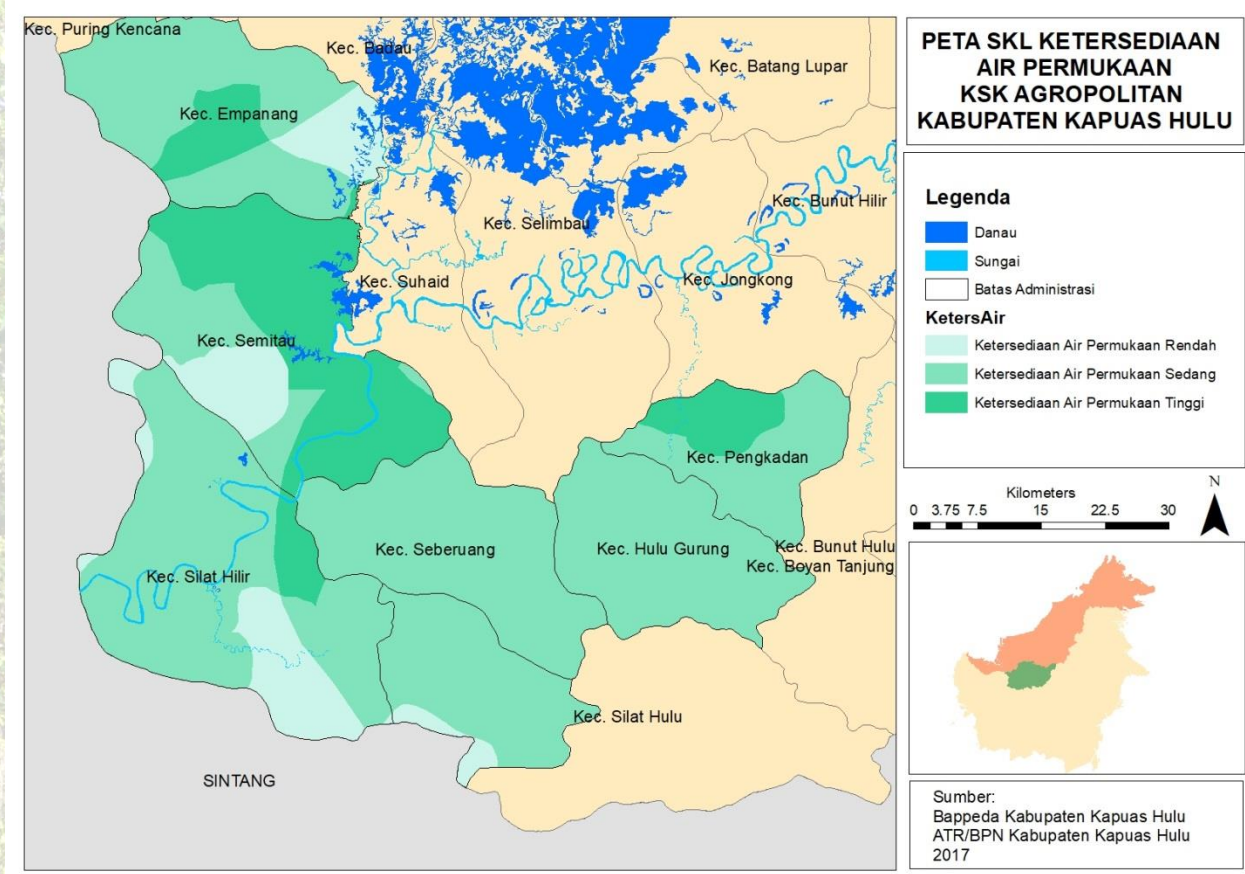
	Curah Hujan	Nilai	Bobot
	2500-3000 mm	4	4
	>3000mm	5	
	Perairan	Nilai	Bobot
	Danau	2	3

Sungai 2 garis (besar)	2
Sungai 1 garis (kecil)	1

Sumber: Analisis, 2017

Berdasarkan *overlay* dari curah hujan dan perairan, kecamatan yang memiliki ketersediaan paling tinggi adalah Semitau. Secara keseluruhan, ketersediaan air permukaan di kawasan agropolitan Kapuas Hulu cukup baik, seperti yang ditampilkan pada gambar IV.5.

Gambar IV.5 Peta SKL Ketersediaan Air Permukaan KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber: Analisis, 2017

Walaupun secara keseluruhan ketersediaan air cukup di kawasan ini, berdasarkan hasil wawancara, ketersediaan dan kualitas air masih buruk. Hal ini karena terdapat sungai yang tercemar oleh limbah padat dan cair baik dari kegiatan domestik, maupun kegiatan ekonomi. Selain itu, instalasi pengolahan air bersih baik dari PDAM maupun non-PDAM juga belum tersedia di seluruh desa dan kecamatan. Tidak sedikit juga masyarakat yang memanfaatkan air hujan untuk konsumsi sehari-hari, khususnya di Kecamatan Empanang. Hal ini salah satunya disebabkan oleh terkonversinya kawasan hutan menjadi perkebunan, sehingga tidak ada penyimpanan air cadangan. Secara umum, kondisi perairan sungai di Kapuas Hulu mudah mengalami kekeringan apabila tidak hujan. Kondisi sungai yang mudah surut ini tentunya mempengaruhi ketersediaan air dan juga transportasi air. Pencemaran dari perusahaan perkebunan dan kegiatan domestik masyarakat menyebabkan penurunan kualitas air sungai. Berdasarkan hasil FGD, daerah yang memiliki mata air adalah Desa Laja Sandang di Silat Hilir, Pengkadan, Hulu Gurung, dan Desa Marsedan raya di Semitau.

4.1.1.5 SKL Drainase

Analisis pada satuan kemampuan lahan drainase bertujuan untuk mengetahui bagaimana air mengalir di daerah tertentu. Drainase tinggi berarti air dapat mudah mengalir dan kecil peluangnya untuk terjadi genangan. Untuk mengetahui SKL drainase maka diperlukan data kemiringan lereng, ketinggian, jenis tanah, guna lahan, dan curah hujan. Berikut adalah penilaian dan pembobotan untuk SKL Drainase

Tabel IV.8 Penilaian dan Pembobotan SKL Drainase

Kemiringan Lahan	Nilai	Bobot	Guna Lahan	Nilai	Bobot
0%-8%	1	3	Hutan Lahan Kering Primer	4	1
8% - 15%	2		Hutan Lahan Kering Sekunder	4	
8% - 25%	3		Hutan Rawa Sekunder	1	
25%-40%	4		Perkebunan	3	
> 40%	5		Permukiman	3	
Ketinggian	Nilai	Bobot	Pertambangan	1	
0-100 m	1	3	Pertanian Lahan Kering	3	
100-500 m	2		Pertanian Lahan Kering Bercampur dengan Semak	3	
500-1000 m	3		Rawa	1	
>1000 m	4		Semak/Belukar	3	
Jenis Tanah	Nilai		Bobot	Semak/Belukar Rawa	2
Aluvial	5	1	Tanah Terbuka	3	
Tektonik/Struktural	3		Tubuh Air	5	
Volkan	3		Nilai	Bobot	
			3500-4000 mm	2	
		4000-4500 mm	1	1	

Sumber: Analisis, 2017

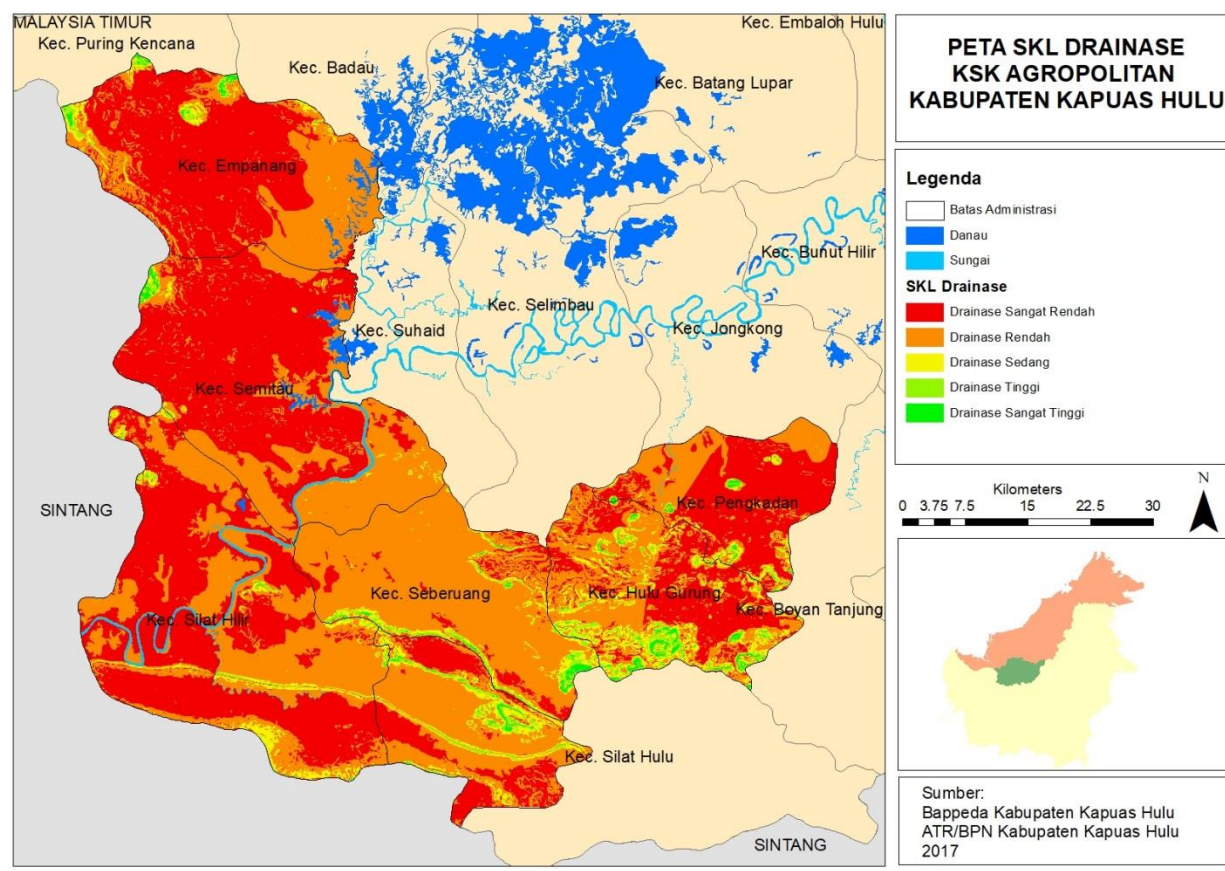
Setelah dilakukan *overlay* terhadap peta dan data tersebut, diperoleh nilai akhir yang digunakan untuk mengklasifikasikan kemampuan drainasenya. Berikut adalah tabel klasifikasi dan peta SKL Drainase

Tabel IV.9 Klasifikasi SKL Drainase

Nilai Akhir	Klasifikasi
18-29	SKL Drainase Sangat Tinggi
30-36	SKL Drainase Tinggi
37-41	SKL Drainase Sedang
42-47	SKL Drainase Rendah
48-57	SKL Drainase Sangat Rendah

Sumber: Analisis, 2017

Gambar IV.6 Peta SKL Drainase KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber: Analisis, 2017

Secara umum, ketujuh kecamatan di kawasan agropolitan memiliki kemampuan drainase yang rendah karena kondisi morfologinya cenderung datar. Kecamatan Empanang, Semitau, dan Silat Hilir cenderung berwarna merah yang berarti kemampuan drainasenya sangat rendah. Hanya beberapa titik di Hulu Gurung dan sekitarnya yang berbukit dan memiliki tingkat kelerengan tinggi sehingga dapat mengalirkan air dengan baik dan tidak berpotensi terjadi genangan.

4.1.1.6 SKL terhadap Erosi

Satuan kemampuan lahan terhadap erosi bertujuan untuk mengetahui mudah tidaknya lapisan tanah terbawa air atau angin. Lahan yang mudah terkena erosi akan mudah terkikis permukaannya dan sulit dalam penyerapan air. Erosi bukan hanya proses alami, tapi juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia dalam pemanfaatan lahan. Tingkat erosi ini dapat diketahui melalui kemiringan lereng, jenis tanah, formasi batuan, curah hujan, dan penggunaan lahan.

Tabel IV.10 Penilaian dan Pembobotan SKL Terhadap Erosi

Jenis Tanah	Nilai	Bobot	Kemiringan Lahan	Nilai	Bobot
Aluvial	5		0%-8%	5	
Tektonik/Struktural	3	2	8% - 15%	4	
Volkan	3		8% - 25%	3	3
Formasi Batuan	Nilai	Bobot	25%-40%	2	
Aluvium	3		> 40%	1	
Batuan Terobosan	5	2	Penggunaan Lahan	Nilai	Bobot

FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU

Betung Volcanics	3	Hutan Lahan Kering Primer	5	
Dangkan Sandstones	2	Hutan Lahan Kering Sekunder	4	
Disected Alluvial Deposit	3	Hutan Rawa Sekunder	4	
Haloq Sandstone	2	Perkebunan	2	
Ingar Formation	3	Permukiman	3	
Kantu	3	Pertambangan	1	
Kelompok Selangkai	3	Pertanian Lahan Kering	2	4
Ketungau	3	Pertanian Lahan Kering Bercampur dengan Semak	2	
Komplek Busang	3	Rawa	5	
Kuaro	3	Semak/Belukar	2	
Lake Deposits	3	Semak/Belukar Rawa	3	
Mandai Group	3	Tanah Terbuka	1	
Piyabung Volcanics	3	Tubuh Air	5	
Semitau Complex	3	Curah Hujan	Nilai	Bobot
Serpih Silat	2	3500-4000 mm	2	4
Tutoop Sandstone	2	4000-4500 mm	1	

Sumber: Analisis, 2017

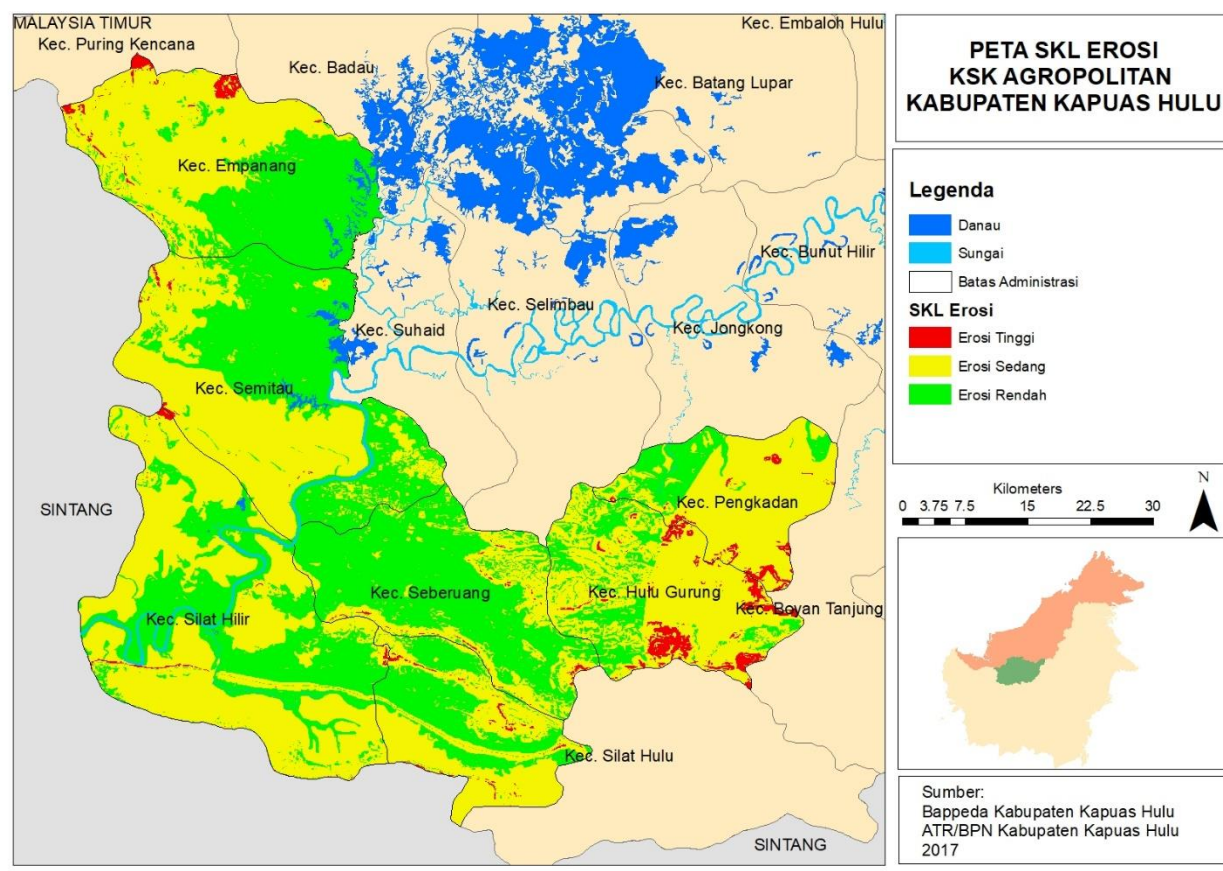
Berdasarkan penilaian tersebut, daerah dengan nilai kecil akan mudah terkena erosi, dan sebaliknya. Daerah hutan memiliki tingkat erosi yang rendah dibandingkan dengan daerah perkebunan dan pertanian yang telah ditanami oleh vegetasi lain. Curah hujan yang tinggi pun mempengaruhi tingkat erosi, semakin besar curah hujan, maka tingkat erosi akan semakin tinggi pula. Berikut adalah tabel klasifikasi tingkat erosi di kawasan agropolitan di Kapuas Hulu dan peta SKL erosi.

Tabel IV.11 Klasifikasi SKL Erosi

Nilai Akhir	Klasifikasi
10-34	SKL Erosi Tinggi
35-43	SKL Erosi Sedang
44-55	SKL Erosi Rendah

Sumber: Analisis, 2017

Gambar IV.7 Peta SKL Erosi KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber: Analisis, 2017

Masyarakat di ketujuh kecamatan ini mayoritas bermata pencaharian di sector pertanian dan tidak sedikit juga yang masih menggunakan sistem ladang berpindah. Hal ini tentunya mempengaruhi tingkat erosi dan kemampuan lahannya secara umum. Selain guna lahan, cuaca juga berperan besar dalam tingkat erosi ini. Pada Gambar IV.7 terlihat bahwa hampir seluruh kecamatan memiliki tingkat erosi sedang, kecuali Kecamatan Seberuang yang tingkat erosinya rendah.

4.1.1.7 SKL untuk Pembuangan Limbah

Pengelolaan limbah merupakan hal yang penting bagi keberlanjutan lingkungan. Limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan pencemaran dan degradasi lingkungan. Analisis SKL pembuangan limbah dilakukan untuk mencari daerah yang cocok sebagai lokasi pembuangan dan pengelolaan limbah. Lokasi pembuangan limbah tidak bisa ditentukan di sembarang tempat karena akan mempengaruhi wilayah sekitarnya. Lokasi yang cenderung datar dengan guna lahan yang jauh dari permukiman penduduk dan bercurah hujan rendah merupakan lokasi yang cocok sebagai tempat pengelolaan limbah. Berikut ini adalah penilaian dan pembobotan untuk membuat SKL pembuangan limbah.

Tabel IV.12 Penilaian dan Pembobotan SKL untuk Pembuangan Limbah

Jenis Tanah	Nilai	Bobot	Penggunaan Lahan	Nilai	Bobot
Aluvial	1	1	Hutan Lahan Kering Primer	3	4
Tektonik/Struktural	3		Hutan Lahan Kering Sekunder	3	

FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STARTEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU

Volkan	3		Hutan Rawa Sekunder	1
Gambut	1		Perkebunan	2
Ketinggian	Nilai	Bobot	Permukiman	1
0-100 m	5		Pertambangan	3
100-500 m	4		Pertanian Lahan Kering	4
500-1000 m	3	3	Pertanian Lahan Kering Bercampur dengan Semak	4
>1000 m	2		Rawa	1
Kemiringan Lahan	Nilai	Bobot	Semak/Belukar	5
0%-8%	5		Semak/Belukar Rawa	1
8% - 15%	4		Tanah Terbuka	5
8% - 25%	3	3	Tubuh Air	5
25%-40%	2		Curah Hujan	Nilai
> 40%	1		3500-4000 mm	2
			4000-4500 mm	1
				2

Sumber: Analisis, 2017

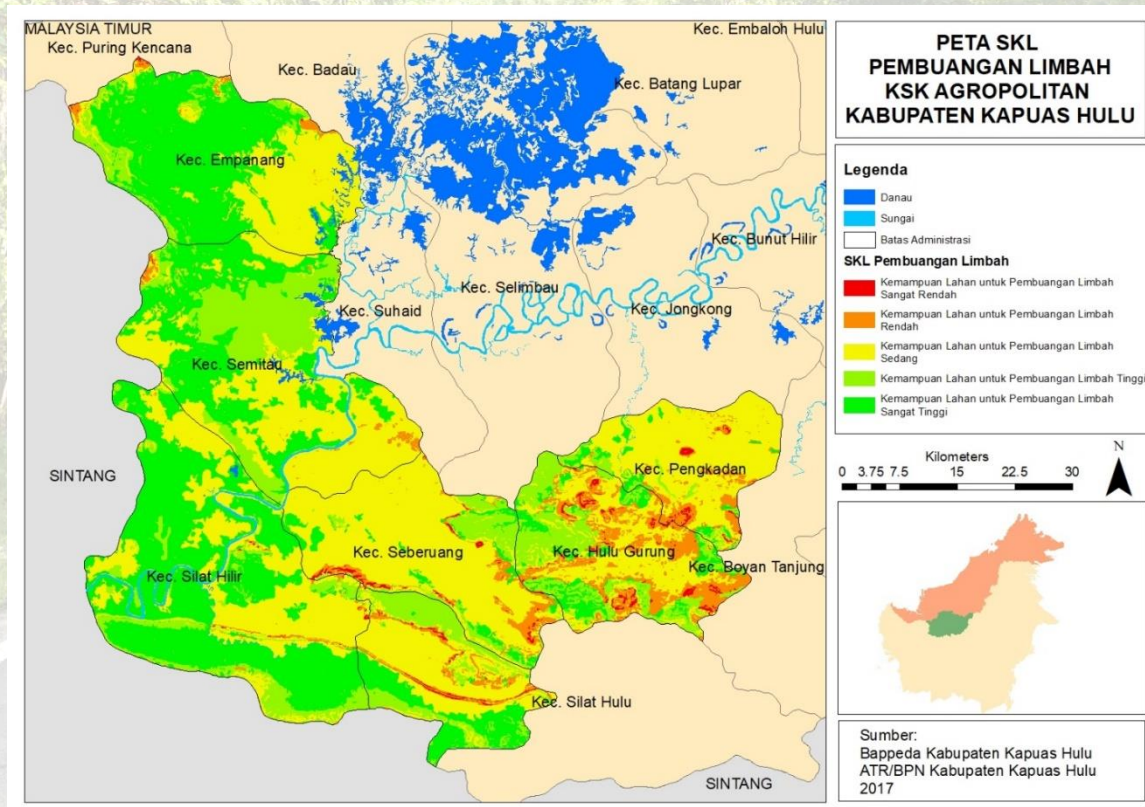
Klasifikasi SKL untuk pembuangan limbah ditentukan dari nilai akhir penilaian dan pembobotan data-data terkait. Berikut adalah tabel klasifikasi dan peta SKL untuk pembuangan limbah.

Tabel IV.13 Klasifikasi SKL untuk Pembuangan Limbah

Nilai Akhir	Klasifikasi
18-29	SKL untuk Pembuangan Limbah Sangat Tinggi
30-36	SKL untuk Pembuangan Limbah Tinggi
37-41	SKL untuk Pembuangan Limbah Sedang
42-47	SKL untuk Pembuangan Limbah Rendah
48-57	SKL untuk Pembuangan Limbah Sangat Rendah

Sumber: Analisis, 2017

Gambar IV.8 Peta SKL Pembuangan Limbah KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber: Analisis, 2017

Pada Gambar IV.8 terlihat bahwa setiap kecamatan memiliki daerah yang cocok sebagai lokasi pembuangan limbah. Saat ini, belum terdapat tempat pembuangan atau pengelolaan limbah padat dan cair domestik di kawasan agropolitan ini. Masyarakat membuang langsung limbah padatnya ke sungai atau dibakar, begitu juga dengan limbah cair. Hampir tidak ada septictank untuk mengolah limbah cair domestik. Bahkan, masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan MCK. Kondisi ini pastinya akan berdampak pada kualitas lingkungan apabila terus dibiarkan.

4.1.1.8 SKL Rawan bencana

Bencana yang rawan dihadapi oleh Kabupaten Kapuas Hulu adalah banjir karena kabupaten ini dilalui oleh sungai Kapuas dan anak-anak sungainya. Ditambah lagi dengan kondisi sungai yang mudah kering dan mudah meluap apabila hujan deras. Pembuatan SKL rawan bencana ini juga mempertimbangkan kondisi guna lahan, ketinggian, dan kemiringan lerengnya.

Tabel IV.14 Penilaian dan Pembobotan SKL Rawan Bencana

Potensi Banjir	Nilai	Bobot	Penggunaan Lahan	Nilai	Bobot
Potensi Tinggi	4	4	Hutan Lahan Kering Primer	4	
Tidak Berpotensi	1		Hutan Lahan Kering Sekunder	4	
Kemiringan Lahan	Nilai	Bobot	Hutan Rawa Sekunder	4	
0%-8%	5		Perkebunan	3	
8% - 15%	4		Permukiman	1	
8% - 25%	3		Pertambangan	1	
25%-40%	2	1	Pertanian Lahan Kering	3	
> 40%	1		Pertanian Lahan Kering Bercampur dengan Semak	3	2
Curah Hujan	Nilai	Bobot	Rawa	1	
3500-4000 mm	2		Semak/Belukar	2	
4000-4500 mm	1	1	Semak/Belukar Rawa	1	
			Tanah Terbuka	1	
			Tubuh Air	4	

Sumber: Analisis, 2017

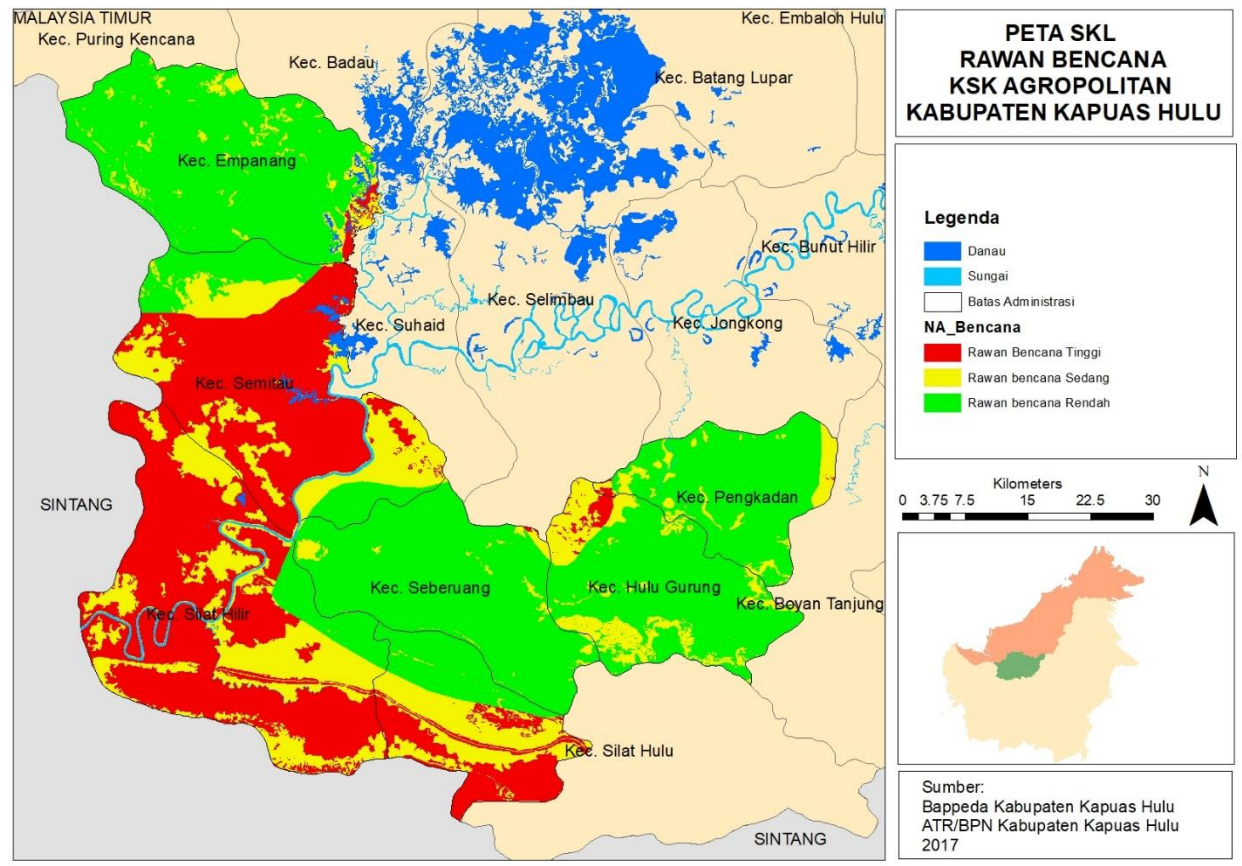
Berdasarkan penilaian dan pembobotan data tersebut, dilakukan *overlay* dan menghasilkan klasifikasi sebagai berikut

Tabel IV.15 Klasifikasi SKL Rawan Bencana

Nilai Akhir	Klasifikasi
8-16	SKL Rawan Bencana Tinggi
17-21	SKL Rawan Bencana Sedang
22-27	SKL Rawan Bencana Rendah

Sumber: Analisis, 2017

Gambar IV.9 Peta SKL Rawan Bencana KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber: Analisis, 2017

Kecamatan yang dilalui oleh sungai induk Kapuas, yaitu Kecamatan Semitau dan Silat Hilir, memiliki tingkat rawan bencana yang tinggi. Kecamatan sisanya yang hanya dilalui oleh sungai-sungai kecil, tingkat kerawanannya rendah. Namun, berdasarkan wawancara, hampir seluruh kecamatan bisa terkena banjir apabila hujan besar walaupun tidak tinggi dan hanya sebentar. Biasanya air meluap dari sungai dan membanjiri ladang masyarakat sehingga menimbulkan kerusakan ladang. Belum terdapat upaya mitigasi bencana yang dilakukan untuk mengatasi kerawanan banjir ini. Masyarakat cenderung beradaptasi dengan bencana banjir yang terjadi dengan meninggikan bangunan rumah (rumah panggung). Di beberapa bagian sungai bahkan tidak terdapat sempadan yang berfungsi untuk menjaga masyarakat dari meluapnya air sungai karena terdapat perumahan masyarakat tepat di tepi sungai.

4.1.1.9 Analisis Kemampuan Lahan

Berdasarkan analisis SKL yang telah dilakukan, dapat diketahui bagaimana kemampuan lahan secara keseluruhan untuk dikembangkan sebagai pusat kegiatan. Daerah dikatakan mampu untuk menampung kegiatan perkotaan apabila bentang alamnya cenderung datar, memiliki lereng yang stabil dan ketersediaan air yang cukup, rendah rawan bencana, serta rendah potensi genangan. Untuk memnentukan daerah ini, dilakukan pembobotan pada masing-masing SKL seperti yang dapat dilihat pada tabel IV.16.

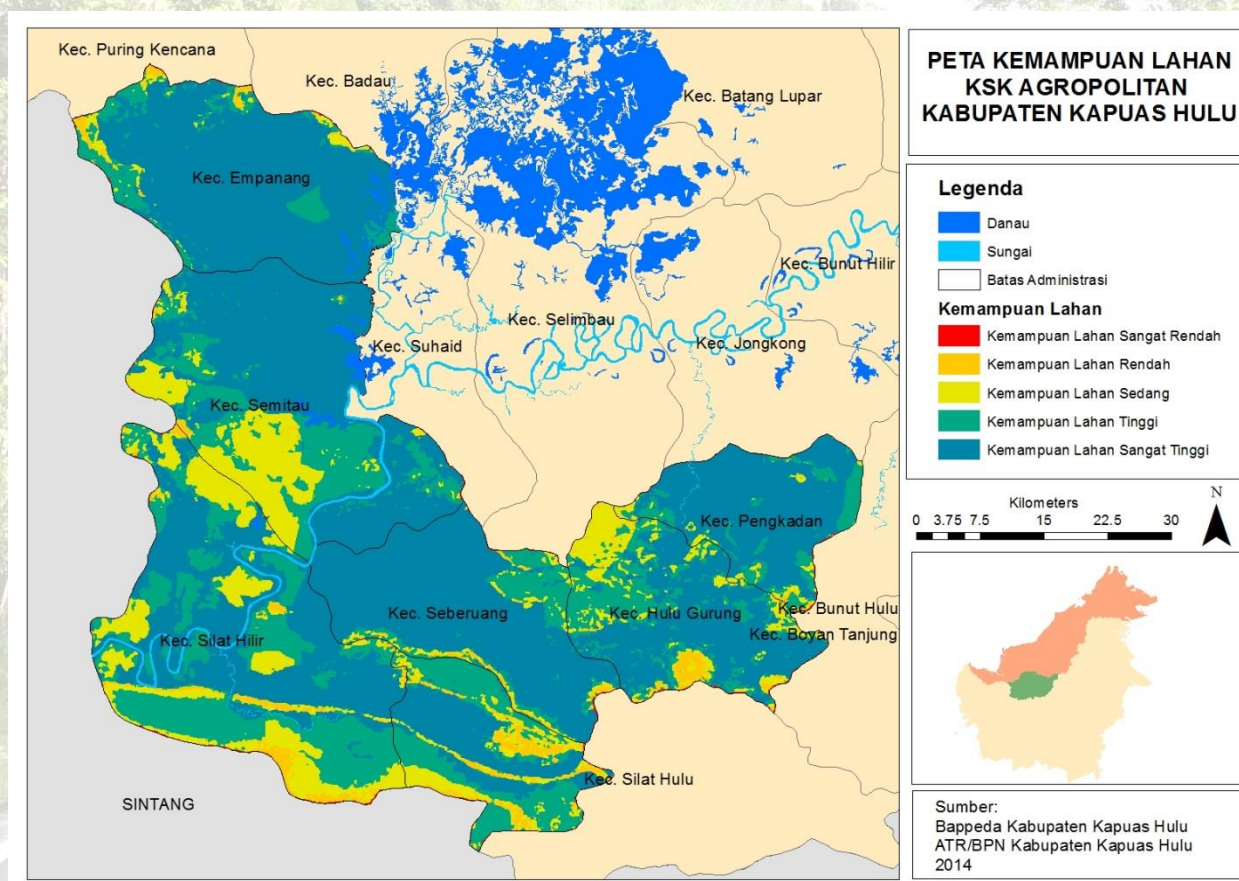
Tabel IV.16 Pembobotan Analisis Kemampuan Lahan

SKL	BOBOT
Morfologi	5
Kemudahan Dikerjakan	1
Kestabilan Lereng	5
Kestabilan Pondasi	3
Ketersediaan Air	5
Erosi	3
Drainase	5
Pembuangan Limbah	0
Bencana Alam	5

Sumber: Analisis, 2017

Pembobotan ini didasarkan pada tujuan pengembangan wilayah dan Permen PU 20/2007. Untuk mengembangkan agropolitan tidak hanya diperlukan lahan-lahan untuk sector pertanian, namun juga pusat dan subpusat kegiatan yang digunakan sebagai tempat pemasaran, pengolahan, dan penunjang lainnya. SKL pembuangan limbah diberi bobot nol karena SKL tersebut hanya menentukan lokasi mana yang tepat untuk menjadi tempat pembuangan atau pengelolaan limbah dan dianggap tidak relevan untuk menentukan kemampuan pengembangan lahan untuk agropolitan.

Gambar IV.10 Peta Kemampuan Lahan KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber: Analisis, 2017

Hasil overlay SKL menunjukkan bahwa Kecamatan Empanang, Pengkadan, dan Seberuang memiliki proporsi kemampuan lahan sangat tinggi yang paling besar dibandingkan lima kecamatan lainnya. Kecamatan Semitau, Silat Hilir, Hulu Gurung, dan Silat Hulu memiliki

kemampuan lahan yang lebih rendah, namun masih tergolong kemampuan lahan sedang dan tinggi. Namun secara umum, seluruh kecamatan memiliki kemampuan lahan yang cukup baik. Berdasarkan SK Kehutanan 733, ketujuh kecamatan ini memiliki APL (Area Penggunaan Lain) yang paling luas dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Kapuas Hulu sehingga dapat dikembangkan optimal untuk agropolitan.

Walaupun memiliki status lahan APL dan kemampuan lahan yang tinggi, ditemukan bahwa Kecamatan Semitau dan Epanang memiliki kawasan hutan dengan fungsi konservasi air dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Statusnya sebagai APL memungkinkan terjadinya konversi di daerah tersebut dan akan berpengaruh terhadap ekosistem sekitarnya, sebagai contoh adalah berkurangnya ketersediaan air untuk masyarakat. Terlebih lagi, terdapat perusahaan sawit yang telah memiliki izin untuk memanfaatkan kawasan hutan tersebut, namun belum beroperasi saat ini.

4.1.2 Analisis Kesesuaian Lahan

4.1.2.1 Arahan Rasio Tutupan Lahan dan Arahan Ketinggian Bangunan

Analisis rasio tutupan lahan dan ketinggian bangunan merupakan analisis berbeda yang selanjutnya akan menjadi rekomendasi untuk batasan pengembangan kawasan budidaya dengan daerah terbangun. Arahan rasio tutupan lahan bertujuan untuk memberikan gambaran perbandingan daerah yang dapat tertutup bangunan bersifat kedap air dengan luas lahan keseluruhan. Menurut pedoman analisis rencana tata ruang, Permen PU 20/2007, arahan rasio tutupan lahan ini adalah merupakan perbandingan bruto, dengan pengertian perbandingan antara luas lahan yang tertutup oleh bangunan bersifat kedap air dengan luas lahan keseluruhan pada tingkat rasio tutupan lahan yang ditekan, terutama dalam satu sistem wilayah sungai atau daerah aliran sungai (DAS). Namun, analisis yang dilakukan ini tidak berdasarkan DAS, melainkan deliniasi wilayah kawasan agropolitan yang telah ditentukan dalam RTRW Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk menentukan arahan tutupan, diperlukan hasil analisis yang sebelumnya telah dilakukan yaitu SKL Drainase, Kestabilan Lereng, Erosi, Rawan Bencana, serta analisis kemampuan lahan. Berikut adalah tabel penilaian dan pembobotan untuk analisis rasio tutupan lahan.

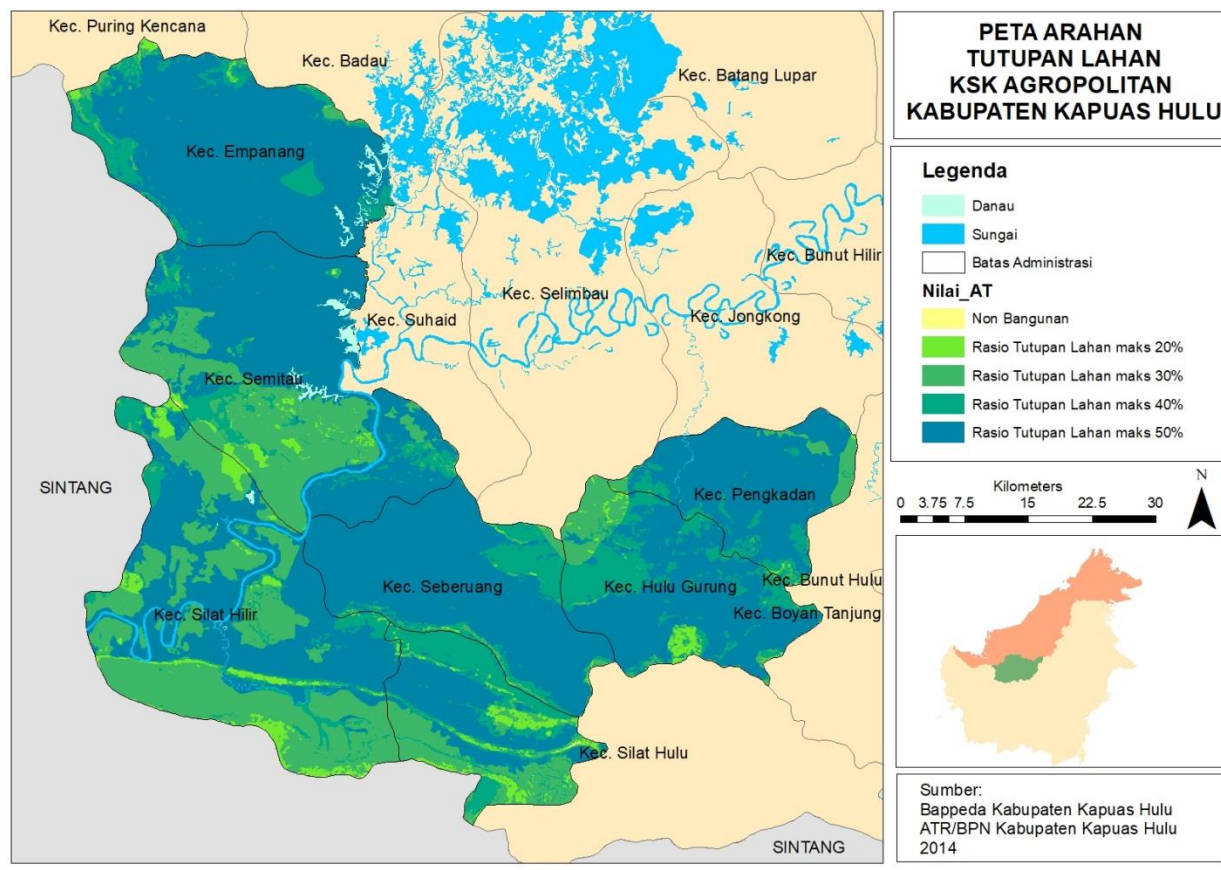
Tabel IV.17 Pembobotan Analisis Rasio Tutupan Lahan

Kriteria	Bobot
Kemampuan Lahan	4
SKL Drainase	3
SKL Kestabilan Lereng	2
SKL Erosi	2
SKL Bencana	2

Sumber: Analisis, 2017

Kemampuan lahan memiliki bobot yang paling tinggi karena dianggap sebagai factor yang paling berpengaruh dalam menentukan arahan tutupan lahan. Dengan kemampuan lahan yang tinggi, lahan dianggap bisa dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan hingga 50%. Satuan kemampuan lahan drainase, kestabilan lereng, erosi, dan rawan bencana juga menentukan seberapa besar arahan tutupan lahan dengan bobot yang lebih rendah.

Gambar IV.11 Peta Arahkan Tutupan Lahan KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber: Analisis, 2017

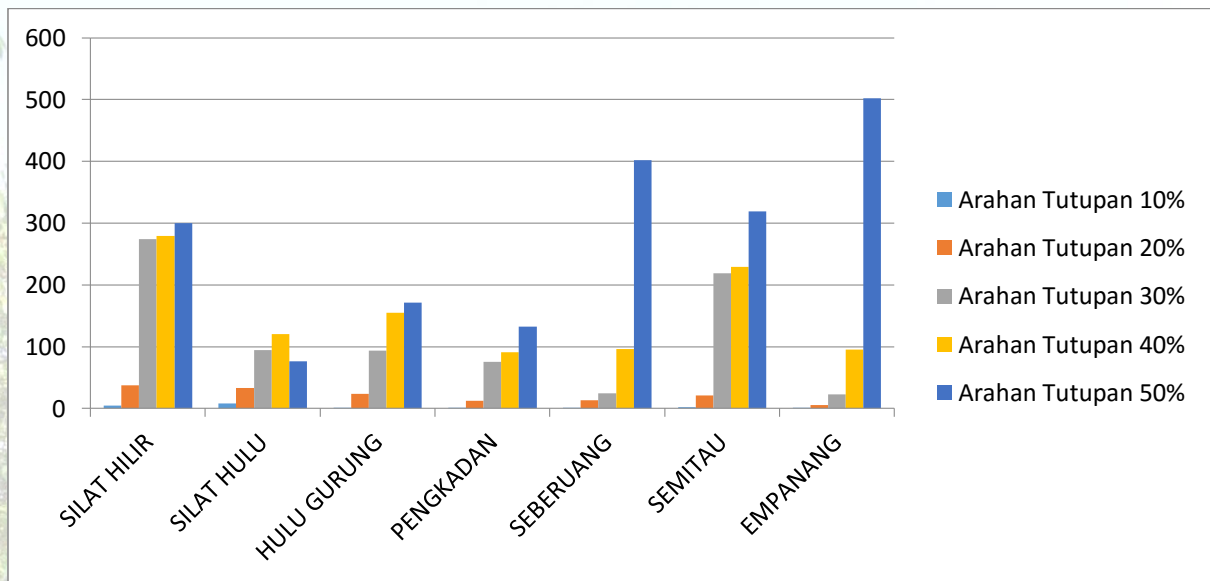
Dalam gambar IV.11 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan, mayoritas daerah di kawasan agropolitan ini dapat dikembangkan hingga 40% - 50%. Kecamatan Empanang dan Seberuang memiliki arahan tutupan lahan maksimal 50% yang paling tinggi, sedangkan Semitau, Silat Hulu, dan Silat Hilir memiliki tutupan lahanimbang antara 40% dan 50%. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel IV.18 dan gambar IV.12.

Tabel IV.18 Luas Arahan Tutupan Per Kecamatan

	Arahan Tutupan 10% (km ²)	Arahan Tutupan 20% (km ²)	Arahan Tutupan 30% (km ²)	Arahan Tutupan 40% (km ²)	Arahan Tutupan 50% (km ²)	Total (km ²)
SILAT HILIR	4,351348	37,42306	274,447	278,9768	299,8218	895
SILAT HULU	8,000008	32,95394	94,87594	120,2008	76,5693	333
HULU GURUNG	1,061719	23,47093	94,00567	155,3069	171,3948	445
PENKADAN	1,34168	12,60711	75,36841	91,03608	132,2467	313
SEBERUANG	0,113896	13,04109	24,99247	95,86077	401,7918	536
SEMITAU	2,320237	20,85255	218,7834	229,5424	318,8214	790
EMPANANG	0,144111	5,958486	22,8756	95,65175	501,6501	626

Sumber: Analisis, 2017

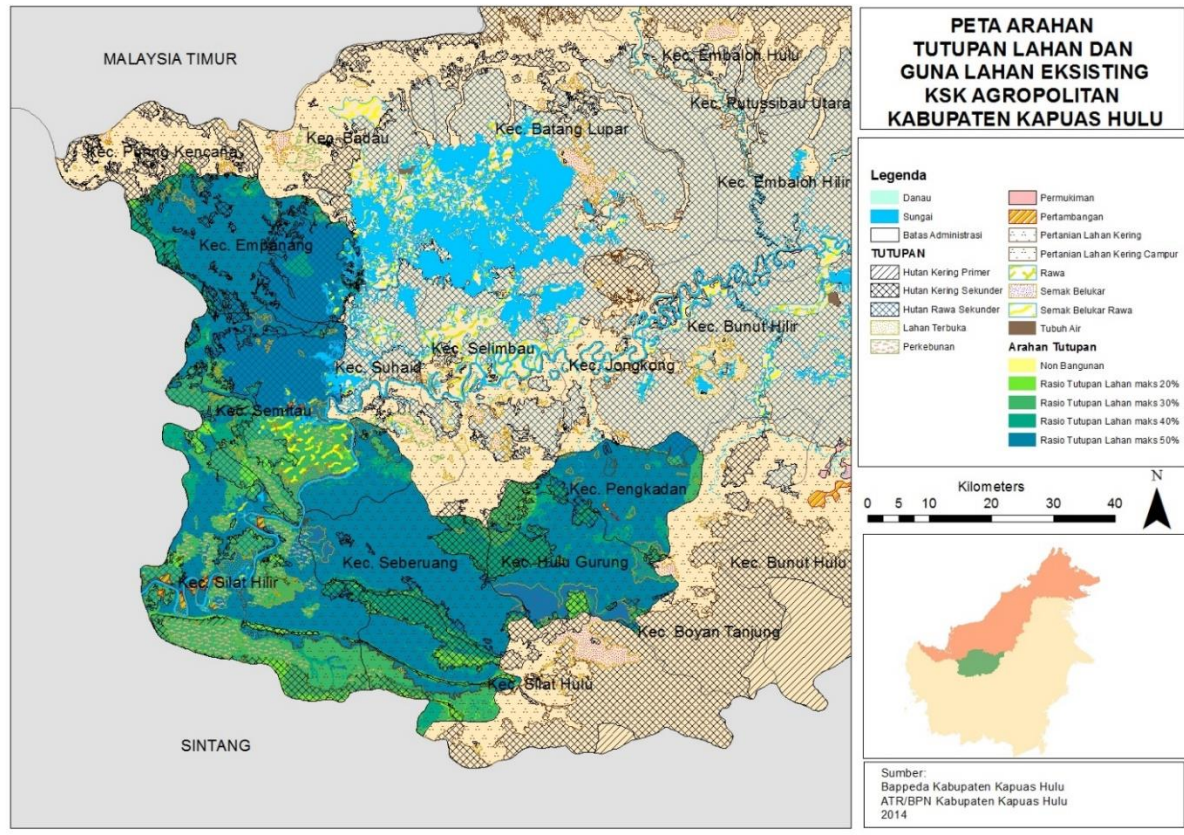
Gambar IV.12 Grafik Luas Arahan Tutupan Lahan Per Kecamatan (KM²)



Sumber: Analisis, 2017

Dibandingkan dengan peta guna lahan yang tersedia, Kecamatan Empanang dan Semitau yang memiliki arahan tutupan lahan tinggi masih berupa kawasan hutan. Pada gambar IV.13 terlihat pula bahwa sebagian kecil Danau Sentarum yang masuk dalam Kecamatan Empanang dan Semitau dikelilingi oleh kawasan hutan. Hal ini perlu dipertimbangkan dalam penentuan kawasan mana saja yang dikembangkan, karena apabila kawasan hutan terganggu akan mempengaruhi ekosistem lainnya. Walaupun memiliki kemampuan lahan tinggi dan memiliki status APL, kawasan hutan pada setiap kecamatan, maupun desa perlu dijaga karena memiliki fungsi penyimpanan air untuk melayani konsumsi penduduk sekitar. Saat ini, beberapa kawasan hutan di kecamatan Empanang dan Semitau yang termasuk APL sudah diizinkan untuk perkebunan sawit perusahaan, sehingga dapat diprediksikan bahwa jumlah hutan akan berkurang di masa yang akan datang.

Gambar IV.13 Peta Overlay Arahan Tutupan Lahan dengan Guna Lahan Tahun 2009 KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber: Analisis, 2017

Setelah mengetahui daerah mana saja yang dapat didirikan bangunan, maka ditentukan seberapa berat dan tinggi bangunan yang dapat ditampung oleh kawasan tersebut. Arahan ketinggian bangunan akan menentukan daerah mana yang dapat dikembangkan bangunan berat atau tinggi. Arahan ini menggunakan data kemampuan lahan, SKL kestabilan pondasi, dan rawan bencana, serta data mengenai guna lahan.

Tabel IV.19 Pembobotan Analisis Ketinggian Bangunan

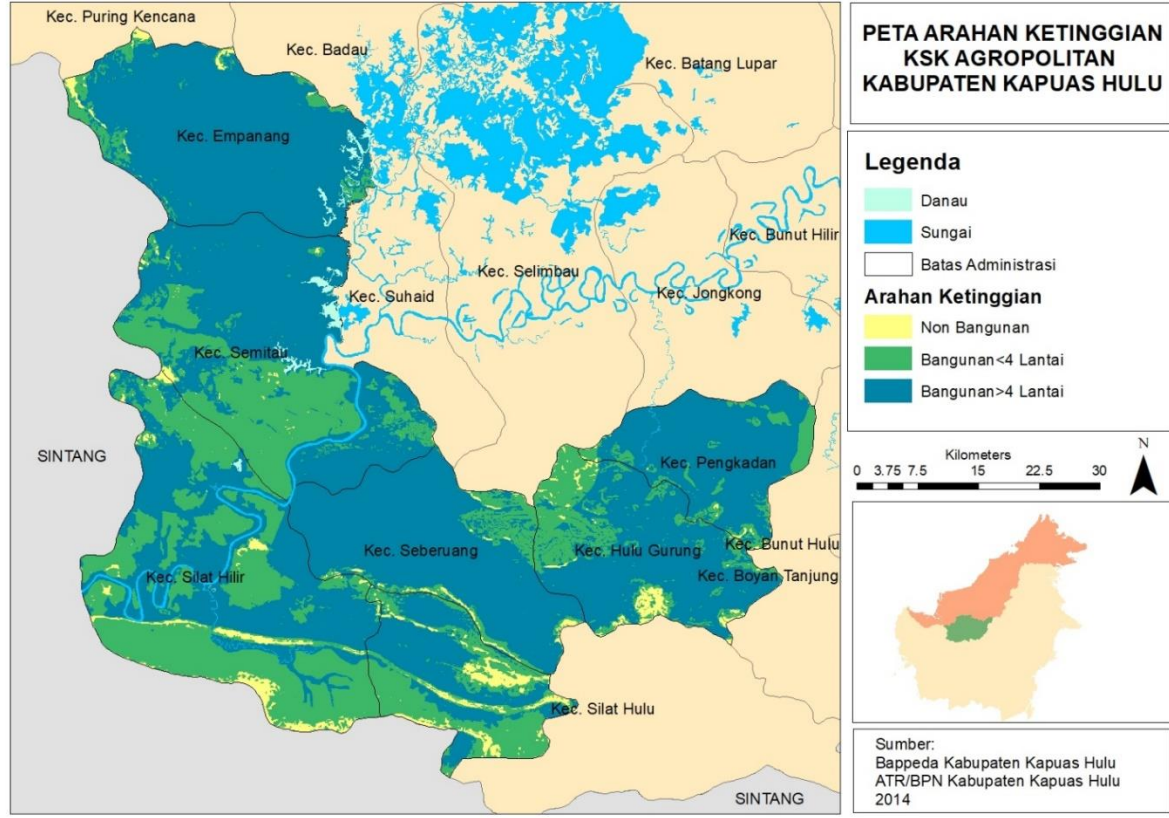
		Nilai	Bobot
Kemampuan Lahan	Sangat Rendah	1	4
	Rendah	2	
	Sedang	3	
	Tinggi	3	
	Sangat Tinggi	4	
SKL Kestabilan Pondasi			3
Guna Lahan	Pertambangan	0	2
	Non Pertambangan	1	
SKL Bencana			3

Sumber: Analisis, 2017

Untuk menentukan arahan ketinggian bangunan, kemampuan lahan juga memiliki pengaruh yang besar. selain itu, SKL rawan bencana dan kestabilanpondasi juga dipertimbangkan dalam menentukan ketinggian bangunan. Penggunaan lahan juga dilibatkan dalam analisis ini karena keberadaan bahan galian golongan C atau daerah bekas penambangan akan memperlemah kekuatan bangunan. Analisis ini akan menghasilkan tiga

klasifikasi, yaitu bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 4, kurang dari 4, dan non bangunan, seperti yang diperlihatkan pada gambar IV.14.

Gambar IV.14 Peta Arahan Ketinggian KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber: Analisis, 2017

Peta arahan ketinggian ini merupakan lanjutan dari peta arahan tutupan lahan. Sama seperti arahan tutupan lahan, Kecamatan Empanang dan Seberuang memiliki nilai yang tinggi sehingga bangunan yang akan dikembangkan bisa lebih dari 4 lantai. Terdapat arahan non bangunan di beberapa titik di Kecamatan Silat Hulu, Hulu Gurung dan Silat Hilir. Pengembangan agropolitan tidak begitu memerlukan adanya bangunan-bangunan yang tinggi seperti hotel, apartemen, gedung perkantoran namun perlu dipertimbangkan dalam penentuan pusat dan subpusat agropolitan.

4.1.2.2 Perkiraan Daya tampung Lahan

Pengembangan suatu wilayah perlu memperhitungkan peningkatan kebutuhan air bersih, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang akan terjadi. Analisis daya tampung ini membenturkan arahan rasio tutupan lahan serta lahan yang dibutuhkan dalam satu keluarga. Diasumsikan bahwa lahan yang digunakan untuk permukiman hanya 50% dari luas lahan yang diarahkan tertutup, 30% dialokasikan untuk fasilitas, dan 20% untuk utilitas lainnya. Berikut adalah hasil perhitungan daya tampung pada tahun 2030.

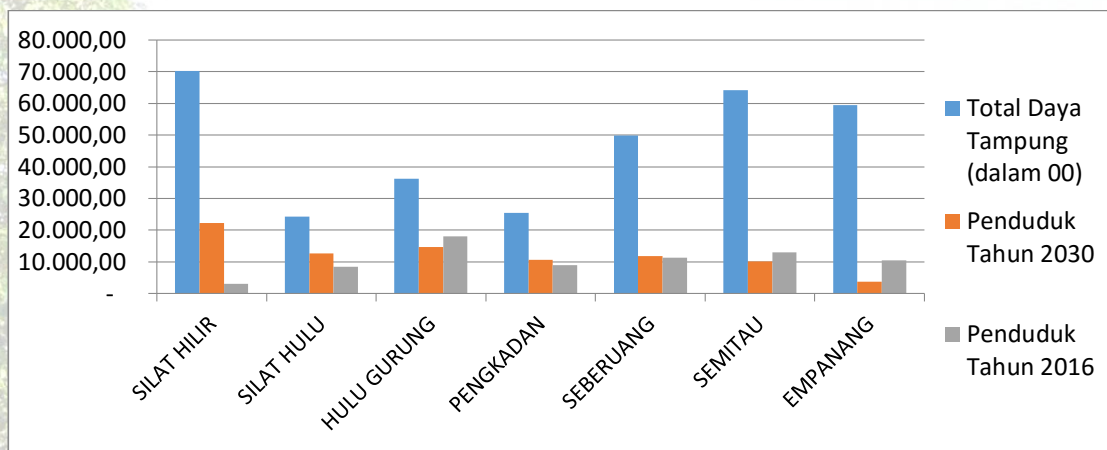
Tabel IV.20 Perkiraan Daya Tampung Berdasarkan Kemampuan Lahan Tahun 2030

Daya Tampung (n)	10%	20%	30%	40%	50%	Daya Tampung (jiwa)
SILAT HILIR	0	149692.2253	1646681.977	2231814.46	2998217.915	70,26407
SILAT HULU	0	131815.7513	569255.6351	961606.4848	765693.0416	24,28371

Daya Tampung (n)	10%	20%	30%	40%	50%	Daya Tampung (jiwa)
HULU GURUNG	0	93883.70676	564034.0307	1242455.34	1713947.65	36,14321
PENKADAN	0	50428.43711	452210.4842	728288.6541	1322467.147	5,53395
SEBERUANG	0	52164.35268	149954.8068	766886.1943	4017917.736	49,86923
SEMITAU	0	83410.21721	1312700.163	1836339.423	3188214.203	64,20664
EMPANANG	0	23833.9433	137253.5922	765214.0298	5016500.505	59,42802

Sumber: Analisis, 2017

Gambar IV.15 Grafik Daya Tampung dan Jumlah Penduduk Tahun 2030 Per Kecamatan

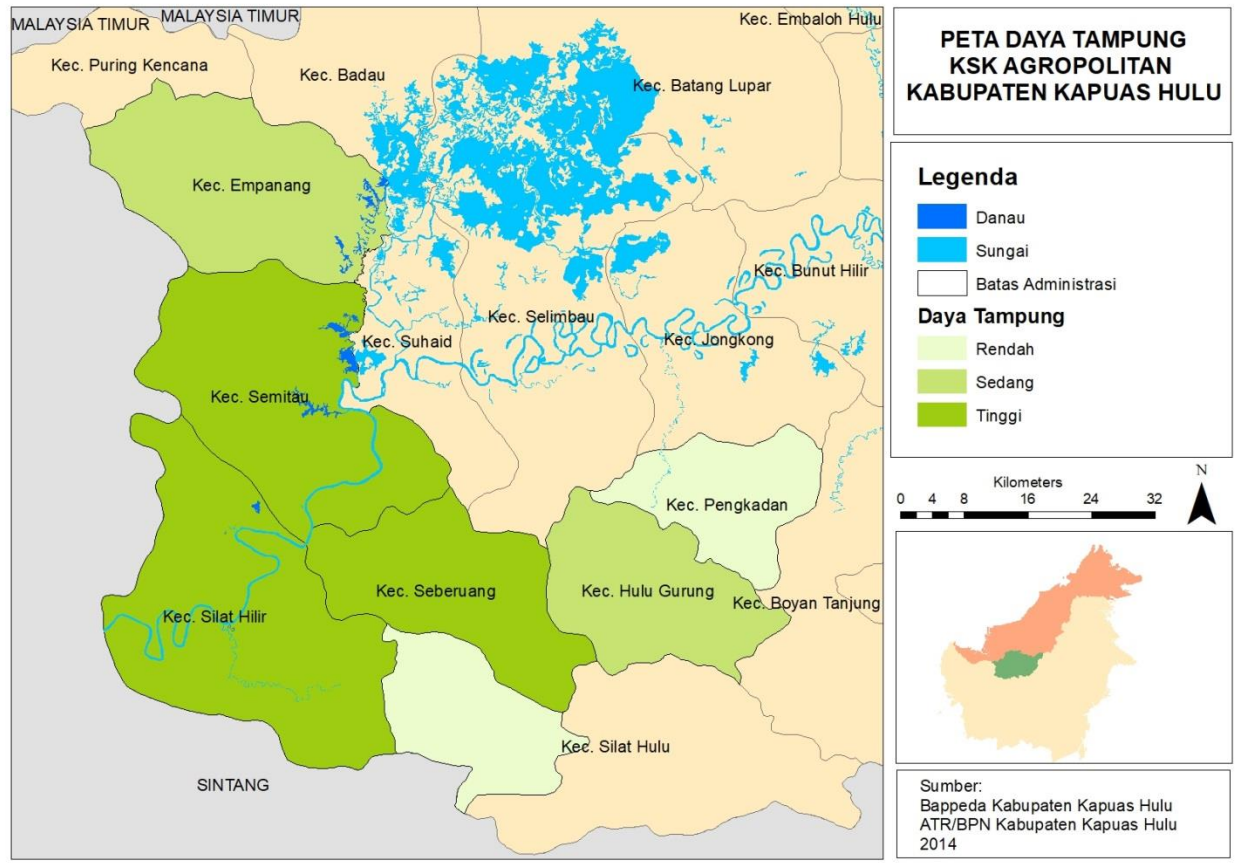


Sumber: Analisis, 2017

Berdasarkan proyeksi penduduk, jumlah penduduk di Kecamatan Empanang, Semitau, dan Hulu Gurung akan mengalami penurunan, sedangkan di kecamatan sisanya akan terus meningkat. Walaupun ada peningkatan penduduk yang signifikan, seperti di Kecamatan Silat Hilir, daya tampung masih jauh melampaui proyeksi jumlah penduduk di tahun 2030. Kecamatan Silat Hilir memiliki daya tampung paling tinggi dikarenakan luas wilayahnya juga yang terbesar. Silat Hilir memiliki beberapa desa yang merupakan desa transmigran. Apabila akan diadakan program transmigrasi lagi atau kebijakan pemerintah lainnya yang menyebabkan jumlah penduduk bertambah, daya tampung masih mencukupi.

Diantara tujuh kecamatan yang tergabung dalam KSK Agropolitan Kapuas Hulu, Kecamatan Pengkadan dan Silat Hulu memiliki daya tampung paling rendah, berdasarkan Peta Daya Tampung. Hal ini karena luas Kecamatan Pengkadan paling kecil dan tidak seluruh desa di Silat Hulu tergabung dalam KSK Agropolitan.

Gambar IV.16 Peta Daya Tampung KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber: Analisis, 2017

4.1.2.3 Analisis Lahan Pertanian

Penggunaan lahan budidaya di Kapuas Hulu didominasi oleh pertanian lahan kering dan hal ini sesuai dengan arahan pengembangan KSK Agropolitan yang mengandalkan pertanian sebagai penggerak ekonomi. Analisis lahan pertanian digunakan untuk mengetahui apakah komoditas tertentu dapat dikembangkan dalam area KSK Agropolitan Kapuas Hulu. Komoditas yang saat ini dikembangkan di area KSK Agropolitan terdiri dari tanaman pangan, buah-buahan, perkebunan, dan sayuran. Terdapat 15 komoditas yang dilihat kesesuaiannya, yaitu padi sawah, padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, cabe, sawit, kelapa, karet, coklat, kopi, durian, dan pisang.

Kesesuaian komoditas dengan lahan dilihat dari berbagai kriteria yang dilihat dari kemampuan lahan, arahan komoditas berdasarkan RTRW, dan beberapa persyaratan sesuai dengan Permentan no 79 tahun 2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan. Namun, tidak semua persyaratan dapat dinilai karena adanya keterbatasan data di Kapuas Hulu sehingga yang digunakan untuk analisis ini adalah temperatur, gambut, lereng, genangan/banjir, curah hujan, dan kelembaban. Temperatur, curah hujan, dan kelembaban rata-rata di Kapuas Hulu tergolong cukup tinggi. Temperatur rata-rata mencapai 28°C dan kelembaban 87.75%. Dalam area KSK terdapat 3 curah hujan berbeda, yaitu 3250mm di sekitar Kecamatan Semitau dan Silat Hilir, 3750mm di sekitar Kecamatan Empanang, Silat Hulu, Seberuang, dan Hulu Gurung, serta 4250mm di

Kecamatan Pengkadan dan utara Kecamatan Empanang. Sesuai dengan analisis SKL rawan bencana, potensi genangan atau banjir di area KSK terdapat di Kecamatan Semitau dan Silat Hilir. Kondisi kelerengan di area KSK mayoritas dibawah 8% yang berarti memiliki kondisi relief yang datar dan berombak atau agak melandai.

Arahan komoditas pertanian dalam RTRW Kabupaten Kapuas Hulu berbeda-beda setiap kecamatan, namun tanaman padi sawah, padi ladang, dan karet diarahkan di ketujuh kecamatan yang tergabung dalam area KSK. Berikut adalah arahan komoditas yang dikembangkan di tujuh kecamatan KSK Agropolitan berdasarkan RTRW.

Tabel IV.21 Arahan Komoditas Berdasarkan RTRW Kabupaten Kapuas Hulu

Empanang	Semitau	Silat Hilir	Seberuang	Pengkadan	Hulu Gurung	Silat Hulu
Padi Sawah	Padi Sawah	Padi Sawah	Padi Sawah	Padi Sawah	Padi Sawah	Padi Sawah
Padi Ladang	Kedelai dan Kacang Tanah	Kacang	jagung	Kacang	Buah	Padi Ladang
Jagung	Jagung	Jagung	Buah	Buah	Padi Ladang	Palawija dan Sayuran
Ketela Pohon	Buah	Ketela Pohon	Padi Ladang	Sayur	Palawija dan Sayuran	Sawit
Buah	Sawit	Buah	Palawija dan Sayuran	Padi Ladang	Karet	Karet
Palawija dan Sayuran	Padi Ladang	adi ladang	Sawit	Palawija dan Sayuran		
Sawit	Palawija dan Sayuran	Palawija dan Sayuran	Karet	Sawit		
Karet	Karet	Sawit				
		Karet				

Sumber: RTRW Kabupaten Kapuas Hulu 2015

Arahan berdasarkan RTRW tersebut selanjutnya menjadi salah satu kriteria kesesuaian lahan pertanian. Tabel IV.21 menunjukkan kesesuaian 15 komoditas di setiap kecamatan dengan arahan RTRW dan beberapa persyaratan teknis sesuai dengan permentan 79/2013. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa curah hujan Kapuas Hulu yang tinggi tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh komoditas. Dari sisi kelerengannya, area KSK sudah cukup memenuhi persyaratan komoditas yang mengharuskan tingkat kelerengan <3% dan <8%.

FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STARTEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU

Tabel IV.22 Pemenuhan Persyaratan Kesesuaian Lahan per Komoditas dan per Kecamatan

	Padi Sawah	Padi Gogo	Jagung	Kacang	Kedelai	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Karet	Sawit	Cokelat	Kopi	Durian	Cabe	Kelapa	Pisang
Kec Empanang															
Arahan RTRW	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
temperatur	24-28	24-29	20-26	25-27	23-25	22-28	22-25	26-30	25-28	25-28	22-25	25-28	20-25	25-28	25-27
gambut	<40 cm							<60 cm	<60 cm	-	<60 cm	<60	<60 cm	<60 cm	<60 cm
lereng	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<8%	<8%	<8%	<8%	<8%	<8%	<8%	<8%
genangan/banjir	25cm , kurang sehari							F0	F0	F0	F0	F0	F0	F0	F0
curah hujan			900-1200	400-1100	350-1100	1000-2000	800-1000	2500-3000	1700-2500	1500-2500	2000-3000	2000-3000	350-600	2000-3000	1500-2500
kelembaban	33-90	33-91	>42							40-65	45-80	>42			
Kec Semitau															
Arahan RTRW	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
temperatur	24-28	24-29	20-26	25-27	23-25	22-28	22-25	26-30	25-28	25-28	22-25	25-28	20-25	25-28	25-27
gambut	<40 cm							<60 cm	<60 cm	-	<60 cm	<60	<60 cm	<60 cm	<60 cm
lereng	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<8%	<8%	<8%	<8%	<8%	<8%	<8%	<8%
genangan/banjir	25cm , kurang sehari							F0	F0	F0	F0	F0	F0	F0	F0
curah hujan			900-1200	400-1100	350-1100	1000-2000	800-1000	2500-3000	1700-2500	1500-2500	2000-3000	2000-3000	350-600	2000-3000	1500-2500
kelembaban	33-90	33-91	>42							40-65	45-80	>42			
Kec Silat Hilir															
Arahan RTRW	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
temperatur	24-28	24-29	20-26	25-27	23-25	22-28	22-25	26-30	25-28	25-28	22-25	25-28	20-25	25-28	25-27
gambut	<40 cm							<60 cm	<60 cm	-	<60 cm	<60	<60 cm	<60 cm	<60 cm
lereng	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<8%	<8%	<8%	<8%	<8%	<8%	<8%	<8%
genangan/banjir	25cm , kurang sehari							F0	F0	F0	F0	F0	F0	F0	F0

FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STARTEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU

		Padi Sawah	Padi Gogo	Jagung	Kacang	Kedelai	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Karet	Sawit	Cokelat	Kopi	Durian	Cabe	Kelapa	Pisang
r a t a n	curah hujan			900-1200	400-1100	350-1100	1000-2000	800-1000	2500-3000	1700-2500	1500-2500	2000-3000	2000-3000	350-600	2000-3000	1500-2500
	kelembaban	33-90	33-91	>42							40-65	45-80	>42			
Kec Seberuang																
Arahan RTRW		Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
P e r s y a r a t a n	temperatur	24-28	24-29	20-26	25-27	23-25	22-28	22-25	26-30	25-28	25-28	22-25	25-28	20-25	25-28	25-27
	gambut	<40 cm							<60 cm	<60 cm	-	<60 cm	<60	<60 cm	<60 cm	<60 cm
	lereng	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<8%	<8%	<8%	<8%	<8%	<8%	<8%	<8%
	genangan/banjir	25cm , kurang sehari							F0	F0	F0	F0	F0	F0	F0	F0
r a t a n	curah hujan			900-1200	400-1100	350-1100	1000-2000	800-1000	2500-3000	1700-2500	1500-2500	2000-3000	2000-3000	350-600	2000-3000	1500-2500
	kelembaban	33-90	33-91	>42							40-65	45-80	>42			
Kec Pengkadan																
Arahan RTRW		Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
P e r s y a r a t a n	temperatur	24-28	24-29	20-26	25-27	23-25	22-28	22-25	26-30	25-28	25-28	22-25	25-28	20-25	25-28	25-27
	gambut	<40 cm							<60 cm	<60 cm	-	<60 cm	<60	<60 cm	<60 cm	<60 cm
	lereng	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<8%	<8%	<8%	<8%	<8%	<8%	<8%	<8%
	genangan/banjir	25cm , kurang sehari							F0	F0	F0	F0	F0	F0	F0	F0
r a t a n	curah hujan			900-1200	400-1100	350-1100	1000-2000	800-1000	2500-3000	1700-2500	1500-2500	2000-3000	2000-3000	350-600	2000-3000	1500-2500
	kelembaban	33-90	33-91	>42							40-65	45-80	>42			
Kec Hulu Gurung																
Arahan RTRW		Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
P e r	temperatur	24-28	24-29	20-26	25-27	23-25	22-28	22-25	26-30	25-28	25-28	22-25	25-28	20-25	25-28	25-27
	gambut	<40 cm							<60 cm	<60 cm	-	<60 cm	<60	<60 cm	<60 cm	<60 cm

FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU

	Padi Sawah	Padi Gogo	Jagung	Kacang	Kedelai	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Karet	Sawit	Cokelat	Kopi	Durian	Cabe	Kelapa	Pisang	
s lereng	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<8%	<8%	<8%	<8%	<8%	<8%	<8%	<8%	
y a genangan/banjir	25cm , kurang sehari							F0	F0	F0	F0	F0	F0	F0	F0	F0
r a curah hujan			900-1200	400-1100	350-1100	1000-2000	800-1000	2500-3000	1700-2500	1500-2500	2000-3000	2000-3000	350-600	2000-3000	1500-2500	
t a kelembaban	33-90	33-91	>42							40-65	45-80	>42				
n																
Kec Silat Hulu																
Arahan	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	
P e r s y a r a n t a n	24-28	24-29	20-26	25-27	23-25	22-28	22-25	26-30	25-28	25-28	22-25	25-28	20-25	25-28	25-27	
r gambut	<40 cm							<60 cm	<60 cm	-	<60 cm	<60	<60 cm	<60 cm	<60 cm	
s lereng	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<8%	<8%	<8%	<8%	<8%	<8%	<8%	<8%	
y a genangan/banjir	25cm , kurang sehari							F0	F0	F0	F0	F0	F0	F0	F0	
r a curah hujan			900-1200	400-1100	350-1100	1000-2000	800-1000	2500-3000	1700-2500	1500-2500	2000-3000	2000-3000	350-600	2000-3000	1500-2500	
t a kelembaban	33-90	33-91	>42							40-65	45-80	>42				
n																
Keterangan	Tidak Sesuai															
	Sesuai															
	Terdapat beberapa daerah yang tidak sesuai															

Sumber: Analisis, 2017

Analisis kemampuan lahan yang telah dilakukan pada bab 4.1.1.9 juga dijadikan bahan pertimbangan yang penting dalam penentuan kesesuaian lahan pertanian. Daerah yang memiliki kemampuan lahan tinggi mengindikasikan bahwa lahan memiliki sedikit hambatan yang membatasi penggunaannya dan cocok untuk berbagai penggunaan, termasuk pertanian. Selanjutnya dilakukan *overlay* peta kemampuan lahan, persyaratan teknis, dan arahan RTRW dengan bobot yang ditunjukkan pada tabel IV.23.

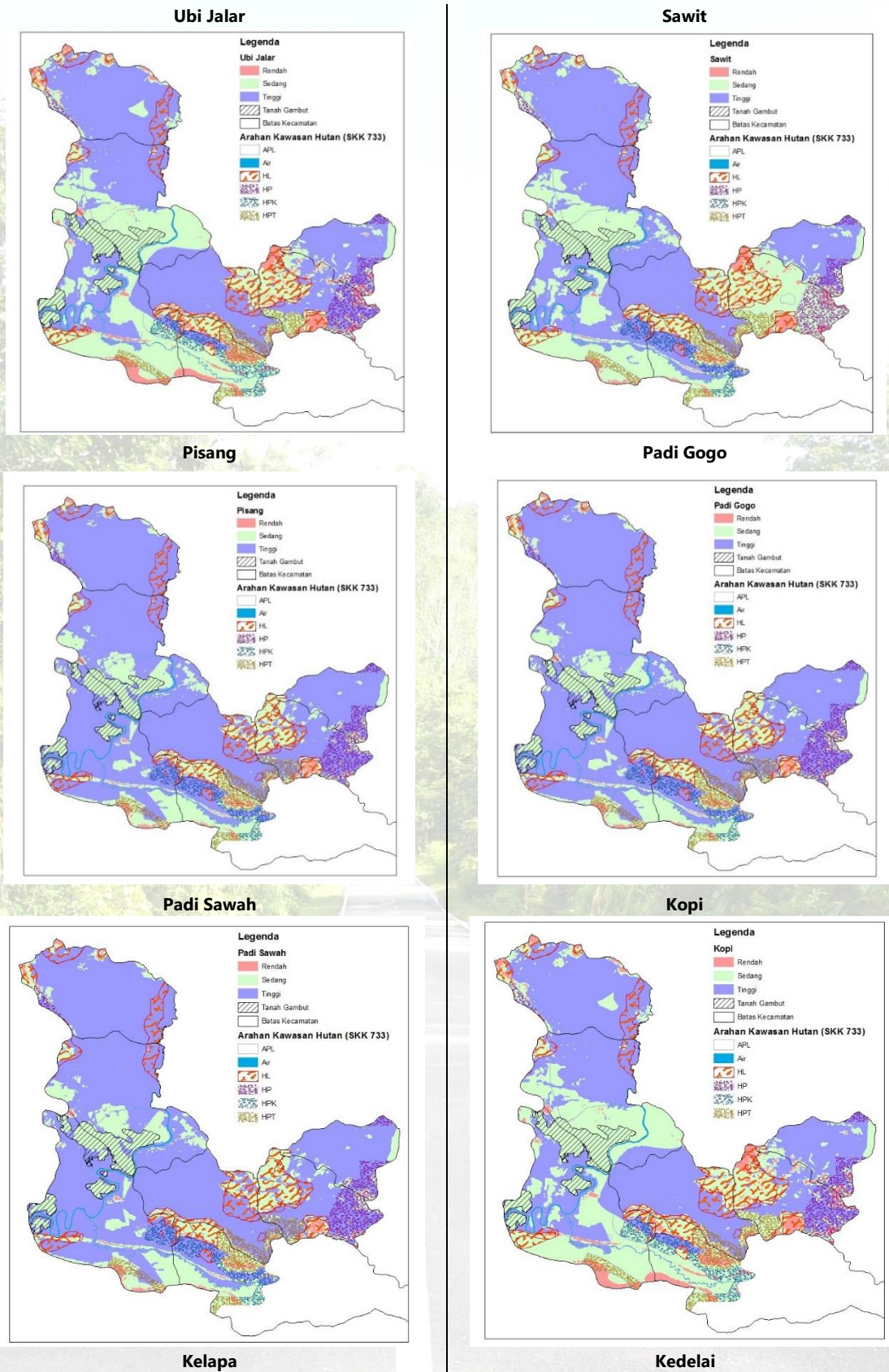
Tabel IV.23 Penilaian dan Pembobotan Kriteria Kesesuaian Lahan Pertanian

Kriteria	Kelas	Nilai	Bobot
Kemampuan Lahan	Sangat Tinggi	4	2
	Tinggi	3	
	Sedang	2	
	Rendah	0	
	Sangat Rendah	0	
Kelerengan	0%-8%	3	1
	8%-15%	0	
	15%-40%	0	
	>40%	0	
Curah Hujan	3250	1	1
	3750	0	
	4250	0	
Potensi Banjir	Berpotensi	1	1
	Tidak Berpotensi	0	
Arahan RTRW		1	2

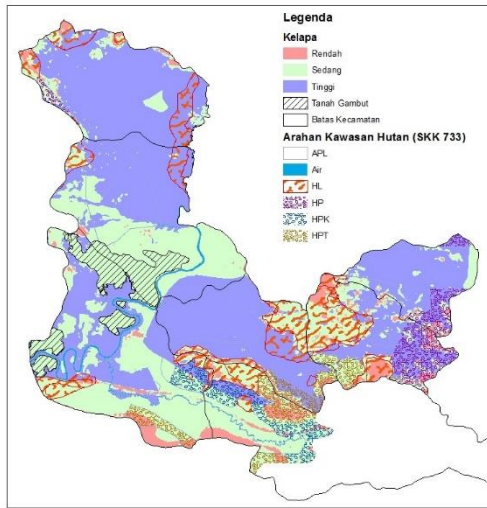
Sumber: Analisis, 2017

Berdasarkan penilaian dan pembobotan tersebut, diperoleh peta kesesuaian lahan 15 komoditas seperti pada gambar IV.17. Secara keseluruhan, lahan di area KSK Agropolitan sudah memiliki kesesuaian lahan komoditas dengan klasifikasi tinggi dan sedang. Terdapat beberapa daerah yang memiliki tingkat kesesuaian sedang di semua komoditas, yaitu Kecamatan Semitau bagian tengah, bagian selatan Silat Hilir dan Silat Hulu, serta perbatasan antara Hulu Gurung dan Seberuang. Pada gambar IV.17 juga dilakukan *overlay* pada arahan kawasan hutan sesuai SK Kehutanan 733 tahun 2014. Terlihat bahwa daerah dengan kesesuaian lahan pertanian rendah merupakan kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang tidak bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Terdapat beberapa daerah dengan kesesuaian lahan pertanian sedang yang juga diarahkan menjadi hutan lindung dan hutan produksi.

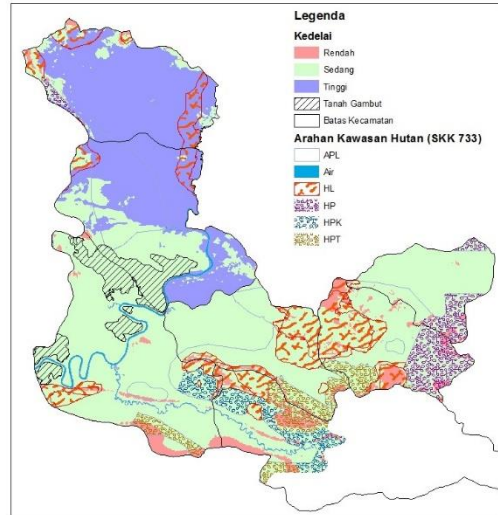
Gambar IV.17 Peta Kesesuaian Lahan Pertanian KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu per Komoditas



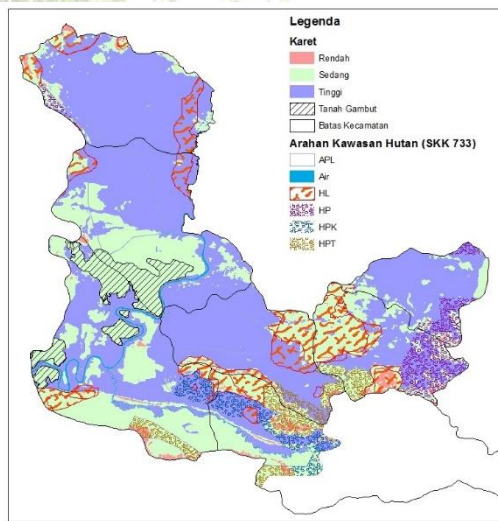
FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU



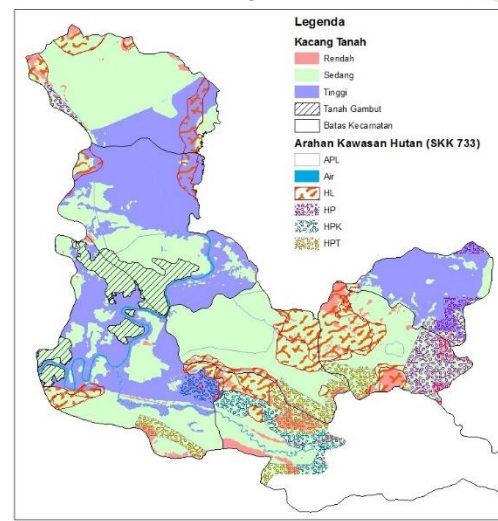
Kelapa



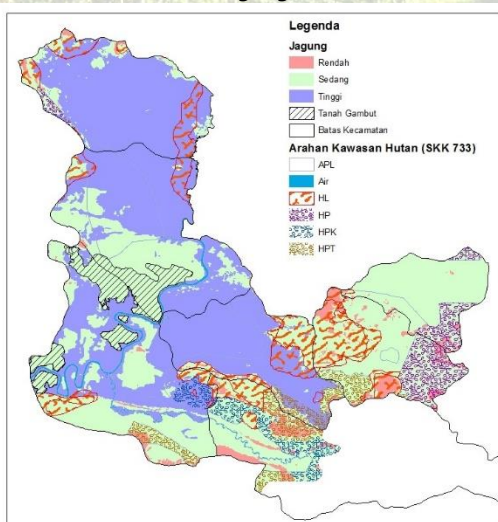
Kedelai



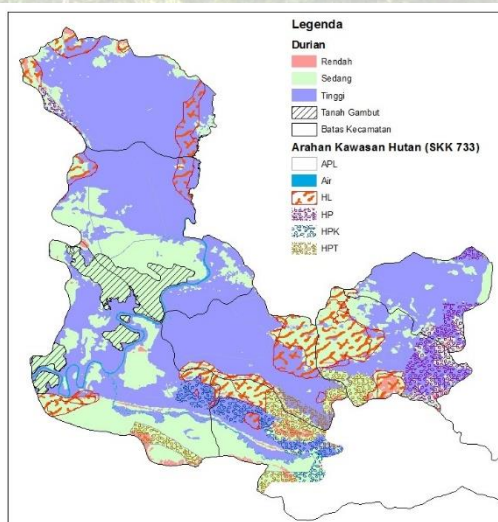
Karet



Kacang Tanah



Jagung

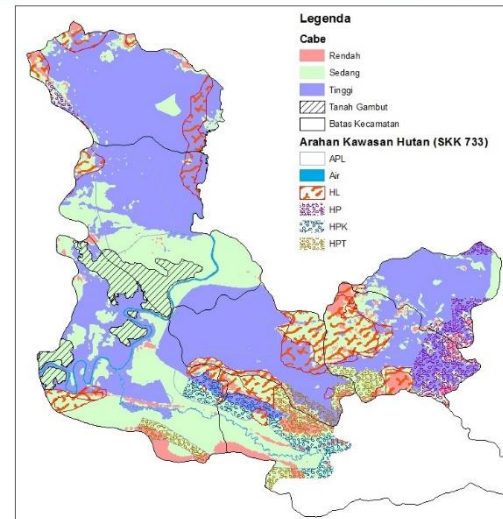
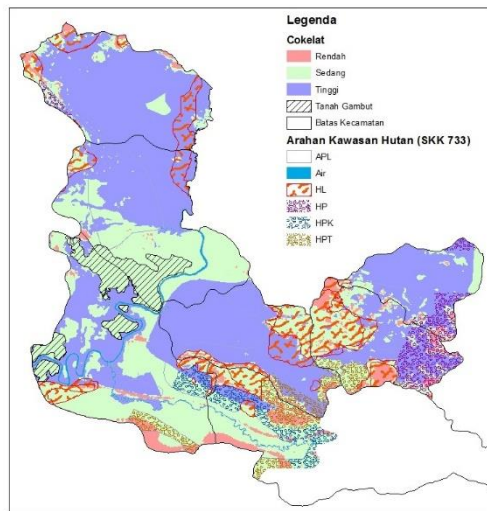


Durian

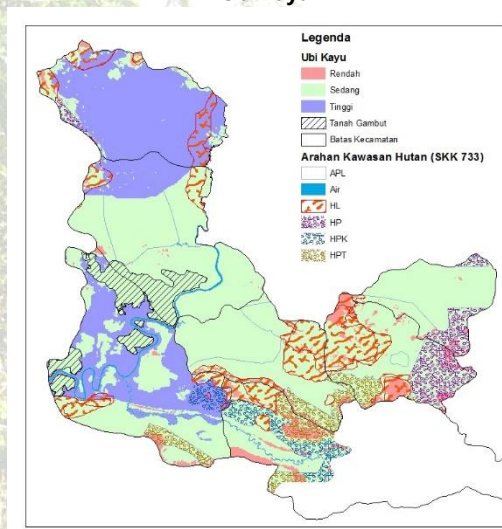
Cokelat

Cabe

FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU



Ubi Kayu



Sumber: Analisis, 2017

Komoditas yang memiliki kesesuaian lahan tinggi paling luas adalah padi sawah dan padi ladang / padi gogo, sedangkan kesesuaian lahan dengan klasifikasi sedang paling luas adalah komoditas ubi kayu. Komoditas sawit yang mendominasi di sebagian daerah KSK memiliki kesesuaian yang tinggi di kecamatan Empanang, sebagian Semitau, Pengkadan, dan Seberuang. Kesesuaian selanjutnya tentang sawit akan dijelaskan pada bab 4.1.2.4.

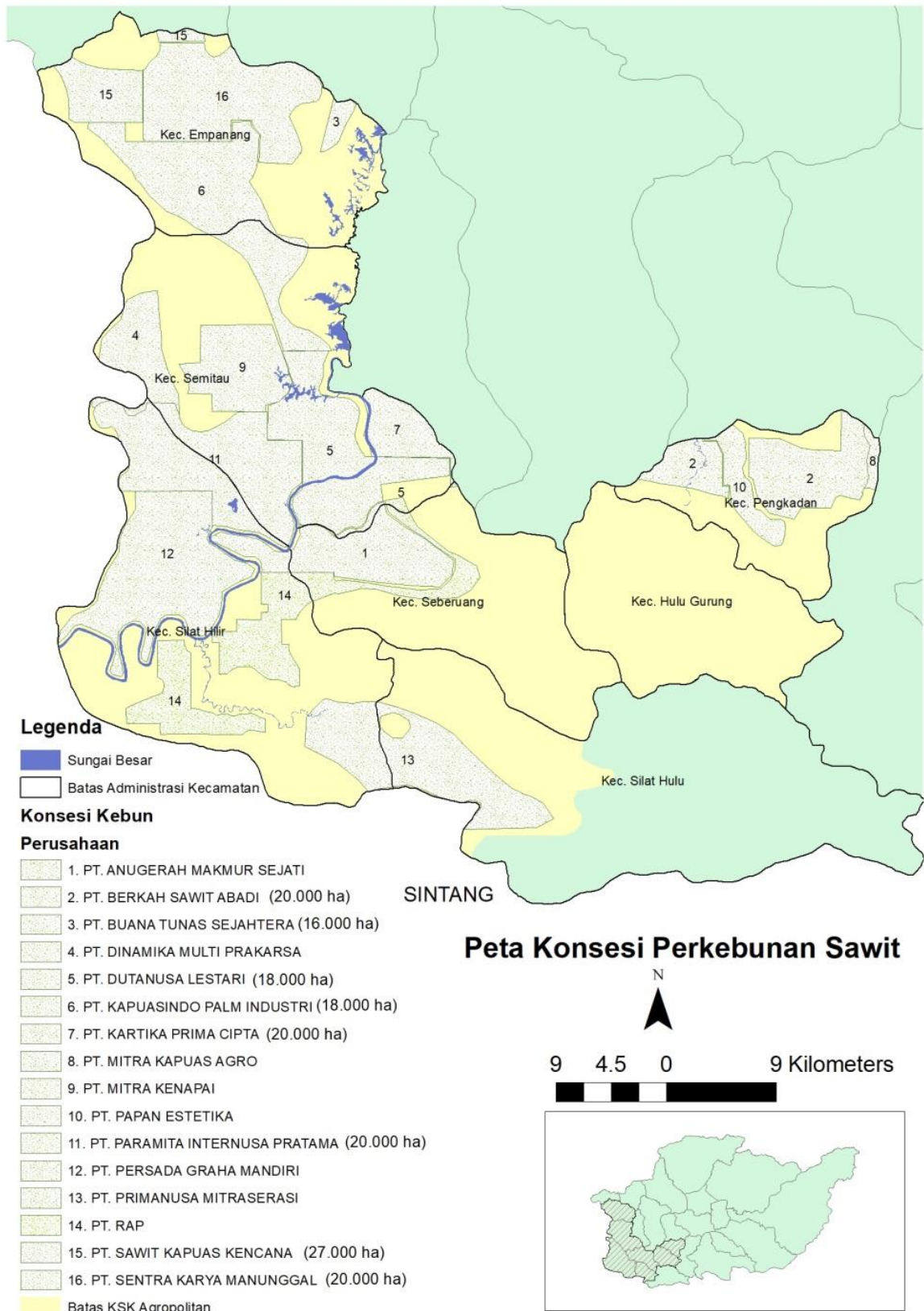
Komoditas yang ditanam oleh masyarakat saat ini di area KSK tidak hanya satu jenis karena menerapkan sistem tumpangsari dan *rotational crops*. Biasanya dalam satu lahan masyarakat menanam komoditas utama seperti karet dan komoditas yang akan dikonsumsi sendiri seperti sayur-sayuran. Sistem pertanian yang dilakukan oleh penduduk di area KSK Agropolitan masih tergolong tradisional dan tidak menggunakan pupuk kimia yang mencemari lingkungan. Ladang berpindah juga masih banyak dilakukan oleh masyarakat di seluruh kecamatan pada area KSK dengan alasan lahan yang sudah digunakan dalam 3-4 tahun hilang kesuburannya sehingga harus membuka lahan baru. Pada awal pembakaran, lahan dianggap subur dan dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman, hal ini karena adanya kandungan arang aktif yang mengikat air dan mineral. Tradisi ini sebenarnya tergolong tidak ramah lingkungan karena adanya polusi udara dan asap. Selain itu, tradisi

ini juga mematikan mikroorganisme dan makrofauna tanah yang berperan sebagai pengurai sehingga dalam jangka panjang akan menyebabkan lahan menjadi tidak produktif dan miskin nutrisi apabila tidak dibantu pupuk.

4.1.2.4 Analisis Konsesi Sawit dan Izin Usaha Pertambangan

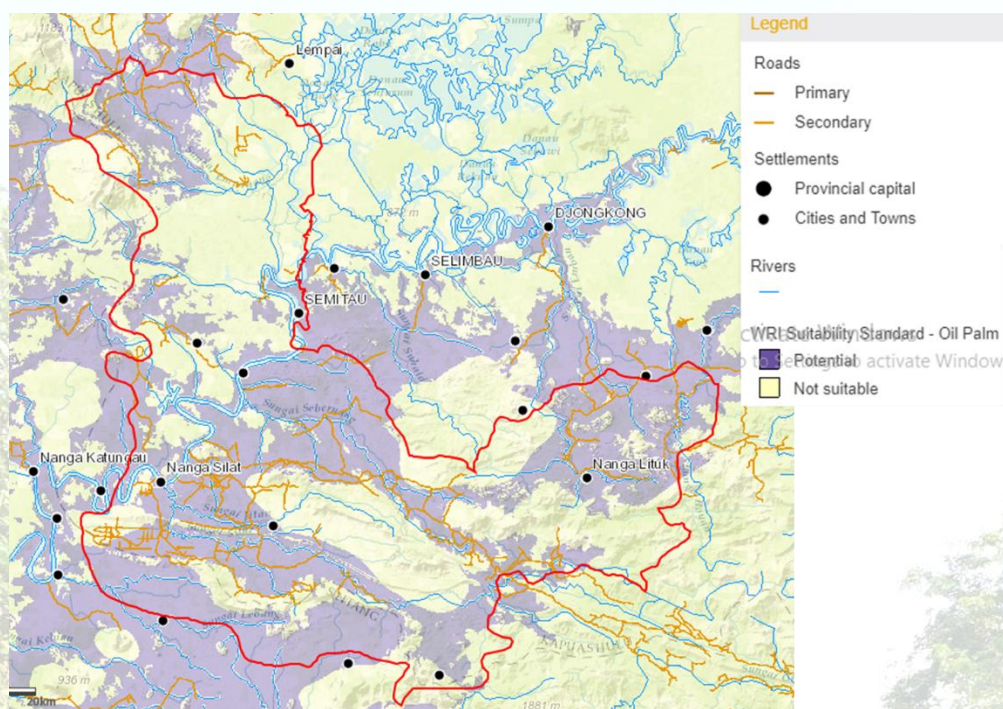
Perkebunan sawit, baik dari perusahaan besar maupun sawit mandiri, dikenal sangat mendominasi di Kalimantan. Walaupun begitu, tidak seluruh kecamatan di KSK Agropolitan memiliki perkebunan sawit. Berdasarkan survey lapangan, tidak ada perusahaan sawit yang masuk ke Kecamatan Hulu Gurung dan Pengkadan. Tetapi terdapat perbedaan berdasarkan gambar IV.18, yaitu peta konsesi perkebunan yang bersumber dari pemerintah daerah Kapuas Hulu, terlihat bahwa di Kecamatan Pengkadan terdapat perusahaan perkebunan kayu dan sawit. Terdapat 16 perusahaan perkebunan di KSK Agropolitan, tapi sebenarnya hampir seluruh perusahaan sawit dimiliki oleh Sinarmas dan Kencana Grup walaupun nama perusahaan yang digunakan berbeda-beda.

Gambar IV.18 Peta Konsesi Perkebunan KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber: Pengolahan Data, 2017

Gambar IV.19 Peta Kesesuaian Lahan Sawit di KSK Agropolitan



Sumber: World Resources Institute, 2017

Gambar IV.19 menunjukkan lahan yang berpotensi untuk ditanami sawit berdasarkan *World Research Institute / Global Forest Watch*. Kriteria kesesuaian lahan sawit didasarkan pada tabel IV.24. Dibandingkan dengan peta konsesi perkebunan, hampir seluruh perusahaan sawit telah berlokasi di kawasan berpotensi sawit kecuali Kecamatan Semitau bagian utara, sebagian daerah Empanang, dan beberapa titik lainnya. Kecamatan Hulu Gurung juga diidentifikasi sebagai daerah yang tidak sesuai untuk sawit, sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Kesesuaian lahan sawit ini ditentukan berdasarkan kriteria yang dapat dilihat pada tabel IV.24.

Tabel IV.24 Kriteria Kesesuaian Lahan Sawit

Peat Depth (cm)	0 cm
Conservation area buffers (m)	1000-5000
Water resource buffers (m)	100-1000
Slope (%)	0-30
Elevation (m)	0-1000
Rainfall (mm)	1500-6000
Soil drainage	poor/ imperfect; well/ moderately well; excessive/ slightly excessive
Soil depth (cm)	mod shallow (26-50 cm); mod deep (51-75 cm); deep (76-100 cm); very deep (101-150 cm); extremely deep (> 150 cm)
Soil acidity (pH)	excessively acid (< 4.0); extremely acid (4.0 - 4.5); very strongly acid (4.6 - 5.0); strongly acid (5.1 - 5.5); moderately acid (5.6 - 6.0); slightly acid (6.1 - 6.5); neutral (6.6 - 7.3)
Land Cover	Shrub; Bareland; Dryland Agriculture mixed with shrub; Plantation Forest; Estate Crop Plantation; Grassland; Dryland agriculture; Rice field
Soil Type	Inceptisol; Oxisol; Alfisol; Ultisol; Spodosol; Entisol; Mollisol

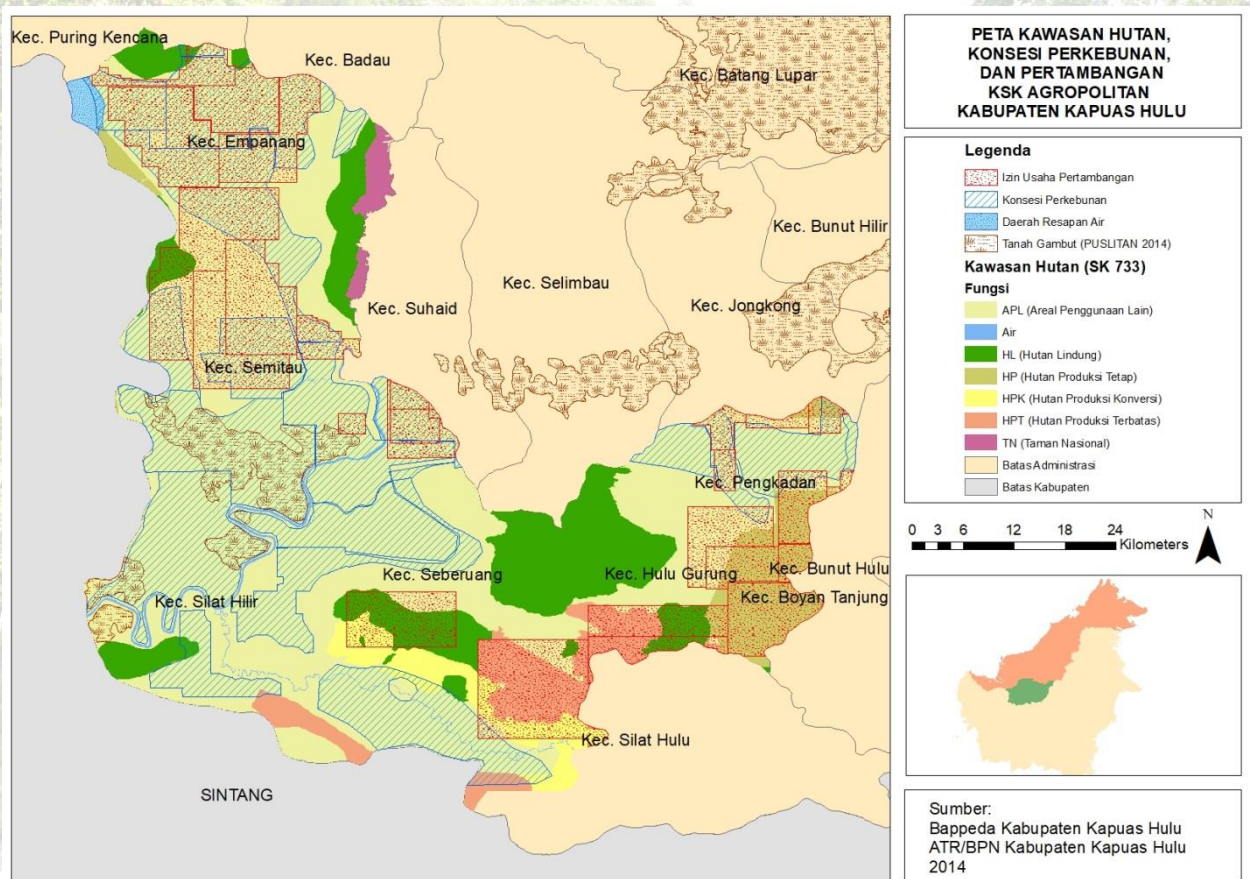
Sumber: World Resources Institute, 2017

Dilihat dari *overlay* lokasi konsesi perkebunan dan kawasan hutan SK 733, terlihat jelas bahwa terdapat konsesi sawit di lahan gambut di Kecamatan Semitau dan juga di Silat Hilir. Lahan gambut tersebut seharusnya dibatasi kegiatannya, bahkan dilindungi. Selain itu,

dapat dilihat juga terdapat kegiatan pertambangan yang juga cukup marak di KSK Agropolitan. Kegiatan pertambangan banyak yang berlokasi di HPT bahkan di hutan lindung. Di Kecamatan Hulu Gurung, Silat Hulu, dan Seberuang, izin usaha pertambangan terletak di HPT, HPK, dan HL. Berdasarkan PP 24/2010 tentang penggunaan kawasan hutan, kegiatan pertambangan diperbolehkan beroperasi di dalam kawasan hutan produksi dengan pola pertambangan terbuka atau bawah tanah. Untuk hutan lindung, kegiatan pertambangan juga diperbolehkan dengan pola pertambangan bawah tanah yang melarang adanya turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah.

Pada RTRW Kabupaten Kapuas Hulu juga dijelaskan bahwa pertambangan memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten, termasuk dalam wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung selama eksploitasi bahan tambang tersebut bermanfaat bagi negara. Studi khusus dan penelitian diperlukan untuk pengembangan pertambangan ini. Namun, sebagai kawasan yang diarahkan menjadi agropolitan, pertambangan tidak menjadi prioritas di ketujuh kecamatan ini.

Gambar IV.20 Peta Kawasan Hutan (SKK 733), Pertambangan, dan Konsesi Perkebunan

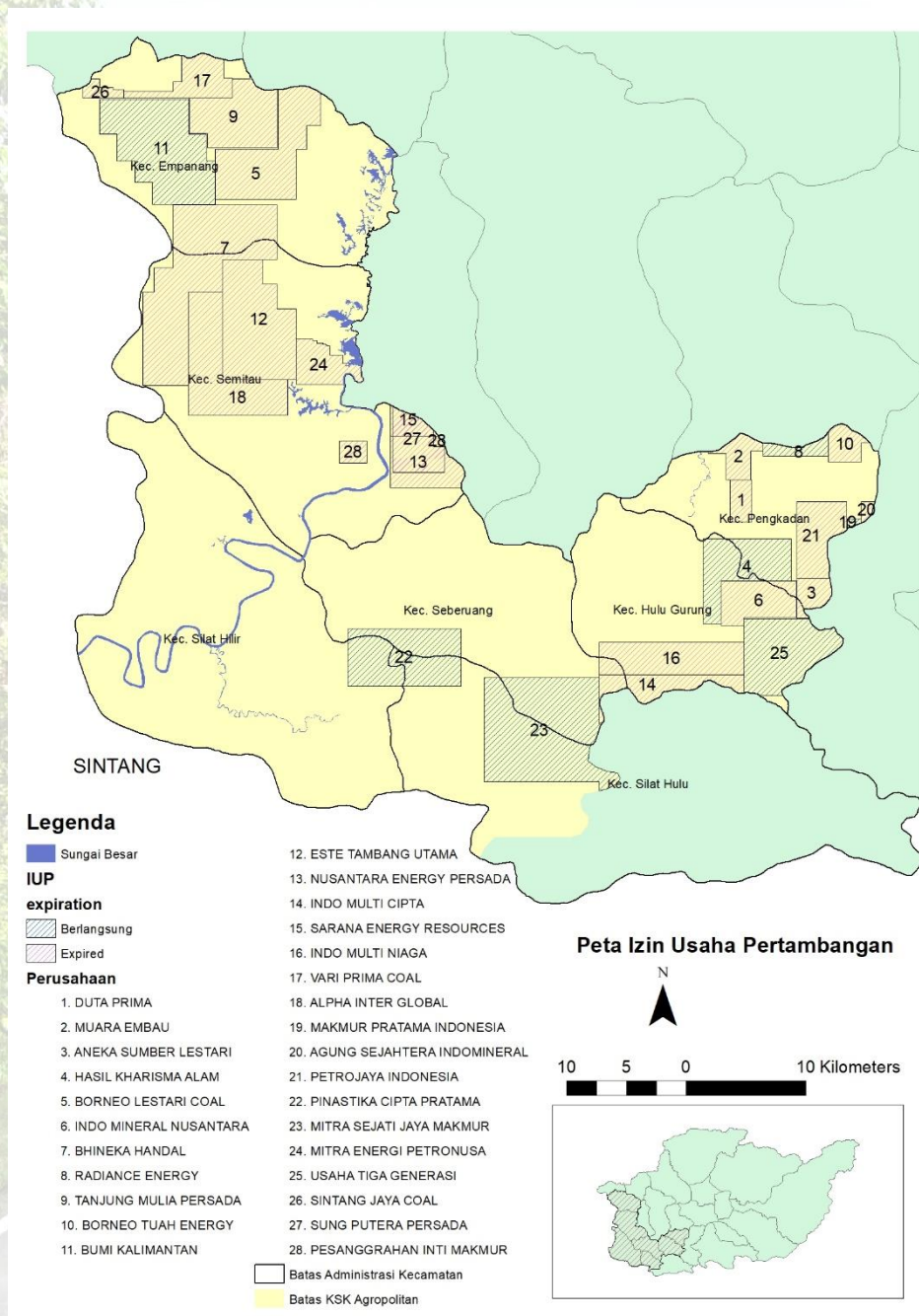


Sumber: Pengolahan Data, 2017

Pada gambar IV.20 terlihat sebaran izin usaha pertambangan, namun sebagian besar telah habis masa beroperasinya. Terdapat 6 dari 28 perusahaan pertambangan yang masih beroperasi. Namun, pada kenyataannya selain penambangan perusahaan, ada pula penambangan pribadi yang tergolong ilegal dan berdampak buruk pada lingkungan.

Walalupun sudah dilarang, kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) masih dapat dijumpai di Kecamatan Pengkadan, Silat Hulu, Silat Hilir, dan Hulu Gurung. Dampak lingkungan dari PETI dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar lokasi PETI, misalnya turunnya kesuburan tanah di lokasi ex-tambang dan juga limbah yang mencemari daerah hilir.

Gambar IV.21 Peta Izin Usaha Pertambangan KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber: Pengolahan Data, 2017

Izin yang dikeluarkan pemerintah untuk perusahaan tambang di ketujuh kecamatan yang tergabung KSK Agropolitan sebagian besar adalah izin eksplorasi dan sebagian kecil lainnya untuk operasi produksi. Terdapat bahan galian A, yang memiliki nilai strategis, dan bahan galian B, yang memiliki nilai vital, di kawasan agrolplitan ini. Pertambangan batubara,

sebagai bahan galian A, yang masih beroperasi saat ini terletak di Kecamatan Pengkadan dan Empanang. Emas dan antimony yang merupakan bahan galian B tersebar di Kecamatan Hulu Gurung, Silat Hulu, dan Pengkadan.

Tabel IV.25 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kawasan Agropolitan Kapuas Hulu

Nama Perusahaan	SK	Luas (ha)	Mineral	Kegiatan	Jenis	Tanggal Mulai	Tanggal Habis
1. Duta Prima	16 / 2010	1177	Batubara	Eksplorasi	CV	2010-01-16	2015-01-16
2. Muara Embau	304 / 2010	3300	Batubara	Eksplorasi	CV	2010-12-22	2015-12-22
3. Aneka Sumber Lestari	169 / 2011	3966	Antimoni	Eksplorasi	PT	2011-05-09	2016-05-09
4. Hasil Kharisma Alam	319 / 2009	14510	Emas	Eksplorasi	PT	2009-12-10	2017-12-10
5. Borneo Lestari Coal	338 / 2009	9397	Batubara	Eksplorasi	PT	2009-12-21	2014-12-21
6. Indo Mineral Nusantara	328 / 2009	3758	Emas	Eksplorasi	PT	2009-12-21	2015-12-21
7. Bhineka Handal	81 / 2010	15185	Batubara	Eksplorasi	PT	2010-02-25	2017-02-25
				Operasi			
8. Radiance Energy	87 / 2010	10000	Batubara	Produksi	PT	2010-03-17	2030-03-16
9. Tanjung Mulia Persada	82 / 2010	14360	Batubara	Eksplorasi	PT	2010-02-25	2017-02-25
10. Borneo Tuah Energy	317 / 2009	5340	Batubara	Eksplorasi	PT	2009-12-10	2014-12-10
				Operasi			
11. Bumi Kalimantan	17 / 2010	10000	Batubara	Produksi	PT	2010-01-12	2024-05-20
12. Este Tambang Utama	305 / 2009	9650	Batubara	Eksplorasi	PT	2009-11-26	2014-11-26
13. Nusantara Energy Persada	349 / 2009	5000	Batubara	Eksplorasi	PT	2009-12-29	2014-12-29
14. Indo Multi Cipta	326 / 2009	8840	Emas	Eksplorasi	PT	2009-12-21	2014-12-21
15. Sarana Energy Resources	350 / 2009	5000	Batubara	Eksplorasi	PT	2009-12-29	2014-12-29
16. Indo Multi Niaga	327 / 2009	6036	Emas	Eksplorasi	PT	2009-12-21	2014-12-21
17. Vari Prima Coal	337 / 2009	5980	Batubara	Eksplorasi	PT	2009-12-21	2014-12-21
18. Alpha Inter Global	15 / 2010	8300	Batubara	Eksplorasi	PT	2010-01-11	2015-01-11
				Operasi			
19. Makmur Pratama Indonesia	321 / 2009	509.7	Antimoni	Produksi	PT	2006-02-03	2026-02-02
20. Agung Sejahtera Indomineral	357 / 2009	4940	Antimoni	Eksplorasi	PT	2009-12-29	2014-12-28
21. Petrojaya Indonesia	358 / 2009	5000	Antimoni	Eksplorasi	PT	2009-12-29	2014-12-28
22. Pinastika Cipta Pratama	374 / 2009	8270	Emas	Eksplorasi	PT	2009-12-29	2017-12-28
23. Mitra Sejati Jaya Makmur	9 / 2010	22280	Emas	Eksplorasi	PT	2010-01-11	2018-01-10
24. Mitra Energi Petronusa	14 / 2010	5000	Batubara	Eksplorasi	PT	2010-01-11	2015-01-10
25. Usaha Tiga Generasi	7 / 2010	11650	Emas	Eksplorasi	PT	2010-01-11	2018-01-11
26. Sintang Jaya Coal	170 / 2011	4334	Batubara	Eksplorasi	PT	2009-12-21	2014-12-20
27. Sung Putera Persada	329 / 2009	4466	Bijih Besi	Eksplorasi	PT	2009-12-21	2014-12-21
				Laterit Fero			
28. Pesanggrahan Inti Makmur	322 / 2009	4976	Mangan	Eksplorasi	PT	2009-12-10	2015-12-10

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, 2017

4.1.3 Isu Fisik dan Lingkungan

KSK Agropolitan berada di Kabupaten Kapuas Hulu yang kondisi fisiknya dibagi menjadi tiga wilayah fisiografis, yaitu wilayah daratan DAS Kapuas, Wilayah Pegunungan Kapuas Hulu, dan Wilayah Pegunungan Muller (SDLH, 2016). KSK agropolitan berada di wilayah DAS Kapuas yang memiliki karakter umum danau – danau dan rawa-rawa yang dangkal serta teras-teras rendah yang sangat luas, bergambut, dan tidak subur. Dari total 296 sungai yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, KSK Agropolitan dilalui oleh 67 sungai. Kapuas hulu memiliki 23 danau lindung, salah satunya adalah Danau Marsedan yang ada di Kecamatan Semitau.

Mengingat tiap kecamatan memiliki jarak yang jauh dari kecamatan satu dan lainnya. Maka setiap perpindahan dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya di KSK Agropolitan Kapuas Hulu bisa memberikan karakteristik fisik dan lingkungan yang tidak sama. Sehingga laporan ini akan memberikan penjelasan mengenai isu fisik dan lingkungan berdasarkan data – data yang menjelaskan karakter kecamatan masing - masing.

KSK Agropolitan masih memiliki karakter perdesaan, sehingga permasalahan lingkungan seperti pencemaran udara akibat kendaraan bermotor tidak ditemukan sama sekali. Ada beberapa permasalahan lingkungan utama yang ditemukan di Kapuas Hulu melalui data yang didapatkan dari data sekunder, hasil wawancara, dan kegiatan *focus group discussion* (FGD) di 7 kecamatan. Umumnya permasalahan lingkungan tersebut berhubungan dengan sumber daya air, hutan, dan lahan yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan aktivitas perekonomian (perkebunan, pertanian, dan pertambangan). Dalam laporan empiris ini permasalahan – permasalahan tersebut dikategorikan menjadi beberapa kategori. Namun pengkategorian tersebut tidak bisa memisahkan keterkaitan masalah satu dengan yang lainnya, karena permasalahan lingkungan memiliki sebab akibat yang sangat erat. Berikut adalah pembahasan mengenai permasalahan lingkungan yang akan dijelaskan satu persatu.

4.1.3.1 Pencemaran Air Sungai dan Danau

Pola penggunaan air masyarakat juga cukup berbeda dari pola penggunaan air di masyarakat perkotaan. Pola penggunaan air ini merupakan bentuk adaptasi dari kondisi alam, penurunan kualitas alam, dan juga ketidadaannya infrastruktur air bersih. Masyarakat umumnya memprioritaskan penggunaan mata air jika di desa atau kecamatannya terdapat mata air dari bukit. Air permukaan, seperti air sungai dan danau merupakan sumber air bersih alternatif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dikonsumsi seperti untuk makan dan minum. Air sungai juga digunakan sebagai alternatif saat kemarau panjang, yaitu saat air bukit debitnya berkurang. Berbeda halnya dengan desa atau kecamatan yang tidak memiliki mata air, umumnya masyarakat bergantung kepada air sungai dan danau sebagai sumber air untuk konsumsi dan untuk MCK (mandi, cuci, dan kakus).

Menurut dokumen SDLH atau Sumber Dala Lingkungan Hidup (2014) masalah sumber daya air yang ditemukan adalah: banjir tahunan, sedimentasi yang menyebabkan pendangkalan sungai, dan pencemaran air sungai oleh kegiatan rumah tangga, PETI, limbah perkebunan, dan limbah peternakan. Selain itu sedimentasi juga dibantu oleh maraknya tamban batu

pecah, pasir, dan tanah merah. Data ini kemudian dikonfirmasi lagi dengan FGD untuk mendalami masalah pencemaran air apa yang paling mengkhawatirkan, penyebabnya, dan kejadiannya di seluruh kecamatan yang ada di KSK Agropolitan. Air sungai dan danau memiliki peranan yang penting karena air tersebut digunakan oleh masyarakat untuk keperluan mandi, cuci, kakus, dan memasak. Dari hasil FGD ditemukan bahwa pencemaran air bisa terjadi dari berbagai penyebab, namun penyebab yang umumnya dikemukakan adalah PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin), limbah pabrik sawit, limbah dari perusahaan kayu, erosi, dan limbah domestik.

A. Pencemaran oleh Kegiatan Ekonomi

Pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan ekonomi dibatasi oleh pencemaran akibat limbah perkebunan, perusahaan kayu, kegiatan PETI, atau penambangan batu pecah. Mengingat bahwa setiap kecamatan memiliki permasalahan air yang berbeda, maka permasalahan air di tiap kecamatan akan dibahas satu persatu.

a. Kecamatan Pengkadan

Gambar IV.22 Sungai di Pengkadan



Sumber: Hasil Observasi, 2017

Gambar IV.23 Tambang Batu dari Sungai Milik Rakyat



Sumber: Hasil Observasi, 2017

Gambar IV.24 Tambang Pasir dari Sungai Milik Masyarakat



Sumber: Hasil Observasi, 2017

Masyarakat pengkadan tidak merasakan masalah penurunan kualitas air secara langsung karena kebutuhan sehari – harinya sudah didukung oleh air pegunungan seperti di Desa Hulu Pengkadan, dari air sungai yang sudah diolah oleh PDAM seperti di Desa Buak Limbang, atau dari air mata air yang mengalir ke sungai seperti di Desa Martadana. Debit mata air tersebut masih sangat terbatas, sehingga belum bisa digunakan untuk kegiatan industri ataupun untuk irigasi pertanian. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, seharusnya masyarakat bisa memanfaatkan air sungai untuk mengairi pertanian, namun pencemaran sungai akibat PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) menyebabkan air tidak layak untuk sawah. Kasus tersebut juga ditemukan di Desa Sasan. Selain itu dari hasil observasi, juga ditemukan banyak pertambangan pasir dan batu milik masyarakat yang diambil dari sungai yang ada di Kecamatan Pengkadan seperti di gambar di atas.

b. Kecamatan Hulu Gurung

Gambar IV.25 Sungai di Hulu Gurung



Sumber: Hasil Observasi, 2017

Gambar IV.26 Pertambangan Batu Pecah Milik Perusahaan



Sumber: Hasil Observasi, 2017

Hulu gurung memiliki karakter yang hampir mirip dengan Pengkadan karena kebanyakan menggunakan sumber air yang berasal dari gunung dibandingkan dari sungai. Namun pada saat kemarau masyarakat bergantung kepada air sungai karena sumber air pegunungan berkurang. Sebagai alternatif masyarakat memanfaatkan air sungai untuk keperluan sehari – hari. Menurut wawancara dengan pihak Kecamatan Hulu Gurung ditemukan bahwa terdapat pencemaran sungai dari PETI dan juga dari tambang pasir dan batu dari sungai yang menyebabkan sungai berwarna keruh. Seperti digambar diatas ditemukan tambang baru dari milik perusahaan.

c. Kecamatan Silat Hilir

Gambar IV.27 Sungai di Silat Hilir



Sumber: Hasil Observasi, 2017

Sungai silat mengalami pencemaran di sungai dan dananya akibat PETI dan limbah pabrik sawit. Akibatnya air menjadi kuning dan keruh. Selain itu, air bersih dari sungai dan danau di Kecamatan Silat Hilir juga tercemar akibat perkebunan sawit. Bahkan air sumur juga berbau limbah CPO.

d. Kecamatan Silat Hulu

Gambar IV.28 Sungai di Silat Hulu



Sumber: Hasil Observasi, 2017

Sebagian masyarakat Silat menggunakan sistem air bersih yang disediakan oleh PDAM ataupun bantuan dari perusahaan. Namun masih ada juga yang menggunakan air sungai. Di Silat Hulu terdapat sistem PDAM dari Desa Landau Badai namun jika musim kemarau, air tidak bisa mencukupi kebutuhan sehingga masyarakat perlu mengambil air dari Sungai Silat. Begitu juga di Desa Selimu dimana sumber air bersih berdasar dari sumber perpipaan yang dibangun oleh perusahaan kayu, namun tetap dikelola oleh desa. Berbeda dengan yang lainnya, Desa Dangkan Kota mendapatkan sumber air dari sungai yang belum

bermasalah sampai saat ini. Dari hasil FGD ditemukan bahwa air bersih dari sungai di Silat Hulu tercemar oleh PETI. Akibatnya aliran sungai menjadi tercemar dan keruh. Salah satu sumber pencemaran adalah Desa Nanga Dangkan yang 80% pendapatan masyarakatnya adalah dari PETI. Selain PETI, Silat Hulu terkena dampak dari perkebunan sawit yang mencemari air sungai Silat.

e. Kecamatan Semitau

Gambar IV.29 Sungai di Kecamatan Semitau



Sumber: Hasil Observasi, 2017

Kecamatan Semitau dilalui oleh sungai Kapuas, yang sebagian penduduknya tinggal di daerah pesisir sungai. Dari beberapa desa kebanyakan memanfaatkan sumber air yang berasal dari sungai seperti Desa Entipan, Desa Tua Abang, dan Desa Sekedau. Desa Marsedan Raya menggunakan dua sumber air yaitu air sungai untuk keperluan MCK dan air dari mata air untuk minum dan memasak. Kecuali desa Panung Kumang yang menggunakan sumber air bersih dari pegunungan. Bagi desa – desa yang menggunakan air sungai, masyarakat merasa air sungai sudah tercemar akibat adanya perkebunan sawit. Air sungai yang digunakan saat ini menyebabkan gatal – gatal pada kulit.

f. Kecamatan Seberuang

Gambar IV.30 Sungai di Kecamatan Seberuang



Sumber: Hasil Observasi, 2017

Kecamatan Seberuang masih memanfaatkan air sungai untuk keperluan sehari – hari. Jika desanya memiliki bukit, maka masyarakat mengambil air bukit sebagai sumber air bersih. Namun disaat kemarau, masyarakat mengandalkan air sungai untuk memenuhi kebutuhannya. Masih ada desa yang hanya mengandalkan air sungai. Masyarakat menfaatkan air Sungai Seberuang dengan membangun sistem perpipaan secara swadaya di desa tanpa ada sistem pengolahan air. Air tersebut diendapkan di pagi hari untuk keperluan MCK dan dimasak untuk keperluan minum dan makan.

Menurut laporan masyarakat saat FGD, Sungai Seberuang saat ini sudah tercemar akrena perusahaan kayu yang baru aktif dalam satu tahun terakhir. Perusahaan Kayu tersebut mendapatkan IU PHKA yang izinnya didapatkan dari pemerintah pusat dan provinsi. Sebenarnya perusahaan tersebut banyak mengambil porsi lahan dari Kecamatan Silat Hulu, namun pintu masuknya melalui Kecamatan Seberuang. Selain melalui Kecamatan Seberuang, dampak dari penebangan pohon – pohon tersebut juga mencemari air di Kecamatan Seberuang. Menurut cerita dari mendiang Tumenggung Suku Suhaid, air limpasan yang berwarna coklat akibat perusahaan kayu ini sempat mengalir ke sawah – sawah dan air penduduk sehingga perusahaan tersebut sempat di adat oleh masyarakat. Disisi lain, Kecamatan Seberuang adalah kecamatan yang memiliki potensi sumur bor yang kualitasnya baik. Namun masyarakat banyak yang tidak bisa membangun sumur bor karena harganya mahal, yaitu sekitar 3-4 juta rupiah.

g. Kecamatan Empanang

Empanang adalah kecamatan yang paling sedikit ketersediaan sistem air bersihnya. Masyarakat Kecamatan Empanang dulunya mengandalkan air bersih yang didapatkan dari sungai untuk minum ataupun mandi. Namun semenjak sawit masuk tahun 2009, terutama pada desa Nanga Kantuk, terdapat perubahan besar pada sungai, yaitu air menjadi tercemar

oleh limbah sawit, banyak masyarakat yang terkena penyakit kulit akibat mengkonsumsi air dan ikan yang ada di sungai, ikan – ikan berkurang, dan warna air berubah menjadi kecoklatan padahal dulunya dasar air sungai masih bisa terlihat. Demi bertahan hidup masyarakat bergantung pada penggunaan air hujan (*rain water harvesting*) atau membeli air gallon seharga 100.000 rupiah per galonnya.

Menurut pengakuan masyarakat Desa Keling Panggau, pabrik sawit membuang limbah ke sungai. Menyebabkan air menjadi keruh sehingga air bahkan tidak layak untuk mandi dan minum. Pada awalnya perusahaan sawit berjanji bahwa limbahnya akan ditampung dalam kolam penampungan limbah di sekitar sawit, namun dalam waktu beberapa bulan sekali limbahnya dialirkan ke sungai tanpa ada pengolahan.

B. Penurunan Kualitas air dari sampah dan limbah rumah tangga

Gambar IV.31 Pembuangan Sampah di Tepi Sungai



Sumber: Hasil Observasi, 2017

Gambar IV.32 Lanting (Jamban) di Sungai



Sumber: Hasil Observasi, 2017

Kualitas air sungai dan danau juga menurun akibat sampah dan limbah rumah tangga yang dibuang langsung ke sungai. Hal ini terjadi di tujuh kecamatan KSK Agropolitan. Pembuangan sampah ke sungai terjadi karena sarana dan prasarana sampah, seperti TPA dan TPS tidak melayani kecamatan – kecamatan lain di Kapuas Hulu selain Kecamatan Putussibau. Selain itu limbah rumah tangga seperti grey water (air abu – abu – seperti air sisa mencuci dan mandi) dan black water (air hitam – air buangan toilet) juga langsung dibuang ke sungai tanpa ada pengolahan atau ditampung di septiktank. Walaupun menurut FGD yang dilakukan di Kecamatan Seberuang masyarakat mulai untuk membangun WC di rumah masing-masing walaupun belum 100%.

C. Erosi: Air Keruh dan Pendangkalan Sungai

Dengan maraknya pembukaan lahan hutan, menyebabkan banyak sedimentasi dari tanah yang larut didalam air sungai melalui peristiwa erosi. Erosi tersebut menyebabkan air sungai berwarna keruh dan kecoklatan. Tidak hanya menyebabkan air sungai menjadi berwarna keruh dan kecoklatan, dari diskusi FGD, ditemukan bahwa semenjak maraknya pembukaan lahan hutan dirasakan terjadi erosi yang membuat sungai menjadi dangkal. Sehingga saat musim kemarau, sungai yang tidak bisa digunakan untuk transportasi logistik lebih cepat terjadi. Mengingat sungai sangat penting perannya untuk transportasi logistik menuju dan dari Kota Pontianak, maka jika sungai mengalami pendangkalan, akan banyak kapal - kapal logistic yang tidak bisa lewat.

D. Pengurangan Debit Sungai

Berdasarkan pengalaman dari masyarakat saat melakukan FGD di kecamatan ditemukan ada perubahan karakter dan debit sungai. Menurut diskusi yang dilakukan saat FGD di Kecamatan Silat Hulu dan Kecamatan Seberuang terdapat Perusahaan Kayu yang bernama PT. BDK. Perusahaan tersebut menebang pohon dengan diameter 60cm ke atas. Dampak dari perusahaan tersebut ke dua kecamatan ini adalah menurunnya debit air sungai dan tercemarnya air bersih. Menurut pernyataan dari perwakilan Desa Riam Tapang, debit air sungai dirasa menurun karena pengurangan lahan hutan. Di Kecamatan Seberuang juga merasakan bahwa perubahan karakter sungai sangat besar. Sekitar 10 – 15 tahun yang lalu air sungai cukup stabil, yaitu daya tampung airnya lama. Sekarang sungai lebih cepat surutnya dan semakin keruh.

4.1.3.2 Dampak Perusahaan Sawit dan Perusahaan Kayu Terhadap Lingkungan

Perusahaan besar memiliki skala penguasaan lahan yang sangat besar, sehingga memiliki dampak yang sangat besar dalam perubahan lingkungan akibat perubahan ekosistem lokal secara besar – besaran. Berikut adalah dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang disampaikan melalui FGD sejak keberadaan perusahaan sawit dan perusahaan kayu kepada lingkungan sekitarnya.

A. Dampak Umum Kebersihan dan Kesehatan Masyarakat

Perubahan skala besar dari perusahaan sawit atau perusahaan kayu umumnya memberikan dampak lingkungan yang besar juga. Selain penurunan kualitas air seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya, terdapat dampak dari perusahaan sawit atau perusahaan kayu kepada lingkungan yang dirasa oleh masyarakat. Dampak lingkungan ini tidak terjadi di Kecamatan Pengkadan, Hulu Gurung, dan Silat Hilir karena di kecamatan tersebut tidak terdapat perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan sawit atau perusahaan bidang kehutanan. Sehingga tidak ditemukan masalah – masalah lingkungan dalam skala besar seperti di Kecamatan Silat Hulu, Semitau, Seberuang, dan Empanang yang akan dibahas satu persatu.

Menurut perwakilan Desa Kenepai Komplek, Kecamatan Semitau di FGD, dampak dari kegiatan sawit untuk lingkungan Kecamatan Semitau adalah polusi udara berbentuk debu pada saat kemarau, pencemaran sungai yang menjadi keruh, dan zat kimia yang larut menyebabkan masyarakat mudah sakit gatal – gatal serta jalan menjadi licin dan berlumpur saat hujan.

Kecamatan Empanang adalah kecamatan dengan dominasi lahan untuk perkebunan sawit yang paling besar. Selain itu Kecamatan Empanang juga memiliki pabrik sawit yang lokasinya berada di Desa Keling Panggau. Pabrik sawit tersebut menggunakan air sungai untuk proses pengolahan produksinya yang dibawa ke tempat penampungan. Menurut pengakuan masyarakat saat FGD, Limbah pabrik tersebut seharusnya di tampung ke dalam kolam penampungan limbah yang berada di sekitar pabrik sawit. Namun, saat ini limbah tersebut dibuang langsung ke sungai tanpa ada proses pengolahan. Dampak yang dirasa

lebih dari sekedar adanya pencemaran air sungai, menyebabkan air tersebut tidak bisa digunakan untuk minum dan mandi. Dampak lainnya adalah ikan – ikan banyak yang mati, menghilang dari habitatnya, atau tidak bisa di konsumsi oleh masyarakat akibat kandungan kimia di dalam ikan yang bisa menyebabkan sakit. Bahkan air sumur bor masyarakat tidak layak lagi untuk di konsumsi karena airnya terkena limbah sawit dan berbau seperti CPO (Crude Palm Oil).

Perkebunan sawit juga menimbulkan polusi udara, bau limbah pabriknya sangat menusuk bahkan menurut perwakilan Desa Nanga Kantuk baunya melebihi mau feses manusia. Bau busuk dari pabrik – pabrik tersebut bisa tercium sampai ke rumah – rumah warga. Selain itu serangga – serangga seperti kecoa, lalat, dan nyamuk meningkat populasinya semenjak adanya pabrik sawit akibat adanya limbah yang tidak dikelola dengan baik. Dampak lainnya adalah penurunan kualitas kesehatan masyarakat, kasus – kasus penyakit meningkat seperti demam berdarah, diare, ISPA, dan penyakit – penyakit yang dibawa oleh pendatang dari luar yang bekerja di kebun sawit juga mengkhawatirkan, aku masyarakat Empanang saat FGD.

B. Berkurangnya produksi perikanan ikan air tawar tangkap

Ikan merupakan sumber protein yang penting untuk masyarakat Kapuas Hulu sehingga penurunan produksi perikanan air tawar tangkap sangat terasa bagi masyarakat. Misalnya di Kecamatan Silat Hilir, Seberuang, dan Empanang disinyalir lewat laporan FGD masyarakat merasa banyak habitat ikan air tawar mulai terganggu sehingga jumlah ikan juga berkurang. Hal ini dirasakan semenjak maraknya pertumbuhan perkebunan sawit, ikan – ikan di sungai dan danau berkurang akibat karena pemakaian pestisida yang berlebih. Diakui oleh masyarakat melalui FGD, walaupun ikan – ikan tersebut ada di sungai masyarakat tidak dapat mengkonsumsi ikan tersebut akibat kandungan kimia yang ada di dalam ikan tidak aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Ikan – ikan tersebut bisa menyebabkan gatal atau menyebabkan penyakit lain.

C. Meningkatnya Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman)

Sebagai kawasan yang nantinya akan didorong menjadi kawasan pertanian pembahasan mengenai OPT merupakan pembahasan yang penting. KSK Agropolitan memiliki permasalahan dengan OPT atau yang biasa dikenal sebagai hama oleh masyarakat. OPT bisa menyebabkan pengurangan hasil pertanian atau bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Seperti yang diceritakan oleh masyarakat yang hadir saat FGD di Empanang, OPT yang ada di KSK Agropolitan itu beragam. Namun OPT yang umumnya ditemukan adalah kera dan babi hutan untuk ladang berpindah, sedangkan tikus, burung pipit, belalang, dan wereng merupakan OPT untuk sawah.

Perubahan yang dirasakan masyarakat semenjak adanya perkebunan sawit skala besar adalah kecamatan – kecamatan yang memiliki perkebunan sawit mengalami peningkatan serangan OPT. Mengingat perkebunan sawit memiliki kemampuan menghilangkan hama dengan menggunakan pestisida, maka hama tersebut beralih ke kebun, ladang, dan sawah

masyarakat yang selama ini jarang menggunakan pestisida dan pupuk. Masyarakat sendiri mengakui bahwa tidak menggunakan pestisida atau pupuk akibat tidak memiliki kemampuan membeli. Dengan demikian, banyak petani yang gagal panen akibat serangan OPT tersebut.

4.1.3.3 PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin)

PETI merupakan kegiatan menambang emas yang dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya izin pertambangan dan dilakukan dengan teknologi sederhana. Metode yang digunakan sangat sederhana, yaitu menggunakan dulang dan dengan bantuan mesin sederhana. PETI ditemukan di Kecamatan Pengkadan, Hulu Gurung, Silat Hulu, dan Silat Hilir. Misalnya di Desa Martadana di Kecamatan Pengkadan, masyarakat yang bekerja sangat tergantung dengan alam, jika musim hujan masyarakat berhenti berladang karet dan beralih ke tambang emas. Sedangkan di Kecamatan Hulu Gurung, terdapat 5 desa yang terlibat ke dalam kegiatan PETI. Salah satu penyumbang PETI ada di Desa Kelakar. Kegiatan PETI menguasai 40-50% lahan yang ada di Desa, dengan melibatkan kurang lebih 200 kepala keluarga atau sekitar 80% dari total penduduk. Di desa ini masyarakat sudah menambang emas turun temurun sejak tahun 1991 hingga sekarang. Walaupun menambang emas, ternyata pendapatan yang didapat dari PETI tidak bisa untuk mendapatkan pendapatan yang besar namun hanya sekedar keperluan ekonomi. Begitu juga dengan Kecamatan Silat Hulu, di Desa Nanga Dangan, PETI menjadi pekerjaan utama masyarakat, sekitar 80% dari total penduduk. Menyebabkan dua aliran sungai yang ada di Silat Hulu tercemar dan keruh.

Menurut pengakuan masyarakat, selain perusakan terhadap kualitas air yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya akibat pembukaan tambang emas adalah lahan pertanian rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Hal ini dikarenakan PETI merusak lahan pertanian walaupun kegiatan PETI sudah lama dihentikan bertahun – tahun yang lalu. Lahan di kolam tambang ini tergolong sebagai lahan kritis (lahan yang produktivitas pertaniannya rendah) karena tanahnya hanya berisi campuran batu dan pasir.

PETI merupakan kegiatan yang illegal maka masyarakat mulai bersembunyi dalam melakukan pertambangan emas. Disisi lain sudah ada upaya untuk meminimalisir PETI dengan cara razia yang dilakukan oleh polisi desa dan polisi pusat.

4.1.3.4 Banjir

Masyarakat di Kapuas Hulu adalah masyarakat yang hidup berdampingan dengan sungai. Dari 296 sungai yang ada di Kapuas Hulu, KSK agropolitan memiliki 67 sungai. Sehingga sungai memiliki peranan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang dibawa dari sungai adalah ancaman bencana banjir.

Pemahaman Terhadap Bencana

$$\frac{\text{Ancaman Bencana} \times \text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas} \times \text{Adaptasi}} = \text{Resiko Bencana}$$

Bencana secara sederhana bisa dipahami dengan formula diatas, yaitu ancaman bencana yang diekskalasi oleh kerentanan oleh masyarakat yang terpapar resiko namun juga bisa

redakan oleh kapasitas masyarakat yang terpapar resiko akan menciptakan sebuah resiko bencana.

Kerentanan memiliki berbagai tipe, seperti kerentanan sosial, ekonomi, lingkungan, dan fisik. Kerentanan fisik contohnya bangunan semi permanen, rencana tata ruang yang tidak terdulasi, bangunan tepi sungai. Terutama jika terdapat kegiatan – kegiatan strategis yang berpengaruh untuk meningkatkan orang yang akan terpapar resiko atau meningkatkan infrastruktur yang akan terpapar bencana, yaitu kegiatan perdagangan jasa, pelabuhan, pasar, dan lain – lain. Kerentanan dari segi lingkungan seperti kekurangan daerah resapan air. Selain itu ada juga kerentanan akibat aspek ekonomi, yaitu kehidupan masyarakat perdesaan yang cenderung rentan, tidak memiliki asuransi, atau bergantung pada kegiatan ekonomi yang tidak mensejahterakan masyarakat.

Ancaman Bencana

Banjir musiman merupakan peristiwa yang biasa terjadi di kecamatan – kecamatan KSK Agropolitan. Banjir masih dianggap sebagai hal yang lumrah dan dapat ditoleransi oleh masyarakat yang ada di Kapuas Hulu. Banjir terjadi di semua kecamatan yang ada seperti Kecamatan Pengkadan, Hulu Gurung, Silat Hulu, Seberuang, dan Empanang setiap satu tahun sekali atau lebih. Sedangkan di Kecamatan Silat Hilir terdapat banjir musiman besar yang terjadi 5-6 tahun sekali. Ketinggian banjir bisa bervariasi tergantung kondisi topografi dan debit air banjir yang mengalir. Menurut diskusi FGD kecamatan – kecamatan, terdapat ketinggian banjir yang berbeda – beda. Di Kecamatan Hulu Gurung ketinggian banjir bisa mencapai 2-4 meter, Kecamatan Silat Hilir bisa mencapai tinggi lantai rumah betang, Kecamatan Seberuang bisa mencapai 2 meter, Kecamatan Empanang tinggi air bisa mencapai 8 meter. Banjir tersebut dapat naik dengan cepat, namun dapat juga dengan cepat surutnya. Selama ini tidak ada korban jiwa dari banjir tersebut, namun di Kecamatan Empanang banjir bisa menyebabkan gagal panen pada pertanian karena merendam tanaman pertanian. Banjir umumnya terjadi di daerah yang dilalui sungai besar seperti Semitau, Silat Hilir, dan Silat Hulu. Akan tetapi terjadi juga di dekat sungai sungai kecil.

Kerentanan dan Kapasitas

Salah satu bentuk kerentanan fisik dari masyarakat yang tinggal di bantaran sungai di kawasan KSK Agropolitan adalah dekatnya kawasan budidaya, seperti perumahan, perdagangan dan jasa, atau sarana dan prasarana dengan sungai tanpa tanggul seperti di Kapuas Hulu. Dengan demikian, dampak dari bencana banjir akan lebih besar karena masyarakat terbiasa untuk tinggal di tepi sungai. Terutama jika masyarakat terbiasa untuk tidak mengindahkan Permen PUPR Nomor 28 tahun 2015 Tentang penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Yang mengatur mengenai pembangunan kawasan budidaya tidak boleh berada di sempadan sungai tanpa tanggul sejauh 100 meter untuk sungai besar dan 50 meter untuk sungai kecil.

Selain itu secara sosial ekonomi, masyarakat memiliki kerentanan masih belum memiliki kemampuan dalam menghadapi cepat tanggap bencana banjir. Seperti masyarakat belum

memiliki dana darurat untuk menghadapi bencana banjir untuk menyediakan kebutuhan dasar saat bencana, seperti makanan, baju, tempat tinggal darurat, dan lain – lain. Masyarakat belum teredukasi untuk menghadapi bencana banjir dari proses evakuasi dan penyelamatan.

Adaptasi

Masyarakat saat ini sudah sangat menyesuaikan dengan adanya bencana banjir di Kabupaten Kapuas Hulu. Saat ini adaptasi yang sudah dilakukan adalah membangun rumah – rumah panggung yang tinggi sehingga tidak terkena dampak bencana banjir.

Bencana Lanjutan

Terdapat bencana lanjutan dari bencana banjir. Bencana banjir bisa menyebabkan bencana lanjutan seperti kebakaran, kerusakan alat - alat elektronik, prasarana listrik, atau aset – aset lainnya, kerusakan jaringan telekomunikasi, atau terputusnya jaringan jalan. Hal ini juga perlu mendapatkan upaya mitigasi.

Kajian mengenai ancaman bencana, kerentanan, kapasitas, adaptasi, hingga menghasilkan resiko bencana memerlukan kajian yang lebih mendalam dari kajian yang dilakukan dalam dokumen empiris ini. Perlu diingat bahwa kajian ini merupakan kajian sederhana karena hanya menjadi bagian kecil dari kajian fisik dan lingkungan.

Perlunya Upaya Mitigasi Bencana Banjir

Walaupun banjir masih merupakan ancaman bukan merupakan bencana alam karena kerugiannya masih dapat diterima oleh masyarakat dan masyarakat masih dapat beradaptasi dengan ancaman banjir. Namun di masa depan, terutama melihat konteks perencanaan yang mengantisipasi perubahan dalam waktu 20 tahun kedepan, perlu ada upaya untuk menangani banjir yang pasti terjadi setiap tahunnya. Apalagi jika ancaman banjir tersebut semakin membesar skalanya akibat maraknya pembukaan lahan hutan dan peralihan guna lahan dari pertanian/perkebunan menuju ke guna lahan lainnya. Terutama di masa depan saat masyarakat semakin rentan terkena dampak bencana banjir, akibat perkembangan jumlah penduduk, penambahan aset pribadi masyarakat, perkembangan investasi sarana prasarana publik, tingginya kawasan terbangun di sepadan sungai, dan pertumbuhan kegiatan ekonomi. Maka perlu ada upaya mitigasi dan adaptasi terhadap bencana banjir sebelum merugikan kawasan KSK Agropolitan di masa depan.

4.1.3.5 Ladang Berpindah dan Kebakaran Lahan

Lahan berpindah merupakan pola bertani yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Ladang berpindah merupakan sistem pertanian tanpa irigasi, sehingga memanfaatkan air hujan. Menurut FGD di Kecamatan Seberuang dan Pengkadan, masyarakat memanfaatkan ladang berpindah karena kualitas tanah di Kapuas Hulu bisa hilang kesuburannya dalam kurang dari lima tahun bertani. Dengan demikian, menurut FGD di Kecamatan Silat Hulu, masyarakat harus membuka lahan baru untuk berladang dan meninggalkan dalam waktu sepuluh tahun. Lahan lama yang tinggalkan akan akan di reboisasi oleh masyarakat.

Masyarakat sulit untuk menggunakan metode land clearance (pembukaan lahan) dengan teknologi yang maju karena tidak ada akses terhadap teknologi.

Pembakaran lahan untuk pembukaan atau untuk mengembalikan kesuburan ladang merupakan peristiwa yang terjadi pada waktu – waktu tertentu, terutama saat musim kemarau. Kesuburan ladang dikembalikan dengan cara membakar lahan, sehingga masyarakat bisa bertani tanpa menggunakan pupuk. Masyarakat Kapuas Hulu memiliki aturan untuk melakukan pembakaran ladang, seperti dilakukan di jam – jam tertentu yang umumnya di siang hari, pada musim kemarau, dalam rentang waktu yang singkat (yaitu sekitar 2-4 jam), dan tidak langsung membakar satu hamparan lahan dalam waktu bersamaan.

Dalam setiap wawancara dan FGD yang dilakukan di kecamatan – kecamatan, masyarakat yakin bahwa pembakaran lahan sudah berkurang sejak ditetapkan Instruksi Presiden No 11 Tahun 2015 Tentang Peningkatan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Hal ini menjadi sebuah dilemma karena masyarakat membakar lahan untuk berladang bukan membakar hutan dan praktek ladang berpindah ini merupakan budaya Suku Dayak yang sudah dilakukan turun menurun.

Walaupun demikian berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Global Forest Watch pembakaran lahan tetap terjadi. Daei laporan tersebut ditemukan beberapa titik api yang terjadi di KSK Agropolitan.

Tabel IV.26 Laporan Titik Api KSK Agropolitan Tahun 2017

No	Tanggal	Jumlah Titik Api	Lokasi
1	21 Agustus 2017	37	Pengkadan, Hulu Gurung, Silat Hulu, Silat Hilir, dan Empanang
2	23 Agustus 2017	21	Empanang
3	24 Agustus 2017	21	Empanang
4	25 Agustus 2017	23	Empanang
5	28 September 2017	55	Silat Hilir dan Seberuang

Sumber: Global Forest Watch 2017

Gambar IV.33 Titik Api KSK Agropolitan 21 Agustus 2017



Sumber: Global Forest Watch 2017

Gambar IV.34 Titik Api KSK Agropolitan 23 Agustus 2017



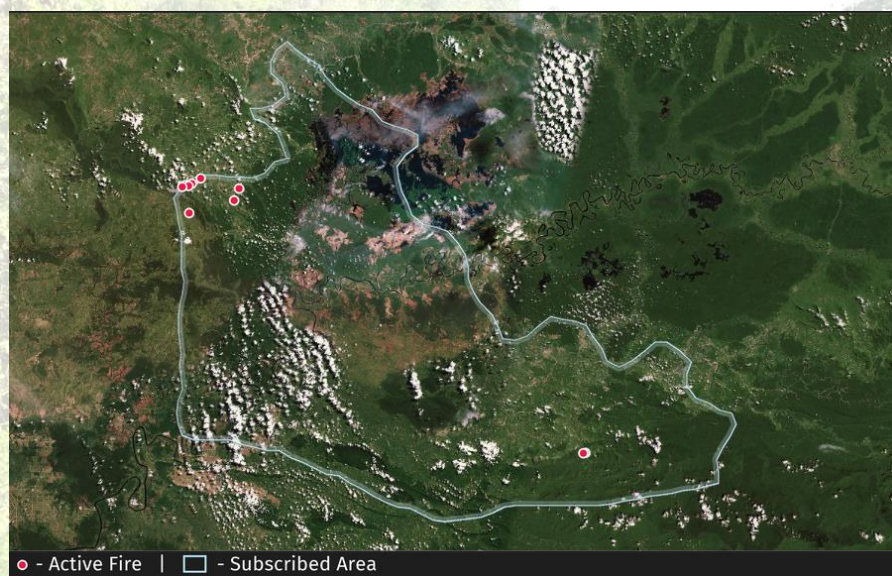
Sumber: Global Forest Watch 2017

Gambar IV.35 Titik Api KSK Agropolitan 24 Agustus 2017



Sumber: Global Forest Watch 2017

Gambar IV.36 Titik Api KSK Agropolitan 25 Agustus 2017



Sumber: Global Forest Watch 2017

Gambar IV.37 Titik Api KSK Agropolitan 25 Agustus 2017



Sumber: Global Forest Watch 2017

4.1.3.6 Masalah Lahan

Sistem kepemilikan lahan masyarakat merupakan lahan yang didapatkan secara turun – temurun, dimiliki pribadi, dan bisa dijual ke orang lain. Namun banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikat, yaitu hanya berbentuk surat keterangan kepala desa atau yang dikenal dengan Girik C.

Ada beberapa masalah lahan yang ditemukan, yang pertama adalah masalah status lahan, masalah penguasaan lahan, dan konflik lahan. Pertama adalah masalah status lahan yang umumnya ditemukan adalah hutan lindung belum jelas statusnya, seperti hasil FGD dari masyarakat di kecamatan Empanang. Begitu juga di Desa Pinang Laka, Kecamatan Pengkadan, pemuda desa ingin merubah status Hutan Lindung menjadi Hutan Wisata karena terdapat potensi pariwisata.

Masalah kedua yang ditemukan adalah penguasaan lahan sawit yang sangat besar di beberapa kecamatan KSK Agropolitan. Misalnya di Kecamatan Semitau, di Desa Nanga Kenepai 1000 Ha dari 10.000 Ha sudah dikuasai sawit. Lalu Desa Dekedau dengan 6700 Ha, 50% lahannya sudah dikuasai sawit dan akan ditingkatkan menjadi 60%. Masyarakat terpaksa menyerahkan lahannya dan berpindah pekerjaan ke sawit karena nilai karet turun. Desa Panung Kumang Sawit juga didominasi lahannya sawit. Desa Semitau Hilir juga memiliki sawit plasma dan inti, namun banyak sawit plasma yang dijual ke oknum yang memiliki uang, sehingga masyarakat sudah kehilangan aset lahannya. Selain itu di Nanga seberuang, terdapat dua lahan sawit besar yaitu PT PIP dan Kencana Group. Banyak masyarakat yang dulunya melakukan ladang berpindah yang menjual lahan pribadinya ke sawit. Desa Kenepai Komplek memiliki luas 2252 Ha, dengan hampir 40% lahannya merupakan lahan sawit. Desa Tua Abang, memiliki luas 13.500 Ha dan 40% lahannya merupakan lahan sawit. Begitu juga dengan Desa Lemedak, terdapat dua perusahaan sawit seluas 2000 Ha. Di Kecamatan Silat Hulu, terutama di Desa Dangkan kota, terdapat perkebunan sawit yang

menguasai hampir 80% dari luas desa yang total luasnya 4120 Ha. Begitu juga dengan Kecamatan Empanang dimana sawit mendominasi lahan yang ada di Kecamatan empanang.

Permasalahan lahan tidak hanya berkuat di masalah kepemilikan, tetapi juga dari konflik yang dihasilkan dari pelepasan lahan dalam serangkaian proses pengembangan lahan. Seperti izin sawit yang dicabut atau perjanjian pelepasan lahan yang tidak sesuai. Misalnya di Desa Buak Limbang, Kecamatan Pengkadan sudah ada perkebunan sawit punya perusahaan yang izinnnya dicabut tapi sudah hampir produksi sebanyak 1000 ha yang sudah digarap dari total 1700 ha. Sehingga masyarakat terombang – ambing oleh lahan yang didiamkan tersebut. Seperti di banyak tempat yang memiliki perkebunan sawit di kecamatannya, konflik plasma merupakan konflik yang sering dilaporkan oleh masyarakat di setiap FGD. Contohnya lainnya di Desa Laja Sandang, Kecamatan Empanang, sekitar 50% lahannya digunakan oleh perkebunan sawit. Dulu masyarakat melepaskan tanahnya ke sawit seharga Rp. 250.000,00 per hektar pada tahun 2009 dengan perjanjian pembangunan sarana dan prasarana dasar seperti air dan jalan. Sampai saat ini perjanjian sarana prasarana tidak terpenuhi, ataupun jika sarana dan prasarana sudah terbangun, tidak ada pengelolaan untuk sarana dan prasarana tersebut. Selain itu di daerah yang sama, konflik plasma juga terjadi. Tidak semua masyarakat mendapatkan keuntungan yang sama. Misalnya yang paling miris adalah masyarakat Desa Laja Sandang yang baru mendapatkan Rp.51.000,00 dari hasil plasmanya. Sedangkan desa lain di Kecamatan Semitau bisa mendapatkan lebih dari Rp. 500.000 walaupun hasil tersebut bisa berfluktuasi karena ada pembebanan biaya produksi ke masyarakat yang tidak ada di awal perjanjian serta keuntungan yang sangat dipengaruhi oleh harga jual komoditas di pasar internasional.

4.2 ANALISIS BIODIVERSITAS KAWASAN

Ditinjau dari aspek biodiversitas dan permasalahannya, Wilayah KSK Agropolitan Kapuas Hulu secara umum terbagi ,menjadi tiga wilayah besar, yaitu 1) wilayah utara (mencakup Kec. Empanang dan Kec. Semitau); 2) wilayah Selatan (mencakup Kec. Silat Hilir dan Kec. Silat Hulu); dan 3) wilayah Timur (mencakup Kec. Seberuang, Kec. Hulu Gurung dan Kec. Pengkadan).

Berdasarkan pertimbangan aspek biodiversitas kawasan dan potensi jasa lingkungan yang dimiliki masing-masing wilayah, direkomendasikan arah pengembangan wilayah sebagaimana disajikan pada Tabel IV.27.

Tabel IV.27 Rekomendasi Arah Pengembangan Wilayah Berbasis Biodiversitas dan Jasa Lingkungan

No	Wilayah	Arah pengembangan	
		Biodiversitas	Jasa lingkungan
1	Utara: 1. Kec. Empanang 2. Kec. Semitau	Pengembangan HHBK: Bahan-bahan anyaman rotan dan pandan Budidaya sagu Kebun buah-buahan lokal (tembawang)	Perbaikan tata hidrologi (pembuatan embung dan jaringan irigasi) Penyediaan sarana air bersih
2	Selatan: 1. Kec. Silat Hilir 2. Kec. Silat Hulu	Optimalisasi lahan di luar kawasan hutan melalui pengembangan kebun buah lokal dan pertanian lahan kering Pengembangan HHBK : bahan-bahan anyaman rotan Agroforestry di lahan pekarangan	Pengembangan ekowisata berbasis sungai dan tebing-tebing batu
3	Timur: 1. Kec. Seberuang 2. Kec. Hulu Gurung 3. Kec. Pengkadan	Kebun buah-buahan lokal Lebah madu Budidaya perikanan Pertanian lahan basah Pengembangan kebun sagu dan bamboo penghasil rebung Agroforestry (tanaman kayu, buah-buahan dan tanaman berbunga penghasil pakan lebah)	Ekowisata sungai dan air terjun berwarna (khas gambut) Produksi air mineral

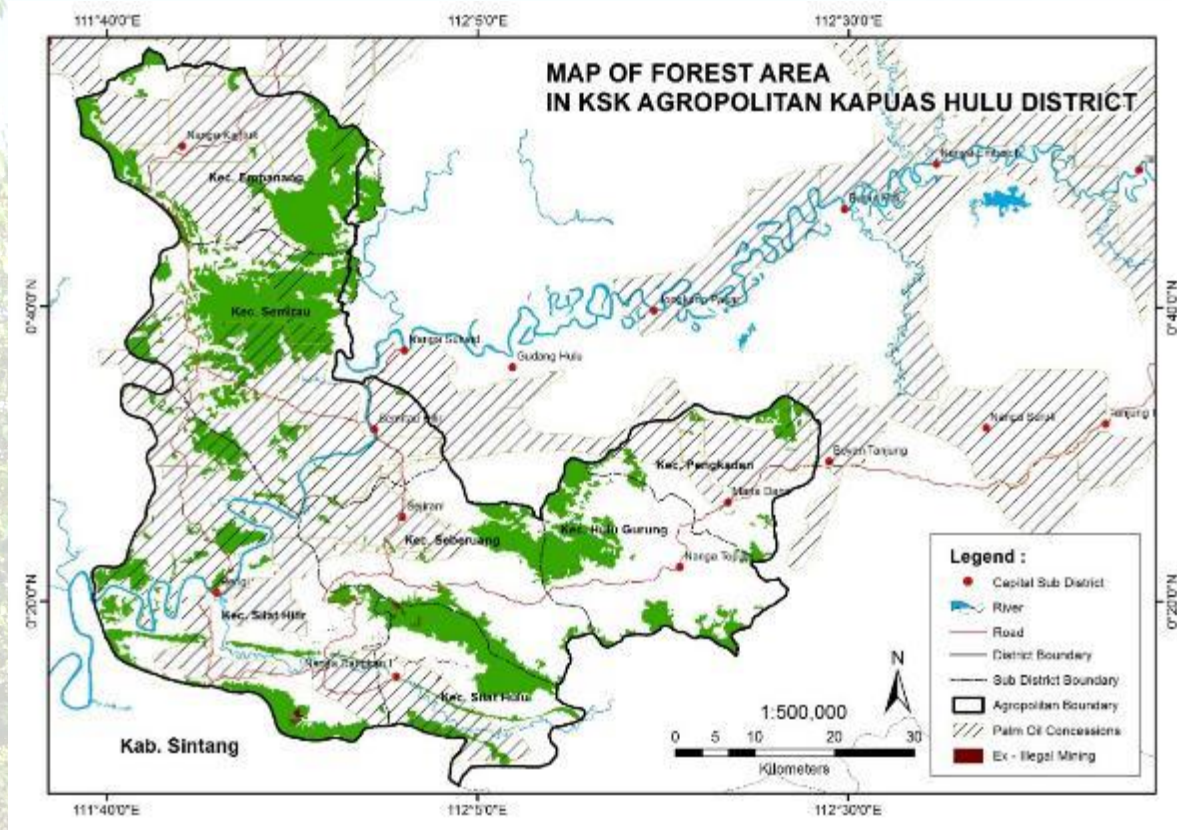
Sumber: Hasil Analisis, 2017

Deskripsi masing-masing arah pengembangan wilayah berdasarkan hasil survey dan wawancara dengan tokoh masyarakat pada lokasi-lokasi sampel diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

4.2.1 Pengembangan Wilayah Utara (Kec. Empanang dan Kec. Semitau)

Kawasan biodiversitas di wilayah utara secara umum telah diinvasi oleh konsesi perkebunan sawit (Gambar IV.38). Hutan-hutan alam yang tersisa juga akan segera digantikan oleh kebun sawit mengingat sudah terdapat izin konsesi dari pemerintah. Status kawasan hutan di wilayah ini sebagian besar ditetapkan sebagai APL (areal penggunaan lain), hanya sebagian kecil saja di wilayah yang berbatasan dengan TN Danau Sentarum yang ditetapkan sebagai hutan lindung. Dampak terbesar yang dialami wilayah ini adalah hilangnya keanekaragaman hayati seiring dengan hilangnya hutan alam dan kesulitan air untuk pertanian dan keperluan MCK.

Gambar IV.38 Sebaran Konsesi Perkebunan Sawit di Wilayah KSK Agropolitan (sumber: WWF 2017)



Sumber: Hasil Analisis, 2017

Hasil pengamatan di lokasi sampling tepatnya di Desa Tuak Abang, Kec. Semitau menunjukkan bahwa hutan alam yang ada di wilayah ini kondisinya masih baik. Hutan-hutan di wilayah ini umumnya berupa hutan rawa gambut terintegrasi dengan hutan kerangas (*heat forest*). Air yang dihasilkan dari hutan-hutan ini umumnya air gambut kemerahan sampai hitam dengan keasaman cukup tinggi, sehingga tidak layak minum. Namun demikian keberadaan hutan rawa gambut ini memberikan manfaat jasa lingkungan berupa pengaturan tata air (hidrologi). Status kawasan hutan yang ditetapkan pemerintah sebagian besar adalah APL, berimplikasi mudahnya konsesi kebun sawit masuk ke wilayah ini dan mengakibatkan kehilangan biodiversitas yang tinggi. Hamparan perkebunan sawit terlihat sangat mendominasi penggunaan lahan, hampir tidak dijumpai lahan-lahan pertanian dan tembawang.

Hasil pengamatan dan wawancara dengan tokoh masyarakat diperoleh informasi bahwa mengingat areal-areal sudah ditetapkan izin konsesinya, masyarakat terlebih dahulu memanfaatkan semaksimal mungkin kayu-kayu yang tersedia di hutan alam yang ada di wilayah mereka dengan menggunakan jasa penebang-penebang kayu dari Sambas. Orang-orang Sambas merupakan kelompok masyarakat dari wilayah Sambas memiliki keterampilan yang tinggi dalam mengeksploitasi kayu khususnya di hutan rawa dan gambut menggunakan peralatan *chainsaw* dan sepeda. Hal ini berimplikasi pada rusaknya hutan-hutan alam primer menjadi hutan-hutan sekunder bekas eksploitasi. Walaupun demikian

masih terlihat kearifan dari para penebang kayu, yaitu tetap ditinggalkannya pohon-pohon kecil untuk keperluan regenerasi hutan lebih lanjut

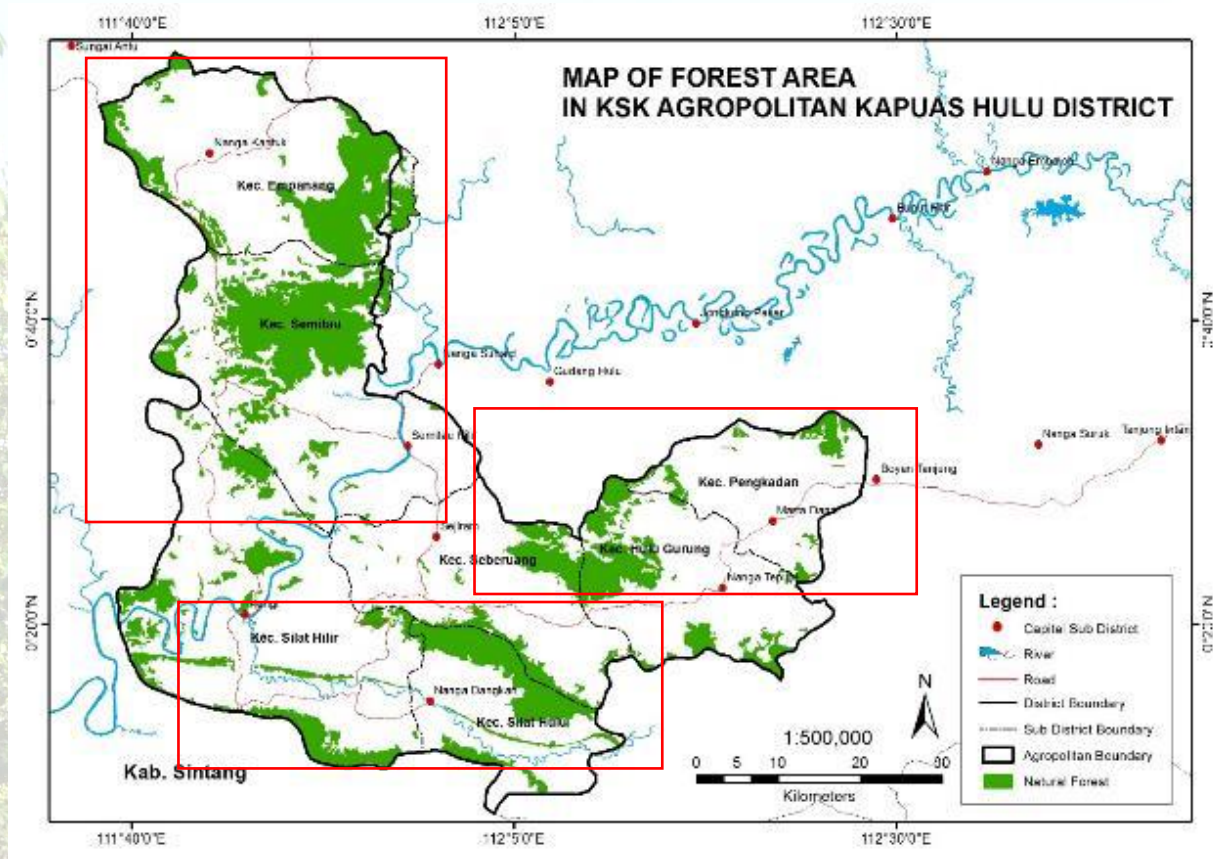
Bentuk pengembangan wilayah yang direkomendasikan di wilayah ini adalah mempertahankan sebagian hutan alam yang masih belum dibuka menjadi cadangan biodiversitas yang disebar di setiap kampung dengan 10% dari luas area konsesi. Hal ini perlu dilakukan selain untuk mempertahankan nilai-nilai biodiversitas, juga sebagai cadangan bagi masyarakat dalam pemanfaatan plasma nutfah lokal dan jaminan pengaturan tata air bagi lingkungan kampung.

Selain hal tersebut juga perlu dilakukan penguatan dalam mendukung kebutuhan hasil hutan bukan kayu (HHBK) melalui pemanfaatan dari hutan maupun pengembangan budidaya tanaman penghasil HHBK antara lain rotan dan pandan untuk bahan anyaman, tanaman sagu untuk menghasilkan tepung, dan lebah madu.

4.2.2 Pengembangan Wilayah Selatan (Kec. Silat Hilir dan Kec. Silat Hulu)

Wilayah Kec. Silat Hilir, Silat Hulu termasuk bagian dari KSK Agropolitan Kapuas Hulu yang menjadi jantung kawasan ini, selain posisinya yang berada di tengah wilayah, juga memiliki hutan-hutan lindung yang relative terjaga dengan baik. Hasil pengamatan secara sampling di wilayah hutan lindung Sui Mali – Sebalang Hulu diperoleh informasi bahwa di wilayah ini terdapat tipe hutan hujan dataran rendah dan hutan gambut topogen di bagian atasnya. Hutan-hutan tersebut menjadi sumber air bersih bagi desa-desa yang ada di sekitarnya. Selain itu masyarakat juga kerap memanfaatkan sumberdaya hutan untuk keperluan hidupnya seperti rotan untuk bahan anyaman dan kayu untuk bahan bangunan rumah.

Gambar IV.39 Peta Sebaran Hutan di Wilayah KSK Agropolitan

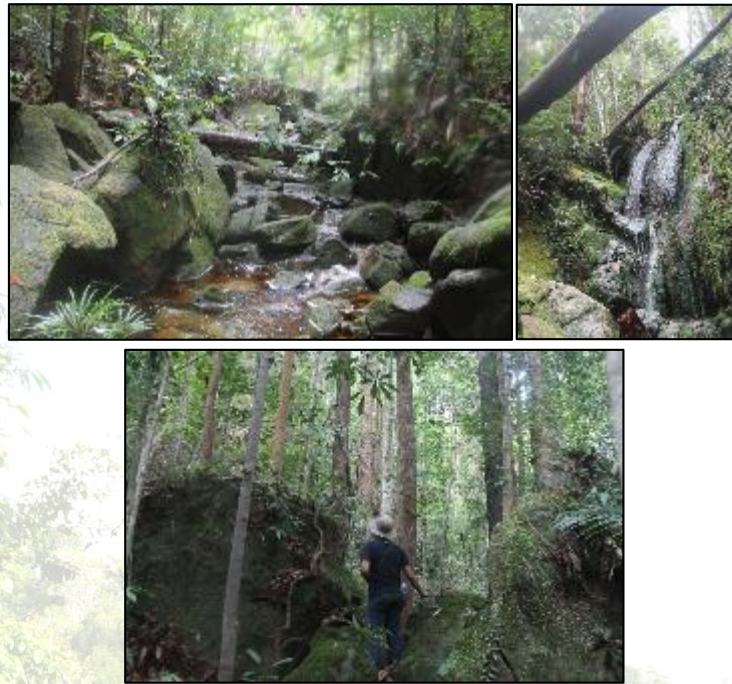


Sumber: Hasil Analisis, 2017

Arah pengembangan terkait aspek biodiversitas di kawasan ini adalah mempertahankan keberadaan hutan-hutan alam untuk perlindungan biodiversitas dan tata air, pengembangan kebun-kebun buah lokal dan tanaman pertanian lahan kering di lahan-lahan luar kawasan hutan. Pengembangan kebun buah lokal dan pertanian lahan kering dapat didukung oleh keberadaan air sungai yang mengalir dari hutan-hutan Bukit Sebalang. Selain hal tersebut di wilayah ini juga memungkinkan dikembangkan pola-pola agroforestry di lahan pekarangan, mengingat masyarakat sudah mulai bercocok tanam memadukan tanaman keras dan tanaman semusim di lahan pekarangan mereka.

Selain pengembangan berbasis lahan di atas, hutan lindung Sui Mali dan Sebalang Hulu memiliki potensi pengembangan ekowisata berbasis sungai berbatu, bahkan pada areal-areal di lereng-lereng bukit terdapat batu-batu terjal dan air terjun yang menarik untuk wisata alam (Gambar IV.40).

Gambar IV.40 Potensi Ekowisata Berbasis Sungai dan Tebing-Tebing Berbatu di Dusun Sui Mali Desa Seberu Kec. Silat Hilir



Sumber: Hasil Analisis, 2017

Pengembangan ekowisata ini diharapkan mampu mengurangi intensitas masyarakat dalam melakukan PETI di kawasan sungai beralih pada usaha-usaha pariwisata alam dan pertanian lahan kering. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat diperoleh informasi bahwa aturan adat sudah diterapkan dalam bentuk denda bagi pelaku-pelaku PETI dengan tujuan dapat menurunkan intensitas kegiatan ini karena dampak lingkungan yang ditimbulkan berupa kerusakan dan pencemaran sungai.

4.2.3 Pengembangan Wilayah Timur (Kec. Seberuang, Kec. Hulu Gurung dan Kec. Pengkadan)

Hutan-hutan di wilayah timur yang mencakup tiga wilayah kecamatan, mencakup Seberuang, Hulu Gurung dan Pengkadan secara umum berada dalam satu hamparan luas, kecuali sebagian di bagian utara Kec. Pengkadan masih satu bagian tak terpisahkan dari hutan-hutan lindung wilayah utara Kab. Kapuas Hulu. Ketergantungan masyarakat setempat dengan hutan sangat tinggi baik untuk keperluan memanfaatkan sumber plasma nutfah juga sebagai penyedia air bagi pertanian intensif. Kecamatan Hulu Gurung menjadi pusat pertanian yang sudah maju, mulai dari pertanian sawah lahan basah, budidaya perikanan, hingga kebun buah-buahan lokal yang sudah berkembang secara turun temurun beberapa generasi (Gambar IV.41).

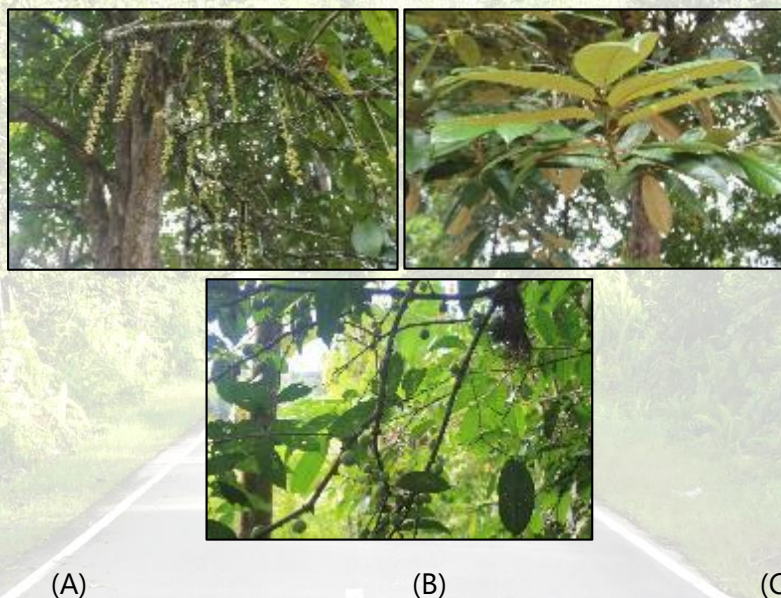
Gambar IV.41 Contoh Pengembangan Berbasis Biodiversitas di Dusun Beluan Desa Lubuk Antuk. A. Budidaya Ikan Arwana, B. Sawah dan Kebun Buah-Buahan Lokal



Sumber: Hasil Analisis, 2017

Jenis-jenis buah-buahan lokal yang sudah dikembangkan secara turun temurun bahkan memberikan kontribusi ekonomi cukup tinggi selain hasil pertanian sawah dan perikanan adalah tanaman durian, kelawai (durian kuning), langsung/duku, rukam dan manggis (Gambar IV.42).

Gambar IV.42 Contoh Jenis-Jenis Tanaman Buah Lokal yang Dikembangkan di Desa Lubuk Antuk. A. Langsung/duku, B. Durian, C. Rukam



Sumber: Hasil Analisis, 2017

Selain hal tersebut di atas, di wilayah Kec. Hulu Gurung, Seberuang dan Pengkadan sangat memungkinkan dikembangkan budidaya sagu. Hal ini didukung oleh hasil observasi di lokasi sampling yang menunjukkan tegakan-tegakan sagu cukup tersedia terutama di areal-areal yang agak berawa atau sekitar sungai. Tanaman sagu juga sudah mulai dimanfaatkan secara subsisten oleh sebagian masyarakat untuk menghasilkan tepung sagu. Pengembangan budidaya tanaman sagu ini diharapkan menjadi alternative peningkatan ekonomi lokal selain pengembangan pertanian lahan basah dan kebun buah-buahan di

atas. Disamping itu, di wilayah ini juga memiliki potensi tegakan bambu yang selama ini dimanfaatkan masyarakat untuk menghasilkan rebung (rumpun bambu muda) untuk bahan pangan dan batang bambu untuk pagar kebun. Pengembangan tanaman bambu juga dapat dipertimbangkan sebagai salah satu bentuk penguatan sumberdaya tanaman lokal.

Gambar IV.43 Potensi Tanaman Sagu dan Bamboo di Lahan-Lahan Masyarakat



Sumber: Hasil Analisis, 2017

Hasil pengamatan lainnya juga menunjukkan tingginya potensi pohon-pohon kempas (*Koompassia malaccensis*) yang secara umum dilindungi masyarakat mengingat pohon-pohon ini merupakan sarang lebah madu hutan (disebut dengan istilah "Lalay" dalam bahasa Dayak). Pohon-pohon kempas ini umum dijumpai di lahan-lahan masyarakat dan di hutan hujan dataran rendah. Pengembangan yang memungkinkan untuk meningkatkan produksi madu dan kontinuitasnya adalah model agroforestry yang memadukan tanaman

kayu dan buah-buahan dipadu pula dengan jenis-jenis penghasil bunga sebagai pendukung sumberdaya pakan bagi lebah.

Bentuk pengembangan lainnya di wilayah Kec. Hulu Gurung ini adalah pemanfaatan jasa lingkungan air dan ekowisata. Hasil survey menunjukkan bahwa di wilayah ini terdapat objek-objek wisata alam berbasis air yang sangat potensial, yaitu di Desa Lubuk Antuk dan Desa Tani Makmur. Objek wisata yang cukup menarik antara lain air terjun berwarna (khas gambut) medang pulang Dusun Sui Medang dan objek wisata sungai Pusaka Tunggal Dusun Senai di Desa Tani Makmur. Desa Lubuk Antuk juga memiliki objek-objek wisata alam berbasis hutan yang cukup menarik antara lain air terjun dan gua-gua.

Gambar IV.44 Objek Wisata Air Terun Berwarna (Khas Gambut) Medang Pulang di Dusun Sui Medang, Desa Tani Makmur, Kec. Hulu Gurung



Sumber: Hasil Analisis, 2017

Gambar IV.45 Objek Wisata Sungai Berwarna (Khas Gambut) Pusaka Tunggal dengan Jeram-Jeram yang Menarik di Dusun Senai, Desa Tani Makmur, Kec. Hulu Gurung



Sumber: Hasil Analisis, 2017

4.3 ANALISIS KEPENDUDUKAN DAN SOSIAL BUDAYA

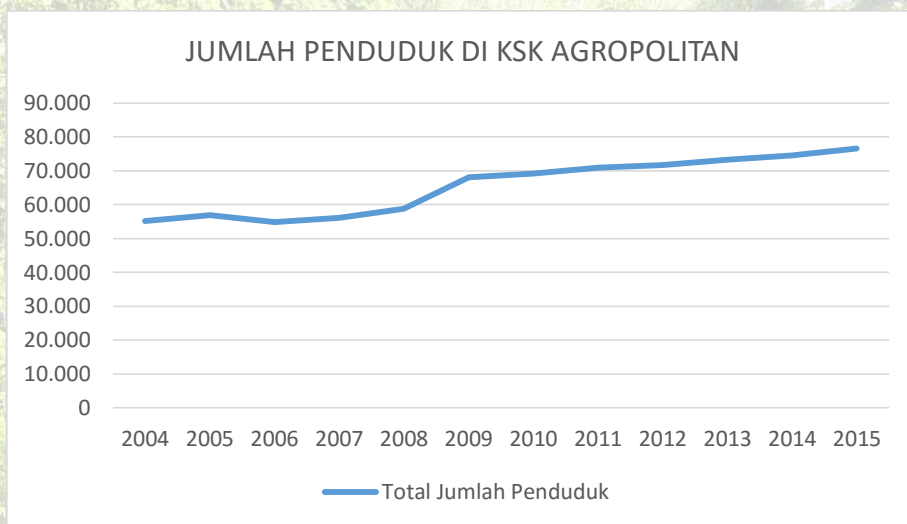
Analisis kependudukan dan sosial budaya dibagi ke dalam dua bagian yaitu analisis kependudukan dan analisis sosial budaya. Analisis kependudukan dilakukan melalui analisis kondisi demografi masyarakat di KSK Agropolitan. Hal – hal yang dianalisis pada analisis kependudukan antara lain jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Sementara itu, analisis sosial budaya dilakukan melalui analisis terhadap stratifikasi sosial, klasifikasi masyarakat, interaksi sosial masyarakat, serta modal budaya dalam masyarakat.

4.3.1 Analisis Kependudukan

4.3.1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk di KSK Agropolitan dihitung dari total jumlah penduduk di 7 kecamatan selama 12 tahun terakhir. Jumlah penduduk di KSK Agropolitan mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun terdapat sedikit fluktuasi antara tahun 2005 hingga 2009. Hal ini dikarenakan pada tahun – tahun tersebut terdapat beberapa kali penggabungan kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Kecamatan Pengkadan pun baru resmi terbentuk di tahun 2009. Meskipun begitu, apabila dilihat secara *trend* maka didapatkan pola kecenderungan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

Gambar IV.46 Jumlah Penduduk di KSK Agropolitan Tahun 2004 - 2015



Sumber: Kabupaten kapuas Hulu Dalam Angka (2016)

Berbeda dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, laju pertumbuhan penduduk di KSK Agropolitan sangat fluktuatif. Pada tahun 2015, rata – rata laju pertumbuhan penduduk di KSK Agropolitan adalah sebesar 2,838 sementara rata – rata laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebesar 2,32. Laju pertumbuhan penduduk ini dapat terbilang kecil sehingga apabila diproyeksikan, jumlah penduduk di KSK Agropolitan maupun di Kabupaten Kapuas Hulu tidak akan meningkat tajam. Pada tahun 2009 terdapat laju pertumbuhan yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut terdapat beberapa penggabungan kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu yang mulanya berjumlah 25 kecamatan menjadi 23 kecamatan. Penggabungan ini mengakibatkan banyaknya penambahan penduduk pada beberapa kecamatan. Namun selanjutnya laju pertumbuhan penduduk kembali normal dari tahun 2010 hingga 2015.

Gambar IV.47 Laju Pertumbuhan Penduduk di KSK Agropolitan Tahun 2005 - 2015



Sumber: Hasil Analisis, 2017

Pada tahun 2015, Kecamatan Semitau adalah kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk yang paling rendah sementara Kecamatan Empanang adalah kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk paling tinggi. Apabila dilihat dari jumlah penduduknya, Kecamatan Empanang memiliki jumlah penduduk paling sedikit namun memiliki laju paling cepat tumbuh. Berkebalikan dengan Kecamatan Silat Hilir yang memiliki jumlah penduduk paling banyak namun lajunya hanya 2,412. Tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di KSK Agropolitan pada tahun 2015.

Tabel IV.28 Perbandingan Jumlah dan Laju Penduduk di KSK Agropolitan Tahun 2015

KECAMATAN	Jumlah Penduduk	Laju Penduduk
SILAT HILIR	18.808	2,41
SILAT HULU	11.887	2,46
HULU GURUNG	13.664	3,14
PENKADAN	8.814	4,15
SEBERUANG	11.420	3,29
SEMITAU	8.850	1,57
EMPANANG	3.165	3,87

Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka (2016)

Berdasarkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, bisa didapatkan gambaran mengenai struktur pertumbuhan penduduk berdasarkan kecamatan. Kecamatan – kecamatan ini dapat dibagi ke dalam 4 (empat) klasifikasi yaitu:

- (1) Daerah maju yaitu daerah yang memiliki jumlah penduduk banyak dan memiliki laju pertumbuhan penduduk yang tinggi
- (2) Daerah maju tapi tertekan yaitu daerah yang memiliki jumlah penduduk banyak namun laju pertumbuhan penduduknya rendah
- (3) Daerah berkembang yaitu daerah yang memiliki jumlah penduduk sedikit namun laju pertumbuhan penduduknya tinggi

(4) Daerah tertekan yaitu daerah yang memiliki jumlah penduduk yang sedikit dan juga laju pertumbuhan penduduk yang rendah

Kecamatan Pengkadan dan Empanang adalah kecamatan yang berpotensi untuk berkembang. Kecamatan Pengkadan memiliki akses yang baik karena dilintasi oleh jalan nasional dan memiliki sarana dan prasarana yang cukup menunjang. Hal ini menarik minat penduduk untuk bermukim. Sementara itu, Kecamatan Empanang yang juga berpotensi untuk berkembang memiliki faktor penarik lain. Kecamatan ini didominasi oleh perkebunan sawit sehingga memungkinkan banyaknya pendatang untuk bermukim di kecamatan ini meskipun saat ini masih belum maju, baik dari penyediaan sarana dan prasarananya maupun kegiatan ekonominya. Sementara itu, Kecamatan Silat Hilir dan Silat Hulu semakin tertekan dengan rendahnya laju pertumbuhan penduduk. Salah satu faktor yang mendorong hal ini adalah rendahnya akses terhadap kedua kecamatan ini, bahkan ibu kota kecamatan pun cukup sulit untuk ditempuh. Tabel di bawah ini menunjukkan pengkalsifikasian pertumbuhan penduduk menggunakan tipologi klasen.

Tabel IV.29 Tipologi Klasen Pertumbuhan Penduduk

Laju Penduduk \ Jumlah Penduduk	TINGGI	RENDAH
	TINGGI	⁽¹⁾ Hulu Gurung Seberuang
RENDAH	⁽²⁾ Silat Hilir Silat Hulu	⁽⁴⁾ Semtau

Sumber: Hasil Analisis, 2017

4.3.1.2 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam pengembangan suatu daerah. Pendidikan dapat menjadi suatu alat untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui bekal pendidikan yang dimiliki oleh satu penduduk, maka diharapkan ilmu tersebut dapat berfungsi untuk memajukan suatu wilayah dengan ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimiliki setelah menempuh dunia pendidikan. Pembangunan pendidikan akan memberikan dampak positif di masyarakat baik dari segi perilaku, sikap, maupun kesadaran untuk dapat meningkatkan kualitas hidup. Kesadaran akan pentingnya pendidikan akan mempengaruhi dan mengubah pola perilaku penduduk menjadi lebih sehat, cerdas, dan produktif. Selain itu, kualitas pendidikan masyarakat juga akan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah.

Pendidikan merupakan alat yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan dan untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jalur pendidikan dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) macam pendidikan yaitu formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

- 1) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- 2) Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- 3) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

A. Pendidikan Formal

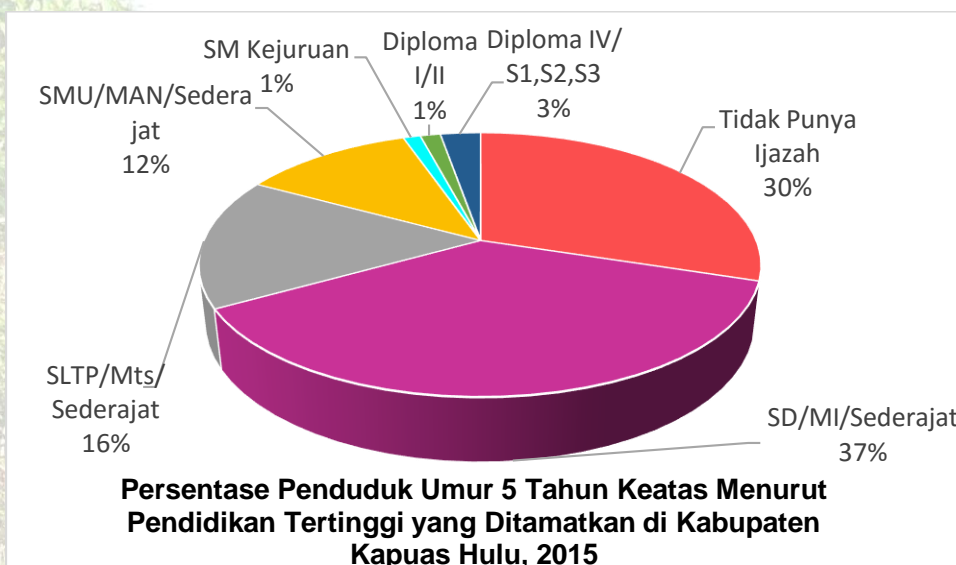
Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan formal maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu kabupaten yang masih memiliki nilai rendah terhadap pendidikan formalnya dimana rata – rata penduduknya hanya menyelesaikan pendidikan di tingkat pendidikan dasar atau setara dengan jenjang pendidikan tingkat SD. Meskipun terdapat beberapa yang sudah mampu hingga pendidikan menengah setara SMP. Hal ini dapat dilihat dari rata – rata lama sekolah penduduk yang hanya mencapai 7 tahun. Apabila dilihat berdasarkan persentasenya, mayoritas penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu pendidikan tertingginya ialah tamatan SD sederajat. Sebanyak 37% penduduk merupakan tamatan SD. Sedangkan urutan kedua terbanyak ialah penduduk yang tidak punya ijazah yaitu sebesar 30%. Sementara untuk pendidikan menengah, terdapat 16% masyarakat lulusan SMP dan 13% masyarakat lulusan SMA/SMK. Hanya terdapat kurang dari 5% masyarakat yang merupakan lulusan pendidikan tinggi.

Rendahnya masyarakat yang mengenyam pendidikan formal dapat disebabkan oleh beberapa hal. Hal yang paling umum terjadi adalah adanya kendala ekonomi yang menyebabkan masyarakat putus sekolah. Masyarakat memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan juga mengetahui pentingnya pendidikan bagi masa depan, namun kondisi ekonomi keluarga yang tidak mendukung menjadi faktor penghambat masyarakat mengenyam pendidikan. Salah satu cara yang paling sering ditempuh masyarakat untuk mengatasi kendala ekonomi dalam menyekolahkan anak – anak mereka ke pendidikan yang lebih tinggi adalah dengan menjual lahan perkebunan mereka ke perusahaan sawit.

Di sisi lain, terdapat juga masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan lebih memilih untuk bekerja dibandingkan sekolah. Hal ini dapat dilihat di Kecamatan Seberuang dan Silat Hulu. Orangtua memiliki keinginan untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi namun anaknya lebih memilih untuk langsung bekerja dibandingkan melanjutkan sekolah. Di Kecamatan Seberuang masyarakat lebih memilih untuk bekerja sebagai buruh kasar di perkebunan sawit sementara di Kecamatan Silat Hulu beberapa masyarakat lebih memilih untuk merantau sehingga keinginan untuk melanjutkan pendidikan kurang. Anak muda di wilayah studi masih belum sadar akan pentingnya pendidikan. Mereka juga memiliki motivasi yang rendah dan pemikiran yang kurang terbuka. Bagi mereka, lulusan SMP pun sama – sama sudah menghasilkan uang khususnya dari buruh sawit. Lingkungan mereka yang mayoritas masyarakatnya bekerja di perkebunan sawit telah membentuk pola pikir seperti itu.

Hal utama yang dikejar dalam hal pendidikan bukanlah mutu atau kualitas dari pendidikan itu sendiri, karena untuk bersekolah pun masih menjadi tantangan. Selain itu, sulitnya akses juga masih menjadi kendala utama masyarakat untuk bersekolah. Kurangnya tenaga pendidik masih menjadi masalah bagi pendidikan di kecamatan – kecamatan KSK Agropolitan. Contohnya saja di Kecamatan Semitau dimana tidak semua mata pelajaran ada tenaga pendiknya. Bahkan di sekolah yang dibangun oleh pihak swasta masih membutuhkan tenaga pendidik dari Jawa karena kurangnya guru di daerah KSK Agropolitan.

Gambar IV.48 Persentase Penduduk Umur 5 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015



Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka (2016)

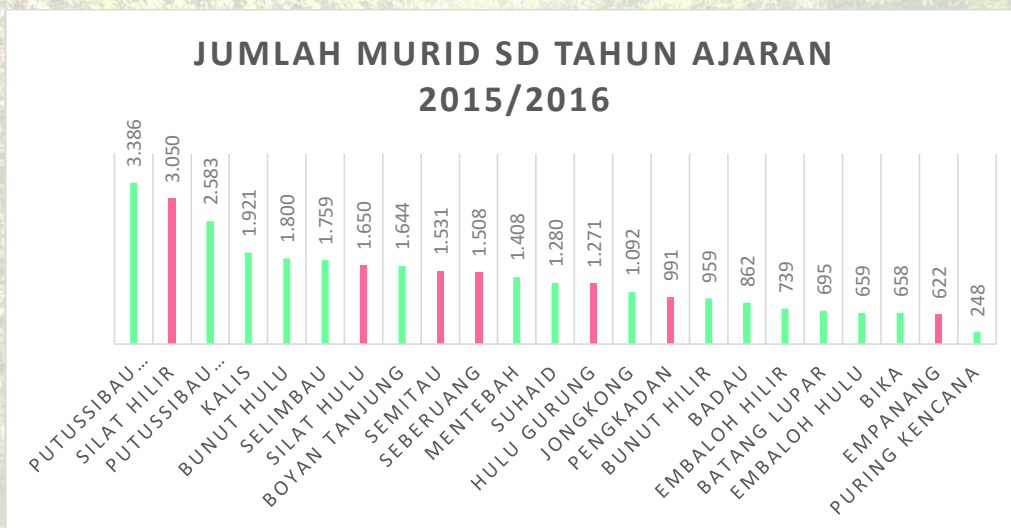
Dilihat berdasarkan jenjang pendidikan, jumlah murid dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) jenjang yaitu jumlah murid SD, jumlah murid SMP, dan jumlah murid SMA. Jumlah murid terbanyak baik pada tingkat SD, SMP, ataupun SMA berada di Kecamatan Putussibau Utara yang merupakan ibukota kabupaten. Banyaknya jumlah murid di Kecamatan Putussibau Utara didukung oleh tersedianya sarana pendidikan yang didukung pula oleh banyaknya tenaga pendidik yang berkualitas. Sementara itu, Kecamatan Puring Kencana adalah kecamatan dengan jumlah murid pada tingkat SD, SMP, dan SMA yang paling sedikit.

Apabila melihat secara spesifik ke kecamatan – kecamatan yang tergabung dalam KSK Agropolitan, Kecamatan Silat Hilir memiliki jumlah murid SD dan SMP lebih banyak diantara 7 kecamatan lainnya. Hal ini sejalan dengan banyaknya jumlah sarana pendidikan di Kecamatan di Silat Hilir yang mencapai 31 buah di tingkat SD dan 6 buah di tingkat SMP, lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan – kecamatan lainnya. Sementara untuk di tingkat SMA, Kecamatan Semitau memiliki murid SMA paling banyak diantara 7 kecamatan lainnya. Apabila dilihat dari jumlah sarana pendidikan, jumlah SMA di Kecamatan Semitau hanya berjumlah 3 buah sementara sarana pendidikan di tingkat SMA yang paling banyak berada di Kecamatan Silat Hilir. Salah satu hal yang dapat menyebabkan banyaknya jumlah murid SMA di Kecamatan Semitau adalah karena baiknya kualitas pendidikan dan

mudahnya akses untuk mencapai daerah tersebut. Kondisi seperti ini memungkinkan untuk menarik murid – murid lain di luar Kecamatan Semitau untuk bersekolah di Kecamatan Semitau. Sedangkan Kecamatan Empanang, memiliki jumlah murid SD, SMP, dan SMA paling sedikit diantara 7 kecamatan KSK lainnya. Bahkan tidak hanya dalam lingkup KSK, dalam lingkup kabupaten pun Kecamatan Empanang memiliki jumlah murid SD, SMP, dan SMA paling sedikit setelah Kecamatan Puring Kencana. Dilihat dari pembangunannya, memang Kecamatan Empanang dan Kecamatan Puring Kencana adalah kecamatan paling tertinggal, begitu pula dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Bahkan, Kecamatan Empanang tidak memiliki murid SMA yang berarti bahwa seluruh masyarakat Empanang putus sekolah hingga tingkat SMP atau murid SMA di Kecamatan Empanang bersekolah di luar kecamatan.

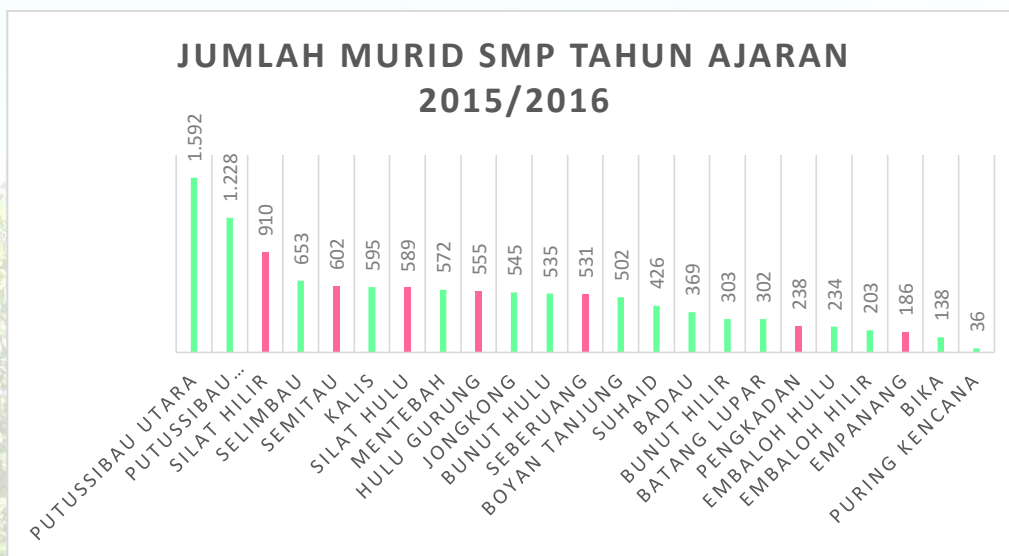
Pada KSK Agropolitan, terdapat 2 SMK yang terfokus di bidang pertanian. SMK tersebut berada di Kecamatan Hulu Gurung dan Kecamatan Silat Hilir. Berdasarkan hasil wawancara, tingkat antusiasme masyarakat untuk bersekolah di SMK lebih tinggi dibandingkan dengan bersekolah di SMA. Masyarakat berpikir bahwa dengan melanjutkan pendidikan ke SMK akan mempermudah mereka dalam mendapatkan pekerjaan. Namun sayangnya saat ini belum semua kecamatan memiliki SMK. Keberadaan SMK dapat menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan untuk meningkatkan kapasitas pendidikan masyarakat yang memiliki keahlian khususnya di bidang pertanian. Gambar di bawah ini adalah grafik jumlah murid SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Kapuas Hulu per kecamatan pada tahun ajaran 2015/2016.

Gambar IV.49 Jumlah Murid SD Tahun Ajaran 2015/2016



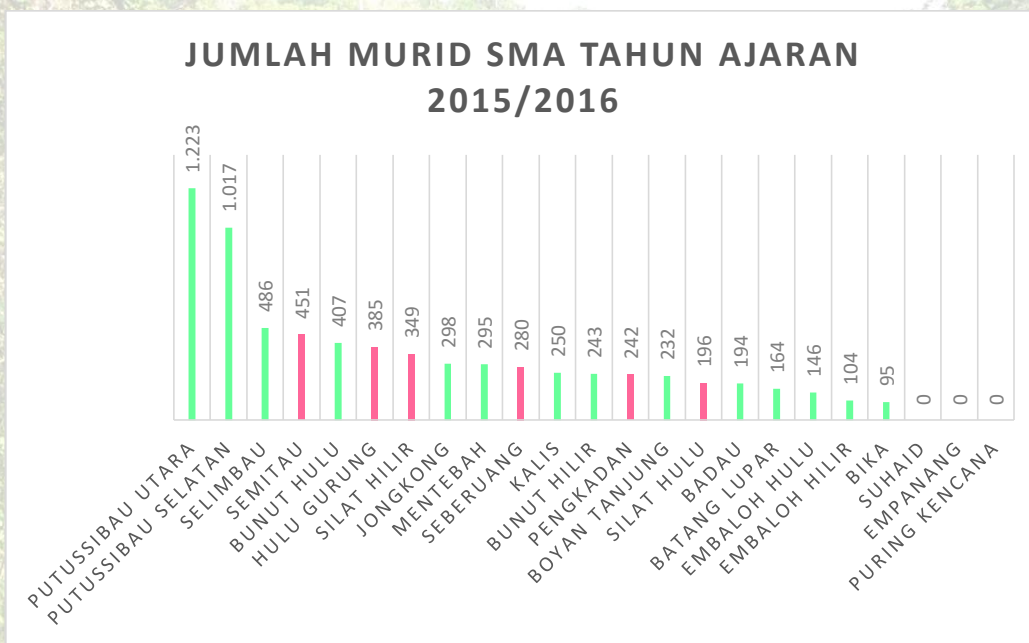
Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka (2016)

Gambar IV.50 Jumlah Murid SMP Tahun Ajaran 2015/2016



Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka (2016)

Gambar IV.51 Jumlah Murid SMA Tahun Ajaran 2015/2016



Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka (2016)

Tabel IV.30 Perbandingan Jumlah Murid dengan Jumlah Penduduk di KSK Agropolitan

KECAMATAN	SD	SMP	SMA	JUMLAH MURID	JUMLAH PENDUDUK	JML MURID / JML PENDUDUK (%)
SILAT HILIR	3.050	910	349	4.309	18.808	22,91
SILAT HULU	1.650	589	196	2.435	11.887	20,48
HULU GURUNG	1.271	555	385	2.211	13.664	16,18
PENKADAN	991	238	242	1.471	8.814	16,69
SEBERUANG	1.508	531	280	2.319	11.420	20,31
SEMITAU	1.531	602	451	2.584	8.850	29,20
EMPANANG	622	186	0	808	3.165	25,53

Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka (2016)

B. Pendidikan Nonformal

Kegiatan pendidikan non formal berfungsi sebagai penambah bagi pendidikan formal apabila pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik dari pendidikan formal belum memadai. Pendidikan yang diajarkan melalui pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Lembaga – lembaga yang dapat menjalankan pendidikan nonformal disebut sebagai satuan pendidikan nonformal yang dapat terdiri dari lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Badan Penyuluh Pertanian (BPP) merupakan salah satu lembaga pendidikan non formal yang berfungsi untuk meningkatkan keterampilan dan pelatihan kerja di bidang pertanian. BPP membantu petani untuk memberikan penyuluhan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan masyarakat dalam bertani sehingga dapat meningkatkan kualitas masyarakat pertanian. BPP merupakan sebuah badan yang berada di bawah Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Hulu. Di KSK Agropolitan sendiri terdapat 4 BPP yang tersebar di 7 kecamatan antara lain BPP Pengkadan, BPP Hulu Gurung, BPP Semitau dan Seberuang (digabung), BPP Silat Hulu dan Silat Hilir (digabung). Kehadiran BPP di kecamatan telah membantu meningkatkan kualitas dan produktivitas petani. Sebagai contoh, BPP telah membuka pikiran masyarakat untuk menjual padi hasil panen mereka yang sebelumnya masih menjadi hal yang tabu di masyarakat terkait dengan pamali. Keterbukaan pemikiran masyarakat ini melalui beberapa pemahaman yang disampaikan oleh BPP dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas bertani masyarakat serta meningkatkan penghasilan dari hasil panen. Selain itu, adanya BPP juga melatih masyarakat untuk membudidayakan pertanian yang sebelumnya tidak mereka tekuni. Sebagai contoh, masyarakat di KSK Agropolitan cenderung memiliki lebih dari satu pekerjaan, selain berkebun mereka juga bertani atau beternak. Adanya BPP membantu para petani yang baru menekuni bidang – bidang lain, misalnya BPP membantu petani karet yang ingin membudidayakan arwana atau lele. Saat ini BPP di KSK Agropolitan hanya berfungsi sebagai tempat pelatihan dan penyuluhan bagi masyarakat sementara di daerah lain (BPP Jambi) BPP juga menjadi Tempat Uji Kompetensi bagi profesi – profesi pertanian khususnya sawit. Masyarakat terdampak perkebunan sawit seharusnya dapat memanfaatkan BPP sebagai wadah untuk meningkatkan keahlian serta untuk mendapatkan sertifikasi profesi agar masyarakat tidak hanya menjadi buruh kasar di perkebunan sawit.

Di bawah BPP terdapat para penyuluh pertanian atau biasa disebut sebagai PPL. PPL ini adalah orang yang berinteraksi langsung dengan para petani untuk memberikan pelatihan, penyuluhan, serta pendampingan pertanian. Sayangnya jumlah PPL yang ada saat ini dianggap masih kurang. Satu orang PPL dapat memegang beberapa kecamatan. Hal ini menguras tenaga PPL karena jarak tempuh dari satu kecamatan dan kecamatan lainnya cukup jauh. Akibatnya, kinerja PPL tidak lagi maksimal. Padahal, PPL merupakan tenaga ahli yang dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan pertaniannya. PPL merupakan

media yang dapat digunakan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan non formal di bawah lembaga BPP.

Selain BPP, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja juga bisa didapatkan dari salah satu lembaga pelatihan yang dibangun oleh Grup Sinarmas sebagai salah satu bentuk CSR. Sinarmas membuka Pusat Pelatihan dan Pendidikan Masyarakat (P3M) di Kecamatan Semitau. Kecamatan Semitau juga menjadi salah satu lokasi perkebunan sawit milik perusahaan sinarmas. P3M ini dibuka untuk masyarakat terdampak perkebunan, namun tidak menutup kemungkinan untuk dapat diakses oleh masyarakat umum. Pelatihan yang diberikan P3M tidak hanya di bidang pertanian saja namun juga hal lain seperti pelatihan menjahit. Sayangnya, keberadaan balai pelatihan ini tidak banyak diketahui masyarakat sehingga keberadaannya belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan masyarakat.

Beberapa pendidikan nonformal lainnya dapat terlihat di KSK Agropolitan. Salah satunya adalah pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan sangat kental di KSK Agropolitan melalui kepastoran atau majelis taklim. Kepastoran atau majelis taklim menjadi wadah untuk mendapatkan pendidikan keagamaan. Selain keagamaan, kepastoran dan majelis taklim ini juga aktif melaksanakan kegiatan – kegiatan kemanusiaan.

C. Pendidikan Informal

Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Salah satu bentuk pendidikan informal yang diajarkan oleh keluarga ialah nilai – nilai dasar kehidupan yang akan membentuk sikap dan perilaku anak di masa yang akan datang. Kabupaten Kapuas Hulu khususnya KSK Agropolitan masih memegang teguh adat istiadat dan kebudayaan mereka baik dari Suku Dayak maupun Suku Melayu. Kebudayaan tersebut memiliki nilai – nilai kehidupan yang diajarkan secara turun temurun. Nilai – nilai tersebut diturunkan oleh keluarga namun dapat juga dilakukan oleh penggawa / temanggung sebagai tokoh adat yang menjaga nilai – nilai tersebut. Pendidikan informal ini sudah dan masih dilakukan oleh masyarakat di KSK Agropolitan. Bahkan, pendidikan informal ini menjadi acuan dan tuntunan dalam berkehidupan masyarakat.

4.3.1.3 Kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sumberdaya manusia serta meningkatkan angka harapan hidup. Pembangunan kesehatan diarahkan juga untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Masyarakat yang sehat merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif untuk pengembangan wilayah. Secara kuantitatif, kondisi kesehatan masyarakat dapat dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Pada tahun 2015, Angka Kematian Ibu mengalami penurunan yaitu 270/100.000 kelahiran hidup. Begitu pula dengan Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami penurunan sebesar 15/1.000 kelahiran hidup. Secara

agregat, Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 71,94. Namun angka tersebut mengalami stagnansi sejak tahun 2014.

Ketersediaan sarana kesehatan di 7 kecamatan KSK Agropolitan sudah memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, tenaga kesehatan yang tersedia masih kurang. Berdasarkan hasil wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) diketahui bahwa di Kecamatan Seberuang, Pengkadan, Semitau dan Silat Hulu masih kekurangan tenaga kesehatan. Di Kecamatan Silat Hulu, sudah dibangun puskesmas dari tahun 2016 namun hingga saat ini belum dikarenakan karena tidak adanya tenaga kesehatan. Di Desa Padung Kumang Kecamatan Semitau bahkan tidak memiliki tenaga medis sehingga tenaga medisnya digabung dengan Desa Tua Abang. Hal yang sama juga terjadi di Desa Entipan Kecamatan Semitau dimana adanya kekurangan tenaga medis, sementara itu masyarakat harus menempuh jarak yang cukup jauh dan akses yang sulit untuk menuju sarana kesehatan lainnya. Sementara itu, di Kecamatan Seberuang, keberadaan tenaga medis yang minim menyebabkan tenaga medis perlu bolak – balik ke beberapa sarana kesehatan yang ada. Padahal, jarak menuju sarana kesehatan ada yang mencapai 17km. Selain tenaga medis, keberadaan dukun masih menjadi alternatif bagi beberapa masyarakat seperti di Kecamatan Empanang dan Semitau untuk menjalani pengobatan. Bahkan, di Kecamatan Empanang, masyarakat lebih memilih untuk berobat ke dukun dibandingkan ke tenaga medis.

Hal lain yang harus diperhatikan dalam menganalisis kesehatan masyarakat adalah menganalisis gaya hidup masyarakat. Gaya hidup masyarakat di KSK Agropolitan belum menerapkan gaya hidup sehat. Masyarakat juga belum menyadari pentingnya gaya hidup sehat. Masyarakat di wilayah studi masih bergantung pada sungai sebagai sumber air utama. Masyarakat memanfaatkan sungai untuk keperluan mandi, cuci, kakus (MCK) bahkan untuk sumber air minum. Berdasarkan data sarana prasarana, dari 7 kecamatan di KSK Agropolitan, 53,8% rumah tangga belum memiliki tempat buang air besar pribadi, 39% memiliki tempat buang air besar pribadi, 3,89% menggunakan tempat buang air besar bersama, sisanya umum. Rendahnya fasilitas MCK yang dimiliki masyarakat mengakibatkan tingginya kebergantungan masyarakat untuk melakukan keperluan MCK di sungai. Selain dari tingkat ketersediaan yang kurang, terdapat pula faktor kebiasaan yang mengakibatkan masyarakat tetap menggunakan sungai untuk keperluan MCK. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang sudah mempunyai tempat buang air besar pribadi namun masih menggunakan sungai untuk keperluan MCKnya khususnya bagi masyarakat yang memiliki rumah di pinggir sungai ataupun di dekat sungai. Masyarakat di pinggir sungai rata – rata memiliki *lanting* yang digunakan untuk keperluan MCK. *Lanting* tersebut biasanya digunakan secara komunal.

Kebiasaan masyarakat untuk memanfaatkan air sungai tidak diikuti dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat. Saat ini, masyarakat masih membuang sampah di sungai. Padahal, sungai tersebut adalah sungai yang sama dengan sungai yang mereka gunakan untuk keperluan sehari-hari. Selain tercemar oleh sampah, sungai yang biasa masyarakat gunakan juga banyak tercemar oleh limbah peti maupun limbah sawit. Tingkat pencemaran sungai cukup tinggi dan berdampak pada kesehatan masyarakat. Di Kecamatan Empanang, diare merupakan penyakit yang paling sering diderita oleh masyarakat. Bahkan, diare sampai

menyebabkan beberapa masyarakat meninggal. Selain diare, beberapa penyakit kulit juga pernah dialami oleh masyarakat di wilayah studi akibat adanya pencemaran air sungai tersebut.

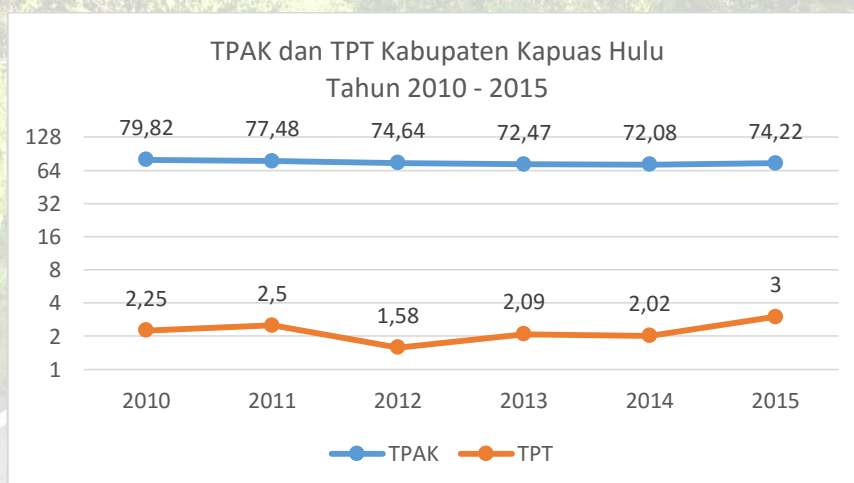
4.3.1.4 Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja yakni dalam rentang usia 15 hingga 64 tahun atau disebut juga sebagai rentang usia produktif. Berdasarkan jumlah penduduk menurut usia, terdapat 74,69% penduduk yang berada pada rentang usia produktif. Maka, rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebesar 33,88%. Hal ini berarti pada tahun 2015, 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Kapuas Hulu hanya menanggung 34 penduduk usia tidak produktif. Banyaknya usia produktif di Kabupaten Kapuas Hulu dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya ialah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki sumber daya manusia yang banyak untuk membangun dan mengembangkan daerahnya. Namun hal ini akan menjadi dampak negatif apabila sumber daya manusia yang banyak tersebut tidak terserap oleh lapangan kerja yang justru hanya akan meningkatkan tingkat pengangguran di Kabupaten Kapuas Hulu.

A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Dalam hal partisipasi angkatan kerja, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 74,22% pada tahun 2015. Semenjak tahun 2010, TPAK di Kabupaten Kapuas Hulu terus mengalami penurunan namun pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2015, TPT di Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 3%. Angka ini mengalami peningkatan cukup besar dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 2,02%.

Gambar IV.52 Perbandingan TPAK dan TPT Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2010 - 2015



Sumber: BPS Kabupaten Kapuas Hulu, 2017

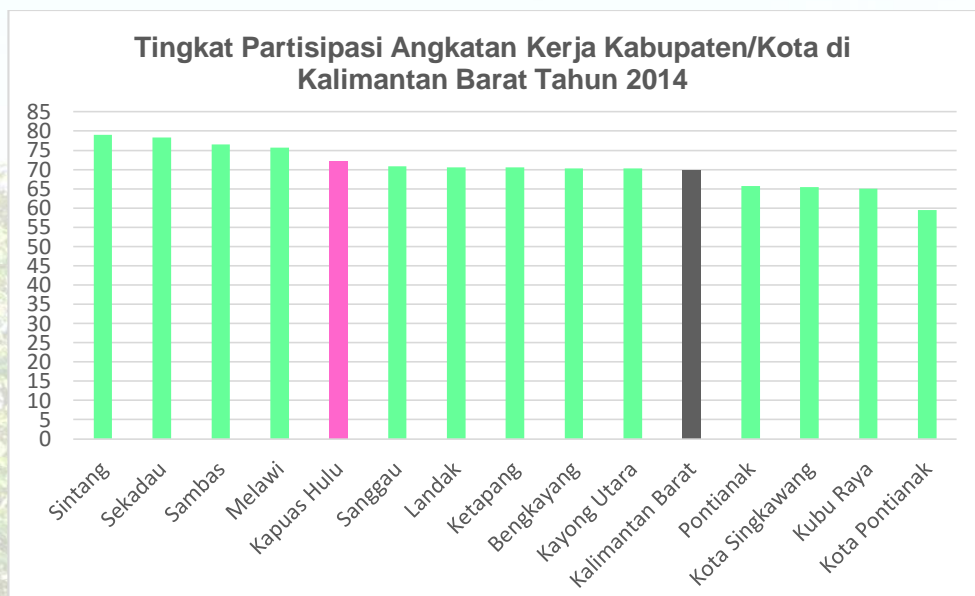
Nilai TPAK yang tinggi di Kabupaten Kapuas Hulu dapat diartikan bahwa tidak hanya penduduk laki – laki yang bekerja namun juga penduduk perempuan. Perempuan – perempuan di lokasi studi kebanyakan bertani namun ada juga yang berladang. Dalam mengolah lahan, suami istri mengerjakannya bersama – sama. Tingginya partisipasi perempuan dalam bertani telah memunculkan beberapa gerakan dari berbagai LSM

maupun NGO untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas perempuan dalam bertani. Salah satunya adalah program penguatan ibu – ibu petani padi yang berlokasi di Kecamatan Hulu Gurung. Program ini mengenalkan metode pertanian yang terstruktur dimana ibu – ibu diajarkan untuk mengelola lahan pertanian mereka, bukan hanya ditanam lalu ditinggal hingga panen.

Meskipun Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tren TPAK yang terus menurun dan TPT yang terus meningkat, nilai TPAK dan TPT di Kapuas Hulu masih lebih baik dibandingkan dengan kabupaten – kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Barat. Bahkan, nilai TPAK Kabupaten Kapuas Hulu jauh di atas TPAK Provinsi Kalimantan Barat serta nilai TPT Kabupaten Kapuas Hulu jauh di bawah TPT Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sintang adalah kabupaten dengan TPAK paling tinggi. Berdasarkan karakteristik wilayahnya, Kabupaten Sintang sudah berbentuk perkotaan dimana lebih banyak tersedianya lapangan pekerjaan yang bervariasi. Secara geografis, kecamatan – kecamatan dalam KSK Agropolitan di Kabupaten Kapuas Hulu berdekatan dengan Kabupaten Sintang. Hal ini dapat menjadi peluang lapangan pekerjaan bagi penduduk usia produktif di Kabupaten Kapuas Hulu agar dapat mengurangi tingkat pengangguran.

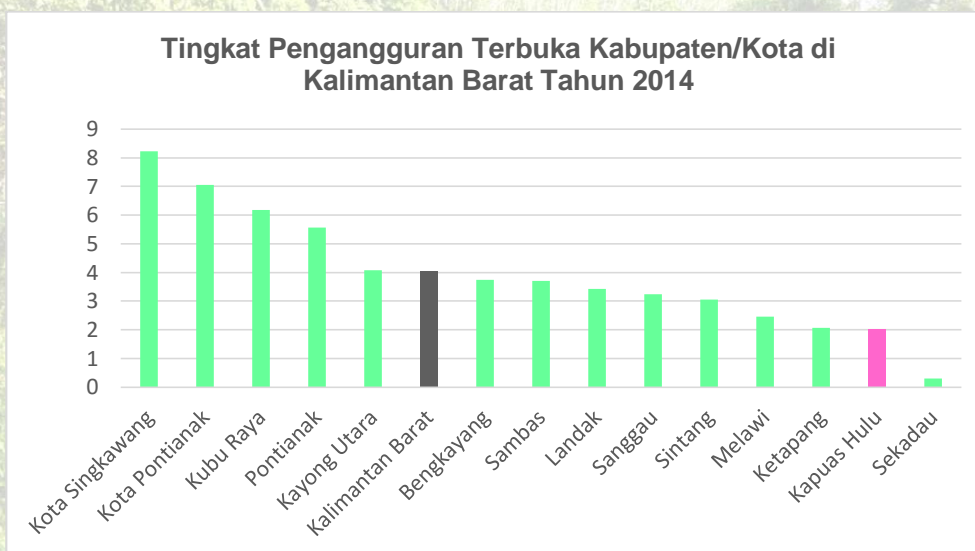
Tingginya tingkat pengangguran di KSK Agropolitan adalah karena sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Mayoritas masyarakat di KSK Agropolitan tidak terbiasa untuk berwirausaha sehingga mereka bergantung pada lapangan kerja yang ada. Padahal, masyarakat di KSK Agropolitan memiliki lahan pertanian yang cukup luas yang apabila diusahakan dapat menjadi mata pencaharian utama masyarakat. Rendahnya kemampuan masyarakat untuk berwirausaha telah menghambat pengembangan pertanian di KSK Agropolitan. Selain itu juga masih banyak masyarakat yang memandang rendah pertanian. Hal ini khususnya terjadi di Kecamatan Hulu Gurung. Oleh karena itu, banyak anak muda yang tidak ingin bekerja sebagai petani. Lapangan pekerjaan lain yang paling memungkinkan di wilayah studi ialah bekerja di perkebunan sawit. Namun berdasarkan kapasitas dan kualitas masyarakatnya, mereka pun hanya mampu bekerja sebagai buruh kasar. Oleh karena itu, tidak jarang masyarakat yang memilih untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Kota Pontianak, Kabupaten Sintang, dan Malaysia menjadi daerah – daerah tujuan masyarakat untuk mencari pekerjaan.

Gambar IV.53 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat Tahun 2014



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2017

Gambar IV.54 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat Tahun 2014

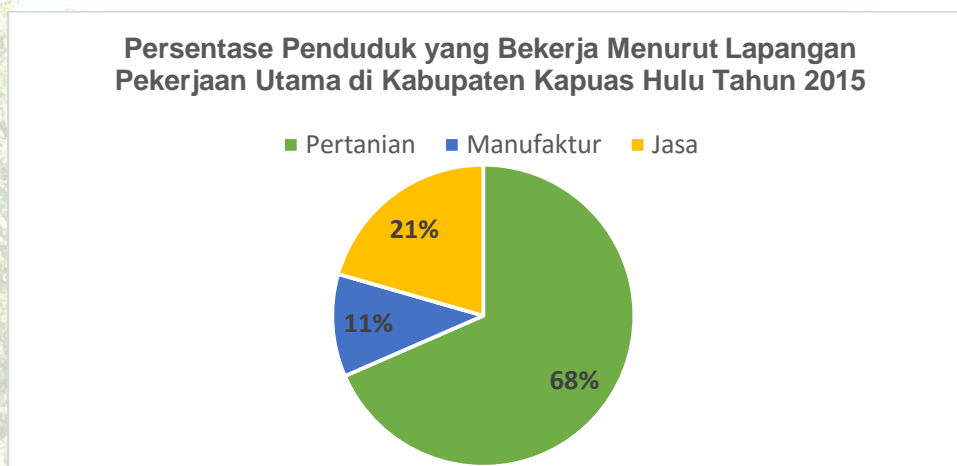


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2017

Persebaran tenaga kerja di Kabupaten Kapuas Hulu didominasi pada sektor pertanian. Sebanyak 68% masyarakat bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian masih menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Sementara itu, terdapat 21% masyarakat yang bekerja di sektor jasa dan hanya terdapat 11% masyarakat yang bekerja di sektor manufaktur. Berdasarkan komposisi persebaran tenaga kerja berdasarkan sektor, masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu masih sangat bergantung pada sektor pertanian. Sektor pertanian juga masih menjadi sektor yang berkontribusi paling besar bagi PDRB Kabupaten Kapuas Hulu. Namun, dilihat dari trennya, kontribusi sektor pertanian ini semakin menurun setiap tahunnya meskipun masih menjadi basis. Hal ini perlu diperhatikan

mengingat banyaknya masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian. Masyarakat diharapkan tidak hanya bergantung pada sektor pertanian saja melainkan sektor – sektor lain yang pertumbuhannya sedang meningkat. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Gambar IV.55 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015



Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka (2016)

B. Kapasitas Masyarakat Pertanian

Dibentuknya KSK di bidang agropolitan merupakan salah satu langkah untuk dapat mengembangkan sektor pertanian yang menjadi sektor unggulan untuk mendukung perekonomian kabupaten. Berdasarkan hasil analisis, sektor pertanian merupakan sektor ekonomi unggulan di wilayah studi. Pengembangan sektor pertanian perlu didukung oleh kapasitas masyarakat yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidang pertanian. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis mengenai kapasitas masyarakat di bidang pertanian.

Mayoritas pekerjaan masyarakat di KSK Agropolitan adalah bertani, berkebun, atau berladang. Pekerjaan tersebut sudah menjadi pekerjaan turun menurun sejak jaman dahulu. Oleh karenanya, masyarakat masih menggunakan cara tradisional dalam bertani. Cara tradisional tersebut adalah masyarakat tidak memelihara komoditas yang mereka tanam. Mereka terbiasa untuk menanam lalu meninggalkan tanamannya dan baru akan diperhatikan lagi saat akan panen. Hal ini juga dilatar belakangi oleh jenis tanaman yang biasa dibudidayakan oleh masyarakat yaitu karet. Selain menggunakan cara yang tradisional, masyarakat juga belum memanfaatkan teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian mereka.

Secara kondisi lahan, kecamatan – kecamatan di KSK Agropolitan memiliki sumber daya yang melimpah yang memungkinkan untuk ditanami komoditas – komoditas baru seperti sayur – sayuran, buah – buahan, dan tanaman pangan. Namun, masyarakat belum mampu memanfaatkan lahan untuk mengembangkan komoditas lain. Selama ini, masyarakat belajar bertani dan berladang secara otodidak. Mereka tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk membudidayakan komoditas lain selain karet. Kebanyakan masyarakat hanya coba – coba dalam budidaya tanaman lainnya sehingga hasilnya pun tidak begitu

memuaskan. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam membudidayakan pertanian salah satunya dikarenakan minimnya pendampingan dan pelatihan bagi masyarakat. Selama ini, pelatihan yang diberikan ke masyarakat tidak pernah sampai tuntas. Masyarakat hanya menerima pelatihan namun tidak diberikan pendampingan untuk membudidayakan pertanian hingga berhasil dipanen. Padahal, dengan latar belakang pendidikan petani yang cukup rendah, mereka tidak mampu menerima pengajaran melalui pendidikan lisan melainkan butuh fasilitator untuk memberikan contoh secara praktik atau langsung. Oleh karenanya, tidak jarang bantuan – bantuan yang diberikan pemerintah dapat dimanfaatkan dengan baik. Sebagai contoh, pemerintah memberikan bantuan bibit salah satu jenis komoditas, bibit tersebut dibudidayakan oleh petani dengan pengetahuan seadanya. Setelah selesai panen, komoditas tersebut tidak ditanam lagi oleh petani karena berbagai kendala seperti modal dan pengetahuan.

Secara konsep hulu ke hilir, petani di KSK Agropolitan pun belum sadar akan pentingnya agrobisnis. Mereka belum menjadikan budidaya pertanian sebagai sumber pendapatan ekonomi namun lebih pada pemenuhan kehidupan sehari – hari. Komoditas tanaman pangan, sayur – sayuran, dan buah – buahan yang ditanam masyarakat hanya cukup untuk memenuhi kehidupan sehari – hari. Adapun komoditas yang dijual hanya pada skala lokal yaitu dijual ke tetangga atau pasar lokal dengan jumlah produksi yang sedikit. Pada pengembangan agropolitan, dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk dapat berorientasi pada pasar. Bahkan, dibutuhkan pula pemahaman masyarakat akan pentingnya pengolahan hasil pertanian agar dapat memberikan nilai tambah pada komoditas pertanian.

Secara umum, keahlian dan keterampilan masyarakat dalam bertani masih belum mampu mendorong pengembangan agropolitan. Dibutuhkan sebuah perubahan dalam cara bertani masyarakat. Masyarakat perlu mempelajari cara bertani modern untuk membudidayakan komoditas secara lebih efektif dan efisien. Masyarakat juga memerlukan pengetahuan untuk dapat melakukan diversifikasi produk pertanian agar masyarakat tidak bergantung pada satu jenis komoditas saja. Secara ekonomi, adanya diversifikasi komoditas yang dibudidayakan petani akan membuat perekonomian lebih berkelanjutan karena apabila harga suatu komoditas anjlok masih dapat diselamatkan dari komoditas lain. Namun, rendahnya pendidikan masyarakat berimplikasi pada rendahnya nilai tambah yang didapat oleh masyarakat serta tidak mampunya masyarakat untuk melakukan diversifikasi dan inovasi pengolahan produk pertanian.

Cara pandang masyarakat terhadap pertanian pun menjadi salah satu kendala dalam pengembangan agropolitan. Masyarakat yang belum sadar agrobisnis tidak akan mengerti situasi pasar. Masyarakat belum mampu melihat peluang pasar atas berbagai komoditas yang mungkin dikembangkan. Oleh karenanya, sedikit sekali keinginan masyarakat untuk menjual produk pertaniannya. Mereka tidak memiliki akses maupun gambaran terhadap pasar yang dapat menampung komoditas mereka. Selain cara pandang, kebiasaan budidaya pertanian masyarakat yang tidak terbiasa untuk mengolah pertanian juga menjadi hambatan. Petani membutuhkan bekal berupa kerja keras, keuletan, dan kesabaran untuk dapat berhasil di bidang pertanian.

C. Etos Kerja

Etos adalah sikap mendasar terhadap diri dan dunia yang dijadikan sebagai prinsip bagi individu dalam mengambil keputusan (Geertz, 1982). Sementara itu, etos kerja dapat diartikan sebagai sikap yang muncul atas kehendak dan kesadaran sendiri yang didasari oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja (Pelly, 1992). Etos kerja mempunyai dasar dari nilai budaya dimana kebiasaan yang berlaku dalam kebudayaan mereka menjadi dasar pembentuk etos kerja masing – masing pribadi. Pendapat lain juga mengemukakan bahwa etos kerja merupakan konsep tentang kerja yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang yang diwujudkan dalam perilaku bekerja mereka. Etos kerja menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan pengembangan ekonomi masyarakat. Berikut adalah beberapa identifikasi terhadap etos kerja masyarakat yang berada di wilayah kawasan strategis kabupaten (KSK) agropolitan Kapuas Hulu.

Bekerja keras dalam bekerja

Masyarakat di wilayah studi mayoritas bermata pencaharian sebagai petani namun dengan berbagai sub-bidang pertanian. Biasanya, setiap orang merupakan gabungan dari petani kebun, petani sawah, dan petani ternak. Jarang sekali masyarakat yang hanya bekerja di satu bidang pertanian saja. Namun pekerjaan utama mereka adalah petani karet. Di samping karet, biasanya mereka juga berladang, bertani sawah atau tanaman pangan, beternak ikan arwana atau walet, atau bahkan membuat kerajinan seperti menenun. Dalam 1 hari, setiap orang mampu mengerjakan berbagai pekerjaan. Keseharian masyarakat dimulai dari menoreh karet di pagi hari atau bekerja di kebun sawit, di siang hari menuju sore mereka melakukan pekerjaan lain seperti berladang atau bertani. Sore harinya biasanya mereka mengambil hasil torehan karet. Dapat dikatakan bahwa produktivitas masyarakat di KSK Agropolitan cukup tinggi.

Belum berorientasi pada kesuksesan material

Secara sistem ekonomi, kondisi masyarakat yang membudidayakan beberapa komoditas pertanian dapat dibidang baik dan berkelanjutan karena tidak bergantung pada satu mata pencaharian saja. Namun, banyaknya jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat tidak berorientasi pada kesuksesan material. Masyarakat cenderung subsisten dan bertani hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Jarang sekali masyarakat yang memasarkan hasil pertaniannya. Hal ini dilatarbelakangi oleh prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam yang diyakini oleh masyarakat. Masyarakat tidak terbiasa untuk mengeksploitasi sumber daya alam melebihi kebutuhan mereka. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dalam skala yang terbatas. Di sisi lain, pengetahuan masyarakat dalam membudidayakan komoditas pertanian masih rendah yang berdampak pada produktivitas hasil pertanian. Produk hasil pertanian hanya cukup untuk kehidupan sehari – hari. Selain itu, masyarakat juga belum mampu melihat peluang pasar sehingga berkebun, berladang, atau bertani belum digunakan sebagai salah satu jalan untuk mendapatkan kesuksesan material.

Memiliki jiwa gotong royong yang tinggi

Kebudayaan masyarakat yang terbiasa untuk saling tolong menolong berpengaruh pada etos kerja masyarakat. Masyarakat memiliki jiwa gotong royong yang tinggi dan tidak

sungkan untuk saling membantu. Masyarakat saling tolong menolong dalam membudidayakan komoditas pertanian. Sikap gotong royong ini telah meningkatkan produktivitas bekerja para petani. Mereka memiliki tenaga bantuan selama proses budidaya pertanian berlangsung. Sifat tolong menolong yang tertanam pada diri masyarakat telah menghilangkan salah satu biaya produksi yaitu untuk mengupah buruh tani. Masyarakat di KSK Agropolitan tidak memerlukan buruh tani karena mereka senantiasa membantu petani lain yang membutuhkan pertolongan.

Masyarakat transmigran cenderung lebih tekun dan agresif

Terdapat sedikit perbedaan antara etos kerja masyarakat lokal dengan masyarakat transmigran. Apabila masyarakat lokal cenderung lebih subsisten dalam bekerja, masyarakat transmigran lebih agresif dan lebih berani bersaing dalam mengelola sumber daya mereka. Orientasi masyarakat transmigran tidak hanya untuk pemenuhan kehidupan sehari – hari melainkan agar mampu memberikan nilai tambah ekonomi. Hal ini ditunjang dengan kemampuan masyarakat transmigran dalam berdagang. Selain itu, kebudayaan pun berpengaruh terhadap perbedaan etos kerja masyarakat lokal dan transmigran. Masyarakat lokal terbiasa dimanja oleh kekayaan sumber daya alam yang ada. Masyarakat lokal terbiasa memperluas wilayah, jadi saat wilayahnya tidak subur maka wilayah tersebut ditinggalkan. Berbeda dengan masyarakat lokal yang terbiasa untuk mengolah dan mengerjakan kebun secara ulet. Oleh karena itu, desa – desa transmigran cenderung memiliki komoditas pertanian yang lebih variatif karena mereka ulet dalam mengusahakan kebunnya.

Masyarakat tidak mampu berkomitmen untuk terikat dengan suatu pekerjaan dalam jangka panjang

Komitmen masyarakat untuk dapat terikat dalam satu pekerjaan cukup rendah. Masyarakat cenderung tidak tekun dalam mengerjakan suatu hal. Mereka kerap kali berganti – ganti pekerjaan. Dapat dikatakan bahwa masyarakat cenderung setengah – setengah dalam bekerja. Etos kerja seperti ini menghambat masyarakat untuk dapat bekerja di sektor formal. Salah satu contohnya adalah bekerja di perusahaan sawit. Beberapa masyarakat bekerja di perusahaan sawit hanya sebagai buruh kontrak. Hal ini dikarenakan bekerja di sawit bukan menjadi pekerjaan prioritas utama mereka. Selain pada sektor formal, etos kerja masyarakat yang cenderung tidak tekun ini pula lah yang menghambat berkembangnya pertanian mereka.

4.3.2 Analisis Sosial Budaya

4.3.2.1 Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial merupakan pengelompokan anggota masyarakat ke dalam lapisan – lapisan sosial yang berhirarkis. Beberapa ahli mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai tingkatan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga ada tingkatan masyarakat yang lebih tinggi hingga yang paling rendah. Stratifikasi sosial terjadi karena adanya proses komunikasi antar manusia yang saling berhubungan dan bersosialisasi. Wujud kehidupan bersosial masyarakat membutuhkan penataan sehingga munculah stratifikasi sosial ini.

Dasar stratifikasi sosial di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di KSK Agropolitan ditentukan berdasarkan kehormatan. Di wilayah studi, terdapat orang – orang yang memiliki tingkatan

lebih tinggi dibandingkan masyarakat secara umum. Orang – orang tersebut merupakan para tokoh adat dari tiap suku di tiap kecamatan yang disebut temenggung / penggawa. Temenggung / penggawa merupakan orang yang dihormati dalam sebuah kelompok masyarakat. Seringnya, temenggung / penggawa dimintai pendapatnya untuk memecahkan berbagai perkara. Tingginya status sosial temenggung / penggawa di wilayah studi dikarenakan masih berlakunya hukum adat sebagai landasar dasar hukum di masyarakat. Status sebagai temenggung / penggawa bisa diperoleh melalui keturunan atau pun pemilihan. Secara teori, status stratifikasi sosial yang berlaku di KSK Agropolitan adalah *ascribe status* atau *assigned status*. *Ascribe status* yaitu kedudukan yang diperoleh seseorang melalui kelahiran/keturunan sementara *assigned status* merupakan kedudukan yang diberikan.

Berdasarkan sifatnya, stratifikasi sosial yang ada di KSK Agropolitan merupakan stratifikasi terbuka dimana setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk naik ke pelapisan sosial yang lebih tinggi karena kemampuan dan kecakapannya sendiri atau turun ke pelapisan sosial yang lebih rendah bagi mereka yang tidak cakap dan tidak beruntung. Di kecamatan – kecamatan KSK Agropolitan, tidak ada perbedaan sifat stratifikasi sosial secara budaya maupun secara ekonomi. Secara budaya, tidak ada perbedaan masyarakat berdasarkan keturunannya yang berdampak pada tidak adanya perbedaan pada kehidupan masyarakat seperti dalam urusan pernikahan. Pada zaman dahulu, stratifikasi sosial masyarakat Dayak terbagi ke dalam dua golongan yaitu golongan merdeka dan budak dimana pembedaannya berdasarkan pada asal mula keturunan. Namun, diakhir abad ke 19 ketika pengaruh Belanda masuk ke pedalaman kalimantan, kaum budak secara resmi telah dihapuskan. Oleh karena itu, saat ini tidak ada lagi strata sosial berdasarkan keturunan yang membedakan kelas sosial masyarakat. Sebagai contohnya, seorang tokoh adat, siapa saja memiliki kesempatan untuk menjadi temenggung / penggawa. Secara ekonomi, tidak ada perbedaan masyarakat atas kepemilikan harta. Justru sebaliknya, masyarakat memiliki kesetaraan dan kebersamaan yang tinggi dalam sistem ekonomi.

Selain berdasarkan budaya dan ekonomi, stratifikasi sosial juga dapat dilihat dalam wujud sosial masyarakat. Meskipun tidak ada pengelompokkan masyarakat berdasarkan budaya dan ekonomi, terdapat pengelompokkan masyarakat berdasarkan prestis (gengsi) khususnya yang terkait dengan pekerjaan. Kondisi seperti ini dapat dilihat pada struktur sosial masyarakat di Kecamatan Hulu Gurung. Masyarakat di masih memandang rendah pekerjaan sebagai petani. Anak muda di wilayah studi lebih memilih bekerja sebagai PNS atau bekerja di pabrik dibandingkan bekerja sebagai petani khususnya para sarjana. Hal ini terkait dengan gengsi yang berlaku di masyarakat dimana petani dianggap sebagai pekerjaan yang rendah. Apalagi bagi masyarakat yang sudah sekolah tinggi. Oleh karenanya, tidak jarang masyarakat yang memilih bekerja di luar daerah karena minimnya lapangan pekerjaan di dalam KSK Agropolitan. Adanya prestis terhadap suatu pekerjaan tertentu telah menghambat pengembangan di KSK Agropolitan khususnya bidang pertanian. Para sarjana yang memiliki ilmu yang cukup tinggi tidak mau membantu untuk mengembangkan pertanian di wilayah studi padahal pertanian merupakan sektor yang paling berkembang di wilayah studi.

4.3.2.2 Klasifikasi Masyarakat

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem yang saling berinteraksi antar individu. Masyarakat dalam suatu wilayah dapat digolongkan berdasarkan hubungan diferensiasinya antara lain diferensiasi suku, diferensiasi mata pencaharian (pekerjaan), serta diferensiasi agama. Berbeda dengan stratifikasi sosial yang menggolongkan masyarakat ke dalam lapisan – lapisan hirarkis, klasifikasi masyarakat berdasarkan diferensiasi hanya mengelompokkan masyarakat berdasarkan kesamaan suatu hal. Hal ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik masyarakat tersebut. Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai klasifikasi masyarakat di wilayah studi yang digolongkan berdasarkan (A) etnis, (B) mata pencaharian, dan (C) agama.

A. Etnis

Etnis merupakan penggolongan sosial yang dibedakan berdasarkan asal – usul, tempat asal, serta kebudayaan. Persamaan yang menjadikan sekelompok masyarakat tergabung dalam suatu etnis tertentu yaitu dikarenakan adanya kesamaan dalam hal ciri fisik, bahasa daerah, kesenian, atau adat istiadat. Etnis yang terdapat di KSK Agropolitan dapat dibagi ke dalam dua etnis besar yaitu Dayak dan Melayu. Suku Dayak sendiri dapat dibagi lagi ke dalam beberapa sub – suku. Kedua etnis ini tersebar di seluruh kecamatan – kecamatan yang termasuk ke dalam KSK Agropolitan. Namun apabila dilihat berdasarkan mayoritasnya, setiap kecamatan di KSK Agropolitan dapat dibedakan berdasarkan mayoritas suku yang mendiami kecamatan tersebut.

Terdapat 4 suku Dayak yang terdapat di KSK Agropolitan yaitu suku Dayak Kantuk, Dayak Iban, Dayak Suaid, dan Dayak Seberuang. Suku Dayak Kantuk merupakan suku dayak yang paling banyak mendiami wilayah KSK Agropolitan Kapuas Hulu. Suku Dayak Kantuk ini tersebar di 5 dari 7 kecamatan yang tergabung dalam KSK Agropolitan. Kecamatan – kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Silat Hilir, Silat Hulu, Seberuang, Semitau, dan Empanang. Kecamatan Silat Hilir dan Kecamatan Silat Hulu merupakan pusat konsentrasi orang Dayak Kantuk karena berada di sekitar anak – anak sungai di bagian Hulu Sungai Kapuas. Selain kedua kecamatan tersebut, orang Dayak Kantuk ada pula yang bermukim di Kecamatan Semitau, Seberuang, dan Empanang.

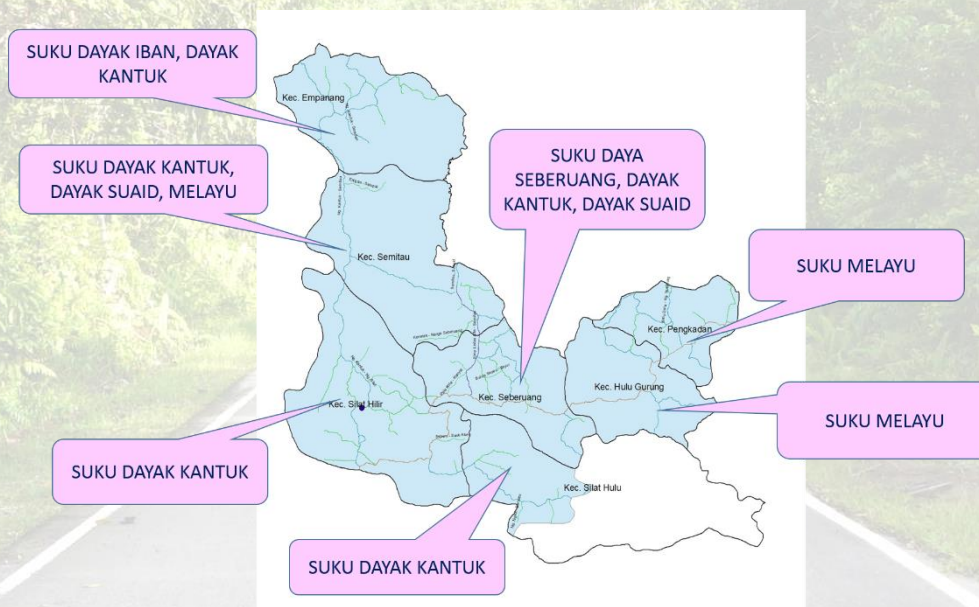
Suku dayak selanjutnya yang berada di KSK Agropolitan adalah Suku Dayak Suaid. Suku Dayak Suaid merupakan salah satu sub suku Dayak yang berdiam di daerah Provinsi Kalimantan Barat. Orang – orang Dayak Suaid lebih banyak terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Seberuang. Suku Dayak Suaid bukanlah satu – satunya suku Dayak yang mendiami Kecamatan Seberuang. Kecamatan Seberuang adalah kecamatan yang terdiri dari 3 Suku Dayak yaitu Suku Dayak Seberuang, Suku Dayak Suaid, dan Suku Dayak Kantuk. Diantara kecamatan lain, Kecamatan Seberuang ini lah yang paling beragam keberadaan etnis dayaknya. Namun di kecamatan ini pula hampir tidak terdapat suku Melayu karena didominasi oleh suku Dayak. Selain Kecamatan Seberuang, Kecamatan Semitau juga didiami oleh berbagai etnis antara lain Suku Melayu, Suku Dayak Kantuk, dan Suku Dayak Suaid. Suku Melayu yang mendiami Kecamatan Semitau rata – rata terkonsentrasi di sepanjang

Sungai Kapuas sementara suku Dayak terkonsentrasi di wilayah sungai bagian hulu yang lebih dekat ke hutan.

Kecamatan Empanang didominasi oleh Suku Dayak Iban dan beberapa Suku Dayak Kantuk. Dayak Iban sebenarnya tersebar di beberapa wilayah seperti kota Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Di Kapuas Hulu sendiri, Dayak ini berdiam di daerah Embaloh Hilir, Embaloh Hulu, Batang Lupar, Badau, Empanang, Lanjak, dan Putussibau. Suku Dayak Iban ini banyak bermukim di sekitar hulu sungai Kapuas bagian utara dan di sekitar Sungai Batang Lupar yang berada di wilayah serawak. Oleh karena itu, diantara kecamatan – kecamatan lainnya di KSK Agropolitan, hanya Kecamatan Empanang yang didiami oleh Suku Dayak Iban karena secara geografis berada di wilayah utara dan berdekatan dengan Malaysia. Sementara itu, dua kecamatan di bagian selatan KSK Agropolitan yaitu Kecamatan Hulu Gurung dan Pengkadan didominasi oleh Suku Melayu.

Suku – suku yang dijelaskan di atas adalah suku – suku mayoritas yang mendiami kecamatan – kecamatan dalam KSK Agropolitan. Pengklasifikasian ini tidak menandakan bahwa tidak adanya suku lain yang mendiami kawasan. Diantara suku lain tersebut adalah terdapat Suku Jawa, Tionghoa, Sunda, Madura, dan suku – suku lainnya. Mereka merupakan suku minoritas yang terdapat di wilayah studi. Suku lain ini merupakan suku pendatang yang bukan merupakan penduduk asli yang mendiami Kabupaten Kapuas Hulu. Kecamatan – kecamatan yang terkena program transmigrasi seperti Kecamatan Silat Hilir dan Pengkadan memiliki diferensiasi suku yang lebih beragam.

Gambar IV.56 Peta Persebaran Etnis di KSK Agropolitan



Sumber: Hasil Analisis, 2017

Berdasarkan identifikasi terhadap diferensiasi suku di KSK Agropolitan, didapatkan bahwa KSK Agropolitan terdiri dari beragam suku. Keberagaman suku dalam struktur sosial masyarakat tidak menimbulkan konflik. Justru setiap masyarakat dapat hidup secara harmonis. Salah satu yang melatarbelakangi hal tersebut adalah karena suku – suku di

wilayah studi berasal dari satu rumpun yang sama yaitu masyarakat Dayak. Hal yang membedakan antara suku Dayak dan Melayu hanyalah dalam tatanan cara hidup orang Melayu yang sudah diatur dalam konteks agama Islam.

B. Mata Pencaharian

Mata pencaharian utama masyarakat di seluruh kecamatan di KSK Agropolitan adalah sebagai petani karet. Hampir seluruh masyarakat memiliki kebun dengan luas kurang lebih 2 ha. Namun semenjak harga karet anjlok, masyarakat menekuni bidang pekerjaan lain. Pekerjaan – pekerjaan sampingan masyarakat ini dapat dikelompokkan untuk selanjutnya diidentifikasi guna mengetahui karakteristik mata pencaharian masyarakat. Berdasarkan hasil analisis, terdapat tiga pengelompokan masyarakat berdasarkan mata pencaharian. Kelompok masyarakat pertama adalah kelompok masyarakat Melayu yang berada di Kecamatan Pengkadan dan Hulu Gurung. Kelompok masyarakat yang kedua adalah kelompok masyarakat Dayak yang berada di Kecamatan Silat Hulu, Silat Hilir, Semitau, Seberuang, dan Empanang. Kelompok masyarakat yang ketiga ialah kelompok masyarakat transmigran yang tersebar di beberapa desa transmigrasi di Kecamatan Silat Hilir dan Pengkadan.

Kelompok masyarakat pertama ialah kelompok masyarakat Melayu. Pekerjaan utama mereka adalah sebagai petani karet. Selain sebagai petani karet, mayoritas masyarakat memiliki pekerjaan sampingan sebagai peternak arwana. Dibandingkan dengan kecamatan lain, masyarakat yang beternak arwana paling banyak berada di Kecamatan Pengkadan dan Hulu Gurung. Selain beternak arwana, masyarakat di wilayah ini juga merupakan petani tanaman pangan. Tanaman pangan yang dikembangkan di Kecamatan Pengkadan dan Hulu Gurung antara lain padi, jagung, dan ubi. Bahkan, untuk Kecamatan Hulu Gurung sudah memiliki sertifikat organik untuk jenis beras raja uncah. Beberapa jenis tanaman pangan lebih banyak berkembang di kecamatan – kecamatan ini. Salah satu perbedaan yang paling menonjol dari kelompok masyarakat ini adalah masyarakat tidak membudidayakan sawit atau bekerja di perusahaan sawit. Masyarakat di Kecamatan Pengkadan dan Hulu Gurung tidak ada yang bermata pencaharian di sektor sawit. Masyarakat justru menolak keberadaan sawit. Hal ini dikarenakan sudah pemahannya masyarakat mengenai kerugian yang didapatkan apabila lahan mereka diubah menjadi perkebunan sawit. Selain itu, masyarakat pada kelompok ini pun sudah tidak lagi menggunakan sistem ladang berpindah. Masyarakat tidak menggarap hutan karena untuk melindungi sawah – sawah yang berada di kaki gunung. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat di Kecamatan Pengkadan dan Hulu Gurung mayoritas bermata pencaharian sampingan sebagai petani tanaman pangan dan peternak.

Kelompok masyarakat yang kedua adalah kelompok masyarakat yang berada di Kecamatan Silat Hulu, Silat Hilir, Semitau, Seberuang, dan Empanang atau kecamatan – kecamatan yang mayoritas penduduknya merupakan suku Dayak. Sama halnya dengan kelompok masyarakat pertama, kelompok masyarakat yang kedua ini pula bermata pencaharian utama sebagai petani karet. Sementara itu, pekerjaan sampingan masyarakat di kelompok ini mayoritas bekerja di sawit baik yang mengelola perkebunan sawit masyarakat maupun yang bekerja sebagai buruh sawit di perusahaan. Karakteristik mata pencharaian masyarakat

di kelompok kedua yang banyak bekerja di sawit dipengaruhi oleh banyaknya perusahaan sawit yang membuka lahan perkebunan sawit di kecamatan ini. Selain sawit, masyarakat di kecamatan – kecamatan ini juga banyak yang berladang. Hal ini tidak terlepas dari kebudayaan masyarakat Dayak yang terbiasa untuk berladang dan menggarap hutan. Masyarakat di Kecamatan ini terbiasa untuk mengusahakan tanaman – tanaman hutan khususnya di tembawang – tembawang mereka. Kegiatan mata pencaharian masyarakat di kelompok ini lebih dekat pada kegiatan agroforestri. Beberapa kegiatan berladang yang biasa mereka lakukan adalah membudidayakan komoditas – komoditas perkebunan. Berbeda dengan masyarakat di Kecamatan Hulu Gurung dan Pengkadan yang terbiasa membudidayakan tanaman pangan.

Kelompok masyarakat yang ketiga adalah kelompok masyarakat transmigran yang tersebar di beberapa desa di Kecamatan Silat Hilir dan Pengkadan. Masyarakat transmigran tidak banyak yang bermata pencaharian sebagai petani karet maupun pekerja sawit. Salah satu komoditas yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat di daerah transmigran adalah lada. Dapat dikatakan bahwa masyarakat transmigran lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani hortikultura. Masyarakat banyak yang menanam sayur – sayuran. Karakteristik mata pencaharian masyarakat transmigran ini didukung oleh kebiasaan masyarakat yang terbiasa untuk mengolah lahan sehingga mereka lebih ulet dalam mengembangkan komoditas – komoditas lain khususnya hortikultura. Karakteristik lain dari masyarakat transmigran selain bertani hortikultura adalah berdagang.

Agama

Dua agama besar yang ada di wilayah studi adalah agama Kristen dan Islam. Pengelompokan masyarakat berdasarkan agama dapat dilihat dari kelompok masyarakat dayak dan kelompok masyarakat melayu. Kelompok masyarakat Dayak mayoritas memeluk agama kristen sementara kelompok masyarakat Melayu mayoritas memeluk agama Islam. Perbedaan ini dapat terlihat dari ketersediaan rumah ibadah di setiap kecamatan. Kecamatan Pengkadan dan Hulu Gurung yang mayoritasnya masyarakat melayu beragama Islam ditandai dengan banyaknya mesjid yang tersedia di dua kecamatan ini. Sementara di 5 kecamatan lainnya, mayoritas masyarakat beragama kristen yang ditandai dengan banyaknya gereja yang tersebar di wilayah kecamatan.

4.3.2.3 Interaksi Sosial Masyarakat

Menurut Brinkerhoff dkk (2011), terdapat 4 (empat) jenis interaksi sosial yang dapat terjadi dalam hubungan bermasyarakat yaitu timbal balik (*exchange*), kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan konflik (*conflict*). Pada analisis ini, akan dijelaskan mengenai tiga jenis interaksi masyarakat yang terjadi di KSK Agropolitan yaitu timbal balik, kerja sama, dan konflik. Dua jenis interaksi yang pertama yaitu timbal balik dan kerjasama akan menjadi modal dalam meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap suatu kelompok. Hal tersebut akan menjadi potensi bagi pengembangan kawasan agropolitan. Sebaliknya, interaksi yang ketiga yaitu konflik, dapat menjadi kendala dalam pengembangan kawasan

agropolitan. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis mengenai interaksi sosial yang terjadi di masyarakat.

A. Hubungan Timbal Balik

Hubungan timbal balik merupakan interaksi beberapa pihak yang terlibat untuk saling bertukar manfaat baik yang terlihat maupun tidak terlihat agar setiap pihak merasa diuntungkan (Stolte et al, 2001 dalam Brinkerhoff et al, 2011). Keberjalanan hubungan timbal balik akan bergantung pada komitmen orang – orang yang terlibat dalam proses pertukaran. Hubungan timbal balik akan berjalan lancar saat orang – orang mengembalikan bantuan yang telah mereka terima untuk menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima (Molm dan Cook, 1995 dalam Brinkerhoff et al, 2011). Secara teoritis, hubungan timbal balik seringkali tidak dapat bertahan karena ada pihak – pihak yang saling berinteraksi tidak mendapatkan suatu hasil atau tidak mendapatkan imbalan yang sama. Namun, hal ini bertolak belakang dengan yang terjadi pada masyarakat di KSK Agropolitan.

Masyarakat di KSK Agropolitan memiliki hubungan timbal balik yang baik dan sudah berjalan secara turun temurun. Hubungan timbal balik di dalam masyarakat ini sudah menjadi nilai – nilai yang tertanam pada setiap individu dan sudah menjadi kearifan lokal masyarakat setempat. Beberapa masyarakat mengenal hubungan timbal balik ini dengan istilah *beduruh*. Hubungan timbal balik pada masyarakat di KSK Agropolitan antara lain dalam hal pertanian. Beberapa orang terlibat untuk saling bertukar manfaat dalam mengerjakan pertanian. Terdapat proses pertukaran dalam kegiatan pertanian masyarakat. Masyarakat saling memberikan bantuan dari proses pembukaan ladang hingga panen. Masyarakat yang telah mendapatkan bantuan, selanjutnya akan membantu masyarakat yang lain untuk membuka ladang hingga proses panen selesai. Sebelumnya terdapat perjanjian antar anggota masyarakat terkait seberapa besar bantuan yang akan mereka beri, maka sebesar itu pula bantuan yang akan mereka dapatkan. Oleh karenanya, biasanya proses panen di wilayah studi itu bergilir dimana individu – individunya saling bertukar bantuan dalam memanen. Masyarakat di wilayah studi tidak mengenal istilah buruh tani seperti yang banyak dijumpai pada petani – petani umumnya. Hubungan timbal balik yang tercipta telah menyetarakan kedudukan para petani di wilayah studi melalui komitmen dan rasa kepemilikan yang tinggi dalam hubungan bermasyarakat.

B. Kerjasama dalam Masyarakat

Kerjasama terjadi saat orang – orang bergerak dan bekerja bersama untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Kerjasama perlu dibangun atas dasar kepercayaan dalam setiap individu kepada individu lain yang berada dalam sebuah komunitas. Setiap individu umumnya akan bekerja sama saat menghadapi permasalahan bersama. Menurut Van Vugt dan Synder (2002, dalam Brinkerhoff et al, 2011), individu akan bekerjasama saat kerjasama tampak perlu dilakukan dalam kepentingan ekonomi, saat setiap individu berbagi identitas atas rasa kepemilikan terhadap komunitas, juga saat setiap individu menghargai apa yang menjadi milik komunitas.

Masyarakat yang tergabung dalam KSK Agropolitan memiliki tingkat kerjasama yang cukup baik khususnya dalam lingkup desa. Kerjasama yang biasa dilakukan oleh masyarakat umumnya dalam hal pembangunan seperti pembangunan jalan desa, pembangunan

jembatan, pembangunan rumah, dan sebagainya. Kerjasama sudah menjadi kebudayaan masyarakat. Namun, pada beberapa daerah seperti di Kecamatan Pengkadan dan Silat Hilir, kerjasama sudah mulai luntur dan berubah menjadi hubungan yang transaksional. Hal ini dilatarbelakangi oleh masuknya dana desa. Dana desa berdampak pada perilaku kerjasama serta gotong royong masyarakat. Saat ini, tidak jarang masyarakat yang meminta upah buruh dalam melakukan kegiatan – kegiatan yang bersifat kerjasama.

C. Konflik – konflik Sosial

Konflik – konflik sosial yang ada dan pernah terjadi di wilayah studi antara lain:

1) Konflik Antara Masyarakat dengan Perusahaan Sawit

Ketidakjelasan Pembagian Plasma untuk Masyarakat

Pola kemitraan plasma merupakan amanat dari UU No. 18/2004 tentang perkebunan dimana setiap perusahaan perkebunan diharuskan membangun plasma seluas 20% dari luas konsesi hak guna usaha (HGU). Setiap perusahaan sawit diwajibkan untuk memberikan kebun plasma bagi masyarakat. Namun banyak perusahaan yang tidak menindaklanjuti kewajiban tersebut dengan berbagai alasan. Banyak perusahaan sawit yang tidak menepati janji untuk membangun dan memberikan kebun plasma untuk masyarakat. Adapun perusahaan yang telah memberikan kebun plasma bagi masyarakat justru menempatkan kebun tersebut di area yang jauh dan tidak subur. Salah satu konflik yang terjadi adalah antara PT. PGM dan PT.PIP dengan masyarakat. Kedua perusahaan ini tidak memberikan informasi yang utuh tentang pembagian plasma sebesar 20% dari luas kebun dan tidak pernah menyampaikan beban kredit yang harus dibayar masyarakat saat menerima kebun plasma. Masyarakat menuntut pembagian plasma namun perusahaan mewajibkan masyarakat menunjukkan bukti dokumentasi pertemuan dan absen pertemuan yang sampai saat ini tidak pernah dimiliki oleh masyarakat.

Pencemaran Akibat Limbah Pabrik Sawit

Pada tahun 2014, 6 perusahaan kelapa sawit milik Sinar Mas Grup di Kabupaten Kapuas Hulu dan Ketapang terdeteksi melanggar kebijakan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). Salah satu pelanggaran fundamentalnya adalah tidak melaksanakan kebijakan *New Planting Procedures* (NPP). Berdasarkan investigasi Lingkar Borneo dan Forest People Programme di Kapuas Hulu pada dua anak perusahaan Sinar Mas Grup, didapati bahwa PT. PGM tidak pernah menyampaikan secara terbuka dokumen AMDAL. Selain itu, pengolahan CPO pabrik kelapa sawit Belian Mile yang berlokasi di Desa Seberuang, Kecamatan Semitau juga telah menghasilkan limbah yang menimbulkan dampak lingkungan, khususnya Sungai Rusa dan Sungai Sejentu. Sungai tersebut merupakan sumber air bagi masyarakat Desa Sentabai, Kecamatan Silat Hilir. Tercemarnya sungai – sungai akibat limbah sawit merugikan masyarakat karena sebagian besar masyarakat masih bergantung dari sungai baik untuk memasak, mencuci, bahkan mandi. Bahkan sempat terjadi wabah penyakit kulit dikarenakan sungai yang tercemar.

Gambar IV.57 Sungai Rusa di Desa Seberuang yang Tercemar Limbah Pabrik



Sumber: www.mongabay.co.id (foto: Dok Link-Ar-FPP)

Pembukaan Lahan Sawit di Tanah Adat

Hutan memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat Dayak. Masyarakat Dayak tidak dapat dipisahkan dari hutan karena sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya dari hasil hutan. Masyarakat Dayak membagi – bagi tanah mereka ke dalam beberapa bagian dimana asal – usul dan penggunaannya berbeda – beda. Tanah yang tidak dapat sembarang digunakan adalah tanah adat yang termasuk di dalamnya adalah hutan adat. Hutan Adat berada di bawah kewenangan adat dan diatur dalam hukum adat.

Keberadaan tanah adat ini kerap kali memicu konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan sawit. Beberapa kali perusahaan sawit didapati melakukan pembangunan dengan menggusur sebagian wilayah tanah adat seperti kuburan atau hutan adat. Padahal daerah – daerah ini dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Dianggap tidak menghargai adat istiadat dan telah menghina roh leluhur, masyarakat adat melayangkan tuntutan ke perusahaan sawit untuk membatalkan pembangunan. Kadangkala konflik ini ada yang dapat diselesaikan secara adat namun ada pula yang harus menempuh hukum dengan melibatkan kementerian.

Salah satu contohnya adalah konflik antara masyarakat Adat Dayak di Silat Hulu berkonflik dengan PT Bangun Nusa Mandiri (BNM) yang merupakan anak perusahaan Sinar Mas Grup. Konflik bermula pada April 2008 dimana PT BNM melakukan penggusuran dan perusakan wilayah adat Silat Hulu seluas 350 Ha. Areal yang digusur adalah areal perladangan, kebun karet, kebun buah – buahan, dan dua buah kuburan yang merupakan kawasan milik masyarakat Dayak di Silat Hulu. Atas penggusuran dan perusakan ini, masyarakat Dayak di Silat Hulu melakukan perlawanan dan menyita alat berat milik PT BNM. Perusahaan pun melawan dan melaporkan masyarakat ke polisi. Masyarakat banyak yang dipidanakan saat memperjuangkan hak – haknya karena UU Perkebunan tidak mengatur luas maksimum dan minimum tanah untuk lahan perkebunan. Perusahaan kerap menggusur masyarakat adat atau petani di sekitar lahan perkebunan mereka. Akibatnya, masyarakat adat dan petani

tidak dapat lagi mengakses tanah yang telah turun menurun mereka kuasai atau bahkan kehilangan lahannya.

Masyarakat Tidak Dilibatkan / Tidak Diinformasikan Terkait Kegiatan Sawit

Pada tahap sosialisasi, PT. PGM dan PT.PIP tidak menerapkan prinsip – prinsip *Free, Prior Informed Consent* (FPIC) dengan tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait aktivitas perkebunan. Pihak perusahaan seringkali tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu seperti membuka lahan, memasukkan alat berat, menanam sawit, dll. Terdapat pola – pola yang digunakan oleh pihak perusahaan untuk dapat mengakuisisi lahan masyarakat. Pihak perusahaan biasanya mendekati orang-orang yang memiliki pengaruh besar di masyarakat seperti kepala desa, tokoh adat, pengusaha, atau masyarakat desa yang tereduksi (Potter, 2008). Pihak perusahaan kerap kali menjanjikan berbagai keuntungan dari adanya perkebunan sawit namun masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam diskusi. Orang – orang desa yang digandeng oleh perusahaan sawit membantu untuk menggiring opini masyarakat agar *pro* terhadap perkebunan sawit salah satunya dengan memberikan harapan akan adanya berbagai insentif dalam perkebunan sawit. Sementara itu, masyarakat biasa yang memiliki pengetahuan terbatas akhirnya hanya mengikuti pendapat beberapa orang berpengaruh saja. Secara umum, dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak terinformasi dengan baik terkait pembebasan dan penggunaan lahan untuk perkebunan sawit dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam mekanisme legalitas pembebasan dan penggunaan lahan sawit. Oleh karenanya, setelah bertahun – tahun masyarakat akhirnya baru menyadari bahwa mereka dibodohi oleh pihak perusahaan dengan berbagai janji yang tak kunjung ditepati oleh pihak perusahaan.

Di antara 7 kecamatan KSK, konflik – konflik seperti yang disebutkan di atas seringkali terjadi di Kecamatan Silat Hilir, Silat Hulu, Empanang, Seberuang, dan Semitau. Kelima kecamatan tersebut merupakan kecamatan – kecamatan yang sudah dimasuki perusahaan sawit dan sudah ditanami perkebunan sawit. Secara umum dapat dikatakan bahwa konflik antara masyarakat dengan perusahaan sawit lebih banyak merugikan masyarakat. Sementara dari sisi lingkungan, kegiatan perkebunan sawit dan perkebunan – perkebunan lainnya banyak yang merusak hutan. Padahal, masyarakat Dayak memiliki ketergantungan yang erat dengan hutannya. Bahkan mereka memiliki istilah hutan adat yang perlu dijaga kelestariannya. Berlandaskan adat – istiadat dan nilai – nilai kearifan lokal masyarakat Dayak, seringkali mereka memberikan hukuman adat atau tuntutan terhadap perkebunan sawit. Kegiatan perkebunan yang merusak hutan berlawanan dengan tujuan dan kepercayaan masyarakat Dayak untuk menjaga dan memelihara lingkungan. Bermodalkan kearifan lokal tersebut, masyarakat Dayak mempunyai potensi untuk menjadi “polisi hutan” atau penjaga lingkungan hutan dari perusakan – perusakan pihak luar pada wilayah adat mereka.

Masyarakat Dayak dapat mengambil contoh dari masyarakat adat Toro di Sulawesi (Painu, 2014) terkait keterlibatan masyarakat adat untuk menjaga dan mengawasi hutan agar jangan sampai ada yang melakukan perambahan di hutan adat. Disana telah dibentuk sebuah kelompok yang berisi masyarakat adat untuk menjaga hutan adat yang disebut Tondo Ngata. Tondo artinya polisi dan Ngata merupakan sebutan bagi desa di daerah

tersebut. Tondo Ngata dibentuk atas kerjasama lembaga adat dengan pemerintah. Tondo Ngata mengembangkan konsep kolaboratif manajemen yang diterapkan oleh masyarakat adat dan pemerintah sehingga ada pengakuan dari kedua belah pihak. Masyarakat adat melihat bagaimana konsep pemerintah pada taman nasional sebagai keberlanjutan lingkungan hidup sementara pemerintah mengadopsi bagaimana cara masyarakat adat untuk melakukan preservasi hutan. Jadi dalam Tondo Ngata, kearifan lokal tidak hanya untuk preservasi hutan tetapi dapat pula diadaptasi ke dalam konsep penggunaan dan pengelolaan hutan.

Keberhasilan Tondo Ngata dalam menjaga kelestarian hutan tidak terlepas dari kerjasama masyarakat adat dengan pemerintah. Saat ini, di kecamatan – kecamatan yang terjadi konflik di KSK Agropolitan, sudah terdapat pengelompokan masyarakat yang bersama – sama memerangi “penjarah” hutan yang digawangi oleh ketua adat (temenggung / tumenggung). Namun posisi mereka masih lemah terutama apabila perkaranya sudah di bawa ke ranah hukum. Diperlukan adanya penguatan para “polisi hutan” di KSK Agropolitan ini agar mereka memiliki *positioning* di tatanan hukum. Sama halnya dengan Tondo Ngata yang semakin kuat perannya setelah bekerja sama dengan pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan.

Konflik yang berhubungan dengan perusahaan sawit dan perkebunan sawit kerap kali memicu timbulnya konflik horisontal antar masyarakat Dayak. Hal ini dikarenakan adanya pihak yang pro dan kontra terhadap kehadiran perusahaan sawit ini. Selain itu, adanya kesimpangsiuran informasi antar masyarakat juga menghasilkan silang pendapat antar masyarakat yang dapat memicu konflik. Contohnya seperti yang terjadi di Kecamatan Seberuang dimana terdapat konflik antar suku dayak. Awalnya masyarakat bersama bersengketa dengan perusahaan terkait ganti rugi masyarakat untuk tanah yang terkena lokasi perkebunan. Ketidakjelasan informasi terkait ganti rugi ini menimbulkan kabar simpang siur bahwa terdapat masyarakat yang sudah menerima kompensasi, padahal kenyataannya belum. Kesalahpahaman tersebut berujung pada konflik antar masyarakat Dayak karena merasa tidak satu tujuan lagi.

Sistem Ladang Berpindah vs Kebijakan Larangan Membakar Hutan

Presiden Jokowi mengeluarkan instruksi presiden dengan kebijakan “kanalisasi” sebagai solusi untuk menangani kebakaran hutan yang terjadi. Kebijakan itu berisi larangan untuk membakar hutan. Polisi bertindak tegas terhadap mereka yang melakukan pembakaran sesuai dengan instruksi presiden tersebut. Kebijakan ini dianggap “membunuh” petani. Pasalnya, hutan bagi masyarakat Dayak adalah darah dan nafas mereka, artinya tanpa hutan mereka tidak bisa hidup. Kehidupan bertani orang Dayak adalah bertani ladang berpindah di darat, tanah kering, berbeda dengan sawah. Tanah kering ini tidak dapat ditanami padi apabila tidak dibakar terlebih dahulu.

Respon keras bermunculan dari berbagai kalangan masyarakat, khususnya bagi petani yang menggantungkan hidup dengan bercocok tanam. Dikatakan mustahil bagi petani untuk dapat berladang tanpa membakar lahan. Selain karena keterbatasan tenaga, waktu dan biaya, kegiatan berladang dengan cara membakar sudah dilakukan oleh masyarakat Dayak

selama beratus – ratus tahun bahkan sebelum Indonesia menyatakan diri sebagai sebuah negara. Masyarakat Dayak sendiri memiliki kearifan lokal dalam melakukan pembakaran untuk membuka ladang. Kearifan lokal ini sebisa mungkin menjaga supaya api tidak menjalar ke hutan – hutan. Jadi sedikit sekali kemungkinan ada upaya orang Dayak untuk sengaja merusak hutan atau membakar hutan. Justru kearifan lokal mereka adalah untuk memelihara dan melestarikan lingkungan supaya tidak terjadi kebakaran hutan.

Sayangnya, secara tidak langsung, para petani ini disematkan predikat sebagai “pembakar” hutan yang menjadi dalang dari kebakaran hutan di Indonesia. Petani ladang berpindah selalu dikambing hitamkan oleh perusahaan – perusahaan besar yang mengatakan bahwa kebakaran hutan disebabkan oleh ladang berpindah. Kebijakan larangan membakar hutan ini menjadi kontroversi dan perbincangan berbagai kalangan karena kebijakannya dianggap tidak berpihak pada masyarakat kecil atau petani – petani kecil. Padahal, perusahaan – perusahaan besar seperti perusahaan sawit biasa membuka lahan dengan luas yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang di lakukan oleh para petani dan resiko kebakaran hutannya pun sangat tinggi. Kebijakan larangan membakar hutan ini telah menjadi dilema dan memicu berbagai konflik seperti penangkapan para petani. Pelarangan membakar hutan telah membuat para petani takut untuk bertani. Mereka takut dikenai sanksi atau dipenjara.

2) Dilema Kebijakan Transmigrasi

Program transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah sudah terjadi selama kurang lebih 67 tahun, salah satunya ke Kalimantan Barat. Untuk merangsang agar warga bersedia ditempatkan di daerah transmigrasi, pemerintah memberikan beberapa insentif kepada para transmigran. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi memberikan tanah gratis seluas 0,25 ha/KK sebagai lokasi tinggal. Pemerintah juga memberikan lahan usaha berupa kebun seluas 3ha yang dapat diperoleh melalui kredit bank dengan bunga yang disubsidi dari pemerintah.

Beberapa insentif yang dilakukan pemerintah kepada para transmigran telah memicu penolakan dari masyarakat setempat terhadap program transmigrasi. Hal ini tertuang dalam poin 11 hasil rekomendasi seminar nasional Dewan Adat Dayak (DAD) yang berisi penolakan terhadap wacana pemerintah pusat untuk menempatkan satu juta KK transmigrasi di sepanjang perbatasan. Alasan masyarakat lokal menolak transmigrasi bukanlah karena penolakan terhadap suku tertentu melainkan penolakan terhadap kebijakan pemberian lahan dan kemudahan mendapatkan sertifikat lahan bagi warga transmigran. Masyarakat lokal merasa terancam akan kehilangan lahan mereka di tanah mereka sendiri. Para transmigran tidak memiliki keterikatan atau koneksi terhadap adat istiadat setempat sehingga seringkali mengabaikan status – status tanah seperti tanah adat atau tidak menjaga hutan seperti yang diyakini oleh masyarakat Dayak . Di Kapuas Hulu sendiri, khususnya di kecamatan – kecamatan KSK Agropolitan, yang terjadi adalah beberapa transmigran justru menjual tanah yang diberikan pemerintah kepada perusahaan kelapa sawit, meskipun tidak berarti masyarakat lokal tidak ada yang menjual tanah mereka untuk perusahaan sawit. Memang dari awal tujuan pemerintah memberikan intensif berupa lahan perkebunan ialah untuk mendorong komoditas kelapa sawit dengan model bisnis

kemitraan inti plasma dimana transmigran memposisikan sebagai plasma. Sayangnya hal ini bertolak belakang dengan prinsip masyarakat lokal khususnya masyarakat Dayak yang banyak menentang perkebunan sawit.

Selain itu, masyarakat lokal khususnya masyarakat Dayak merasa adanya ketidakadilan dalam hal mengurus surat tanah. Dalam beberapa wawancara yang dilakukan, masyarakat lokal mengalami kesulitan dalam mengurus sertifikat tanah mereka sementara para transmigran selain diberikan tanah, mereka juga akan dibantu dalam kepemilikan sertifikat tanah – tanah. Jadi dalam realisasinya masyarakat lokal merasa bahwa program transmigrasi ini selalu tidak berlandaskan rasa keadilan terhadap masyarakat lokal.

4.3.2.4 Mekanisme Penyelesaian Konflik

Mekanisme penyelesaian konflik di kawasan studi dapat dilakukan dalam dua cara yaitu melalui hukum adat dan hukum positif. Sama halnya dengan hukum positif, dalam hukum adat pun terdapat tingkatan dalam penyelesaian konfliknya yang dimulai dari tingkat dusun, desa, hingga kecamatan. Apabila konflik masih belum bisa diselesaikan di tingkat kecamatan, baru konflik tersebut dibawa ke polisi dan menggunakan hukum positif.

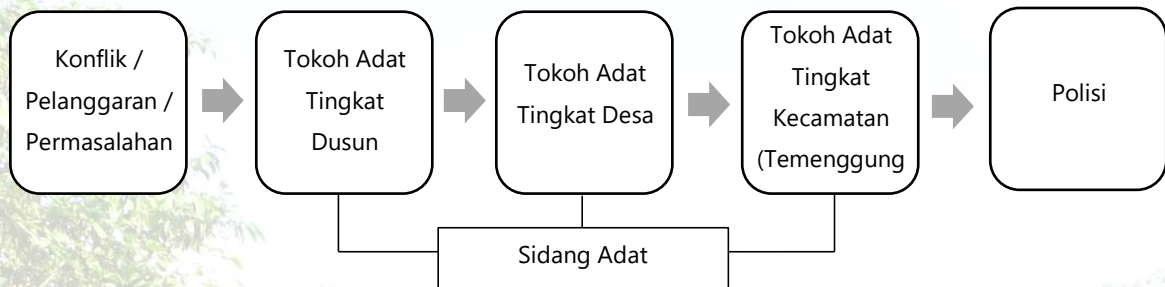
Pada hukum adat, penyelesaian konflik dipimpin oleh tokoh adat. Apabila konfliknya dalam tingkat dusun, maka yang memimpin adalah tokoh adat dusun. Apabila konfliknya dalam tingkat desa, maka yang memimpin adalah tokoh adat desa. Sementara itu, apabila konfliknya sudah berada dalam tingkat kecamatan, maka penyelesaian konflik dipimpin oleh temenggung / penggawa dari suku yang berkonflik. Setiap pelanggaran terhadap hukum adat akan dikenakan denda. Denda yang dikenakan tiap suku berbeda – beda sesuai dengan kesepakatan masing – masing suku. Selain denda, hukum adat tiap suku berbeda dan itu tertuang dalam buku adat masing – masing suku. Buku adat mengatur berbagai hal dalam kehidupan masyarakat dan menjadi landasan atau dasar bagi kehidupan masyarakat. Secara umum, beberapa hal yang diatur dalam buku adat antara lain terkait perkawinan, perzinahan, kejahatan terhadap harta benda, kejahatan terhadap hak orang lain, penipuan, pencurian, pencemaran dan pengrusakan lingkungan, serta aturan – aturan terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanah.

Hukum adat tiap suku berbeda – beda namun memiliki cara kerja yang sama di semua wilayah dan semua suku. Apabila orang yang berkonflik melakukan pelanggaran di luar wilayah sukunya, maka hukum adat yang berlaku adalah hukum adat dimana pelanggaran tersebut terjadi. Masyarakat adat mengenal istilah "*Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung*" untuk menjelaskan mengenai penerapan hukum adat tersebut. Konflik diselesaikan melalui sidang adat yang dipimpin oleh tokoh adat. Sidang adat dihadiri oleh temenggung/penggawa, orang yang berkonflik, saksi – saksi, serta perwakilan dari lembaga adat.

Hukum adat memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukum positif. Dapat dikatakan bahwa hampir seluruh perkara dapat diselesaikan dalam sidang adat. Jadi, penyelesaian konflik melalui polisi menggunakan hukum positif sangat jarang dilakukan, kecuali untuk masalah – masalah yang tidak menemukan kata mufakat. Hukum adat ini

memang berlandaskan musyawarah mufakat jadi setiap permasalahan berusaha diselesaikan secara kekeluargaan. Bahkan, untuk urusan pembunuhan pun apabila kedua belah pihak yang berkonflik telah sudah berdamai, kasus tersebut tidak perlu dilaporkan ke polisi.

Gambar IV.58 Mekanisme Penyelesaian Konflik



Sumber: Hasil Analisis, 2017

4.3.2.5 Modal Budaya

Produk dari kebudayaan yang ada di masyarakat KSK Agropolitan dapat dikelompokkan ke dalam kebudayaan suku Melayu dan suku Dayak. Berikut adalah beberapa kebudayaan dari suku Melayu dan Dayak yang ada di wilayah studi.

A. Kebudayaan Suku Melayu

1) Tarian Jepin

Tari Jepin merupakan salah satu kesenian tradisional Kalimantan Barat yang diadaptasi dari kesenian melayu, agama Islam, dan budaya lokal. Tari Jepin berasal dari daerah Sambas dan berkembang di daerah Kalimantan Barat. Tari Jepin menjadi salah satu alat penyebaran agama Islam di Kalimantan Barat. Tarian ini menjadi media dakwah dalam penyebaran agama Islam pada abad ke-13. Alat musik yang digunakan adalah gambus, gendang, dan ketipung yang dimainkan dengan irama padang pasir. Syair – syair yang dilantunkan merupakan puji-pujian kepada Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, dan kewajiban atau larangan menurut ajaran Islam. Pada awalnya, tarian ini hanya dimainkan oleh keluarga kerajaan untuk menyemarakkan acara – acara seperti pernikahan, khitanan, atau upacara potong rambut pada saat kelahiran anak. Namun seiring dengan perkembangan jaman, tari ini juga mulai dipentaskan oleh masyarakat umum seiring dengan penyebaran Islam yang semakin luas.

Pementasan Tari Jepin ini mengandung beberapa nilai budaya yang diyakini oleh masyarakat Melayu antara lain pendidikan agama, hiburan, pelestarian budaya, seni, dan olahraga.

- 1) Pendidikan agama. Syair – syair yang dilantunkan untuk mengiringi gerakan tari bertujuan untuk mendidik masyarakat agar selalu mengingat dan mengamalkan ajaran agama Islam. Hal ini sejalan dengan tujuan awal lahirnya Tari Jepin yaitu untuk membantu penyebaran agama Islam melalui kesenian
- 2) Hiburan. Tarian Jepin menampilkan gerakan yang indah serta alunan musik yang gembira. Menonton tarian ini akan membuat masyarakat terhibur dan sejenak

melupakan masalah – masalah yang dihadapi serta dapat meringankan beban meskipun tidak menyelesaikannya

- 3) Pelestarian budaya. Pementasan Tari Jepin merupakan salah satu upaya untuk melestarikan kreasi budaya yang keberadaannya hampir punah
- 4) Seni. Sisi seni pada Tari Jepin timbul dari adanya unsur gerak, musik, pakaian, musik pengiring, dan syair – syair yang dilantunkan. Unsur seni ini yang menjadikan Tari Jepin menarik untuk ditonton
- 5) Olahraga. Nilai ini tampak dari gerakan – gerakan Tari Jepin. Kekuatan, ketahanan, dan kelenturan tubuh penari sangat diperlukan untuk melakukan berbagai ragam gerak Tari Jepin.

Gambar IV.59 Tari Jepin



Sumber: budayacenters.blogspot.co.id

(Sumber: <http://m.melayuonline.com/ind/culture/dig/2621/tari-jepin-lembut-tari-tradisional-kalimantan-barat> dan <http://www.negerikuindonesia.com/2015/04/tari-jepin-tarian-tradisional-dari.html>)

2) Syair

Syair merupakan salah satu jenis puisi lama dari persia yang dibawa masuk ke nusantara seiring dengan masuknya peradaban Islam. Syair melayu menjadi sarana dakwah di Kalimantan Barat dengan memuat bentuk – bentuk internalisasi terhadap ayat – ayat Al-Quran berupa bait – bait kata yang indah yang mengandung nasehat dan petunjuk hidup agar masyarakat Melayu senantiasa taat dan berpegangan teguh pada Al – Quran dalam kehidupan kesehariannya. Sayangnya, keberadaan syair melayu saat ini sudah tidak begitu terlihat, bahkan bisa saja hilang apabila tidak dilestarikan. Masuknya budaya asing dan tekanan globalisasi dunia telah menenggelamkan budaya lokal sendiri. Beberapa organisasi yang masih berusaha menghidupkan kembali eksistensi syair – syair melayu seperti Majelis Adat Budaya Melayu (MABM), Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu (PKFPM) dengan menyelenggarakan perlombaan perlombaan bernuansa melayu.

(Sumber: <http://www.kalbariana.web.id/syair-melayu-identitas-peradaban-melayu-islam-di-kalimantan-barat/>)

3) Upacara Tepung Tawar

Pada umumnya dikenal enam jenis upacara tepung tawar yaitu tepung tawar badan, tepung tawar peralatan, tepung tawar rumah, tepung tawar tiga hari setelah orang di rumah meninggal, tepung tawar pada ikan peliharaan, dan tepung tawar bagi anak bayi. Tepung

tawar badan diperuntukkan bagi anak kecil yang melaksanakan gunting rambut, melaksanakan pernikahan, dan yang akan dikhitan bagi laki – laki, dilakukan pada orang yang selamat dari musibah, atau pada anak perempuan yang baru pertama kali menstruasi. Upacara ritual tepung tawar peralatan biasanya dilakukan pada kendaraan yang baru maupun kendaraan yang telah mendapat musibah seperti kecelakaan atau kendaraan hilang yang ditemukan kembali. Upacara tepung tawar mayit yang dikenal juga dengan Pesili dilakukan agar keluarga yang ditinggalkan tidak meninggal dalam waktu yang berdekatan dari orang yang meninggal tadi atau dapat terhindar dari musibah. Upacara tepung tawar rumah dilakukan ketika mau mendirikan tiang rumah. Hal ini dilakukan agar tiang yang didirikan tidak goyah dan tetap berdiri tegak. Upacara tepung tawar pada ikan peliharaan dilakukan khususnya pada ikan arwana. Hal ini dilakukan agar ikan arwana tersebut dapat memeberikan hoki kepada orang yang memeliharanya, agar ikannya cepat bertelur atau cepat laku. Terakhir adalah upacara tepung tawar bagi anak bayi. Tradisinya adalah memutarakan benang yang diikat di atas kepala bayi dengan harapan keluarga tersebut dapat diikat hatinya menjadi suatu ikatan yang kuat dan kokoh layaknya benang tersebut. Menurut tradisi adat Melayu di Kapuas Hulu, seorang bayi yang baru lahir mempunyai pantangan rambutnya digunting sebelum melalui acara ini.

4) Tumbang Apam

Tumbang Apam merupakan acara yang dilaksanakan ketika hajat seseorang tersampaikan dan ia mewujudkan rasa syukur melalui Tumpang Apam. Apam adalah makanan yang terbuat dari tepung beras atau terigu. Acara ini diawali dengan apam yang dikukus, serabi dan apam yang dibakar ditusuk ke pelapah kelapa yang sudah dibuang daunnya dan hanya tersisa tulang daunnya yang memiliki tinggi sesuai dengan tinggi orang yang melakukan hajat tersebut.

5) Buang – Buang

Buang – buang atau dapat dikenal sebagai pemberian sesajen kepada roh leluhur merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat ketikan akan melahirkan atau mengadakan acara. Hal ini dilakukan agar nenek moyang tidak mengganggu ketenangan orang – orang yang akan berbahagia. Bahan sesajen ini berupa nasi yang diberi warna. Selain nasi ada juga daun sirih, buah pinang, buah pisang, dan rokok daun mipah. Buang – buang ini biasanya dihantarkan ke sungai atau ke wilayah rimba.

6) Upacara Adat Kematian

Upacara kematian atau tahlilan merupakan upacara yang dilakukan apabila ada di dalam keluarga tersebut yang meninggal dunia. Upacara ini dilakukan dari hari pertama seseorang meninggal hingga hari ketujuh orang tersebut meninggal. Pada upacara ini disajikan makanan – makanan yang berbeda setiap harinya.

B. Kebudayaan Suku Dayak

1) Gawai/ Naik Dango

Gawai merupakan sebuah perayaan yang diadakan di Kalimantan Barat oleh suku asli Kalimantan Barat. Gawai merupakan perkembangan lebih lanjut dari acara pergelaran kesenian Dayak sehingga Gawai Dayak sesungguhnya bukanlah peristiwa budaya yang murni tradisional. Namun, asal usul perayaan serta nilai – nilai yang terkandung dalam Gawai Dayak mencerminkan kebudayaan asli masyarakat Dayak. Gawai sendiri adalah upacara syukuran yang sesudah panen yang rutin dilakukan oleh Suku Dayak sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Jubata (Tuhan) atas hasil panen yang melimpah. Acara ini biasanya dilakukan masing – masing sub – suku Dayak yang tinggal di desa – desa di kabupaten provinsi Kalimantan Barat. Tata cara dan pelaksanaan gawai yang diangkat disesuaikan dengan kebudayaan dan adat istiadat masing – masing suku meskipun secara garis besar pelaksanaannya memiliki kesamaan. Dalam hal penyebutan istilah pun terdapat perbedaan dimana orang Dayak Hulu menyebutnya dengan *Gawai*, di Kabupaten Sambas dan Bengkayang disebut *Maka'Dio*, sedangkan orang Dayak Kayaan menyebutnya dengan *Dange*.

Berdasarkan mitos yang berlaku di masyarakat, fungsi padi dan kemurahan hati Jubata menjadi dasar upacara Gawai atau Naik Dango. Jubata mengajarkan orang Dayak bertani, mengajarkan orang Dayak mengobati penyakit, memberikan anugerah kekuatan pada orang tertentu, melantukan doa pada-Nya, mengajarkan untuk menghormati arwah nenek moyang dan mengajarkan cara hidup yang benar. Hal tersebut diajarkan oleh Jubata. Menurut Bahari (1999, dalam Ivo (2015)), makna dari upacara Gawai adalah mensyukuri karunia *Jubata*, memohon doa restu kepada *Jubata* untuk menggunakan padi yang telah disimpang di *danago* padi, pertanda penutupan tahun berladang, serta memepererat hubungan persaudaraan/solidaritas.

Tigas aspek utama dalam upacara gawai antara lain:

1. Aspek kehidupan agraris yaitu kehidupan masyarakat yang bertradisi bercocok tanam
2. Aspek religius merupakan aspek untuk berterima kasih kepada Tuhan atas hasil panen yang diperoleh
3. Aspek kehidupan kekeluargaan solidaritas serta persatuan yang merupakan aspek yang menjunjung tinggi kekeluargaan dalam masyarakat baik antar keluarga dekat ataupun orang lain

2) Tuak / Baram

Tuak / Baram tidak hanya sebagai minuman memabukkan tetapi juga memiliki nilai sakral bagi orang Dayak. Tuak / Baram dipakai dalam ritual sebagai salah satu persembahan kepada makhluk atas /malaikat /roh suci /sengiang. Dalam proses pembuatan dan pengolahannya pun tidak sembarangan melainkan memiliki nilai kesakralan tersendiri. Selama proses pembuatan, sang pengolah tidak boleh berhubungan badan, tidak boleh bertengkar, bahkan apabila sang pengolah itu memiliki hewan peliharaan, hewan peliharaannya pun tidak boleh berkelahi. Hal tersebut dipercaya akan berpengaruh pada hasil tuak / baramnya. Selama proses pengolahan, raginya pun memiliki nilai kesakralan. Terdapat doa yang dipanjatkan untuk ragi ini. Salah satu doa untuk ragi dalam pengolahan baram: "toh ikau tapai, aku balaku ikau masak, mangat ikau manis, menyak, tada bahari,

laris manis” – ini engkau ketan, aku meminta supaya engkau menjadi masak, supaya engkau manis berlemak (enak), pedas, dan laris manis.

Tuak / Baram dibuat tidak hanya dari beras saja melainkan dicampurkan dengan bahan – bahan lainnya seperti akar alang – alang, akar pinang, akar kelapa, merica, lengkuas, laos, pala, kayu manis, cabe, bawang putih, dll. Campuran – campuran ini sejatinya bagus untuk kesehatan. Setiap sub suku dayak mempunyai campuran masing – masing untuk membuat tuak / baram. Saat ini tuak / baram banyak yang disalahgunakan. Hal yang merusak tuak / baram adalah dicampurkannya bahan – bahan kimia seperti spirtus dan obat – obatan ke dalam tuak (oplosan) seperti pada ciu. Ciu / Arak adalah pengaruh budaya China dan Ciu hampir tidak pernah dipakai dalam ritual adat.

Tuak / baram pasti disediakan dalam acara adat. Dalam ritual adat, umumnya tuak / baram ini adalah salah satu persembahan wajib yang dibawa untuk Roh Sengiang. Apabila tuak / baram ini tidak disuguhkan, maka dipercaya bahwa Roh Sengiang tidak akan datang. Itulah sebabnya mengapa tuak / baram ini juga bernilai suci dan magis. Sama halnya apabila kita membawa tuak saat melakukan perjalanan atau melewati daerah – daerah yang sakral , maka sebaiknya tuak ini dituangkan sedikit ke tanah sebagai pemberian kepada roh – roh alam di daerah tersebut agar tidak mengganggu kita. Minuman tuak / baram ini juga sangat digemari oleh roh – roh halus.

Dalam menjamu tamu, orang yang disuguhkan tuak / baram adalah orang – orang yang dihargai. Dari sanalah dapat terlihat niat dari tamu tersebut. Apabila tamu atau orang baru tersebut meminum tuak dan keluar ucapan atau niatan yang tidak baik, maka jangan harap tamu/orang baru tersebut akan diterima dengan baik. Dapat dikatakan bahwa tuak / baram ini sebagai salah satu media komunikasi untuk mengetahui niat sesungguhnya dari seseorang. Jadi apabila seseorang baru masuk ke dalam suatu daerah dan disuguhkan tuak maka artinya orang tersebut adalah tamu yang dihormati.

3) Tato

Tato merupakan bagian dari tradisi kebudayaan masyarakat Dayak. Setiap sub suku Dayak memiliki aturan dan motif tato yang berbeda – beda. Pada masa lalu, tato dijadikan sebagai tanda pengenal dan merupakan alat identifikasi paling mudah untuk mengenali siapa lawan dan siapa kawan. Tato juga dapat dijadikan sebagai bentuk penghormatan suatu suku terhadap kemampuan seseorang. Pada masa lalu, tato dijadikan sebagai tanda bahwa seseorang telah berbuat sesuatu. Namun secara religi, makna tato bagi masyarakat Dayak itu sama yaitu berfungsi sebagai penerang dalam perjalanan seseorang menuju alam keabadian setelah kematian.

Masyarakat Dayak tidak dapat membuat tato seenaknya di tubuh mereka. Terdapat aturan – aturan yang harus dipatuhi sebelum seseorang membuat tato di tubuhnya seperti pemilihan motif tato dan penempatan tato dibagian tubuh. Pada suku Dayak Iban, motif yang banyak digunakan antara lain ukir degug, kalapah, bilun, ketam itit, dan bunga terung. Ukir degug merupakan simbol identitas masyarakat Dayak Iban yang ada di leher depan, bentuknya bulat memanjang dari leher bawah hingga bawah dagu.

Terdapat motif tato yang terkait dengan kebiasaan masyarakat pada jaman dahulu yaitu kebiasaan mengayau (memenggal kepala) dalam sebuah peperangan. Suku Dayak Iban merupakan salah satu suku yang pernah melakukan tradisi ini. Mereka yang berhasil memburu kepala, berhak memakai gigi macan kumbang di telinga, hiasan burung enggang, serta sebuah tato yang didesain khusus. Setelah masa perang suku dan tradisi ngayau berakhir, mulai ada pergeseran makna tato yang semula menjadi identitas dan tanda telah mengayau, kini menjadi tanda bagi seseorang yang merantau karena pada jaman dahulu tidak semua orang berani keluar untuk meninggalkan tempat tinggalnya.

C. Nilai – nilai Suku Melayu

Secara umum, nilai – nilai yang dianut oleh masyarakat suku Melayu tidak berbeda dengan nilai – nilai yang dianut oleh Suku Dayak. Hal ini dikarenakan masyarakat Melayu awalnya merupakan keturunan Dayak namun dianggap menjadi Melayu setelah memeluk agama Islam. Oleh karena itu, nilai – nilai yang berlaku di masyarakat Melayu masih sama dengan masyarakat Dayak namun terdapat beberapa perbedaan karena adanya larangan dalam ajaran agama Islam. Nilai – nilai yang dianut oleh suku Melayu berlandaskan pada ajaran agama Islam, tuntunan hadist, serta sunnah – sunnah nabi Muhammad saw.

Salah satu nilai yang dapat dibedakan antara suku Melayu dan suku Dayak adalah nilai terhadap kepemilikan tanah. Di Suku Melayu, sudah tidak banyak terdapat tanah adat namun lebih banyak tanah pribadi. Rasa kepemilikan masyarakat Melayu terhadap tanah adat tidak sekuat rasa kepemilikan masyarakat Dayak terhadap tanah adat mereka. Tanah adat Suku Dayak biasanya dikeramatkan dan dijaga serta dibatasi penggunaannya oleh masyarakat sebagai cadangan tanah di masa depan. Hal ini cukup berbeda dengan nilai yang dipegang oleh masyarakat Melayu terhadap tanah adat mereka. Pada Suku Melayu, kebanyakan tanah adatnya digunakan dan dimanfaatkan untuk keperluan bersama masyarakat seperti untuk pembuatan surau, lapangan voli, lapangan bola, dan lain – lain. Pada akhirnya, secara administratif, tanah adat milik masyarakat Melayu akan berubah menjadi aset daerah. Pada masyarakat Melayu juga tidak ada ganti rugi terhadap penggunaan tanah adat karena biasanya langsung menjadi tanah wakaf.

D. Nilai – nilai Suku Dayak

1) Solidaritas Melalui Rumah Panjang/Batang

Nilai solidaritas dan kesetiakawanan sosial masyarakat Dayak begitu kuat yang dipupuk dari kehidupan sosial di dalam rumah panjang. Rumah panjang atau rumah batang merupakan rumah adat khas masyarakat Dayak. Masyarakat Dayak pada jaman dahulu biasanya membangun rumah panggung dan memanjang karena ditempati oleh banyak keluarga. Hal ini dilakukan untuk menghindari binatang buas atau menjaga keselamatan keluarga dari serangan suku lainnya. Dengan berada dalam satu rumah yang sama, maka akan memudahkan masyarakat Dayak untuk berkoordinasi apabila ada acara tertentu atau apabila ada ancaman dari luar. Fungsi lain dari rumah panjang ialah digunakan sebagai tempat rapat, pertemuan, atau upacara – upacara adat yang ada dalam masyarakat Dayak.

Orang – orang Dayak yang tinggal di rumah – rumah panjang memiliki solidaritas yang sangat tinggi. Selain itu mereka juga memiliki rasa kebersamaan dan toleransi yang tinggi dalam bermasyarakat. Hal ini terbentuk karena mereka terbiasa hidup berdampingan dengan beberapa anggota keluarga lainnya. Rata – rata rumah panjang dihuni oleh sekitar 30 kepala keluarga. Di dalam rumah betang, setiap kehidupan individu dalam rumah tangga secara sistematis diatur melalui kesepakatan bersama. Salah satu contoh nilai kebersamaan orang Dayak yang tinggal di rumah berang adalah saat ada anggota keluarga yang meninggal dunia maka masa berkabung mutlak diberlakukan selama satu minggu bagi seluruh penghuni rumah betang. Mereka tidak beris, tidak minum tuak, tidak menggunakan perhiasan, dan tidak pula menyalakan peralatan elektronik. Nilai solidaritas dan toleransi yang tertanam pada kehidupan rumah betang dapat dilihat dalam kehidupan bermasyarakat orang Dayak yang terbuka terhadap perbedaan dan memiliki toleransi yang tinggi dimana mereka memiliki kehidupan yang berdampingan dengan berbagai suku lainnya.

2) Pola Kepemilikan Tanah

Kepemilikan tanah secara umum dapat dibagi ke dalam 4 kelompok yaitu tanah agama, tanah adat, tanah negara, dan tanah personal³.

1. Tanah milik agama adalah tanah yang dialokasikan oleh pemerintah setempat untuk dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan
2. Tanah milik adat. Tanah ini berada di bawah hukum adat dan diatur melalui kewenangan lembaga adat dan kepala adat. Apabila ada masyarakat yang membuka tanah di wilayah ini tanpa seizin adat maka dipercaya bahwa mereka akan mendapatkan kutukan dari roh nenek moyang. Selain itu mereka juga akan dikenai denda adat. Tanah adat dapat dibagi sebagai berikut:
 - Tembawang, merupakan lahan yang dikelola secara turun temurun oleh suatu keluarga namun telah lama ditinggalkan. Sisa dari tanah ini berupa bekas bangunan rumah panggung atau bahkan sudah tidak ada bentuk bangunannya. Terdapat tanaman – tanaman yang menjadi ciri dari tembawang antara lain Cempedak, Durian, Nangka, Langsap, Jengkol, dan Petai. Tembawang diatur dalam hukum adat dan hanya boleh diambil oleh bagian dari keluarga yang dulu pernah menempatinnya.
 - Balai adat, digunakan sebagai pusat budaya, pelaksanaan upacara adat, atau kegiatan kesenian. Balai adat biasanya berlokasi di pusat permukiman.

³ PT SMART Tbk dan TFT Indonesia. (2016). Rancangan Rencana Tata Ruang Desa Kesepakatan (RTRDK) Sub Perencanaan Pelestarian Sumber Daya Alam Penting Secara Partisipatif. Kapuas Hulu: TFT Indonesia-PT,SMART Tbk.

- Pendam/kuburan tua, merupakan lahan yang dulunya digunakan untuk memakamkan seseorang namun cara memakamkannya tidak dikubur melainkan diletakkan pada pohon besar. Pendam/kuburan tua menjadi tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat.
 - Lulung, merupakan lahan kecil yang sengaja dibatasi karena merupakan tempat yang dilarang untuk diusahakan, contohnya seperti mata air di hulu sungai. Areal ini diberi tanda oleh masyarakat agar tidak dibuka menjadi areal untuk berladang.
 - Temunik, merupakan lahan kecil yang dulunya digunakan untuk mengubur ari – ari bayi. Masyarakat menandai daerah ini agar tetap dijaga keberadaannya dari kegiatan ekonomi atau pembukaan hutan lainnya.
 - Hutan adat/hutan cadangan, merupakan hutan yang diperuntukkan sebagai lahan cadangan bagi masyarakat di masa yang akan datang. Hutan adat ini diatur dalam hukum adat dan kewenangannya berada di bawah lembaga adat. Tidak sembarang orang dapat memanfaatkan hutan adat ini. Sebagian besar masyarakat Dayak secara bersama – sama menjaga kelestarian hutan adat ini.
3. Tanah milik negara, atau dapat juga dikatakan sebagai tanah milik desa/dusun. Tanah ini biasanya dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, lapangan bola, jalan desa, atau bangunan – bangunan yang pengelolaannya di bawah kewenangan pemerintah desa/dusun.
 4. Tanah milik personal, merupakan tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang berstatus adat dan dimiliki atas dasar hak asal usul. Masyarakat Dayak menganut kepercayaan bahwa orang yang pertama kali membuka hutan akan mendapatkan hak untuk memiliki tanah tersebut

3) Sistem Berladang⁴

Masyarakat Dayak memiliki kearifan lokal berupa sistem ladang berpindah dengan cara membakar kawasan yang akan digunakan berladang. Tujuannya adalah untuk menyuburkan tanah karena mereka itu bertani di tanah kering bukan di sawah. Tanah kering ini baru bisa ditanami padi setelah dibakar, berbeda dengan tumbuhan lain seperti nanas atau karet. Selain itu juga pembakaran ladang ini memberikan manfaat karena menyuburkan tanah, mengembalikan unsur – unsur hara di dalam tanah. Biasanya masyarakat adat membatasi wilayah yang akan dibakar. Wilayah yang akan dibakar pun luasnya sesuai dengan kebutuhan ladang saja. Sebelum membakar, mereka membuat perhitungan dari mana mereka harus menyulut api pertama agar tidak membakar hutan. Selain itu, ada juga syarat – syarat tertentu, dimana ada aspek magis agar tidak membakar

⁴ Arkanudin. (2012). *Sistem Perladangan dan Kearifan Tradisional Orang Dayak Dalam Mengelola Sumber Daya Hutan*. Retrieved July 5, 2017, from <http://prof-arkan.blogspot.com/2012/04/sistem-perladangan-dan-kearifan-25.html>

Bamba, John. (2014). *Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Budaya Dayak dan Tantangan yang Dihadapi*. Dalam buku Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat, Atok, Kristianus., Florus, Paulus., Tamen, Agus. (Ed). PPSDAK Pancur Kasih.

hutan. Setelah itu dilakukan proses penebangan yang dilanjutkan dengan proses menjemur. Sementara menjemur, petani yang membuka ladang membuat isolasi mengelilingi ladang sekitar kurang lebih 2 meter. Daerah isolasi tersebut dibersihkan betul – betul dari daun atau pohon sehingga api tidak dapat menjalar. Meskipun sudah begitu, sebagai upaya tambahan agar api tidak menjalar, petani yang membuka ladang akan mengundang tetangga sebagai tambahan tenaga untuk ikut mengamati proses pembakaran ladang. Orang yang mengelilingi ladang itu juga memegang alat untuk mematikan api. Itu pun terjadi apabila ada kondisi tidak terduga dimana ada angin ribut yang membawa nyala api nyebrang ke hutan. Namun hal tersebut sedikit sekali kemungkinannya untuk dilakukan secara sengaja. Masyarakat Dayak tidak ada tujuan untuk merusak lingkungan dengan membakar hutan justru sebaliknya

4.3.3 Pandangan dan Harapan Masyarakat Terkait KSK Agropolitan

Berdasarkan survei primer berupa wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan oleh Tim LAPI ITB kepada masyarakat di 7 kecamatan yang termasuk ke dalam KSK Agropolitan, mereka menyampaikan beberapa aspirasinya terkait rencana pengembangan kawasan agropolitan di wilayah mereka, antara lain:

- Masyarakat menyambut baik rencana pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Agropolitan di 7 (tujuh) kecamatan. Masyarakat berpesan agar rencana dan program yang akan dikembangkan dalam RTR KSK akan berkesinambungan dan saling mendukung dengan rencana dan program – program yang tertuang dalam rencana tata ruang desa karena sebagian desa telah memiliki rencana tata ruang desa.
- Masyarakat berharap akan adanya pengembangan komoditas lain di KSK Agropolitan. Saat ini karet merupakan komoditas dominan di kawasan namun harga karet semakin menurun yang berdampak pada pendapatan masyarakat. Masyarakat mengharapkan bantuan untuk mengidentifikasi komoditas lain yang mungkin dikembangkan di KSK Agropolitan serta kemungkinan peluang pasarnya.
- Masyarakat berharap adanya pendampingan dalam pembudidayaan pertanian hingga pemasaran produk pertanian. Selama ini masyarakat memiliki tingkat antusias yang tinggi untuk belajar namun terkendala ilmu pengetahuan yang tidak memadai. Masyarakat juga tidak memiliki akses terhadap pasar.
- Masyarakat berharap akan ada industri pengolahan bahan baku di Kawasan Agropolitan untuk dapat meningkatkan nilai tambah komoditas yang dikembangkan.
- Masyarakat meminta bantuan untuk dapat mengubah pola pikir dan cara bertani masyarakat yang masih tradisional menjadi cara bertani modern dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.
- Terkait dengan konflik lahan untuk perkebunan sawit yang banyak terjadi, masyarakat berharap ikut dilibatkan dalam mekanisme kerjasama dan proses pembebasan lahan.

4.4 ANALISIS TINGKAT KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA

Tujuan dari analisis sarana dan prasarana adalah mengetahui kapasitas sarana dan prasarana yang ada di tujuh kecamatan yang merupakan Kawasan Strategis Agropolitan Kapuas Hulu dalam pengembangan kawasan agropolitan hijau: Kecamatan Silat Hulu, Kecamatan Silat Hilir, Kecamatan Hulu Gurung, Kecamatan Pengkadan, Kecamatan Seberuang, Kecamatan Semitau, dan Kecamatan Empanang. Meskipun dikembangkan sebagai kawasan agropolitan yang kegiatan utamanya adalah pertanian atau perkebunan, pasar dan lainnya yang menjadi ciri infrastruktur pendukung agropolitan, berdasarkan indikator-indikator kawasan agropolitan yang telah disintesis, infrastruktur dasar pun harus memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Antara bahan baku, pengolahan, produksi, dan pemasaran, dan permukiman dengan segala infrastrukturnya harus terhubung dengan baik. Tentunya sarana dan prasarana tidak boleh mengganggu kawasan konservasi. Selain itu, mengingat konsep pengembangan ini adalah kawasan agropolitan hijau, maka pengembangannya pun harus memperhatikan lingkungan, seperti menggunakan material ramah lingkungan, konsep rancangannya yang meminimalkan pergerakan kendaraan, dan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua analisis utama yang akan dilakukan pada bagian ini, yaitu analisis infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang ekonomi dan agropolitan hijau. Infrastruktur dasar terdiri dari fasilitas sosial (pendidikan, kesehatan, dan peribadatan); jaringan jalan dan transportasi; air bersih; sampah dan limbah; listrik dan telekomunikasi. Sedangkan infrastruktur penunjang agropolitan hijau adalah infrastruktur penunjang perdagangan dan jasa dan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi.

Dalam melakukan analisis ketersediaan atau tingkat pelayanan sarana dan prasarana yang ada dan tersebar di tujuh kecamatan Kawasan Strategis Kabupaten Agropolitan, digunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan 03-1733-2004. Walaupun, mengacu pada standar tersebut, terdapat penyesuaian-penyesuaian terhadap standar minimal karena kondisi-kondisi yang ada di Provinsi Kalimantan, termasuk tujuh kecamatan kawasan agropolitan. Sebagai ilustrasi, kecamatan-kecamatanannya memiliki wilayah yang sangat luas sehingga dibutuhkan penyesuaian standar yang digunakan dengan kondisi yang ada dalam menentukan kebutuhan sarana dan prasarana.

4.4.1 Infrastruktur Dasar

Pada bagian ini, analisis tingkat pelayanan yang akan ditinjau adalah infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang. Infrastruktur dasar akan membahas tingkat pelayanan dan kebutuhan prasarana pendidikan; prasarana kesehatan; prasarana peribadatan; jaringan jalan dan transportasi; air bersih; sampah dan limbah; dan listrik dan telekomunikasi. Sedangkan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi adalah prasarana perdagangan dan jasa; dan pertanian, perikanan, dan perkebunan.

4.4.1.1 Sarana dan Prasarana Pendidikan

Terdapat empat prasarana pendidikan utama yang akan dilihat kondisi dan tingkat pelayanannya, yaitu Taman Kanak-Kanak (TK) yang didalamnya sudah termasuk negeri dan swasta. Sekolah Dasar (SD) baik negeri, swasta, dan M. Ibtidaiyah. Prasarana ketiga adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) baik negeri, swasta, dan M. Tsanawiyah. Sedangkan prasarana pendidikan yang terakhir yang dibahas dalam bagian ini adalah Sekolah Menengah Umum (SMU) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sudah termasuk negeri, swasta, dan M. Aliyah. Dalam mengetahui tingkat pelayanan sarana pendidikan, analisis ini mengacu pada standar SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan kawasan Perumahan di Perkotaan. Berikut standar acuan yang digunakan dalam menentukan tingkat pelayanan standar pendidikan:

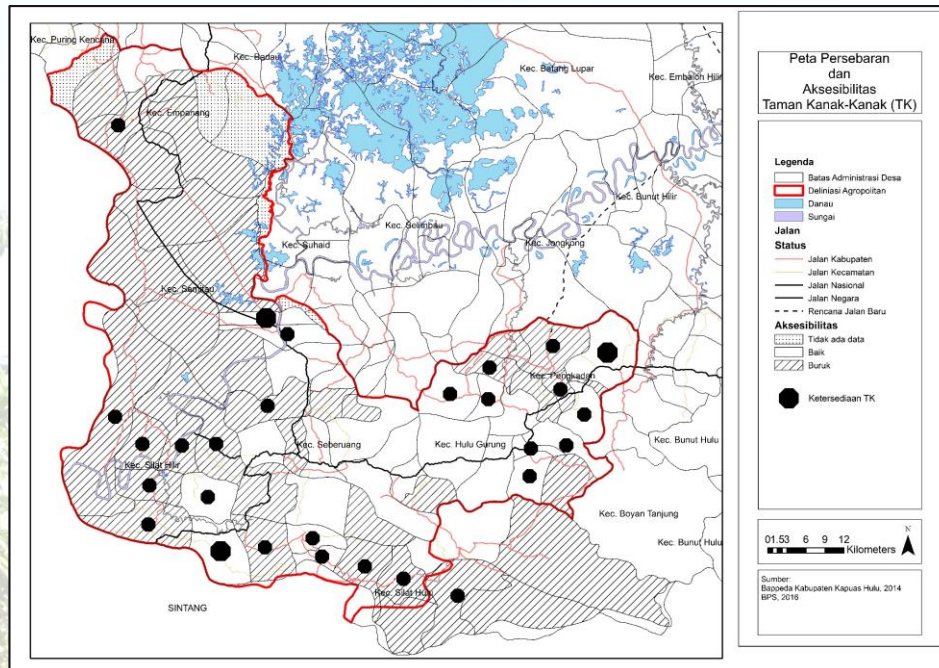
1. Taman Kanak-Kanak memiliki jumlah penduduk pendukung sebesar 1.250 Jiwa;
2. Sekolah Dasar (SD) memiliki jumlah penduduk pendukung sebesar 1.600 jiwa;
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) memiliki jumlah penduduk pendukung sebesar 4.800 jiwa;
4. Sekolah Menengah Umum (SMU) memiliki jumlah penduduk pendukung sebesar 4.800 jiwa.

Selain itu, dalam mengidentifikasi perkiraan kebutuhan sarana dan prasarana, digunakan data hasil proyeksi jumlah penduduk yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, Sosial, Budaya, dan Kependudukan.

1. Taman Kanak-Kanak (TK)

Kondisi terkini, ketersediaan jumlah prasarana TK memang tidak begitu banyak. Bisa dilihat pada Gambar Persebaran dan Aksesibilitas Prasarana TK. Bagi prasarana TK yang memiliki aksesibilitas buruk, artinya prasarana kondisi jalan yang ada di desa tersebut tidak bisa dilalui sepanjang tahun. Hal tersebut bisa diakibatkan oleh cuaca. Prasarana TK yang tidak didukung dengan aksesibilitas yang baik adalah TK yang berlokasi di Kecamatan Empanang dan Kecamatan Silat Hilir seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar IV.60 Persebaran dan Aksesibilitas Prasarana Taman Kanak-Kanak (TK)



Sumber: Hasil Pengolahan, 2017

Di antara prasarana pendidikan lainnya, tingkat pelayanan TK sangatlah rendah. Hampir semua kecamatan KSK Agropolitan memiliki tingkat ketersediaan yang rendah. Namun, seperti yang terlihat pada Tabel IV.31. Satu kecamatan yang tingkat ketersediaannya telah mencapai 100 persen, yaitu Kecamatan Pengkadan. Walaupun, pada saat ini kondisinya cukup, pertumbuhan populasi memungkinkan penambahan jumlah TK di masa mendatang. Kecamatan dengan tingkat ketersediaan TK paling rendah diantara kecamatan KSK Agropolitan lainnya adalah Kecamatan Seberuang, tingkat pelayanannya hanya mencapai 11.11%. Kondisi seperti ini merupakan salah satu isu kebutuhan terhadap pendidikan yang diangkat oleh salah satu perangkat kecamatan di Kecamatan Semitau. Berdasarkan hasil wawancara, rendahnya ketersediaan TK mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang diharapkan dapat bersaing dengan penduduk pendatang.

Tabel IV.31 Tingkat Ketersediaan Prasarana Taman Kanak-Kanak (TK) di Kawasan Agropolitan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Desa	Jumlah TK Eksisting	Jumlah TK Standar	Surplus/ Defisit	Tingkat ketersediaan (%)	Keterangan
1	Silat Hilir	18808	13	12	15	-3	80.00	Kurang
2	Silat Hulu	11887	14	5	10	-5	50.00	Kurang
3	Hulu Gurung	13664	15	7	11	-4	63.64	Kurang
4	Pengkadan	8814	11	7	7	0	100.00	Cukup
5	Seberuang	11420	15	1	9	-8	11.11	Kurang

FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU

6	Semitau	8850	12	3	7	-4	42.86	Kurang
7	Empanang	3165	6	1	3	-2	33.33	Kurang

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Berdasarkan perhitungan kebutuhan menggunakan standar, berikut kebutuhan terhadap prasarana Taman Kanak-Kanak (TK) yang dibutuhkan di masing-masing kecamatan baik berdasarkan standar dan kebutuhan setelah disesuaikan dengan ketersediaan dan kondisi yang ada pada kawasan:

Tabel IV.32 Kebutuhan Prasarana Taman Kanak-Kanak (TK) di Kawasan Agropolitan Berdasarkan Standar

No	Kecamatan	Ketersediaan (2015)	Jumlah Desa	Kabutuhan								
				2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2037
1	Silat Hilir	12	13	12	12	15	15	15	17	18	19	20
2	Silat Hulu	5	14	9	9	9	9	9	10	10	11	11
3	Hulu Gurung	7	15	10	11	11	11	11	11	12	12	13
4	Pengkadan	7	11	7	7	7	7	8	8	9	9	9
5	Seberuang	1	15	8	8	9	9	9	9	9	10	10
6	Semitau	3	12	7	7	7	7	7	7	8	9	9
7	Empanang	1	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Tabel IV.33 Kebutuhan Prasarana Taman Kanak-Kanak (TK) di Kawasan Agropolitan Berdasarkan Penyesuaian dan Ketersediaan

No	Kecamatan	Ketersediaan (2015)	Jumlah Desa	Kabutuhan								
				2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2037
1	Silat Hilir	12	13	12	12	15	15	15	17	18	19	20
2	Silat Hulu	5	14	5	14	14	14	14	14	14	14	14
3	Hulu Gurung	7	15	7	7	15	15	15	15	15	15	15
4	Pengkadan	7	11	7	7	12	12	12	12	12	12	12
5	Seberuang	1	15	1	1	15	15	15	15	15	15	15
6	Semitau	3	12	3	3	13	13	13	13	13	13	13
7	Empanang	1	6	1	1	6	6	6	6	6	6	6

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Tentunya lokasi dan persebaran TK tersebut, perlu diperhatikan. Mengingat murid-murid TK memiliki kemampuan jalan yang terbatas dan masih membutuhkan pengawasan lebih dari orang tua, sehingga lebih baik TK tersebut tersebar di masing-masing desa. Sayangnya, masih banyak desa yang belum dilengkapi oleh prasarana pendidikan TK. Oleh karena itu, perhitungan kebutuhan dengan menggunakan standar disesuaikan dengan kondisi tersebut. Besarnya kebutuhan setelah penyesuaian dapat dilihat pada Tabel X. Kebutuhan Taman Kanak-

Kanak (TK) di Kawasan Agropolitan. Berdasarkan jumlah kebutuhan yang sudah dibahas. Prioritas desa-desa yang membutuhkan fasilitas TK adalah desa-desa yang belum terlayani TK sama sekali. Berikut daftar desa-desa per kecamatan yang belum memiliki fasilitas TK yang perlu menjadi prioritas:

Tabel IV.34 Desa yang Membutuhkan Prasarana Taman Kanak-Kanak

Kec. Silat Hilir	Kec. Silat Hulu	Kec. Hulu Gurung	Kec. Pengkadan	Kec. Seberuang	Kec. Semitau	Kec. Empanang
Seberu	Nanga Luan	Parang	Permata	Rinyai	Kenerek	Keling Panggau
Sentabai	Belimbing	Lubuk Antuk	Hulu Pengkadan	Beluis Harum	Na. Seberuang	Bajau Andai
	Riam Taoang	Nanga Yen	Pinang Laka	Gurung	Kenepo Komplek	Tintin Peninjau
	Lebak Najah	Bugang	Sasan	Bati	Entipan	Kumang Jaya
	Perjuk	Simpang Senara	Pengkadan Hilir	Seneban	Nanga Kenepai	Laja Sandang
	Landau Rantau	Beringin		Belikai	Tua Abang	
	Selangkai	Sejahtera Mandiri		Pala Kota	Mersedan Raya	
	Entabi	Karya Mandiri		Emperiang	Nanga Lemedek	
	Selimu			Nanga Lot	Sekedau	
				Tanjung Keliling	Padung Kumang	
				Tanjung Mada		
				Jeranjang		
				Bekuan		
				Nanga Pala		

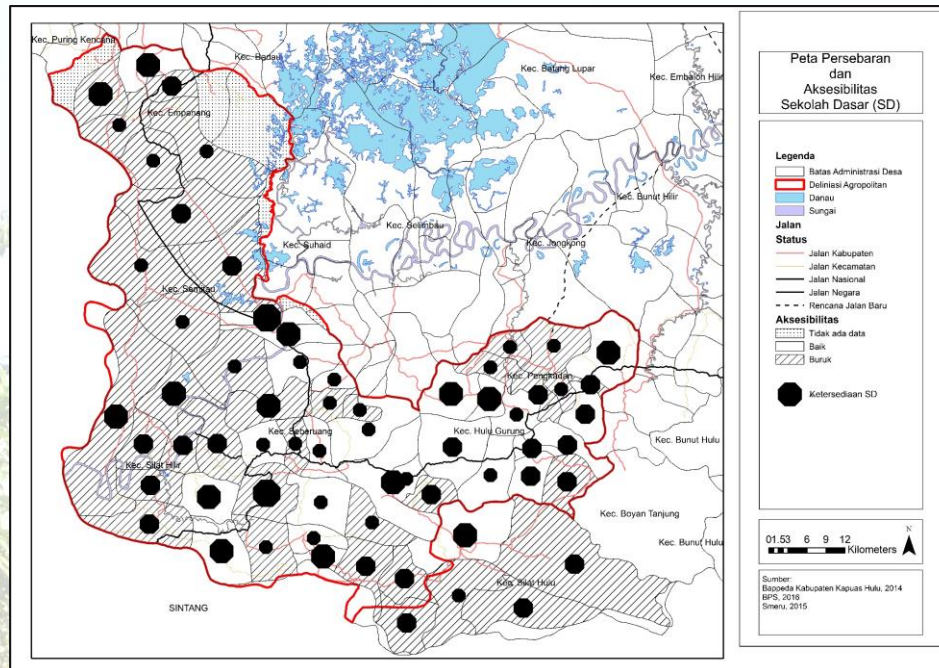
Sumber: Hasil Analisis, 2017

Selain ketersediaan prasarana yang masih rendah, berdasarkan wawancara juga diketahui bahwa tenaga pendidik untuk TK masih sangatlah jarang.

2. Sekolah Dasar (SD)

Dapat dilihat pada Peta Persebaran dan Aksesibilitas Prasarana Sekolah Dasar (SD), jumlah prasarana SD sudah cukup banyak dan tersebar. Desa dengan lingkaran yang lebih besar dari yang lainnya mewakili desa yang memiliki jumlah SD lebih dari satu. Pada peta tersebut didapatkan bahwa desa yang memiliki jumlah SD lebih dari satu memiliki kondisi jalan yang lebih baik dibandingkan dengan desa yang memiliki jumlah prasarana SD hanya satu.

Gambar IV.61 Persebaran dan Aksesibilitas Prasarana Sekolah Dasar (SD)



Sumber: Hasil Pengolahan, 2017

Berdasarkan perhitungan tingkat pelayanan sekolah dasar di tujuh kecamatan di Kawasan Agropolitan, jumlah sekolah dasar sudah memenuhi standar kebutuhan sekolah dasar yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan seperti yang ditampilkan pada Tabel Tingkat Ketersediaan Prasarana Sekolah Dasar di Kawasan Agropolitan. Kecamatan dengan tingkat pelayanan tertinggi adalah Kecamatan Empanang, walaupun jumlah penduduknya rendah, di kecamatan ini terdapat jumlah sekolah dasar yang lima kali lebih banyak dari jumlah yang dibutuhkan.

Tabel IV.35 Tingkat Ketersediaan Prasarana Sekolah Dasar (SD) di Kawasan Agropolitan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Desa	Jumlah SD Eksisting	Jumlah SD Standar	Surplus/ Defisit	Tingkat ketersediaan (%)	Keterangan
1	Silat Hilir	18808	13	31	12	19	258.33	Berlebih
2	Silat Hulu	11887	14	23	7	16	328.57	Berlebih
3	Hulu Gurung	13664	15	22	9	13	244.44	Berlebih
4	Pengkadan	8814	11	17	6	11	283.33	Berlebih
5	Seberuang	11420	15	20	7	13	285.71	Berlebih
6	Semitau	8850	12	15	6	9	250.00	Berlebih
7	Empanang	3165	6	11	2	9	550.00	Berlebih

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Sama halnya dengan prasarana TK, lokasi dan persebaran prasarana SD pun perlu diperhatikan. Dengan mempertimbangkan kemampuan berjalan anak yang terbatas, sehingga lebih baik SD tersebut tersebar merata di masing-masing desa. Jika melihat Tabel Tingkat Ketersediaan SD di Kawasan Agropolitan. Kebutuhan SD di Kawasan Agropolitan, jumlah ketersediaan telah mencukupi pelayanan di masing-masing kecamatan. Namun ternyata walaupun jumlahnya sudah banyak, tidak semua desa dilengkapi oleh Sekolah Dasar. Oleh karena itu, terdapat penyesuaian perhitungan standar dengan kondisi yang ada yang dapat dilihat pada Tabel kebutuhan Prasarana SD di Kawasan Agropolitan. Desa-desa yang belum terlayani Sekolah Dasar menjadi desa yang diprioritaskan untuk dibangun SD. Daftar desa tersebut dapat dilihat pada tabel selanjutnya, Tabel Desa yang Membutuhkan Prasarana SD. Untuk beberapa kecamatan, sudah terdapat kecamatan-kecamatan yang memiliki jumlah prasarana diatas jumlah kebutuhan, sehingga terdapat penyesuaian kebutuhan yang ditampilkan pada tabel selanjutnya.

Tabel IV.36 Kebutuhan Prasarana Sekolah Dasar (SD) di Kawasan Agropolitan Berdasarkan Standar

No	Kecamatan	Ketersediaan (2015)	Jumlah Desa	Kebutuhan								
				2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2037
1	Silat Hilir	31	13	11	11	12	12	12	13	14	15	15
2	Silat Hulu	23	14	7	7	7	7	8	8	8	8	8
3	Hulu Gurung	22	15	8	8	8	8	8	9	9	10	10
4	Pengkadan	17	11	6	6	6	6	6	7	7	7	7
5	Seberuang	20	15	7	7	7	7	7	7	7	8	8
6	Semitau	15	12	5	5	5	5	6	6	6	7	7
7	Empanang	11	6	2	2	2	2	2	2	2	2	3

Tabel IV.37 Kebutuhan Prasarana Sekolah Dasar (SD) di Kawasan Agropolitan Berdasarkan Penyesuaian dan Ketersediaan

No	Kecamatan	Ketersediaan (2015)	Jumlah Desa	Kebutuhan								
				2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2037
1	Silat Hilir	31	13	31	31	31	31	31	31	31	31	31
2	Silat Hulu	23	14	23	23	23	23	23	23	23	23	23
3	Hulu Gurung	22	15	22	22	22	22	22	22	22	22	22
4	Pengkadan	17	11	17	17	17	17	17	17	17	17	17
5	Seberuang	20	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20
6	Semitau	15	12	15	15	17	17	17	17	17	17	17
7	Empanang	11	6	11	11	11	11	11	11	11	11	11

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Tabel IV.38 Desa yang Membutuhkan Prasarana Sekolah Dasar (SD)

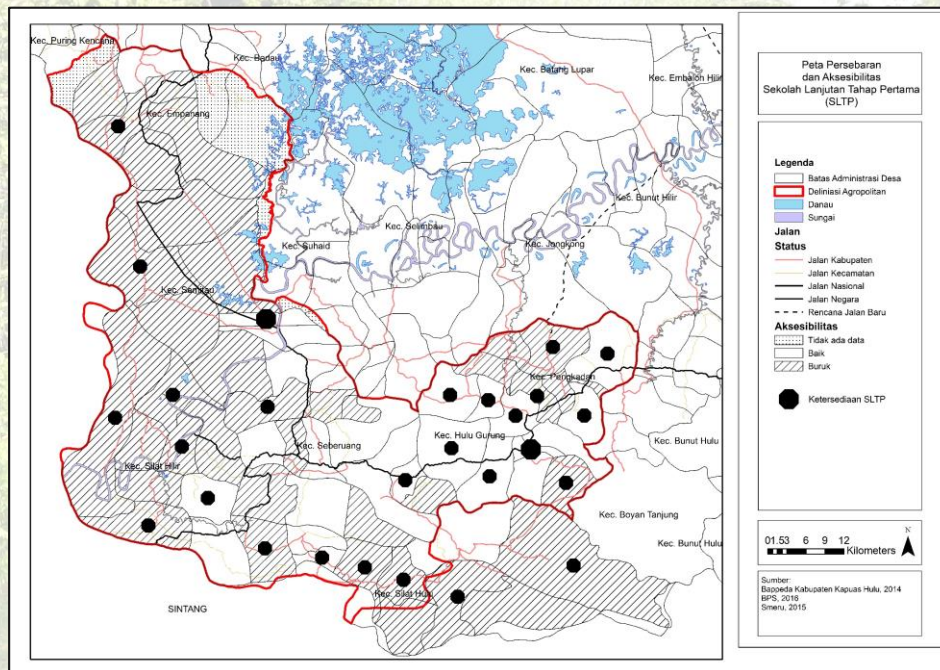
Silat Hilir	Silat Hulu	Hulu Gurung	Pengkadan	Seberuang	Semitau	Empanang
-	-	-	-	-	Marsedan Raya	-
-	-	-	-	-	Na. Lemedak	-

Sumber: Hasil Analisis, 2017

3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

Sama halnya dengan SD, prasarana ini juga memiliki jumlah yang banyak dan jika dilihat penyebarannya sudah menyebar namun hamper seluruh prasarana SLTP tersebut didukung dengan aksesibilitas yang baik, seperti yang ditampilkan oleh Peta Persebaran dan Aksesibilitas menuju Prasarana SLTP. Sama halnya dengan kondisi prasarana SD, hanya desa yang memiliki lingkaran yang lebih besar yang artinya memiliki lebih dari satu prasarana SLTP, yang dilengkapi oleh kondisi jalan yang baik. Selain itu, dapat dilihat pada Tabel Jarak Terdekat dalam Mengakses Sekolah Lanjut Tingkat Pertama di Kawasan Agropolitan, masih terdapat Desa yang harus menempuh jarak lebih dari lima puluh kilometer, terutama desa-desa yang ada di Kecamatan Seberuang, seperti Desa Beluis Harum, Desa Gurung, Desa bati, Desa Pala Kota, dan Desa Bekuan.

Gambar IV.62 Persebaran dan Aksesibilitas Prasarana Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP)



Sumber: Hasil Pengolahan, 2017

Tabel IV.39 Jarak Terdekat yang Ditempuh untuk Mengakses Prasarana Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP)

No	Desa	Jarak (km)	No	Desa	Jarak (km)	No	Desa	Jarak (km)	No	Desa	Jarak (km)
Kecamatan Silat Hilir			Kecamatan Hulu Gurung			Kecamatan Seberuang			Kecamatan Empanang		
1	Bongkong	-	1	Parang	-	1	Ranyai	16.3	1	Keling Panggau	9
2	Nanga Nuar	4	2	Lubuk Antuk	-	2	Sejiram	1.3	2	Bajau Andai	10
3	Setunggul	5.8	3	Nanga Tepuai	-	3	Beluis Harum	85.6	3	Tintin Peninjau	15
4	Sungai Sena	-	4	Landau Kumpang	2.5	4	Gurung	83.7	4	Nanga Kantuk	-
5	Miau Merah	-	5	Nanga Yen	-	5	Bati	61.5	5	Kumang Jaya	7
6	Pangeran	2	6	Kelakar	1	6	Seneban	17.7	6	Laja Sandang	4
7	Baru	-	7	Bugang	-	7	Belikai	-			
8	Perigi	1	8	Mentawit	-	8	Pala Kota	53.7			
9	Penai	-	9	Tani Makmur	-	9	Emperiang	17.4			
10	Seberu	3	10	Simpang Senara	2	10	Nanga Lot	48.6			
11	Sentabai		11	Kelakar	1	11	Tanjung Keliling	49.2			
12	Rumbih	3.2	12	Sejahtera Mandiri	0.5	12	Tajum Mada	-			
			13	Mubung	-	13	Jeranjang	5.5			
Kecamatan Silat Hulu			14	Tunas Muda	2	14	Bekuan	61.9			
1	Nanga Ngeri	-	15	Karya Mandiri	-	15	Nanga Pala	18.9			
2	Landau Badai	-	Kecamatan Pengkadan			Kecamatan Semitau					
3	Nanga Lungu	-	1	Permata	15	1	Nanga Seberuang	22			
4	Nanga Luan	8	2	Marta Dana	1	2	Kenerak	8			
5	Belimbing	5	3	RIAM PANJANG	-	3	Semitau Hulu	-			
6	Nanga Dangkan I	1.5	4	Buak Limbang	-	4	Kenepai Komplek	-			
7	Riam Tapang	-	5	Mawan	-	5	Entipan	46			
8	Nanga Dangkan li	-	6	Kerangan Panjang	6	6	Semitau Hilir	1			
9	Lebak Najah	6	7	Hulu Pengkadan	8	7	Nanga Kenepai	10			
10	Perejuk	20	8	Pinang Laka	-	8	Tua	25			
11	Landau Rantau	20	9	Sasan	10	9	Nanga Lemedak	26			
12	Entabi	8	10	Pengkadan Hilir	6	10	Marsedan Raya	8			
13	Selangkai	72	11	Sira Jaya	-	11	Padung Kumang	40			
14	Selimu	4				12	Sekedau	30			

Sumber: Potensi Desa 2014

(-) tidak ada data

Berdasarkan perhitungan tingkat pelayanan, tingkat ketersediaan SLTP yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk juga sudah memadai seperti yang sudah ditampilkan dalam Tabel Tingkat Ketersediaan Prasarana SLTA di Kawasan Agropolitan. Tingkat ketersediaannya telah mencapai 100 persen dan 100 persen lebih. Bahkan dengan melihat Tabel Kebutuhan

Prasarana SLTP di Kawasan Agropolitan, hingga tahun 2034, kebutuhan terhadap prasarana SLTP tidak melebihi ketersediaan prasarana yang ada saat ini. Walaupun begitu, perbaikan infrastruktur jalan juga dibutuhkan agar dapat memudahkan akses menuju prasarana SLTP.

Tabel IV.40 Tingkat Ketersediaan Prasarana Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Kawasan Agropolitan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Desa	Jumlah SLTP Eksisting	Jumlah SLTP Standar	Surplus/ Defisit	Tingkat ketersediaan (%)	Keterangan
1	Silat Hilir	18808	13	6	4	2	150.00	Berlebih
2	Silat Hulu	11887	14	5	2	3	250.00	Berlebih
3	Hulu Gurung	13664	15	10	3	7	333.33	Berlebih
4	Pengkadan	8814	11	5	2	3	250.00	Berlebih
5	Seberuang	11420	15	2	2	0	100.00	Cukup
6	Semitau	8850	12	3	2	1	150.00	Berlebih
7	Empanang	3165	6	1	1	0	100.00	Cukup

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Tabel IV.41 Kebutuhan Prasarana Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) di Kawasan Agropolitan Berdasarkan Standar

No	Kecamatan	Ketersediaan (2015)	Jumlah Desa	Kabutuhan								
				2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2037
1	Silat Hilir	6	13	4	4	4	4	4	4	5	5	5
2	Silat Hulu	5	14	2	2	2	2	2	3	3	3	3
3	Hulu Gurung	10	15	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Pengkadan	5	11	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Seberuang	2	15	2	2	2	2	2	2	2	3	3
6	Semitau	3	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	Empanang	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Tabel IV.42 Kebutuhan Prasarana Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) di Kawasan Agropolitan Berdasarkan Penyesuaian dan Ketersediaan

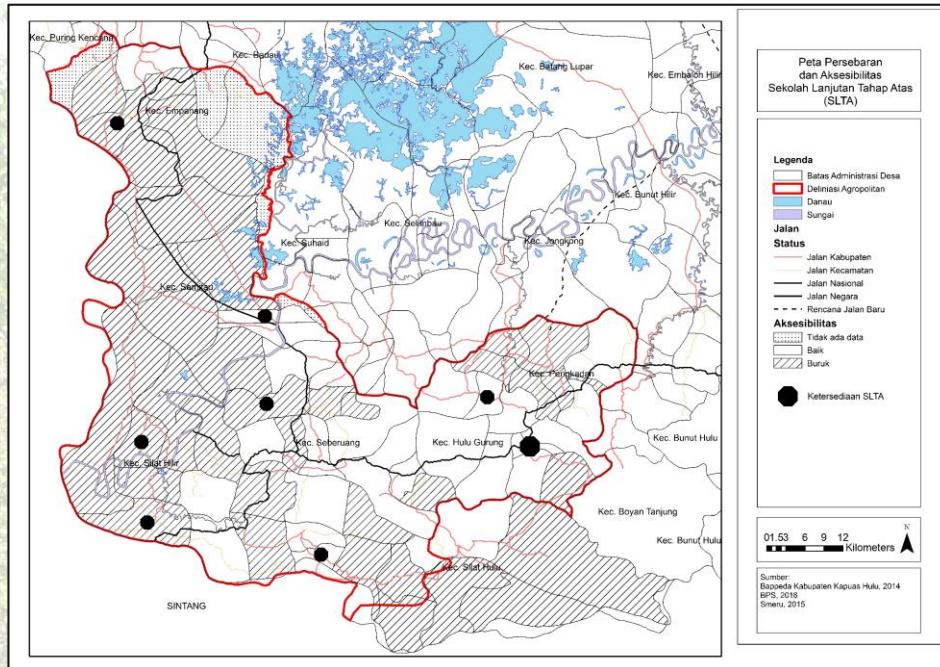
No	Kecamatan	Ketersediaan (2015)	Jumlah Desa	Kabutuhan								
				2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2037
1	Silat Hilir	6	13	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	Silat Hulu	5	14	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	Hulu Gurung	10	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4	Pengkadan	5	11	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	Seberuang	2	15	2	2	2	2	2	2	2	3	3
6	Semitau	3	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	Empanang	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Sumber: Hasil Analisis, 2017

4. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)

Prasarana SLTA tersebar di masing-masing kecamatan. Namun, lokasi prasarana SLTA yang tersebar tidak didukung dengan aksesibilitas yang baik seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Hanya SLTA yang berada di Kecamatan Hulu Gurung, SLTA di Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau, dan SLTA yang berada di Desa Nanga Dangkan II di Kecamatan Silat Hulu yang memiliki kondisi jalan yang baik, yaitu yang dapat ditempuh sepanjang tahun.

Gambar IV.63 Persebaran dan Aksesibilitas Prasarana Sekolah Tingkat Lanjutan Atas (SLTA)



Sumber: Hasil Pengolahan, 2017

Berdasarkan tabel mengenai jarak terdekat untuk mengakses sarana pendidikan yang telah ditampilkan pada bagian gambaran umum, didapatkan terdapat siswa SLTA yang perlu menempuh jarak lebih dari 50 km untuk dapat mengakses gedung SLTA seperti yang terjadi di beberapa desa di Kecamatan Silat Hulu: Desa Riam Tapang, Desa Landau Rantau, dan Desa Selangkai, Kecamatan Seberuang: Desa Beluis Harum, Desa Gurung, Desa Bati, Desai Belikai dan Desa Pala Kota. Berdasarkan standar, memang cakupan pelayanan sarana SLTA lebih luas dibandingkan sarana pendidikan SD, SMP, dan SLTA, namun mengingat terdapat desa yang masih perlu menempuh jarak 90 km untuk mencapai SLTA, diperlukan peningkatan kualitas kondisi jalan atau bahkan menambahkan SLTA di desa tersebut.

Tabel IV.43 Jarak Terdekat yang Ditempuh untuk Mengakses Prasarana Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA)

No	Desa	Jarak (km)	No	Desa	Jarak (km)	No	Desa	Jarak (km)	No	Desa	Jarak (km)
Kecamatan Silat Hilir			Kecamatan Hulu Gurung			Kecamatan Seberuang			Kecamatan Emanang		

FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STARTEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Desa	Jarak (km)	No	Desa	Jarak (km)	No	Desa	Jarak (km)	No	Desa	Jarak (km)
1	Bongkong	12	1	Parang	9.8	1	Ranyai	16.7	1	Keling Panggau	38
2	Nanga Nuar	13	2	Lubuk Antuk	4	2	Sejiram	1.3	2	Bajau Andai	19
3	Setunggul	14.8	3	Nanga Tepuai	-	3	Beluis Harum	89.7	3	Tintin Peninjau	17
4	Sungai Sena	14.2	4	Landau Kumpang	4	4	Gurung	99.8	4	Nanga Kantuk	10
5	Miau Merah	14.2	5	Nanga Yen	10.5	5	Bati	65.3	5	Kumang Jaya	34
6	Pangeran	3	6	Kelakar	4.5	6	Seneban	48	6	Laja Sandang	14
7	Baru	4	7	Bugang	8	7	Belikai	52.7			
8	Perigi		8	Mentawit	-	8	Pala Kota	55.5			
9	Penai	20.2	9	Tani Makmur	22	9	Emperiang	17.8			
10	Seberu	15	10	Simpang Senara	7	10	Nanga Lot	48.4			
11	Sentabai	8.4	11	Kelakar	4.5	11	Tanjung Keliling	49.4			
12	Rumbih	10.3	12	Sejahtera Mandiri	3	12	Tajum Mada	-			
				Mubung	6	13	Jeranjang	5.4			
	Kecamatan Silat Hulu		14	Tunas Muda	16	14	Bekuan	61.9			
1	Nanga Ngeri	14	15	Karya Mandiri	4	15	Nanga Pala	16.8			
2	Landau Badai	30		Kecamatan Pengkadan			Kecamatan Semitau				
3	Nanga Lungu	30	1	Permata	20	1	Nanga Seberuang	22			
4	Nanga Luan	45	2	Marta Dana	2	2	Kenerak	8			
5	Belimbing	5	3	Riam Panjang	1	3	Semitau Hulu	-			
6	Nanga Dangkan I	1.5	4	Buak Limbang	4	4	Kenepai Komplek	35			
7	Riam Tapang	70	5	Mawan	6	5	Entipan	46			
8	Nanga Dangkan li		6	Kerangan Panjang	8	6	Semitau Hilir	1			
9	Lebak Najah	6	7	Hulu Pengkadan	6	7	Nanga Kenepai	10			
10	Perejuk	35	8	Pinang Laka	8	8	Tua	25			
11	Landau Rantau	60	9	Sasan	16	9	Nanga Lemedak	26			
12	Entabi	42	10	Pengkadan Hilir	12	10	Marsedan Raya	8			
13	Selangkai	72	11	Sira Jaya	1	11	Padung Kumang	40			
14	Selimu	29				12	Sekedau	30			

Sumber: Potensi Desa 2014

(-) tidak ada data

Berdasarkan standar yang digunakan, satu fasilitas SLTA disediakan untuk 4.800 jiwa penduduk, sehingga SLTA merupakan prasarana yang tidak perlu tersedia pada skala yang cukup kecil seperti SD sehingga tidak perlu dilihat ketersediaannya per desa. Berdasarkan perhitungan, hampir seluruh kecamatan telah terlayani dengan baik namun masih terdapat satu kecamatan dengan tingkat pelayanan yang masih lima puluh persen, yaitu kecamatan Seberuang seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.44 Tingkat Ketersediaan Prasarana Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kawasan Agropolitan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Desa	Jumlah SMA Eksisting	Jumlah SMA Standar	Surplus/Defisit	Tingkat ketersediaan (%)	Keterangan
1	Silat Hilir	18808	13	10	4	6	250.00	Berlebih
2	Silat Hulu	11887	14	5	2	3	250.00	Berlebih
3	Hulu Gurung	13664	15	7	3	4	233.33	Berlebih
4	Pengkadan	8814	11	7	2	5	350.00	Berlebih
5	Seberuang	11420	15	1	2	-1	50.00	Kurang
6	Semitau	8850	12	3	2	1	150.00	Berlebih
7	Empanang	3165	6	1	1	0	100.00	Cukup

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Berdasarkan perhitungan tingkat pelayanan yang telah dilakukan dan hasil proyeksi penduduk, maka kebutuhan prasarana SLTA untuk masing-masing kecamatan dapat dilihat pada dua tabel dibawah. Mengingat terdapat beberapa kecamatan yang sudah memiliki jumlah prasarana berlebih, maka terdapat tabel kebutuhan yang dihitung berdasarkan penyesuaian kondisi dengan jumlah ketersediaan yang ada.

Tabel IV.45 Kebutuhan Prasarana Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) di Kawasan Agropolitan Berdasarkan Standar

No	Kecamatan	Ketersediaan (2015)	Jumlah Desa	Kabutuhan								
				2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2037
1	Silat Hilir	10	13	4	4	4	4	4	4	5	5	5
2	Silat Hulu	5	14	2	2	2	2	2	3	3	3	3
3	Hulu Gurung	7	15	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Pengkadan	7	11	7	7	7	7	7	7	7	7	7
5	Seberuang	1	15	2	2	2	2	2	2	2	3	3
6	Semitau	3	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	Empanang	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Tabel IV.46 Kebutuhan Prasarana Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kawasan Agropolitan Berdasarkan Penyesuaian dan Ketersediaan

No	Kecamatan	Ketersediaan (2015)	Jumlah Desa	Kabutuhan								
				2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2037
1	Silat Hilir	10	13	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	Silat Hulu	5	14	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	Hulu Gurung	7	15	7	7	7	7	7	7	7	7	7
4	Pengkadan	7	11	7	7	7	7	7	7	7	7	7
5	Seberuang	1	15	2	2	2	2	2	2	2	3	3
6	Semitau	3	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	Empanang	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Menurut hasil wawancara, terdapat Sekolah Menengah Kejuruan di bidang pertanian. Sekolah tersebut berlokasi di Kecamatan Hulu Gurung dan Silat Hilir. Dalam pengembangan kawasan agropolitan, tentunya hal tersebut merupakan potensi yang cukup baik. Namun, perlu diperhatikan prasarana tersebut juga perlu didukung dengan sarana yang baik seperti tenaga pendidik terutama pendidik ilmu pertanian, dan sarana lainnya.

4.4.1.2 Sarana dan Prasarana Kesehatan

Dalam menghitung tingkat pelayanan prasarana kesehatan, berikut standar acuan yang digunakan dalam menentukan tingkat pelayanan standar kesehatan berdasarkan SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan 03-1733-2004:

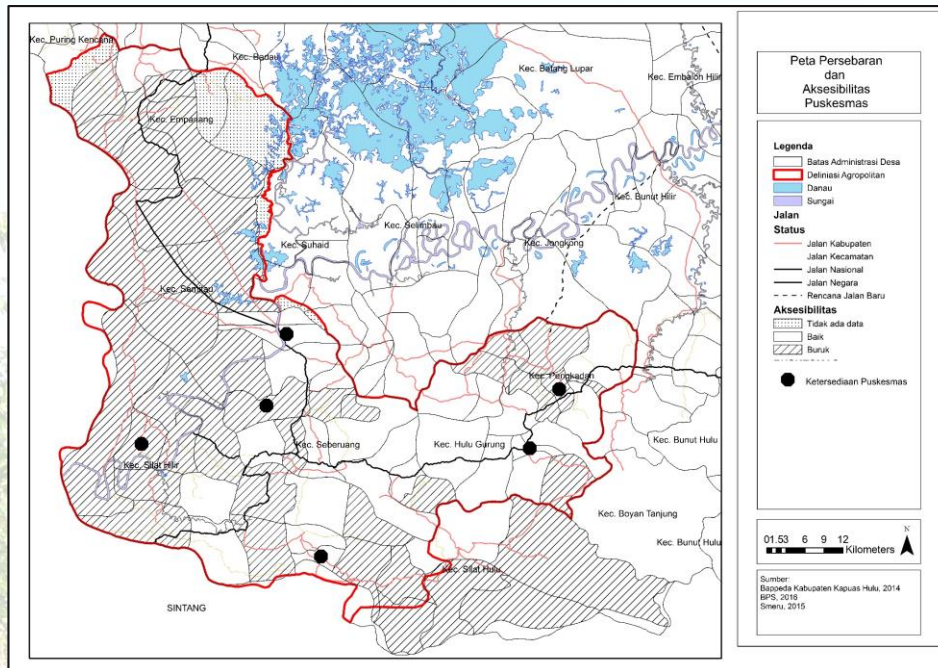
1. Puskesmas memiliki jumlah penduduk pendukung sebesar 120.000 jiwa;
2. Posyandu memiliki jumlah penduduk pendukung sebesar 1250 jiwa;
3. Puskesmas pembantu memiliki jumlah penduduk pendukung sebesar 30.000 jiwa;

Walaupun dalam perhitungan tingkat pelayanan menggunakan standar tersebut, dalam perhitungannya terdapat penyesuaian-penyesuaian karena beberapa kondisi, sebagai ilustrasi yaitu luas kecamatan yang cukup luas. Penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan akan dibahas di masing-masing prasarana kesehatan berikut.

1. Puskesmas

Prasarana Puskesmas yang berada di Kawasan Agropolitan memang sudah tersebar di masing-masing kecamatan. Namun, meskipun setiap kecamatan sudah dilengkapi dengan prasarana puskesmas, ternyata aksesibilitasnya beberapa puskesmas belum didukung kondisi infrastruktur jalan yang baik. Puskesmas di Desa Sejiram Kecamatan Seberuang memiliki kondisi jalan yang tidak bisa dilalui sepanjang tahun. Selain puskesmas di Desa Sejiram, puskesmas lainnya adalah puskesmas yang berlokasi di Desa Perigi Silat Hilir.

Gambar IV.64 Persebaran dan Aksesibilitas Menuju Prasarana Puskesmas



Sumber: Hasil Pengolahan, 2017

Berdasarkan standar yang digunakan, diketahui jumlah penduduk pendukung puskesmas sebesar 120.000 jiwa namun seluruh kecamatan memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih sedikit dari 120.000 jiwa. Selain itu, jika tetap menggunakan standar tersebut sehingga satu puskesmas akan melayani lebih dari satu kecamatan akan menyulitkan penduduk mengingat jarak antar pusat kecamatan cukup jauh. Sehingga standar yang digunakan disesuaikan dengan kondisi tersebut dan dalam perhitungannya didapatkan bahwa dalam satu kecamatan seharusnya terdapat satu puskesmas. Berdasarkan hasil perhitungan, belum seluruh kecamatan memiliki satu puskesmas, kecamatan tersebut adalah kecamatan Empanang. Selain itu, berdasarkan data Podes tahun 2014, jarak terdekat yang ditempuh penduduk di masing-masing kecamatan untuk mencapai puskesmas (rawat inap dan tanpa rawat inap): Kecamatan Silat Hilir sepanjang 16.20 km (rawat inap), 9.43 km (non-rawat inap); Kecamatan Silat Hulu sepanjang 30.79 km (rawat inap) dan 9.43 km (non-rawat inap); Kecamatan Hulu Gurung sepanjang 7.68 km (rawat inap) dan 99.85 km (non-rawat inap); Kecamatan Pengkadan sepanjang 21.29 km (rawat inap) dan 10.57 km (non-rawat inap); Kecamatan Seberuang 99.80 km (rawat inap) dan 99.73 km (non-rawat inap); Kecamatan Semitau sepanjang 63.06 km (rawat inap) dan 44.26 km (non-rawat inap).

Tabel IV.47 Tingkat Ketersediaan Prasarana Puskesmas di Kawasan Agropolitan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Desa	Jumlah (Eksisting)	Jumlah (Standar)	Surplus/ Defisit	Tingkat ketersediaan (%)	Keterangan
1	Silat Hilir	18808	13	1	1	1	100	Cukup
2	Silat Hulu	11887	14	1	1	1	100	Cukup
3	Hulu Gurung	13664	15	1	1	1	100	Cukup
4	Pengkadan	8814	11	1	1	1	100	Cukup
5	Seberuang	11420	15	1	1	1	100	Cukup
6	Semitau	8850	12	1	1	1	100	Cukup
7	Empanang	3165	6	0	1	1	0	Kurang

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Berdasarkan standar dan hasil proyeksi jumlah penduduk yang telah dilakukan, berikut kebutuhan tujuh kecamatan kawasan agopolitan terhadap prasarana puskesmas hingga tahun 2034 tetap satu, yang artinya ketersediaan saat ini dapat melayani kebutuhan masyarakat hingga tahun 2034. Hal tersebut disebabkan oleh proyeksi jumlah penduduk yang tidak meningkat signifikan hingga tahun 2034.

Tabel IV.48 Kebutuhan Prasarana Puskesmas di Kawasan Agropolitan

No	Kecamatan	Ketersediaan (2015)	Jumlah Desa	Kebutuhan									
				2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2034	2035	2037
1	Silat Hilir	1	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Silat Hulu	1	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Hulu Gurung	1	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Pengkadan	1	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Seberuang	1	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Semitau	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Empanang	0	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Sumber: Hasil Analisis, 2017

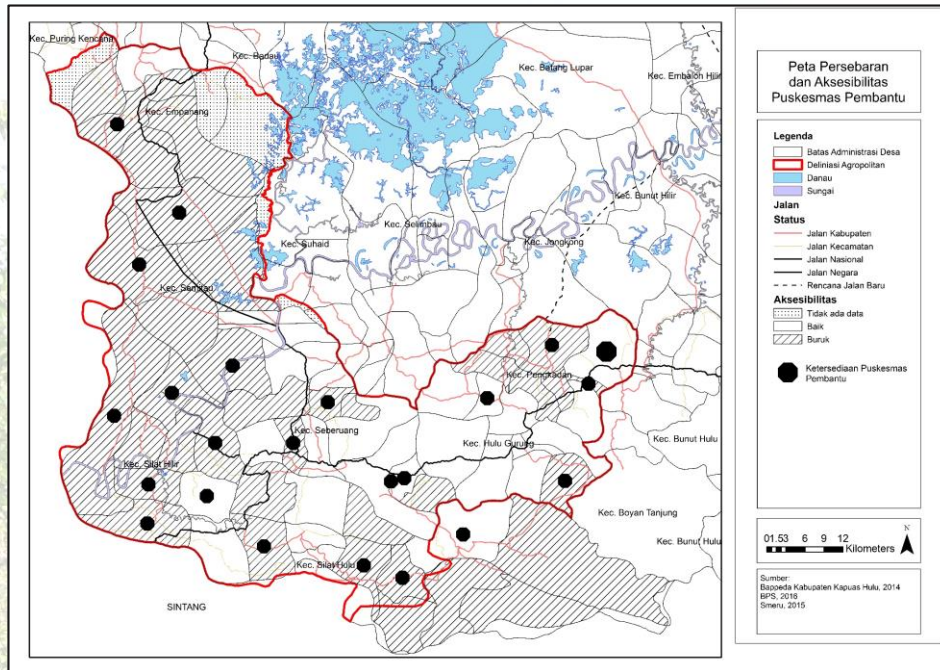
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, tenaga kesehatan puskesmas masih sangatlah kurang. Selain itu, prasarana puskesmas tidak dilengkapi dengan sarana yang cukup seperti ambulans, terutama di Kecamatan Seberuang dan Empanang.

2. Puskesmas Pembantu

Walaupun fungsinya hampir sama dengan puskesmas, jumlah ketersediaan puskesmas pembantu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah puskesmas. Namun, persebarannya tidak ada di setiap desa. Hampir seluruh puskesmas pembantu yang tersedia berlokasi di desa yang memiliki kondisi jalan yang buruk, yaitu jalan yang tidak bisa dilalui sepanjang tahun. Kecamatan Silat Hilir memiliki jumlah puskesmas pembantu yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah puskesmas pembantu di kecamatan lainnya. Hal ini mungkin dapat dikaitkan

dengan kondisi jalan di Kecamatan Silat Hilir yang buruk sehingga ketersediaan puskesmas pembantu lebih tersebar untuk memudahkan masyarakat.

Gambar IV.65 Persebaran dan Aksesibilitas Prasarana Puskesmas Pembantu



Sumber: Hasil Analisis, 2017

Berdasarkan data Podes tahun 2014, jarak terdekat yang ditempuh masyarakat masing-masing kecamatan untuk menempuh puskesmas pembantu terdekat: Kecamatan Silat Hilir sepanjang 4.53 km; Kecamatan Silat Hulu sepanjang 39.19 km; Kecamatan Hulu Gurung sepanjang 44.99 km; Kecamatan Pengkadan sepanjang 7.86 km; Kecamatan Seberuang 7.67 km; Kecamatan Semitau sepanjang 45.97; dan Kecamatan Empanang sepanjang 14.75 km. Berdasarkan data tersebut maka jarak terdekat yang ditempuh adalah masyarakat di Kecamatan Silat Hilir, dan terjauh adalah masyarakat di Kecamatan Semitau. Masih terdapat desa-desa yang harus menempuh jarak sangat jauh, yaitu di atas 50 km untuk mengakses prasarana puskesmas pembantu. Jarak untuk masing-masing desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.49 Jarak Terdekat yang Ditempuh untuk Mengakses Prasarana Puskesmas Pembantu

No	Desa	Jarak (km)	No	Desa	Jarak (km)	No	Desa	Jarak (km)	No	Desa	Jarak (km)
Kecamatan Silat Hilir			Kecamatan Hulu Gurung			Kecamatan Seberuang			Kecamatan Empanang		
1	Bongkong	-	1	Parang	99.90	1	Ranyai	-	1	Keling Panggau	12.00
2	Nanga Nuar	-	2	Lubuk Antuk	17.00	2	Sejiram	-	2	Bajau Andai	3.00
3	Setunggul	-	3	Nanga Tepuai	-	3	Beluis Harum	8.20	3	Tintin Peninjau	-

FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STARTEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Desa	Jarak (km)	No	Desa	Jarak (km)	No	Desa	Jarak (km)	No	Desa	Jarak (km)
4	Sungai Sena	-	4	Landau Kumpang	14.50	4	Gurung	9.30	4	Nanga Kantuk	-
5	Miau Merah	-	5	Nanga Yen	-	5	Bati	-	5	Kumang Jaya	25.00
6	Pangeran	-	6	Kelakar	99.90	6	Seneban	-	6	Laja Sandang	19.00
7	Baru	3.00	7	Bugang	7.00	7	Belikai	-			
8	Perigi	-	8	Mentawit	-	8	Pala Kota	7.30			
9	Penai	-	9	Tani Makmur	99.80	9	Emperiang	8.70			
10	Seberu	5.40	10	Simpang Senara	6.00	10	Nanga Lot	9.70			
11	Sentabai	-	11	Kelakar	99.80	11	Tanjung Keliling	7.30			
12	Rumbih	5.20	12	Sejahtera Mandiri	15.00	12	Tajum Mada	-			
		-	13	Mubung	-	13	Jeranjang	8.50			
Kecamatan Silat Hulu			14	Tunas Muda	28.00	14	Bekuan	2.70			
1	Nanga Ngeri	-	15	Karya Mandiri	8.00	15	Nanga Pala	7.30			
2	Landau Badai	-	Kecamatan Pengkadan			Kecamatan Semitau					
3	Nanga Lungu	-	1	Permata	15.00	1	Nanga Seberuang	22.00			
4	Nanga Luan	-	2	Marta Dana	-	2	Kenerak	20.00			
5	Belimbing	5.00	3	Riam Panjang	4.00	3	Semitau Hulu	99.90			
6	Nanga Dangkan I	1.50	4	Buak Limbang	-	4	Kenepai Komplek	-			
7	Riam Tapang	-	5	Mawan	-	5	Entipan	-			
8	Nanga Dangkan li	-	6	Kerangan Panjang	8.00	6	Semitau Hilir	-			
9	Lebak Najah	20.00	7	Hulu Pengkadan	-	7	Nanga Kenepai	10.00			
10	Perejuk	-	8	Pinang Laka	6.00	8	Tua	-			
11	Landau Rantau	60.00	9	Sasan	12.00	9	Nanga Lemedak	-			
12	Entabi	16.00	10	Pengkadan Hilir	6.00	10	Marsedan Raya	99.90			
13	Selangkai	72.00	11	Sira Jaya	4.00	11	Padung Kumang	40.00			
14	Selimu	99.80				12	Sekedau	30.00			

Sumber: Potensi Desa 2014

(-) tidak ada data

Kemudian, berdasarkan standar yang digunakan, diketahui jumlah penduduk pendukung puskesmas pembantu cukup besar, yaitu 30.000 jiwa, sedangkan jumlah penduduk masing-masing kecamatan tidak mencapai 30.000 jiwa dan jumlah penduduk dengan jumlah yang paling tinggi adalah penduduk Kecamatan Silat Hilir dengan jumlah penduduk 18.808 jiwa. Walaupun begitu, bukan berarti peran puskesmas pembantu tidak dibutuhkan. Mengingat antar pusat kecamatan memiliki jarak yang cukup jauh, setidaknya di dalam satu kecamatan

memiliki satu puskesmas dan terdapat puskesmas pembantu. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat pelayanan, seluruh kecamatan telah dilengkapi oleh puskesmas pembantu.

Tabel IV.50 Tingkat Ketersediaan Prasarana Puskesmas Pembantu di Kawasan Agropolitan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Desa	Jumlah Eksisting	Jumlah Standar	Surplus/ Defisit	Tingkat ketersediaan (%)	Keterangan
1	Silat Hilir	18808	13	8	1	7	1276	Berlebih
2	Silat Hulu	11887	14	3	1	2	300	Berlebih
3	Hulu Gurung	13664	15	2	1	1	200	Berlebih
4	Pengkadan	8814	11	4	1	3	400	Berlebih
5	Seberuang	11420	15	4	1	3	400	Berlebih
6	Semitau	8850	12	4	1	3	400	Berlebih
7	Empanang	3165	6	1	1	0	100	Kurang

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Berdasarkan proyeksi penduduk dan penyesuaian yang telah dilakukan dalam menghitung tingkat pelayanan, maka kebutuhan terhadap prasarana puskesmas pembantu dapat dilihat pada Tabel Kebutuhan Prasarana Puskesmas Pembantu di Kawasan Agropolitan Berdasarkan Standar. Tidak terlihat penambahan kebutuhan karena memang proyeksi penduduk menunjukkan pertumbuhan yang tidak terlalu signifikan. Namun, karena terdapat kecamatan-kecamatan yang sudah memiliki prasarana melebihi jumlah prasarana yang dibutuhkan sesuai standar, jadi kebutuhan dihitung sesuai dengan kondisi yang ada dan ketersediaan yang ada.

Tabel IV.51 Kebutuhan Prasarana Puskesmas Pembantu di Kawasan Agropolitan Berdasarkan Standar

No	Kecamatan	Ketersediaan (2015)	Jumlah Desa	Kebutuhan								
				2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2037
1	Silat Hilir	8	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Silat Hulu	3	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Hulu Gurung	2	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Pengkadan	4	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Seberuang	4	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Semitau	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Empanang	0	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabel IV.52 Kebutuhan Prasarana Puskesmas Pembantu di Kawasan Agropolitan Berdasarkan Penyesuaian dan Ketersediaan

No	Kecamatan	Ketersediaan (2015)	Jumlah Desa	Kebutuhan								
				2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2037
1	Silat Hilir	8	13	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2	Silat Hulu	3	14	3	3	3	3	3	3	3	3	3

FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STARTEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU

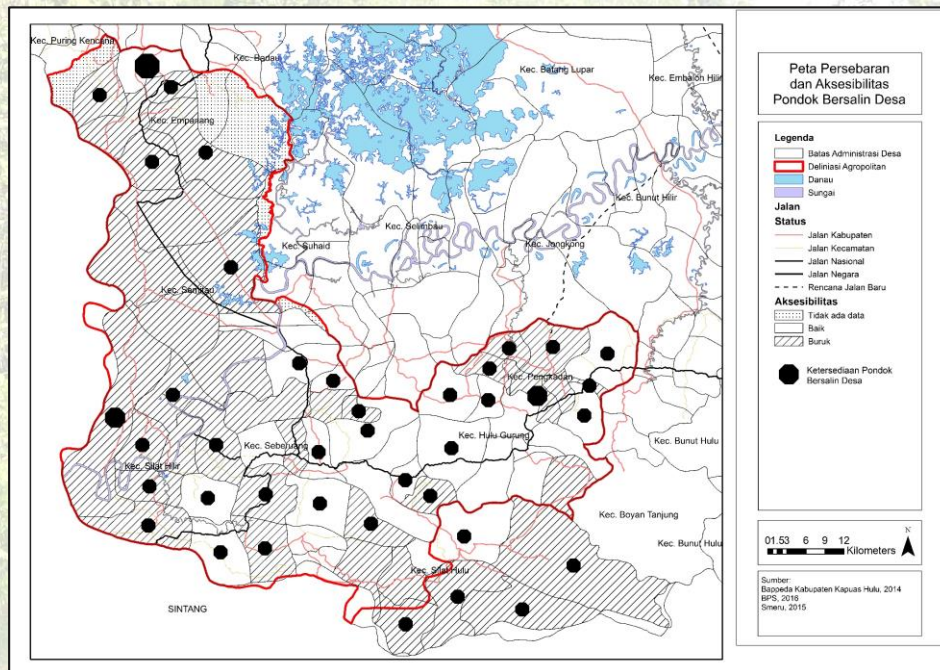
No	Kecamatan	Ketersediaan (2015)	Jumlah Desa	Kabutuhan								
				2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2037
3	Hulu Gurung	2	15	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Pengkadan	4	11	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	Seberuang	4	15	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	Semitau	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	Empanang	0	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Sumber: Hasil Analisis, 2017

3. Pondok Bersalin Desa (Polindes)

Pondok bersalin yang ada di setiap desa memiliki peran yang penting mengingat persalinan tidak bisa dilakukan di puskesmas dan membutuhkan tindakan yang sangat segera. Oleh karena itu, diharapkan ketersediaan prasarana pondok bersalin desa dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Berdasarkan Gambar Persebaran dan Aksesibilitas Prasarana Polindes yang ditampilkan berikut, polindes yang ada belum didukung dengan infrastruktur jalan yang baik. Pondok bersalin yang kondisi jalan desanya masih buruk lebih baik dapat segera diperbaiki karena penduduk yang mau melahirkan di polindes harus ditangani dengan segera.

Gambar IV.66 Persebaran dan Aksesibilitas Menuju Prasarana Pondok Bersalin Desa



Sumber: Hasil Pengolahan, 2017

Selain itu, dapat dilihat pada Tabel Jarak Terdekat untuk Menempuh Prasarana Pondok Bersalin Desa, masih terdapat masyarakat desa yang harus menempuh jarak melebihi lima puluh kilometer untuk mencapai polindes, seperti yang terjadi di Desa Mentawit di Kecamatan Hulu

FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STARTEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU

Gurung; Desa Landau Rantau di Kecamatan Silat Hulu; Desa Rinyai, Desa Nanga Lota, dan Desa Tajum Mada di Kecamatan Seberuang; dan Desa Semitau Hulu di Kecamatan Semitau.

Tabel IV.53 Jarak Terdekat untuk Menempuh Prasarana Pondok Bersalin Desa

No	Desa	Jarak (km)	No	Desa	Jarak (km)	No	Desa	Jarak (km)	No	Desa	Jarak (km)
Kecamatan Silat Hilir			Kecamatan Hulu Gurung			Kecamatan Seberuang			Kecamatan Empanang		
1	Bongkong	-	1	Parang	14.00	1	Ranyai	99.80	1	Keling Panggau	-
2	Nanga Nuar	-	2	Lubuk Antuk	6.00	2	Sejiram	5.30	2	Bajau Andai	-
3	Setunggul	-	3	Nanga Tepuai	6.00	3	Beluis Harum	4.10	3	Tintin Peninjau	2.00
4	Sungai Sena	-	4	Landau Kumpang	1.00	4	Gurung	-	4	Nanga Kantuk	12.00
5	Miau Merah	-	5	Nanga Yen	-	5	Bati	8.30	5	Kumang Jaya	-
6	Pangeran	-	6	Kelakar	3.00	6	Seneban	7.30	6	Laja Sandang	16.00
7	Baru	3.00	7	Bugang	1.00	7	Belikai	-			
8	Perigi	1.00	8	Mentawit	99.90	8	Pala Kota	-			
9	Penai	-	9	Tani Makmur	14.00	9	Emperiang	8.70			
10	Seberu	-	10	Simpang Senara	-	10	Nanga Lot	99.80			
11	Sentabai	-	11	Kelakar	3.50	11	Tanjung Keliling	7.20			
12	Rumbih	5.20	12	Sejahtera Mandiri	5.00	12	Tajum Mada	99.80			
13	Bukit Penai	5.00	13	Mubung	12.00	13	Jerenjang	-			
Kecamatan Silat Hulu			Kecamatan Pengkadan			Kecamatan Semitau					
1	Nanga Ngeri	14.00	14	Tunas Muda	1.00	14	Bekuan	-	15	Nanga Pala	8.30
2	Landau Badai	29.00	15	Karya Mandiri	-	15	Nanga Pala	8.30			
3	Nanga Lungu	30.00	1	Permata	15.00	1	Nanga Seberuang	-			
4	Nanga Luan	25.00	2	Marta Dana	1.00	2	Kenerak	-			
5	Belimbing	15.00	3	Riam Panjang	1.00	3	Semitau Hulu	99.90			
6	Nanga Dangkan I	4.00	4	Buak Limbang	-	4	Kenepai Komplek	10.00			
7	Riam Tapang	2.00	5	Mawan	-	5	Entipan	-			
8	Nanga Dangkan li	6.00	6	Kerangan Panjang	-	6	Semitau Hilir	15.00			
9	Lebak Najah	5.00	7	Hulu Pengkadan	-	7	Nanga Kenepai	-			
10	Perejuk	35.00	8	Pinang Laka	-	8	Tua	-			
11	Landau Rantau	75.00	9	Sasan	10.00	9	Nanga Lemedak	15.00			
12	Entabi	16.00	10	Pengkadan Hilir	18.00	10	Marsedan Raya	99.90			
13	Selangkai	-	11	Sira Jaya	-	11	Padung Kumang	40.00			
14	Selimu	99.90				12	Sekedau	-			

Sumber: Potensi Desa 2014
(-) tidak ada data

Pondok bersalin desa (polindes) merupakan salah satu sarana dan prasarana kesehatan yang penting namun standar pelayanannya tidak diatur dalam SNI. Polindes adalah salah satu bentuk peran masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak (termasuk KB) (Depkes RI, 1999). Peran polindes ini sangat penting keberadaannya untuk masyarakat karena tidak adanya klinik bersalin yang tersedia. Dalam penentuan tingkat pelayanan, polindes ini diharapkan dapat melayani satu kecamatan, bahkan lebih baik di setiap desa memiliki 1 polindes mengingat keberadaan klinik bersalin sangatlah penting. Berdasarkan kondisi tersebut, maka berikut tingkat pelayanan polindes saat ini:

Tabel IV.54 Tingkat Ketersediaan Prasarana Pondok Bersalin Desa (Polindes) di Kawasan Agropolitan (Standar Kecamatan)

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Desa	Jumlah Eksisting	Jumlah Standar	Surplus/ Defisit	Tingkat ketersediaan (%)	Keterangan
1	Silat Hilir	18808	13	11	13	-2	84.62	Kurang
2	Silat Hulu	11887	14	9	14	-5	64.29	Kurang
3	Hulu Gurung	13664	15	3	15	-12	20.00	Kurang
4	Pengkadan	8814	11	12	11	1	109.09	Berlebih
5	Seberuang	11420	15	8	15	-7	53.33	Kurang
6	Semitau	8850	12	2	12	-10	16.67	Kurang
7	Empanang	3165	6	7	6	1	116.67	Berlebih

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Masih terdapat desa-desa yang belum dilengkapi oleh polindes. Penambahan-penambahan prasarana polindes yang dibutuhkan seperti yang ditunjukkan oleh Kebutuhan Polindes pada tabel mengenai tingkat ketersediaan Polindes, sebaiknya diperuntukan untuk desa-desa pada kecamatan yang dapat dilihat pada Tabel Desa yang Membutuhkan Polindes.

Tabel IV.55 Kebutuhan Prasarana Pondok Bersalin Desa (Polindes) di Kawasan Agropolitan Berdasarkan Penyesuaian dan Kebutuhan

No	Kecamatan	Ketersediaan (2015)	Jumlah Desa	Kebutuhan								
				2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2034	2035
1	Silat Hilir	11	13	11	11	14	14	14	14	14	14	14
2	Silat Hulu	9	14	9	9	14	14	14	14	14	14	14
3	Hulu Gurung	7	15	7	7	15	15	15	15	15	15	15
4	Pengkadan	12	11	13	13	13	13	13	13	13	13	13
5	Seberuang	8	15	8	8	15	15	15	15	15	15	15
6	Semitau	2	12	2	2	12	12	12	12	12	12	12
7	Empanang	7	6	7	7	8	8	8	8	8	8	8

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Tabel IV.56 Desa yang Membutuhkan Pondok Bersalin Desa (Polindes)

Silat Hilir	Silat Hulu	Hulu Gurung	Pengkadan	Seberuang	Semtau	Empanang
Baru	Nanga Ngeri	Lubuk Antuk	Martadana	Rinyai	Semtau Hulu	Nanga Kantuk
Rumbih	Landau Badai	Nanga Yen		Sejiram	Nanga Seberuang	
Bukit Penai	Nanga Dangkan	Landau Kupang		Gurung	Kenepao Komplek	
	Dangkan Kota	Nanga Tepuai		Seneban	Entipan	
	Entabi	Kelakar		Pala Kota	Silat Hilir	
		Bugang		Tanjung Mada	Tua Abang	
		Sejahtera Mandiri		Bekuan	Mersedan Raya	
		Tunas Muda			Na. Lemedek	
					Sekedau	
					Padung Kumang	

Sumber: Hasil Analisis, 2017

4. Posyandu

Berbeda dengan prasarana kesehatan lainnya yang telah dibahas, posyandu memiliki skala pelayanan yang lebih kecil dan kegiatannya merupakan kegiatan musiman sehingga tidak adanya bangunan fisik/ prasarana khusus untuk posyandu bukan masalah yang utama karena kegiatan posyandu dapat dilakukan di kantor kecamatan atau kantor desa. Hal yang utama adalah di setiap desa memiliki prasarana yang dapat mendukung kegiatan posyandu ini dan skala yang dilihat ketersediaannya adalah desa. Berdasarkan perhitungan tingkat pelayanan yang telah dilakukan, seluruh kecamatan telah dilengkapi oleh sarana posyandu.

Tabel IV.57 Tingkat Ketersediaan Posyandu di Kawasan Agropolitan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Desa	Jumlah (Eksisting)	Jumlah (Standar)	Surplus/ Defisit	Tingkat ketersediaan	Keterangan
1	Silat Hilir	18808	13	21	15	6	139.6	Berlebih
2	Silat Hulu	11887	14	16	10	6	168.3	Berlebih
3	Hulu Gurung	13664	15	24	11	13	219.6	Berlebih
4	Pengkadan	8814	11	20	7	13	283.6	Berlebih
5	Seberuang	11420	15	16	9	7	175.1	Berlebih
6	Semtau	8850	12	14	7	7	197.7	Berlebih
7	Empanang	3165	6	6	3	3	237.0	Berlebih

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Dengan melihat Tabel IV.58 mengenai kebutuhan posyandu, memang jumlah yang ada hingga saat ini lebih banyak dari yang dibutuhkan, namun kondisi tersebut bukanlah kondisi yang buruk. Berdasarkan kondisi tersebut, maka hingga tahun 2034 tidak diperlukan lagi posyandu yang baru.

Tabel IV.58 Kabutuhan Posyandu di Kawasan Agropolitan

No	Kecamatan	Ketersediaan (2015)	Jumlah Desa	Kebutuhan								
				2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2037
1	Silat Hilir	21	13	14	15	15	15	15	17	18	19	19
2	Silat Hulu	16	14	9	9	9	9	9	10	10	11	11
3	Hulu Gurung	24	15	10	11	11	11	11	11	12	12	13
4	Pengkadan	20	11	7	7	7	7	8	8	9	9	9
5	Seberuang	16	15	8	8	9	9	9	9	9	10	10
6	Semitau	14	12	7	7	7	7	7	8	8	9	9
7	Empanang	6	6	2	3	3	3	3	3	3	3	3

Sumber: Hasil Analisis, 2017

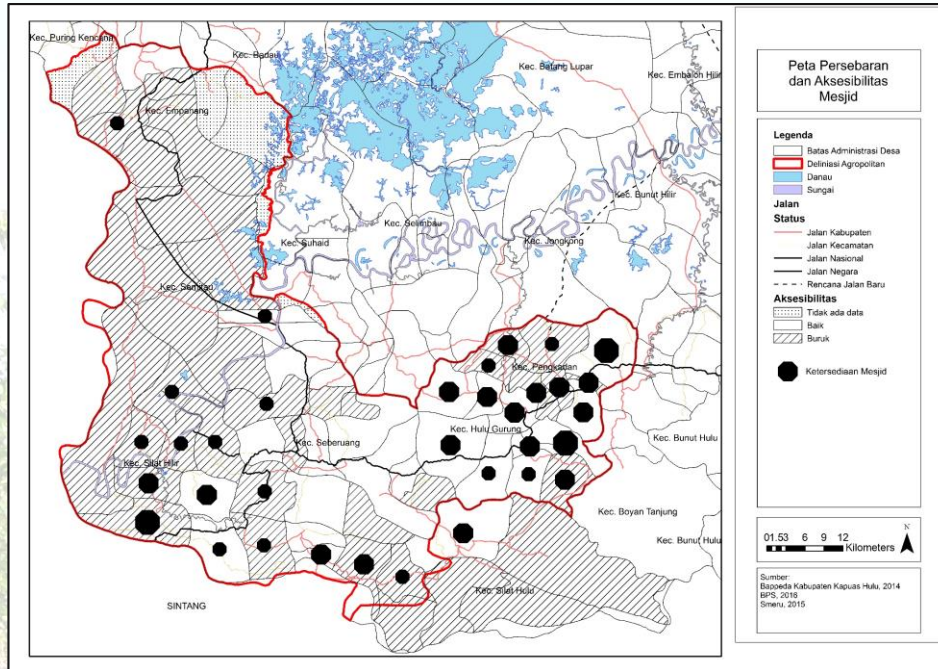
4.4.1.3 Sarana Peribadatan

Berdasarkan gambaran umum yang telah dijelaskan sebelumnya, masing-masing kecamatan KSK Agropolitan tidak didominasi oleh satu agama saja. Walaupun dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan 03-1733-2004 hanya kebutuhan terhadap mesjid yang memiliki standar yang jelas, dalam analisis ini, untuk menentukan tingkat pelayanan gereja pun mengikuta jumlah maksimal penduduk yang digunakan untuk menentukan jumlah mesjid. Hal tersebut dilakukan karena kondisi di wilayah ini berbeda dengan wilayah yang lain, yang biasanya jumlah penduduk muslim hampir 90 persen. Kelemahan pada perhitungan ini adalah tidak dapat menangkap kemungkinan-kemungkinan khusus yang biasanya terjadi pada kasus penentuan tingkat pelayanan gereja. Hal tersebut terjadi karena pelayanan gereja biasanya memiliki jemaatnya tersendiri, sehingga terkadang asumsi jemaat akan mengakses gereja terdekat tidak berlaku.

1. Mesjid

Seperti yang telah dibahas, setiap kecamatan didominasi oleh agama yang berbeda. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Gambar di bawah. Ketersediaan prasarana mesjid pada saat ini memang cukup banyak, tetapi hal ketersediaannya beraglomerasi di kecamatan yang mayoritas penduduknya adalah muslim, seperti yang terjadi di Kecamatan Pengkadan, Kecamatan Hulu Gurung, dan di beberapa desa di Kecamatan Silat Hilir. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketersediaan mesjid hanya dipengaruhi kebutuhan masyarakat muslim.

Gambar IV.67 Persebaran dan Aksesibilitas Prasarana Mesjid



Sumber: Hasil Pengolahan, 2017

Berdasarkan data yang didapatkan, dengan menggunakan standar perhitungan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan 03-1733-2004 untuk menghitung kebutuhan mesjid berdasarkan jumlah penduduk, didapatkan tingkat pelayanan masing-masing yang ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel IV.59 Tingkat Ketersediaan Mesjid di Kawasan Agropolitan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah (Eksisting)	Jumlah (Standar)	Surplus/D efisit	Tingkat ketersediaan	Keterangan
1	Silat Hilir	18808	15	8	7	199.38	Berlebih
2	Silat Hulu	11887	7	5	2	147.22	Berlebih
3	Hulu Gurung	13664	26	5	21	475.70	Berlebih
4	Pengkadan	8814	19	4	15	538.92	Berlebih
5	Seberuang	11420	1	5	-4	21.89	Kurang
6	Semtau	8850	1	4	-3	28.25	Kurang
7	Empanang	3165	1	1	0	78.99	Cukup

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Berdasarkan perhitungan tingkat pelayanan prasarana mesjid, beberapa kecamatan memiliki jumlah sarana peribadatan mesjid yang berlebih. Namun, terdapat pula beberapa kecamatan yang hingga tahun 2034 membutuhkan pembangunan mesjid baru karena penambahan jumlah penduduk yang cukup signifikan.

Tabel IV.60 Kebutuhan Mesjid di Kawasan Agropolitan Berdasarkan Standar

No	Kecamatan	Ketersediaan (2015)	Kebutuhan								
			2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2037
1	Silat Hilir	15	7	7	7	8	8	8	9	9	10
2	Silat Hulu	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	Hulu Gurung	26	5	5	5	5	5	6	6	6	6
4	Pengkadan	19	4	4	4	4	4	4	4	5	5
5	Seberuang	1	4	4	4	4	4	5	5	5	5
6	Semitau	1	3	3	3	4	4	4	4	4	5
7	Empanang	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2

Sumber: Hasil Analisis, 2017

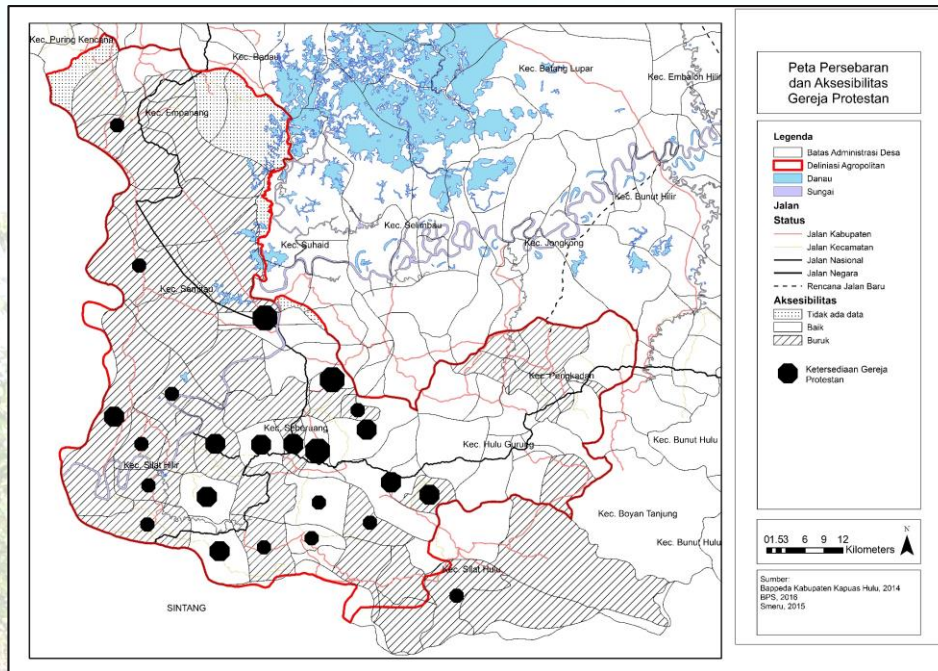
Tabel IV.61 Kebutuhan Mesjid di Kawasan Agropolitan Berdasarkan Penyesuaian dan Ketersediaan

No	Kecamatan	Ketersediaan (2015)	Kebutuhan								
			2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2037
1	Silat Hilir	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
2	Silat Hulu	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
3	Hulu Gurung	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
4	Pengkadan	19	19	19	19	19	19	19	18	19	19
5	Seberuang	1	4	4	4	4	4	5	5	5	5
6	Semitau	1	3	3	3	4	4	4	4	4	5
7	Empanang	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2

2. Gereja Protestan

Dengan melihat gambar persebaran dan aksesibilitas menuju prasarana gereja protestan, dapat diketahui jika seluruh kecamatan tidak memiliki jumlah gereja protestan yang tinggi. Hal tersebut dilihat dari besarnya lingkaran yang ada. Dalam hal ini, kecamatan dengan jumlah gereja protestan yang kurang adalah kecamatan yang didominasi oleh penduduk non-kristen protestan. Selain itu, dari peta persebaran dan aksesibilitas menuju prasarana gereja protestan, dapat dilihat bahwa tidak seluruh gereja protestan didukung dengan kondisi jalan yang baik.

Gambar IV.68 Persebaran dan Aksesibilitas menuju Prasarana Gereja Protestan



Sumber: Hasil Pengolahan, 2017

Jika menggunakan standar yang sama dengan standar dalam menentukan tingkat pelayanan masjid, kecamatan-kecamatan yang mayoritas masyarakatnya muslim adalah kecamatan yang prasarana gerejanya kurang. Rincian tingkat pelayanan masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.62 Tingkat Ketersediaan Gereja Protestan di Kawasan Agropolitan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah (Eksisting)	Jumlah (Standar)	Surplus/D efisit	Tingkat ketersediaan	Keterangan
1	Silat Hilir	18808	15	8	7	199.38	Berlebih
2	Silat Hulu	11887	5	5	0	105.15	Berlebih
3	Hulu Gurung	13664	0	5	-5	0	Kurang
4	Pengkadan	8814	0	4	-4	0	Kurang
5	Seberuang	11420	21	5	16	459.71	Berlebih
6	Semtau	8850	5	4	1	141.24	Berlebih
7	Empanang	3165	1	1	0	78.98	Cukup

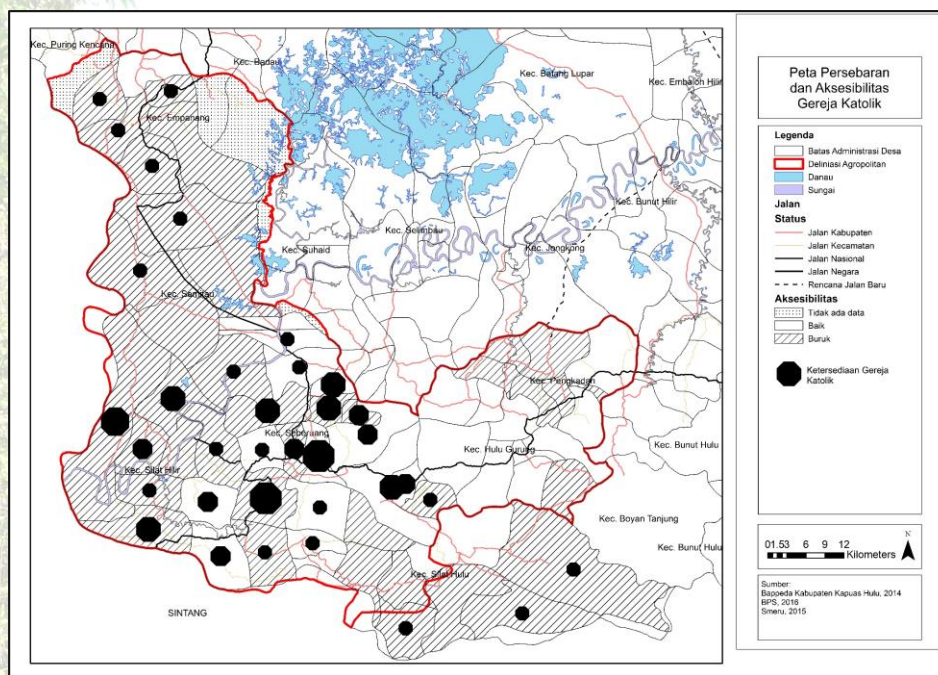
Sumber: Hasil Analisis, 2017

Seperti yang telah diungkapkan bahwa masing-masing gereja memiliki kebijakan khusus untuk menentukan tingkat pelayanannya. Oleh karena itu, penentuan kebutuhan gereja protestan tidak bisa menggunakan standar yang sama dengan penentuan standar tingkat pelayanan masjid.

3. Gereja Katolik

Sama halnya dengan analisis ketersediaan gereja protestan, dari gambar mengenai persebaran dan aksesibilitas prasarana gereja katolik, didapatkan jika seluruh kecamatan tidak memiliki jumlah gereja katolik yang tinggi dilihat dari ukuran lingkarannya. Kecamatan dengan jumlah gereja katolik yang kurang adalah kecamatan yang didominasi oleh penduduk non-kristen katolik seperti muslim. Selain itu, dari gambar persebaran dan aksesibilitas menuju prasarana gereja protestan, dapat dilihat bahwa hampir seluruh gereja katolik berada di desa yang memiliki jalan desa dengan kondisi yang buruk, yaitu yang tidak bisa dilalui sepanjang tahunnya.

Gambar IV.69 Persebaran dan Aksesibilitas menuju Prasarana Gereja Katolik



Sumber: Hasil Analisis, 2017

Berdasarkan perhitungan kebutuhan yang mengikuti standar kebutuhan mesjid, tingkat ketersediaan di Kecamatan Hulu Gurung dan Kecamatan Pengkadan pun kurang seperti yang terlihat pada tabel mengenai tingkat ketersediaan gereja katolik. Seperti yang sudah dibahas, bahwa dalam menentukan tingkat pelayanan prasarana gereja memiliki kondisi yang berbeda dengan tingkat pelayanan mesjid. Namun, meskipun begitu, dibutuhkan minimal satu bangunan gereja katolik atau kapel di dua kecamatan tersebut.

Tabel IV.63 Tingkat Ketersediaan Gereja Katolik di Kawasan Agropolitan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah (Eksisting)	Jumlah (Standar)	Surplus/ Defisit	Tingkat ketersediaan	Keterangan
1	Silat Hilir	18808	26	8	18	345.60	Berlebih

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah (Eksisting)	Jumlah (Standar)	Surplus/ Defisit	Tingkat ketersediaan	Keterangan
2	Silat Hulu	11887	6	5	1	126.19	Berlebih
3	Hulu Gurung	13664	0	5	-5	0.00	Kurang
4	Pengkadan	8814	0	4	-4	0.00	Kurang
5	Seberuang	11420	31	5	26	678.63	Berlebih
6	Semitau	8850	6	4	2	169.49	Berlebih
7	Empanang	3165	4	1	3	315.96	Berlebih

Sumber: Hasil Analisis, 2017

4.4.1.4 Jaringan Jalan dan Transportasi

Berdasarkan hasil survey di tujuh kecamatan kawasan Agropolitan, tidak seluruh jalan dalam kondisi baik seperti yang ditunjukkan oleh Gambar IV.70. Meskipun itu jalan negara, tidak selalu memiliki kondisi yang lebih baik dari status jalan lainnya.

Gambar IV.70 Kondisi Jalan di Kawasan Agropolitan



Sumber: Hasil Dokumentasi 2017

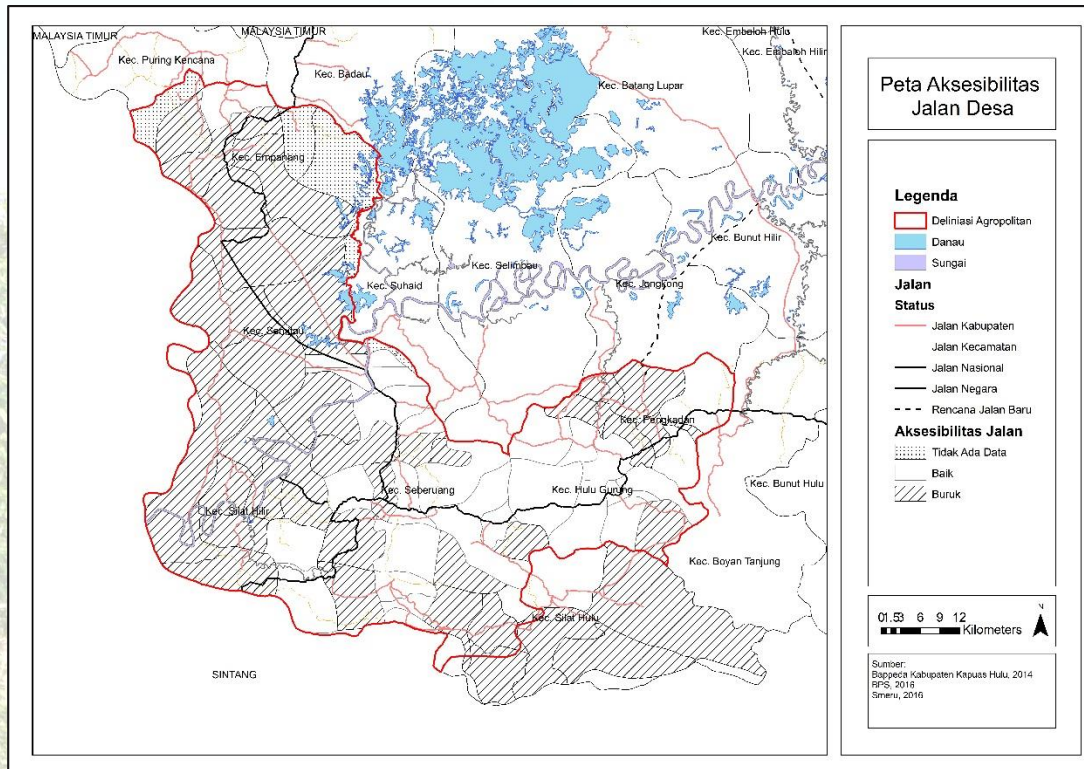
Kemudian, jalan desa merupakan jalan yang memiliki peran penting dalam mendukung perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu kegiatan ke kegiatan lain. Sehingga untuk dapat mendukung kegiatan masyarakat dibutuhkan jalan desa yang selain terhubung dengan kawasan-kawasan lain juga memiliki kualitas yang baik. Berdasarkan data yang didapatkan Smeru tahun 2015 yang dapat dilihat pada tabel mengenai kondisi jalan desa dan peta aksesibilitas jalan desa, tidak seluruh jalan desa memiliki kondisi yang baik. Kondisi jalan yang baik didefinisikan dengan jalan yang dapat dilalui selama satu tahun penuh, sebaliknya kondisi jalan desa yang buruk tidak dapat dilalui setahun penuh karena berbagai kemungkinan, seperti banjir dan kondisi jalan yang buruk.

Tabel IV.64 Kondisi Jalan Desa di Kawasan Agropolitan

No	Kecamatan	Kondisi Jalan Desa		Data Tidak Tersedia
		Baik	Buruk	
1	Silat Hilir	1. Nanga Nuar 2. Sungai Sena	1. Bongkong 2. Setunggul 3. Miau Merah 4. Pangeran Baru 5. Perigi 6. Penai 7. Seberu 8. Sentabai	1. Rumbih 2. Bukit Penai
2	Silat Hulu	1. Nanga Luan 2. Belimbing 3. Nanga Dangkan I 4. Nanga Dangkan II	1. Nanga Negeri 2. Landau Badai 3. Nanga Lungu 4. Riam Tapang 5. Dangkan Kota 6. Lebak Najah 7. Perejuk 8. Ladau Rantau	1. Selangkai 2. Entabi 3. Selimu
3	Hulu Gurung	1. Parang 2. Lubuk Antuk 3. Landau Kumpang 4. Nanga Tepuai 5. Kelakar 6. Bugang 7. Mentawit 8. Tani Makmur	1. Nanga Yen	1. Simpang Senara 2. Beringin 3. Sejahtera Mandiri 4. Karya Mandiri 5. Mubung 6. Tunas Muda
4	Pengkadan		1. Kerangan Panjang 2. Marta Dana 3. Mawan 4. Buak Limbang 5. Riam Panjang 6. Permata 7. Pinang Langka	1. Hulu Pengkadan 2. Sasan 3. Pengkadan Hilir 4. Sira Jaya
5	Seberuang	1. Beluis Harum 2. Bati 3. Seneban 4. Belikai 5. Pala Kota 6. Emperiang	1. Ranyai 2. Sejiram 3. Gurung 4. Nanga Lot 5. Tanjung Keliling	1. Tanjun Mada 2. Jerenjang 3. Bekuan 4. Nanga Pala
6	Semitau	1. Semitau Hulu 2. Kenerak 3. Semitau Hilir	1. Nanga Seberuang 2. Kenepai Komplek 3. Entipan 4. Nanga Kenepai 5. Tua' Abang	1. Marsedan Raya 2. Nanga Lemedak 3. Sekedau 4. Padung Kumang
7	Empanang	1. Kumang Jaya 2. Laja Sandang	1. Keling Panggau 2. Bajau Andai 3. Tintin Peninjau 4. Nanga Kantuk	

Sumber: povertymap.smeru.or.id

Gambar IV.71 Peta Aksesibilitas Jalan Desa



Sumber: Hasil Pengolahan, 2017

Dalam praktiknya keberadaan perusahaan sawit yang berkembang, khususnya di Kecamatan Empanang dan Kecamatan Silat Hilir ternyata membuka memiliki dampak positif terhadap aksesibilitas. Pembukaan lahan untuk perkebunan sawit didukung dengan pembangunan jalan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Bahkan dalam kenyataannya, jalan sawit memiliki kondisi yang lebih baik dibandingkan nenerapa ruas jalan nasional. Sehingga jalan sawit menjadi pilihan utama masyarakat.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dan survey yang telah dilakukan jika di Kabupaten Kapuas Hulu, masyarakat lebih mengandalkan kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan umum untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Walaupun begitu, kendaraan masih dapat ditemukan seperti bus mini yang mengantarkan masyarakat ke kota/kabupaten lainnya.

Meskipun terdapat kendaraan umum, tidak ada prasarana terminal yang berfungsi sebagaimana mestinya. Satu-satunya terminal yang berlokasi di tujuh kecamatan kawasan agropolitan adalah Terminal C yang berada di Kecamatan Semitau, sayang sekali terminal tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga saat survey dilakukan, kondisinya hanyalah berupa bangunan kosong yang ditinggalkan. Sehingga, minibus yang beroperasi memanfaatkan pasar sehingga terkadang menyebabkan kemacetan.

Gambar IV.72 Kondisi Terminal Tipe C di Kecamatan Semitau



Sumber: Hasil Dokumentasi 2017

Selain itu, berdasarkan hasil observasi, kondisi dermaga, terutama dermaga di Silat Hilir yang menghubungkan antara Desa Perigi dan Desa Pangeran juga tidak didukung oleh kelengkapan yang baik bahkan cenderung membahayakan. Tentunya kondisi ini perlu menjadi catatan yang penting untuk memperbaiki sarana dan prasarana dasar masyarakat. Berbeda dengan dermaga untuk menusia menyebrang, ternyata terdapat dermaga yang membantu kendaraan bermotor untuk menyebrang.

Gambar IV.73 Ponton untuk Menyebrang Kendaraan di Kecamatan Silat Hilir



Sumber: Hasil Dokumentasi 2017

4.4.1.5 Air Bersih

Data yang berbeda, didapatkan dari data PDAM Tahun 2016, dari 23 Kecamatan di Kapuas Hulu, hanya terdapat 12 kecamatan saja yang terlayani. Kecamatan yang terlayani dan termasuk

ke dalam kawasan agropolitan adalah Kecamatan Silat Hilir, Kecamatan Hulu Gurung, Kecamatan Pengkadan, dan Kecamatan Semitau. Berdasarkan daftar kecamatan tersebut, hanya terdapat empat Kecamatan KSK Agropolitan yang terlayani PDAM. Walaupun, kecamatan tersebut terlayani, jangkauan pelayanan tersebut ternyata tidak mencakup seluruh desa yang ada di kecamatan tersebut

Tabel IV.65 Kapasitas Air Bersih PDAM Tahun 2016

No	Kecamatan	Kapasitas Terpasang (L/detik)	Kapasitas Produksi (L/detik)	Jam Operasi Distribusi	Domestik (m3/Bln)	Non Domestik (m3/Bln)
1	Silat Hilir	10	2.92	4	5426	326
2	Silat Hulu	-	-	-	-	-
3	Hulu Gurung	15	10.58	24	16628	2451
4	Pengkadan	15	12.13	24	20865	851
5	Seberuang	-	-	-	-	-
6	Semitau	10	4.87	10.9	5446	880
7	Empanang	-	-	-	-	-

Sumber: PDAM, 2016

Jika kondisi berdasarkan data PDAM, adalah data terkini, dengan membandingkan kebutuhan air yang telah dihitung dan ditunjukkan pada tabel mengenai kebutuhan produksi rata-rata air pada halaman selanjutnya, maka kapasitas produksi PDAM yang ada saat ini masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan. Untuk menjamin kualitas air yang dikonsumsi oleh masyarakat di tujuh kecamatan yang merupakan kawasan strategis agropolitan. Dalam pemenuhan kebutuhan air ini, PDAM memiliki peran yang sangat penting. Sehingga suatu saat ini diharapkan PDAM dapat mendistribusikan air bersih yang layak dikonsumsi kepada masyarakat mengingat masih banyak masyarakat yang mengandalkan air sungai untuk diminum yang kualitasnya dapat berubah mengikuti perubahan musim.

FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU

Tabel IV.66 Kebutuhan Produksi Rata-Rata Air (Liter/Detik)

No	KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	SILAT HILIR																						
	Kebutuhan Domestik	26.35	26.79	27.22	27.66	28.09	28.53	28.97	29.40	29.84	30.27	30.71	31.15	31.58	32.02	32.45	32.89	33.32	33.76	34.20	34.63	35.07	35.50
	Kebutuhan Non Domestik	240.16	246.64	402.01	413.65	425.46	437.44	449.57	461.88	474.35	486.98	499.78	475.70	525.88	539.18	552.64	566.27	580.06	594.02	608.14	622.48	635.85	649.36
	Total Produksi Rata-Rata	386.44	396.46	622.39	639.90	657.66	675.65	693.88	712.36	731.07	750.02	769.22	734.92	808.32	828.23	848.38	868.78	889.41	910.28	931.39	952.81	972.83	993.05
	Kebutuhan Harian Maksimum	463.73	475.75	746.87	767.89	789.19	810.78	832.66	854.83	877.28	900.03	923.06	881.90	969.98	993.88	1018.06	1042.53	1067.29	1092.34	1117.67	1143.37	1167.40	1191.66
	Kebutuhan Jam Puncak	676.27	693.81	1089.18	1119.83	1150.90	1182.39	1214.30	1246.63	1279.37	1312.54	1346.13	1286.11	1414.56	1449.41	1484.67	1520.36	1556.46	1592.99	1629.93	1667.42	1702.45	1737.84
2	SILAT HULU																						
	Kebutuhan Domestik	16.47	16.61	16.76	16.91	17.06	17.21	17.36	17.51	17.66	17.81	17.96	18.11	18.25	18.40	18.55	18.70	18.85	19.00	19.15	19.30	19.45	19.60
	Kebutuhan Non Domestik	97.13	98.56	140.65	143.01	145.39	148.02	150.41	152.81	155.24	157.69	160.15	162.64	165.14	167.66	170.21	172.77	175.35	177.95	180.57	183.22	185.87	188.54
	Total Produksi Rata-Rata	164.71	167.01	228.25	231.89	235.55	239.58	243.26	246.97	250.70	254.47	258.26	262.08	265.92	269.80	273.70	277.63	281.59	285.58	289.59	293.65	297.71	301.80
	Kebutuhan Harian Maksimum	197.65	200.41	273.90	278.27	282.67	287.50	291.91	296.36	300.84	305.36	309.91	314.49	319.11	323.76	328.44	333.16	337.91	342.70	347.51	352.38	357.25	362.16
	Kebutuhan Jam Puncak	288.24	292.26	399.44	405.80	412.22	419.27	425.71	432.19	438.73	445.32	451.95	458.63	465.37	472.15	478.98	485.86	492.79	499.76	506.79	513.88	520.99	528.15
3	HULU GURUNG																						
	Kebutuhan Domestik	19.05	19.23	19.40	19.57	19.74	19.91	20.09	20.26	20.43	20.60	20.77	20.95	21.12	21.29	21.46	21.64	21.81	21.98	22.15	22.32	22.50	22.67
	Kebutuhan Non Domestik	193.93	196.85	233.77	237.31	240.88	244.48	248.11	251.76	255.44	259.14	262.87	266.63	270.41	274.22	278.06	281.90	285.78	289.68	293.60	297.54	301.50	305.49
	Total Produksi Rata-Rata	308.82	313.31	367.10	372.47	377.90	383.37	388.88	394.42	400.01	405.63	411.29	416.99	422.72	428.49	434.31	440.13	446.00	451.90	457.84	463.81	469.80	475.83
	Kebutuhan Harian Maksimum	370.59	375.97	440.52	446.97	453.49	460.05	466.66	473.31	480.01	486.75	493.55	500.38	507.27	514.19	521.17	528.16	535.20	542.28	549.41	556.57	563.76	570.99
	Kebutuhan Jam Puncak	540.44	548.29	642.43	651.83	661.33	670.90	680.54	690.24	700.01	709.85	719.75	729.72	739.76	749.87	760.04	770.23	780.50	790.82	801.22	811.67	822.15	832.70
4	PENKADAN																						
	Kebutuhan Domestik	13.12	13.29	13.47	13.64	13.82	13.99	14.17	14.34	14.52	14.69	14.87	15.04	15.22	15.39	15.57	15.74	15.92	16.09	16.27	16.44	16.61	16.79
	Kebutuhan Non Domestik	105.95	108.26	118.64	121.20	123.78	126.39	129.03	131.70	134.39	137.11	139.86	142.63	145.43	148.25	151.11	153.99	156.90	159.83	162.79	295.98	302.26	308.61
	Total Produksi Rata-Rata	172.66	176.25	191.56	195.52	199.52	203.56	207.64	211.76	215.92	220.11	224.35	228.62	232.93	237.29	241.68	246.11	250.58	255.08	259.63	453.01	462.37	471.83
	Kebutuhan Harian Maksimum	207.19	211.50	229.87	234.62	239.42	244.27	249.17	254.11	259.10	264.13	269.22	274.35	279.52	284.74	290.01	295.33	300.69	306.10	311.56	543.61	554.84	566.19
	Kebutuhan Jam Puncak	302.15	308.44	335.22	342.16	349.16	356.23	363.37	370.58	377.85	385.20	392.61	400.09	407.64	415.25	422.94	430.69	438.51	446.40	454.36	792.77	809.15	825.69
5	SEBERUANG																						
	Kebutuhan Domestik	15.36	15.49	15.63	15.76	15.89	16.02	16.16	16.29	16.42	16.55	16.69	16.82	16.95	17.08	17.22	17.35	17.48	17.61	17.75	17.88	18.01	18.14
	Kebutuhan Non Domestik	77.65	78.41	169.21	171.54	173.89	176.25	178.63	181.02	183.43	185.85	188.29	190.74	193.21	195.70	198.20	200.70	203.22	205.77	208.32	210.88	213.47	216.07
	Total Produksi Rata-Rata	134.87	136.16	268.02	271.59	275.18	278.80	282.44	286.10	289.78	293.48	297.21	300.96	304.74	308.53	312.35	316.16	320.01	323.90	327.79	331.70	335.64	339.61
	Kebutuhan Harian Maksimum	161.85	163.39	321.62	325.91	330.22	334.56	338.92	343.32	347.74	352.18	356.66	361.16	365.68	370.24	374.82	379.40	384.01	388.68	393.35	398.04	402.77	407.53
	Kebutuhan Jam Puncak	236.03	238.28	469.03	475.28	481.57	487.90	494.26	500.67	507.11	513.60	520.12	526.68	533.29	539.93	546.61	553.29	560.02	566.83	573.64	580.47	587.38	594.32
6	SEMITAU																						
	Kebutuhan Domestik	12.27	12.45	12.63	12.81	12.99	13.17	13.35	13.52	13.70	13.88	14.06	14.24	14.42	14.60	14.78	14.96	15.14	15.32	15.50	15.68	15.86	16.04
	Kebutuhan Non Domestik	36.06	36.79	81.75	83.91	86.09	88.31	90.55	92.82	95.12	97.45	99.81	102.19	104.61	107.05	109.52	112.03	114.55	117.11	119.70	122.65	125.29	127.94
	Total Produksi Rata-Rata	70.07	71.39	136.85	140.24	143.67	147.14	150.65	154.20	157.80	161.44	165.11	168.83	172.60	176.40	180.25	184.13	188.06	192.03	196.04	200.59	204.68	208.77
	Kebutuhan Harian Maksimum	84.08	85.67	164.22	168.28	172.40	176.56	180.78	185.04	189.36	193.72	198.14	202.60	207.12	211.68	216.30	220.96	225.67	230.44	235.25	240.70	245.61	250.53
	Kebutuhan Jam Puncak	122.62	124.94	239.49	245.41	251.42	257.49	263.64	269.85	276.15	282.51	288.95	295.46	302.04	308.70	315.43	322.23	329.11	336.06	343.08	351.03	358.18	365.35
7	EMPANANG																						
	Kebutuhan Domestik	4.50	4.57	4.63	4.69	4.76	4.82	4.88	4.95	5.01	5.08	5.14	5.20	5.27	5.33	5.39	5.46	5.52	5.59	5.65	5.71	5.78	5.84
	Kebutuhan Non Domestik	3.04	2.08	12.08	12.38	12.68	12.99	13.30	13.61	13.93	14.25	14.58	14.91	15.24	15.58	15.92	16.03	16.87	17.04	17.22	18.08	18.44	18.80
	Total Produksi Rata-Rata	10.94	9.64	24.23	24.76	25.29	25.82	26.36	26.91	27.46	28.02	28.59	29.16	29.74	30.32	30.91	31.15	32.46	32.81	33.17	34.51	35.12	35.73

FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU

No	KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
	Kebutuhan Harian Maksimum	13.13	11.57	29.08	29.71	30.34	30.99	31.64	32.29	32.96	33.63	34.31	34.99	35.68	36.38	37.09	37.38	38.95	39.38	39.80	41.41	42.14	42.88
	Kebutuhan Jam Puncak	19.15	16.87	42.41	43.32	44.25	45.19	46.14	47.09	48.06	49.04	50.03	51.03	52.04	53.06	54.09	54.52	56.81	57.42	58.04	60.38	61.45	62.53

Sumber: Hasil Analisis, 2017

4.4.1.6 Sampah dan Limbah Cair

Seperti yang telah dibahas pada Bab Gambaran Umum mengenai kondisi sarana dan prasarana yang ada di kawasan agropolitan, tidak ada sistem persampahan yang terintegrasi. Masyarakat memiliki alternative membuang sampah di sungai, dibakar, atau bahkan dibuang ke hutan. Tentunya kondisi tersebut dapat merusak lingkungan. Bahkan untuk kegiatan yang cukup intensif, seperti pasar, tidak memiliki tempat pengumpulan sampah sama sekali seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut.

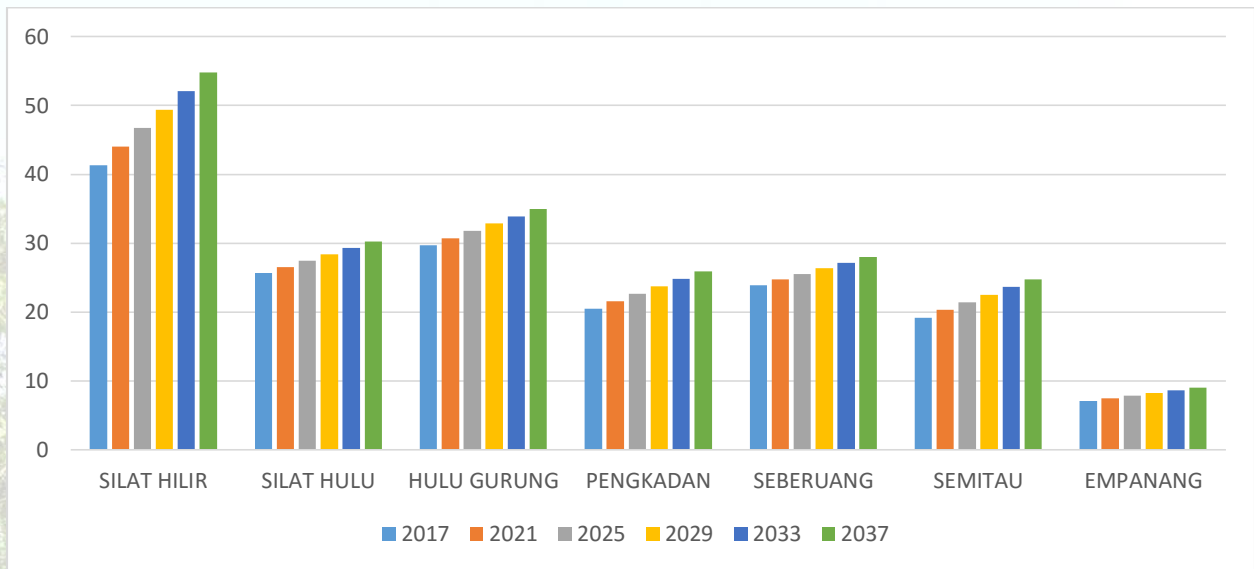
Gambar IV.74 Sampah yang menumpuk di Pasar Kecamatan Semitau



Sumber: Hasil Dokumentasi 2017

Berdasarkan SNI 19-2454-2002 mengenai Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, pengelolaan sampah itu perlu dimulai dari lingkup terkecil, yaitu RW atau dusun. Selain itu, Di lingkungan rumah harus terdapat tong sampah, di tingkat rukun warga atau dusun terdapat gerobak sampah kecil dan sampahnya diangkut tiga kali seminggu. Begitu pun dengan tingkat kelurahan/desa dan kecamatan, dibutuhkan bak sampah besar (TPA/TPS lokal) untuk menampung sampah-sampah sebelum dibawa ke TPA. Banyaknya dan dimensi dari sarana pelengkap sampah tersebut dapat dihitung berdasarkan produksi sampah yang dihasilkan setiap harinya. Dengan menggunakan asumsi satu orang menghasilkan sampah 2.25 liter per hari, berikut produksi sampah tujuh kecamatan agropolitan hingga tahun 2033:

Gambar IV.75 Produksi Sampah per Hari (m3)



Sumber: Hasil Analisis 2017

Dengan jumlah produksi sampah yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, tentunya prasarana persampahan harus menjadi lebih baik lagi di masa mendatang untuk mencapai kawasan agropolitan hijau. Mengingat kondisi prasarana persampahan yang bisa dibilang belum tersedia sama sekali, rencana-rencana pengembangan prasarana, seperti pembuatan TPA dan pelaksanaan angkutan sampah perlu dilakukan. Berikut jenis prasarana yang dibutuhkan di tingkat desa dan kecamatan berdasarkan SNI 19-2454-2002 mengenai Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan dan SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan 03-1733-2004.

Tabel IV.67 Kebutuhan Prasarana Persampahan

Tingkat Pelayanan	Prasarana	Kebutuhan	Keterangan
Kelurahan/desa	Bak sampah besar	2-3 di masing-masing kelurahan	Dimensi : 12 m3, diangkut 3x seminggu
Kecamatan	Bak sampah besar	1 di masing-masing kecamatan/ 1 untuk 2 kecamatan	Dimensi : 25 m3, diangkut 3x seminggu

Sumber: SNI 19-2454-2002

Selain sampah, jenis limbah lain yang harus diperhatikan adalah limbah cair. Besarnya limbah cair didapatkan dari 60 hingga 85 persen debit pemakaian air bersih. Jumlah proyeksi limbah cair dapat dilihat pada tabel di halaman selanjutnya. Namun, total limbah cair tersebut merupakan limbah cair domestik. Karena keterbatasan data, hasil perhitungan di halaman selanjutnya tidak mencakup limbah non domestik.

Tabel IV.68 Proyeksi Produksi Limbah Cair Domestik Tahun 2016-2034

No	KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	SILAT HILIR																						
	Kebutuhan Air Domestik	26.35	26.79	27.22	27.66	28.09	28.53	28.97	29.4	29.84	30.27	30.71	31.15	31.58	32.02	32.45	32.89	33.32	33.76	34.2	34.63	35.07	35.50
	Produksi Limbah Domenstik	15.81	16.07	16.33	16.6	16.86	17.12	17.38	17.64	17.9	18.16	18.43	18.69	18.95	19.21	19.47	19.73	19.99	20.26	20.52	20.78	21.04	21.30
2	SILAT HULU																						
	Kebutuhan Domestik	16.47	16.61	16.76	16.91	17.06	17.21	17.36	17.51	17.66	17.81	17.96	18.11	18.25	18.4	18.55	18.7	18.85	19	19.15	19.30	19.45	19.60
	Produksi Limbah Domenstik	9.88	9.97	10.06	10.15	10.24	10.33	10.42	10.51	10.59	10.68	10.77	10.86	10.95	11.04	11.13	11.22	11.31	11.4	11.49	11.58	11.67	11.76
3	HULU GURUNG																						
	Kebutuhan Domestik	19.05	19.23	19.4	19.57	19.74	19.91	20.09	20.26	20.43	20.6	20.77	20.95	21.12	21.29	21.46	21.64	21.81	21.98	22.15	22.32	22.50	22.67
	Produksi Limbah Domenstik	11.43	11.54	11.64	11.74	11.85	11.95	12.05	12.15	12.26	12.36	12.46	12.57	12.67	12.77	12.88	12.98	13.08	13.19	13.29	13.39	13.50	13.60
4	PENGKADAN																						
	Kebutuhan Domestik	13.12	13.29	13.47	13.64	13.82	13.99	14.17	14.34	14.52	14.69	14.87	15.04	15.22	15.39	15.57	15.74	15.92	16.09	16.27	16.44	16.61	16.79
	Produksi Limbah Domenstik	7.87	7.98	8.08	8.19	8.29	8.4	8.5	8.61	8.71	8.82	8.92	9.02	9.13	9.23	9.34	9.44	9.55	9.65	9.76	9.86	9.97	10.07
5	SEBERUANG																						
	Kebutuhan Domestik	15.36	15.49	15.63	15.76	15.89	16.02	16.16	16.29	16.42	16.55	16.69	16.82	16.95	17.08	17.22	17.35	17.48	17.61	17.75	17.88	18.01	18.14
	Produksi Limbah Domenstik	9.22	9.3	9.38	9.46	9.53	9.61	9.69	9.77	9.85	9.93	10.01	10.09	10.17	10.25	10.33	10.41	10.49	10.57	10.65	10.73	10.81	10.88
6	SEMITAU																						
	Kebutuhan Domestik	12.27	12.45	12.63	12.81	12.99	13.17	13.35	13.52	13.7	13.88	14.06	14.24	14.42	14.6	14.78	14.96	15.14	15.32	15.5	15.68	15.86	16.04
	Produksi Limbah Domenstik	7.36	7.47	7.58	7.68	7.79	7.9	8.01	8.11	8.22	8.33	8.44	8.55	8.65	8.76	8.87	8.98	9.09	9.19	9.3	9.41	9.52	9.62
7	EMPANANG																						
	Kebutuhan Domestik	4.5	4.57	4.63	4.69	4.76	4.82	4.88	4.95	5.01	5.08	5.14	5.2	5.27	5.33	5.39	5.46	5.52	5.59	5.65	5.71	5.78	5.84
	Produksi Limbah Domenstik	2.7	2.74	2.78	2.82	2.85	2.89	2.93	2.97	3.01	3.05	3.08	3.12	3.16	3.2	3.24	3.27	3.31	3.35	3.39	3.43	3.47	3.50

Sumber: Hasil Analisis 2017

4.4.1.7 Listrik dan Telekomunikasi

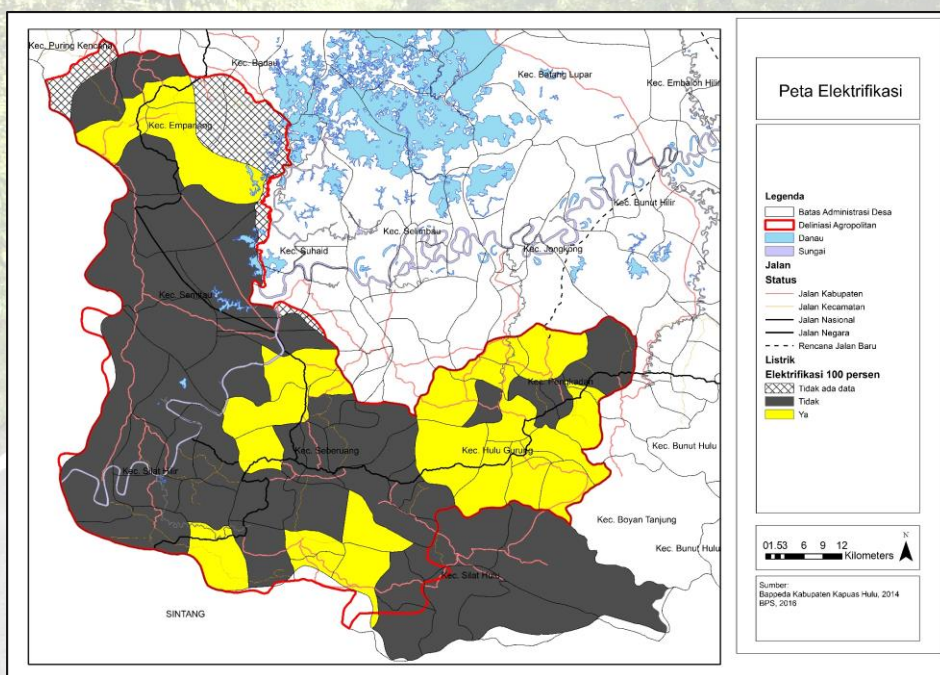
Seperti yang ditunjukkan oleh tabel mengenai tingkat pelayanan listrik, kecamatan yang tingkat elektrifikasinya paling tertinggi adalah Kecamatan Pengkadan, Kecamatan Hulu Gurung, kemudian Kecamatan Semitau. Sedangkan, kecamatan dengan tingkat elektrifikasi terendah adalah Kecamatan Silat Hulu dan kecamatan Empanang. Seluruh kecamatan sudah terlayani listrik lebih dari 50 persen. Namun, tidak seluruh desa sudah teraliri listrik seluruh rumahnya. Selain itu, ditemukan juga alternatif sumber listrik lain di beberapa kecamatan, tentunya hal ini merupakan kondisi atau modal yang cukup baik sebagai kawasan yang akan berkembang sebagai kawasan agropolitan yang dikembangkan dengan konsep agropolitan hijau. Selain itu, sebagai calon kawasan agropolitan yang memiliki kemandirian dalam penyediaan kebutuhan dasar, ternyata kebutuhan listrik Kecamatan Empanang masih bergantung pada negara Malaysia, hal tersebut merupakan hal yang perlu menjadi catatan dalam pengembangan kawasan agropolitan di tujuh kecamatan ini.

Tabel IV.69 Tingkat Pelayanan Listrik (PLN dan Non-PLN)

No	Kecamatan	Tingkat Pelayanan (%)
1	Silat Hilir	86
2	Silat Hulu	76
3	Hulu Gurung	96
4	Pengkadan	99
5	Seberuang	72
6	Semitau	95
7	Empanang	76

Sumber: Podes, 2014

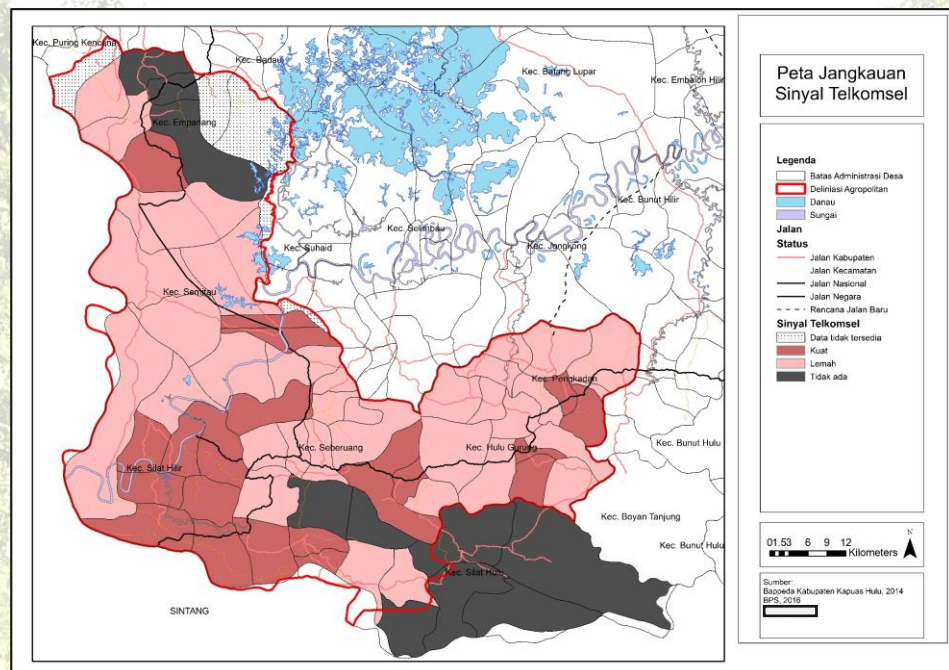
Gambar IV.76 Peta Tingkat Elektrifikasi



Sumber: Hasil Pengolahan, 2017

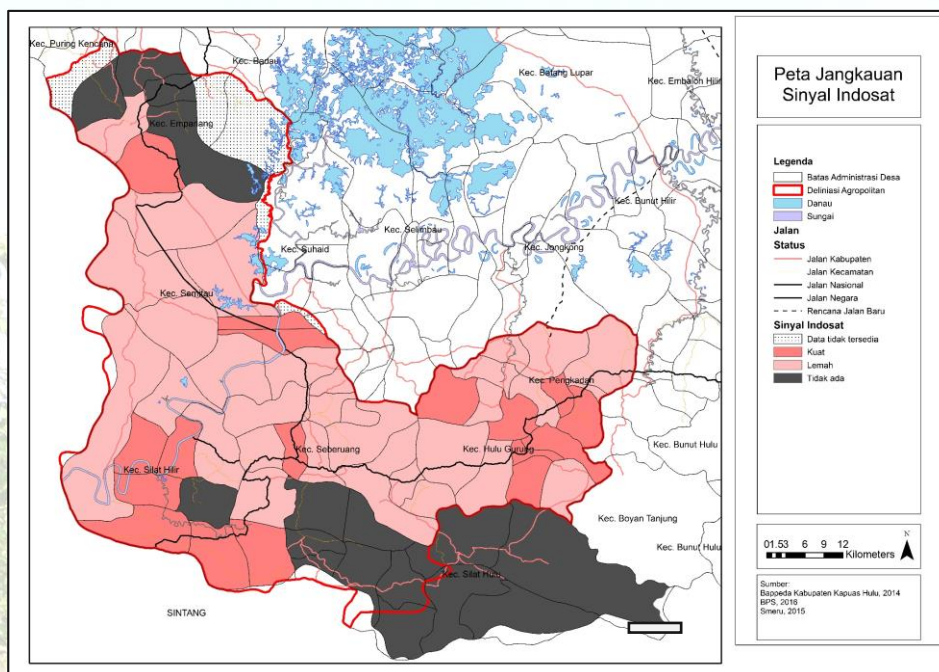
Terdapat dua *provider* yang digunakan di Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu Telkomsel dan Indosat. Namun, dua jenis *provider* tersebut tidak mencakup seluruh desa di tujuh kecamatan yang merupakan Kawasan Agropolitan. Untuk Telkomsel, terdapat dua kecamatan yang tidak terlayani seratus persen oleh Telkomsel: Kecamatan Silat Hulu (Desa nanga Luan, Desa Perejuk, Desa Nanga Lungu, Desa Lebak Najah, Desa Belimbing) dan Kecamatan Empanang (Desa Bajau Andai, Desa Kumang Jaya, dan Desa Tintin Peninjau). Sedangkan untuk indosat, terdapat tiga kecamatan yang tidak terlayani seratus persen: Kecamatan Silat Hilir (Desa Sungai Sena); Kecamatan Silat Hulu (seuruh desa); Kecamatan Empanang (Desa bajau Andal, Desa Kumang Jaya, Desa Titin Peninjau, dan Desa Lajang Sandang). Desa-desa tersebut merupakan desa yang perlu diutamakan dalam perluasan jangkauan pelayanan penyedia tersebut.

Gambar IV.77 Tingkat Pelayanan Telekomunikasi Telkomsel



Sumber: Hasil Pengolahan 2017

Gambar IV.78 Tingkat Pelayanan Telekomunikasi Indosat



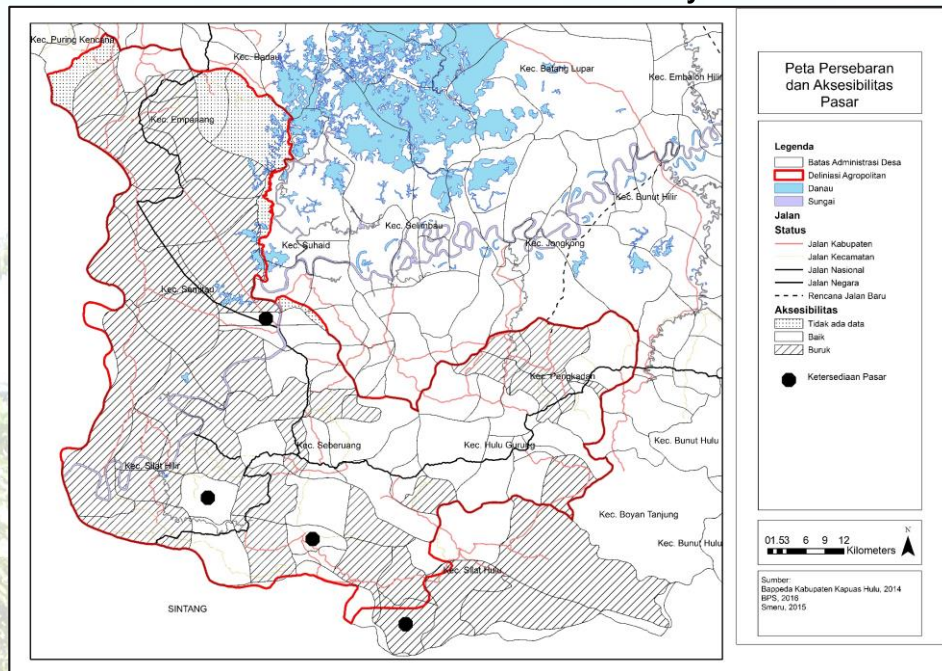
Sumber: Hasil Pengolahan 2017

4.4.2 Infrastruktur Penunjang Agropolitan Hijau

4.4.2.1 Perdagangan dan Jasa

Pasar dalam kawasan agropolitan memiliki peran yang sangat penting. Selain menjual kebutuhan sehari-hari masyarakat di kawasan agropolitan, pasar merupakan salah satu infrastruktur utama yang mendukung kegiatan ekonomi utama kawasan agropolitan. Hasil-hasil pertanian, perkebunan, dan lainnya dapat diperjual-belikan di pasar. Tentunya hal tersebut tergantung dengan jenis pasarnya. Berdasarkan hasil data Smeru 2016, di tujuh kecamatan yang masuk ke dalam kawasan agropolitan, pasar hanya tersedia di dua kecamatan saja, yaitu Kecamatan Silat Hilir (Desa Sungai Sena), Kecamatan Silat Hulu (Desa Nanga Dangkan), dan Kecamatan Semitau (Desa Semitau Hilir dan Desa Semitau Hulu), seperti yang dapat dilihat pada gambar persebaran lokasi pasar. Namun, saat dilakukan observasi, bangunan pasar dan kegiatan jual-beli yang terlihat hanya di Desa Semitau Hulu, Kecamatan Semitau. Selain itu, pada gambar selanjutnya juga didapatkan bahwa seluruh pasar yang ada berada di desa yang memiliki kondisi infrastruktur yang baik, yaitu yang dapat dilalui sepanjang tahunnya. Tentunya kondisi tersebut merupakan kondisi yang baik yang perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan terus kondisinya.

Gambar IV.79 Persebaran dan Aksesibilitas Menuju Pasar

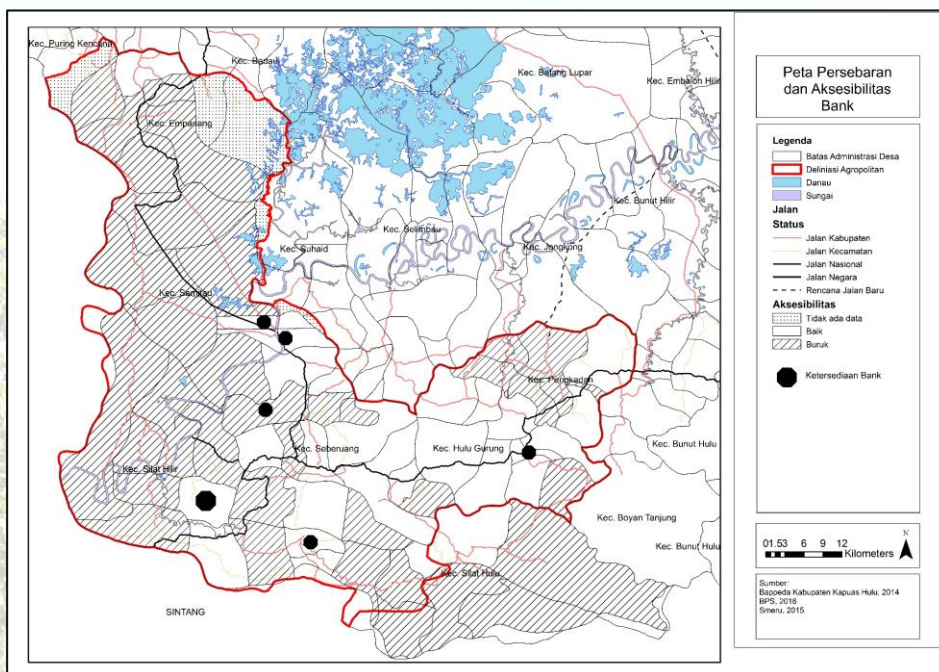


Sumber: Hasil Pengolahan 2017

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan, pasar dibutuhkan untuk melayani 30.000 penduduk, namun masing-masing kecamatan yang masuk ke dalam Kawasan Strategis Agropolitan Kapuas Hulu yang sudah dijabarkan pada Bab Sosial, Budaya, dan Kependudukan tidak mencapai 30.000 penduduk. Walaupun begitu, bukan berarti tidak dibutuhkan pasar. Mengingat jarak antar pusat kecamatan cukup jauh, dan aksesibilitas seperti yang telah dibahas sebelumnya masih sangat rendah, maka satu kecamatan seharusnya memiliki satu pasar yang dapat mendukung kebutuhan sehari-hari masyarakat dan skalanya dapat menyesuaikan. Dalam merencanakan kawasan agropolitan, ketersediaan pasar ini harus menjadi catatan dalam menentukan pasar apa yang dibutuhkan, seberapa besar skalanya, dan berlokasi dimana.

Selain pasar, kegiatan yang penting yaitu perbankan. Keberadaan prasarana ini menggambarkan seberapa akses masyarakat terhadap uang. Seperti persebaran prasarana pasar, prasarana bank juga berlokasi pada seluruh desa yang memiliki kondisi jalan yang baik. Sebenarnya terdapat koperasi atau Credit Union (CU) yang berkembang di lingkungan masyarakat, namun data mengenai persebaran prasarana tersebut tidak didapatkan. Walaupun begitu, tentunya kondisi tersebut dapat membantu masyarakat dalam mengakses fasilitas perbankan, seperti meminjam uang dan lainnya.

Gambar IV.80 Persebaran dan Aksesibilitas Menuju Bank



Sumber: Hasil Pengolahan 2017

4.4.2.2 Pertanian dan Perternakan, Perkebunan, dan Industri

Kegiatan pertanian yang berkembang di tujuh kecamatan agrpolitan ternyata cukup banyak yang secara fisik sudah didukung oleh keberadaan irigasi namun, tidak seluruh irigasi tersebut dapat dan telah dimanfaatkan dengan baik oleh petani-petani yang mengolah pertanian tersebut, Berdasarkan Keputusan Menteri PU Nomor 390/KPTS/M/2007, terdapat 76 daerah irigasi yang wewenang dan tanggung jawab kabupaten, dan beberapa diantaranya berada di Kecamatan yang merupakan kawasan agropolitan.

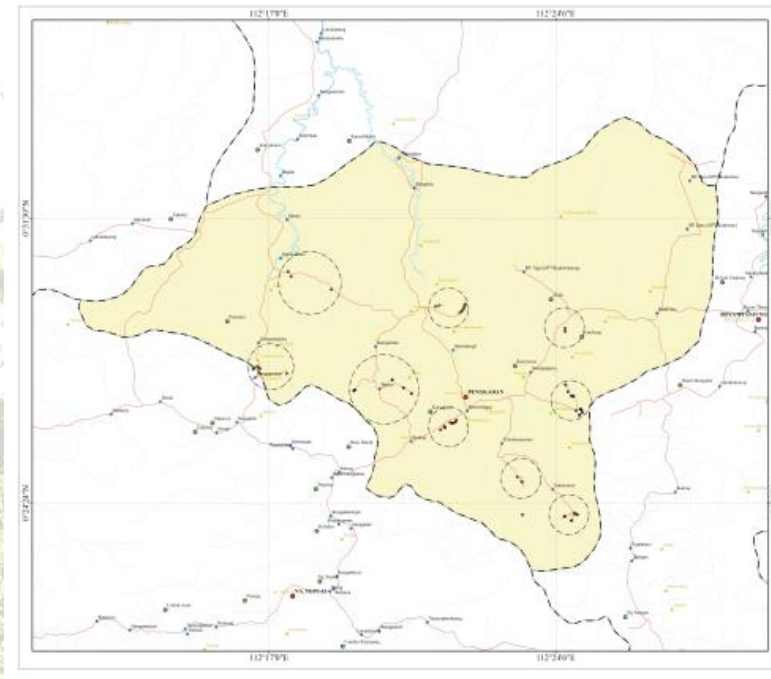
Di Kecamatan Pengkadan terdapat sembilan daerah irigasi yang terdata oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kapuas Hulu Tahun 2016. Daerah irigasi tersebut adalah sebagai berikut:

- D.I. Riam Panjang
- D.I. Suka Ramai
- D.I. Menendang
- D.I. Pedian
- D.I. Mawan
- D.I. Repun
- D.I. Kerangan Panjang
- D.I. Titin Kematn
- D.I. Buak Limbang

Berdasarkan Laporan Penyusunan Database Jaringan Irigasi yang disusun oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kapuas Hulu pada tahun 2016, daerah-daerah irigasi tersebut memiliki luas fungsional dan potensial yang berbeda-beda. Rata-rata daerah irigasi tersebut sudah dilengkapi dengan bendungan sederhana, saluran primer dan saluran

sekunder. Dapat dilihat pada Gambar IV.81, daerah irigasi terhubung yang ada di Kecamatan Pengkadan dapat diakses dengan jalan.

Gambar IV.81 Lokasi Daerah Irigasi di Kecamatan Pengkadan



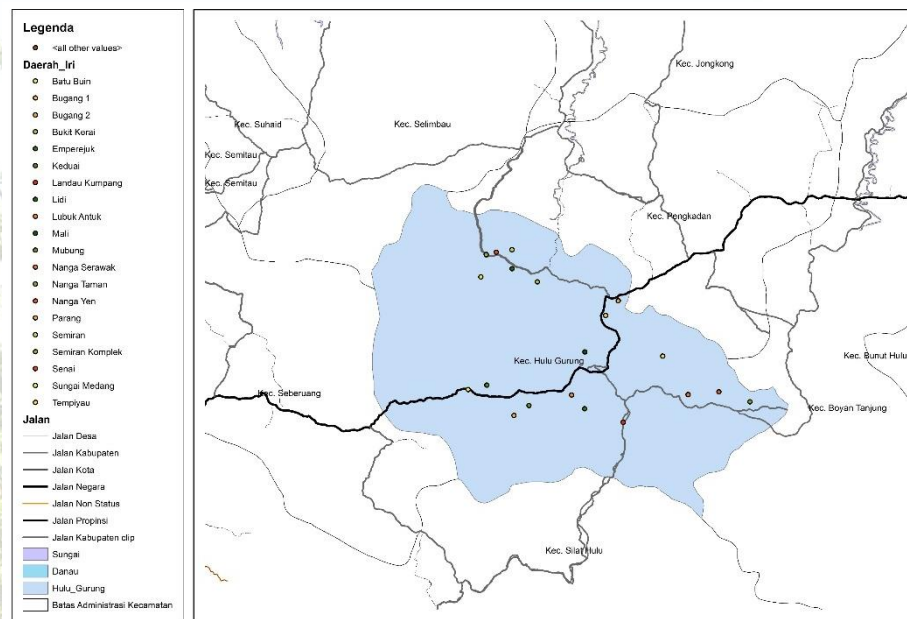
Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan, 2016

Selain di Kecamatan Pengkadan, daerah irigasi juga terdata di Kecamatan Hulu Gurung. Jumlah irigasinya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah daerah irigasi di Kecamatan Pengkadan, yaitu sebanyak dua puluh. Berikut daerah irigasi yang terdapat di Kecamatan Hulu Gurung:

1. Keduai
2. Emperejuk
3. Mubung
4. Parang
5. Batu Buin
6. Lubuk ANtuk
7. Tempiyau
8. Semiran Komplek
9. Semiran
10. Senai
11. Bukit Kerai
12. Sungai Medang
13. Lidi
14. Mali
15. Bugang 1
16. Bugang 2

- 17. Nanga Yen
- 18. Nanga Serawak
- 19. Nanga Taman
- 20. Landau Kumpang

Gambar IV.82 Lokasi Daerah Irigasi Kecamatan Hulu Gurung



Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan, 2016

Di Salah satu desa di Kecamatan Hulu Gurung, yaitu Desa Mubung, terdapat embung, yaitu embung. Embung ini memiliki fungsi sebagai pengatur dan menampung air yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti kebutuhan air untuk peranian bahkan untuk kebutuhan rumah tangga. Embung ini diharapkan dapat menampung volume air sebanyak 49.000 m³. Selain bermanfaat untuk keperluan pertanian dan juga rumah tangga, embung ini juga menjadi daya tarik bagi masyarakat sehingga kawasan embung ini sering dikunjungi oleh masyarakat untuk wisata.

4.4.3 Pusat Perkotaan

Berdasarkan analisis ketersediaan dan tingkat pelayanan masing-masing infrastruktur yang telah dilakukan, didapatkan lokasi-lokasi yang merupakan aglomerasi dari infrastruktur yang dapat mengindikasikan pusat-pusat kegiatan yang berkembang di tujuh kecamatan ini menggunakan analisis skalogram. Analisis ini bermanfaat untuk menunjukkan adanya ketidak merataan infrastruktur dan mengetahui pusat-pusat pertumbuhan atau identifikasi aglomerasi pusat pertumbuhan. Berdasarkan analisis skalogram yang telah dilakukan, orde-orde yang didapatkan untuk masing-masing desa cukup merata, sehingga mengindikasikan ketimpangan infrastruktur tidak terlalu tinggi. Walaupun dapat dikatakan merata, berdasarkan analisis-analisis ketersediaan yang telah dibahas sebelumnya, tujuh kecamatan ini belum dilengkapi dengan infrastruktur-infrastruktur dasar seperti sanitasi yang memadai, pengolahan limbah yang memadai, dan air bersih yang cukup. Selain itu, infrastruktur-infrastruktur yang memiliki peran penting dalam pengembangan kawasan agropolitan pun masih sangat minim.

Tabel IV.70 Orde per Desa (Analisis Skalogram)

No	Kecamatan	Orde				
		I	II	III	IV	V
1	Silat Hilir	1. Bongkong 2. Sungai Sena 3. Miau Merah 4. Oerigi 5. Penai	1. Nanga Nuar 2. Setunggul 3. Pangeran 4. Sentabai	1. Baru 2. Seberu 3. Rumbih 4. Bukit Penai		
2	Silat Hulu		1. Nanga Ngeri 2. Landau Badai 3. Nanga Dangkan I 4. Dangkan Kota	1. Nanga Langu 2. Nanga Luan 3. Belimbing 4. Riam Tapang 5. Perejuk	1. Lebak Najah 2. Landau Rantau 3. Selengkai 4. Selimu	1. Entabi
3	Hulu Gurung		1. Mentawit 2. Mubung	1. Parang 2. Nanga Yen 3. Tani Makmur	1. Lubuk Antuk 2. Landau Kumpang 3. Kelakar 4. Bugang 5. Sinpang Senara 6. Beringin 7. Karya Mandiri 8. Tunas Muda	1. Sejahtera Mandiri
4	Pengkadan		1. Mawan 2. Buak Limbang 3. Sira Jaya	1. Kerangan Panjang 2. Marta Dana 3. Riam Panjang 4. Pinang Laka	1. Permata 2. Hulu Pengkadan 3. Pengkadan Hilir	
5	Seberuang		1. Sejiram	1. Seneban 2. Belikai 3. Nanga Lot	1. Beluis Jarum 2. Gurung 3. Bati 4. Pala Kota 5. Emperiang 6. Tanjung Keliling 7. Tanjun Mada 8. Jerenjang 9. Bekuan 10. Nanga Pala	
6	Semitau	1. Semitau Hulu	1. Semitau Hilir	1. Kenepai Komplek	1. Kenerak 2. Nanga Seberuang 3. Entipan 4. Nanga Kenepai 5. Padung Kumang	1. Tua' Abang 2. Marsedan Raya 3. Nanga Lemedak 4. Sekedau
7	Empanang		1. Nanga Kantuk		1. Keling Panngau 2. Tintin Peninjau	1. Bajau Andai

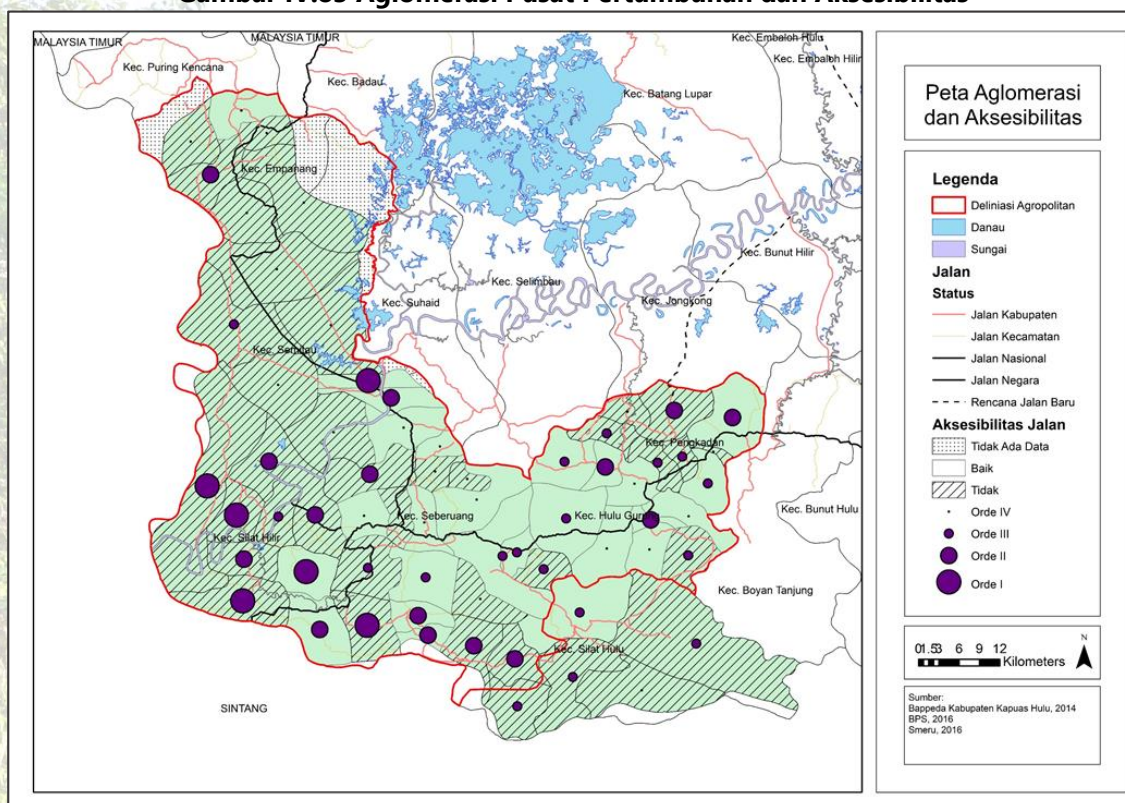
Sumber: Hasil Analisis, 2017

Dapat dilihat pada Gambar Aglomerasi Pusat Pertumbuhan dan Aksesibilitas, aglomerasi pusat pertumbuhan berkembang di kawasan selatan bagian barat: Kecamatan Semitau (Desa Semitau Hulu dan Semitau Hilir) dan Kecamatan Silat Hilir (Desa Bongkong, Desa Nanga Nuar, Desa Setunggul, Desa Sungai Sena, Desa Miau Merah, Desa Pangeran, Desa Perigi, dan Desa Penai, dan Desa Sentebai). Dalam kasus di tujuh kecamatan yang merupakan kawasan agropolitan ini, kawasan yang dilalui jalan nasional memiliki akses yang baik. Namun, akses yang baik ini ternyata tidak berdampak terhadap kelengkapan infrastruktur yang dilalui jalan nasional tersebut. Dapat dilihat pada gambar tersebut, kawasan-kawasan yang merupakan aglomerasi pusat pertumbuhan memiliki aksesibilitas yang rendah. Sehingga dapat diindikasikan jika aglomerasi muncul akibat aksesibilitas

kawasan tersebut rendah sehingga sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dibangun lebih lengkap sebagai dampaknya masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut tidak perlu keluar dari kawasan mereka.

Dibuktikan dengan kondisi fisik yang dapat diobservasi, kawasan-kawasan dengan orde-orde utama memang lebih ramai dibandingkan dengan desa—desa dengan orde yang rendah. Yang paling membedakan kawasan yang memiliki orde utama dan orde yang rendah selain ketersediaan sarana prasarana dasar adalah keberadaan pasar, pertokoan, dan bank.

Gambar IV.83 Aglomerasi Pusat Pertumbuhan dan Aksesibilitas



Sumber: Hasil Pengolahan 2017

Jika membandingkan hasil analisis skalogram dengan sistem perkotaan yang telah ditetapkan oleh Rencana Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034, Perkotaan Semitau memang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang memiliki fungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa; dan berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Selain itu, Perkotaan Nanga Silat di Kecamatan Silat Hilir juga berdasarkan RTRW Kabupaten Kapuas Hulu memiliki peran sebagai Pusat Pelayanan Kawasan yang memiliki fungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

4.5 ANALISIS EKONOMI

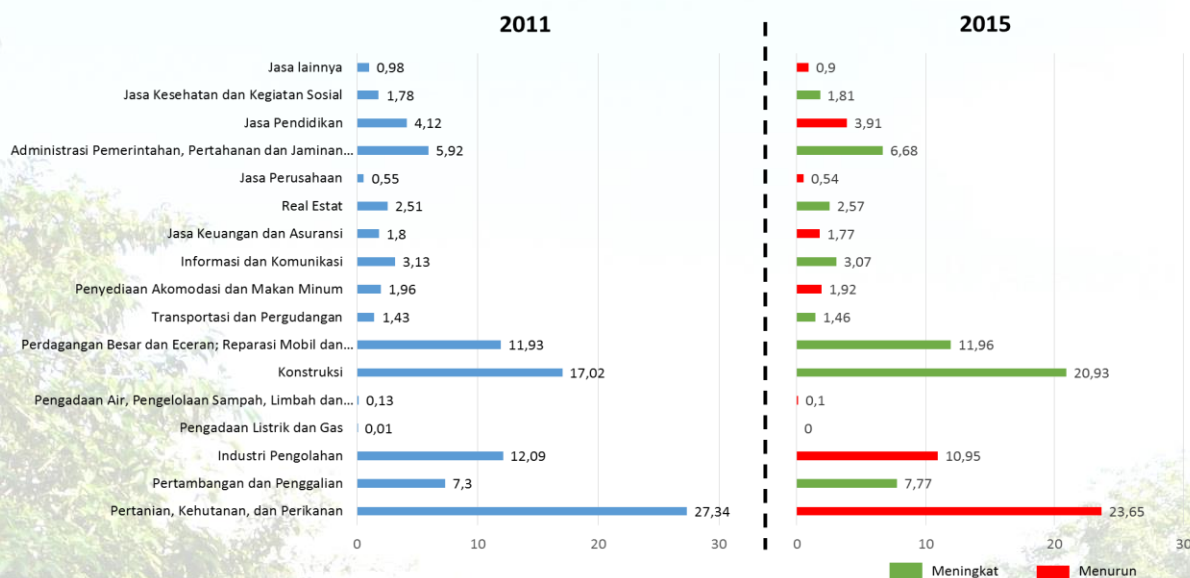
Pada bagian ini akan dilakukan analisis aspek perekonomian terkait dengan pengembangan KSK Agropolitan. Analisis yang dilakukan terdiri dari analisis daya saing ekonomi wilayah, analisis sektor unggulan Kabupaten Kapuas Hulu, analisis komoditas unggulan budidaya pertanian, serta analisis komoditas unggulan produk budidaya pertanian.

4.5.1 Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Kapuas Hulu

Bagian ini akan menganalisis sektor unggulan untuk mengetahui sektor apa saja yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu. Secara umum analisis akan meninjau kontribusi setiap sektor pada PDRB Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian akan dilakukan klasifikasi sektor berdasarkan Tipologi Klassen. Selain itu akan dilakukan pula analisis terkait dengan kontribusi setiap sub sektor terhadap PDRB sektor pertanian sebagai sektor utama dalam pengembangan KSK Agropolitan. Sehingga dapat disimpulkan sektor dan sub sektor unggulan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Analisis sektor unggulan salah satunya dapat dilakukan dengan melihat kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan hasil analisis PDRB menurut lapangan usaha pada tahun 2011 dan tahun 2015, dapat dilihat bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor basis di Kabupaten Kapuas Hulu dengan kontribusi 27,34% pada tahun 2011 dan 23,65% pada tahun 2015. Kemudian sektor unggulan lainnya yaitu sektor konstruksi dimana kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten mencapai 20% pada tahun 2015. Namun apabila kita bandingkan kontribusi setiap sektor pada tahun 2011 dan tahun 2015, dapat terlihat adanya pergeseran yang terjadi, khususnya pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dibandingkan dengan sektor konstruksi. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar kurang lebih 4%, sedangkan sektor konstruksi mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 3,9%. Jika tren ini terus berlanjut, sektor basis Kabupaten Kapuas Hulu dapat bergeser menjadi sektor konstruksi. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam pengembangan kawasan agropolitan. Secara rinci, kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar IV.84 Kontibusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber: BPS Kabupaten Kapuas Hulu, 2012; 2016

Kemudian jika dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan tipologi klasen, dapat diketahui klasifikasi sektor perekonomian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Analisis tipologi klasen digunakan dengan tujuan mengidentifikasi posisi sektor perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu dengan memperhatikan sektor perekonomian Provinsi Kalimantan Barat sebagai daerah referensi. Analisis tipologi klasen menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik sebagai berikut (Sjafrijal, 2008:180):

1. **Kuadran I** : merupakan ektor yang maju dan tumbuh pesat (*developed sector*). Kuadran ini merupakan kuadram dimana laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB kabupaten (si) lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi (s), serta memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (ski) lebih besar dibandingkan dengan kontribusi sektor tersebut terhadap daerah yang menjadi referensi (sk). Klasifikasi ini dilambangkan dengan **si > s dan ski > sk**.
2. **Kuadran II** : merupakan sektor maju tapi tertekan (*stagnant sector*). Kuadran ini merupakan kuadran dimana laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB (si) lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB daerah yang menjadi referensi (s), tetapi memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (ski) lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi (sk). Klasifikasi ini dilambangkan dengan **si < s dan ski > sk**.
3. **Kuadran III** : merupakan sektor potensial atau masih dapat berkembang (*developing sector*). Kuadran ini merupakan kuadran dimana laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB (si) lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi (s), tetapi memiliki nilai kontribusi terhadap PDRB (ski) lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi (sk). Klasifikasi ini dilambangkan dengan **si > s dan ski < sk**.

4. **Kuadran IV** : merupakan sektor relatif tertinggal (*underdeveloped sector*). Kuadran ini merupakan kuadran dimana laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB (si) lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi (s) dan sekaligus memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (ski) lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi (sk). Klasifikasi ini dilambangkan dengan **si < s dan ski < sk**.

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat klasifikasi sektor PDRB Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2013-2015 berdasarkan Tipologi Klassen. Diketahui bahwa sektor yang masuk ke dalam kategori maju dan tumbuh pesat adalah sektor pertambangan dan penggalian serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sedangkan pertanian, kehutanan, dan perikanan masuk ke dalam kategori sektor maju tapi tertekan. Hal ini tentunya akan mempengaruhi rencana pengembangan agropolitan di Kabupaten Kapuas Hulu. Lalu secara umum ditunjukkan bahwa sebagian besar sektor di Kabupaten Kapuas Hulu tergolong ke dalam sektor relatif tertinggal. Sedangkan sektor yang berpotensi dapat berkembang yaitu industri pengolahan, real estate, dan jasa lainnya. Hal ini menunjukkan industri dan jasa mulai menggantikan peran sektor primer di Kabupaten Kapuas Hulu.

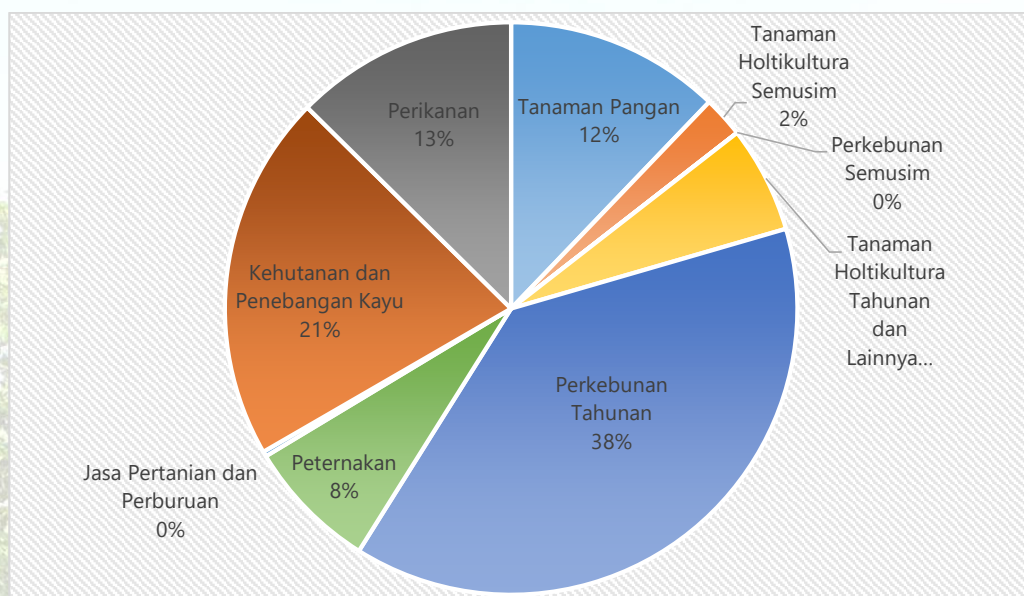
Tabel IV.71 Klasifikasi Sektor PDRB Kapuas Hulu menurut Tipologi Klassen

Kuadran I (sektor maju dan tumbuh pesat)	Kuadran II (sektor maju tapi tertekan)
<ul style="list-style-type: none"> • Pertambangan dan penggalian • Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian, kehutanan, dan perikanan • Konstruksi • Jasa Perusahaan • Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial
Kuadran III (sektor potensial/dapat berkembang)	Kuadran IV (sektor relatif tertinggal)
<ul style="list-style-type: none"> • Industri pengolahan • Real estate • Jasa lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan listrik dan gas • Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang • Perdagangan besar dan eceran • Transportasi dan pergudangan • Penyediaan akomodasi dan makan minum • Informasi dan komunikasi • Jasa keuangan dan asuransi

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Apabila dilihat lebih rinci pada sektor pertanian secara spesifik sebagai sektor yang rencananya akan dikembangkan di Kabupaten Kapuas Hulu, sub sektor yang berkontribusi terbesar terhadap perekonomian wilayah adalah perkebunan tahunan, yaitu sebesar 38,42%. Kemudian disusul oleh sub sektor kehutanan dan penebangan kayu sebesar 20,74%, perikanan sebesar 12,61%, dan tanaman pangan sebesar 12,17%. Hal ini menunjukkan bahwa sub sektor perkebunan tahunan, khususnya perkebunan sawit masih menjadi andalan di Kabupaten Kapuas Hulu. Proporsi kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB sektor pertanian dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar IV.85 Kontibusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian



Sumber: BPS Kabupaten Kapuas Hulu, 2016

4.5.2 Analisis Komoditas Unggulan Budidaya Pertanian Kawasan Agropolitan

Analisis komoditas unggulan budidaya pertanian dilakukan untuk mengetahui potensi pengembangan komoditas pertanian yang ada di kawasan agropolitan berdasarkan prestasinya. Penentuan komoditas unggulan menjadi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Penentuan ini penting dengan pertimbangan bahwa ketersediaan dan kapabilitas sumber daya alam untuk menghasilkan dan memasarkan semua komoditas secara simultan cukup terbatas. Sehingga, hal ini akan menjadi masukan untuk rencana pengembangan KSK agropolitan. Analisis komoditas unggulan budidaya pertanian akan ditinjau dalam tiga komponen, yaitu: kemampuan produksi komoditas, tingkat konsentrasi komoditas, serta peluang pasar komoditas.

Analisis kemampuan produksi komoditas dilakukan dengan menggunakan pendekatan nilai kontribusi komoditas serta rasio komoditas relatif terhadap rata-rata produksi Kabupaten Kapuas Hulu, untuk menentukan komoditas yang berprestasi. Pada perhitungan kontribusi komoditas akan diperoleh nilai dengan interpretasi sebagai berikut:

- Nilai kontribusi $< 50\%$, berarti bahwa produksi komoditas dianggap belum menjadi unggulan di Kabupaten Kapuas Hulu.
- Nilai kontribusi $\geq 50\%$, berarti bahwa komoditas bersangkutan merupakan komoditas basis, artinya produksi komoditas tersebut berkontribusi besar di tingkat Kapuas Hulu, sehingga surplus produksi komoditas dapat dijual ke luar daerah (ekspor).

Analisis komoditas unggulan budidaya pertanian di kabupaten Kapuas Hulu dilakukan pada setiap sub sektor pertanian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui potensi komoditas secara spesifik, sehingga dapat dilakukan intervensi khusus dalam rencana pengembangan KSK agropolitan di tujuh kecamatan yang termasuk dalam rencana KSK agropolitan. Rumus yang

digunakan dalam melakukan perhitungan kontribusi komoditas pada tingkat kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut.

$$K = \frac{pi}{pt} \times 100$$

Keterangan:

pi = produksi komoditas i pada tingkat kecamatan

pt = produksi komoditas di Kabupaten Kapuas Hulu

Sedangkan, perhitungan rasio komoditas relatif terhadap rata-rata produksi Kabupaten Kapuas Hulu digunakan untuk melihat tingkat konsentrasi pada suatu komoditas. Akan terlihat seberapa banyak daerah yang memiliki tingkat produksi lebih dari rata-rata Kabupaten Kapuas Hulu. Sehingga akan diperoleh kesimpulan mengenai komoditas apa saja yang umumnya sudah memiliki potensi pengembangan di kawasan agropolitan secara khususnya. Pada perhitungan rasio komoditas, akan diperoleh nilai dengan interpretasi sebagai berikut:

- Rasio < 1 , berarti bahwa produksi komoditas masih di bawah rata-rata produksi di Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga dapat disimpulkan komoditas belum berprestasi.
- Rasio ≥ 1 , berarti bahwa produksi komoditas telah sama atau melebihi rata-rata produksi di Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga dapat disimpulkan komoditas tersebut sudah memiliki prestasi yang baik.

Analisis komoditas unggulan budidaya pertanian dilakukan pada tingkat kabupaten Kapuas Hulu untuk mengetahui prestasi komoditas pada setiap kecamatan. Hal ini khususnya dilakukan untuk mengetahui komoditas-komoditas yang potensial untuk dikembangkan pada KSK agropolitan.

Kemudian rumus yang digunakan dalam melakukan perhitungan rasio komoditas di kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut:

$$R = \frac{pi}{\bar{X}}$$

Keterangan:

pi = produksi komoditas i pada tingkat kecamatan (Ton)

\bar{X} = rata-rata produksi komoditas di kabupaten Kapuas Hulu (Ton)

Kemudian, analisis peluang pasar komoditas akan meninjau komoditas-komoditas yang memiliki kepentingan yang strategis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Komoditas-komoditas tersebut dianggap memiliki peluang pasar yang tinggi, sehingga dapat menjadi masukan untuk rencana pengembangan KSK Agropolitan.

4.5.2.1 Analisis Komoditas Unggulan Tanaman Pangan di Kawasan Agropolitan Kontribusi Komoditas Tanaman Pangan Kawasan Agropolitan

Sub sektor tanaman pangan memiliki peranan besar dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan suatu daerah. Ketahanan pangan merupakan salah satu kriteria dalam pengembangan kawasan agropolitan yang berkelanjutan. Pada sub sektor tanaman

pangan, apabila dilihat berdasarkan kontribusi setiap komoditas terhadap Kabupaten Kapuas Hulu kacang tanah dan kacang kedelai merupakan komoditas di kawasan agropolitan yang memiliki kontribusi yang besar di tingkat kabupaten. Pada kawasan agropolitan, kacang tanah berkontribusi sebesar 72,56% terhadap Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan kacang kedelai berkontribusi sebesar 100%. Kemudian secara keunggulan daerah, kecamatan Hulu Gurung memiliki kontribusi cukup besar pada sub sektor tanaman pangan, dimana menumbang lebih dari 15% pada komoditas padi sawah dan kacang tanah. Kemudian kecamatan Pengkadan juga merupakan kecamatan yang memiliki prestasi pada sub sektor tanaman pangan, khususnya pada komoditas ubi jalar dan kacang tanah, dengan kontribusi lebih dari 14%. Kemudian kecamatan Seberuang memiliki prestasi yang baik pada komoditas jagung dan ubi kayu, dengan kontribusi mencapai 18% terhadap kabupaten Kapuas Hulu. Secara detail kontribusi komoditas per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.72 Kontribusi Komoditas Tanaman Pangan menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	KONTRIBUSI PRODUKSI KOMODITAS (%)							
		Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Kacang Kedelai
1	Silat Hilir	0,97	1,67	9,32	3,91	3,67	13,11	0,00	0,00
2	Silat Hulu	1,62	6,94	3,21	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hulu Gurung	15,20	4,18	0,00	4,85	3,57	22,87	0,00	0,00
4	Pengkadan	8,98	3,89	0,00	3,24	14,27	32,01	0,00	100,00
5	Seberuang	6,06	4,36	18,01	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Semitau	2,98	2,85	1,20	1,19	0,00	4,57	0,00	0,00
7	Empanang	0,49	6,72	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kawasan Agropolitan	36,31	30,62	34,14	32,19	21,51	72,56	0,00	100,00
8	Bunut Hulu	9,60	8,50	0,00	0,81	0,00	9,15	0,00	0,00
9	Mentebah	2,74	5,23	0,00	4,75	3,57	0,00	0,00	0,00
10	Bika/Manday	3,34	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kalis	5,52	5,45	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Putussibau Selatan	9,15	7,78	0,00	4,45	10,70	4,57	0,00	0,00
13	Embaloh Hilir	0,71	1,01	0,00	1,21	3,57	9,15	0,00	0,00
14	Bunut Hilir	0,81	0,80	4,81	2,02	17,84	0,00	0,00	0,00
15	Boyan Tanjung	3,43	7,03	16,10	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Jongkong	10,96	0,42	0,00	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Selimbau	3,62	0,86	0,00	3,24	10,70	0,00	0,00	0,00
18	Suhaid	3,51	2,97	6,40	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Puring Kencana	0,00	2,25	0,80	0,81	3,57	0,00	0,00	0,00
20	Badau	0,23	2,52	1,60	1,19	7,14	0,00	0,00	0,00
21	Batang Lupar	3,16	6,75	0,00	4,85	21,41	0,00	0,00	0,00
22	Embaloh Hulu	0,85	4,76	9,64	0,79	0,00	4,57	0,00	0,00
23	Putussibau Utara	6,04	8,14	7,25	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Non-Kawasan	63,69	69,38	65,86	67,81	78,49	27,44	0,00	0,00

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Konsentrasi Komoditas Tanaman Pangan pada lingkup Kabupaten Kapuas Hulu

Apabila dilihat dari perhitungan rasio komoditas terhadap rata-rata kabupaten Kapuas Hulu, kecamatan yang memiliki komoditas tanaman pangan unggulan terbanyak di kawasan KSK agropolitan adalah kecamatan Pengkadan dengan 4 komoditas, kemudian disusul oleh kecamatan Hulu Gurung dan Seberuang dengan 3 komoditas unggulan. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa komoditas tanaman pangan yang memiliki tingkat konsentrasi tinggi adalah padi sawah, padi ladang, jagung, ubi kayu, dan

kacang tanah, dimana setidaknya 5 kecamatan membudidayakan komoditas tersebut. Hal ini menunjukkan peluang pengembangan komoditas apabila dilihat dari banyaknya daerah yang sudah mulai membudidayakan komoditas tersebut. Dari analisis rasio juga dapat disimpulkan bahwa pada komoditas tanaman pangan, kecamatan-kecamatan di KSK agropolitan memiliki potensi cukup besar, khususnya pada komoditas kacang tanah dan kacang kedelai, karena memiliki rasio mencapai lebih dari 16 kali rata-rata produksi kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini dapat menunjang pengembangan komoditas tanaman pangan dalam rencana kawasan agropolitan apabila dilihat dari sisi potensinya pada lingkup eksternal.

Tabel IV.73 Rasio Komoditas Tanaman Pangan dengan Rata-Rata Kabupaten Kapuas Hulu

NO	KECAMATAN	TINGKAT KONSENTRASI KOMODITAS TANAMAN PANGAN							
		Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Kacang Kedelai
1	Silat Hilir	0,22	0,38	2,14	0,90	0,85	3,02	0,00	0,00
2	Silat Hulu	0,37	1,60	0,74	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hulu Gurung	3,50	0,96	0,00	1,12	0,82	5,26	0,00	0,00
4	Pengkadan	2,07	0,89	0,00	0,74	3,28	7,36	0,00	23,00
5	Seberuang	1,39	1,00	4,14	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Semitau	0,69	0,66	0,28	0,27	0,00	1,05	0,00	0,00
7	Empanang	0,11	1,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kawasan Agropolitan		8,35	7,04	7,85	7,40	4,95	16,69	1,00	23,00
8	Bunut Hulu	2,21	1,95	0,00	0,19	0,00	2,10	0,00	0,00
9	Mentebah	0,63	1,20	0,00	1,09	0,82	0,00	0,00	0,00
10	Bika/Manday	0,77	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kalis	1,27	1,25	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Putussibau Selatan	2,10	1,79	0,00	1,02	2,46	1,05	0,00	0,00
13	Embaloh Hilir	0,16	0,23	0,00	0,28	0,82	2,10	0,00	0,00
14	Bunut Hilir	0,19	0,18	1,11	0,47	4,10	0,00	0,00	0,00
15	Boyan Tanjung	0,79	1,62	3,70	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Jongkong	2,52	0,10	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Selimbau	0,83	0,20	0,00	0,74	2,46	0,00	0,00	0,00
18	Suhaid	0,81	0,68	1,47	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Puring Kencana	0,00	0,52	0,18	0,19	0,82	0,00	0,00	0,00
20	Badau	0,05	0,58	0,37	0,27	1,64	0,00	0,00	0,00
21	Batang Lupar	0,73	1,55	0,00	1,12	4,92	0,00	0,00	0,00
22	Embaloh Hulu	0,20	1,09	2,22	0,18	0,00	1,05	0,00	0,00
23	Putussibau Utara	1,39	1,87	1,67	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-Kawasan		14,65	15,96	15,15	15,60	18,05	6,31	1,00	0,00

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Kemudian apabila dibandingkan antara konsentrasi produksi komoditas tanaman pangan di dalam kawasan agropolitan dengan kecamatan-kecamatan di luar kawasan agropolitan, dapat diketahui persaingan yang terjadi pada wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Pada sub sektor tanaman pangan, dapat disimpulkan bahwa kacang kedelai merupakan komoditas yang sangat unggul, karena hanya diproduksi di kecamatan Pengkadan, sehingga tidak memiliki pesaing di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian terdapat pula komoditas lainnya yang unggul, yaitu padi sawah dan kacang tanah. Komoditas tersebut memiliki keunggulan di tingkat Kabupaten, namun masih memiliki pesaing di luar kawasan

agropolitan. Sehingga pada pengembangan KSK Agropolitan, dapat disimpulkan bahwa komoditas kacang kedelai, padi sawah, dan kacang tanah memiliki potensi untuk dikembangkan produksinya dan dipasarkan ke luar kawasan. Perbandingan konsentrasi komoditas tanaman pangan antara kawasan agropolitan dengan non kawasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.74 Konsentrasi Komoditas Tanaman Pangan di Kawasan Agropolitan relatif terhadap Non Kawasan Agropolitan

No	Komoditas	Kawasan	Non Kawasan	Kesimpulan
		Kecamatan Konsentrasi	Kecamatan Konsentrasi	
1	Padi Sawah	Hulu Gurung Pengkadan Seberuang	Jongkong Bunut Hulu Putussibau Selatan	Unggul
2	Padi Ladang	Silat Hulu Empanang	Bunut Hulu Putussibau Utara Putussibau Selatan Boyan Tanjung	Tidak Unggul
3	Jagung	Seberuang Silat Hilir	Kalis Boyan Tanjung Embaloh Hulu	Kurang Unggul
4	Ubi Kayu	Seberuang Hulu Gurung	Jongkong Suhaid Batang Lupar	Tidak Unggul
5	Ubi Jalar	Pengkadan	Batang Lupar Bunut Hilir	Kurang Unggul
6	Kacang Tanah	Pengkadan Hulu Gurung Seberuang Semitau	Bunut Hulu Embaloh Hilir	Unggul
7	Kacang Kedelai	Pengkadan		Sangat Unggul

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Keterangan:

Sangat Unggul : tidak ada persaingan dengan non kawasan

Unggul: ada sedikit persaingan dengan non kawasan

Kurang Unggul: ada cukup besar persaingan dengan non kawasan

Tidak Unggul : menghadapi persaingan berat dengan non kawasan

Peluang Pasar Komoditas Tanaman Pangan

Apabila dilihat dari sisi peluang pasar, komoditas tanaman pangan yang memiliki pasar di tingkat nasional dan internasional yaitu beras, jagung, kacang tanah, kacang hijau, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar. Komoditas-komoditas tersebut memiliki permintaan yang tinggi dan berpotensi untuk dikembangkan. Negara tujuan ekspor tanaman pangan Indonesia pada dasarnya cukup beragam, namun secara umum terdapat di wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur, seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Jepang, India, dan Korea Selatan. Kemudian untuk pesaing di dalam Indonesia pada sub sektor tanaman pangan didominasi oleh Provinsi-Provinsi di wilayah Jawa, Sumatera dan Indonesia bagian Timur, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan dan sebagainya.

Apabila dilihat secara lebih rinci terhadap beberapa komoditas yang unggul di kawasan agropolitan, dapat diketahui bahwa untuk komoditas kacang kedelai terdapat peluang ekspor ke luar kawasan hingga mencapai negara Malaysia, Saudi Arabia, Australia, dan Belanda. Namun, apabila ingin dikembangkan harus bersaing dengan Provinsi Jawa Timur,

Jawa Tengah, Jawa Barat, NTB, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk komoditas padi sawah/beras, dapat diketahui bahwa peluang ekspornya mencapai Malaysia, India, Singapura, dan Brunei Darusalam. Namun jika ingin dikembangkan akan memiliki pesaing dalam negeri, yaitu Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Lampung. Kemudian untuk komoditas kacang tanah dapat diekspor hingga negara Vietnam. Namun apabila ingin dikembangkan, akan memiliki pesaing utama di dalam negeri seperti Provinsi Aceh, Bali, Jambi, dan Jawa Timur. Secara lebih lengkap, dapat dilihat peluang pasar ekspor komoditas tanaman pangan pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.75 Peluang Pasar Ekspor Tanaman Pangan

No	Komoditas	Nasional	Internasional	Pesaing Terbesar
1	Beras	V	Malaysia India Singapura Brunei Darusalam	Jawa Timur Sulawesi Selatan Jawa Tengah Sumatera Selatan Lampung
2	Jagung	V	Filipina Jepang	Jawa Timur Jawa Tengah Lampung Sulawesi Selatan Sumatera Utara
3	Kacang Tanah	V	Vietnam	Aceh Bali Jambi Jawa Timur
4	Kacang Hijau	V	China	Jawa Tengah Jawa Timur NTT Sulawesi Selatan
5	Kacang Kedelai	V	Malaysia Saudi Arabia Australia Belanda	Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat NTB Sulawesi Selatan
6	Ubi Kayu	V	Taiwan China	Lampung Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat Sumatera Utara
7	Ubi Jalar	V	Malaysia Jepang Korea Selatan	Papua Jawa Barat Jawa Timur NTT Sumatera Utara

Sumber: Hasil Studi Literatur, 2017

Komoditas Unggulan Tanaman Pangan di Kawasan Agropolitan

Berdasarkan analisis sebelumnya dengan melihat kontribusi produksi komoditas sub sektor tanaman pangan di tingkat Kabupaten Kapuas Hulu, konsentrasi komoditas, kompetisi dengan kecamatan-kecamatan di non kawasan agropolitan, serta peluang pasar, maka dapat dihasilkan komoditas-komoditas unggulan sub sektor tanaman pangan di kawasan agropolitan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa komoditas kacang tanah dan kacang kedelai merupakan komoditas yang sangat unggul di kawasan agropolitan, yang berarti bahwa dapat dikembangkan tanpa harus bersaing dengan wilayah non kawasan agropolitan, sehingga peluang untuk dipasarkan akan semakin besar, minimal pada tingkat

Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian, komoditas padi sawah merupakan komoditas unggul di kawasan agropolitan, yang berarti bahwa komoditas dapat dikembangkan namun masih perlu bersaing dengan kecamatan-kecamatan lain di luar kawasan agropolitan. Ketiga komoditas tersebut memiliki potensi besar dan memiliki prospek yang baik apabila akan dikembangkan dalam rencana KSK Agropolitan. Sintesa dari analisis komoditas unggulan tanaman pangan di kawasan agropolitan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.76 Komoditas Unggulan Tanaman Pangan di Kawasan Agropolitan

No	Komoditas	Kontribusi di Kabupaten Kapuas Hulu	Kompetisi dengan Non Kawasan	Peluang Pasar	Kesimpulan
1	Padi Sawah	Tidak Dominan	Unggul	Ada	Unggul
2	Padi Ladang	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Ada	Tidak Unggul
3	Jagung	Tidak Dominan	Kurang Unggul	Ada	Kurang Unggul
4	Ubi Kayu	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Ada	Tidak Unggul
5	Ubi Jalar	Tidak Dominan	Kurang Unggul	Ada	Kurang Unggul
6	Kacang Tanah	Dominan	Unggul	Ada	Sangat Unggul
7	Kacang Kedelai	Dominan	Sangat Unggul	Ada	Sangat Unggul

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Keterangan:

- Sangat Unggul** : sama sekali tidak perlu bersaing dengan non kawasan,
Unggul : perlu sedikit bersaing dengan non kawasan.
Kurang Unggul : perlu lebih banyak bersaing dengan non kawasan
Tidak unggul : perlu bersaing berat dengan non kawasan
Sangat Tidak Unggul : belum berdaya dan perlu menciptakan pasar

4.5.2.2 Analisis Komoditas Unggulan Perkebunan di Kawasan Agropolitan

1. Kontribusi Komoditas Perkebunan Kawasan Agropolitan

Sub sektor perkebunan memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Mayoritas penduduk Kabupaten Kapuas Hulu bekerja pada sub sektor perkebunan, khususnya pada komoditas sawit dan karet. Pada sub sektor perkebunan, apabila dilihat berdasarkan kontribusi setiap komoditas terhadap Kabupaten Kapuas Hulu kelapa sawit merupakan komoditas di kawasan agropolitan yang memiliki kontribusi yang besar di tingkat kabupaten. Pada kawasan agropolitan, kelapa sawit berkontribusi sebesar 73,77% terhadap produksi di Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan kelapa dan karet berkontribusi cukup tinggi, yaitu sebesar 44%. Kemudian secara keunggulan daerah, kecamatan Silat Hilir memiliki kontribusi cukup besar pada sub sektor perkebunan, dimana menyumbang lebih dari 12% pada komoditas kelapa dan kelapa sawit. Kemudian kecamatan Hulu Gurung juga merupakan kecamatan yang memiliki prestasi pada sub sektor perkebunan, khususnya pada komoditas kelapa dan karet, dengan kontribusi lebih dari 10%. Kemudian kecamatan Semitau memiliki prestasi yang baik pada komoditas kelapa sawit, dengan kontribusi mencapai 17% terhadap kabupaten Kapuas Hulu. Secara detail kontribusi komoditas perkebunan per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.77 Kontribusi Komoditas Perkebunan menurut Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu

NO	KECAMATAN	KONTRIBUSI PRODUKSI KOMODITAS (%)								
		Sawit	Lada	Kapuk	Tebu	Kopi	Kakao	Kelapa	Karet	Aren
1	Silat Hilir	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	5,46	4,29
2	Silat Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	5,88	0,00
3	Hulu Gurung	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52	3,51	14,89	10,12	0,00
4	Pengkadang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	4,96	11,06	0,00
5	Seberuang	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	6,84	2,86
6	Semitau	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	6,75	4,29
7	Empanang	7,87	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	1,81	1,43
Kawasan Agropolitan		73,77	9,09	0,00	0,00	9,52	7,02	44,67	47,92	12,86
8	Bunut Hulu	0,00	0,00	0,00	40,00	2,86	5,26	0,25	5,11	0,00
9	Mentebah	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	1,24	5,08	0,71
10	Bika/Manday	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	4,96	1,83	14,29
11	Kalis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	3,77	0,71
12	Putussibau Selatan	0,00	0,00	25,00	40,00	0,00	24,56	7,44	1,79	7,14
13	Embaloh Hilir	0,00	0,00	50,00	0,00	38,10	14,04	7,44	6,19	42,86
14	Bunut Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	2,73	0,00
15	Boyan Tanjung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	4,96	5,43	0,00
16	Jongkong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	4,30	0,00
17	Selimbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	2,95	0,00
18	Suhaid	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	6,40	5,71
19	Puring Kencana	4,93	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,42	1,43
20	Badau	12,50	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	1,05	1,43
21	Batang Lupar	0,00	9,09	0,00	0,00	28,57	5,26	0,99	1,44	1,43
22	Embaloh Hulu	0,00	9,09	0,00	0,00	19,05	22,81	2,48	1,95	8,57
23	Putussibau Utara	0,00	0,00	25,00	20,00	0,00	14,04	7,44	1,63	2,86
Non-Kawasan		26,23	90,91	100,00	100,00	90,48	92,98	55,33	52,08	87,14

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Konsentrasi Komoditas Perkebunan pada lingkup Kabupaten Kapuas Hulu

Secara umum, kecamatan yang memiliki komoditas unggulan terbanyak pada sub sektor perkebunan di kawasan agropolitan adalah kecamatan Hulu Gurung dan Silat Hilir dengan 3 komoditas. Berdasarkan hasil perhitungan rasio dengan rata-rata produksi kabupaten Kapuas Hulu, dapat disimpulkan bahwa komoditas perkebunan yang unggul dan memiliki tingkat konsentrasi tinggi di kawasan KSK agropolitan adalah sawit, kelapa, dan karet dimana lebih dari 4 kecamatan membudidayakan komoditas tersebut. Dari analisis tersebut juga dapat disimpulkan bahwa pada komoditas perkebunan sawit, kelapa, dan karet memiliki potensi cukup besar. Secara umum, komoditas-komoditas tersebut juga selaras dengan komoditas unggulan pada lingkup Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini dapat menunjang pengembangan komoditas perkebunan dalam rencana kawasan agropolitan apabila dilihat dari sisi potensinya pada lingkup eksternal.

Tabel IV.78 Rasio Komoditas Perkebunan dengan Rata-Rata Kabupaten Kapuas Hulu

NO	KECAMATAN	TINGKAT KONSENTRASI KOMODITAS PERKEBUNAN								
		Sawit	Lada	Kapuk	Tebu	Kopi	Kakao	Kelapa	Karet	Aren
1	Silat Hilir	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	1,25	0,99
2	Silat Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	1,35	0,00
3	Hulu Gurung	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,81	3,42	2,33	0,00
4	Pengkadan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	1,14	2,54	0,00
5	Seberuang	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	1,57	0,66
6	Semtau	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	1,55	0,99
7	Empanang	1,81	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,42	0,33
Kawasan Agropolitan		16,97	2,09	0,00	0,00	2,19	1,61	10,27	11,02	2,96
8	Bunut Hulu	0,00	0,00	0,00	9,20	0,66	1,21	0,06	1,18	0,00
9	Mentebah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,29	1,17	0,16
10	Bika/Manday	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,14	0,42	3,29
11	Kalis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,87	0,16
12	Putussibau Selatan	0,00	0,00	5,75	9,20	0,00	5,65	1,71	0,41	1,64
13	Embaloh Hilir	0,00	0,00	11,50	0,00	8,76	3,23	1,71	1,42	9,86
14	Bunut Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,63	0,00
15	Boyan Tanjung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	1,14	1,25	0,00
16	Jongkong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,99	0,00
17	Selimbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,68	0,00
18	Suhaid	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	1,47	1,31
19	Puring Kencana	1,13	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,10	0,33
20	Badau	2,87	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,24	0,33
21	Batang Lupar	0,00	2,09	0,00	0,00	6,57	1,21	0,23	0,33	0,33
22	Embaloh Hulu	0,00	2,09	0,00	0,00	4,38	5,25	0,57	0,45	1,97
23	Putussibau Utara	0,00	0,00	5,75	4,60	0,00	3,23	1,71	0,37	0,66
Non-Kawasan		6,03	20,91	23,00	23,00	20,81	21,39	12,73	11,98	20,04

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Kemudian apabila dibandingkan antara konsentrasi produksi komoditas perkebunan di dalam kawasan agropolitan dengan kecamatan-kecamatan di luar kawasan agropolitan, dapat diketahui persaingan yang terjadi pada wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Pada sub sektor perkebunan, dapat disimpulkan tidak terdapat komoditas yang sangat unggul, dimana berarti bahwa seluruh komoditas yang dibudidayakan memiliki pesaing di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian terdapat komoditas perkebunan yang unggul yaitu kelapa sawit, kelapa, dan karet. Komoditas tersebut memiliki keunggulan di tingkat Kabupaten, namun masih memiliki pesaing di luar kawasan agropolitan. Sehingga pada pengembangan KSK Agropolitan, dapat disimpulkan bahwa komoditas tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan produksinya dan dipasarkan ke luar kawasan. Perbandingan konsentrasi komoditas perkebunan antara kawasan agropolitan dengan non kawasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.79 Konsentrasi Komoditas Perkebunan di Kawasan Agropolitan relatif terhadap Non Kawasan Agropolitan

No	Komoditas	Kawasan	Non Kawasan	Kesimpulan
		Kecamatan Konsentrasi	Kecamatan Konsentrasi	
1	Sawit	Semitau Silat Hilir Seberuang Empanang	Badau Suhaid	Unggul
2	Lada	Empanang	Badau Puring Kencana Batang Lupar Embaloh Hulu	Tidak Unggul
3	Kopi	Hulu Gurung	Embaloh Hilir	Tidak Unggul
4	Kakao		Putussibau Selatan Embaloh Hulu Embaloh Hilir Putussibau Utara Bunut Hulu Boyan Tanjung Batang Lupar	Tidak Unggul
5	Kelapa	Hulu Gurung Silat Hilir Seberuang Pengkadan	Putussibau Selatan Putussibau Utara Embaloh Hilir Bunut Hilir Bika/Manday Boyan Tanjung Jongkong	Unggul
6	Karet	Pengkadan Hulu Gurung Seberuang Semitau Silat Hulu Silat Hilir	Suhaid Embaloh Hilir Boyan Tanjung	Unggul
7	Aren		Embaloh Hilir Bika/Manday Embaloh Hulu Putussibau Selatan Suhaid	Tidak Unggul

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Keterangan:

Sangat Unggul : tidak ada persaingan dengan non kawasan

Unggul : ada sedikit persaingan dengan non kawasan

Kurang Unggul: ada cukup besar persaingan dengan non kawasan

Tidak Unggul : menghadapi persaingan berat dengan non kawasan

Peluang Pasar Komoditas Perkebunan

Apabila dilihat dari sisi peluang pasar, komoditas perkebunan yang memiliki pasar di tingkat nasional dan internasional yaitu kelapa sawit, karet, lada, kelapa, kopi, dan kakao/coklat. Komoditas-komoditas tersebut memiliki permintaan yang tinggi dan berpotensi untuk dikembangkan. Negara tujuan ekspor perkebunan Indonesia pada dasarnya cukup beragam, namun secara umum terdapat di wilayah Amerika Serikat, Eropa, dan Asia, seperti Malaysia, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan, Belanda dan sebagainya. Kemudian untuk pesaing di dalam Indonesia pada sub sektor perkebunan didominasi oleh Provinsi-Provinsi

di wilayah Sumatera dan Kalimantan, seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan sebagainya.

Apabila dilihat secara lebih rinci terhadap beberapa komoditas yang unggul di kawasan agropolitan, dapat diketahui bahwa untuk komoditas kelapa sawit terdapat peluang ekspor ke luar kawasan hingga mencapai negara India, China, Belanda, Pakistan, dan Malaysia. Namun, apabila ingin dikembangkan harus bersaing dengan Provinsi Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sedangkan untuk komoditas kelapa, dapat diketahui bahwa peluang ekspornya mencapai China, Malaysia, Korea Selatan, Belanda, dan Amerika Serikat. Namun jika ingin dikembangkan akan memiliki pesaing dalam negeri, yaitu Riau, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara. Kemudian untuk komoditas karet berpeluang untuk diekspor hingga negara Amerika Serikat, Jepang, China, India, dan Korea Selatan. Namun apabila ingin dikembangkan, akan memiliki pesaing utama di dalam negeri seperti Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat. Secara lebih lengkap, dapat dilihat peluang pasar ekspor komoditas perkebunan pada tabel berikut.

Tabel IV.80 Peluang Pasar Ekspor Perkebunan

No	Komoditas	Nasional	Internasional	Pesaing Terbesar
1	Kelapa Sawit	V	India China Belanda Pakistan Malaysia	Riau Sumatera Utara Sumatera Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat
2	Karet	V	Amerika Serikat Jepang China India Korea Selatan	Aceh Sumatera Utara Jambi Sumatera Selatan Jawa Barat
3	Lada	V	Amerika Serikat Singapura India Vietnam Belanda	Lampung Bangka Belitung Sumatera Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara
4	Kelapa	V	China Malaysia Korea Selatan Belanda Amerika Serikat	Riau Maluku NTT Sulawesi Utara
5	Kopi	V	Amerika Serikat Jerman Italia Jepang Malaysia	Sumatera Selatan Lampung Aceh Sumatera Utara Jambi
6	Kakao	V	Malaysia Amerika Serikat Jerman China Belanda	Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sumatera Utara Kalimantan Timur

Sumber: Hasil Studi Literatur, 2017

Komoditas Unggulan Perkebunan di Kawasan Agropolitan

Berdasarkan analisis sebelumnya dengan melihat kontribusi produksi komoditas sub sektor perkebunan di tingkat Kabupaten Kapuas Hulu, konsentrasi komoditas, kompetisi dengan kecamatan-kecamatan di non kawasan agropolitan, serta peluang pasar, maka dapat dihasilkan komoditas-komoditas unggulan sub sektor perkebunan di kawasan agropolitan. Dapat disimpulkan bahwa komoditas kelapa sawit merupakan komoditas yang sangat unggul di kawasan agropolitan, yang berarti bahwa dapat dikembangkan tanpa harus bersaing dengan wilayah non kawasan agropolitan, sehingga peluang untuk dipasarkan akan semakin besar. Kemudian komoditas karet dan kelapa merupakan komoditas yang unggul di kawasan agropolitan, yang berarti bahwa dapat dikembangkan namun masih harus bersaing dengan wilayah non kawasan agropolitan. Peluang untuk dipasarkan cukup besar, khususnya pada tingkat Kabupaten Kapuas Hulu. Ketiga komoditas tersebut memiliki potensi besar dan memiliki prospek yang baik apabila akan dikembangkan dalam rencana KSK Agropolitan. Sintesa dari analisis komoditas unggulan perkebunan di kawasan agropolitan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.81 Komoditas Unggulan Perkebunan di Kawasan Agropolitan

No	Komoditas	Kontribusi di Kabupaten Kapuas Hulu	Kompetisi dengan Non Kawasan	Peluang Pasar	Kesimpulan
1	Sawit	Dominan	Unggul	Ada	Sangat Unggul
2	Lada	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Ada	Tidak Unggul
3	Kopi	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Ada	Tidak Unggul
4	Kakao	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Ada	Tidak Unggul
5	Kelapa	Tidak Dominan	Unggul	Ada	Unggul
6	Karet	Hampir Dominan	Unggul	Ada	Unggul
7	Aren	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Tidak Ada	Sangat Tidak Unggul

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Keterangan:

- Sangat Unggul** : sama sekali tidak perlu bersaing dengan non kawasan,
- Unggul** : perlu sedikit bersaing dengan non kawasan.
- Kurang Unggul** : perlu lebih banyak bersaing dengan non kawasan
- Tidak unggul** : perlu bersaing berat dengan non kawasan
- Sangat Tidak Unggul** : belum berdaya dan perlu menciptakan pasar

4.5.2.3 Analisis Komoditas Unggulan Sayur-Sayuran di Kawasan Agropolitan

1. Kontribusi Komoditas Sayur-Sayuran Kawasan Agropolitan

Sub sektor tanaman sayur-sayuran memiliki potensi cukup besar untuk meningkatkan perekonomian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Walaupun belum berkembang, tetapi sub sektor tanaman sayur-sayuran berpotensi untuk menjadi alternatif dari komoditas perkebunan dilihat dari potensi pasarnya. Pada sub sektor tanaman sayur-sayuran, apabila dilihat berdasarkan kontribusi setiap komoditas terhadap Kabupaten Kapuas Hulu, kacang panjang, cabai rawit, terung, mentimun, kangkung, dan bayam merupakan komoditas di kawasan agropolitan yang memiliki kontribusi yang besar di tingkat kabupaten. Komoditas-komoditas tersebut berkontribusi lebih dari 60% dari produksi kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian secara keunggulan daerah, kecamatan Silat Hilir memiliki kontribusi cukup besar

pada sub sektor perkebunan, dimana menyumbang lebih dari 90% produksi komoditas-komoditas tersebut dari wilayah agropolitan. Hal ini menunjukkan kecamatan Silat Hilir mendominasi kegiatan pertanian tanaman sayur-sayuran di wilayah KSK agropolitan, bahkan di tingkat kabupaten Kapuas Hulu. Secara detail kontribusi komoditas sayur-sayuran per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.82 Kontribusi Komoditas Sayur-Sayuran Menurut Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu

NO	KECAMATAN	KONTRIBUSI PRODUKSI KOMODITAS (%)										
		Bawang Daun	Petsai/Sawi	Kacang Panjang	Cabe Besar	Cabe Rawit	Tomat	Terung	Buncis	Ketimun	Kangkung	Bayam
1	Silat Hilir	0,00	0,00	62,15	0,00	59,75	0,00	79,96	0,00	60,25	69,27	56,04
2	Silat Hulu	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hulu Gurung	0,00	0,00	1,98	0,00	3,72	0,00	0,55	0,00	0,92	0,37	0,33
4	Pengkadan	0,00	0,00	0,53	1,80	0,68	12,10	0,29	0,00	0,37	0,46	0,60
5	Seberuang	0,00	8,41	0,64	0,00	3,78	0,00	0,76	0,00	0,40	0,00	2,13
6	Semitau	0,00	4,21	1,85	0,00	0,39	0,00	0,74	0,00	1,68	0,46	5,60
7	Empanang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	Kawasan Agropolitan	0,00	12,62	68,33	1,80	68,43	12,10	82,29	0,00	63,64	70,55	64,71
8	Bunut Hulu	0,00	0,00	2,12	15,57	3,61	0,00	6,18	13,79	5,39	1,87	2,67
9	Mentebah	0,00	0,00	0,68	30,54	6,71	0,00	0,41	0,00	0,11	0,00	0,00
10	Bika/Manday	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,12	0,13
11	Kalis	0,00	3,27	0,11	0,00	1,13	0,00	0,02	0,69	0,05	0,21	0,33
12	Putussibau	100,00	57,48	6,07	29,34	3,83	75,00	2,42	60,69	4,17	8,83	14,08
13	Embaloh Hilir	0,00	3,27	0,19	0,00	0,34	2,42	0,07	0,00	0,03	0,21	0,20
14	Bunut Hilir	0,00	10,28	0,76	4,19	0,85	6,45	0,79	1,38	1,09	2,07	1,93
15	Boyan Tanjung	0,00	0,00	4,25	0,00	8,00	0,00	5,55	0,00	5,45	5,31	0,00
16	Jongkong	0,00	0,00	0,62	0,00	0,56	0,00	0,40	0,00	0,77	0,91	1,53
17	Selimbau	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	1,31	0,00	0,00
18	Suhaid	0,00	0,00	7,86	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	12,93	0,00	0,00
19	Puring Kencana	0,00	1,87	0,32	0,00	0,90	0,00	0,12	0,00	0,05	0,08	0,27
20	Badau	0,00	0,00	0,40	0,00	0,34	4,03	0,05	0,00	0,08	0,37	0,67
21	Batang Lupar	0,00	11,21	1,49	18,56	2,42	0,00	0,86	23,45	0,99	1,16	1,87
22	Embaloh Hulu	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,32	0,21	0,33
23	Putussibau Utara	0,00	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	3,49	8,09	11,27
	Non-Kawasan	100,00	87,38	31,67	98,20	31,57	87,90	17,71	100,00	36,36	29,45	35,29

Sumber: Hasil Analisis, 2017

2. Konsentrasi Komoditas Sayur-Sayuran pada lingkup Kabupaten Kapuas Hulu

Secara umum, kecamatan yang memiliki komoditas unggulan terbanyak pada sub sektor tanaman sayur-sayuran di kawasan agropolitan adalah bayam dengan 3 komoditas. Berdasarkan hasil perhitungan rasio dengan rata-rata produksi kabupaten Kapuas Hulu, dapat disimpulkan bahwa komoditas tanaman sayur-sayuran tidak memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi di kawasan KSK agropolitan dimana hanya sedikit kecamatan membudidayakan komoditas tersebut dengan hasil baik. Dari analisis tersebut juga dapat disimpulkan bahwa kecamatan silat hilir memiliki potensi untuk mengembangkan tanaman sayur-sayuran, dimana secara rasio produksi dibandingkan rata-rata kabupaten Kapuas Hulu sudah baik pada beberapa komoditas yaitu: kacang panjang, cabai rawit, terung, ketimun, kangkung, dan bayam. Secara umum, komoditas-komoditas tersebut juga selaras dengan komoditas unggulan pada lingkup Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini dapat menunjang pengembangan komoditas tanaman pangan dalam rencana kawasan agropolitan apabila dilihat dari sisi potensinya pada lingkup eksternal.

Tabel IV.83 Rasio Komoditas Sayur-Sayuran dengan Rata-Rata Kabupaten Kapuas Hulu

NO	KECAMATAN	TINGKAT KONSENTRASI KOMODITAS SAYUR-SAYURAN										
		Bawang Daun	Petsai/Sawi	Kacang Panjang	Cabe Besar	Cabe Rawit	Tomat	Terung	Buncis	Ketimun	Kangkung	Bayam
1	Silat Hilir	0,00	0,00	14,29	0,00	13,74	0,00	18,39	0,00	13,86	15,93	12,89
2	Silat Hulu	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hulu Gurung	0,00	0,00	0,45	0,00	0,86	0,00	0,13	0,00	0,21	0,09	0,08
4	Pengkadan	0,00	0,00	0,12	0,41	0,16	2,78	0,07	0,00	0,08	0,10	0,14
5	Seberuang	0,00	1,93	0,15	0,00	0,87	0,00	0,17	0,00	0,09	0,00	0,49
6	Semtau	0,00	0,97	0,43	0,00	0,09	0,00	0,17	0,00	0,39	0,10	1,29
7	Empanang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kawasan Agropolitan		0,00	2,90	15,72	0,41	15,74	2,78	18,93	0,00	14,64	16,23	14,88
8	Bunut Hulu	0,00	0,00	0,49	3,58	0,83	0,00	1,42	3,17	1,24	0,43	0,61
9	Mentebah	0,00	0,00	0,16	7,02	1,54	0,00	0,09	0,00	0,02	0,00	0,00
10	Bika/Manday	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03
11	Kalis	0,00	0,75	0,02	0,00	0,26	0,00	0,00	0,16	0,01	0,05	0,08
12	Putussibau Selatan	23,00	13,22	1,40	6,75	0,88	17,25	0,56	13,96	0,96	2,03	3,24
13	Embaloh Hilir	0,00	0,75	0,04	0,00	0,08	0,56	0,02	0,00	0,01	0,05	0,05
14	Bunut Hilir	0,00	2,36	0,18	0,96	0,19	1,48	0,18	0,32	0,25	0,48	0,44
15	Boyan Tanjung	0,00	0,00	0,98	0,00	1,84	0,00	1,28	0,00	1,25	1,22	0,00
16	Jongkong	0,00	0,00	0,14	0,00	0,13	0,00	0,09	0,00	0,18	0,21	0,35
17	Selimbau	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,30	0,00	0,00
18	Suhaid	0,00	0,00	1,81	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00
19	Puring Kencana	0,00	0,43	0,07	0,00	0,21	0,00	0,03	0,00	0,01	0,02	0,06
20	Badau	0,00	0,00	0,09	0,00	0,08	0,93	0,01	0,00	0,02	0,09	0,15
21	Batang Lupar	0,00	2,58	0,34	4,27	0,56	0,00	0,20	5,39	0,23	0,27	0,43
22	Embaloh Hulu	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,07	0,05	0,08
23	Putussibau Utara	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,80	1,86	2,59
Non-Kawasan		23,00	20,10	7,28	22,59	7,26	20,22	4,07	23,00	8,36	6,77	8,12

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Kemudian apabila dibandingkan antara konsentrasi produksi komoditas sayur-sayuran di dalam kawasan agropolitan dengan kecamatan-kecamatan di luar kawasan agropolitan, dapat diketahui persaingan yang terjadi pada wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Pada sub sektor sayur-sayuran, dapat disimpulkan tidak terdapat komoditas yang sangat unggul, dimana berarti bahwa seluruh komoditas yang dibudidayakan memiliki pesaing di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian terdapat komoditas perkebunan yang unggul yaitu kacang panjang, cabai rawit, terong, ketimun, kangkung, dan bayam. Hal ini berarti bahwa komoditas-komoditas tersebut memiliki pesaing di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Komoditas tersebut memiliki keunggulan di tingkat Kabupaten, namun masih memiliki pesaing di luar kawasan agropolitan. Sehingga pada pengembangan KSK Agropolitan, dapat disimpulkan bahwa komoditas tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan produksinya dan dipasarkan ke luar kawasan. Perbandingan konsentrasi komoditas sayur-sayuran antara kawasan agropolitan dengan non kawasan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.84 Konsentrasi Komoditas Sayur-Sayuran di Kawasan Agropolitan relatif terhadap Non Kawasan Agropolitan

No	Komoditas	Kawasan	Non Kawasan	Kesimpulan
		Kecamatan Konsentrasi	Kecamatan Konsentrasi	
1	Petsai/Sawi	Seberuang	Putussibau Selatan Batang Lupar Bunut Hilir	Tidak Unggul
2	Kacang Panjang	Silat Hilir	Suhaid Putussibau Selatan Putussibau Utara	Unggul
3	Cabai Besar		Mentebah Putussibau Selatan	Tidak Unggul

			Batang Lupar Bunut Hulu	
4	Cabai Rawit	Silat Hilir Siberuang Hulu Gurung	Boyan Tanjung Mentebah Putussibau Selatan	Unggul
5	Tomat	Pengkadan	Putussibau Selatan Bunut Hilir	Tidak Unggul
6	Terong	Silat Hilir	Bunut Hulu Boyan Tanjung	Unggul
7	Ketimun	Silat Hilir	Suhaid Boyan Tanjung Bunut Hulu	Unggul
8	Kangkung	Silat Hilir	Putussibau Selatan Putussibau Utara Boyan Tanjung	Unggul
9	Bayam	Silat Hilir Semitau	Putussibau Selatan Putussibau Utara	Unggul

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Keterangan:

Sangat Unggul : tidak ada persaingan dengan non kawasan

Unggul : ada sedikit persaingan dengan non kawasan

Kurang Unggul: ada cukup besar persaingan dengan non kawasan

Tidak Unggul : menghadapi persaingan berat dengan non kawasan

3. Peluang Pasar Komoditas Sayur-Sayuran

Apabila dilihat dari sisi peluang pasar, beberapa komoditas sayur-sayuran yang memiliki pasar di tingkat nasional dan internasional yaitu kol/kubis, cabai, tomat, bawang merah, tomat, bawang merah, kangkung, dan bayam. Komoditas-komoditas tersebut memiliki permintaan yang tinggi dan berpotensi untuk dikembangkan di KSK agropolitan. Negara tujuan ekspor sayur-sayuran Indonesia pada dasarnya cukup beragam, namun secara umum terdapat di negara Malaysia, Singapura, India, Amerika Serikat dan sebagainya. Kemudian untuk pesaing di dalam Indonesia pada sub sektor sayur-sayuran didominasi oleh Provinsi-Provinsi di wilayah Jawa dan Sumatera, seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lainnya.

Apabila dilihat secara lebih rinci terhadap beberapa komoditas yang unggul di kawasan agropolitan, dapat diketahui bahwa untuk komoditas cabai terdapat peluang ekspor ke luar kawasan hingga mencapai negara Saudi Arabia, India, Singapura, dan Malaysia. Namun, apabila ingin dikembangkan harus bersaing dengan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Sedangkan untuk komoditas kangkung, dapat diketahui bahwa peluang ekspornya mencapai Singapura, China, dan Brunei Darussalam. Namun jika ingin dikembangkan akan memiliki pesaing dalam negeri, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Kemudian untuk komoditas bayam berpotensi untuk diekspor hingga negara Singapura. Namun apabila ingin dikembangkan, akan memiliki pesaing utama di dalam negeri seperti Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara. Secara lebih lengkap, dapat dilihat peluang pasar ekspor komoditas sayur-sayuran pada tabel berikut.

Tabel IV.85 Peluang Pasar Ekspor Sayur-Sayuran

No	Komoditas	Nasional	Internasional	Pesaing Terbesar
1	Kol/Kubis	V	Taiwan Singapura Malaysia	Jawa Tengah Jawa Barat Jawa Timur Sumatera Utara
2	Cabai	V	Saudi Arabia India Singapura Malaysia	Jawa Barat Jawa Tengah Sumatera Utara Jawa Timur
3	Tomat	V	Singapura Amerika Serikat	Jawa Barat Sumatera Utara Sumatera Barat Jawa Timur Jawa Tengah
4	Bawang Merah	V	Thailand	Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat NTB
5	Kentang	V	Singapura Malaysia	Jawa Tengah Jawa Barat Jawa Timur Jambi
6	Kangkung	V	Singapura China Brunei Darusalam	Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah Sumatera Utara Sulawesi Selatan
7	Bayam	V	Singapura	Jawa Barat Sumatera Utara

Sumber: Hasil Studi Literatur, 2017

4. Komoditas Unggulan Sayur-Sayuran di Kawasan Agropolitan

Berdasarkan analisis sebelumnya dengan melihat kontribusi produksi komoditas sub sektor hortikultura sayur-sayuran di tingkat Kabupaten Kapuas Hulu, konsentrasi komoditas, kompetisi dengan kecamatan-kecamatan di non kawasan agropolitan, serta peluang pasar, maka dapat dihasilkan komoditas-komoditas unggulan sayur-sayuran di kawasan agropolitan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa komoditas kacang tanah, cabai rawit, terong, ketimun, kangkung, dan bayam merupakan komoditas yang unggul di kawasan agropolitan, yang berarti bahwa dapat dikembangkan namun masih harus bersaing dengan wilayah non kawasan agropolitan. Peluang untuk mengembangkan komoditas-komoditas tersebut cukup besar dan beberapa diantaranya berpotensi untuk dipasarkan ke wilayah yang lebih luas, khususnya yaitu cabai rawit, kangkung, dan bayam yang memiliki pasar hingga tingkat nasional dan internasional. Kedua komoditas tersebut memiliki potensi besar dan memiliki prospek yang baik apabila nantinya akan dikembangkan dalam rencana KSK Agropolitan. Sintesa dari analisis komoditas unggulan pada sub sektor sayur-sayuran di kawasan agropolitan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.86 Komoditas Unggulan Sayur-Sayuran di Kawasan Agropolitan

No	Komoditas	Kontribusi di Kabupaten Kapuas Hulu	Kompetisi dengan Non Kawasan	Peluang Pasar	Kesimpulan
1	Petsai/Sawi	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Tidak ada	Sangat Tidak Unggul

No	Komoditas	Kontribusi di Kabupaten Kapuas Hulu	Kompetisi dengan Non Kawasan	Peluang Pasar	Kesimpulan
2	Kacang Panjang	Dominan	Unggul	Tidak Ada	Unggul Pasar Kabupaten
3	Cabai Besar	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Ada	Tidak Unggul
4	Cabai Rawit	Dominan	Unggul	Ada	Unggul Pasar Kabupaten
5	Tomat	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Ada	Tidak Unggul
6	Terong	Dominan	Unggul	Tidak Ada	Unggul Pasar Kabupaten
7	Ketimun	Dominan	Unggul	Tidak Ada	Unggul Pasar Kabupaten
8	Kangkung	Dominan	Unggul	Ada	Unggul Pasar Kabupaten
9	Bayam	Dominan	Unggul	Ada	Unggul Pasar Kabupaten

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Keterangan:

- Sangat Unggul** : sama sekali tidak perlu bersaing dengan non kawasan,
Unggul : perlu sedikit bersaing dengan non kawasan.
Kurang Unggul : perlu lebih banyak bersaing dengan non kawasan
Tidak unggul : perlu bersaing berat dengan non kawasan
Sangat Tidak Unggul : belum berdaya dan perlu menciptakan pasar

4.5.2.4 Analisis Komoditas Unggulan Buah-Buahan di Kawasan Agropolitan

1. Kontribusi Komoditas Buah-Buahan Kawasan Agropolitan

Sub sektor tanaman buah-buahan juga memiliki potensi cukup besar untuk menjadi alternatif komoditas dalam rangka diversifikasi komoditas unggulan di Kabupaten Kapuas Hulu. Sub sektor tanaman buah-buahan memiliki kontribusi yang besar dalam beberapa komoditasnya terhadap perekonomian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Apabila dilihat berdasarkan kontribusi setiap komoditas terhadap Kabupaten Kapuas Hulu, komoditas durian, jambu air, nangka, dan jengkol merupakan komoditas di kawasan agropolitan yang memiliki kontribusi yang besar di tingkat kabupaten, dimana lebih dari 50% tingkat kontribusinya. Pada kawasan agropolitan, durian berkontribusi sebesar 74,11% terhadap produksi di Kabupaten Kapuas Hulu dan kontribusi tersebut didominasi oleh kecamatan Semitau. Sedangkan jambu air dan nangka berkontribusi cukup tinggi, yaitu sekitar 50% dan jengkol berkontribusi sebesar 73,08% yang didominasi oleh kecamatan Silat Hulu dan Semitau, masing-masing 30%. Kemudian secara keunggulan daerah, kecamatan Semitau memiliki kontribusi cukup besar pada sub sektor tanaman buah-buahan, dimana menyumbang lebih dari 30% pada beberapa komoditas, contohnya seperti durian, jambu air, sirsak, dan jengkol. Kemudian kecamatan Silat Hilir juga merupakan kecamatan yang memiliki prestasi pada sub sektor tanaman buah-buahan, khususnya pada komoditas nangka dan nanas, dengan kontribusi lebih dari 20%. Kemudian kecamatan Silat Hulu memiliki prestasi yang baik pada komoditas jengkol, dengan kontribusi mencapai 30% terhadap kabupaten Kapuas Hulu. Secara detail kontribusi komoditas buah-buahan per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah.

2. Konsentrasi Komoditas Buah-Buahan pada lingkup Kabupaten Kapuas Hulu

Secara umum, kecamatan Semitau merupakan kecamatan yang memiliki prestasi pada komoditas tanaman buah-buahan, kemudian disusul oleh kecamatan Pengkadan. Berdasarkan hasil perhitungan rasio terhadap rata-rata produksi kabupaten Kapuas Hulu, dapat disimpulkan bahwa komoditas tanaman buah-buahan yang memiliki tingkat konsentrasi tinggi di kawasan KSK agropolitan adalah belimbing, jambu biji, jambu air, jeruk besar, nangka, nanas, pepaya, pisang, sirsak, dan sukun dimana terdapat empat atau lebih kecamatan yang sudah membudidayakan komoditas tersebut. Dari analisis rasio tersebut juga dapat disimpulkan bahwa pada komoditas tanaman buah-buahan, kecamatan-kecamatan di KSK agropolitan memiliki potensi cukup besar, khususnya pada durian dan jengkol, karena memiliki rasio mencapai lebih dari 16 kali rata-rata produksi kabupaten Kapuas Hulu. Secara umum, komoditas-komoditas tersebut juga selaras dengan komoditas unggulan pada lingkup Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini dapat menunjang pengembangan komoditas tanaman buah-buahan dalam rencana kawasan agropolitan apabila dilihat dari potensinya secara eksternal. Secara detail, tingkat konsentrasi komoditas dan rasionya terhadap rata-rata kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU

Tabel IV.87 Kontribusi Komoditas Tanaman Buah-Buahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu

NO	KECAMATAN	KONTRIBUSI PRODUKSI KOMODITAS BUAH-BUAHAN (%)																				
		Belimbing	Duku/Langsar	Durian	Jambu Biji	Jambu Air	Jeruk Siam	Jeruk Besar	Mangga	Manggis	Nangka	Nanas	Pepaya	Pisang	Rambutan	Salak	Sawo	Sirsak	Sukun	Melinjo	Petai	Jengkol
1	Silat Hilir	0,00	0,00	0,00	8,49	0,23	0,14	0,00	0,00	0,00	23,12	29,09	0,75	5,29	0,00	0,00	1,10	0,78	0,36	0,00	0,00	0,00
2	Silat Hulu	1,20	1,13	2,64	0,99	2,33	0,00	1,03	0,30	1,30	1,47	0,47	0,28	0,22	3,97	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	7,76	30,77
3	Hulu Gurung	0,00	0,00	0,02	0,57	0,93	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,56	1,83	0,00	12,79	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00
4	Pengkadan	2,40	0,91	0,00	1,13	0,93	2,17	1,54	3,99	0,43	9,08	1,51	2,15	3,02	11,30	4,65	5,49	1,56	1,46	23,33	4,74	3,85
5	Seberuang	0,30	0,00	0,00	1,56	3,50	0,00	0,00	0,00	0,43	1,64	1,72	3,26	0,14	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Semitau	26,13	21,09	71,45	29,99	42,66	0,00	26,41	17,87	0,00	16,19	9,91	21,55	1,75	29,29	0,00	14,29	35,80	15,69	0,00	7,76	38,46
7	Empanang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kawasan Agropolitan		30,03	23,13	74,11	42,72	50,58	8,82	28,97	22,16	2,16	51,49	42,89	28,54	12,25	44,56	17,44	20,88	47,86	17,88	23,33	20,26	73,08
8	Bunut Hulu	2,40	47,39	0,86	6,65	14,45	11,56	7,95	14,65	77,92	4,74	28,19	41,79	1,35	15,69	0,00	4,40	16,73	3,65	0,00	8,62	13,46
9	Mentebah	12,31	0,00	1,74	11,17	3,73	4,19	8,72	1,49	0,00	6,32	1,08	1,96	1,05	0,42	32,56	0,00	3,50	5,11	0,00	63,36	0,00
10	Bika/Manday	0,00	0,00	8,79	0,57	0,93	0,00	0,00	11,91	0,00	0,06	0,26	0,37	0,06	0,42	0,00	0,00	1,56	1,46	0,00	0,00	0,00
11	Kalis	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,26	1,21	52,59	0,00	0,00	0,00	0,78	0,36	0,00	0,00	0,00
12	Putussibau	36,64	0,00	0,00	20,23	4,66	42,20	22,56	3,22	0,00	18,16	20,34	15,67	22,89	0,00	29,07	39,56	16,73	59,49	71,67	0,00	0,00
13	Embaloh Hilir	3,00	1,13	0,05	4,67	2,56	3,32	5,13	16,80	0,87	1,41	0,17	1,40	1,59	1,05	2,33	0,00	1,56	0,36	0,00	0,00	0,00
14	Bunut Hilir	0,00	0,00	0,00	1,27	8,16	6,50	15,38	17,87	0,00	2,82	1,72	0,28	1,14	0,00	0,00	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Boyan Tanjung	1,20	8,84	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,85	0,56	0,65	0,20	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	2,88
16	Jongkong	0,30	0,00	1,05	0,42	1,17	1,01	1,28	0,60	0,00	0,00	0,39	0,65	0,28	1,88	0,00	0,00	1,17	3,28	0,00	0,00	0,00
17	Selimbau	0,90	1,13	0,42	0,99	0,93	0,29	0,51	0,89	0,43	4,57	0,69	0,56	1,55	2,93	0,00	0,00	1,56	0,00	5,00	0,86	0,96
18	Suhaid	1,50	0,00	0,11	1,13	0,93	0,00	1,03	2,80	0,43	2,31	0,34	0,93	0,96	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	1,92
19	Puring Kencana	1,20	2,72	0,84	0,57	0,93	0,00	0,00	0,95	1,73	1,02	0,34	0,75	0,46	1,67	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	3,85
20	Badau	1,20	0,00	0,16	1,84	0,93	0,29	0,00	0,60	0,00	0,79	0,26	1,49	0,86	1,26	2,33	0,00	0,78	0,36	0,00	0,00	0,00
21	Batang Lupar	0,90	10,66	4,39	1,98	0,93	0,58	1,03	0,12	0,43	0,28	0,26	0,37	1,71	1,67	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Embaloh Hulu	4,20	2,04	3,06	2,40	1,17	2,46	3,08	2,44	0,87	3,38	0,34	2,33	0,41	3,97	4,65	0,00	1,95	2,92	0,00	3,45	0,00
23	Putussibau Utara	4,20	2,95	2,74	3,39	7,93	18,79	4,36	1,37	15,15	1,80	1,90	1,03	0,64	15,48	10,47	0,00	4,28	5,11	0,00	2,16	3,85
Non-Kawasan		69,97	76,87	25,89	57,28	49,42	91,18	71,03	77,84	97,84	48,51	57,11	71,46	87,75	55,44	82,56	79,12	52,14	82,12	76,67	79,74	26,92

Sumber: Hasil Analisis, 2017

FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU

Tabel IV.88 Rasio Komoditas Tanaman Buah-Buahan dengan Rata-Rata Kabupaten Kapuas Hulu

NO	KECAMATAN	TINGKAT KONSENTRASI KOMODITAS BUAH-BUAHAN																					
		Belimbing	Duku/Langsar	Durian	Jambu Biji	Jambu Air	Jeruk Siam	Jeruk Besar	Mangga	Manggis	Nangka	Nanas	Pepaya	Pisang	Rambutan	Salak	Sawo	Sirsak	Sukun	Melinjo	Petai	Jengkol	
1	Silat Hilir	0,00	0,00	0,00	1,95	0,05	0,03	0,00	0,00	0,00	5,32	6,69	0,17	1,22	0,00	0,00	0,25	0,18	0,08	0,00	0,00	0,00	
2	Silat Hulu	0,28	0,26	0,61	0,23	0,54	0,00	0,24	0,07	0,30	0,34	0,11	0,06	0,05	0,91	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	1,78	7,08	
3	Hulu Gurung	0,00	0,00	0,00	0,13	0,21	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,13	0,42	0,00	2,94	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	
4	Pengkadan	0,55	0,21	0,00	0,26	0,21	0,50	0,35	0,92	0,10	2,09	0,35	0,49	0,69	2,60	1,07	1,26	0,36	0,34	5,37	1,09	0,88	
5	Seberuang	0,07	0,00	0,00	0,36	0,80	0,00	0,00	0,00	0,10	0,38	0,40	0,75	0,03	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Semitau	6,01	4,85	16,43	6,90	9,81	0,00	6,07	4,11	0,00	3,72	2,28	4,96	0,40	6,74	0,00	3,29	8,23	3,61	0,00	1,78	8,85	
7	Empanang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kawasan Agropolitan	6,91	5,32	17,04	9,82	11,63	2,03	6,66	5,10	0,50	11,84	9,86	6,57	2,82	10,25	4,01	4,80	11,01	4,11	5,37	4,66	16,81	
8	Bunut Hulu	0,55	10,90	0,20	1,53	3,32	2,66	1,83	3,37	17,92	1,09	6,48	9,61	0,31	3,61	0,00	1,01	3,85	0,84	0,00	1,98	3,10	
9	Mentebah	2,83	0,00	0,40	2,57	0,86	0,96	2,01	0,34	0,00	1,45	0,25	0,45	0,24	0,10	7,49	0,00	0,81	1,18	0,00	14,57	0,00	
10	Bika/Manday	0,00	0,00	2,02	0,13	0,21	0,00	0,00	2,74	0,00	0,01	0,06	0,09	0,01	0,10	0,00	0,00	0,36	0,34	0,00	0,00	0,00	
11	Kalis	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,06	0,28	12,10	0,00	0,00	0,00	0,18	0,08	0,00	0,00	0,00	
12	Putussibau Selatan	8,43	0,00	0,00	4,65	1,07	9,71	5,19	0,74	0,00	4,18	4,68	3,60	5,26	0,00	6,69	9,10	3,85	13,68	16,48	0,00	0,00	
13	Embaloh Hilir	0,69	0,26	0,01	1,07	0,59	0,76	1,18	3,86	0,20	0,32	0,04	0,32	0,37	0,24	0,53	0,00	0,36	0,08	0,00	0,00	0,00	
14	Bunut Hilir	0,00	0,00	0,00	0,29	1,88	1,50	3,54	4,11	0,00	0,65	0,40	0,06	0,26	0,00	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Boyan Tanjung	0,28	2,03	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,19	0,13	0,15	0,05	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,66	
16	Jongkong	0,07	0,00	0,24	0,10	0,27	0,23	0,29	0,14	0,00	0,00	0,09	0,15	0,06	0,43	0,00	0,00	0,27	0,76	0,00	0,00	0,00	
17	Selimbau	0,21	0,26	0,10	0,23	0,21	0,07	0,12	0,21	0,10	1,05	0,16	0,13	0,36	0,67	0,00	0,00	0,36	0,00	1,15	0,20	0,22	
18	Suhaid	0,35	0,00	0,02	0,26	0,21	0,00	0,24	0,64	0,10	0,53	0,08	0,21	0,22	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,44	
19	Puring Kencana	0,28	0,63	0,19	0,13	0,21	0,00	0,00	0,22	0,40	0,23	0,08	0,17	0,11	0,38	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,88	
20	Badau	0,28	0,00	0,04	0,42	0,21	0,07	0,00	0,14	0,00	0,18	0,06	0,34	0,20	0,29	0,53	0,00	0,18	0,08	0,00	0,00	0,00	
21	Batang Lupar	0,21	2,45	1,01	0,46	0,21	0,13	0,24	0,03	0,10	0,06	0,06	0,09	0,39	0,38	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Embaloh Hulu	0,97	0,47	0,70	0,55	0,27	0,57	0,71	0,56	0,20	0,78	0,08	0,54	0,09	0,91	1,07	0,00	0,45	0,67	0,00	0,79	0,00	
23	Putussibau Utara	0,97	0,68	0,63	0,78	1,82	4,32	1,00	0,32	3,48	0,42	0,44	0,24	0,15	3,56	2,41	0,00	0,98	1,18	0,00	0,50	0,88	
	Non-Kawasan	16,09	17,68	5,96	13,18	11,37	20,97	16,34	17,90	22,50	11,16	13,14	16,43	20,18	12,75	18,99	18,20	11,99	18,89	17,63	18,34	6,19	

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Kemudian apabila dibandingkan antara konsentrasi produksi komoditas buah-buahan di dalam kawasan agropolitan dengan kecamatan-kecamatan di luar kawasan agropolitan, dapat diketahui persaingan yang terjadi pada wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Pada sub sektor buah-buahan, dapat disimpulkan tidak terdapat komoditas yang sangat unggul, dimana berarti bahwa seluruh komoditas yang dibudidayakan memiliki pesaing di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian terdapat komoditas perkebunan yang unggul yaitu durian, jambu biji, jambu air, rambutan, sirsak, dan jengkol. Hal ini berarti bahwa komoditas-komoditas tersebut memiliki pesaing di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Komoditas-komoditas tersebut memiliki keunggulan di tingkat Kabupaten, namun masih memiliki pesaing di luar kawasan agropolitan. Sehingga pada pengembangan KSK Agropolitan, dapat disimpulkan bahwa komoditas tersebut cukup memiliki potensi untuk dikembangkan produksinya dan dipasarkan ke luar kawasan. Perbandingan konsentrasi komoditas buah-buahan antara kawasan agropolitan dengan non kawasan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.89 Konsentrasi Komoditas Buah-Buahan di Kawasan Agropolitan relatif terhadap Non Kawasan Agropolitan

No	Komoditas	Kawasan	Non Kawasan	Kesimpulan
		Kecamatan Konsentrasi	Kecamatan Konsentrasi	
1	Belimbing	Semtau	Putussibau Selatan Mantebah	Kurang Unggul
2	Dukuh	Semtau	Bunut Hulu Batang Lupar Boyan Tanjung	Tidak Unggul
3	Durian	Semtau	Bika/Manday Batang Lupar	Unggul
4	Jambu Biji	Semtau	Putussibau Selatan Mentebah	Unggul
5	Jambu Air	Semtau	Bunut Hulu Bunut Hilir Putussibau Utara Putussibau Selatan	Unggu
6	Jeruk Siam	Hulu Gurung	Putussibau Selatan Putussibau Utara Bunut Hulu Bunut Hilir	Tidak Unggul
7	Jeruk Besar	Semtau	Putussibau Selatan Bunut Hilir Mentebah Bunut Hulu Embaloh	Kurang Unggul
8	Mangga	Semtau	Bunut Hilir Bunut Hulu Emboh Hilir Bika/Manday	Kurang Unggul
9	Manggis		Bunut Hulu Putussibau Utara	Tidak Unggul
10	Nangka	Silat Hilir Semtau Pengkadan	Putussibau Selatan Mentebau Burut Hulu Selimbau	Kurang Unggul
11	Nanas	Silat Hilir Semtau	Bunut Hulu Putussibau Selatan	Kurang Unggul
12	Pepaya	Semtau	Bunut Hulu Putussibau Selatan	Tidak Unggul
13	Pisang	Semtau	Kalis Putussibau Selatan	Tidak Unggul
14	Rambutan	Semtau	Bunut Hulu	Unggul

FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STARTEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU

		Pengkadan	Putussibau Selatan	
15	Salak	Hulu Gurung Pengkadan	Mentebah Putussibau Selatan Putussibau Utara Emboloh Hulu	Tidak Unggul
16	Sawo	Semita Pengkadan	Putussibau Selatan Bunut Hilir	Tidak Unggul
17	Sirsak	Semita Seberuang	Bunut Hulu Putussibau Selatan	Unggul
18	Sukun	Semita	Putussibau Selatan Mentebahh Putussibau Utara	Tidak Unggul
19	Melinjo	Pengkadan	Putussibau Selatan Selimbau	Tidak Unggul
20	Petai	Silat Hulu Semita Pengkadan	Mentebah Bunut Hulu	Tidak Unggul
21	Jengkol	Semita Silat Hulu	Bunut Hulu	Unggul

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Keterangan:

Sangat Unggul : tidak ada persaingan dengan non kawasan

Unggul : ada sedikit persaingan dengan non kawasan

Kurang Unggul: ada cukup besar persaingan dengan non kawasan

Tidak Unggul : menghadapi persaingan berat dengan non kawasan

3. Peluang Pasar Komoditas Buah-Buahan

Apabila dilihat dari sisi peluang pasar, beberapa komoditas buah-buahan yang memiliki pasar di tingkat nasional dan internasional yaitu manggis, salak, mangga, nanas, pisang, jambu biji, rambutan, jeruk, durian, dan pepaya. Komoditas-komoditas tersebut memiliki permintaan yang tinggi dan berpotensi untuk dikembangkan di KSK agropolitan. Negara tujuan ekspor buah-buahan Indonesia pada dasarnya cukup beragam, namun secara umum terdapat di wilayah Asia, seperti negara Malaysia, Singapura, Uni Emirat Arab dan sebagainya. Kemudian untuk pesaing di dalam Indonesia pada sub sektor buah-buahan didominasi oleh Provinsi-Provinsi di wilayah Jawa dan Sumatera, seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lainnya.

Apabila dilihat secara lebih rinci terhadap beberapa komoditas yang unggul di kawasan agropolitan, dapat diketahui bahwa untuk komoditas durian terdapat peluang ekspor ke luar kawasan hingga mencapai negara China, Vietnam, dan SIngapura. Namun, apabila ingin dikembangkan harus bersaing dengan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sedangkan untuk komoditas jambu biji, dapat diketahui bahwa peluang ekspornya mencapai Singapura dan Uni Emirat Arab. Namun jika ingin dikembangkan akan memiliki pesaing dalam negeri, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Kemudian untuk komoditas rambutan berpotensi untuk diekspor hingga negara Uni Emirat Arab, Jepang, dan Singapura. Namun apabila ingin dikembangkan, akan memiliki pesaing utama di dalam negeri seperti Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Secara lebih lengkap, dapat dilihat peluang pasar ekspor komoditas buah-buahan pada tabel berikut.

Tabel IV.90 Peluang Pasar Ekspor Buah-Buahan

No	Komoditas	Nasional	Internasional	Pesaing Terbesar
1	Manggis	V	Malaysia Thailand Hongkong	Jawa Barat Jawa Timur Sumatera Barat Sumatera Utara Banten
2	Salak	V	China Malaysia Singapura	Jawa Tengah Sumatera Utara D.I Yogyakarta Bali
3	Mangga	V	Singapura Uni Emirat Arab Malaysia	Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Sulawesi Selatan NTB
4	Nanas	V	Amerika Serikat Belanda Spanyol	Lampung Sumatera Utara Jambi Jawa Barat Jawa Timur
5	Pisang	V	China Saudi Arabia Malaysia	Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Lampung
6	Jambu Biji	V	Singapura Uni Emirat Arab	Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Sumatera Utara Sulawesi Selatan
7	Rambutan	V	Uni Emirat Arab Jepang Singapura	Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Sulawesi Selatan
8	Jeruk	V	Malaysia Brunei Darusalam Timur Tengah	Jawa Timur Sumatera Utara Kalimantan Barat Kalimantan Selatan
9	Durian	V	China Vietnam Singapura	Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat Sumatera Utara Sumatera Barat
10	Pepaya	V	Singapura Hongkong Uni Emirat Arab	Jawa Timur Jawa Tengah Lampung

Sumber: Hasil Studi Literatur, 2017

4. Komoditas Unggulan Buah-Buahan di Kawasan Agropolitan

Berdasarkan analisis sebelumnya dengan melihat kontribusi produksi komoditas sub sektor hortikultura buah-buahan di tingkat Kabupaten Kapuas Hulu, konsentrasi komoditas, kompetisi dengan kecamatan-kecamatan di non kawasan agropolitan, serta peluang pasar, maka dapat dihasilkan komoditas-komoditas unggulan buah-buahan di kawasan agropolitan. Dapat disimpulkan bahwa komoditas durian merupakan komoditas yang sangat unggul di kawasan agropolitan, yang berarti bahwa dapat dikembangkan tanpa harus bersaing dengan wilayah non kawasan agropolitan, sehingga peluang untuk dipasarkan akan semakin besar. Kemudian komoditas jambu biji, jambu air, nangka,

rambutan, dan sirsak merupakan komoditas yang unggul di kawasan agropolitan, yang berarti bahwa dapat dikembangkan namun masih harus bersaing dengan wilayah non kawasan agropolitan. Peluang untuk mengembangkan komoditas-komoditas tersebut cukup besar dan beberapa diantaranya berpeluang untuk dipasarkan ke wilayah yang lebih luas, khususnya yaitu jambu air dan rambutan yang memiliki pasar hingga tingkat nasional dan internasional. Kedua komoditas tersebut memiliki potensi besar dan memiliki prospek yang baik apabila nantinya akan dikembangkan dalam rencana KSK Agropolitan. Sintesa dari analisis komoditas unggulan pada sub sektor buah-buahan di kawasan agropolitan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.91 Komoditas Unggulan Buah-Buahan di Kawasan Agropolitan

No	Komoditas	Kontribusi di Kabupaten Kapuas Hulu	Kompetisi dengan Non Kawasan	Peluang Pasar	Kesimpulan
1	Belimbing	Tidak Dominan	Kurang Unggul	Tidak ada	Sangat Tidak Unggul
2	Dukuh	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Tidak ada	Sangat Tidak Unggul
3	Durian	Dominan	Unggul	Ada	Sangat Unggul
4	Jambu Biji	Hampir dominan	Unggul	Ada	Unggul Pasar Kabupaten
5	Jambu Air	Dominan	Unggul	Tidak ada	Unggul Pasar Kabupaten
6	Jeruk Siam	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Ada	Tidak Unggul
7	Jeruk Besar	Tidak Dominan	Kurang Unggul	Ada	Tidak Unggul
8	Mangga	Tidak Dominan	Kurang Unggul	Ada	Tidak Unggul
9	Manggis	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Ada	Tidak Unggul
10	Nangka	Dominan	Kurang Unggul	Tidak ada	Unggul Pasar Kabupaten
11	Nanas	Hampir dominan	Kurang Unggul	Ada	Tidak Unggul
12	Pepaya	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Ada	Tidak Unggul
13	Pisang	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Ada	Tidak Unggul
14	Rambutan	Hampir dominan	Unggul	Ada	Unggul Pasar Kabupaten
15	Salak	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Ada	Tidak Unggul
16	Sawo	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Tidak ada	Sangat Tidak Unggul
17	Sirsak	Hampir dominan	Unggul	Ada	Unggul Pasar Kabupaten
18	Sukun	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Tidak ada	Sangat Tidak Unggul
19	Melinjo	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Tidak ada	Sangat Tidak Unggul
20	Petai	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Tidak ada	Sangat Tidak Unggul
21	Jengkol	Dominan	Unggul	Tidak ada	Unggul Pasar Kabupaten

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Keterangan:

- Sangat Unggul** : samasekali tidak perlu bersaing dengan non kawasan,
- Unggul** : perlu sedikit bersaing dengan non kawasan.
- Kurang Unggul** : perlu lebih banyak bersaing dengan non kawasan
- Tidak unggul** : perlu bersaing berat dengan non kawasan
- Sangat Tidak Unggul** : belum berdaya dan perlu menciptakan pasar

4.5.2.5 Analisis Komoditas Unggulan Peternakan di Kawasan Agropolitan

1. Kontribusi Komoditas Peternakan Kawasan Agropolitan

Sub sektor peternakan memiliki potensi cukup besar untuk menjadi alternatif komoditas dalam rangka diversifikasi komoditas unggulan di Kabupaten Kapuas Hulu. Walaupun secara prestasi belum baik, namun apabila dilihat berdasarkan kontribusi setiap komoditas terhadap Kabupaten Kapuas Hulu, komoditas ayam buras, babi, dan itik manila merupakan komoditas di kawasan agropolitan yang memiliki kontribusi cukup besar di tingkat kabupaten, dimana lebih dari 15% tingkat kontribusinya. Pada kawasan agropolitan, ayam buras berkontribusi sebesar 17,52% terhadap produksi di Kabupaten Kapuas Hulu dan kontribusi tersebut merata di seluruh kecamatan. Sedangkan komoditas babi juga berkontribusi cukup tinggi, yaitu sebesar 26,75% yang didominasi oleh kecamatan Empanang, Seberuang, dan Semitau, masing-masing berkontribusi lebih dari 6%. Lalu untuk komoditas itik manila berkontribusi sebesar 16,97% terhadap produksi kabupaten Kapuas Hulu yang didominasi oleh kecamatan Silat Hilir sebesar 9%. Kemudian secara keunggulan daerah, kecamatan Semitau memiliki kontribusi cukup besar pada sub sektor peternakan, dimana menyumbang lebih dari 8% pada beberapa komoditas, khususnya komoditas kambing dan babi. Kemudian kecamatan Empanang dan Silat Hilir juga merupakan kecamatan yang memiliki prestasi cukup baik pada sub sektor peternakan, khususnya komoditas babi di Empanang dan itik manila di Silat Hilir dengan kontribusi lebih dari 8% terhadap produksi kabupaten Kapuas Hulu. Secara detail kontribusi komoditas peternakan per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.92 Kontribusi Komoditas Peternakan menurut Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu

KONTRIBUSI KOMODITAS PETERNAKAN (%)								
NO.	KECAMATAN	Sapi Potong	Kambing	Babi	Ayam Buras	Ayam Ras Pedaging	Itik	Itik Manila
1	Empanang	0,00	0,00	8,46	2,10	0,04	0,00	0,00
2	Hulu Gurung	3,05	1,89	0,00	4,45	1,50	0,83	1,82
3	Pengkadan	2,49	0,00	0,00	4,07	0,28	1,67	3,03
4	Seberuang	0,11	0,00	6,75	0,95	0,49	0,00	0,00
5	Semitau	1,92	8,49	10,27	2,10	0,31	0,00	1,82
6	Silat Hilir	0,79	2,83	0,58	1,46	1,17	0,00	9,09
7	Silat Hulu	0,45	0,00	0,68	2,38	0,32	0,00	1,21
	Kawasan Agropolitan	8,81	13,21	26,75	17,52	4,10	2,50	16,97
8	Badau	0,79	1,89	4,86	0,90	0,49	1,25	1,82
9	Batang Lupar	0,34	0,00	8,01	2,71	0,35	0,00	0,00
10	Bika	0,23	0,00	6,54	5,33	0,67	2,08	1,82
11	Boyan Tanjung	1,58	6,60	0,00	4,25	0,60	0,83	3,64
12	Bunut Hilir	2,15	0,00	0,17	2,25	0,43	9,58	0,00
13	Bunut Hulu	1,69	0,00	0,24	3,35	0,77	0,00	3,03
14	Embaloh Hilir	0,23	0,00	0,38	3,83	0,22	0,00	0,00
15	Embaloh Hulu	0,68	0,00	7,33	3,94	0,20	0,00	0,00

NO.	KECAMATAN	KONTRIBUSI KOMODITAS PETERNAKAN (%)						
		Sapi Potong	Kambing	Babi	Ayam Buras	Ayam Ras Pedaging	Itik	Itik Manila
16	Jongkong	4,29	3,77	0,14	2,32	4,75	0,42	0,00
17	Kalis	1,92	2,83	8,46	3,96	0,70	0,00	10,30
18	Mentebah	2,49	19,81	3,25	5,18	0,64	0,00	3,03
19	Puring Kencana	0,00	0,00	6,68	1,70	0,07	0,00	0,00
20	Putussibau Selatan	17,29	22,64	10,07	15,09	38,87	29,58	28,48
21	Putussibau Utara	50,06	28,30	17,12	21,35	46,46	53,75	30,91
22	Selimbau	6,44	0,94	0,00	3,62	0,37	0,00	0,00
23	Suhaid	1,02	0,00	0,00	2,71	0,31	0,00	0,00
Non-Kawasan		91,19	86,79	73,25	82,48	95,90	97,50	83,03

Sumber: Hasil Analisis, 2017

2. Konsentrasi Komoditas Peternakan pada lingkup Kabupaten Kapuas Hulu

Secara umum, kecamatan Semitau merupakan kecamatan yang memiliki prestasi pada komoditas peternakan pada wilayah KSK agropolitan. Namun apabila dibandingkan kecamatan lainnya di Kapuas Hulu, hasil ini belum cukup baik. Berdasarkan hasil perhitungan rasio terhadap rata-rata produksi kabupaten Kapuas Hulu, dapat disimpulkan bahwa komoditas peternakan yang memiliki tingkat konsentrasi tinggi di kawasan KSK agropolitan adalah sapi potong, babi, ayam, dan itik manila dimana hampir semua kecamatan membudidayakan komoditas tersebut. Dari analisis rasio tersebut juga dapat disimpulkan bahwa pada komoditas peternakan, kecamatan-kecamatan di KSK agropolitan belum berprestasi namun memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan lebih lanjut khususnya dari tingkat produksinya. Secara umum, komoditas-komoditas yang berpotensi tersebut juga selaras dengan komoditas unggulan pada lingkup Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini dapat menunjang pengembangan komoditas peternakan dalam rencana wilayah KSK agropolitan apabila dilihat dari potensinya secara eksternal. Secara detail, tingkat konsentrasi komoditas dan rasionya terhadap rata-rata kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.93 Rasio Komoditas Peternakan dengan Rata-Rata Kabupaten Kapuas Hulu

NO.	KECAMATAN	TINGKAT KONSENTRASI KOMODITAS PETERNAKAN						
		Sapi Potong	Kambing	Babi	Ayam Buras	Ayam Ras Pedaging	Itik	Itik Manila
1	Empanang	0,00	0,00	1,95	0,48	0,01	0,00	0,00
2	Hulu Gurung	0,70	0,43	0,00	1,02	0,35	0,19	0,42
3	Pengkadang	0,57	0,00	0,00	0,94	0,06	0,38	0,70
4	Seberuang	0,03	0,00	1,55	0,22	0,11	0,00	0,00
5	Semitau	0,44	1,95	2,36	0,48	0,07	0,00	0,42
6	Silat Hilir	0,18	0,65	0,13	0,34	0,27	0,00	2,09
7	Silat Hulu	0,10	0,00	0,16	0,55	0,07	0,00	0,28
Kawasan Agropolitan		2,03	3,04	6,15	4,03	0,94	0,58	3,90
8	Badau	0,18	0,43	1,12	0,21	0,11	0,29	0,42

FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STARTEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU

NO.	KECAMATAN	TINGKAT KONSENTRASI KOMODITAS PETERNAKAN						
		Sapi Potong	Kambing	Babi	Ayam Buras	Ayam Ras Pedaging	Itik	Itik Manila
9	Batang Lupar	0,08	0,00	1,84	0,62	0,08	0,00	0,00
10	Bika	0,05	0,00	1,50	1,22	0,15	0,48	0,42
11	Boyan Tanjung	0,36	1,52	0,00	0,98	0,14	0,19	0,84
12	Bunut Hilir	0,49	0,00	0,04	0,52	0,10	2,20	0,00
13	Bunut Hulu	0,39	0,00	0,06	0,77	0,18	0,00	0,70
14	Embaloh Hilir	0,05	0,00	0,09	0,88	0,05	0,00	0,00
15	Embaloh Hulu	0,16	0,00	1,69	0,91	0,05	0,00	0,00
16	Jongkong	0,99	0,87	0,03	0,53	1,09	0,10	0,00
17	Kalis	0,44	0,65	1,95	0,91	0,16	0,00	2,37
18	Mentebah	0,57	4,56	0,75	1,19	0,15	0,00	0,70
19	Puring Kencana	0,00	0,00	1,54	0,39	0,02	0,00	0,00
20	Putussibau Selatan	3,98	5,21	2,32	3,47	8,94	6,80	6,55
21	Putussibau Utara	11,51	6,51	3,94	4,91	10,69	12,36	7,11
22	Selimbau	1,48	0,22	0,00	0,83	0,08	0,00	0,00
23	Suhaid	0,23	0,00	0,00	0,62	0,07	0,00	0,00
Non-Kawasan		20,97	19,96	16,85	18,97	22,06	22,43	19,10

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Kemudian apabila dibandingkan antara konsentrasi produksi komoditas peternakan di dalam kawasan agropolitan dengan kecamatan-kecamatan di luar kawasan agropolitan, dapat diketahui persaingan yang terjadi pada wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Pada sub sektor peternakan, dapat disimpulkan tidak terdapat komoditas yang sangat unggul, dimana berarti bahwa seluruh komoditas yang dibudidayakan memiliki pesaing di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Semua komoditas peternakan di kawasan agropolitan tergolong pada klasifikasi tidak unggul. Hal ini berarti bahwa komoditas-komoditas tersebut menghadapi persaingan berat dengan non kawasan agropolitan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Sehingga pada pengembangan KSK Agropolitan, dapat disimpulkan bahwa komoditas-komoditas peternakan tersebut tidak cukup memiliki potensi untuk dikembangkan produksinya dan dipasarkan ke luar kawasan. Perbandingan konsentrasi komoditas peternakan antara kawasan agropolitan dengan non kawasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.94 Konsentrasi Komoditas Peternakan di Kawasan Agropolitan relatif terhadap Non Kawasan Agropolitan

No	Komoditas	Kawasan	Non Kawasan	Kesimpulan
		Kecamatan Konsentrasi	Kecamatan Konsentrasi	
1	Sapi Potong		Putussibau Utara Putussibau Selatan Selimbau	Tidak Unggul
2	Kambing	Semitau	Putussibau Utara Putussibau Selatan Mentebah	Tidak Unggul
3	Babi	Semitau Emnpanang Seberuang	Putussibau Utara Putussibau Selatan Kalis Batang Lupar Embaloh Hulu	Tidak Unggul
4	Ayam Buras	Hulu Gurung	Putussibau Utara Putussibau Selatan	Tidak Unggul

			Bika	
			Mentebah	
5	Ayam Ras Pedaging		Putussibau Utara Putussibau Selatan Jongkong	Tidak Unggul
6	Itik		Putussibau Utara Putussibau Selatan	Tidak Unggul
7	Itik Manila	Silat Hilir	Putussibau Utara Putussibau Selatan Kalis	Tidak Unggul

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Keterangan:

Sangat Unggul : tidak ada persaingan dengan non kawasan

Unggul : ada sedikit persaingan dengan non kawasan

Kurang Unggul: ada cukup besar persaingan dengan non kawasan

Tidak Unggul : menghadapi persaingan berat dengan non kawasan

3. Peluang Pasar Komoditas Peternakan

Apabila dilihat dari sisi peluang pasar, beberapa komoditas buah-buahan yang memiliki pasar di tingkat nasional dan internasional yaitu sapi, kambing, babi, ayam buras, ayam ras pedaging, dan itik/itik manila. Komoditas-komoditas tersebut memiliki permintaan yang tinggi dan berpotensi untuk dikembangkan di KSK agropolitan. Negara tujuan ekspor komoditas peternakan Indonesia pada dasarnya cukup beragam, namun secara umum terdapat di negara Malaysia, Singapura, Uni Emirat Arab dan sebagainya. Kemudian untuk pesaing di dalam Indonesia pada sub sektor peternakan didominasi oleh Provinsi-Provinsi di wilayah Jawa dan Sulawesi, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi selatan, dan lainnya.

Apabila dilihat secara lebih rinci terhadap beberapa komoditas yang dibudidayakan di kawasan agropolitan, dapat diketahui bahwa untuk komoditas ayam buras terdapat peluang ekspor ke luar kawasan hingga mencapai negara Jepang, Hongkong, dan Uni Emirat Arab. Namun, apabila ingin dikembangkan harus bersaing dengan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Sedangkan untuk komoditas babi, dapat diketahui bahwa peluang ekspornya mencapai Singapura dan China. Namun jika ingin dikembangkan akan memiliki pesaing dalam negeri, yaitu Nusa Tenggara Timur, Bali, Papua, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Kemudian untuk komoditas itik/itik manila berpotensi untuk diekspor hingga negara Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura. Namun apabila ingin dikembangkan, akan memiliki pesaing utama di dalam negeri seperti Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Secara lebih lengkap, dapat dilihat peluang pasar ekspor komoditas peternakan pada tabel berikut.

Tabel IV.95 Peluang Pasar Ekspor Peternakan

No	Komoditas	Nasional	Internasional	Pesaing Terbesar
1	Sapi	V	Australia	NTB NTT Jawa Timur Sulawesi Selatan Lampung

2	Kambing	V	Malaysia	Jawa Barat Jawa tengah Jawa Timur Lampung
3	Babi	V	Singapura China	NTT Bali Sumatera Utara Sulawesi Selatan Papua
4	Ayam Buras	V	Jepang Hongkong Uni Emirat Arab	Jawa Tengah Jawa Timur Sulawesi Selatan Jawa Barat Sumatera Utara
5	Ayam Ras Pedaging	V		Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah Banten
6	Itik/Itik Manila	V	Amerika Serikat Jepang Singapura	Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Sulawesi Selatan Kalimantan Selatan

Sumber: Hasil Studi Literatur, 2017

Komoditas Unggulan Peternakan di Kawasan Agropolitan

Berdasarkan analisis sebelumnya dengan melihat kontribusi produksi komoditas sub sektor peternakan di tingkat Kabupaten Kapuas Hulu, konsentrasi komoditas, kompetisi dengan kecamatan-kecamatan di non kawasan agropolitan, serta peluang pasar, maka dapat dihasilkan komoditas-komoditas unggulan peternakan di kawasan agropolitan. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat komoditas yang unggul pada sub sektor peternakan di kawasan agropolitan. Hal ini berarti bahwa komoditas-komoditas tersebut belum berdaya secara tingkat produksi dan bahkan belum mempunyai pasar. Apabila ingin dikembangkan maka harus dapat menciptakan pasar serta meningkatkan kualitas dan kuantitas agar mampu bersaing dengan daerah non kawasan agropolitan. Peluang untuk mengembangkan komoditas-komoditas tersebut sebetulnya cukup besar dan beberapa diantaranya berpeluang untuk dipasarkan ke wilayah yang lebih luas, bahkan hingga tingkat nasional dan internasional. Sintesa dari analisis komoditas unggulan pada sub sektor peternakan di kawasan agropolitan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.96 Komoditas Unggulan Peternakan di Kawasan Agropolitan

No	Komoditas	Kontribusi di Kabupaten Kapuas Hulu	Kompetisi dengan Non Kawasan	Peluang Pasar	Kesimpulan
1	Sapi Potong	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Ada	Tidak Unggul
2	Kambing	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Ada	Tidak Unggul
3	Babi	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Ada	Tidak Unggul
4	Ayam Buras	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Ada	Tidak Unggul
5	Ayam Ras Pedaging	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Ada	Tidak Unggul
6	Itik	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Ada	Tidak Unggul
7	Itik Manila	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Ada	Tidak Unggul

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Keterangan:

- Sangat Unggul** : samasekali tidak perlu bersaing dengan non kawasan,
- Unggul** : perlu sedikit bersaing dengan non kawasan.
- Kurang Unggul** : perlu lebih banyak bersaing dengan non kawasan
- Tidak unggul** : perlu bersaing berat dengan non kawasan
- Sangat Tidak Unggul** : belum berdaya dan perlu menciptakan pasar

4.5.2.6 Analisis Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Kawasan Agropolitan

1. Kontribusi Komoditas Perikanan Tangkap Kawasan Agropolitan

Sub sektor perikanan tangkap kurang memiliki potensi untuk dapat menjadi alternatif komoditas dalam rangka diversifikasi komoditas unggulan di Kabupaten Kapuas Hulu. Walaupun secara prestasi belum baik, namun apabila dilihat berdasarkan kontribusi setiap komoditas terhadap Kabupaten Kapuas Hulu, komoditas ikan jelawat, gabus, betutu, dan tambakan merupakan komoditas di kawasan agropolitan yang memiliki kontribusi cukup besar di tingkat kabupaten, dimana lebih dari 10% tingkat kontribusinya. Pada kawasan agropolitan, ikan tambakan berkontribusi sebesar 16,93% terhadap produksi di Kabupaten Kapuas Hulu dan kontribusi tersebut didominasi oleh kecamatan Silat Hilir dan Semitau. Sedangkan komoditas ikan betutu juga berkontribusi cukup tinggi, yaitu sebesar 13,14% yang didominasi oleh kecamatan Semitau. Lalu untuk komoditas ikan jelawat dan ikan gabus berkontribusi sekitar 10% terhadap produksi kabupaten Kapuas Hulu yang didominasi oleh kecamatan Silat Hilir dan Semitau, masing-masing sebesar 5%. Kemudian secara keunggulan daerah, kecamatan Semitau memiliki kontribusi cukup besar pada sub sektor perikanan tangkap, dimana menyumbang lebih dari 5% pada beberapa komoditas, seperti ikan jelawat, gabus, betutu, dan tambakan. Kemudian kecamatan Silat Hilir juga merupakan kecamatan yang memiliki prestasi cukup baik pada sub sektor perikanan tangkap, khususnya komoditas ikan jelawat, gabus, dan tambakan dengan kontribusi lebih dari 5% terhadap produksi kabupaten Kapuas Hulu. Secara detail kontribusi komoditas peternakan per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.97 Kontribusi Komoditas Perikanan Tangkap menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	KONTRIBUSI PRODUKSI KOMODITAS IKAN PERAIRAN UMUM (%)							
		Jelawat	Gabus	Betutu	Toman	Belida	Lais	Tambakan	Lain-lain
1	Silat Hilir	6,25	5,20	0,00	0,00	4,22	4,05	7,49	2,35
2	Silat Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69
3	Hulu Gurung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pengkadan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Seberuang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Semitau	5,68	5,18	13,14	3,30	4,38	3,32	9,44	6,25
7	Empanang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00
	Kawasan Agropolitan	11,94	10,38	13,14	3,30	8,60	8,66	16,93	10,29
8	Bunut Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Mentebah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bika/Manday	2,00	3,35	0,00	0,55	2,60	7,60	7,10	5,65
11	Kalis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	Putussibau Selatan	4,00	3,60	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	3,13
13	Embaloh Hilir	6,87	6,07	9,61	37,24	5,87	7,54	7,21	9,12
14	Bunut Hilir	24,18	14,10	13,56	41,49	46,06	19,84	7,48	18,71
15	Boyan Tanjung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Jongkong	5,83	7,86	11,91	3,72	6,00	8,05	5,20	6,93
17	Selimbau	11,13	11,48	13,22	4,37	5,43	10,57	22,52	9,77
18	Suhaid	8,81	11,75	16,08	4,27	9,76	20,79	9,60	12,42
19	Puring Kencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badau	4,68	4,17	0,00	1,75	3,41	3,90	3,67	5,65
21	Batang Lupar	4,70	13,36	9,34	0,00	3,65	4,37	3,36	5,42
22	Embaloh Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Putussibau Utara	3,92	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62
	Non-Kawasan	76,13	79,24	73,72	93,39	82,79	82,67	66,13	79,42

Sumber: Hasil Analisis, 2017

2. Konsentrasi Komoditas Perikanan Tangkap pada lingkup Kabupaten Kapuas Hulu

Secara umum, kecamatan Semitau merupakan kecamatan yang memiliki prestasi pada komoditas perikanan tangkap di wilayah KSK agropolitan. Namun apabila dibandingkan kecamatan lainnya di Kapuas Hulu, hasil ini belum cukup baik. Berdasarkan hasil perhitungan rasio terhadap rata-rata produksi kabupaten Kapuas Hulu, dapat disimpulkan bahwa komoditas perikanan tangkap terkonsentrasi di kecamatan Silat Hilir dan Semitau. Dari analisis rasio tersebut juga dapat disimpulkan bahwa pada komoditas perikanan tangkap, kecamatan Silat Hilir dan Semitau belum berprestasi namun memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan lebih lanjut khususnya dari tingkat produksinya. Secara umum, komoditas-komoditas yang berpotensi di kecamatan tersebut juga selaras dengan komoditas unggulan pada lingkup Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini dapat menunjang pengembangan komoditas perikanan tangkap dalam rencana wilayah KSK agropolitan apabila dilihat dari potensinya secara eksternal. Secara detail, tingkat konsentrasi komoditas dan rasionya terhadap rata-rata kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.98 Rasio Komoditas Perikanan Tangkap dengan Rata-Rata Kabupaten Kapuas Hulu

NO	KECAMATAN	TINGKAT KONSENTRASI KOMODITAS IKAN PERAIRAN UMUM							
		Jelawat	Gabus	Betutu	Toman	Belida	Lais	Tambakan	Lain-lain
1	Silat Hilir	1,63	1,33	0,00	0,00	1,06	1,02	2,07	0,60
2	Silat Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
3	Hulu Gurung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pengkadang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Seberuang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Semitau	1,48	1,33	3,48	0,79	1,10	0,84	2,61	1,60
7	Empanang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
	Kawasan Agropolitan	3,12	2,66	3,48	0,79	2,17	2,18	4,69	2,64
8	Bunut Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	KECAMATAN	TINGKAT KONSENTRASI KOMODITAS IKAN PERAIRAN UMUM							
		Jelawat	Gabus	Betutu	Toman	Belida	Lais	Tambakan	Lain-lain
9	Mentebah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bika/Manday	0,52	0,86	0,00	0,13	0,65	1,91	1,97	1,45
11	Kalis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Putussibau Selatan	1,04	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
13	Embaloh Hilir	1,80	1,56	2,54	8,86	1,48	1,90	2,00	2,34
14	Bunut Hilir	6,32	3,62	3,59	9,87	11,59	5,00	2,07	4,80
15	Boyan Tanjung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Jongkong	1,52	2,02	3,15	0,88	1,51	2,03	1,44	1,78
17	Selimbau	2,91	2,95	3,50	1,04	1,37	2,66	6,23	2,51
18	Suhaid	2,30	3,01	4,26	1,02	2,46	5,24	2,66	3,19
19	Puring Kencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badau	1,22	1,07	0,00	0,42	0,86	0,98	1,02	1,45
21	Batang Lupar	1,23	3,43	2,47	0,00	0,92	1,10	0,93	1,39
22	Embaloh Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Putussibau Utara	1,02	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
Non-Kawasan		19,88	20,34	19,52	22,21	20,83	20,82	18,31	20,36

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Kemudian apabila dibandingkan antara konsentrasi produksi komoditas perikanan tangkap di dalam kawasan agropolitan dengan kecamatan-kecamatan di luar kawasan agropolitan, dapat diketahui persaingan yang terjadi pada wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Pada sub sektor perikanan tangkap, dapat disimpulkan tidak terdapat komoditas yang sangat unggul, dimana berarti bahwa seluruh komoditas yang dibudidayakan memiliki pesaing di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Semua komoditas perikanan tangkap di kawasan agropolitan tergolong pada klasifikasi tidak unggul. Hal ini berarti bahwa komoditas-komoditas tersebut menghadapi persaingan berat dengan non kawasan agropolitan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Sehingga pada pengembangan KSK Agropolitan, dapat disimpulkan bahwa komoditas-komoditas perikanan tangkap tersebut tidak cukup memiliki potensi untuk dikembangkan produksinya dan dipasarkan ke luar kawasan. Perbandingan konsentrasi komoditas perikanan tangkap antara kawasan agropolitan dengan non kawasan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.99 Konsentrasi Komoditas Perikanan Tangkap di Kawasan Agropolitan relatif terhadap Non Kawasan Agropolitan

No	Komoditas	Kawasan	Non Kawasan	Kesimpulan
		Kecamatan Konsentrasi	Kecamatan Konsentrasi	
1	Jelawat	Silat Hilir Semitau	Bunut Hilir Selimbau Suhaid Embaloh Hilir Jongkong	Tidak Unggul
2	Gabus	Silat Hilir Semitau	Bunut Hilir Batang Lupar	Tidak Unggul

FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Komoditas	Kawasan		Kesimpulan
		Kecamatan Konsentrasi	Non Kawasan Kecamatan Konsentrasi	
			Selimbau Jongkong Embaloh Hilir Badau	
3	Betutu	Semitau	Suhaid Bunut Hilir Selimbau Jingkong Embaloh Hilir Batang Lupar	Tidak Unggul
4	Toman		Bunut Hilir Embaloh Hilir Selimbau Suhaid	Tidak Unggul
5	Belida	Semitau Silat Hilir	Bunut Hilir Suhaid Jongkong Embaloh Hir Selimbau	Tidak Unggul
6	Lais	Silat Hilir	Suhaid Bunut Hilir Selimbau Jongkong Bika/Manday Embaloh Hilir Batang Lupar	Tidak Unggul
7	Tambakan	Semitau Silat Hilir	Selimbau Suhaid Bunut Hilir	Tidak Unggul
8	Lain-lain	Semitau	Bunut Hilir Suhaid Selimbau Embaloh Hilir Bika/Manday Jongkong Badau Batang Lupar	Tidak Unggul

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Keterangan:

Sangat Unggul : tidak ada persaingan dengan non kawasan

Unggul : ada sedikit persaingan dengan non kawasan

Kurang Unggul: ada cukup besar persaingan dengan non kawasan

Tidak Unggul : menghadapi persaingan berat dengan non kawasan

3. Peluang Pasar Komoditas Perikanan Tangkap

Apabila dilihat dari sisi peluang pasar, beberapa komoditas perikanan tangkap yang memiliki pasar di tingkat nasional dan internasional yaitu udang, ikan tuna, ikan cakalang, ikan tongkol, dan kepiting. Komoditas-komoditas tersebut memiliki permintaan yang tinggi dan berpeluang untuk dikembangkan di KSK agropolitan. Negara tujuan ekspor perikanan tangkap Indonesia secara umum terdapat di negara Thailand, Jepang, dan Amerika Serikat. Kemudian untuk pesaing di dalam Indonesia pada sub sektor perikanan tangkap didominasi oleh Provinsi-Provinsi seperti DKI Jakarta, Maluku, Papua, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Apabila dilihat secara lebih rinci terhadap beberapa komoditas perikanan tangkap yang dibudidayakan di kawasan agropolitan, dapat diketahui bahwa komoditas perikanan

tangkap pada umumnya mampu untuk diekspor pada lingkup nasional. Namun apabila ingin dikembangkan, akan memiliki pesaing utama di dalam negeri, khususnya wilayah-wilayah pesisir yang pada umumnya mempunyai akses lebih baik untuk menangkap ikan. Secara lebih lengkap, dapat dilihat peluang pasar ekspor komoditas perikanan tangkap pada tabel berikut.

Tabel IV.100 Peluang Pasar Ekspor Perikanan Tangkap

No	Komoditas	Nasional	Internasional	Pesaing Terbesar
1	Udang	V		DKI Jakarta
2	Tuna	V	Thailand	Maluku
3	Cakalang	V	Jepang	Papua
4	Tongkol	V	Amerika Serikat	Jawa Timur
5	Kepiting	V		Sulawesi Selatan

Sumber: Hasil Studi Literatur, 2017

4. Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Kawasan Agropolitan

Berdasarkan analisis sebelumnya dengan melihat kontribusi produksi komoditas sub sektor perikanan tangkap di tingkat Kabupaten Kapuas Hulu, konsentrasi komoditas, kompetisi dengan kecamatan-kecamatan di non kawasan agropolitan, serta peluang pasar, maka dapat dihasilkan komoditas-komoditas unggulan perikanan tangkap di kawasan agropolitan. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat komoditas yang unggul pada sub sektor perikanan tangkap di kawasan agropolitan. Semua komoditas perikanan tangkap di kawasan agropolitan tergolong dalam klasifikasi sangat tidak unggul. Hal ini berarti bahwa komoditas-komoditas tersebut belum berdaya secara tingkat produksi dan bahkan belum mempunyai pasar. Apabila ingin dikembangkan maka harus dapat menciptakan pasar serta meningkatkan kualitas dan kuantitas agar mampu bersaing dengan daerah non kawasan agropolitan. Peluang untuk mengembangkan komoditas-komoditas tersebut sebetulnya cukup besar dan beberapa diantaranya berpeluang untuk dipasarkan ke wilayah yang lebih luas. Sintesa dari analisis komoditas unggulan pada sub sektor peternakan di kawasan agropolitan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.101 Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Kawasan Agropolitan

No	Komoditas	Kontribusi di Kabupaten Kapuas Hulu	Kompetisi dengan Non Kawasan	Peluang Pasar	Kesimpulan
1	Jelawat	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Tidak Ada	Sangat Tidak Unggul
2	Gabus	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Tidak Ada	Sangat Tidak Unggul
3	Betutu	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Tidak Ada	Sangat Tidak Unggul
4	Toman	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Tidak Ada	Sangat Tidak Unggul
5	Belida	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Tidak Ada	Sangat Tidak Unggul
6	Lais	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Tidak Ada	Sangat Tidak Unggul
7	Tambakan	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Tidak Ada	Sangat Tidak Unggul
8	Lain-lain	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Tidak Ada	Sangat Tidak Unggul

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Keterangan:

- Sangat Unggul** : samasekali tidak perlu bersaing dengan non kawasan,
- Unggul** : perlu sedikit bersaing dengan non kawasan.
- Kurang Unggul** : perlu lebih banyak bersaing dengan non kawasan
- Tidak unggul** : perlu bersaing berat dengan non kawasan
- Sangat Tidak Unggul** : belum berdaya dan perlu menciptakan pasar

4.5.2.7 Analisis Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Kawasan Agropolitan

1. Kontribusi Komoditas Perikanan Budidaya Kawasan Agropolitan

Sub sektor perikanan budidaya justru memiliki potensi cukup besar untuk menjadi alternatif komoditas dalam rangka diversifikasi komoditas unggulan di Kabupaten Kapuas Hulu. Secara umum, apabila dilihat berdasarkan kontribusi setiap komoditas terhadap Kabupaten Kapuas Hulu, komoditas ikan nila, ikan mas, dan ikan lele merupakan komoditas di kawasan agropolitan yang memiliki kontribusi cukup besar di tingkat kabupaten, dimana lebih dari 20% tingkat kontribusinya. Pada kawasan agropolitan, komoditas ikan nila berkontribusi sebesar 20,35% terhadap produksi di Kabupaten Kapuas Hulu dan kontribusi tersebut didominasi oleh kecamatan Hulu Gurung sebesar hampir 14%. Sedangkan komoditas ikan mas berkontribusi cukup tinggi, yaitu sekitar 46,70% yang didominasi oleh kecamatan Hulu Gurung sebesar 25%. Lalu untuk komoditas ikan lele berkontribusi sebesar 34,58% terhadap produksi kabupaten Kapuas Hulu yang didominasi oleh kecamatan Hulu Gurung dan Pengkadan, masing-masing sebesar 13,81% dan 20,76%. Kemudian secara keunggulan daerah, kecamatan Hulu Gurung memiliki kontribusi cukup besar pada sub sektor perikanan budidaya, dimana menyumbang lebih dari 13% pada beberapa komoditas, seperti ikan nila, ikan mas, dan ikan lele. Kemudian kecamatan Pengkadan juga merupakan kecamatan yang memiliki prestasi cukup baik pada sub sektor perikanan budidaya, khususnya komoditas ikan mas dan ikan lele dengan kontribusi lebih dari 10% terhadap produksi kabupaten Kapuas Hulu. Secara detail kontribusi komoditas peternakan per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.102 Kontribusi Komoditas Perikanan Budidaya menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	KONTRIBUSI KOMODITAS IKAN BUDIDAYA (%)									
		Jelawat	Betutu	Toman	Nila	Mas	Gurami	Lele	Patin	Baung	Lain-lain
1	Silat Hilir	0,00	0,00	0,00	1,45	11,00	0,00	0,00	0,91	0,00	1,48
2	Silat Hulu	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,11
3	Hulu Gurung	0,00	0,00	0,00	13,98	25,00	0,75	13,81	0,45	0,00	3,01
4	Pengkadan	0,00	0,00	0,00	3,49	10,70	0,50	20,76	2,14	0,00	5,13
5	Seberuang	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,10
6	Semitau	0,00	0,00	0,04	0,84	0,00	1,14	0,00	1,28	0,00	2,95
7	Empanang	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,11
	Kawasan Agropolitan	0,00	0,00	0,04	20,35	46,70	2,40	34,58	4,96	0,00	12,89
8	Bunut Hulu	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	3,13
9	Mentebah	0,00	0,00	0,00	0,15	10,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,10
10	Bika/Manday	0,08	0,00	0,04	0,07	0,00	0,65	0,00	0,17	0,00	0,07
11	Kalis	0,00	0,00	0,00	15,47	10,00	0,36	0,00	6,53	0,00	4,89
12	Putussibau	0,03	0,00	0,00	0,27	10,20	1,00	34,92	0,24	0,00	0,24
13	Embaloh Hilir	0,17	0,00	0,74	0,78	0,00	1,88	0,00	1,05	0,00	0,96
14	Bunut Hilir	1,18	3,10	3,03	4,50	0,00	20,92	0,00	2,62	6,58	10,39
15	Boyan Tanjung	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	10,17	1,23	0,00	0,47
16	Jongkong	41,54	6,81	33,29	22,05	13,00	18,16	0,00	30,50	9,87	18,27
17	Selimbau	51,72	79,26	53,21	14,42	0,00	42,21	0,00	33,87	75,66	28,51
18	Suhaid	0,58	7,74	2,11	1,76	0,00	5,18	0,00	1,53	4,61	5,35
19	Puring Kencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
20	Badau	0,10	3,10	2,79	2,09	0,00	2,18	0,00	4,14	0,00	7,25
21	Batang Lupar	4,61	0,00	4,71	3,02	0,00	5,05	0,00	4,97	3,29	7,06
22	Embaloh Hulu	0,00	0,00	0,05	0,26	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,26
23	Putussibau Utara	0,00	0,00	0,00	0,10	10,10	0,00	20,34	0,07	0,00	0,14
	Non-Kawasan	100,00	100,00	99,96	79,65	53,30	97,60	65,42	95,04	100,00	87,11

Sumber: Hasil Analisis, 2017

2. Konsentrasi Komoditas Perikanan Budidaya pada lingkup Kabupaten Kapuas Hulu

Secara umum, kecamatan Hulu Gurung merupakan kecamatan yang memiliki prestasi pada komoditas perikanan budidaya di wilayah KSK agropolitan. Namun apabila dibandingkan kecamatan lainnya di Kapuas Hulu, hasil ini belum cukup baik. Berdasarkan hasil perhitungan rasio terhadap rata-rata produksi kabupaten Kapuas Hulu, dapat disimpulkan bahwa komoditas perikanan budidaya terkonsentrasi di kecamatan Hulu Gurung dan Pengkadan. Dari analisis rasio tersebut juga dapat disimpulkan bahwa pada komoditas perikanan budidaya, kecamatan-kecamatan tersebut belum berprestasi tinggi namun memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan lebih lanjut khususnya dari tingkat produksinya. Secara umum, komoditas-komoditas yang berpotensi di kecamatan tersebut juga selaras dengan komoditas unggulan pada lingkup Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini dapat menunjang pengembangan komoditas perikanan budidaya dalam rencana wilayah KSK agropolitan apabila dilihat dari potensinya secara eksternal. Secara detail, tingkat konsentrasi komoditas dan rasionya terhadap rata-rata kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.103 Rasio Komoditas Perikanan Budidaya dengan Rata-Rata Kabupaten Kapuas Hulu

NO	KECAMATAN	TINGKAT KONSENTRASI KOMODITAS IKAN BUDIDAYA									
		Jelawat	Betutu	Toman	Nila	Mas	Gurami	Lele	Patin	Baung	Lain-lain
1	Silat Hilir	0,00	0,00	0,00	0,33	2,53	0,00	0,00	0,21	0,00	0,34
2	Silat Hulu	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03
3	Hulu Gurung	0,00	0,00	0,00	3,22	5,75	0,17	3,18	0,10	0,00	0,69
4	Pengkadan	0,00	0,00	0,00	0,80	2,46	0,12	4,78	0,49	0,00	1,18
5	Seberuang	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02
6	Semitau	0,00	0,00	0,01	0,19	0,00	0,26	0,00	0,29	0,00	0,68
7	Empanang	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03
Kawasan Agropolitan		0,00	0,00	0,01	4,68	10,74	0,55	7,95	1,14	0,00	2,97
8	Bunut Hulu	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,72
9	Mentebah	0,00	0,00	0,00	0,04	2,30	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02
10	Bika/Manday	0,02	0,00	0,01	0,02	0,00	0,15	0,00	0,04	0,00	0,02
11	Kalis	0,00	0,00	0,00	3,56	2,30	0,08	0,00	1,50	0,00	1,12
12	Putussibau Selatan	0,01	0,00	0,00	0,06	2,35	0,23	8,03	0,05	0,00	0,06
13	Embaloh Hilir	0,04	0,00	0,17	0,18	0,00	0,43	0,00	0,24	0,00	0,22
14	Bunut Hilir	0,27	0,71	0,70	1,04	0,00	4,81	0,00	0,60	1,51	2,39
15	Boyan Tanjung	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	2,34	0,28	0,00	0,11
16	Jongkong	9,55	1,57	7,66	5,07	2,99	4,18	0,00	7,02	2,27	4,20
17	Selimbau	11,90	18,23	12,24	3,32	0,00	9,71	0,00	7,79	17,40	6,56
18	Suhaid	0,13	1,78	0,49	0,41	0,00	1,19	0,00	0,35	1,06	1,23
19	Puring Kencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badau	0,02	0,71	0,64	0,48	0,00	0,50	0,00	0,95	0,00	1,67
21	Batang Lupar	1,06	0,00	1,08	0,70	0,00	1,16	0,00	1,14	0,76	1,62
22	Embaloh Hulu	0,00	0,00	0,01	0,06	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,06
23	Putussibau Utara	0,00	0,00	0,00	0,02	2,32	0,00	4,68	0,02	0,00	0,03
Non-Kawasan		23,00	23,00	22,99	18,32	12,26	22,45	15,05	21,86	23,00	20,03

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Kemudian apabila dibandingkan antara konsentrasi produksi komoditas perikanan budidaya di dalam kawasan agropolitan dengan kecamatan-kecamatan di luar kawasan agropolitan, dapat diketahui persaingan yang terjadi pada wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Pada sub sektor perikanan budidaya, dapat disimpulkan tidak terdapat komoditas yang sangat unggul, dimana berarti bahwa seluruh komoditas yang dibudidayakan memiliki pesaing di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian terdapat komoditas perkebunan yang unggul yaitu Ikan mas. Hal ini berarti bahwa komoditas tersebut memiliki pesaing di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Ikan mas memiliki keunggulan produksi pada tingkat Kabupaten, namun masih memiliki pesaing di luar kawasan agropolitan. Sehingga pada pengembangan KSK Agropolitan, dapat disimpulkan bahwa ikan mas cukup memiliki potensi untuk dikembangkan produksinya dan dipasarkan ke luar kawasan. Perbandingan konsentrasi komoditas perikanan budidaya antara kawasan agropolitan dengan non kawasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.104 Konsentrasi Komoditas Perikanan Budidaya di Kawasan Agropolitan relatif terhadap Non Kawasan Agropolitan

No	Komoditas	Kawasan	Non Kawasan	Kesimpulan
		Kecamatan Konsentrasi	Kecamatan Konsentrasi	
1	Toman		Selimbau	Tidak Unggul

No	Komoditas	Kawasan	Non Kawasan	Kesimpulan
		Kecamatan Konsentrasi	Kecamatan Konsentrasi	
			Jongkong Batang Lumpar	
2	Nila	Hulu Gurung	Jongkong Kalis Selimbau Bunut Hulu Bunut Hilir	Tidak Unggul
3	Mas	Hulu Gurung Silat Hilir Pengkadan	Jongkong	Unggul
4	Gurame		Selimbau Bunut Hilir Jongkong Suhaid Batang Lumar	Tidak Unggul
5	Lele	Pengkadan Hulu Gurung	Putussibau Selatan Putussibau Utara	Tidak Unggul
6	Patin		Selimbau Jongkong Bunut Hulu Kalis Batang Lumar	Tidak Unggul
7	Lain-lain	Pengkadan	Selimbau Jongkong Bunut Hilir Badau Batang Lumpar Suhaid Kalis	Tidak Unggul

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Keterangan:

Sangat Unggul : tidak ada persaingan dengan non kawasan

Unggul : ada sedikit persaingan dengan non kawasan

Kurang Unggul: ada cukup besar persaingan dengan non kawasan

Tidak Unggul : menghadapi persaingan berat dengan non kawasan

3. Peluang Pasar Komoditas Perikanan Budidaya

Apabila dilihat dari sisi peluang pasar, beberapa komoditas perikanan budidaya yang memiliki pasar di tingkat nasional dan internasional yaitu rumput laut, kerapu, bandeng, ikan mas, ikan nila, ikan patin, ikan gurame, dan ikan arwana. Komoditas-komoditas tersebut memiliki permintaan yang tinggi dan berpotensi untuk dikembangkan di KSK agropolitan. Negara tujuan ekspor perikanan tangkap Indonesia pada dasarnya cukup beragam, namun secara umum terdapat di wilayah Asia, Amerika Serikat, dan Eropa seperti negara Malaysia, Singapura, Jepang, China, dan sebagainya. Kemudian untuk pesaing di dalam Indonesia pada sub sektor perikanan tangkap didominasi oleh Provinsi-Provinsi di wilayah Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan, seperti Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan lainnya.

Apabila dilihat secara lebih rinci terhadap komoditas yang unggul maupun yang dibudidayakan di kawasan agropolitan, dapat diketahui bahwa untuk komoditas ikan mas terdapat peluang ekspor ke luar kawasan hingga mencapai negara Amerika Serikat, Jepang, dan Hongkong. Namun, apabila ingin dikembangkan harus bersaing dengan Provinsi

Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk komoditas ikan nila, dapat diketahui bahwa peluang ekspornya mencapai Amerika Serikat dan Hongkong. Namun jika ingin dikembangkan akan memiliki pesaing dalam negeri, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Komoditas-komoditas lainnya memiliki potensi untuk dikembangkan di dalam kawasan maupun di luar kawasan, namun secara keunggulan belum mampu bersaing. Secara lebih lengkap, dapat dilihat peluang pasar ekspor komoditas perikanan tangkap pada tabel berikut.

Tabel IV.105 Peluang Pasar Ekspor Perikanan Budidaya

No	Komoditas	Nasional	Internasional	Pesaing Terbesar
1	Rumput Laut	V	China Malaysia Singapura	Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Jawa Barat NTT Maluku
2	Kerapu	V	Hongkong Malaysia Singapura	Sumatera Utara Maluku Riau
3	Bandeng	V	Filipina Singapura Taiwan Thailand	Sulawesi Selatan Jawa Timur Jawa Tengah Sulawesi Tenggara Kalimantan Tlmur
4	Ikan Mas	V	Amerika Serikat Jepang Hongkong	Sulawesi Selatan
5	Nila	V	Amerika Serikat Hongkong	Sumatera Utara Jawa Tengah Jawa Barat
6	Patin	V	Amerika Serikat Eropa Timur Eropa Tengah	Jambi Riau Kalimantan Selatan
7	Gurame	V	Singapura Jepang Amerika Serikat Malaysia	Jawa Barat Jawa Tengah Sumatera Barat Jawa Timur
8	Ikan Hias/Arwana	V	Singapura Jepang Thailand China	Kalimantan Timur Kalimantan Barat

Sumber: Hasil Studi Literatur, 2017

4. Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Kawasan Agropolitan

Berdasarkan analisis sebelumnya dengan melihat kontribusi produksi komoditas sub sektor perikanan tangkap di tingkat Kabupaten Kapuas Hulu, konsentrasi komoditas, kompetisi dengan kecamatan-kecamatan di non kawasan agropolitan, serta peluang pasar, maka dapat dihasilkan komoditas-komoditas unggulan perikanan tangkap di kawasan agropolitan. Dapat disimpulkan bahwa ikan mas merupakan komoditas yang unggul di kawasan agropolitan, yang berarti bahwa dapat dikembangkan namun masih harus bersaing dengan wilayah non kawasan agropolitan. Peluang untuk mengembangkan komoditas-komoditas tersebut cukup besar dan beberapa diantaranya berpeluang untuk dipasarkan ke wilayah yang lebih luas, bahkan hingga tingkat nasional dan internasional.

Komoditas tersebut memiliki potensi besar dan memiliki prospek yang baik apabila nantinya akan dikembangkan dalam rencana KSK Agropolitan. Untuk komoditas-komoditas lainnya secara kontribusi belum dominan, belum mampu bersaing, serta masih perlu menciptakan pasar apabila ingin dikembangkan kedepannya. Sintesa dari analisis komoditas unggulan pada sub sektor buah-buahan di kawasan agropolitan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.106 Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Kawasan Agropolitan

No	Komoditas	Kontribusi di Kabupaten Kapuas Hulu	Kompetisi dengan Non Kawasan	Peluang Pasar	Kesimpulan
1	Toman	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Tidak Ada	Sangat Tidak Unggul
2	Nila	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Ada	Tidak Unggul
3	Mas	Hampir Dominan	Unggul	Ada	Unggul Pasar Kabupaten
4	Gurame	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Ada	Tidak Unggul
5	Lele	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Ada	Tidak Unggul
6	Patin	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Ada	Tidak Unggul
7	Lain-lain/Arwana	Tidak Dominan	Tidak Unggul	Ada	Tidak Unggul

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Keterangan:

- Sangat Unggul** : samasekali tidak perlu bersaing dengan non kawasan,
- Unggul** : perlu sedikit bersaing dengan non kawasan.
- Kurang Unggul** : perlu lebih banyak bersaing dengan non kawasan
- Tidak unggul** : perlu bersaing berat dengan non kawasan
- Sangat Tidak Unggul** : belum berdaya dan perlu menciptakan pasar

4.5.3 Persebaran Komoditas Unggulan di Kawasan Agropolitan

Kawasan agropolitan terdiri dari tujuh kecamatan dengan karakteristik potensi pertanian yang cukup beragam. Oleh karena itu, analisis persebaran komoditas unggulan akan dilakukan per kecamatan untuk mengetahui arahan pengembangan yang sesuai untuk setiap kecamatan. Selain itu analisis ini juga berguna untuk mengetahui daerah mana yang berpotensi untuk menjadi sentra produksi, sentra pengolahan, dan sentra pemasaran apabila dilihat dari karakteristik kegiatan ekonominya. Dalam rangka pengembangan agropolitan, perlu diketahui pula alternatif komoditas-komoditas yang berpotensi menjadi unggulan dalam pengembangan agropolitan.

4.5.3.1 Kecamatan Silat Hilir

Pada kecamatan Silat Hilir, perkebunan merupakan sub sektor basis dimana karet merupakan mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat sejak turun-temurun, yaitu khususnya Karet. Berdasarkan hasil analisis komoditas unggulan budidaya pertanian pada bagian sebelumnya, diketahui bahwa komoditas karet di kawasan gropolitan masih tergolong unggul pada tingkat kabupaten. Komoditas karet ini secara eksisting masih memiliki pasar, yaitu Kabupaten Sintang dan Kota Pontianak, sehingga masih memiliki potensi apabila ingin dikembangkan kedepannya. Selain itu, mayoritas masyarakat pada komoditas juga bekerja sebagai buruh harian pada perkebunan kelapa sawit. Hal ini didorong dengan turunnya

harga karet, sehingga masyarakat mencari alternatif pekerjaan untuk meningkatkan daya beli mereka di luar berladang karet.

Kemudian terkait dengan sawit, kecamatan Silat Hilir merupakan kecamatan yang sangat unggul dalam budidaya komoditas kelapa sawit apabila dilihat dari hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Kecamatan ini juga cukup memiliki potensi dalam pengembangan sawit mandiri, khususnya di desa Miau Merah yang juga merupakan sentra ekonomi kecamatan Silat Hilir. Cukup banyak masyarakat yang memiliki sawit mandiri di kecamatan Silat Hilir, yang berkisar antara 1-5 ha per orang dan pada umumnya di jual ke pabrik di Sekadau. Sawit mandiri tersebut rata-rata memproduksi 40-50 ton/bulan. Namun, saat ini masyarakat belum dapat mengolah *Crude Palm Oil* (CPO), atau dikenal dengan minyak mentah kelapa sawit, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai tambah komoditas sawit juga masih rendah. Terdapat pula kebun sawit plasma, bekerja sama dengan perusahaan Sinar Mas, namun dalam keberjalannya tidak berjalan dan terbengkalai sejak 2011. Secara umum, inti-plasma di kecamatan Silat Hilir belum memiliki sistem yang baik, khususnya bagi masyarakat.

Pada sub sektor lainnya, kecamatan Silat Hilir cukup memiliki potensi pada komoditas sayur-sayuran dan buah-buahan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, dapat dilihat bahwa banyak potensi komoditas di luar sawit dan karet yang dapat dikembangkan di kecamatan Silat Hilir, seperti kacang panjang, cabai rawit, terong, ketimun, kangkung, dan bayam. Sejauh ini desa Miau Merah yang sudah mulai menanam komoditas sayur-sayuran, ikan, dan ayam. Untuk komoditas perikanan yang cukup diminati masyarakat yaitu budidaya ikan arwana dan ikan nila. Namun komoditas-komoditas tersebut produksinya belum tinggi dan belum memiliki pasar yang memadai. Belum ada upaya dari masyarakat maupun pemerintah untuk mengembangkan komoditas tanaman hortikultura dan perikanan. Sejauh ini juga belum terdapat program spesifik yang dapat menunjang pengembangan komoditas-komoditas alternatif di luar karet dan kelapa sawit. Khusus untuk perikanan, Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Hulu pernah memberikan bantuan bibit, namun belum berkelanjutan. Lokasi strategis kecamatan Silat Hilir berpotensi meningkatkan kegiatan perekonomian wilayah sehingga memiliki potensi untuk menjadi sentra pengolahan dan pemasaran komoditas. Berikut merupakan persebaran komoditas unggulan di kecamatan Silat Hilir.

Tabel IV.107 Persebaran Komoditas di Kecamatan Silat Hilir

No	Komoditas	Tingkat Keunggulan
A. Tanaman Pangan		
1	Jagung	Kurang Unggul
B. Perkebunan		
1	Sawit	Sangat Unggul
2	Kelapa	Unggul
3	Karet	Unggul
C. Sayur-sayuran		
1	Kacang Panjang	Unggul Pasar Kabupaten
2	Cabai Rawit	Unggul Pasar Kabupaten
3	Terong	Unggul Pasar Kabupaten
4	Ketimun	Unggul Pasar Kabupaten
5	Kangkung	Unggul Pasar Kabupaten
6	Bayam	Unggul Pasar Kabupaten

D. Buah-buahan		
1	Nangka	Unggul Pasar Kabupaten
2	Nanas	Tidak Unggul
E. Peternakan		
1	Itik Manila	Tidak Unggul
F. Perikanan Tangkap		
1	Jelawat	Sangat Tidak Unggul
2	Gabus	Sangat Tidak Unggul
3	Belida	Sangat Tidak Unggul
4	Lais	Sangat Tidak Unggul
5	Tambakan	Sangat Tidak Unggul
G. Perikanan Budidaya		
1	Ikan Mas	Unggul Pasar Kabupaten

Sumber: Hasil Analisis, 2017

4.5.3.2 Kecamatan Silat Hulu

Aktivitas utama penduduk di kecamatan Silat Hulu adalah berladang karet yang merupakan salah satu komoditas unggulan di tingkat kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Selain karet, lada juga merupakan komoditas yang diminati masyarakat untuk dikembangkan sejauh ini. Kemudian secara spesifik pada desa Dangan Kota yang merupakan pusat kecamatan, 80% dari luas wilayah merupakan wilayah perkebunan sawit. Masyarakat pada umumnya bekerja sebagai buruh harian pada perusahaan sawit. Sebelumnya tambang emas merupakan salah satu pekerjaan utama masyarakat, hampir mencapai 80%. Dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan tambang tersebut, akhirnya dihentikan. Namun akibatnya sumber air untuk kegiatan pertanian pun menjadi tercemar akibat sawit dan PETI (pertambangan tanpa izin), sehingga mengganggu produktivitas pertanian.

Sudah terdapat perkebunan mandiri untuk komoditas padi, jagung, sayur, mentimun, dan sawi. Namun, sejauh ini kegiatan pertanian di kecamatan Kapuas Hulu masih subsisten, berorientasi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pribadi. Kegiatan ekonomi yang cukup berkembang hanya di beberapa desa, termasuk desa Miau Merah. Namun, berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa saat ini potensi komoditas-komoditas alternatif yang dapat dikembangkan kedepannya yaitu pada sektor tanaman pangan dan buah-buahan. Namun, sayangnya saat ini masyarakat belum memiliki pengetahuan yang baik untuk membudidayakan hasil pertanian mereka sehingga masyarakat masih menggunakan cara tradisional dalam bertani dan belum berorientasi pasar.

Masyarakat telah mencoba menanam beberapa tanaman, dan kondisi lahan di kecamatan Silat Hulu relatif dapat digunakan untuk menanam beragam komoditas seperti: lada, cokelat, ubi, sayur-sayuran, dan lain-lain. Namun tanaman-tanaman tersebut belum ditanam dalam skala besar, hanya di ladang pribadi untuk konsumsi sehari-hari. Sehingga, untuk mendukung kegiatan pertanian masyarakat dalam rangka pengembangan KSK agropolitan, dibutuhkan bantuan dan penyuluhan dari pemerintah kepada masyarakat untuk dapat membudidayakan, mengolah, serta memasarkan komoditas-komoditas alternatif tersebut. Berikut merupakan persebaran komoditas unggulan di kecamatan Silat Hulu.

Tabel IV.108 Persebaran Komoditas di Kecamatan Silat Hulu

No	Komoditas	Tingkat Keunggulan
A. Tanaman Pangan		
1	Padi Ladang	Tidak Unggul
B. Perkebunan		
1	Karet	Unggul
C. Sayur-sayuran		
-		
D. Buah-buahan		
1	Petai	Sangat Tidak Unggul
2	Jengkol	Unggul Pasar Kabupaten
E. Peternakan		
-		
F. Perikanan Tangkap		
1	-	-
G. Perikanan Budidaya		
1	-	-

Sumber: Hasil Analisis, 2017

4.5.3.3 Kecamatan Hulu Gurung

Masyarakat di kecamatan Hulu Gurung rata-rata memiliki 0,2 – 0,3 ha untuk sawah dan 1 – 2 ha untuk kebun karet. Terdapat beberapa komoditas utama yang dikembangkan di kecamatan Hulu Gurung berdasarkan informasi dari hasil wawancara dan FGD, serta analisis yang dilakukan sebelumnya. Pertama yaitu karet, yang terdiri dari dua jenis (karet unggul sebesar 40% dan karet lokal sebesar 60%). Pada sub sektor perkebunan, kelapa juga menjadi komoditas unggulan di kecamatan Hulu Gurung. Selain itu komoditas lainnya yang sangat potensial untuk dikembangkan yaitu pada sektor tanaman pangan, dimana komoditas kacang tanah tergolong sangat unggul dan komoditas padi sawah tergolong unggul. sudah terdapat MoU dengan BUMN PT. Pertani dengan menggunakan sistem irigasi. Terdapat lumbung padi yang berkapasitas 10 ton di desa Lubuk Antuk yang berjarak sekitar 5 km dari pusat kecamatan.

Di sisi lain, komoditas yang cukup berkembang di kecamatan Hulu Gurung adalah perikanan budidaya, khususnya ikan nila, ikan lele, ikan mas, dan ikan patin, mayoritas dibudidayakan di desa Tunas Muda. Berdasarkan analisis komoditas unggul yang telah dilakukan sebelumnya, ikan mas merupakan komoditas perikanan yang unggul di kecamatan Hulu Gurung. Selain itu, budidaya ikan arwana juga sedang berkembang saat ini di kecamatan Hulu Gurung. Terdapat tiga jenis ikan arwana yang dibudidayakan, yaitu arwana red, brazil, dan albino. Sejauh ini belum ada perusahaan di bidang pertanian di Hulu Gurung walaupun potensi pertaniannya sudah cukup besar. Namun, terdapat perusahaan tambang yang memasukkan izin ke 6 desa (Nanga Yen, Karya Mandiri, Landau Kumpang, Beringin, Kelakar, dan Bugang).

Namun, saat ini kegiatan pertanian belum memiliki sistem yang baik untuk mendukung rantai pasok komoditas. Pada umumnya masyarakat hanya menjual hasil produksinya ke daerah sekitar secara mandiri, tidak ada pengelolaan komoditas secara terpadu. Kemudian belum terdapat pasar secara khusus untuk menjual komoditas, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Secara potensi lahan, banyak komoditas yang sudah dicoba dan dapat dikembangkan di kecamatan Hulu Gurung, seperti: kedelai, jagung, kacang, dan sayur-sayuran. Kemudian untuk peternakan juga cukup bisa dikembangkan, salah satunya

ayam, sapi, dan kambing. Selain itu, ikan arwana dan sarang burung walet juga berpotensi dan memiliki pasar yang cukup baik. Ada potensi kawasan bekas PETI yang cukup besar jumlahnya di desa Kelakar untuk dijadikan kolam ikan. Berikut merupakan persebaran komoditas unggulan di kecamatan Hulu Gurung.

Tabel IV.109 Persebaran Komoditas di Kecamatan Hulu Gurung

No	Komoditas	Tingkat Keunggulan
A. Tanaman Pangan		
1	Padi Sawah	Unggul
2	Ubi Kayu	Tidak Unggul
3	Kacang Tanah	Sangat Unggul
B. Perkebunan		
1	Kopi	Tidak Unggul
2	Kelapa	Unggul
3	Karet	Unggul
C. Sayur-sayuran		
1	Cabai Rawit	Unggul Pasar Kabupaten
D. Buah-buahan		
1	Jeruk Siam	Tidak Unggul
2	Salak	Tidak Unggul
E. Peternakan		
1	Ayam Buras	Tidak Unggul
F. Perikanan Tangkap		
1	-	-
G. Perikanan Budidaya		
1	Nila	Tidak Unggul
2	Mas	Unggul Pasar Kabupaten
3	Lele	Tidak Unggul

Sumber: Hasil Analisis, 2017

4.5.3.4 Kecamatan Pengkadan

Mata pencaharian utama masyarakat di kecamatan Pengkadan relatif sama dengan kecamatan lain yaitu berladang Karet, dimana mayoritas menggunakan sistem lahan berpindah. Petani karet minimal mempunyai kebun karet seluas 1 – 3 ha. Dalam satu keluarga biasanya Bapak, Ibu, dan Anak sama-sama bekerja di ladang karet. Namun, untuk pengembangan Karet saat ini belum memadai, belum terdapat pabrik untuk mengolah serta kualitasnya masih rendah, sehingga harganya relatif rendah, yaitu 6 – 8 ribu rupiah per 1 kilogram. Komoditas karet pada umumnya dijual mentah ke Pontianak dan Sanggau melalui tengkulak. Selain karet, masyarakat juga terlibat dalam kegiatan PETI (emas), khususnya ketika harga karet anjlok kegiatan ini menjadi mata pencaharian alternatif. Di desa Buak Limbang terdapat perkebunan sawit oleh perusahaan, dimana 40% masyarakat terlibat di dalam kegiatannya. Selain karet, kelapa juga menjadi komoditas perkebunan yang unggul di kecamatan Pengkadan berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya.

Di sisi lain, rata-rata di setiap desa cocok untuk ditanam beragam komoditas, namun ada beberapa desa yang cukup kesulitan sumber air untuk kegiatan pertanian, jadi bergantung dengan sistem tadah hujan. Terdapat sawah irigasi dan tadah hujan, dimana biasanya satu tahun panen dua kali untuk sawah yang aktif. Namun, untuk hasil sawah sendiri masih untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau dijual ke masyarakat sekitar, belum berorientasi ekspor komoditas. Terdapat potensi komoditas alternatif yang mungkin dapat dikembangkan kedepannya yaitu: sahang (lada), padi sawah, kacang tanah, kacang kedelai, serta sayur-

sayuran seperti nangka dan rambutan. Di desa Sirajaya, komoditas lada tergolong unggul, dan biasanya dipasarkan ke Sintang atau Pontianak dengan harga Rp 200.000,- per kilogram. Saat ini sudah terdapat dua industri kecil penghasil tahu dan tempe yang berpotensi untuk dikembangkan. Produk olahan lainnya yaitu: padi ketan menjadi arak (tuak), emping padi ketan, dodol durian (lempok), dan gula durian.

Untuk sub sektor perikanan juga cukup memiliki potensi untuk dikembangkan. Saat ini 10% penduduk sudah memulai bisnis Ikan Arwana, orang-orang tertentu yang memiliki modal cukup tinggi. Jenis arwana yang dibudidayakan yaitu Arwana Red dan Brazil, dimana dalam 1 tahun bisa panen 3 – 4 kali. Pemeliharaan Ikan Arwana pun juga tidak bisa sembarangan karena membutuhkan PH air dan pakan tertentu. Pada umumnya dalam satu bulan bisa panen 11-12 ekor. Selain itu, ikan mas juga merupakan perikanan budidaya yang sangat unggul berdasarkan hasil analisis. Kemudian untuk perikanan tangkap, terdapat potensi pada komoditas ikan nila, ikan lele, ikan patin, dan ikan bawal, namun belum berkelanjutan karena tidak mampu membeli pakannya. Untuk wilayah bekas tambang juga berpotensi untuk dijadikan kolam perikanan. Apabila ingin mengembangkan komoditas unggulan alternatif diperlukan penyuluhan dan pelatihan dari pemerintah serta *stakeholder* terkait. Berikut merupakan persebaran komoditas unggulan di kecamatan Pengkadan.

Tabel IV.110 Persebaran Komoditas di Kecamatan Pengkadan

No	Komoditas	Tingkat Keunggulan
A. Tanaman Pangan		
1	Padi Sawah	Unggul
2	Ubi Jalar	Kurang Unggul
3	Kacang Tanah	Sangat Unggul
4	Kacang Kedelai	Sangat Unggul
B. Perkebunan		
1	Kelapa	Unggul
2	Karet	Unggul
C. Sayur-sayuran		
1	Tomat	Tidak Unggul
D. Buah-buahan		
1	Nangka	Unggul Pasar Kabupaten
2	Rambutan	Unggul Pasar Kabupaten
3	Salak	Tidak Unggul
4	Sawo	Sangat Tidak Unggul
5	Melinjo	Sangat Tidak Unggul
6	Petai	Sangat Tidak Unggul
E. Peternakan		
1	-	-
F. Perikanan Tangkap		
1	-	-
G. Perikanan Budidaya		
1	Mas	Unggul Pasar Kabupaten.
2	Lele	Tidak Unggul
3	Lain-lain	Tidak Unggul

Sumber: Hasil Analisis, 2017

4.5.3.5 Kecamatan Seberuang

Mata pencaharian utama masyarakat di kecamatan Seberuang juga relatif sama dengan kecamatan lain yaitu berladang Karet, dan mayoritas menggunakan sistem lahan berpindah.

Sulit untuk mengubah pola bertani dari karet ke komoditas lain, terutama masyarakat masih belum yakin prospeknya serta belum mengerti cara bertani untuk komoditas baru sehingga dibutuhkan pendampingan untuk masyarakat. Selain itu, masyarakat juga belum memahami pasar komoditas, sehingga masih menjual hasil produksi secara pribadi ke dalam kecamatan atau daerah sekitar saja. Komoditas unggulan lainnya pada sektor perkebunan adalah kelapa sawit dan kelapa. Lalu komoditas unggul pada sektor lainnya saat ini adalah cabai, dimana sudah surplus produksinya tetapi saat ini belum memiliki pemasaran yang baik. Selain itu, padi sawad dan sirsak juga memiliki keunggulan di tingkat kabupaten.

Masyarakat kecamatan saat ini sudah menyiapkan lumbung untuk komoditas padi dan lada dalam bentuk simpan pinjam oleh beberapa kelompok tani yang dikelola oleh BUMDes. Kendalanya adalah masih sedikit keluarga yang terlibat dalam kegiatan ini. Kemudian terdapat pasar mingguan yang buka setiap Hari Minggu, dari pagi hari hingga pukul 12.00 siang. Sejauh ini masyarakat menjual hasil produksi kepada pedagang keliling, yang kemudian akan dijual ke kecamatan Semitau. Hasil pertanian relatif rendah namun biaya transportasinya cukup tinggi serta belum ada penampungan hasil komoditas di tingkat kecamatan. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan komoditas cukup stagnan, sehingga dibutuhkan intervensi dari pemerintah.

Kemudian saat ini juga masih terdapat PETI (Batu dan Emas), biasanya yang membuka orang luar namun pekerjanya masyarakat lokal. Selain itu juga terdapat perkebunan sawit, baik perusahaan maupun mandiri. Terdapat dua Perusahaan besar yang masuk ke wilayah kecamatan Seberuang, yaitu Sinarmas dan Salim Grup. Masyarakat pada umumnya menjadi buruh harian, dimana merupakan pekerjaan sampingan dari berladang. Terkait dengan sistem inti-plasma, untuk Sinarmas menggunakan skema 8:2, sedangkan Salim Grup 6:4. Namun sejauh ini baru terdapat 1 plasma yang telah dibangun. Untuk kelapa sawit mandiri memiliki kendala pada kualitas yang belum sesuai standar untuk mendapat sertifikasi, sehingga pasar sawit mandiri menjadi terbatas. Berikut merupakan persebaran komoditas unggulan di kecamatan Seberuang.

Tabel IV.111 Persebaran Komoditas di Kecamatan Seberuang

No	Komoditas	Tingkat Keunggulan
A. Tanaman Pangan		
1	Padi Sawah	Unggul
2	Ubi Kayu	Tidak Unggul
3	Kacang Tanah	Sangat Unggul
B. Perkebunan		
1	Sawit	Sangat Unggul
2	Kelapa	Unggul
3	Karet	Unggul
C. Sayur-sayuran		
1	Petsai/Sawi	Tidak Unggul
2	Cabai Rawit	Unggul Pasar Kabupaten
D. Buah-buahan		
1	Sirsak	Unggul Pasar Kabupaten
E. Peternakan		
1	Babi	Tidak Unggul
F. Perikanan Tangkap		

No	Komoditas	Tingkat Keunggulan
-	-	-
G. Perikanan Budidaya		
1	-	-

Sumber: Hasil Analisis, 2017

4.5.4.6 Kecamatan Semitau

Kecamatan Semitau merupakan salah satu kecamatan dengan area perkebunan sawit yang cukup luas. Sebelum ada perusahaan Sawit masuk ke wilayah Semitau, pekerjaan utama masyarakat adalah petani ladang berpindah, khususnya untuk komoditas Karet. Lalu ketika harga karet turun dan perusahaan sawit masuk, sebagian besar masyarakat sekarang juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai buruh harian sawit. Meskipun terdapat program plasma, masyarakat cenderung menjual lahan plasma tersebut dikarenakan pengelolaan lahan plasma yang baru bisa dilakukan bertahun-tahun kemudian, sedangkan masyarakat membutuhkan biaya pada kurun waktu yang relatif singkat. Sawit mandiri (rakyat) yang berkembang sejauh ini masih terkendala di kualitas produksi serta masalah aksesibilitas menuju desa, sehingga pasar sawit mandiri masih terbatas.

Untuk budidaya komoditas karet selama ini terkendala di pemasaran karena harga rendah yang diakibatkan oleh kualitas karet, namun sejauh ini belum ada pelatihan dari pemerintah untuk membudidayakan karet yang berkualitas. Masyarakat masih menggunakan sistem tradisional dalam berladang. Selain Karet, terdapat potensi komoditas-komoditas alternatif yang dapat dikembangkan di kecamatan Semitau, khususnya di sektor tanaman pangan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Setiap tahun ada isu program cetak sawah tapi belum pernah ada realisasinya sejauh ini. Selama ini masyarakat belajar cara bertani sendiri, sehingga kualitas produksinya juga belum baik jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Pemerintah hanya memberikan bantuan bibit dan pupuk untuk masyarakat, namun belum pernah memberikan bimbingan atau pelatihan terkait pertanian. Terdapat pasar di desa Semitau Hilir dan beberapa Kabupaten juga berbelanja di sana. Sehingga dapat menjadi potensi untuk pengembangan kegiatan perdagangan, baik budidaya maupun produk hasil-hasil pertanian.

PKK di kecamatan Semitau memiliki kegiatan yang produktif dan mendukung pengembangan nilai tambah pertanian. PKK di Semitau Hulu pada khususnya mendapatkan bantuan dari dana desa sebesar 10 juta, menghasilkan olahan ikan berupa kerupuk basah dan kering, ikan giling, bakso, dan pentolan yang biasanya dipasarkan di pasar minggu di Semitau Hulu dan minimarket, sama halnya dengan kue kering dan basah. Kemudian dihasilkan pula kerajinan tangan berupa tas dari tali kur, gantungan kunci, hiasan dinding, dan kerajinan untuk acara. Selain itu, Kegiatan PKK di desa Marsedan Raya banyak yang memanfaatkan bahan dasar ikan, seperti membuat abon ikan dari ikan toman (karena setiap musim ada), kerupuk kering dan basah. Abon ikan sudah ada pengemasan, BPOM, IRT dan sudah menjadi produk unggulan karena dipasarkan ke Pontianak, Ketapang, Malaysia. Selain itu PKK juga membuat anyaman seperti tas dan topi, serta kerajinan khas Dayak seperti syal atau selendang. Terdapat tempat khusus pengolahan yang dibangun dari dana desa. Dapat disimpulkan bahwa sudah terdapat modal dan inisiasi dari masyarakat untuk

mengolah beberapa komoditas unggulan. Berikut merupakan persebaran komoditas unggulan di kecamatan Semitau.

Tabel IV.112 Persebaran Komoditas di Kecamatan Semitau

No	Komoditas	Tingkat Keunggulan
A. Tanaman Pangan		
1	Kacang Tanah	Sangat Unggul
B. Perkebunan		
1	Sawit	Sangat Unggul
2	Karet	Unggul
C. Sayur-sayuran		
1	Bayam	Unggul Pasar Kabupaten
D. Buah-buahan		
1	Belimbing	Sangat Tidak Unggul
2	Dukuh	Sangat Tidak Unggul
3	Durian	Sangat Unggul
4	Jambu Biji	Unggul Pasar Kabupaten
5	Jambu Air	Unggul Pasar Kabupaten
6	Jeruk Besar	Tidak Unggul
7	Mangga	Tidak Unggul
8	Nangka	Unggul Pasar Kabupaten
9	Nanas	Tidak Unggul
10	Pepaya	Tidak Unggul
11	Pisang	Tidak Unggul
12	Rambutan	Unggul Pasar Kabupaten
13	Sawo	Tidak Unggul
14	Sukun	Sangat Tidak Unggul
15	Petai	Sangat Tidak Unggul
16	Jengkol	Unggul Pasar Kabupaten
E. Peternakan		
1	Kambing	Tidak Unggul
F. Perikanan Tangkap		
1	Jelawat	Sangat Tidak Unggul
2	Gabus	Sangat Tidak Unggul
3	Betutu	Sangat Tidak Unggul
3	Belida	Sangat Tidak Unggul
4	Lais	Sangat Tidak Unggul
5	Tambakan	Sangat Tidak Unggul
6	Lain-lain	Sangat Tidak Unggul
G. Perikanan Budidaya		
1	-	-

Sumber: Hasil Analisis, 2017

4.5.4.7 Kecamatan Empanang

Kecamatan Empanang juga merupakan salah satu kecamatan yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yang luas di wilayah KSK agropolitan. Oleh karenanya, mayoritas masyarakat di kecamatan Empanang bekerja sebagai buruh harian sawit, namun ada pula yang bekerja sebagai pekerja tetap di perusahaan sawit. Hal ini menjadikan komoditas kelapa sawit sebagai komoditas yang sangat unggul di kecamatan Empanang. Terdapat mekanisme inti-plasma dalam kegiatan perkebunan sawit, namun masih belum baik dimana pembagian kawasan inti dan plasma tidak sebanding, lokasi perkebunan plasma yang ditentukan oleh perusahaan lahannya tidak subur apabila dibandingkan kawasan inti,

sehingga tidak memberi nilai perekonomian tinggi bagi masyarakat. Keuntungan plasma sekitar Rp 400.000, Rp 380.000, dan sebagainya tergantung umur penanamannya.

Selain bekerja di perusahaan sawit, masyarakat juga masih bertani, mayoritas padi ladang, lada dan karet. Untuk komoditas lada sudah ada yang petani yang menjual ke Malaysia. Selain itu, masyarakat juga menanam sayur-sayuran walaupun hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pribadi. Banyak yang melakukan tumpang sari komoditas. Satu ladang jaman dulu setiap rumah tangga bisa mencapai 4 hektar, sekarang hanya 1 hektar. Kesuburan tanah menurun akibat kegiatan pengelolaan sawit. Saat ini sub sektor perikanan belum berkembang, tetapi memiliki potensi. Sementara untuk sub sektor peternakan, khususnya ternak babi dan ayam tidak berkembang karena sering terkena penyakit sampar. Selama ini masyarakat menggunakan cara tradisional dalam berladang, kalau menanam biasanya tidak menggunakan pupuk. Ladang berpindah sudah jarang dilakukan, karena jaraknya cukup jauh. Khusus untuk beberapa desa, lahan yang dapat dikembangkan sudah tidak ada karena sudah diisi perkebunan sawit, sehingga harus berladang atau bertani ke desa lain.

Sejauh ini belum ada bantuan atau penyuluhan terkait pertanian dari Pemerintah maupun non Pemerintah. Masyarakat pernah membentuk kelompok tani namun karena budaya ladang berpindah-pindah jadi sulit untuk dipertahankan. Selama ini hasil tani dijual ke penampung yang keliling kecuali padi karena hanya dikonsumsi sendiri atau sekitar saja. Kemudian terdapat pula kelompok anyaman (tenun) oleh ibu-ibu PKK yang memiliki potensi tinggi, pernah mengajukan proposal ke Pemerintah Kabupaten dan sudah didanai. Kegiatan ini sudah berjalan udah cukup lama, sudah puluhan tahun. Hasil tenun tersebut dijual ke tamu yang datang ke kecamatan atau kadang-kadang langsung dijual ke Malaysia. Kendalanya sejauh ini yaitu masih minimnya pendanaan untuk mengembangkannya. Berikut merupakan persebaran komoditas unggulan di kecamatan Empanang.

Tabel IV.113 Persebaran Komoditas di Kecamatan Empanang

No	Komoditas	Tingkat Keunggulan
A. Tanaman Pangan		
1	Padi Ladang	Tidak Unggul Unggul
B. Perkebunan		
1	Sawit	Sangat Unggul
2	Lada	Tidak Unggul
C. Sayur-sayuran		
1	-	-
D. Buah-buahan		
1	-	-
E. Peternakan		
1	Babi	Tidak Unggul
F. Perikanan Tangkap		
1	-	-
G. Perikanan Budidaya		
1	-	-

Sumber: Hasil Analisis, 2017

4.5.4 Prospek Pasar Komoditas Unggulan di Kawasan Agropolitan

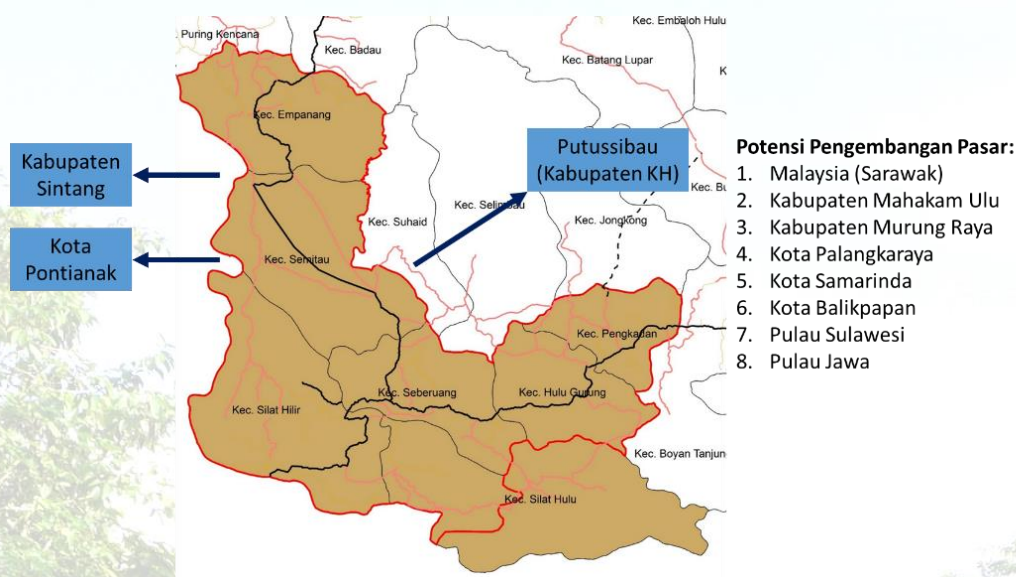
Terkait dengan analisis prospek pasar komoditas unggulan di kawasan agropolitan. Saat ini pasar komoditas unggulan masih terbatas pada wilayah sekitar kecamatan, seperti

Kabupaten Sintang dan Kota Pontianak. Belum banyak pula komoditas yang sudah dipasarkan ke luar kawasan. Hal ini akan menjadi tantangan kedepannya dalam pengembangan rencana KSK Agropolitan. Namun apabila dilihat dari posisi geografis, KSK Agropolitan memiliki kawasan sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara Malaysia, yaitu wilayah Sarawak dimana yang memiliki akses terdekat ke sana yaitu kecamatan Empanang. Hal ini akan menjadi salah satu potensi pasar yang cukup besar bagi wilayah KSK agropolitan di masa yang akan datang. Selain itu juga kecamatan Silat Hilir langsung berbatasan dengan Kabupaten Sintang di wilayah barat daya. Kegiatan perekonomian Kabupaten Sintang cukup baik, sehingga akan berpotensi untuk menjadi salah satu target pasar hasil produk agropolitan.

Selain itu, untuk produk-produk ciri khas Kapuas Hulu maupun Kalimantan Barat, seperti beras Raja Uncak, Ikan Arwana Red, Kerupuk Basah, Hasil Tenun, dan sebagainya berpeluang untuk memiliki pasar yang sangat luas. Target pasar komoditas-komoditas unggulan dan memiliki ciri khas tersebut berpotensi untuk mencapai pulau-pulau lain di Indonesia seperti Pulau Sumatera dan Jawa, maupun ekspor ke luar negeri yang terdekat yaitu Malaysia dan Singapura. Hal ini dikarenakan komoditas-komoditas tersebut tidak memiliki pesaing yang besar, dimana hanya bersaing dengan wilayah yang berada di kabupaten Kapuas Hulu maupun Provinsi Kalimantan Barat. Namun untuk dapat mewujudkan hal tersebut, yang perlu ditingkatkan adalah kuantitas dan kualitas produk, serta meningkatkan sistem pengolahan dan pemasaran produk lokal.

Pada umumnya pemasaran komoditas dilakukan secara tradisional, yaitu pada tingkat desa dan kecamatan akan terdapat pengumpul hasil-hasil pertanian. Kemudian pengumpul tersebut memasarkannya ke luar kawasan, pada umumnya melewati jalur darat ataupun sungai. Kekurangan akses terhadap pasar di kawasan KSK Agropolitan pada akhirnya tidak dapat mengembangkan potensi hasil budidaya pertanian. Masyarakat cenderung menjual hasil pertanian ke daerah sekitar serta tidak membudidayakan dalam skala besar dikarenakan belum mempunyai pasar yang pasti akan menampung hasil pertanian mereka. Oleh karena itu, kebutuhan akan peningkatan akses petani/peladang terhadap pasar memiliki urgensi yang sangat tinggi ketika mengembangkan rencana KSK Agropolitan. Pada gambar berikut dapat terlihat kondisi eksisting target pemasaran komoditas unggulan serta potensi pengembangan pasar di masa yang akan datang, khususnya dalam pengembangan KSK Agropolitan.

Gambar IV.86 Kondisi dan Potensi Pasar Komoditas Unggulan di Kawasan Agropolitan



Sumber: Hasil Analisis, 2017

4.5.5 Analisis Komoditas Unggulan Industri Berbasis Pertanian

Nilai tambah (*value added*) produk pertanian adalah pertambahan nilai suatu komoditas pertanian karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan atau penyimpanan dalam suatu sistem produksi. Nilai tambah yang semakin besar atas produk pertanian tentunya dapat berperan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya menjadi penting dalam pengembangan agropolitan. Komoditas *agroindustry* merupakan subsektor pertanian yang diharapkan dapat berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya dengan diterapkannya rencana pengembangan KSK Agropolitan. Oleh karenanya, diperlukan analisis untuk melihat *potential linkage* komoditas budidaya pertanian untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dalam kegiatan industri. Pengembangan industri akan meningkatkan kegiatan pertanian sebagai motor penggerak perekonomian wilayah KSK Agropolitan. Jenis industri potensial ditentukan berdasarkan potensi wilayah dalam menyediakan input untuk industri. Input industri berasal dari dua sumber, yaitu:

- Sumber daya alam, dimana secara umum mempertimbangkan ketersediaan sumber daya air dan ketersediaan lahan pertanian
- Sumber daya ekonomi lokal, yaitu output dari kegiatan ekonomi lokal yang berpotensi untuk menjadi input industri.

Untuk mengidentifikasi industri potensial ini, digunakan analisis kesesuaian mata rantai industri, yaitu mengidentifikasi industri hilir terkait dengan komoditas-komoditas yang memiliki potensi, prestasi, dan prospek di kawasan KSK agropolitan. Jenis industri potensial adalah kegiatan industri yang berdasarkan analisis mata rantai produksi merupakan hilir dari kegiatan pertanian. Kemudian jenis industri prospektif merupakan jenis industri potensial yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan pertanian, dimana memenuhi syarat sebagai berikut:

- Kesesuaian kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan harga sumber daya pendukung jenis industri potensial dengan standar industri yang ada
- Peluang pasar yang luas, termasuk pesaing yang langka
- Dukungan kebijakan pemerintah, baik lokal, regional, dan nasional

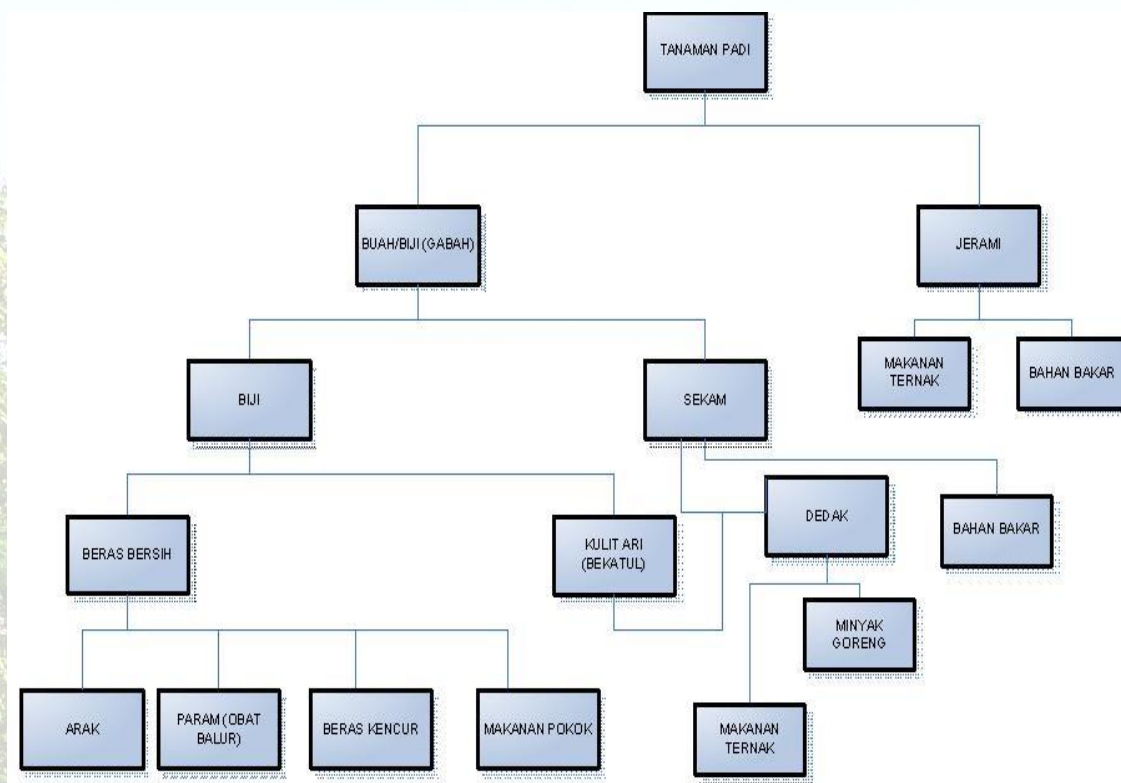
Berikut akan dijelaskan beberapa mata rantai komoditas yang merupakan komoditas unggulan, maupun memiliki potensi menjadi komoditas unggulan alternatif di wilayah KSK Agropolitan, yaitu: padi, karet, ayam, ikan, dan kelapa sawit.

Mata Rantai Industri Padi

Bagi negara produsen padi, beras tidak hanya berperan sebagai sumber pangan utama, tetapi juga sebagai kegiatan ekonomi dan mata pencaharian penduduk, khususnya di wilayah perdesaan. Tidak terkecuali pada kecamatan-kecamatan di kawasan agropolitan yang juga menanam padi, seminimal mungkin untuk memenuhi konsumsi pribadi. Pengembangan produk dari hasil samping dan limbah pengolahan beras sangat prospektif untuk dikembangkan. Salah satunya dari hasil samping beras patas dan menir dapat dimanfaatkan untuk produksi beras dan bahan baku pangan. Kemudian dari limbah sekam dapat digunakan sebagai bahan bakar bata, campuran pembuatan bata, genteng, gabah, dan media tumbuh tanaman. Petani juga dapat memperoleh nilai tambah dari jerami yang bisa diolah menjadi pakan ternak. Masih banyak potensi hasil samping dan limbah pascapanen padi yang dapat diolah lebih lanjut.

Untuk membangun agroindustri komoditas padi dibutuhkan sarana dan prasarana penanganan pascapanen, mulai dari panen, perontokan, pengeringan, penggilingan, dan sarana penunjang lainnya. Dengan adanya rencana pengadaan program cetak sawah di Kabupaten Kapuas Hulu, pengembangan komoditas padi menjadi sangat potensial kedepannya. Selain itu Kabupaten Kapuas Hulu memiliki produk beras lokal unggulan yaitu beras Raja Uncak. Untuk mewujudkan peningkatan nilai tambah komoditas padi, dibutuhkan teknologi pertanian, modal, serta peningkatan kapasitas SDM untuk dapat mengolah komoditas. Secara umum, pohon industri padi secara detail dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar IV.87 Pohon Industri Tanaman Padi

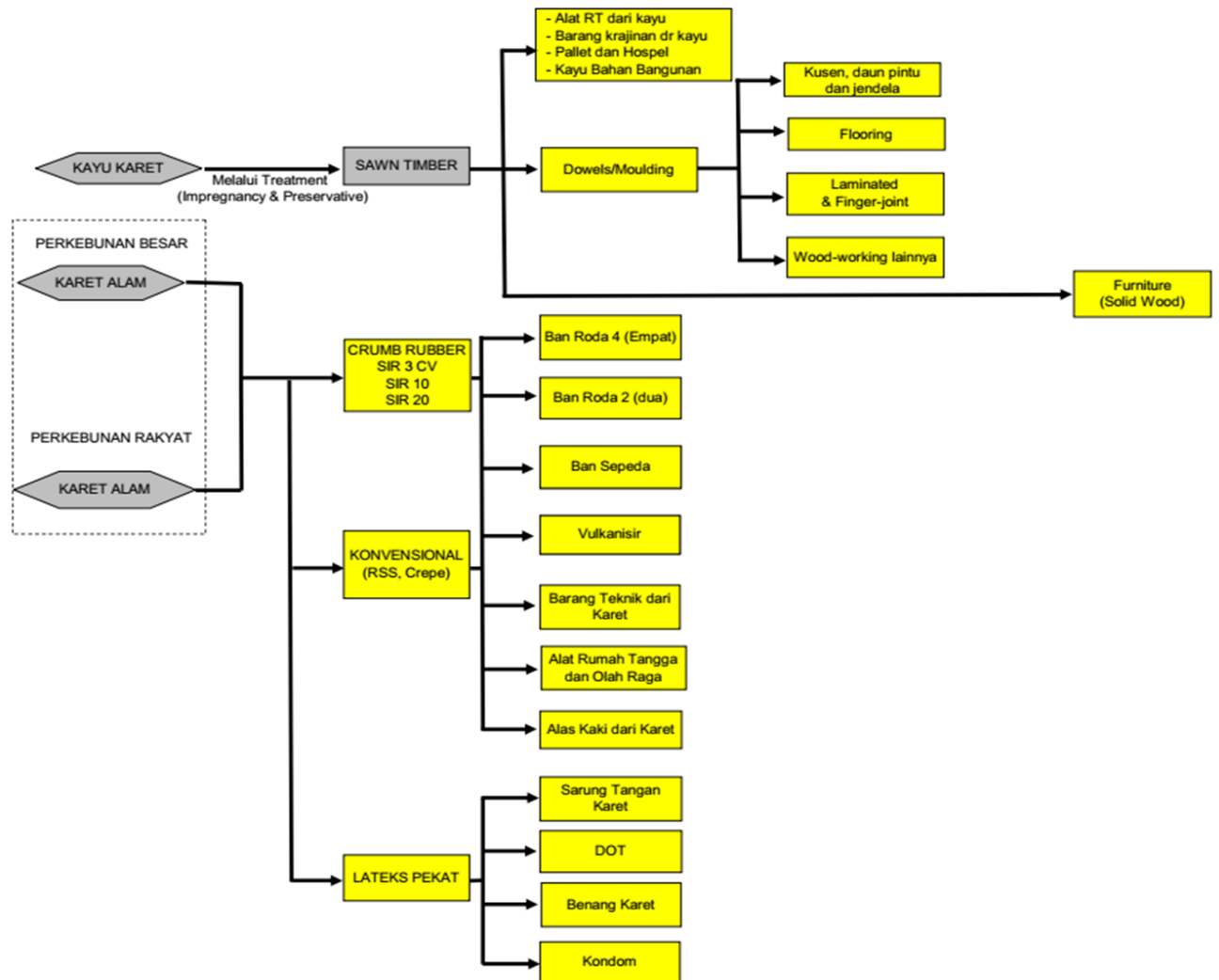


Mata Rantai Industri Karet

Karet merupakan salah satu komoditas perkebunan yang penting di Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya di wilayah KSK Agropolitan. Karet menjadi komoditas utama yang turun temurun ditanam dan dibudidayakan oleh masyarakat, sehingga tingkat ketergantungan masyarakat terhadap komoditas karet pun tinggi. Secara produksi, karet merupakan salah satu komoditas unggulan kawasan agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu, selain itu Indonesia merupakan salah satu produsen karet alam terbesar di dunia. Oleh karenanya, peningkatan nilai tambah pada komoditas karet diasumsikan mampu mengembangkan perekonomian wilayah KSK Agropolitan, melalui pengembangan industri karet.

Tanaman karet apabila ditingkatkan nilai tambahnya akan menghasilkan getah karet yang dapat diperdagangkan di masyarakat berupa lateks segar, koagulasi, ataupun sit asap/sit angin. Selanjutnya produk-produk tersebut digunakan sebagai bahan baku untuk berbagai industri hilir, seperti ban, bola, sepatu, karet, sarung tangan, baju renang, karet gelang, mainan dari karet, dan berbagai produk lainnya. Sektor yang memiliki keterkaitan ke depan (*forward linkage*) tertinggi adalah industri karet plastik, kemudian karet, industri tekstil, pakaian dan kulit, serta industri kimia. Sedangkan sektor yang mempunyai keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) tertinggi adalah sektor karet, disusul industri pupuk dan pestisida, industri kimia, perdagangan, serta bangunan. Untuk mengetahui turunan komoditas karet secara lebih detail, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar IV.88 Pohon Industri Tanaman Karet



Sumber: <http://www.kemenperin.go.id/pohon-industri>

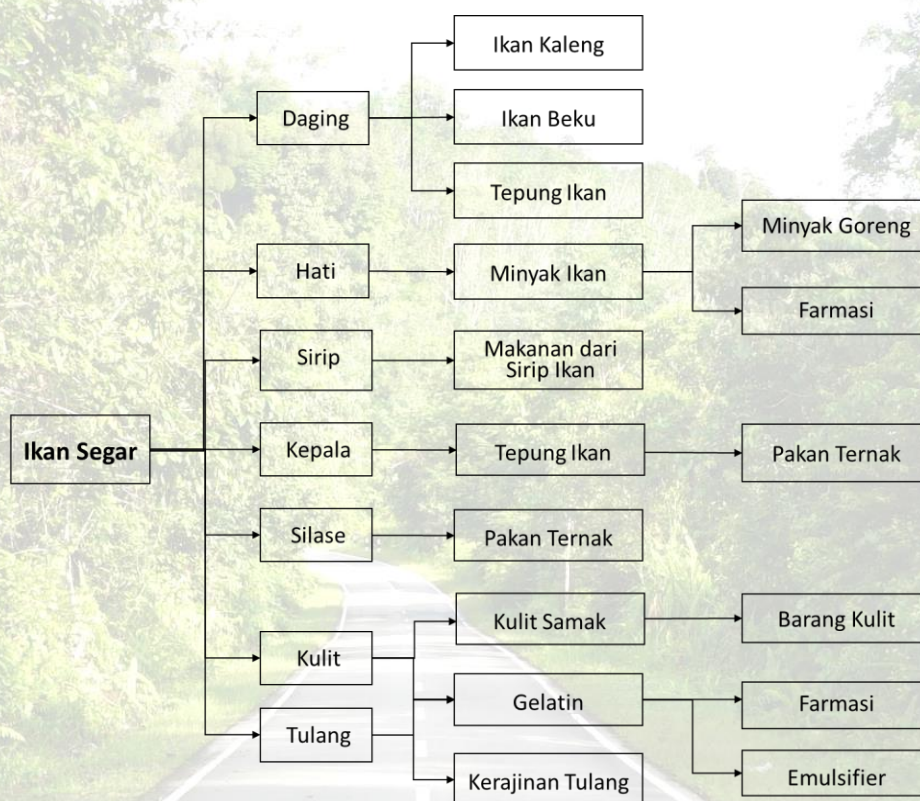
Tersedianya lahan yang luas serta produksi yang tinggi memberikan peluang untuk menghasilkan produk karet alam dalam jumlah besar. Hal ini akan menjadi modal untuk dapat mengembangkan nilai tambah komoditas karet di kawasan agropolitan. Untuk meningkatkan nilai tambah di sektor hilir karet, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu:

- Perlunya membentuk industri terpadu antara produsen karet sektor hulu dan hilir termasuk mudahnya pemasaran hasil-hasil produksinya.
- Perlunya peningkatan investasi dan investor guna meningkatkan hilirisasi, yang berarti Pemerintah daerah perlu menarik investasi dengan melakukan perubahan dan perbaikan birokrasi dan regulasi.
- Perlunya mendorong terbentuknya pabrik-pabrik yang berorientasi hilirisasi seperti pabrik vulkanisir ban dan lain-lain.
- Perlunya dilakukan pemberian insentif terhadap produk karet sintetis sebagai komplemen karet alam.

Mata Rantai Industri Ikan

Nilai tambah yang diperoleh pada kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan terkait dengan faktor teknis dan faktor non teknis. Secara teknis, tingkat teknologi, jumlah bahan baku dan jumlah tenaga kerja yang digunakan akan mempengaruhi besarnya nilai tambah. Unsur non teknis yang juga berpengaruh terhadap besarnya nilai tambah adalah biaya input dan harga output; dalam hal ini harga produk olahan perikanan. Pembudidayaan ikan menjadi penting dalam pengembangan kawasan agropolitan. Pengolahan ikan memiliki produk turunan dari hasil sampingan yang sangat beragam, mulai dari hati yang dapat menjadi bahan membuat minyak ikan, lalu kepala dan silase yang dapat menjadi pakan ternak, kulit menjadi barang kulit dan obat-obatan, tulang dapat menjadi kerajinan dan obat-obatan. Berikut merupakan pohon industri hasil ikan yang berpotensi dikembangkan di KSK Agropolitan.

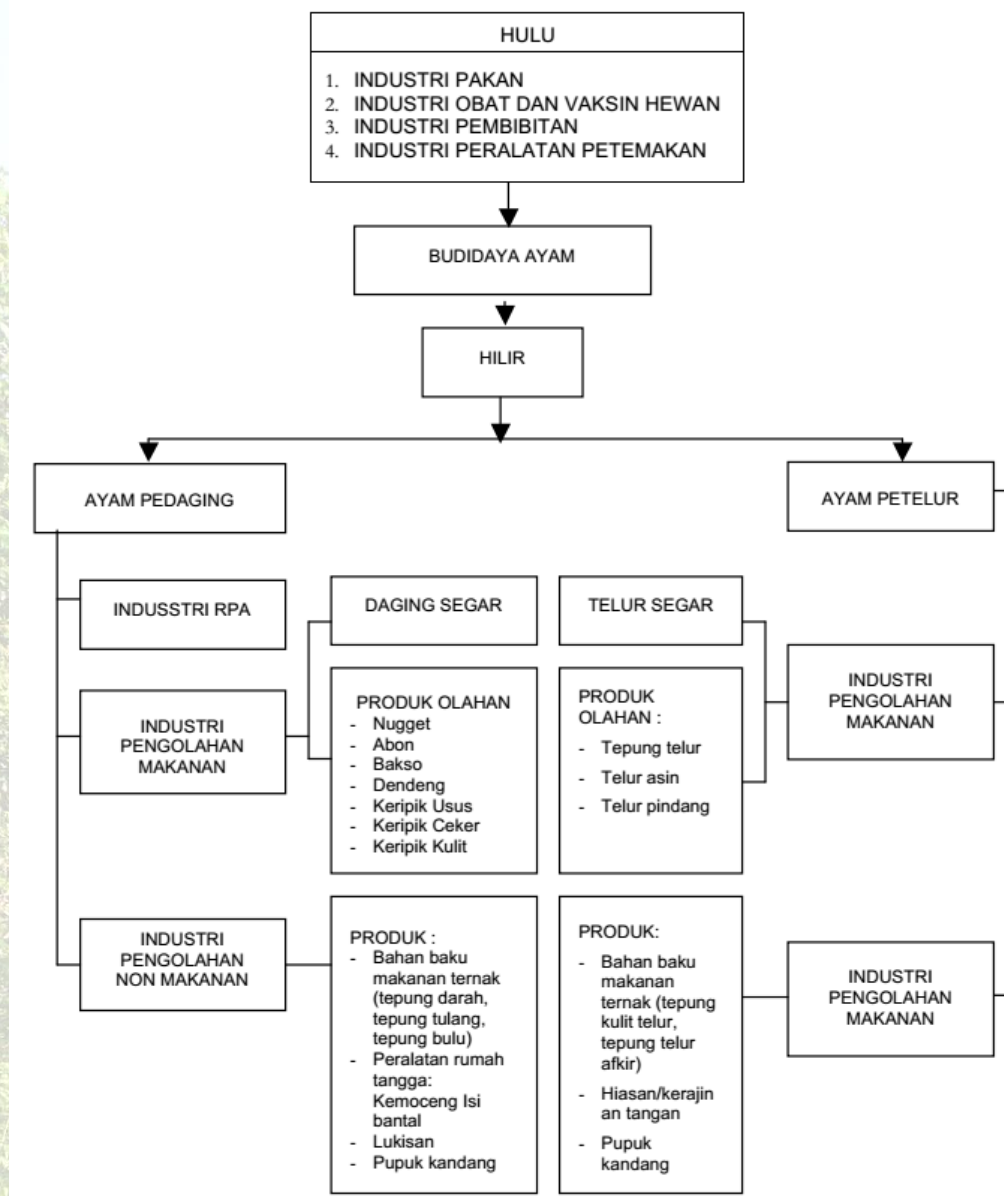
Gambar IV.89 Pohon Industri Hasil Ikan



Mata Rantai Industri Ayam

Saragih (2001) menyatakan bahwa dalam sektor agribisnis, nilai tambah (added value) ekonomi terbesar terdapat pada agribisnis hulu dan hilir, sedangkan pada agribisnis budidaya (on-farm) nilai tambah yang ada relatif kecil. Lebih lanjut dinyatakan bahwa jika tidak diupayakan untuk merubah kondisi ini, maka peternak yang berada di dalam subsistem budidaya akan selalu berada pada posisi pendapatan yang relatif rendah dibandingkan dengan subsistem hulu maupun hilir. Upaya perubahan tersebut antara lain dilakukan melalui penguatan kelembagaan atau koperasi untuk lebih dapat berperan aktif sehingga mewujudkan peningkatan kesejahteraan dalam pendapatan bagi anggotanya.

Gambar IV.90 Pohon Industri Ayam



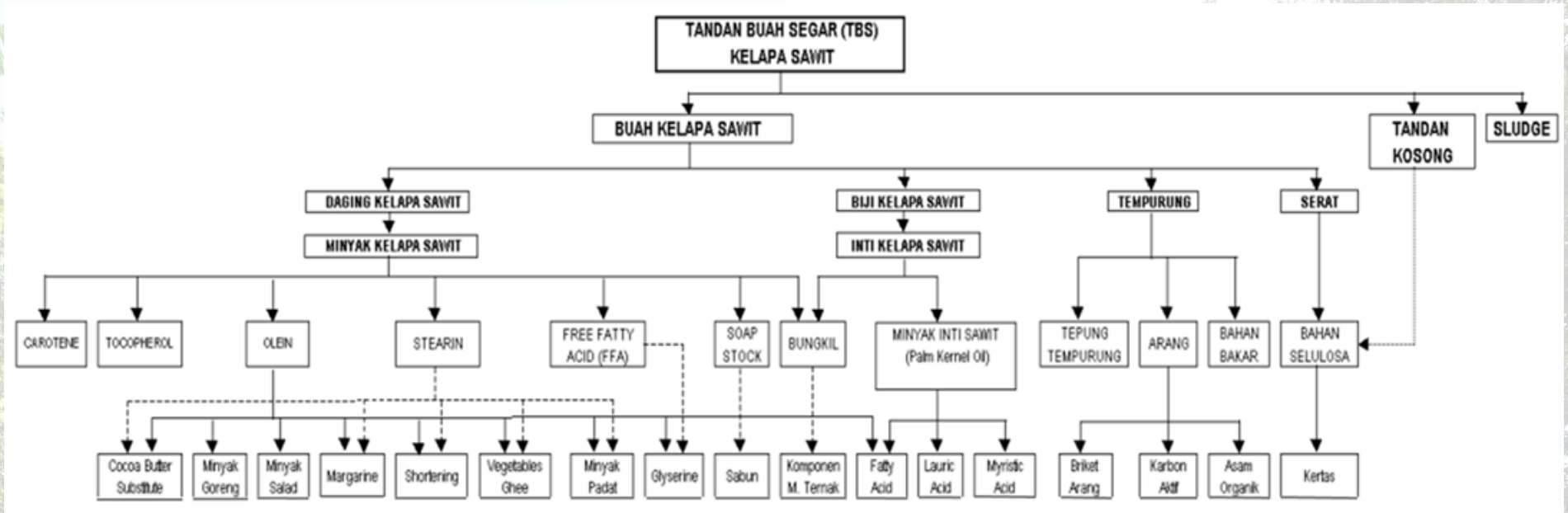
Menurut FAO (2008), produksi dan perdagangan unggas, yang didalamnya termasuk juga ayam buras mengalami pertumbuhan yang konsisten. Berdasarkan analisis sebelumnya juga dapat disimpulkan bahwa hampir semua kecamatan memproduksi ayam buras dan merupakan salah satu komoditas unggulan dengan tipologi tinggi. Produksi hasil ternak dapat dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan peternak, meningkatkan gizi masyarakat, memperluas lapangan kerja, serta memberi dukungan kuat terhadap pengembangan perekonomian daerah. Disamping produk utama dari ayam seperti daging, dan telur, hasil turunan seperti bulu, kulit, dan tulang juga memiliki potensi yang besar dalam memberikan nilai tambah dari sektor peternakan. Pohon industri Ayam secara lebih detail dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Mata Rantai Industri Kelapa Sawit

Kelapa Sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang mempunyai peran penting bagi sub sektor perkebunan, baik di Kapuas Hulu maupun di kawasan agropolitan. Hilirisasi Kelapa Sawit akan memberikan manfaat dalam peningkatan pendapatan petani dan masyarakat secara umum, menciptakan nilai tambah di dalam negeri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, pengembangan sektor industri, dan untuk ekspor sebagai penghasil devisa negara. Meskipun memiliki bahan baku yang melimpah, perkembangan industri sawit di Indonesia saat ini masih rendah. Di saat Malaysia mampu mengolah CPO (minyak kelapa sawit) menjadi lebih dari 120 jenis produk bernilai tambah tinggi, Indonesia baru mampu mengolah hingga belasan produk. Hal ini khususnya akan menjadi potensi yang besar dalam pengembangan perkebunan sawit di wilayah KSK agropolitan.

Pemerintah terus mendorong pengembangan produk turunan CPO, baik untuk keperluan bahan baku industri pangan maupun non pangan. Produk pangan yang dapat dihasilkan dari CPO dan CPKO, seperti *emulsifier*, margarin, minyak goreng, *shortening*, susu full krim, konfeksioneri, *yogurt*, dan lain-lain. Sedangkan produk non pangan yang dihasilkan dari CPO dan CPKO, seperti *epoxy compound*, *ester compound*, lilin, kosmetik, pelumas, *fatty alcohol*, biodiesel, dan lain-lain. Menurut Didu (2003 dalam Kemenkeu, 2012), dari segi nilai tambah, apabila semakin jauh diversifikasi produk dilakukan akan memberikan nilai tambah yang signifikan. Produk level pertama Kelapa Sawit berupa CPO akan memberikan nilai tambah sekitar 30 persen dari nilai TBS. Pengolahan selanjutnya akan memberikan masing-masing nilai tambah berbasis TBS sebagai berikut: minyak goreng (50 persen), asam lemak (100 persen), ester (150-200 persen), surfaktan atau *emulsifier* (300-400 persen), dan kosmetik (600-1000 persen). Secara lebih detail, pohon industri sawit dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar IV.91 Pohon Industri Kelapa Sawit



Sumber: <http://www.kemenperin.go.id/pohon-industr>

4.6 ANALISIS KELEMBAGAAN

4.6.1 Analisis Kelembagaan KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu

Pada bagian ini dijelaskan mengenai analisis yang berhubungan dengan aspek kelembagaan dalam KSK Agropolitan Kapuas Hulu. Komponen analisis terdiri atas analisis terhadap harmonisasi perencanaan dan peraturan kebijakan yang dimiliki oleh Kabupaten Kapuas Hulu, dan analisis terhadap aktor-aktor yang berperan di wilayah dan lingkup KSK Agropolitan.

4.6.2 Analisis Harmonisasi Perencanaan dan Program Kabupaten Kapuas Hulu mengenai KSK Agropolitan

Analisis harmonisasi bertujuan untuk meninjau kesinambungan antara produk perencanaan dengan tujuan dari KSK Agropolitan. Tidak menutup kemungkinan konsep KSK Agropolitan tidak sejalan dengan cita-cita dan program yang dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu.

4.6.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2020

Pembentukan KSK Agropolitan di Kabupaten Kapuas Hulu memiliki implikasi pembangunan dan keruangan yang tidak sedikit. Terlebih jika pembentukan KSK Agropolitan diberlakukan dengan penyusunan Peraturan Daerah yang memiliki kekuatan hukum. Untuk itu, analisis harmonisasi peraturan dan kebijakan di Kapuas Hulu untuk mendukung KSK Agropolitan menjadi penting.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2020 tidak terdapat bagian yang secara spesifik memuat rencana mengenai KSK Agropolitan. Dalam kebijakan maupun strategi pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2020 juga tidak terdapat bagian yang menyebut secara spesifik rencana mengenai KSK Agropolitan.

Analisis lebih mendalam mengenai harmonisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2020 dengan Rencana KSK Agropolitan Kapuas Hulu dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel IV.114 Sinkronisasi Muatan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2020 dengan KSK Agropolitan

No	Komponen	Konten
1	Misi Pembangunan No 3	Memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya daerah yang berkelanjutan
2	Tujuan 2.4 , Meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan daya saing sektor pertanian , , Sasaran Urusan Pertanian	Menjadikan kegiatan pertanian sebagai prioritas untuk menumbuh kembangkan perekonomian daerah. <ul style="list-style-type: none"> • Sasaran yang dicapai adalah peningkatan produktivitas dan kualitas dari tanaman pangan seperti padi, jagung, ubi jalar, kacang tanah dan kacang hijau. Selain itu juga terdapat indikator untuk peningkatan cakupan pembinaan kelompok tani. • Selain itu juga terdapat sasaran peningkatan produktivitas dan produksi hasil peternakan yang menyasar ternak sapi, kambing dan babi.

No	Komponen	Konten
4	Tujuan 2.4 , Meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan daya saing sektor pertanian Sasaran Urusan Kehutanan dan kebun	Terdapat pembahasan mengenai upaya menjaga kelestarian hutan baik di hutan konservasi maupun kelestarian hutan rakyat. Capaian yang diharapkan termasuk peningkatan produksi dan produktivitas hasil hutan dan perkebunan

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2020

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2020 tidak disebutkan spesifik mengenai KSK Agropolitan Kapuas Hulu. Fokus tujuan yang diangkat dalam pembahasan hanya terbatas pada peningkatan produksi dan produktivitas. Padahal, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing juga dapat dilaksanakan dengan memperpanjang rantai produksi dan pengadaan nilai tambah komoditas dengan adanya industri pengolahan dengan inovasi. Pelibatan masyarakat lokal dalam kegiatan perekonomian di dalam kawasan juga tidak dimuat dalam dokumen kebijakan yang telah di kaji.

Salah satu komponen penting dari KSK Agropolitan adalah keberadaan industri pengolahan di dalam kawasan untuk meningkatkan nilai komoditas. Keberadaan industri pengolahan harus didukung dengan kapasitas masyarakat yang siap untuk melakukan aktivitas pengolahan dalam bentuk industri, baik pada skala rumahan, maupun skala menengah dan skala besar. Sayangnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2020 tidak terdapat tujuan yang membahas peningkatan kapasitas dari masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan dan terserap dalam kegiatan industri pengolahan.

Terdapat dua komponen utama dari KSK Agropolitan yang belum didukung dan tertuang dalam rencana pembangunan yang dimiliki oleh Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu kebijakan dan program yang mendukung munculnya industri pengolahan, dan kebijakan dan program yang mendorong peningkatan kapasitas masyarakat untuk siap menjadi pelaku dalam kegiatan industri pengolahan yang merupakan salah satu aktivitas kunci dalam sebuah kawasan agropolitan.

4.6.2.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu 2014-2034

Salah satu kebijakan penataan ruang yang diatur dalam RTRW Kabupaten Kapuas Hulu 2014-2034 adalah pengembangan kawasan agropolitan, sesuai dengan tujuan penataan ruang daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Kapuas Hulu 2014-2034, yaitu

“Mewujudkan daerah di Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, nyaman, produktif melalui pengembangan ekowisata yang harmonis dengan agropolitan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan daerah tertinggal dengan pola pembangunan berkelanjutan yang berwawasan konservasi”.

Strategi pengembangan agropolitan, sesuai dengan kandungan RTRW Kabupaten Kapuas Hulu 2014-2034 terdiri atas tiga poin utama. Yang pertama adalah mengembangkan kawasan peruntukan (pertanian, perkebunan, perikanan) dengan mewujudkan praktik

manajemen yang baik, mengembangka kegiatan industri pengoalahan, perdagangan dan jasa, serta mengembangkan sarana prasaran pendukung kegiatan agropolitan.

Karena konsep KSK Agropolitan yang dikembangkan di Kabupaten Kapuas Hulu adalah *Green Agropolitan*, atau secara sederhana kawasan Agropolitan yang berorientasi pada nilai-nilai lingkungan, maka strategi yang merupakan penurunan dari kebijakan pengembangan instrumen ekonomi yang berbasis ekosistem juga dapat disertakan sebagai bagian yang mendukung KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu. Strategi tersebut terdiri atas:

1. Membangun pemahaman bersama tentang instrumen ekonomi berbasis ekosistem kepada seluruh stake holder;
2. Membangun skema-skema insentif jasa lingkungan;
3. Mengembangkan kegiatan ekowisata;
4. Mengembangkan objek daerah tujuan wisata yang bersinergi dengan sektor lainnya; dan
5. Membangun sistem informasi penataan ruang terpadu.

Kombinasi dari kedua set strategi di atas adalah strategi pengembangan yang sesuai dengan kaidah pengembangan *Green Agropolitan*, atau Agropolitan yang berwawasan lingkungan, mengingat prinsip-prinsip utama dari Agropolitan adalah pengembangan sektor pertanian (dalam arti luas) yang ramah lingkungan berbasis daya dukung lingkungan yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan berhirarki yang saling terhubung dengan berbagai kegiatan pertanian dan penunjang dengan didukung infrastruktu yang memadai.

Selain itu juga terdapat strategi pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan agropolitan, yaitu pengembangan sistem transportasi terpadu yang terdiri dari integrasi transportasi darat,air dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas eksternal maupun internal guna mendukung kegiatan ekowisata dan agropolitan.

Berdasarkan muatan RTRW Kabupaten Kapuas Hulu 2014-2034, terdapat Kawasan Strategis, yang salah satunya adalah Kawasan Agropolitan Bunut Hulu dan Kawasan Agropolitan Slat Hilir dan sekitarnya. Kedua kawasan strategis ini merupakan kawasan strategis yang memiliki kepentingan dari sudut kepentingan ekonomi.

Program Utama yang telah dicanangkan dalam RTRW Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034, yang berhubungan dengan KSK Agropolitan dapat disimak dalam tabel berikut.

Tabel IV.115 Program yang berhubungan dengan Agropolitan dalam RTRW Kabupaten Kapuas Hulu 2014-2034

No	Program	Lokasi	Instansi
1	Perencanaan dan Penetapan Kawasan Agroindustri	Putusibau Utara, Semitau, Nanga Tepuai, dan Badau	Dinas Pertanian, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Kawasan Strategis Kabupaten Kepentingan Ekonomi (Agropolitan Silat Hilir)	Silat Hilir	Dinas Pertanian, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Kapuas Hulu 2014-2034

Berdasarkan tinjauan terhadap kebijakan kewilayahan yang berlaku di Kabupaten Kapuas Hulu dapat disimpulkan bahwa Kawasan Agropolitan Kapuas Hulu sudah memiliki dasar hukum dan terencana dalam bentuk rencana tata ruang wilayah. Pengembangan lebih lanjut mengenai Kawasan Agropolitan dengan konsep *Green Agropolitan* dapat direncanakan dalam dokumen rencana sektoral yang mendukung implementasi konsep *Green Agropolitan*. Beberapa kaidah sektoral yang sebaiknya diupayakan dibahas pada bagian berikutnya.

4.6.2.3 Analisis Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berhubungan dengan KSK Agropolitan

Selain kebijakan yang bersifat kewilayahan, dukungan dari kebijakan yang bersifat sektoral juga dibutuhkan dalam implementasi Konsep *Green Agropolitan* di Kawasan Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan identifikasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berlaku di Kabupaten Kapuas Hulu, diketahui beberapa peraturan yang memiliki keselerasan dengan implementasi konsep *Green Agropolitan*, antara lain

- Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Perkebunan Secara Berkelanjutan
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelelangan Ikan
- Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Konservasi Danau Sentarum
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- Peraturan Bupati No 13 Tahun 2016 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian oleh Perusahaan

Dalam implementasi konsep *Green Agropolitan* di Kawasan Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu dibutuhkan seperangkat peraturan sektoral yang berfungsi untuk mendukung implementasi konsep *Green Agropolitan*. Setidaknya, dibutuhkan peraturan sektoral mengenai

- Kebijakan mengenai kemandirian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dalam wilayah guna mengurangi ketergantungan
- Kebijakan peningkatan produksi pertanian yang berkelanjutan
- Kebijakan peningkatan kemampuan penetrasi pasar
- Kebijakan mengenai peningkatan nilai tambah komoditas pertanian dengan memperhatikan lingkungan
- Kebijakan mengenai partisipasi komunitas lokal dalam pengembangan pertanian dan pengelolaan kawasan agropolitan
- Kebijakan mengenai pertanian ramah lingkungan, terutama dalam rangka transformasi masyarakat
- Kebijakan mengenai inovasi, terutama kapasitas dan kemampuan masyarakat untuk melakukan inovasi
- Kebijakan mengenai pengurangan ketimpangan dan peningkatan kesejahteraan

- Kebijakan mengenai upaya peningkatan resiliensi ekosistem, siklus hidrologi, dan valuasi jasa lingkungan
- Kebijakan untuk meminimalisir konflik kepentingan dan tumpang tindih kebijakan dalam pengelolaan Kawasan Agropolitan

4.6.2.4 Analisis Program yang Berhubungan dengan KSK Agropolitan

Implementasi konsep Green Agropolitan di Kawasan Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu hanya akan tercapai apabila didukung oleh serangkaian program-program yang memenuhi kaidah Green Agropolitan. Analisis ini bertujuan untuk meninjau program-program Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang berhubungan dengan implementasi Green Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan Kehutanan pada sub-urusan pengelolaan dan pemanfaatan berada dalam lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi. Untuk itu, perlu ditinjau bagaimana arahan dan program yang diamanatkan oleh Provinsi Kalimantan Barat terhadap Kabupaten Kapuas Hulu dalam urusan pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Berdasarkan kajian terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan urusan kehutanan lebih diarahkan pada upaya peningkatan fungsi dan manfaat sumber daya hutan secara maksimal dan lestari yang mencakup aspek produksi, ekologi dan sosial dengan memberikan peranan yang seluas-luasnya kepada masyarakat lokal, serta mengendalikan gangguan keamanan hutan dan kerusakan kawasan hutan. Untuk itu strategi yang dikembangkan adalah memantapkan keberadaan kawasan hutan, mengoptimalkan pemanfaatan hutan alam dan hutan tanaman, merehabilitasi hutan dan lahan kritis, memberdayakan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, meningkatkan produksi hasil hutan kayu dan non kayu, mengembangkan industri primer hasil hutan kayu, mengoptimalkan dana bagi hasil sektor kehutanan, mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan lindung dan konservasi, meningkatkan pengamanan dan pengendalian kerusakan hutan, serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

4.6.3 Analisis Aktor Kawasan Agropolitan

Pada bagian ini dijelaskan analisis mengenai pihak-pihak yang berperan dalam pengembangan KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu. Pihak-pihak yang dianalisis tidak hanya berasal dari pihak Pemerintah Daerah, namun juga dari pihak lain seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perusahaan dan Penyandang Dana, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Adat, dan pihak lain yang memiliki peranan dalam KSK Agropolitan Kapuas Hulu. Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, aktor-aktor dalam kawasan Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu adalah;

1. Pemerintah Pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
3. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
4. Pemerintah Kecamatan di masing-masing kecamatan

5. Pemerintah Desa di masing-masing desa
6. Perusahaan
7. Lembaga Adat
8. Lembaga Swadaya Masyarakat
9. Organisasi Non-Pemerintah

Masing-masing aktor di dalam kawasan Agropolitan memiliki perilaku dan perannya masing-masing dalam Kawasan Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu. Aktor-aktor tersebut berhubungan satu lain dengan berbagai peran dan kepentingan. Peranan, fungsi dan hubungan aktor berbeda sesuai dengan urusan yang sedang dilaksanakan.

4.6.3.1 Analisis Aktor Kawasan Agropolitan berdasarkan Urusan

Urusan yang dominan dalam konteks pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu adalah urusan perkebunan, urusan kehutanan dan urusan pelestarian lingkungan. Masing-masing urusan memiliki dinamikanya tersendiri. Untuk itu dibutuhkan analisis mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam tiap-tiap urusan.

1. Analisis Aktor Urusan Perkebunan

Urusan perkebunan merupakan isu yang paling utama dalam Kawasan Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu mengingat keberadaan perkebunan sawit yang masif di dalam kawasan Agropolitan. Kebiasaan dan kecenderungan masyarakat lokal untuk melakukan aktivitas perkebunan, dibandingkan dengan aktivitas pertanian, juga menjadi alasan lain yang menyebabkan urusan perkebunan merupakan urusan paling dominan dalam Kawasan Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu. Peran dan fungsi aktor dalam urusan perkebunan dalam Kawasan Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu adalah;

- **Kementrian Pertanian**
Dalam urusan Perkebunan, Pemerintah Pusat Indonesia diwakili oleh Kementrian Pertanian, Direktorat Perkebunan yang memiliki kewenangan dalam hal-hal mendasar seperti penentuan standard dan pengawasan terhadap mutu perkebunan (urusan bibit, sertifikasi), pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha (pendaftaran, penerbitan rekomendasi, penyelenggaraan varietas tanaman. Kepentingan dari Direktorat Jenderal Perkebunan adalah peningkatan produktifitas dan kualitas produksi dari kegiatan perkebunan di wilayah-wilayah perkebunan di Indonesia. Oleh karena itu, regulasi yang disusun oleh Kementerian Pertanian, melalui Direktorat Jenderal Perkebunan berhubungan dengan upaya peningkatan produktifitas dan integrasi produksi, serta peningkatan teknologi untuk produksi.
- **Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat**
Dalam urusan perkebunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, melalui dinas yang menaungi urusan pertanian dan perkebunan memiliki peran dalam penerbitan usaha pertanian/perkebunan lintas kabupaten/kota, pengawasan peredaran sarana pertanian/perkebunan, dan penerbitan izin usaha. Kepentingan dari
- **Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu**

Beberapa peranan dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang berhasil teridentifikasi dalam urusan perkebunan antara lain, menyusun peraturan dan perencanaan pembangunan skala Kabupaten, menyusun dan melaksanakan program-program pembangunan dalam lingkup kabupaten, menyediakan wadah untuk aktivitas ekonomi seperti sarana prasarana perdagangan dan moda perangkutan. Selain itu, meski belum optimal, upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam kegiatan perkebunan sudah mulai hadir seperti penyuluhan, pembentukan kelompok tani/usaha perkebunan masyarakat. Selain itu juga terdapat peranan dalam pendistribusian sumber bantuan pendanaan untuk kegiatan tani/dagang serta bantuan alat-alat pertanian dan bibit serta pupuk

- Perusahaan Perkebunan

Perusahaan perkebunan memiliki peranan paling besar dalam kegiatan perkebunan di Kawasan Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam konteks perkebunan sawit, perusahaan sawit, selain memberikan lapangan pekerjaan, juga menyediakan kesempatan untuk bermitra dengan perusahaan dengan mekanisme kebun plasma-inti. Hanya saja, berdasarkan informasi yang dihimpun dari Focus Group Discussion (FGD), mekanisme plasma-inti ini banyak menimbulkan persoalan. Timbulnya persoalan ini, selain karena ketidakjelasan mekanisme dan aturan main yang ditetapkan oleh perusahaan, juga disebabkan oleh kurangnya kapasitas masyarakat dalam melakukan kerjasama dengan perusahaan.

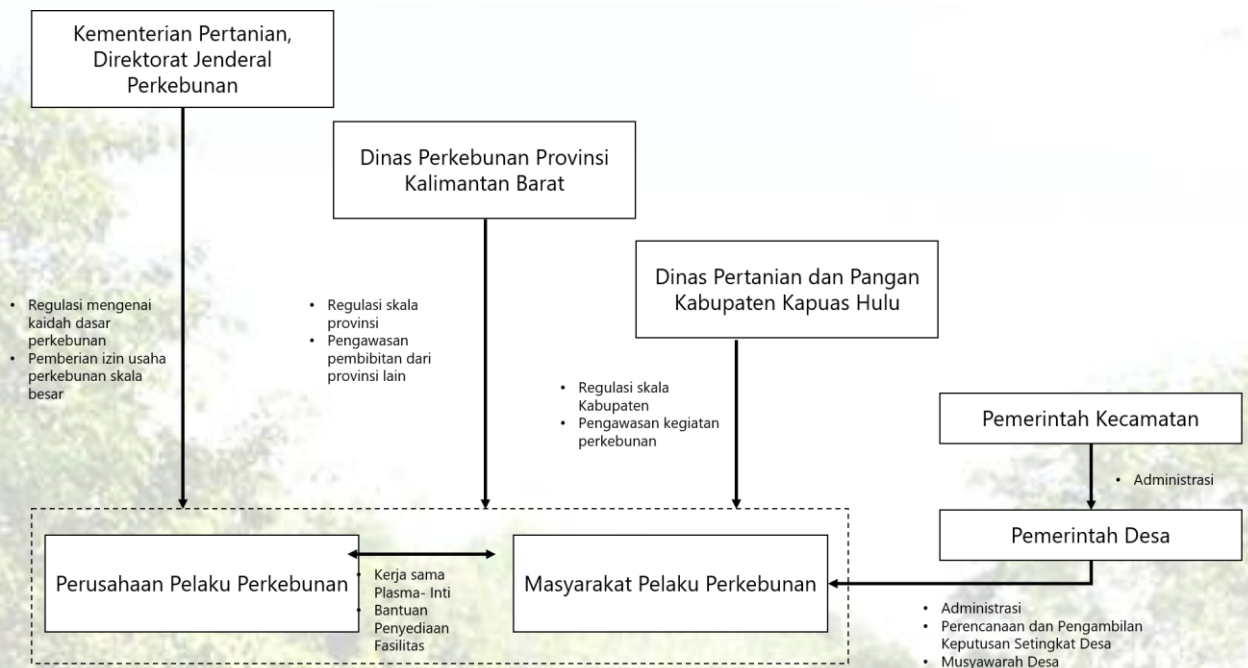
- Masyarakat

Dalam urusan perkebunan, masyarakat lokal berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Peran masyarakat lokal dalam urusan perkebunan terbatas pada pekerja di perusahaan perkebunan. Meski terdapat beberapa kelompok masyarakat atau individu yang memiliki kebun secara pribadi, mayoritas perkebunan dikuasai oleh perusahaan.

- Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa

Salah satu syarat yang diperlukan oleh perusahaan perkebunan saat akan membuka lahan perkebunan dan memulai penanaman bibit perkebunan adalah izin yang diberikan oleh masyarakat. Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa adalah institusi yang dianggap mewakili aspirasi masyarakat untuk memberikan izin dan menarik aspirasi terkait dengan usaha perkebunan. Dalam praktiknya, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa berada dalam posisi yang tidak berdaya, sehingga apapun keputusan yang diambil oleh perusahaan perkebunan tidak melalui pertimbangan dari Pemerintah Kecamatan atau Pemerintah Desa.

Gambar IV.92 Skema Aktor Urusan Perkebunan Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber : Hasil Analisis, 2017

2. Analisis Aktor Urusan Kehutanan

Luasnya wilayah hutan di pulau Kalimantan menjadi salah satu alasan mengapa urusan kehutanan menjadi urusan selanjutnya yang menjadi pembahasan utama dalam Kawasan Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, status sebagai Kabupaten Konservasi, yang merupakan lokasi dari dua Taman Nasional, yaitu Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki area hutan dan hutan lindung yang sangat luas. Beberapa aktor yang berhasil diidentifikasi peran dan interestnya, antara lain

- Pemerintah Pusat, melalui Kementrian Kehutanan
Peran dan kepentingandari Kementrian Kehutanan antara lain inventerisasi dan penetapan kawasan hutan, perencanaan rencana hutan, penetapan status hutan, penyelenggaraan pembentukan dan penerbitan izin pengelolaan hutan. Dari aspek pengelolaan hutan, Kementrian Kehutanan juga memiliki peranan dalam rehabilitasi dan perlindungan hutan, konservasi, serta pengawasan terhadap pengurusan hutan. Kekuatan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menjaga kepentingannya
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam urusan kehutanan memiliki peranan dalam pelaksanaan tata kehutanan, kecuali dalam hutan konservasi. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi merupakan peranan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, seperti pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi dibawah 6000 meter kubik pertahun, dan hasil hutan bukan kayu.

Selain itu, pemerintah Provinsi juga memiliki peranan dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan seperti pemberian penyuluhan.

- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten tidak memiliki kewenangan dalam mengelola wilayah yang termasuk dalam deliniasi hutan, baik hutan lindung maupun hutan produksi. Namun, Pemerintah Kabupaten memiliki peranan untuk merencanakan dan mengatur wilayah yang bersebalahan dengan wilayah hutan, terutama hutan lindung agar tidak memberikan eksternalitas negatif terhadap wilayah hutan.

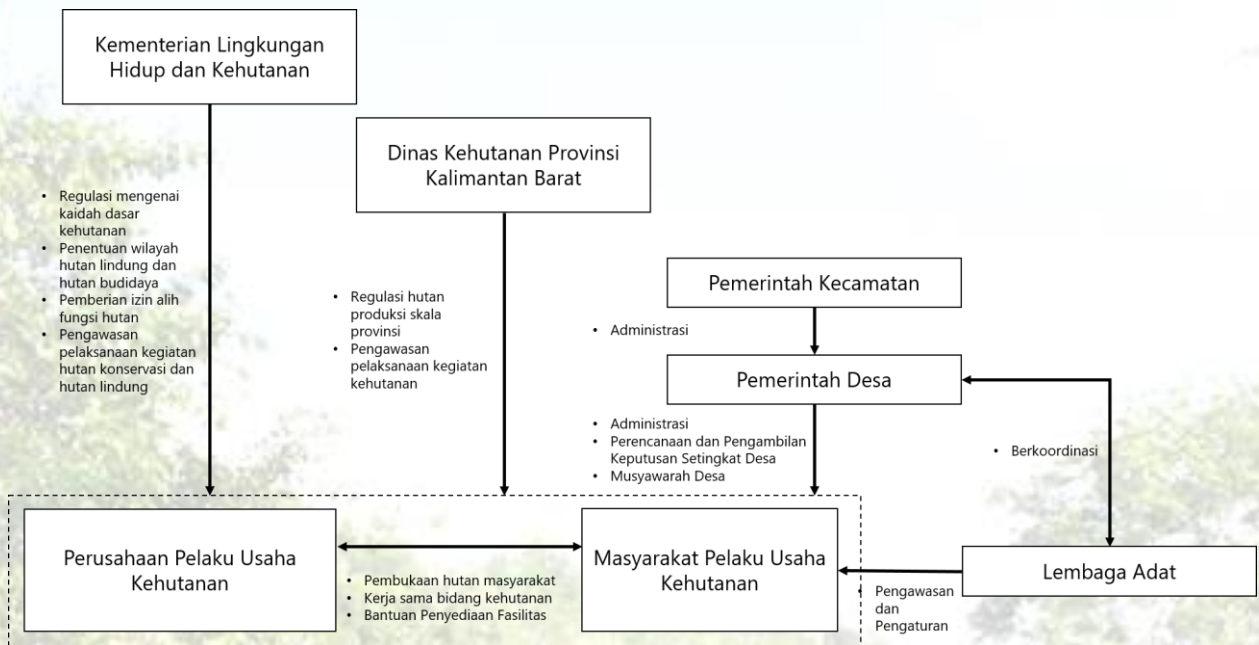
- Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 83 Tahun 2016 mengenai Bentuk Pengelolaan Hutan, masyarakat berhak untuk mengelola beberapa wilayah hutan yang ditetapkan sebagai hutan rakyat, hutan adat dan hutan desa. Tujuan dari pengelolaan tersebut adalah untuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Seperti halnya dalam urusan perkebunan, peranan maupun keterlibatan masyarakat tidak begitu kuat karena tertekan oleh kepentingan aktor-aktor lain yang memiliki kekuatan lebih dalam urusan kehutanan. Berdasarkan observasi masyarakat, juga terdapat praktik pembakaran hutan untuk pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dengan alasan ekonomi, sehingga menimbulkan kebakaran hutan dan pencemaran lingkungan.

- Perusahaan pengusaha hutan

Kementrian yang menaungi urusan kehutanan memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan usaha dalam bidang kehutanan. Izin tersebut diberikan dalam bentuk Hak Pengelolaan Hutan. Adanya perusahaan yang beroperasi dalam perusahaan hutan ini di satu sisi memberikan dampak perekonomian terhadap masyarakat, meski dalam bentuk yang terbatas karena hanya melibatkan masyarakat sebagai pekerja. Di sisi lain, adanya kegiatan perusahaan hutan ini menyebabkan degradasi lingkungan yang tidak sedikit, terlebih mengingat peranan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki fungsi konservasi.

Gambar IV.93 Skema Aktor Urusan Kehutanan



Sumber : Hasil Analisis, 2017

3. Urusan Pelestarian Lingkungan

Sebagai salah satu Kabupaten Konservasi, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi, isu pelestarian dan konservasi lingkungan merupakan isu yang penting dalam Kabupaten Kapuas Hulu. Adanya penetapan Kawasan Agropolitan Kapuas Hulu pada dasarnya bertentangan dengan semangat konservasi dan pelestarian lingkungan yang diinginkan. Namun, kebutuhan untuk peningkatan kesejahteraan juga tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, adanya peranan aktor yang jelas dalam upaya pelestarian lingkungan perlu untuk dikaji. Berdasarkan identifikasi aktor dalam isu pelestarian lingkungan, berikut penjabaran aktor dan peranannya

- Adat dan Kelembagaan Adat

Peranan terbesar dalam upaya konservasi dan pelestarian lingkungan berasal dari nilai-nilai adat yang masih dipegang teguh oleh komunitas adat di Kawasan Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu. Baik adat, maupun kelembagaan adat memiliki kepentingan untuk menjaga kelestarian lingkungan di wilayahnya. Kepercayaan dan upaya pelestarian adat akan sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan karena posisi lingkungan sangat tinggi dalam kacamata adat. Sayangnya, kepentingan tersebut tidak diikuti dengan kemampuan atau kekuatan yang cukup mampu untuk memastikan keberlangsungan pelestarian berlangsung dengan baik. Nilai adat tersebut memang diperkuat dengan masih berjalannya kelembagaan adat sebagai salah satu kelembagaan yang berfungsi dalam tata kelola masyarakat di Kawasan Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu. Namun, upaya pelestarian tersebut tidak sepenuhnya berjalan karena kalah bersaing dengan kepentingan lain, misalnya pembukaan hutan adat untuk kegiatan budidaya.

- Masyarakat Lokal

Meskipun nilai-nilai adat masih berlaku dan kental di tengah masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa juga terdapat tindakan-tindakan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Kepentingan yang paling utama dari masyarakat lokal secara umum adalah kepentingan ekonomi. Tentu saja kepentingan ini akan bergesekan dengan upaya pelestarian alam. Hal yang paling umum terjadi adalah pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Bentuk lain adalah perambahan hutan lindung untuk pemenuhan ekonomi. Adanya praktik perambahan hutan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi ini dilatarbelakangi ketidaktahuan masyarakat terhadap hutan lindung, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Adanya praktik-praktik masyarakat untuk membuka lahan tanpa cukup memperhatikan isu pelestarian alam disebabkan oleh kurangnya fungsi pengawasan dan pelestarian terhadap alam yang diimban oleh dan kelembagaan adat.

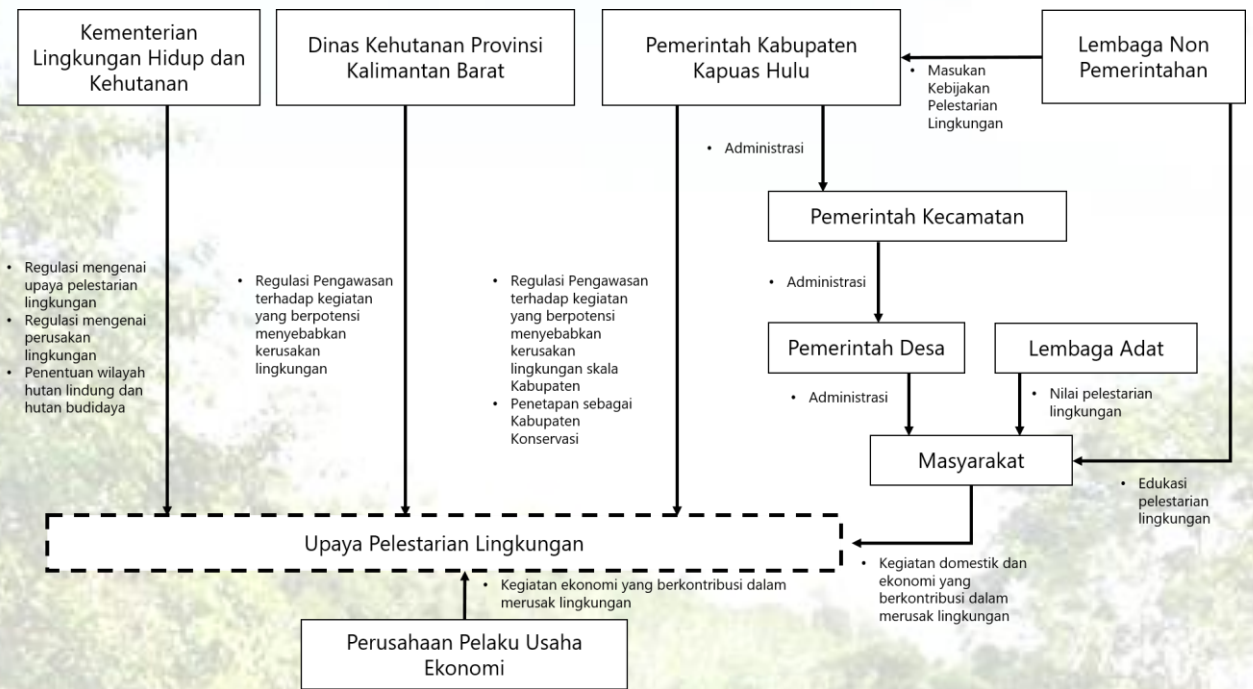
- Lembaga Non Pemerintah

Fungsi edukasi terhadap masyarakat untuk melestarikan lingkungan didominasi oleh lembaga non pemerintah. Fungsi pemerintah, baik dari level Kabupaten, hingga Pemerintah Pusat, tidak melaksanakan dan menyebarkan paham pelestarian lingkungan secara intensif. Fungsi tersebut kemudian dilaksanakan oleh komunitas-komunitas, hingga yayasan yang memiliki perhatian khusus terhadap upaya pelestarian lingkungan. Kepentingan utama dari lembaga non pemerintah ini adalah mendorong upaya pelestarian alam, baik dari tingkat individu dan komunitas, hingga dalam tataran kebijakan. Dalam Kawasan Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu sendiri terdapat beberapa Lembaga Non Pemerintah yang beraktivitas mengupayakan kesadaran pentingnya pelestarian lingkungan, sembari memberikan pendampingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga memberikan masukan terkait upaya pelestarian lingkungan.

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki kepentingan untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan cara menetapkan wilayah hutan lindung dan wilayah budidaya. Untuk mencapai kepentingannya tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberlakukan seperangkat aturan untuk mendorong upaya pelestarian lingkungan dalam praktik sehari-hari di kawasan budidaya, maupun membentuk perwakilan berupa Balai Taman Nasional untuk menjaga wilayah taman nasional.

Gambar IV.94 Skema Aktor Urusan Pelestarian Lingkungan



Sumber : Hasil Analisis, 2017

BAB V PENUTUP

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada masing-masing aspek, yaitu aspek fisik dan lingkungan, aspek sosial budaya dan kependudukan, aspek infrastruktur, aspek ekonomi, dan aspek kelembagaan, didapatkan kondisi-kondisi yang dapat dikelompokkan sebagai potensi dan kendala wilayah dalam pengembangan kawasan agropolitan. Bab ini, akan menjelaskan potensi dan kendala pengembangan yang didapatkan tersebut. Pada bagian akhir bab ini akan dihasilkan isu-isu strategis berdasarkan potensi masalah tersebut, yang akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana tata ruang Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Agropolitan di Kabupaten Kapuas Hulu.

5.1 Potensi Wilayah

Berdasarkan temuan-temuan yang telah didapatkan pada masing-masing aspek yang telah dibahas pada bab sebelumnya, terdapat kondisi-kondisi yang merupakan potensi dalam pengembangan kawasan agropolitan. Potensi-potensi tersebut berupa potensi fisik lingkungan, potensi sosial budaya dan kependudukan, potensi ekonomi, potensi sarana dan prasarana, dan potensi kelembagaan. Kondisi-kondisi yang akan dipaparkan pada sub bab selanjutnya dianggap sebagai kondisi eksisting yang dapat mendukung pengembangan kawasan agropolitan.

Fisik dan Lingkungan:

Kawasan KSK Agropolitan Kapuas Hulu memiliki potensi fisik dan lingkungan sebagai berikut: daya tampung yang tinggi, kemampuan lahan yang tinggi, kawasan memiliki banyak air permukaan, ketersediaan lahan untuk dikembangkan masih tinggi, serta arahan ketinggian bangunan dan arahan rasio lahannya tinggi. Tingkat daya tampung yang tinggi ditunjukkan dari kemampuan lahan dan air dalam mendukung kegiatan masyarakat, baik itu kegiatan domestik maupun penunjang ekonomi. Arahan rasio pengembangan lahan dan arahan ketinggian bangunan memiliki klasifikasi sangat tinggi, tinggi, dan sedang walaupun untuk pengembangan agropolitan tidak membutuhkan area terbangun yang mendominasi kawasan. Dilihat dari tutupan lahannya, KSK agropolitan masih memiliki kawasan hutan primer dan sekunder yang berfungsi untuk melindungi daerah bawahannya walaupun tidak berstatus lindung. Banyaknya hutan termasuk hutan gambut dapat bermanfaat sebagai tata guna air dan ekowisata alam. Terdapat pula potensi pengembangan agroforestry dan komoditas HHBK di area KSK Agropolitan karena memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi fisik berpotensi untuk dikembangkan untuk menjadi kawasan agropolitan. Namun untuk Kecamatan Empanang dan Kecamatan Semitau, kawasan hutannya perlu di lindungi karena memiliki peran konservasi air bagi daerah sekitar.

Sosial, Budaya, dan Kependudukan:

Dilihat dari segi pendidikan, masyarakat di KSK Agropolitan sudah menyadari pentingnya pendidikan dan memiliki keinginan yang tinggi untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, masyarakat di KSK Agropolitan juga memiliki antusias yang tinggi untuk mencoba hal baru. Masyarakat tidak segan untuk mencoba hal baru dan beralih dari kebiasaan yang selama ini mereka kerjakan, namun tetap berada pada batas nilai dan norma yang diakui oleh masyarakat. Masyarakat memiliki sifat bekerja keras dalam bekerja dan juga cukup produktif. Hal ini dapat menjadi modal bagi pengembangan kapasitas sumber daya manusia di KSK Agropolitan. Dilihat dari interkasi sosialnya, masyarakat memiliki budaya kerjasama dan gotong royong yang masih terjaga. Secara internal, masyarakat memiliki ikatan yang kuat namun juga masyarakat terbuka dan mudah beradaptasi terhadap perubahan. Selain itu, masyarakat memiliki nilai toleransi yang tinggi. Wilayah studi memiliki keanekaragaman suku yang tinggi namun masyarakat dapat hidup secara harmonis dan berdampingan. Masyarakat juga memiliki kearifan lokal yang mendukung pelestarian sumber daya alam. Hal ini menjadi potensi untuk dapat mengembangkan agropolitan yang ramah lingkungan.

Ekonomi:

Dari sisi ekonomi, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor unggulan di Kabupaten Kapuas Hulu, dimana sejalan dengan rencana pengembangan agropolitan. Kemudian secara daya tarik investasi, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki daya saing yang tinggi dibandingkan wilayah lainnya di Provinsi Kalimantan Barat, dimana sebagian besar investasi yaitu pada sektor perkebunan. Hal ini dapat menjadi modal dalam pengembangan wilayah KSK Agropolitan. Dari sisi komoditas unggulan, terdapat beberapa komoditas yang tergolong sangat unggul dimana memiliki dominasi tinggi di tingkat Kabupaten, tidak ada persaingan, serta memiliki pasar yang luas, yaitu: kacang tanah, kacang kedelai, kelapa sawit, dan durian. Komoditas-komoditas tersebut berpotensi besar untuk dikembangkan dan menjadi penggerak perekonomian wilayah. Di sisi lain, masyarakat memiliki banyak komoditas yang unggul yang mencerminkan bahwa terjadi diversifikasi produk di wilayah KSK Agropolitan yang berpotensi untuk menjadi komoditas unggulan alternatif di masa yang akan datang, khususnya yang memiliki pasar hingga tingkat nasional dan internasional. Komoditas-komoditas tersebut yaitu: padi, kelapa, karet, cabai, kangkung, bayam, jambu biji, rambutan, dan ikan mas. Di sisi lain, juga terdapat produk-produk unggulan yang memiliki ciri khas daerah, seperti beras lokal 'raja uncah', ikan arwana red, kerupuk basah, dan sebagainya yang mampu menjadi potensi pengembangan di masa yang akan datang.

Kelembagaan:

Keberadaan peraturan di level nasional sudah memungkinkan Kabupaten Kapuas Hulu untuk melaksanakan sebuah Kawasan Strategis dengan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi, namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Peraturan tersebut, setidaknya, bisa menjadi landasan untuk menterjemahkan dan menyusun seperangkat peraturan yang lebih spesifik guna mewujudkan konsep Green Agropolitan dalam Kawasan

Strategis Kabupaten Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Keberadaan Peraturan Daerah sebagai landasan pengembangan Kawasan Agropolitan merupakan modal awal yang strategis untuk mendorong implementasi konsep yang perlu diikuti dengan menyusun seperangkat peraturan dan tata kelola yang lebih spesifik dan teknis mengenai implementasi konsep Green Agropolitan. Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi juga merupakan bentuk komitmen dari Pemerintah Daerah untuk mengupayakan pelestarian lingkungan. Modal ini perlu dilanjutkan dengan membentuk konsep pengembangan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan, namun tetap memberikan kesempatan untuk peluang-peluang ekonomi dalam peningkatan kesejahteraan. Selain itu, keberadaan kelembagaan adat yang masih cukup kuat di antara masyarakat merupakan salah satu keuntungan dalam upaya pelestarian lingkungan dan menjaga relasi antar masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Keberadaan adat dan kelembagaan adat harus diperhatikan agar tidak saling tumpang tindih dengan peraturan yang diberlakukan untuk mewujudkan Konsep Green Agropolitan di Kawasan Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu.

Infrastruktur:

Sebagai kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan agropolitan hijau terdapat potensi-potensi yang dapat mendukung pengembangannya. Pertanian basah yang berkembang di beberapa kawasan seperti di Kecamatan Hulu Gurung dan Kecamatan Pengkadan telah didukung oleh irigasi walaupun tidak seluruh irigasi belum dimanfaatkan dengan maksimal karena kerusakan bangunan irigasi. Selain itu, potensi lain yang dimiliki untuk pengembangan kegiatan pertanian adalah adanya embung yang memiliki volume yang cukup besar yang berlokasi di Desa Mubung, Kecamatan Hulu Gurung. Potensi lain adalah adanya kawasan yang telah menjadi simpul-simpul yang dapat menghubungkan kawasan internal dengan kawasan eksternal seperti Kabupaten Sintang dan Kabupaten Badau. Kawasan tersebut adalah kawasan perkotaan Nanga Silat di Kecamatan Silat Hilir. Terkait dengan kebutuhan dasar, fisik bangunan sarana pendidikan dan kesehatan sudah tersebar diseluruh kecamatan. Kemudian, sudah berkembangnya pemanfaatan energi alternatif seperti mikrohidro yang berkembang di Desa Mubung, Kecamatan Hulu Gurung.

5.2 Kendala Wilayah

Selain terdapat kondisi-kondisi yang dianggap sebagai potensi dalam pengembangan kawasan agropolitan, pada analisis-analisis yang telah dilakukan sebelumnya juga ditemukan kondisi yang dianggap sebagai kendala dalam pengembangan kawasan Agropolitan Silat Hilir. Sama halnya dengan potensi wilayah, kendala wilayah ini akan dibahas ke dalam beberapa aspek, yaitu kendala fisik dan biodiversitas, kendala sosial, budaya, dan kependudukan, kendala ekonomi, kendala sarana dan prasarana, dan yang

terakhir adalah aspek kelembagaan. Kendala-kendala dalam pengembangan kawasan agropolitan tersebut akan dibahas dalam sub subbab selanjutnya.

Fisik dan Lingkungan:

Kawasan KSK Agropolitan Kapuas Hulu memiliki permasalahan fisik dan lingkungan yang sangat beragam yang terjadi di berbagai dimensi fisik dan lingkungan. Masalah - masalah yang dihadapi adalah kualitas air permukaan yang buruk; terdapat ancaman bencana banjir; kawasan mengalami masalah kekeringan; pencemaran sumber air bersih seperti sungai, danau, dan air tanah akibat limbah perusahaan dan limbah rumah tangga; erosi, sedimentasi, pendangkalan, dan penurunan debit sungai; berkurangnya produksi ikan air tawar tangkap; adanya kebakaran lahan; penurunan biodiversitas; dan penurunan jasa lingkungan; dan konflik pengembangan lahan. Kawasan KSK dilewati oleh sungai Kapuas dan anak-anak sungainya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan oleh penduduk sekitar. Namun, kualitas air di kebanyakan sungai masih tergolong buruk karena adanya pencemaran lingkungan yang juga berpengaruh pada populasi ikan di sungai. Pencemaran tidak hanya terjadi dalam skala kecil dari limbah rumah tangga, namun juga dari perusahaan perkebunan sawit. Pencemaran juga berperan pada menurunnya kualitas tanah yang berdampak pada kesuburan tanah pertanian. Pengembangan lahan yang telah mengantongi izin ataupun ilegal berupa aktivitas pertambangan dan perkebunan di daerah hulu dan kawasan hutan juga memberikan dampak negatif pada daerah hilir dan sekitarnya. Ditambah lagi dengan kebiasaan masyarakat yang membuka lahan pertanian dan perkebunan dengan dibakar. Pengembangan lahan ini memperparah erosi, pendangkalan, dan banjir yang terjadi di kawasan KSK. Selain itu, hilangnya kawasan hutan mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati dan kesulitan air bersih. Masalah – masalah ini perlu menjadi perhatian dalam analisis gap dan juga menjadi perhatian dalam pembuatan dokumen rencana. Terutama masalah – masalah lingkungan ini akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang ada di kawasan dan juga akan mempengaruhi kawasan pertanian yang nantinya akan dikembangkan.

Sosial, Budaya, dan Kependudukan:

Kesejahteraan masyarakat di wilayah studi masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kemiskinan di Kabupaten Kapuas Hulu yang cukup tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat. Kantong – kantong kemiskinan dan ketimpangan yang tinggi terkonsentrasi pada daerah yang dikuasai oleh perusahaan sawit. Hal ini menunjukkan bahwa masuknya perusahaan sawit belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Faktor lainnya yang berperan dalam rendahnya kemiskinan masyarakat di wilayah studi ialah kualitas SDM yang masih rendah. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menjadi kendala dalam pengembangan KSK Agropolitan. Faktor ekonomi serta kurangnya akses masyarakat terhadap informasi merupakan beberapa hal yang berkontribusi terhadap rendahnya pendidikan masyarakat. Selain itu, keahlian dan keterampilan masyarakat dalam bertani masih rendah. Masyarakat belum menggunakan teknik budidaya dan teknologi pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Masyarakat juga belum mengenal sistem agribisnis dimana masyarakat tidak terbiasa memasarkan hasil komoditas mereka atau dapat dikenal dengan istilah subsisten.

Oleh karenanya, masyarakat tidak mampu melihat peluang pasar, ditambah dengan ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses pasar. Semua hal tersebut memberikan pengaruh pada prestasi komoditas yang dikembangkan oleh masyarakat. Kendala lain terkait sosial budaya masyarakat adalah adanya konflik di masyarakat khususnya antara masyarakat dengan perusahaan sawit. Mayoritas konflik yang terjadi di KSK Agropolitan adalah konflik – konflik terkait mekanisme kerjasama dan proses pembebasan lahan sawit untuk perkebunan sawit. Konflik yang berhubungan dengan perusahaan sawit dan perkebunan sawit kerap kali memicu timbulnya konflik horisontal antar masyarakat.

Ekonomi:

Secara umum, kondisi perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu masih rendah apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya, dimana dalam tipologi kelas masuk dalam klasifikasi daerah tertinggal. Untuk kegiatan pertanian sendiri masih belum berorientasi pasar, masyarakat masih berorientasi pemenuhan kebutuhan lokal (pertanian subsisten). Hal ini dapat menjadi tantangan dalam pengembangan rencana KSK Agropolitan. Kemudian saat ini dominasi kegiatan pertanian secara umum yaitu pada sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit dan karet. Untuk kelapa sawit sendiri didominasi oleh perkebunan besar milik perusahaan, hanya sebagian kecil masyarakat yang mampu membudidayakannya melalui mekanisme sawit plasma maupun sawit mandiri. Kegiatan sawit tersebut juga belum mampu menyejahterakan masyarakat, dimana umumnya masyarakat hanya bekerja sebagai buruh harian di perusahaan besar. Kemudian pada sawit kegiatan masyarakat sendiri juga belum mampu mencapai kualifikasi untuk standarisasi, sehingga pasar sawit masyarakat masih terbatas dan harganya juga rendah. Selain itu, saat ini belum ada nilai tambah dari hasil-hasil pertanian di KSK Agropolitan untuk dapat mengembangkan perekonomian wilayah. Dapat disimpulkan bahwa saat ini belum terdapat suatu sistem yang baik dalam pengembangan kegiatan pertanian.

Kelembagaan:

Untuk mengimplementasikan Konsep Green Agropolitan di Kabupaten Kapuas Hulu membutuhkan seperangkat tata kelola yang komprehensif, mulai dari dasar hukum, perencanaan yang bersifat kewilayahan seperti Rencana Detail Tata Ruang maupun Rencana Aksi, pengorganisasian lembaga, menyusun dan melaksanakan program yang berhubungan dengan Konsep Green Agropolitan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, baik kapasitas masyarakat secara umum, maupun kapasitas aparat pemerintah. Sayangnya, saat ini tidak satu pun persyaratan tersebut yang sudah terpenuhi di Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya di Kawasan Agropolitan. Dasar hukum yang dimiliki masih berupa deliniasi wilayah, sementara bagaimana bentuk, tujuan serta aktor-aktor dan bagaimana masing-masing aktor berperan belum memiliki dasar yang jelas. Pengelolaan kawasan Agropolitan juga membutuhkan koordinasi yang baik sehingga aktor-aktor dan aktivitas yang dilaksanakan oleh para aktor dapat berjalan secara sinergis agar cita-cita dari kawasan agropolitan dapat terwujud. Sayangnya, bentuk koordinasi atau bentuk kelembagaan juga menjadi tantangan sendiri. Ditambah, isu kapasitas sumber daya manusia, baik secara umum, mau pun dalam konteks pemerintahan juga menjadi

permasalahan tersendiri untuk mewujudkan Kawasan Agropolitan yang hijau dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Infrastruktur:

Belum cukupnya ketersediaan infrastruktur dasar merupakan masalah yang perlu menjadi perhatian di kawasan agropolitan ini. Terutama, ketersediaan air bersih, listrik, dan pengelolaan limbah. Kondisi saat ini, tidak seluruh masyarakat dapat mengakses air bersih, dan beberapa rumah tangga bahkan mengkonsumsi air sungai yang kebersihannya dan kelayakannya sudah tidak terjaga lagi. Tingkat elektrifikasi yang masih rendah juga berdampak kepada kegiatan baik kegiatan sehari-hari dan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian, tidak tersedianya pengolahan limbah ternyata berdampak buruk terhadap kelestarian lingkungan, seperti terjadinya pencemaran air sungai. Selain itu, kegiatan ekonomi juga belum didukung dengan infrastruktur yang memadai. Tidak adanya industri pengolahan karet yang mampu membantu masyarakat meningkatkan nilai jual karet dan komoditas lain yang dihasilkan masyarakat dianggap sebagai masalah utama yang dihadapi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sarana pasar juga masih sangat terbatas dan hanya mampu melayani skala yang cukup kecil. Sarana pasar juga belum berperan sebagai sarana penjualan komoditas yang dihasilkan masyarakat. Selain itu, konektivitas internal dan eksternal kawasan agropolitan yang masih rendah, menjadi permasalahan masyarakat untuk mengakses baik pelayanan dasar dan kegiatan ekonomi.

5.3 Isu Strategis Pengembangan KSK Agropolitan

Berdasarkan tinjauan terhadap gambaran umum karakteristik wilayah serta analisis yang telah dilakukan pada berbagai aspek terkait, maka diperoleh isu-isu strategis. Isu-isu strategis tersebut dapat mendukung maupun menghambat perumusan rencana pengembangan kawasan agropolitan. Oleh karena itu, isu-isu strategis tersebut pada akhirnya akan menjadi salah satu pertimbangan dalam merumuskan dokumen rencana. Berikut merupakan pembahasan setiap isu strategis dalam perencanaan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Agropolitan di Kabupaten Kapuas Hulu.

1. Belum memadainya sarana dan prasarana dasar dan penunjang agropolitan untuk mendorong perekonomian masyarakat

Ketersediaan infrastruktur dasar masih menjadi hal yang perlu diperhatikan, tidak hanya dalam pengembangan kawasan agropolitan saja tetapi juga untuk mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat. Secara kuantitas, ketersediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan memang bukan masalah besar tetapi ketersediaan tenaga pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai masih menjadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Hal yang masih memprihatinkan lainnya adalah tidak tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik yang memadai. Kondisi ini tentunya dapat mengancam kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, kondisi elektrifitas merupakan salah satu

tantangan baik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kondisi saat ini, desa yang seluruh rumah tangganya telah terlayani listrik seratus persen hanya mencapai 36% dari total rumah tangga di seluruh desa yang ada. Hal tersebut menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Kemudian, sarana dan prasarana pendukung pengembangan pertanian dan perkebunan seperti industri pengolahan hasil komoditas yang dihasilkan oleh masyarakat dan pusat pemasaran tidak tersedia. Kondisi pasar yang tersedia saat ini masih tersebar tidak merata, bahkan skalanya masih sangat kecil hanya melayani beberapa rumah tangga di sekitar pasar. Tidak tersedianya industri pengolahan menyebabkan hasil perkebunan masyarakat tidak dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Masyarakat langsung menjual hasil pertanian dan perkebunan mereka langsung ke tengkulak untuk dijual di luar kawasan. Walaupun begitu, di beberapa kawasan sudah terdapat irigasi untuk pertanian lahan basah tetapi kondisinya belum optimal. Masih terdapat beberapa irigasi yang tidak dimanfaatkan akibat kerusakan fisik bangunan irigasi. Kemudian, sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi seperti perbankan hanya terkonsentrasi di beberapa titik, yaitu di Perkotaan Nanga Silat dan Perkotaan Semitau, padahal prasarana tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengakses modal.

Kondisi tersebut diperparah dengan kondisi aksesibilitas internal dan eksternal yang masih sangat rendah. Simpul transportasi, yaitu terminal tipe C yang diharapkan mampu menghubungkan kawasan internal dan eksternal pun tidak berfungsi sama sekali hingga saat ini, meskipun secara fisik bangunan terminal tersebut tersedia. Rendahnya aksesibilitas menyebabkan masyarakat sulit untuk menjangkau sarana pendidikan, kesehatan, pasar, baik yang berlokasi di dalam kawasan agropolitan maupun yang di luar kawasan.

Belum memadainya sarana dan prasarana ini disebabkan oleh lemahnya kapasitas fiskal yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Padahal, Kapuas Hulu memiliki wilayah yang luas sehingga pemerintah membutuhkan pembiayaan yang besar untuk memenuhi kebutuhan seluruh wilayah. Selain itu, akibat kapasitas fiskal daerah yang rendah, pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu sangat bergantung pada Dana Transfer Daerah dan bantuan dari Pemerintah Pusat. Di saat yang bersamaan, kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah untuk memenuhi prasyarat pengajuan bantuan dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan di daerah masih memiliki persoalan tersendiri. Dalam beberapa kasus, bantuan dari Pemerintah Pusat terhambat karena Pemerintah Daerah tidak memenuhi ketentuan awal seperti pemenuhan studi awal atau belum memiliki perencanaan untuk menampung bantuan dari Pemerintah Pusat.

2. Aktivitas domestik dan kegiatan ekonomi masih menimbulkan pencemaran lingkungan

Masalah lingkungan paling penting di KSK Agropolitan adalah pencemaran lingkungan akibat aktivitas domestik dan kegiatan ekonomi. Pencemaran

lingkungan terjadi pada air, tanah, dan udara. Pencemaran air seperti larutnya kandungan zat berbahaya atau tingginya sedimentasi air sungai dan danau. Pencemaran tanah seperti larutnya kandungan zat berbahaya di tanah, sehingga menyebabkan produktivitas tanah menurun. Lalu pencemaran udara akibat debu dari jalan tanah sawit yang jika musim kemarau menyebabkan debu atau asap dari pembakaran lahan. Pembakaran lahan juga berdampak pada menurunnya kesuburan lahan pada jangka panjang. Diantara pencemaran - pencemaran tersebut, pencemaran air adalah pencemaran yang paling dominan dan paling berdampak terhadap kehidupan dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Pencemaran ini merupakan akumulasi dari aktivitas ekonomi, baik skala kecil namun berjumlah banyak maupun kegiatan ekonomi skala besar serta aktivitas domestik. Pencemaran dari limbah aktivitas ekonomi skala besar berasal dari kegiatan perkebunan sawit dan pengolahan produk sawit; pencemaran akibat pembukaan lahan oleh perusahaan kayu; PETI (pertambangan emas tanpa izin); penambangan pasir, batu pecah, dan tanah merah; dan pembakaran lahan. Perusahaan perkebunan besar memiliki kewajiban untuk menjalankan usaha tanpa merusak lingkungan karena mereka memiliki sumber daya lebih besar. Namun, perusakan lingkungan masih terjadi akibat lemahnya penegakan hukum dalam pelestarian lingkungan. Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku aktivitas perkebunan atau pertambangan terjadi akibat longgarnya pengawasan dari pihak yang memiliki kewenangan untuk menegakan peraturan-peraturan yang berlaku.

Selain itu, pencemaran lingkungan ini juga diakibatkan oleh kegiatan ekonomi skala kecil yang dilakukan oleh masyarakat karena tidak adanya alternatif sumber penghasilan lain yang ramah lingkungan. Salah satu penyebab penting dari pencemaran tersebut adalah limbah yang tidak diolah terlebih dahulu sebelum dibuang kembali ke tanah, air, dan udara akibat tidak adanya sarana pengolahan limbah. Sedangkan untuk kegiatan domestik pencemaran berasal dari sampah rumah tangga dan limbah MCK (mandi, cuci, dan kakus). Perlu diingat bahwa adanya keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan limbah domestik membentuk kebiasaan-kebiasaan yang tidak ramah lingkungan seperti membuang sampah dan buang air besar di sungai.

3. Kapasitas sumber daya manusia masih rendah dalam menumbuhkan perekonomian namun masyarakat memiliki keinginan belajar yang tinggi

Kapasitas sumber daya manusia masih rendah dari segi pendidikan dan keterampilan. Rata - rata pendidikan masyarakat di KSK Agropolitan adalah lulusan SD. Masyarakat mengetahui pentingnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, akan tetapi keterbatasan ekonomi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingginya angka putus sekolah di wilayah studi. Tingkat pendidikan yang rendah juga mengakibatkan masyarakat hanya dapat menjadi buruh dan tidak dapat terlibat di jenjang yang lebih tinggi dalam perusahaan besar. Dari sisi keterampilan, masyarakat memiliki keterampilan yang terbatas. Keahlian dan keterampilan masyarakat dalam bertani masih belum mampu mendorong kegiatan

pertanian. Selain itu, masyarakat juga belum sadar akan pentingnya agribisnis dan belum mampu melihat peluang pasar atas komoditas yang mungkin dikembangkan.

Secara kelembagaan, keberadaan BPP (Badan Penyuluh Pertanian) dapat menjadi lembaga yang mendorong keahlian dan keterampilan petani dalam membudidayakan pertanian serta meningkatkan kualitas dan produktivitas petani. Namun, keberadaan BPP di KSK Agropolitan belum mampu membuka akses masyarakat terhadap pengetahuan untuk bertani dan melakukan agribisnis. Salah satu faktornya adalah karena masih rendahnya jumlah penyuluh pertanian Lapangan (PPL) serta terbatasnya ilmu yang diberikan oleh PPL sehingga kinerja PPL belum efektif untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan masyarakat. Selain itu, penggunaan metode pelatihan yang tidak disertai dengan pendampingan juga menghambat perkembangan keterampilan masyarakat. Dibutuhkan metode pelatihan dan pendampingan oleh fasilitator yang memberikan contoh dan praktek yang aplikatif dan berjalan secara terus menerus.

4. Rendahnya produktivitas dan nilai tambah produk pertanian

Masyarakat memiliki kearifan lokal terkait prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan dalam skala yang terbatas. Oleh karena itu, masyarakat cenderung subsisten dan bertani hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Hal ini berdampak pada produktivitas hasil pertanian yang rendah dimana masyarakat tidak terbiasa untuk menjual produk hasil pertanian. Masyarakat belum sadar akan peluang pasar sehingga kegiatan pertanian belum menjadi sebuah cara untuk mendapatkan kesuksesan material. Kurangnya akses masyarakat terhadap pasar menjadi salah satu hambatan bagi perkembangan komoditas pertanian. Sebagai contohnya, beberapa komoditas yang dikembangkan masyarakat seperti padi, kelapa, karet, cabai, kangkung, bayam, jambu biji, rambutan, dan ikan mas sebenarnya sudah memiliki tingkat produksi yang baik di tingkat kabupaten akan tetapi masyarakat belum mampu memasarkan komoditas tersebut dikarenakan kurangnya akses terhadap pasar.

Selain itu, masyarakat juga tidak terbiasa dalam mengolah hasil produksi untuk mendapatkan nilai tambah. Saat ini, komoditas unggulan sendiri seperti sawit dan karet belum memiliki nilai tambah, umumnya dijual mentah ataupun dalam bentuk CPO (minyak kelapa sawit). Padahal potensi nilai tambah komoditas tersebut sangat tinggi dan memiliki beragam produk turunan. Sebagai contoh lainnya yaitu komoditas padi juga masih belum optimal pengolahannya. Secara eksisting, untuk komoditas padi sudah ada produk olahan beras lokal (Raja Uncak), namun hasil sampingan dari padi belum dimanfaatkan dengan optimal. Padahal, pengembangan produk dari hasil sampingan dan limbah pengolahan beras sangat prospektif untuk dikembangkan. Salah satunya dari hasil sampingan beras berupa patas dan menir dapat dimanfaatkan untuk produksi beras dan bahan baku pangan. Kemudian dari limbah sekam dapat digunakan sebagai bahan bakar bata, campuran pembuatan bata, genteng, grabah, dan media tumbuh tanaman. Petani juga dapat memperoleh nilai tambah dari jerami yang bisa diolah menjadi pakan ternak. Masih banyak

potensi hasil sampingan dan limbah pascapanen padi yang dapat diolah lebih lanjut. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah komoditas salah satunya disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan keterampilan masyarakat yang belum mampu menciptakan diversifikasi dan inovasi pengolahan produk pertanian. Hal ini menjadi suatu tantangan dalam pengembangan agropolitan.

5. Adanya keterbatasan masyarakat dalam mengembangkan komoditas unggulan alternatif

Karet merupakan komoditas yang telah dibudidayakan masyarakat secara turun menurun dan sesuai dengan karakter masyarakat yang tidak terbiasa melakukan pemeliharaan yang intensif, hanya saat penanaman dan panen. Pada saat ini masyarakat memiliki keterikatan yang cukup tinggi terhadap komoditas karet karena masyarakat telah memahami cara budidaya hingga pemasarannya. Hal ini kemudian berdampak negatif ketika harga karet anjlok dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai dampaknya, masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga masyarakat mencari alternatif pekerjaan lain, contohnya dengan menjadi buruh di perkebunan sawit. Hal ini terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat untuk mengembangkan komoditas-komoditas lain yang berpotensi untuk dipasarkan dan menjadi kegiatan ekonomi alternatif.

Walaupun begitu, masyarakat telah menerapkan sistem *rotational crop* dan telah mencoba membudidayakan berbagai komoditas lain seperti sawit, padi, sayur mayur, lada, ikan arwana, dan sebagainya. Lahan di kawasan agropolitan juga tergolong subur karena selama ini tidak menggunakan bantuan pupuk kimia sehingga berpotensi untuk dikembangkan komoditas alternatif lain. Oleh karena itu, masih terdapat potensi untuk mengembangkan komoditas alternatif unggulan walaupun terdapat kendala-kendala seperti yang telah dibahas di paragraf sebelumnya.

6. Ketidakjelasan mekanisme kerja sama dan pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit

Pada pengembangan perkebunan sawit, secara hukum diizinkan memulai pengembangan asalkan: (i) telah diperoleh persetujuan masyarakat untuk pembebasan lahan, dan (ii) wilayah izin jatuh di luar Kawasan Hutan sehingga dialokasikan untuk pertanian (APL atau KBNK) di mana pejabat setempat memiliki kewenangan untuk memberi izin pengembangan. Satu proses perizinan penting lainnya berjalan paralel dengan yang di atas, dan disyaratkan untuk memperoleh Hak Guna Usaha yang berjangka panjang untuk menguasai perkebunan. Izin ini memberikan penguasaan atas lahan selama 35 tahun dengan opsi memperpanjang selama 25 tahun lagi. Proses ini dapat dimulai di titik manapun setelah Izin Lokasi telah didapatkan tetapi tidak dapat diselesaikan sehingga batas-batas perkebunan telah ditentukan di lapangan oleh pejabat kantor Badan Pertanahan Nasional setempat. Izin Lokasi berlaku selama 3 tahun dengan kemungkinan memperpanjang selama satu tahun. Merupakan tantangan bagi perusahaan untuk melengkapi

perizinannya dalam waktu yang ditentukan, mengingat bahwa di samping mengembangkan beberapa ribu hektar perkebunan mereka juga harus mengadakan konsultasi dengan masyarakat untuk menegosiasikan pembebasan lahan, menerapkan beberapa pengaman lingkungan hidup guna mengurangi dampak negatif pengembangan perkebunan yang teridentifikasi di dalam AMDAL dan penilaian daerah konservasi tinggi bagi anggota RSPO. Nyatanya, implementasi dari prosedur tersebut mengalami banyak masalah.

Dari sistem pengembangan lahan, terutama proses perjanjian pembebasan lahan dari masyarakat ke perusahaan untuk pembagian sawit inti dan plasma, terdapat ketidakjelasan. Dalam implementasi pembagian tersebut, banyak masyarakat yang tidak puas dengan aktualisasi dari perjanjian saat pembebasan lahan. Sebagai contoh, banyak yang merasa bahwa banyak janji dari perusahaan untuk membangun sarana dan prasarana dasar, memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan rutin, serta perjanjian-perjanjian lainnya tidak ditepati. Masyarakat seakan ditipu oleh janji - janji perusahaan pada saat akan membuka lahan. Selain itu, hal tersebut diperparah oleh ketidaktahuan masyarakat akan konsekuensi pembebasan lahan untuk sawit. Walaupun perkebunan sawit memberikan lapangan pekerjaan dan akses jalan bagi masyarakat, sawit memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Menurunnya kualitas air tanah dan permukaan merupakan salah satu dampak dari kegiatan perkebunan sawit. Selain itu, polusi udara dan pencemaran air sungai juga ditimbulkan dari limbah pupuk perkebunan sawit yang tidak diolah. Tidak sedikit pula hama berpindah ke pertanian dan perkebunan masyarakat karena adanya pupuk dan pestisida di perkebunan sawit perusahaan sehingga menimbulkan gagal panen dan menurunkan produktivitas. Dari berbagai contoh diatas dapat dilihat bahwa masyarakat tidak paham dengan konsekuensi dari pembebasan lahan tersebut.

7. Adanya konflik status dan guna lahan

Banyak ditemukan kasus-kasus lahan masyarakat yang tidak sesuai dengan status yang telah ditetapkan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dan arahan kawasan hutan. Contohnya adalah banyak hutan adat yang berstatus lindung (hutan adat lindung dan hutan adat keramat) maupun hutan adat yang berstatus budidaya (Hutan adat produksi dan hutan adat cadangan) yang ditetapkan menjadi Area Penggunaan Lain (APL) oleh SK Kehutanan. Penetapan lahan tersebut menjadi APL menyebabkan banyak lahan yang sebelumnya hutan berubah menjadi kawasan konsesi perkebunan, seperti perkebunan sawit. Hal tersebut telah menimbulkan konflik di masyarakat. Beberapa kali perusahaan sawit didapati melakukan pembangunan dengan menggusur sebagian wilayah tanah adat seperti kuburan atau hutan adat. Padahal daerah – daerah ini dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Dianggap tidak menghargai adat istiadat dan telah menghina roh leluhur, masyarakat adat melayangkan tuntutan ke perusahaan sawit untuk membatalkan pembangunan. Kadangkala konflik ini ada yang dapat diselesaikan secara adat namun, ada pula yang harus menempuh hukum dengan melibatkan kementerian.

Kawasan hutan yang dianggap menjadi hutan cadangan oleh masyarakat juga termasuk kedalam APL sehingga dapat dimanfaatkan oleh kegiatan budidaya lain. Saat ini, beberapa kawasan hutan yang berlokasi di Semitau dan Empanang telah diizinkan untuk dimanfaatkan sebagai perkebunan sawit dalam skala besar. Padahal, hutan tersebut memiliki fungsi konservasi air dan berperan sebagai sumber air bersih. Ditemukan juga lahan gambut yang seharusnya menjadi kawasan lindung namun diarahkan menjadi APL dalam SK Menteri Kehutanan dan kawasan budidaya dalam RTRW Kabupaten Kapuas Hulu.

8. Aktivitas ekonomi menurunkan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan

Bentuk-bentuk aktivitas ekonomi berbasis lahan dan hutan di wilayah KSK secara umum cenderung menurunkan keanekaragaman hayati dan kualitas jasa lingkungan, kecuali aktivitas-aktivitas pertanian lahan basah. Salah satu isu pokok di wilayah ini adalah hilang atau terdegradasinya hutan-hutan rawa gambut yang merupakan ekosistem dominan di wilayah Kapuas Hulu. Pemanfaatan hutan rawa gambut untuk pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan menghadapi kendala yang cukup berat, terutama dalam mengelola dan mempertahankan produktivitas lahan. Keberhasilan pengembangan lahan gambut di suatu wilayah tidak menjadi jaminan bahwa di tempat lain akan berhasil pula. Pemanfaatan lahan yang tidak cermat dan tidak sesuai dengan karakteristiknya dapat merusak keseimbangan ekologis wilayah.

Berdasarkan fakta yang diperoleh dapat diketahui bentuk-bentuk aktivitas ekonomi yang cenderung menurunkan keanekaragaman hayati dan kualitas jasa lingkungan sebagai berikut. Pertama, perkebunan kelapa sawit berdampak pada tingginya fragmentasi terhadap hutan-hutan yang ada di sekitarnya. Hal ini berimplikasi pada berkurangnya atau hilangnya keanekaragaman hayati, baik berupa flora, fauna, habitat maupun ekosistemnya. Kemudian, kebun dan ladang masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan juga memiliki kontribusi terhadap penurunan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan, walaupun dampaknya tidak sebesar perkebunan sawit. Selain itu terdapat Perburuan satwa liar endemic dan dilindungi untuk tujuan komersil. Jenis-jenis flora dan fauna (endemik dan dilindungi) cenderung mengalami keterancaman cukup tinggi. Hal ini ditandai dengan masih adanya aktivitas perburuan satwa liar seperti beruang madu, primata dan berbagai jenis burung. Di samping itu juga masih banyak terjadi praktik penebangan liar yang berakibat pada menurunnya keragaman pohon-pohon komersial di dalam hutan yang umumnya merupakan hutan lindung. Ditambah lagi dengan masih terdapat praktik penambangan liar emas dan galian c, dimana banyak ditemukan di wilayah selatan khususnya di Kecamatan Silat Hilir. Dari seluruh uraian tersebut, secara umum diketahui bahwa di wilayah KSK Agropolitan cenderung mengalami penurunan jenis-jenis flora dan fauna endemic dan langka atau dilindungi sebagai akibat dari aktivitas-aktivitas ekonomi.

Selain dampak terhadap biodiversitas, dampak penurunan kualitas juga terjadi pada jasa lingkungan, seperti kuantitas dan kualitas air ditandai dengan kurangnya air

bersih atau bahkan kekeringan, dukungan aliran air untuk pertanian terutama di wilayah utara KSK sebagai imbas dari konversi hutan ke perkebunan sawit. Di wilayah lainnya terjadi penurunan kualitas air akibat penambangan liar di bagian hulu berupa pencemaran sungai yang mengakibatkan air tidak layak konsumsi dan meracuni tanaman pertanian. Jasa lingkungan lainnya yang turut terkena dampak adalah mulai berkurangnya produksi madu. Hal ini diduga kuat karena pohon-pohon madu dan tumbuhan berbunga sebagai sumber pakan lebah sudah jarang berbunga akibat berkurangnya serangga-serangga penyerbuk (pollinator). Keseluruhan permasalahan tersebut pada akhirnya berdampak pula terhadap produktivitas lahan dan produksi pertanian sebagai akibat menurunnya kualitas lingkungan. Hal ini dialami pula dengan produksi buah-buahan yang berasal dari hutan setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini. (2015). *Syair Melayu Identitas Peradaban Melayu Islam di Kalimantan Barat*. Retrieved July 12, 2017, from <http://www.kalbariana.web.id/syair-melayu-identitas-peradaban-melayu-islam-di-kalimantan-barat/>
- Alcorn, J. B., Royo, A. G., & others. (2000). *Indigenous social movements and ecological resilience: lessons from the Dayak of Indonesia*. Washington DC: BSP Publication.
- Anwar, C. (2006). *Perkembangan Pasar dan Prospek Agribisnis Karet di Indonesia*. Pusat Penelitian Karet.
- Apriansyah. (2016). Masih Perlukah Program Transmigrasi Dilakukan?. Retrieved July 13, 2017, from <http://www.pontianakpost.co.id/masih-perlukah-program-transmigrasi-dilakukan-0>
- Arkanudin. (2012). *Sistem Perladangan dan Kearifan Tradisional Orang Dayak Dalam Mengelola Sumber Daya Hutan*. Retrieved July 5, 2017, from http://prof-arkan.blogspot.com/2012/04/sistem-perladangan-dan-kearifan_25.html
- Asmadi, S.pd. (2017). *Muatan Lokal*. GUEPEDIA.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. (2005). *Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2005*. Kapuas Hulu: BPS Kabupaten Kapuas Hulu.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. (2006). *Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2006*. Kapuas Hulu: BPS Kabupaten Kapuas Hulu.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. (2007). *Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2007*. Kapuas Hulu: BPS Kabupaten Kapuas Hulu.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. (2008). *Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2008*. Kapuas Hulu: BPS Kabupaten Kapuas Hulu.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. (2009). *Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2009*. Kapuas Hulu: BPS Kabupaten Kapuas Hulu.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. (2010). *Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2010*. Kapuas Hulu: BPS Kabupaten Kapuas Hulu.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. (2011). *Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2011*. Kapuas Hulu: BPS Kabupaten Kapuas Hulu.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. (2012). *Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2012*. Kapuas Hulu: BPS Kabupaten Kapuas Hulu.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. (2013). *Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2013*. Kapuas Hulu: BPS Kabupaten Kapuas Hulu.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. (2014). *Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2014*. Kapuas Hulu: BPS Kabupaten Kapuas Hulu.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. (2015). *Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2015*. Kapuas Hulu: BPS Kabupaten Kapuas Hulu.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. (2016). *Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2016*. Kapuas Hulu: BPS Kabupaten Kapuas Hulu.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. (2016). *Kecamatan Empanang Dalam Angka 2016*. Kapuas Hulu: BPS Kabupaten Kapuas Hulu.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. (2016). *Kecamatan Hulu Gurung Dalam Angka 2016*. Kapuas Hulu: BPS Kabupaten Kapuas Hulu.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. (2016). *Kecamatan Seberuang Dalam Angka 2016*. Kapuas Hulu: BPS Kabupaten Kapuas Hulu.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. (2016). *Kecamatan Semitau Dalam Angka 2016*. Kapuas Hulu: BPS Kabupaten Kapuas Hulu.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. (2016). *Kecamatan Silat Hilir Dalam Angka 2016*. Kapuas Hulu: BPS Kabupaten Kapuas Hulu.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. (2016). *Kecamatan Silat Hulu Dalam Angka 2016*. Kapuas Hulu: BPS Kabupaten Kapuas Hulu.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. (2016). *Kecamatan Pengkadan Dalam Angka 2016*. Kapuas Hulu: BPS Kabupaten Kapuas Hulu.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2016). *Statistik Perdagangan Luar Negeri Kalimantan Barat 2016*. Kalimantan Barat: BPS Provinsi Kalimantan Barat.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2016). *Kalimantan Barat Dalam Angka 2015*. Kalimantan Barat: BPS Provinsi Kalimantan Barat.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2016). *Kalimantan Barat Dalam Angka 2016*. Kalimantan Barat: BPS Provinsi Kalimantan Barat.
- Bamba, John. (2014). *Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Budaya Dayak dan Tantangan yang Dihadapi*. Dalam buku Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat, Atok, Kristianus., Florus, Paulus., Tamen, Agus. (Ed). PPSDAK Pancur Kasih.
- Brinkerhoff, D. B., & all, e. (2011). *Essential of Sociology*. Belmont: Cengage Learning.
- _____. (2012). *Buku Adat Kecamatan Pengkadan*. Kapuas Hulu: Tim Adat Kecamatan Pengkadan
- Carino, J. (2009). *CHAPTER I POVERTY AND WELL-BEING*. In *State of the World's Indigenous Peoples*. Vienna: UN Permanent Forum on Indigenous. New York: United Nations.
- de Jong, W. (1995). *Recreating the forest: successful examples of ethnoconservation among Dayak groups in central West Kalimantan*. In: Sandbukt, O.. *Management of tropical forests: towards an integrated perspective*. :295-304.
- Dove, M. R. (1985). *The Kantu system of land tenure: the evolution of tribal land rights in Borneo*. *Studies in Third World Societies*, 33, 159–182.

- Fachrizal, A. (2014). *Kotak Pandora di Konsesi Sinar Mas Grup Kalbar* – Mongabay.co.id. Retrieved July 12, 2017, from <http://www.mongabay.co.id/2014/11/27/kotak-pandora-di-konsesi-sinar-mas-grup-kalbar/>
- H, D. oleh V., & ayani. (2016). "PENGGOLOONGAN MASYARAKAT." Retrieved July 6, 2017, from <http://rupailmu.blogspot.com/2016/06/penggolongan-masyarakat.html>
- Hamjen, W. (2015). *Dari Community: Mengenal 7 Rumpun Suku Dayak di Pulau Kalimantan*. Retrieved July 6, 2017, from <http://www.hipwee.com/list/mengenal-7-rumpun-suku-dayak-di-pulau-kalimantan/>
- Hartoyo, A. (2012). *Eksplorasi Etnomatematika pada Budaya Masyarakat Dayak Perbatasan Indonesia-Malaysia Kabupaten Sanggau Kalbar*. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 13(1), 14–23.
- _____. (2013). *Hukum Adat Suku Daya' Suaid*. Jeranjang
- Israniar, D. oleh W. (2016). *Makalah Kebudayaan Melayu Kapuas Hulu*. Retrieved July 12, 2017, from <http://belajarawalbuatblokwahyuISRANIAR.blogspot.com/>
- Jackson, M. (1996). *Things as They are: New Directions in Phenomenological Anthropology*. Georgetown University Press.
- Julia, & White, B. (2012). *Gendered experiences of dispossession: oil palm expansion in a Dayak Hibun community in West Kalimantan*. *The Journal of Peasant Studies*, 39(3–4), 995–1016.
- _____. (2000). *Ketentuan Hukum Adat dan Budaya Suku Dayak Kantu'*. Bika: Ketemengungan Suku Kantu'.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2015). *Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2015*. Pusat Data, Statistik dan Informasi: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kementerian Keuangan. (2012). *Laporan Kajian Nilai Tambah Produk Pertanian*. Badan Kebijakan Fiskal Pusat Kebijakan Ekonomi Makro: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Pertanian. (2016). *Statistik Makro Sektor Pertanian 2016*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian: Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- Kementerian Pertanian. (2016). *Statistik Pertanian 2016*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian: Kementerian Pertanian.
- Kementerian Pertanian. (2016). *Statistik Produksi Holtikultura Tahun 2014*. Direktorat Jenderal Holtikultura: Kementerian Pertanian.
- Perwitasari, H & Sari, P.N. (2013). *Analisis Input-Output Komoditas Kelapa Sawit di Indonesia*. *Mediagro*, 9(1): 11-21.
- PIL-NET. (2015). *MA, Masyarakat Adat dan Takluknya Sinar Mas di Depan Hukum*. Retrieved July 12, 2017, from <http://pilnet.or.id/berita/ma-masyarakat-adat-dan-takluknya-sinar-mas-di-depan-hukum-1444139566>
- Malian, A.H. (2004). *Kebijakan Perdagangan Internasional Komoditas Pertanian Indonesia*. *AKP*, 2(2): 135-136.

- Mananta, R. (2016). *Sekilas Suku Melayu Di Kalimantan Barat*. Retrieved July 6, 2017, from <http://www.misterpangalayo.com/2016/01/sekilas-suku-melayu-di-kalimantan-barat.html>
- Mikael. (2008). *Konflik Masyarakat Adat Dusun Perjuk, Pelanjau, Nanga Pengga, Merambang, Pengga Putih dan Gedabang dengan PT Rekananan Bina Bersama (PT KRBB) di Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat*. Retrieved July 12, 2017, from <http://aman-wilayahkalbar.blogspot.com/2008/03/konflik-masyarakat-adat-dusun-perjuk.html>
- Mulyoutami, E., Rismawan, R., & Joshi, L. (2009). *Local knowledge and management of simpukng (forest gardens) among the Dayak people in East Kalimantan, Indonesia*. *Forest Ecology and Management*, 257(10), 2054–2061.
- muzzafar, D. oleh rasheed. (n.d.). *SUKU DAYAK KANTUK*. Retrieved July 6, 2017, from <http://dayakofborneo.blogspot.com/2013/06/suku-dayak-kantuk.html>
- Painu, C. (2014). *Inilah Kisah Said Tolao, Sang Tondo Ngata, Penjaga Hutan Adat Toro – Mongabay.co.id*. Retrieved July 12, 2017, from <http://www.mongabay.co.id/2014/10/07/inilah-kisah-said-tolao-sang-tondo-ngata-penjaga-hutan-adat-toro/>
- Potter, L., & others. (2008). *Dayak resistance to oil palm plantations in West Kalimantan, Indonesia*. In 17th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia [Internet] (pp. 1–3).
- PT SMART Tbk dan TFT Indonesia. (2016). *Rancangan Rencana Tata Ruang Desa Kesepakatan (RTRDK) Sub Perencanaan Pelestarian Sumber Daya Alam Penting Secara Partisipatif*. Kapuas Hulu: TFT Indonesia-PT,SMART Tbk.
- Putra, A. (2016a). *Sejarah Suku Dayak Kantuk*. Retrieved July 5, 2017, from <http://suku-dunia.blogspot.com/2016/07/sejarah-suku-dayak-kantuk.html>
- Putra, A. (2014b). *Sejarah Suku Iban Di Kalimantan*. Retrieved July 5, 2017, from <http://suku-dunia.blogspot.com/2014/10/sejarah-suku-iban-di-kalimantan.html>
- Putra, A. (2014c). *Sejarah Suku Kantu Di Kalimantan Barat*. Retrieved July 5, 2017, from <http://suku-dunia.blogspot.com/2014/09/sejarah-suku-kantu-di-kalimantan-barat.html>
- Putra, A. (2016d). *Sejarah Suku Suhaid*. Retrieved July 5, 2017, from <http://suku-dunia.blogspot.com/2016/05/sejarah-suku-suhaid.html>
- Republik Indonesia. (2003). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*.
- Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial dan Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang*.

